



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2025-2029

Sumedang Simpati
Semakin Maju
Menuju
Indonesia Emas 2045

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2025



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilaksanakan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah;
- b. bahwa rencana pembangunan jangka menengah daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah nasional;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, rencana pembangunan jangka menengah daerah ditetapkan dengan peraturan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Undang-Undang Nomor 105 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 291, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7042);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 51);

Dengan ...

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
dan
BUPATI SUMEDANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Bupati adalah Bupati Sumedang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah dengan berpedoman pada rencana jangka panjang Daerah dan rencana pembangunan jangka menengah nasional terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
7. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan Pembangunan Daerah.
8. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
9. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
10. Program Prioritas adalah program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD yang diperoleh dengan teknik penurunan kinerja.

11. Kinerja adalah capaian hasil kerja.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

RPJMD berkedudukan sebagai:

- a. pedoman Pembangunan Daerah selama 5 (lima) tahun;
- b. pedoman dalam penyusunan rencana kerja Pemerintah Daerah dan rencana strategis Perangkat Daerah; dan
- c. instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 3

- (1) Sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Gambaran umum Daerah;
 - c. BAB III : Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah;
 - d. BAB IV : Program Perangkat Daerah dan Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - e. BAB V : Penutup.
- (2) Ketentuan mengenai uraian sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (2) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 19 Agustus 2025



BUPATI SUMEDANG,

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 19 Agustus 2025



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

TUTI RUSWATI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2025 NOMOR 8

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG,
PROVINSI JAWA BARAT : (8/114/2025)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Pembangunan Daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilaksanakan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Daerah sesuai kewenangannya yang telah dibagi berdasarkan urusan pemerintahan konkuren diwajibkan menyusun perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun secara berjenjang meliputi rencana pembangunan jangka panjang Daerah, RPJMD dan rencana kerja Pemerintah Daerah.

Dokumen RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, Pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang Daerah dan rencana pembangunan jangka menengah nasional. Penyusunan RPJMD dilakukan untuk menjamin kesinambungan Pembangunan Daerah terutama dalam rangka meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, terlebih menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik pada aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik, maupun pemberdayaan masyarakat.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 60

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

DAFTAR TABEL v

DAFTAR GAMBAR viii

DAFTAR GRAFIK x

BAB I PENDAHULUAN I-1

1.1. Latar Belakang I-1

1.2. Dasar Hukum Penyusunan..... I-4

1.3. Hubungan Antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Lainnya I-11

1.3.1. Hubungan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029
dengan RPJMN Tahun 2025-2029 I-12

1.3.2. Hubungan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029
dengan RPJPD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2045..... I-12

1.3.3. Hubungan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029
dengan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 I-13

1.3.4. Hubungan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029
dengan RTRW Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038..... I-13

1.3.5. Hubungan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029
dengan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029..... I-14

1.3.6. Hubungan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029
dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) I-14

1.3.7. Hubungan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029
dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029..... I-14

1.4. Maksud dan Tujuan I-15

1.5. Sistematika Penulisan I-16

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH..... II-1

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah II-1

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi II-2

2.1.1.1. Aspek Geografi..... II-2

2.1.1.1.1. Posisi Strategis Kabupaten Sumedang..... II-5

2.1.1.1.2. Potensi Sumber Daya Alam II-6

2.1.1.1.3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup ... II-20

2.1.1.1.4. Perubahan Iklim dan Ketahanan Bencana..... II-27

2.1.1.2. Aspek Demografi..... II-34

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-38

2.1.2.1. Kesejahteraan Ekonomi II-38

2.1.2.1.1. Analisis Sektor Unggulan Daerah II-53

2.1.2.2. Kesehatan Untuk Semua II-62

2.1.2.3.	Kemiskinan	II-67
2.1.2.4.	Pendidikan yang berkualitas dan Merata	II-70
2.1.2.5.	Perlindungan Sosial yang Adaptif	II-73
2.1.2.6.	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	II-74
2.1.2.7.	Keluarga berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif	II-110
2.1.3.	Aspek Daya Saing Daerah.....	II-112
2.1.3.1.	Daya Saing Sumber Daya Manusia.....	II-113
2.1.3.2.	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi.....	II-115
2.1.3.3.	Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru.....	II-124
2.1.3.4.	Transformasi Digital	II-125
2.1.3.5.	Integrasi Ekonomi, Domestik dan Global	II-127
2.1.3.6.	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi.....	II-129
2.1.3.7.	Stabilitas Ekonomi Makro.....	II-131
2.1.4.	Aspek Pelayanan Umum	II-133
2.1.4.1.	Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif....	II-133
2.1.4.2.	Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial	II-140
2.1.4.3.	Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Budaya Gentrifikasi Kawasan.....	II-142
2.1.4.4.	Kinerja setiap urusan pemerintahan daerah	II-144
2.1.5.	Standar Pelayanan Minimal	II-159
2.1.5.1.	Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	II-160
2.1.5.2.	Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	II-162
2.1.5.3.	Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	II-168
2.1.5.4.	Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan dan Permukiman	II-169
2.1.5.5.	Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketertarikan, Ketertarikan Umum, dan Perlindungan Masyarakat	II-171
2.1.5.6.	Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial	II-174
2.1.6.	Kerjasama Daerah	II-176
2.1.7.	Rencana Pembangunan Infrastruktur oleh APBD dan/atau APBD.....	II-177
2.1.8.	BUMD yang Mendukung Kinerja Pelayanan Pemda	II-177
2.2.	Gambaran Keuangan Daerah.....	II-179
2.2.1.	Realisasi Data APBD Tahun 2020-2024	II-185
2.2.2.	Proyeksi Keuangan Daerah Tahun 2026-2030	II-192
2.3.	Permasalahan dan Isu Strategis.....	II-197
2.3.1.	Permasalahan Pembangunan Daerah	II-197
2.3.1.1.	Aspek Geografi.....	II-197

2.3.1.2.	Aspek Demografi.....	II-199
2.3.1.3.	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-200
2.3.1.3.1.	Kesejahteraan Ekonomi.....	II-200
2.3.1.4.	Aspek Daya Saing.....	II-202
2.3.1.4.1.	Daya Saing Ekonomi Daerah	II-202
2.3.1.4.2.	Daya Saing Sumber Daya Manusia.....	II-203
2.3.1.4.3.	Daya Saing Infrastruktur Wilayah	II-203
2.3.1.4.4.	Daya Saing Iklim Investasi.....	II-206
2.3.1.5.	Aspek Pelayanan Umum	II-208
2.3.1.5.1.	Reformasi Birokrasi	II-208
2.3.1.5.2.	Pelayanan Publik.....	II-209
2.3.1.5.3.	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	II-209
2.3.1.5.4.	Inovasi Daerah	II-210
2.3.1.6.	Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.....	II-219
2.3.2.	Isu Strategis Daerah	II-244
2.3.2.1.	Isu Sesuai Konteks	II-244
2.3.2.1.1.	Isu Global.....	II-244
2.3.2.1.2.	Isu Nasional	II-247
2.3.2.1.3.	Isu Regional Jawa Bali.....	II-250
2.3.2.1.4.	Isu Berdasarkan West Java Development Forum (WJDF)	II-251
2.3.2.1.5.	Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan	II-256
2.3.2.2.	Isu Strategis Provinsi Jawa Barat	II-257
2.3.2.2.1.	Isu Green and Blue Economy Serta Pembangunan Inklusif.....	II-257
2.3.2.2.2.	Isu Kualitas Dan Daya Saing Sumber Daya Manusia... II-259	
2.3.2.2.3.	Isu Kesenjangan Pembangunan Dan Infrastruktur Pelayanan Dasar.....	II-261
2.3.2.2.4.	Isu Keberlanjutan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	II-263
2.3.2.2.5.	Isu Keberlanjutan Penataan Ruang	II-265
2.3.2.2.6.	Isu Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	II-267
2.3.2.3.	Isu Strategis Kabupaten Sumedang	II-269
2.3.2.3.1.	Sumber Daya Manusia (SDM) dan Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	II-276
2.3.2.3.2.	Tata Kelola Pemerintahan dan Profesionalitas Aparatur.....	II-279
2.3.2.3.3.	Infrastruktur dan Prasarana Pengembangan Wilayah .. II-280	
2.3.2.3.4.	Pembangunan Ekonomi Yang Berkelanjutan dan Inklusif.....	II-283
2.3.2.3.5.	Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial.....	II-286

BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN

DAERAH..... III-1

3.1. Visi, Misi, Tujuan dan Program Prioritas.....	III-1
3.1.1. Visi dan Misi.....	III-1
3.1.1.1. Visi.....	III-1
3.1.1.2. Misi	III-4
3.1.1.3. Keselarasan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 dengan Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2045	III-5
3.1.1.4. Keselarasan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025 - 2029 dengan Visi dan Misi RPJMN Tahun 2025 - 2029 (Astacita)	III-7
3.1.1.5. Keselarasan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 dengan Visi dan Misi RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029	III-16
3.2. Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029	III-20
3.2.1. Perumusan Tujuan dan Sasaran	III-20
3.2.1.1. Langkah Perumusan Tujuan dan Sasaran Pembangunan...	III-20
3.2.1.2. Pendekatan Perumusan Tujuan dan Sasaran Pembangunan	III-23
3.3. Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	III-30
3.3.1. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah.....	III-32
3.3.1.1. Strategi Pembangunan	III-32
3.3.1.2. Arah Kebijakan Pembangunan.....	III-34
3.3.2. Arah Kebijakan Kewilayahan	III-56
3.3.3. Program Prioritas Daerah	III-60
3.3.4. Dukungan Program Daerah terhadap Program Prioritas Nasional	III-91
3.3.5. Dukungan Program Daerah terhadap Astacita	III-94
3.3.6. Komitmen Daerah dalam Pelaksanaan Program Mendukung SPM.....	III-98

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA

PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH..... IV-1

4.1.	Program Perangkat Daerah	IV-1
4.2.	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	IV-65

BAB V PENUTUP V-1

5.1. Kaidah Pelaksanaan	V-1
5.2. Pengendalian dan Evaluasi	V-2

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Luas Wilayah Kecamatan, Jumlah Desa dan Kelurahan di Kabupaten Sumedang II-2

Tabel 2.2 Sebaran Potensi Wisata Alam di Kabupaten Sumedang II-7

Tabel 2.3 Perkembangan Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Domestik di Kabupaten Sumedang Tahun 2020-2024..... II-8

Tabel 2.4 Kawasan Konservasi di Kabupaten Sumedang II-10

Tabel 2.5 Rincian Produksi Komoditas Perkebunan di Kabupaten Sumedang Tahun 2024 (Ton) II-14

Tabel 2.6 Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Sumedang Tahun 2023 II-15

Tabel 2.7 Klasifikasi Jasa Lingkungan II-21

Tabel 2.8 Luas Jasa Lingkungan Hidup pada masing-masing klasifikasi dalam Hektar (Ha) II-23

Tabel 2.9 Akumulasi ketersediaan, kebutuhan, selisih ketersediaan, ambang batas penduduk, dan status DDLH penyedia pangan disetiap Kecamatan di Kabupaten Sumedang tahun 2021 II-25

Tabel 2.10 Akumulasi ketersediaan, kebutuhan, selisih ketersediaan, ambang batas penduduk, dan status DDLH penyedia air di setiap kecamatan di Kabupaten Sumedang tahun 2021..... II-27

Tabel 2.11 Kawasan Rawan Bencana II-28

Tabel 2.12 Wilayah yang Rentan Per Kecamatan pada Kabupaten Sumedang II-30

Tabel 2.13 Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, Kepadatan dan Pertumbuhan Penduduk serta Luas Wilayah Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Sumedang Tahun 2024 II-34

Tabel 2.14 Hubungan Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Sumedang..... II-52

Tabel 2.15 Analisa LQ Kabupaten Sumedang Tahun 2022-2024..... II-54

Tabel 2.16 Analisis DLQ Kabupaten Sumedang Tahun 2021-2024..... II-56

Tabel 2.17 Kuadran Analisis LQ DLQ Sumedang II-57

Tabel 2.18 Analisis Shift-share Kabupaten Sumedang II-58

Tabel 2.19 Analisis Klassen Typology Kabupaten Sumedang..... II-60

Tabel 2.20 Kuadran Analisis Klassen Typology Sumedang II-61

Tabel 2.21 Overlay Analisis Sektor Unggulan di Sumedang..... II-62

Tabel 2.22 Indikator Kesehatan di Kabupaten Sumedang Tahun 2020-2024 II-64

Tabel 2.23 Capaian Persentase Siswa dengan Kompetensi Literasi dan Numerasi yang Memenuhi Kompetensi Minimum Tahun 2020-2024 II-73

Tabel 2.24 Lembaga Adat Desa di Kabupaten Sumedang II-75

Tabel 2.25 Data Cagar Budaya Kabupaten Sumedang II-90

Tabel 2.26 Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Sumedang Tahun 2022-2024..... II-113

Tabel 2.27 Distribusi Kategori IMDI II-127

Tabel 2.28 Indikator Stabilitas Ekonomi Makro..... II-132

Tabel 2.29 Capaian Indikator Reformasi Birokrasi Pemda Kabupaten Sumedang Tahun 2022-2024..... II-135

Tabel 2.30 Hasil Penilaian Kepatuhan atas Penerapan Standar Pelayanan Publik..... II-136

Tabel 2.31 Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Sumedang..... II-137

Tabel 2.32 Nilai Domain dan Sub Domain SPBE Kabupaten Sumedang Tahun 2024 II-138

Tabel 2.33 Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Tahun 2022-2024..... II-144

Tabel 2.34 IKK Urusan Pendidikan Kabupaten Sumedang Tahun 2020 – 2024 . II-144

Tabel 2.35 IKK Urusan Kesehatan Kabupaten Sumedang Tahun 2020 – 2024 .. II-145

Tabel 2.36 IKK Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang Tahun 2020 – 2024 II-146

Tabel 2.37	IKK Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumedang Tahun 2020 – 2024	II-147
Tabel 2.38	IKK Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sumedang Tahun 2020 – 2024	II-148
Tabel 2.39	IKK Urusan Sosial Kabupaten Sumedang Tahun 2020 – 2024	II-149
Tabel 2.40	IKK Urusan Tenaga Kerja Kabupaten Sumedang Tahun 2020 – 2024	II-149
Tabel 2.41	IKK Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang Tahun 2020 – 2024	II-150
Tabel 2.42	IKK Urusan Pangan Kabupaten Sumedang Tahun 2020 – 2024.....	II-150
Tabel 2.43	IKK Urusan Pertanahan Kabupaten Sumedang Tahun 2020 – 2024	II-150
Tabel 2.44	IKK Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumedang Tahun 2020 – 2024	II-151
Tabel 2.45	IKK Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang Tahun 2020 – 2024	II-152
Tabel 2.46	IKK Urusan Pemerintahan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang Tahun 2020 – 2024	II-152
Tabel 2.47	IKK Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumedang Tahun 2020 – 2024	II-152
Tabel 2.48	IKK Urusan Perhubungan Kabupaten Sumedang Tahun 2020 – 2024	II-153
Tabel 2.49	IKK Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumedang Tahun 2020 – 2024	II-153
Tabel 2.50	IKK Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 – 2024	II-154
Tabel 2.51	IKK Urusan Penanaman Modal Kabupaten Sumedang Tahun 2020 – 2024	II-154
Tabel 2.52	IKK Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang Tahun 2020 – 2024	II-154
Tabel 2.53	IKK Urusan Statistik Kabupaten Sumedang Tahun 2020 – 2024	II-155
Tabel 2.54	IKK Urusan Persandian Kabupaten Sumedang Tahun 2020 – 2024 ..	II-155
Tabel 2.55	IKK Urusan Kebudayaan Kabupaten Sumedang Tahun 2020 – 2024 ..	II-155
Tabel 2.56	IKK Urusan Perpustakaan Kabupaten Sumedang Tahun 2020 – 2024	II-155
Tabel 2.57	IKK Urusan Kearsipan Kabupaten Sumedang Tahun 2020 – 2024....	II-156
Tabel 2.58	IKK Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumedang Tahun 2020 – 2024	II-156
Tabel 2.59	IKK Urusan Pariwisata Kabupaten Sumedang Tahun 2020 – 2024 ...	II-157
Tabel 2.60	IKK Urusan Pertanian Kabupaten Sumedang Tahun 2020 – 2024	II-157
Tabel 2.61	IKK Urusan Kehutanan Kabupaten Sumedang Tahun 2020 – 2024 ..	II-158
Tabel 2.62	IKK Urusan Perdagangan Kabupaten Sumedang Tahun 2020 – 2024 ..	II-158
Tabel 2.63	IKK Urusan Perindustrian Kabupaten Sumedang Tahun 2020 – 2024	II-158
Tabel 2.64	IKK Urusan Transmigrasi Kabupaten Sumedang Tahun 2020 – 2024 ..	II-159
Tabel 2.65	Capaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2024	II-161
Tabel 2.66	Capaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2024	II-166
Tabel 2.67	Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2024.....	II-168
Tabel 2.68	Capaian SPM Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2024	II-170
Tabel 2.69	Capaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2024	II-173
Tabel 2.70	Capaian SPM Bidang Sosial Tahun 2024	II-175
Tabel 2.71	Kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Periode 2020-2024.....	II-177
Tabel 2.72	Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Sumedang Berdasarkan Jenis Usaha.....	II-178

Tabel 2.73	Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020-2024.....	II-185
Tabel 2.74	Neraca Daerah Tahun 2020-2024.....	II-188
Tabel 2.75	Proyeksi Kerangka Pendanaan Tahun 2026-2030.....	II-195
Tabel 2.76	Kerangka Permasalahan Pembangunan Kabupaten Sumedang.....	II-212
Tabel 2.77	Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas.....	II-220
Tabel 2.78	Penentuan Isu Strategis Daerah	II-271
Tabel 3.1	Keselaran Misi RPJPD Kabupaten Sumedang 2025-2045 dengan Misi RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2045.....	III-6
Tabel 3.2	Sasaran Visi dan Target Kinerja Sasaran Visi Tahun 2025-2029	III-22
Tabel 3.3	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.....	III-26
Tabel 3.4	Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2025-2029.....	III-35
Tabel 3.5	Pentahapan Pembangunan Tahun 2025-2029	III-55
Tabel 3.6	Arah Pembangunan Nasional Tahun 2025-2029.....	III-58
Tabel 3.7	Teknik Merumuskan Program Prioritas Daerah RPJMD Tahun 2025-2029.....	III-66
Tabel 3.8	Lokasi Prioritas Pembangunan.....	III-90
Tabel 3.9	Dukungan Program Daerah terhadap Astacita.....	III-94
Tabel 3.10	Dukungan Program Daerah terhadap Standar Pelayanan Minimal.....	III-99
Tabel 4.1	Program Perangkat Daerah	IV-3
Tabel 4.2	Capaian Realisasi Indikator Makro 2024 dan Target Indikator Makro Tahun 2025-2029.....	IV-66
Tabel 4.3	Indikator Kinerja Utama	IV-67
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Daerah	IV-69
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	IV-98

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya..... I-11

Gambar 1.2 Tahapan Pembangunan RPJPD Kabupaten Sumedang Tahun 2025–2045 I-12

Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Sumedang II-1

Gambar 2.2 Peta Kemiringan Lahan di Kabupaten Sumedang..... II-3

Gambar 2.3 Peta Hidrologi Kabupaten Sumedang II-4

Gambar 2.4 Posisi Strategis Kabupaten Sumedang II-5

Gambar 2.5 Peta persebaran kawasan hutan konservasi dan hutan lindung di Kabupaten Sumedang dan sekitarnya tahun 2023 II-12

Gambar 2.6 Lokasi Geothermal (Panas Bumi) Gunung Tampomas Kabupaten Sumedang II-19

Gambar 2.7 Status DDLH penyedia pangan di Kabupaten Sumedang Tahun 2021 dalam sistem grid 5”x5” II-24

Gambar 2.8 Status DDLH penyedia air terhadap ambang batas tahun 2021 di Provinsi Jawa Barat dalam sistem grid 30”x30” II-26

Gambar 2.9 Peta Rawan Bencana Kabupaten Sumedang II-30

Gambar 2.10 Peta Wilayah Kerentanan Bencana Banjir di Kabupaten Sumedang II-31

Gambar 2.11 Peta Wilayah Kerentanan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Sumedang..... II-32

Gambar 2.12 Peta Wilayah Kerentanan Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Sumedang II-33

Gambar 2.13 Peta Wilayah Kerentanan Bencana Kekeringan di II-33

Gambar 2.14 Peta Wilayah Kerentanan Bencana Cuaca Ekstrem di Kabupaten Sumedang II-34

Gambar 2.15 Komparasi Tingkat Kemiskinan dan Pertumbuhan Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 II-48

Gambar 2.16 Sebaran Kampung Budaya di Jawa Barat II-75

Gambar 2.17 Kesenian Tradisional Karinding II-76

Gambar 2.18 Kesenian Tradisional Ketuk Tilu II-77

Gambar 2.19 Kesenian Tradisional Pencak Silat II-78

Gambar 2.20 Kesenian Tradisional Reak..... II-78

Gambar 2.21 Kesenian Tradisional Tutunggulan II-79

Gambar 2.22 Kesenian Tradisional Tari Jayengrana Kasumedangan II-80

Gambar 2.23 Kesenian Tradisional Tari Jakasona dan Topeng Klana Kasumedangan..... II-80

Gambar 2.24 Kesenian Tradisional Tari Topeng Klana Kasumedangan II-81

Gambar 2.25 Kesenian Tradisional Tari Jaipongan II-81

Gambar 2.26 Kesenian Tradisional Kuda Renggong II-82

Gambar 2.27 Kesenian Tradisional Songah..... II-83

Gambar 2.28 Kesenian Tradisional Wayang Golek II-83

Gambar 2.29 Kesenian Tradisional Rengkong II-84

Gambar 2.30 Kesenian Tradisional Tayuban dan Ibing Keurseus II-84

Gambar 2.31 Kesenian Tradisional Angklung Jenghung II-85

Gambar 2.32 Kesenian Tradisional Beluk Cirangkong..... II-86

Gambar 2.33 Kesenian Tradisional Bangreng (Terebang dan Ronggeng) II-86

Gambar 2.34 Kesenian Tradisional Umbul II-87

Gambar 2.35 Kesenian Tradisional Calung II-88

Gambar 2.36 Kesenian Tradisional Goong Renteng/Koromong II-88

Gambar 2.37 Kesenian Tradisional Ajeng Kasumedangan II-89

Gambar 2.38 IKG Kab/Kota Jabar Tahun 2024 II-112

Gambar 2.39 Nilai Indeks komposit IDM Kabupaten Sumedang Tahun 2022-2024..... II-130

Gambar 2.40 Nilai Indeks SPBE, Domain dan Aspek..... II-139

Gambar 2.41	Konteks Isu Global yang Dihadapi Provinsi Jawa Barat Dalam "Megatrend Jawa Barat 2045".....	II-244
Gambar 2.42	Isu Strategis Terkait Green and Blue Economy serta Pembangunan Inklusif.....	II-258
Gambar 2.43	Isu Terkait Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	II-259
Gambar 2.44	Isu Terkait Kesenjangan Pembangunan dan Infrastruktur Pelayanan Dasar.....	II-261
Gambar 2.45	Isu Terkait Keberlanjutan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	II-263
Gambar 2.46	Isu Terkait Keberlanjutan Penataan Ruang.....	II-266
Gambar 2.47	Isu Terkait Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	II-268
Gambar 2.48	Keterkaitan Isu Strategis RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 dengan Isu Strategis RPJPD Tahun 2025-2045 serta Isu Pembangunan Berkelanjutan pada KLHS RPJMD Tahun 2025-2029	II-276
Gambar 3.1	Keselarasn Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 dengan Visi dan Misi RPJMN Tahun 2025-2029 (Astacita)	III-16
Gambar 3.2	Keselarasn Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 dengan Visi dan Misi RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029	III-19
Gambar 3.3	Logic Model.....	III-32

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1 Produksi Komoditas Pertanian di Kabupaten Sumedang (Ton) II-13

Grafik 2.2 Produksi Komoditas Perkebunan di Kabupaten Sumedang Tahun
2020-2024 (Ton) II-13

Grafik 2.3 Perkembangan Luas Lahan Sawah di Kabupaten Sumedang Tahun
2020-2023 (Ha)..... II-14

Grafik 2.4 Jumlah Rumah Tangga dan Usaha Pertanian Perorangan Urban
Farming Menurut Kecamatan di Kabupaten Sumedang Tahun 2023 .. II-17

Grafik 2.5 Produksi Komoditas Peternakan Kabupaten Sumedang..... II-17

Grafik 2.6 Produksi Komoditas Ikan Konsumsi Tahun 2019-2024 (Ton)..... II-18

Grafik 2.7 Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2024 .. II-26

Grafik 2.8 Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Sumedang Tahun
2018-2024..... II-31

Grafik 2.9 Piramida Penduduk Kabupaten Sumedang Tahun 2024 II-36

Grafik 2.10 Struktur Umur Penduduk Kabupaten Sumedang Tahun 2024 II-37

Grafik 2.11 TFR Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2024 II-38

Grafik 2.12 Pertumbuhan Lapangan Usaha pada PDRB Kabupaten Sumedang
Tahun 2015-2024..... II-40

Grafik 2.13 Trend Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sumedang, Jawa Barat
dan Nasional Tahun 2015-2024..... II-41

Grafik 2.14 Trend Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Barat
Tahun 2015-2024..... II-42

Grafik 2.15 Capaian Kontribusi dan Pertumbuhan Lapangan Usaha PDRB
Kabupaten Sumedang Tahun 2024..... II-43

Grafik 2.16 Kontribusi dan Pertumbuhan Lapangan Usaha terhadap PDRB
Tahun 2024..... II-44

Grafik 2.17 Pertumbuhan PDRB Kabupaten Sumedang Tahun 2023-2024 II-45

Grafik 2.18 Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Sumedang
Tahun 2019-2024..... II-47

Grafik 2.19 Komparasi Jumlah Penduduk Miskin dan Pertumbuhannya di
Provinsi Jawa Barat Tahun 2024..... II-49

Grafik 2.20 Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Sumedang Tahun
2010-2024 II-49

Grafik 2.21 Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Sumedang Tahun
2010-2024 II-50

Grafik 2.22 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (%) di Kabupaten
Sumedang Tahun 2019-2024 II-51

Grafik 2.23 Komposisi TPT berdasarkan Umur di Kabupaten Sumedang
Tahun 2024..... II-52

Grafik 2.24 Tren Proporsi TPT Usia Muda (15-24 Tahun) di Kabupaten
Sumedang Tahun 2024 II-52

Grafik 2.25 Perkembangan Rasio Gini Kabupaten Sumedang, Jawa Barat dan
Nasional Tahun 2019-2024 II-53

Grafik 2.26 Capaian Usia Harapan Hidup Kabupaten Sumedang, Jawa Barat
dan Indonesia Tahun 2020 – 2024..... II-63

Grafik 2.27 Capaian Indeks Keluarga Sehat di Kabupaten Sumedang Tahun
2020-2024 II-64

Grafik 2.28 Jumlah Kematian Balita Kabupaten Sumedang Tahun 2020-2024 ... II-65

Grafik 2.29 Penyebab Kematian Balita Kabupaten Sumedang Tahun 2020-2024 II-66

Grafik 2.30 Jumlah Kematian Ibu Kabupaten Sumedang Tahun 2024 II-66

Grafik 2.31 Penyebab Kematian Ibu Kabupaten Sumedang Tahun 2024 II-67

Grafik 2.32 Komparasi Indikator Kemiskinan Tahun 2024..... II-67

Grafik 2.33 Tren Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Barat
Tahun 2024..... II-69

Grafik 2.34	Capaian Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat dan Indonesia Tahun 2020 – 2024	II-70
Grafik 2.35	Capaian Harapan Lama Sekolah (Tahun) di Kabupaten Sumedang Jawa Barat dan Indonesia Tahun 2020 – 2024	II-71
Grafik 2.36	Capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Sumedang Tahun 2022-2024	II-74
Grafik 2.37	IPG Kabupaten Sumedang dan Jawa Barat Tahun 2018-2024.....	II-110
Grafik 2.38	IDG Kabupaten Sumedang dan Jawa Barat Tahun 2018-2024	II-111
Grafik 2.39	IKG Kabupaten Sumedang dan Jawa Barat Tahun 2018-2024	II-111
Grafik 2.40	Komposisi Penduduk dan Rasio Ketergantungan	II-115
Grafik 2.41	Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021-2024	II-116
Grafik 2.42	Hasil Pengukuran Komponen Indeks Inovasi Daerah Tahun 2024 ..	II-117
Grafik 2.43	Tren dan Komposisi PDRB Kabupaten Sumedang.....	II-119
Grafik 2.44	Tren Kontribusi PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2015-2024	II-120
Grafik 2.45	Proporsi Tenaga Kerja Berdasarkan Lapangan Usaha (%) Tahun 2019-2024	II-121
Grafik 2.46	Kontribusi Pertumbuhan Lapangan Usaha PDRB Kabupaten Sumedang Tahun 2024	II-122
Grafik 2.47	Perbandingan PDRB Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2024 ..	II-123
Grafik 2.48	Indeks Literasi Masyarakat Digital Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat dan Nasional pada Tahun 2022 – 2024.....	II-126
Grafik 2.49	Perkembangan ICOR Kabupaten Sumedang Tahun 2015-2024	II-128
Grafik 2.50	IDM Kabupaten Sumedang Tahun 2020-2024	II-130
Grafik 2.51	Status Desa di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2024	II-131
Grafik 2.52	Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2020-2024	II-138
Grafik 2.53	Jumlah Kasus Pelanggaran Perda yang Tertangani di Kabupaten Sumedang Tahun 2020-2024	II-141
Grafik 2.54	Jumlah Kasus Peredaran Rokok Ilegal Kabupaten Sumedang Tahun 2022-2023.....	II-141
Grafik 2.55	Perbandingan Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2024	II-143
Grafik 2.56	Tren ICOR Kabupaten Sumedang Tahun 2020-2024	II-207

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan Daerah merupakan bagian integral dari Pembangunan nasional yang dilaksanakan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik, serta daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah sesuai kewenangannya yang telah dibagi berdasarkan urusan pemerintahan konkuren diwajibkan menyusun perencanaan pembangunan daerah yang disusun secara berjenjang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Pada tanggal 27 November 2024 Kabupaten Sumedang telah melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati untuk periode Tahun 2025-2029 yang diselenggarakan serentak secara nasional. Berdasarkan hasil Pemilihan Kepala Daerah, maka ditetapkan pasangan Dr. H. Dony Ahmad Munir, ST., M.M. sebagai Bupati dan M. Fajar Aldila, S.H., M.Kn sebagai Wakil Bupati terpilih untuk periode tahun 2025 - 2029 dan telah dilantik pada tanggal 20 Februari 2025.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, maka Pemerintah Kabupaten Sumedang berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk periode Tahun 2025-2029 dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik.

Dokumen RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah

dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 dilakukan untuk menjamin kesinambungan pembangunan daerah terutama dalam rangka meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, terlebih menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan Masyarakat, baik pada aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik, maupun pemberdayaan masyarakat.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa RPJMD disusun secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan teknokratik, partisipatif, politik, dan atas-bawah dan bawah-atas. Pendekatan teknokratik dalam penyusunan RPJMD menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan melalui pelaksanaan konsultasi publik. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dimaksudkan bahwa RPJMD disusun dengan memperhatikan harapan masyarakat di seluruh kabupaten yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan dilaksanakan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD yang bertujuan pada percepatan pembangunan daerah dengan memperhatikan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi. Adapun pendekatan politik dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Lebih lanjut, secara substansi penyusunan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif, dan spasial. Pendekatan holistik-tematik bermakna dilakukannya penanganan menyeluruh dan terfokus pada pencapaian program prioritas sehingga kegiatan

yang dilaksanakan betul-betul ditujukan untuk terwujudnya misi. Pendekatan integratif bermakna adanya keterpaduan seluruh program yang saling memperkuat dan selaras antara organisasi perangkat daerah dalam mencapai program prioritas daerah. Adapun pendekatan spasial bermakna program prioritas direncanakan berdasarkan data dan informasi yang akurat sehingga memudahkan proses integrasi dan pemantauan di lapangan.

Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 menyatakan bahwa sesuai dengan Undang – Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang mengamanatkan penyusunan RPJMD wajib selaras dan berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 yang di dalamnya memuat Asta Cita sebagai misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2025 – 2029, dengan mempertimbangkan semangat otonomi daerah, potensi daerah, dan kearifan lokal, serta untuk memastikan kesinambungan Pembangunan daerah dan menjaga kualitas pelayanan kepada Masyarakat, pasca pemilihan kepala daerah serentak.

Dalam upaya menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah daerah lebih rasional, operasional, efektif, dan akuntabel, penyusunan rancangan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah melalui pendekatan manajemen strategik, *logic model*, berfikir sistem, dan sistem dinamik, untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Selain menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, sekaligus juga merupakan bagian dari upaya mendukung secara seiring sejalan dengan pelaksanaan dan pencapaian 8 (Delapan) Asta Cita, 17 (Tujuh belas) Program Prioritas, dan 8 (Delapan) Proyek Hasil Terbaik Cepat (*Quick Wins*) yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Periode 2025-2029.

Adapun tata cara yang dilakukan dalam penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 selain berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 juga memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Jangka Menengah Daerah dan

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Adapun tata cara penyusunan RPJMD meliputi: persiapan penyusunan; pembahasan Visi dan Misi secara Teknokratik; penyusunan rancangan awal; pelaksanaan Forum Konsultasi Publik; penyusunan rancangan; pelaksanaan Musrenbang; perumusan rancangan akhir; dan penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2025-2029. RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran periode pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2045 dan menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029. Sehingga, penyusunan RPJMD Kabupaten Sumedang tahun 2025-2029 berfokus pada perincian substansi perencanaan pembangunan lima tahunan tahap pertama RPJPD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2045.

Dengan demikian, RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 mempunyai kedudukan, peran, dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat:

1. Sebagai media untuk mengimplementasikan janji Kepala Daerah terpilih yang telah disampaikan pada saat kampanye kepada seluruh masyarakat;
2. Pedoman pembangunan selama 5 (lima) tahun dan rencana tahunan (RKPD);
3. Merupakan ruang politis bagi kepala daerah terpilih dan DPRD, yang akan berdampak tidak baik apabila tidak dapat tercapai;
4. Alat atau instrumen pengendalian bagi satuan pengawas internal (SPI) dan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA);
5. Pedoman penilaian keberhasilan Pemerintahan daerah sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
6. Instrumen mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala Perangkat Daerah selama 5 tahun.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 berlandaskan pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6914);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
14. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
15. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
16. Undang-Undang Nomor 105 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 291, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7042);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
24. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);
25. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
26. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
27. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 91);
28. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
29. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);
30. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
31. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 19);

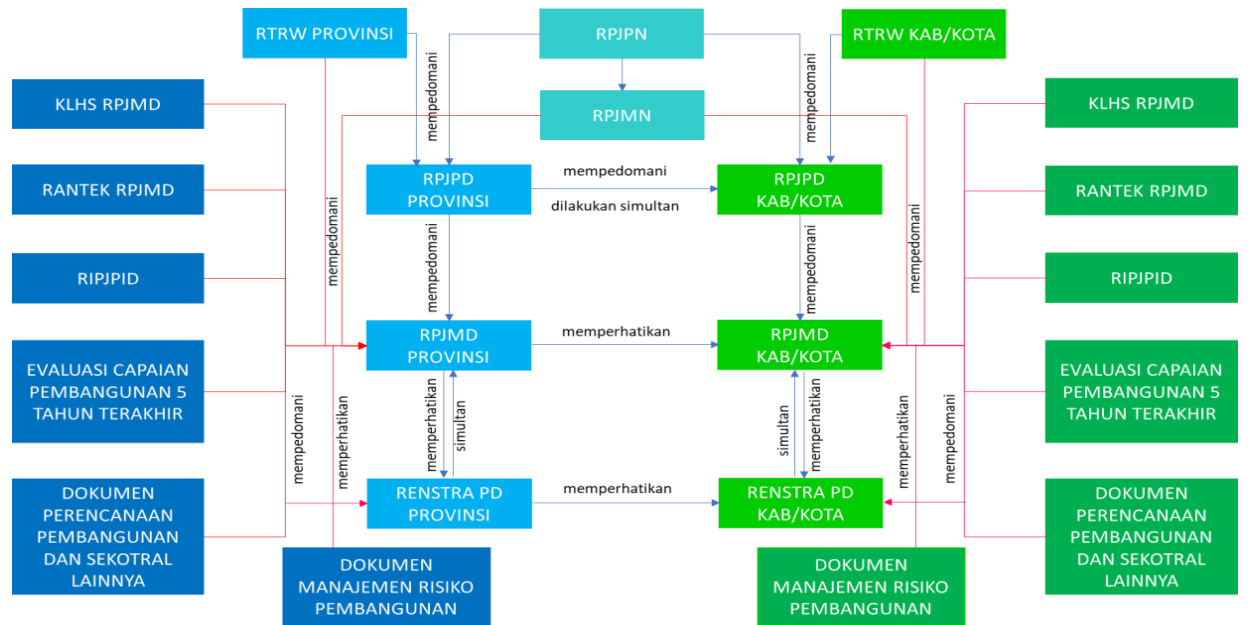
32. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
39. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2050 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 231);

41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);
42. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 4);
43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 50);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Sumedang Puseur Budaya Sunda (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dan Program Bina Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9);

49. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Sumedang Tahun 2021-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Sumedang Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 44);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 51);

1.3. Hubungan Antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Lainnya

RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satuan kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional. Hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya sebagai berikut:



Gambar 1.1 Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya
(Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025)

Dokumen perencanaan sektoral lainnya yang dimaksud pada Gambar 1.1 antara lain Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA),

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) dan Rencana Penanggulangan Bencana.

1.3.1. Hubungan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025-2029

Penyusunan RPJMD diselaraskan dengan RPJM Nasional sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029. Hal ini dilakukan menyelaraskan kinerja dan periodisasi serta mendukung pelaksanaan dan pencapaian 8 (Delapan) Asta Cita, 17 (Tujuh belas) Program Prioritas, dan 8 (Delapan) Proyek Hasil Terbaik Cepat (*Quick Wins*) yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Periode 2025-2029.

1.3.2. Hubungan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2045

Penyusunan RPJMD sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 merupakan tahap pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.



Gambar 1.2 Tahapan Pembangunan RPJPD Kabupaten Sumedang Tahun 2025–2045

(Sumber : Perda RPJPD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2045)

Pada Tahap Pertama ini adalah merupakan penguatan modalitas/sumber daya yang dimiliki dalam pelaksanaan pembangunan ke depan. Penguatan ini dilakukan dengan menjaga kesinambungan pembangunan yang telah dihasilkan dan meningkatkan capaian kinerja yang belum optimal.

Adapun upaya penguatan fondasi ini meliputi:

1. Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan dan Kesehatan dalam menunjang Pembangunan Sumber Daya Manusia Berakhlak, Berkarakter, Berkualitas, dan Inklusif;
2. Penguatan Produksi dan Produktivitas sektor Ekonomi Primer;
3. Penataan kelembagaan, regulasi, digitalisasi, dan pemberdayaan masyarakat sipil yang Berintegritas, Kolaboratif dan Inovatif;
4. Penyelenggaraan Transformasi Kelembagaan dan Tata Kelola Ideologi, Politik, Hukum dan Keamanan Daerah;
5. Peningkatan akses terhadap nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan;
6. Peningkatan Infrastruktur Dasar yang berkualitas;
7. Rehabilitasi sarana dan prasarana pelayanan dasar;
8. Penataan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan.

1.3.3. Hubungan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045

Tujuan dan sasaran pembangunan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029. Hal ini memastikan bahwa pembangunan di tingkat kabupaten telah sejalan dengan arah pembangunan terutama dalam mendukung target kinerja Indikator Utama Pembangunan (IUP) yang telah tercantum dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029.

1.3.4. Hubungan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 dengan RTRW Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038

Penyusunan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 memperhatikan RTRW Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038 yang memberi acuan mengenai struktur dan pola ruang terkait dengan rencana pelaksanaan program-program pembangunan, agar kebijakan dan sasaran dalam Rancangan RPJMD selaras dan tidak menyimpang dari arah kebijakan RTRW.

1.3.5. Hubungan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 dengan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

RPJMD dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat ujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

1.3.6. Hubungan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

RPJMD dijabarkan kedalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disusun setiap tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

1.3.7. Hubungan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029

Penyusunan Rancangan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025–2029 memperhatikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Sumedang tahun 2025-2030. Hal ini bertujuan agar dapat tercipta keselarasan antara kebijakan, rencana, dan program pembangunan dengan kaidah pembangunan berkelanjutan, sehingga mampu mengelola potensi yang menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup.

Isu Pembangunan Berkelanjutan (PB)/ *Sustainable Development Goals* (SDG's) Strategis untuk KLHS RPJMD Kabupaten Sumedang merupakan hasil analisis dari capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), kondisi muatan lingkungan hidup dan dokumen-dokumen perencanaan publik di Kabupaten Sumedang, serta telah didiskusikan bersama Pokja KLHS dan Konsultasi Publik untuk menyepakati isu PB strategis pada KLHS RPJMD Kabupaten Sumedang tahun 2025-2030. Disepakati bahwa terdapat 6 (enam) isu PB strategis di Kabupaten Sumedang sebagai berikut:

1. Perlindungan dan bantuan sosial, serta mitigasi bencana yang belum maksimal dalam mengentaskan kemiskinan dan mewujudkan ketahanan keluarga (berkaitan dengan TPB 1 dan TPB 13);
2. Infrastruktur dasar yang belum memadai seperti akses air bersih dan sanitasi, tempat tinggal layak, konektivitas transportasi, ketenagalistrikan, jaringan internet serta pengelolaan sampah dan limbah (berkaitan dengan TPB 6, TPB 9 dan TPB 11);
3. Minimnya ekosistem ekonomi berbasis teknologi dan pembangunan berkelanjutan serta rendahnya produktivitas sektor ekonomi primer dan daya tarik pariwisata (berkaitan dengan TPB 8);
4. Belum optimalnya sarana prasarana dan pelayanan cakupan akses kesehatan, pengendalian dan pencegahan stunting, penyakit menular, serta kapasitas tenaga kesehatan yang masih rendah dan belum merata (berkaitan dengan TPB 3);
5. Kualitas regulasi dan koordinasi perencanaan dan pengelolaan wilayah yang kurang mendukung upaya pelestarian keanekaragaman hayati (berkaitan dengan TPB 15 dan TPB 16);
6. Belum meratanya akses dan kualitas pendidikan serta perlunya peningkatan pelestarian budaya dan kearifan lokal (berkaitan dengan TPB 4).

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 adalah untuk mewujudkan suatu perencanaan yang berkualitas dengan mengintegrasikan antara kebijakan pembangunan nasional, provinsi maupun daerah sehingga mampu menjawab permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh daerah serta mencapai visi dan misi Bupati.

Adapun tujuan disusunnya RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 adalah:

1. Menjabarkan Visi, Misi, dan program kerja Kepala Daerah ke dalam kebijakan pembangunan yang terukur dan realistis;
2. Menyelaraskan Kebijakan Pembangunan Nasional dan Daerah;
3. Menetapkan Prioritas Pembangunan Daerah;
4. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD);
5. Menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD setiap tahunnya;

6. Menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
7. Menjadi dasar dalam upaya pencapaian kesejahteraan bersama melalui sinergitas, koordinasi dan sinkronisasi oleh masing-masing para pemangku kepentingan di Kabupaten Sumedang;
8. Memberikan arah pada keseimbangan lingkungan, sosial, ekonomi, dan tata kelola hukum dalam pembangunan yang berkelanjutan;
9. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan dengan pemerintah daerah sekitar dan pemerintah pusat;
10. Meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan;
11. Memberikan kepastian ruang bagi partisipasi pemangku kepentingan pembangunan daerah secara proporsional dan profesional;
12. Mengarahkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang, dasar hukum penyusunan, Hubungan antara dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bab ini menyajikan data-data dan informasi dengan pendekatan 4 (empat) yaitu Aspek Geografi dan Demografi; Aspek Kesejahteraan Masyarakat; Aspek Daya Saing Daerah; dan Aspek Pelayanan Umum serta hasil evaluasi capaian pembangunan daerah 5 (lima) tahun terakhir. Gambaran keuangan daerah yang meliputi realisasi APBD, Neraca daerah tahun 2020-2024 dan proyeksi keuangan daerah Tahun Anggaran 2026-2030; serta permasalahan dan isu strategis.

BAB III : Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

Bab ini terdiri dari Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dan Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah.

BAB IV : Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Bab ini menjelaskan tentang rencana Program Perangkat Daerah dalam mencapai kinerja pembangunan daerah Tahun 2025-2030. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah untuk penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) serta penentuan target penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui Indikator Kinerja Daerah (IKD).

BAB V : Penutup

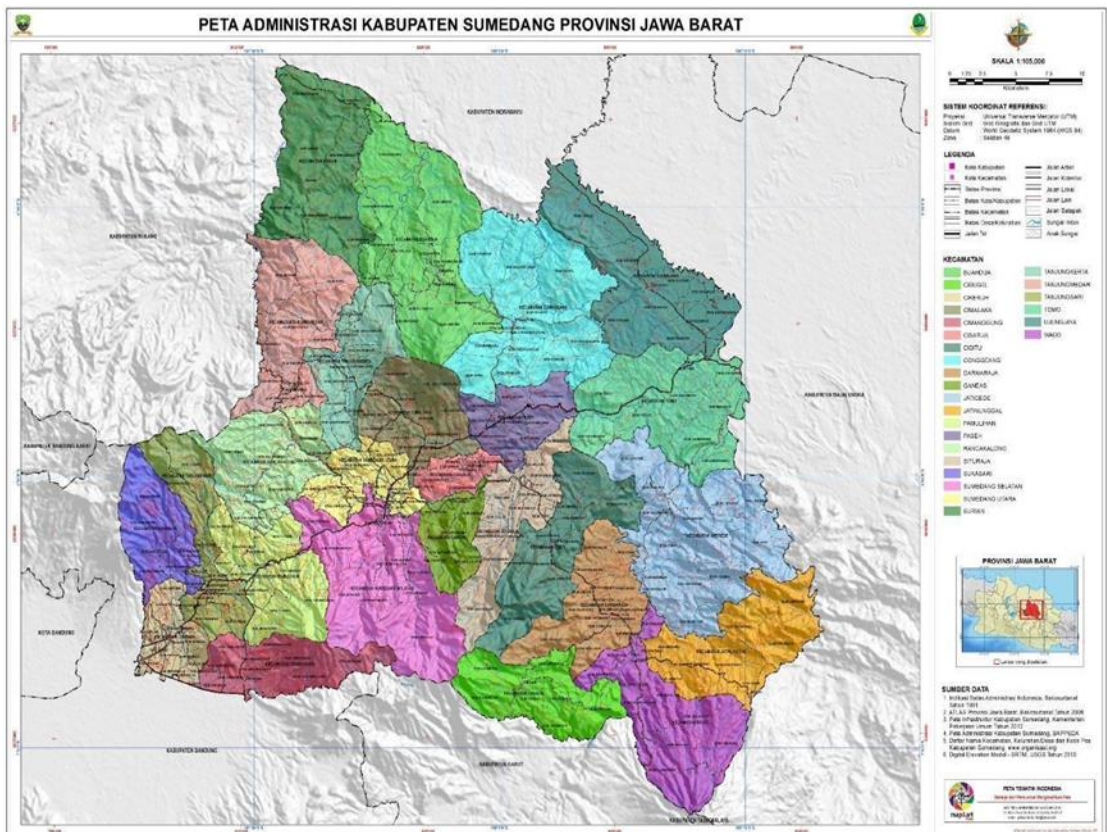
Bab ini berisi Kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Secara geografis, Kabupaten Sumedang berada pada posisi koordinat 06034’46,18”-7000’56,25” Lintang Selatan dan 107001’45,63”- 108012’59,04” Bujur Timur (Gambar 2.1).



Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Sumedang
(Sumber: RTRW Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038)

Batas-batas wilayah administratif Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut:

- a) Sebelah Utara : Kabupaten Indramayu;
- b) Sebelah Timur : Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Tasikmalaya;
- c) Sebelah Barat : Kabupaten Subang dan Kabupaten Bandung; dan
- d) Sebelah Selatan : Kabupaten Garut dan Kabupaten Bandung.

Luas wilayah Kabupaten Sumedang berdasarkan RTRW Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038 adalah 155.872 (seratus lima puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh dua) Ha yang terdiri dari 26 kecamatan dan terbagi menjadi 270 desa dan 7 (tujuh) kelurahan. Kecamatan dengan wilayah terluas

adalah Kecamatan Jatigede sebesar 11.392 Ha, dan luasan terkecil adalah Kecamatan Cisarua sebesar 1.452 Ha. Adapun luas wilayah per Kecamatan, sebagaimana Tabel 2.1 di bawah ini.

Tabel 2.1 Luas Wilayah Kecamatan, Jumlah Desa dan Kelurahan di Kabupaten Sumedang

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Desa	Kelurahan	Persentase (%)
1	Wado	7.331	10		4,71%
2	Jatinunggal	6.322	9		4,05%
3	Darmaraja	5.413	12		3,47%
4	Cibugel	5.004	7		3,21%
5	Cisitu	6.410	10		4,10%
6	Situraja	5.668	15		3,64%
7	Conggeang	11.186	12		7,20%
8	Paseh	3.387	10		2,17%
9	Surian	7.630	9		4,90%
10	Buahdua	11.156	14		7,15%
11	Tanjungsari	4.325	12		2,77%
12	Sukasari	3.904	7		2,50%
13	Pamulihan	5.377	11		3,44%
14	Cimanggung	4.305	11		2,76%
15	Jatinangor	2.570	12		1,64%
16	Rancakalong	5.605	10		3,59%
17	Sumedang Selatan	9.675	10	4	6,20%
18	Sumedang Utara	3.141	10	3	2,01%
19	Ganeas	2.531	8		1,62%
20	Tanjungkerta	4.399	12		2,82%
21	Tanjungmedar	6.687	9		4,29%
22	Cimalaka	4.763	14		3,05%
23	Cisarua	1.452	7		0,93%
24	Tomo	7.541	9		4,87%
25	Ujungjaya	8.692	9		5,61%
26	Jatigede	11.394	11		7,31%
Jumlah		155.868	270	7	100%

Sumber: Perda No 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

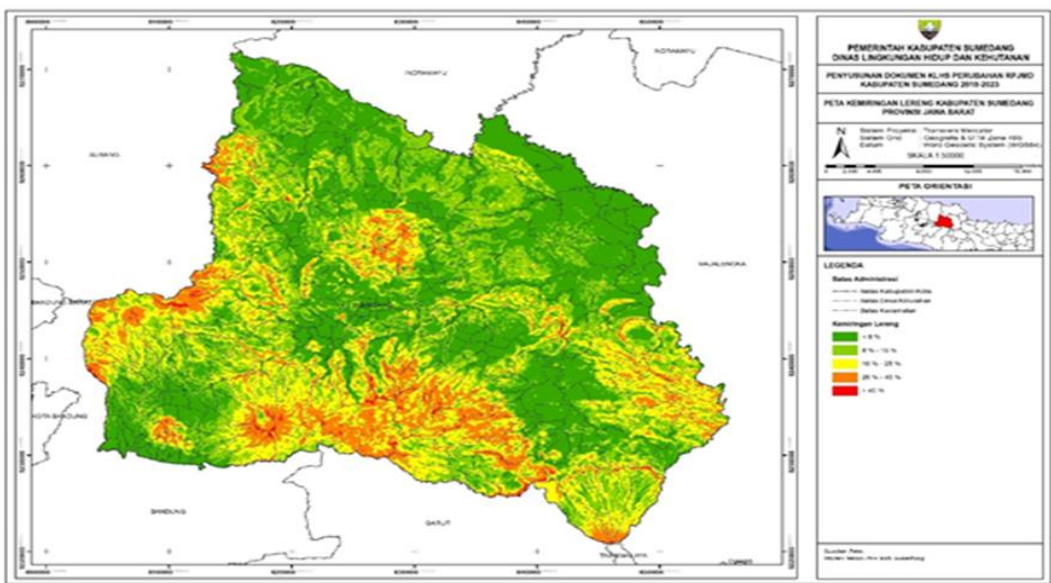
2.1.1.1. Aspek Geografi

Sebagian besar wilayah Kabupaten Sumedang berupa perbukitan dan pegunungan kecuali di sebagian kecil wilayah utara Kabupaten Sumedang. Dataran paling rendah yang terdapat di Kabupaten Sumedang ketinggiannya

mencapai 26 meter di atas permukaan laut dengan puncak tertinggi adalah puncak gunung Tampomas dengan ketinggian sekitar 1.684 meter di atas permukaan laut.

1. 0-8%, merupakan daerah datar hingga berombak dengan luas area sekitar 12,24%. Kemiringan wilayah dominan di bagian timur laut, barat laut, barat daya serta kawasan per kabupaten-an;
2. 8–15%, merupakan daerah berombak sampai bergelombang dengan area sekitar 5,37%. Kemiringan wilayah dominan di bagian tengah ke utara, barat laut dan bagian barat daya;
3. 15–25%, merupakan daerah bergelombang sampai berbukit dengan komposisi area mencakup 51,68%. Kemiringan lereng tipe ini paling dominan di wilayah Kabupaten Sumedang. Persebarannya berada di bagian tengah sampai ke tenggara, bagian selatan sampai barat daya dan bagian barat;
4. 25–40%, merupakan daerah berbukit sampai bergunung dengan luas area sekitar 31,58%. Kemiringan lereng tipe ini dominan di wilayah Kabupaten Sumedang bagian tengah, bagian selatan dan bagian timur;
5. Lebih dari kemiringan 40%, merupakan daerah bergunung dengan luas area mencakup sekitar 11,36%. Kemiringan lereng tipe ini dominan di wilayah Kabupaten Sumedang bagian selatan, bagian timur dan bagian barat daya.

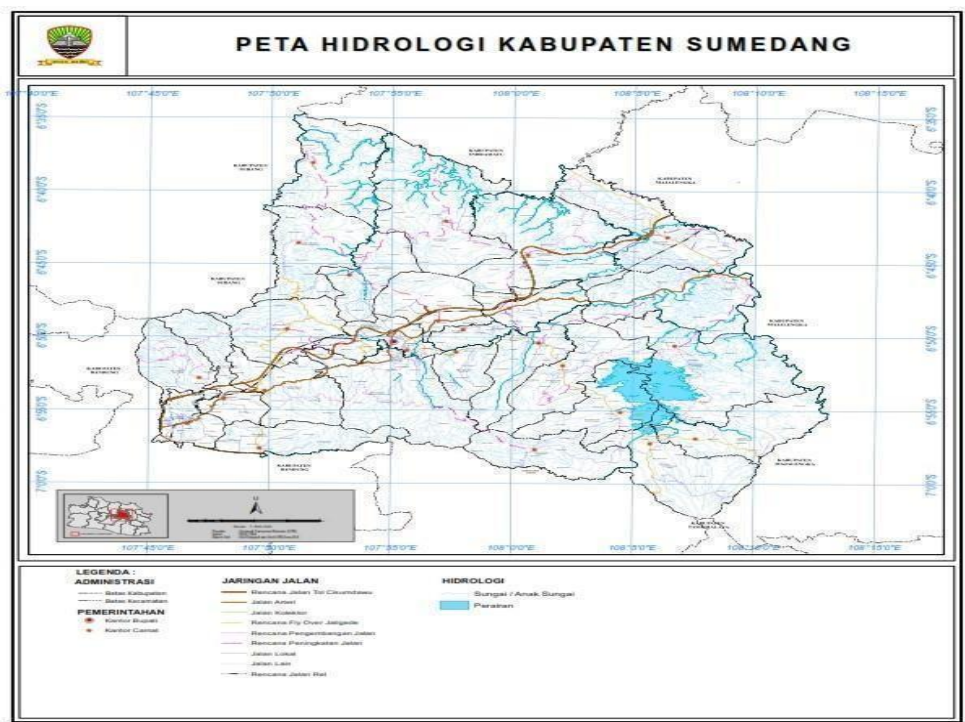
Peta Kemiringan Kabupaten Sumedang yang bersumber dari RTRW Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038 diperlihatkan pada Gambar 2.2 di bawah ini.



Gambar 2.2 Peta Kemiringan Lahan di Kabupaten Sumedang
(Sumber: Perda No 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038)

Aspek hidrologi suatu wilayah sangat diperlukan di dalam pengendalian dan pengaturan tata air wilayah. Wilayah Sungai (WS) Kabupaten Sumedang sebagian besar merupakan jaringan lintas kabupaten, yaitu sungai yang hulu atau hilirnya berada di antara Wilayah Kabupaten Sumedang dengan wilayah kabupaten tetangga. Wilayah Sungai tersebut meliputi:

1. WS Cipunagara terkait dengan Kabupaten Subang adalah Sungai Cipunagara;
2. WS Cipanas terkait dengan Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Majalengka adalah Sungai Cipanas, Sungai Cigalagah, dan Sungai Cikandung;
3. WS Citarum terkait dengan Kabupaten Bandung adalah Sungai Cikeruh dan Sungai Citarik (relatif kecil);
4. WS Cimanuk terkait dengan Kabupaten Garut dan Kabupaten Majalengka adalah Sungai Cipelang, Sungai Cimanuk, dan Sungai Cilutung.



Gambar 2.3 Peta Hidrologi Kabupaten Sumedang
(Sumber: Perda No 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038)

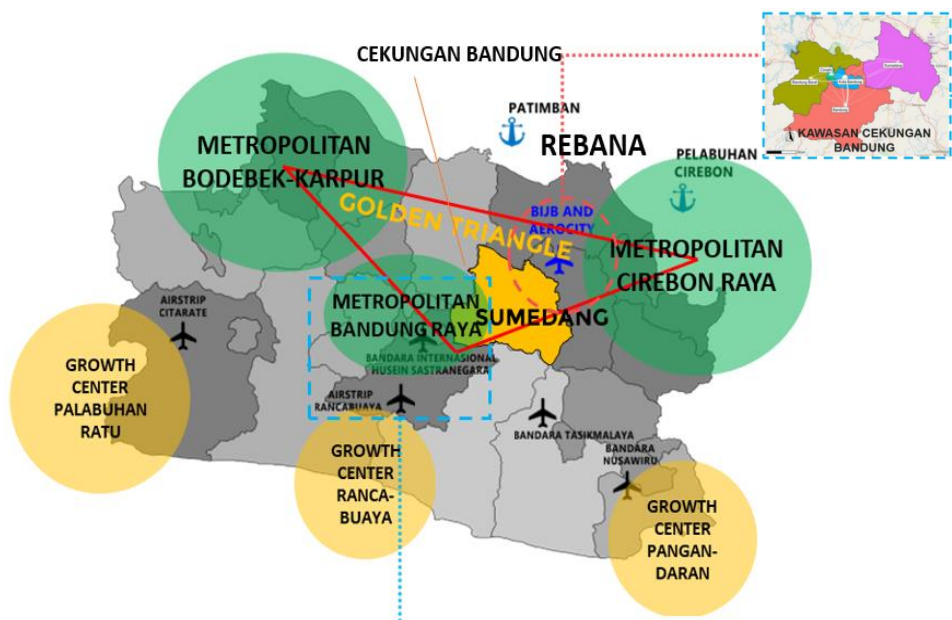
Berdasarkan hidrogeologinya, aliran-aliran sungai besar di wilayah Kabupaten Sumedang bersama anak-anak sungainya membentuk pola Daerah Aliran Sungai (DAS) yang terdiri dari 4 (empat) DAS dengan 6 (enam) Sub DAS, yaitu:

1. DAS Cimanuk meliputi Sub DAS Cimanuk Hulu, Sub DAS Cipeles, Sub DAS Cimanuk Hilir, dan Sub DAS Cilutung;
2. DAS Citarum meliputi Sub DAS Citarik;
3. DAS Cipunagara meliputi Sub DAS Cikandung; dan
4. DAS Cipanas.

2.1.1.1.1. Posisi Strategis Kabupaten Sumedang

Kabupaten Sumedang memiliki kondisi *geo-economy* yang terletak di koridor ekonomi Jawa yaitu diantara 3 (tiga) kota metropolitan meliputi Jakarta Raya, Bandung Raya, dan Cirebon Raya, yang merupakan posisi strategis bagi Kabupaten Sumedang. Kabupaten Sumedang juga berada pada lokasi yang sangat strategis bagi perekonomian nasional, karena sebagian wilayahnya masuk dalam Kawasan Cekungan Bandung yang telah ditetapkan menjadi Kawasan Strategis Nasional (KSN) oleh Pemerintah Pusat berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung dan juga sebagai penyangga Ibukota Provinsi.

Kabupaten Sumedang juga masuk kedalam kawasan pengembangan baru berbasis perkotaan Inti Cirebon-Patimban-Kertajati yang selanjutnya disebut REBANA yang didalamnya meliputi 7 (tujuh) Kabupaten/Kota yaitu Subang, Indramayu, Cirebon, Majalengka, Kuningan, Cirebon, Sumedang dan Kota Cirebon berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan REBANA dan Jawa Barat Bagian Selatan.



Gambar 2.4 Posisi Strategis Kabupaten Sumedang
(Sumber: RPJPD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2045)

Seiring dengan pembangunan berbagai proyek strategis di Kabupaten Sumedang, maka saat ini Kabupaten Sumedang mempunyai posisi strategis terhadap wilayah yang ada di sekitarnya. Keberadaan Waduk Jatigede telah menjadi potensi sumber daya air dengan peran antara lain:

1. Pengatur tata air (banjir, kekeringan) di daerah hilir DAS Cimanuk (Cirebon, Indramayu).
2. Sumber air baku untuk Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Cirebon Raya.
3. Waduk Jatigede menjadi sumber irigasi untuk pertanian daerah hilir DAS Cimanuk, yang juga ditetapkan sebagai wilayah penunpu ketahanan pangan nasional.

2.1.1.1.2. Potensi Sumber Daya Alam

Secara umum ada dua pandangan terhadap sumberdaya alam yakni yang pertama adalah pandangan konservatif yang disebut juga sebagai pandangan pesimis atau perspektif Malthusian dan pandangan eksploitatif atau perspektif Ricardian (Fauzi A, 2010). Perspektif Malthusian memandang bahwa risiko akan terkurasnya sumberdaya alam sehingga sumberdaya alam harus dimanfaatkan secara hati-hati karena adanya faktor ketidakpastian terhadap apa yang akan terjadi pada sumberdaya alam untuk generasi mendatang. Sedangkan perspektif Ricardian memandang bahwa sumberdaya alam:

1. Dianggap sebagai “mesin pertumbuhan” yang mentransformasikan sumberdaya ke dalam “*manmade capital*” yang pada gilirannya akan menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi di masa yang akan datang;
2. Adanya keterbatasan dari sumberdaya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dapat disubstitusikan dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi;

Jika sumberdaya menjadi langka, hal ini akan tercermin dalam dua indikator ekonomi, yakni meningkatnya baik harga output maupun biaya ekstraksi per satuan output. Meningkatnya harga output akibat meningkatnya biaya per satuan output akan menurunkan permintaan terhadap barang dan jasa yang dihasilkan oleh sumberdaya alam. Di sisi lain peningkatan harga output menimbulkan insentif kepada produsen sumberdaya alam untuk meningkatkan suplai. Namun karena ketersediaan sumberdaya yang terbatas, kombinasi dampak harga dan biaya akan menimbulkan insentif untuk mencari sumberdaya substitusi dan peningkatan daur ulang. Selain itu kelangkaan juga akan memberikan insentif untuk mengembangkan inovasi-inovasi seperti pencarian deposit baru, peningkatan efisiensi produksi dan peningkatan

teknologi daur ulang sehingga dapat mengurangi tekanan terhadap pengrusakan sumberdaya alam.

Terkait dengan hal di atas potensi sumberdaya alam dapat diartikan sebagai segala kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang meliputi sumberdaya hayati, non hayati, energi, ruang dan waktu.

Kabupaten Sumedang yang merupakan salah satu kabupaten yang berbatasan langsung dengan Ibukota Provinsi Jawa Barat menyimpan cukup banyak potensi sumber daya alam, diantaranya adalah potensi di sektor pariwisata, kehutanan, pertambangan, pertanian dan lain-lain.

A. Pariwisata

Kabupaten Sumedang saat ini sudah memiliki Perencanaan Pengembangan Kepariwisata di Kabupaten Sumedang yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Kabupaten Sumedang Tahun 2021-2025 sebagai upaya mendorong pengembangan Pariwisata di Kabupaten Sumedang dan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 177 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Pengembangan Desa Wisata sehingga bisa menjadi pedoman bagi penyelenggaraan desa wisata di Kabupaten Sumedang.

Wisata alam sebagai salah satu wisata yang memanfaatkan unsur-unsur daya tarik alam dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, baik itu alami maupun budidaya sebagai daya tarik wisata cukup dominan di Kabupaten Sumedang disamping wisata lain seperti wisata sejarah, wisata budaya, wisata kuliner, wisata edukasi, wisata olahraga dan wisata minat khusus. Keberadaan pariwisata wisata alam di Kabupaten Sumedang tersebar di beberapa kecamatan, seperti yang terdapat pada tabel berikut.

Tabel 2.2 Sebaran Potensi Wisata Alam di Kabupaten Sumedang

No	Nama Kecamatan	Jumlah Wisata Alam
1	Buahdua	2
2	Cibugel	1
3	Cimalaka	3
4	Cimanggung	8
5	Cisarua	-
6	Cisitu	5
7	Conggeang	2

No	Nama Kecamatan	Jumlah Wisata Alam
8	Darmaraja	1
9	Ganeas	1
10	Jatigede	3
11	Jatinangor	-
12	Jatinunggal	-
13	Pamulihan	1
14	Paseh	-
15	Rancakalong	-
16	Situraja	4
17	Sukasari	1
18	Sumedang Utara	-
19	Sumedang Selatan	10
20	Surian	-
21	Tanjungkerta	1
22	Tanjungmedar	1
23	Tanjungsari	5
24	Tomo	-
25	Ujungjaya	-
26	Wado	-

Sumber. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang, 2024 (diolah)

Perkembangan jumlah wisatawan mancanegara dan domestik di Kabupaten Sumedang dari Tahun 2014-2023 menunjukkan trend meningkat terutama pada tahun 2022 dan 2023. Penurunan jumlah pengunjung puncaknya terjadi tahun 2021 dimana terjadi puncak pandemi Covid-19.

Tabel 2.3 Perkembangan Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Domestik di Kabupaten Sumedang Tahun 2020-2024

Tahun	M mancanegara	Domestik	Total
2020	7.784	874.038	881.822
2021	0	648.004	648.004
2022	11.410	1.248.543	1.259.953
2023	12.023	1.803.403	1.815.426
2024	13.721	1.810.983	1.824.704

Sumber. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang, 2024 (diolah)

B. Kehutanan

Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 dikelola dan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi. Adapun kewenangan yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah adalah pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura).

Potensi kehutanan di Kabupaten Sumedang berupa Taman Hutan Raya (Tahura), yaitu Tahura Gunung Palasari dan Tahura Gunung Kunci yang merupakan salah satu kawasan konservasi di Sumedang dan berfungsi sebagai kawasan perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Kedua gunung tersebut menjadi kawasan taman hutan rakyat pada Tahun 2004 sehingga status kawasan Gunung Kunci dan Gunung Palasari berubah fungsinya dari Kawasan Hutan Produksi Terbatas menjadi Taman Hutan Raya yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.692/Menhut-II/2009, kawasan Tahura Gunung Kunci dan Gunung Palasari telah ditetapkan menjadi Taman Hutan Raya. Adapun luas Gunung Kunci sebesar 3,2 hektar sedangkan Tahura Gunung Palasari luasnya 32,89 hektar. Saat ini Tahura di Kabupaten Sumedang merupakan tempat tumbuh dan pelestarian alam beberapa spesies flora seperti akasia (*Acacia mangium*), Eboni (*Diospyros celebica*), Jati (*Tectona grandis*) dan Pinus (*Pinus merkusii*) serta beberapa spesies fauna seperti Burung Kutilang (*Pycnonotus sp.*), Elang, Ular Bido (*Spilornis cheela*) dan Tekukur.

Selain kawasan Tahura Gunung Kunci dan Gunung Palasari, di Kabupaten Sumedang, kawasan hutan yang potensial untuk dikembangkan adalah kawasan hutan yang pengelolaannya oleh Perum Perhutani dan Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA) Kementerian Kehutanan RI. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang RTRW Provinsi Jawa Barat tahun 2022-2042, terdapat beberapa kawasan konservasi di Kabupaten Sumedang. Tabel 2.4 merupakan daftar kawasan konservasi beserta luasannya di Kabupaten Sumedang.

Tabel 2.4 Kawasan Konservasi di Kabupaten Sumedang

No.	Kawasan Konservasi	Kecamatan		Luas (Ha)
1	Cagar Alam Gunung Jagat	1.	Kecamatan Jatigede	133,64 Ha (Sumber: SK Menteri Kehutanan Nomor 3585 Tahun 2014)
		2.	Kecamatan Jatinunggal	
2	Taman Buru Gunung Masigit Kareumbi	1.	Kecamatan Cibugel	12.420,70 Ha (Sumber: Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 298 Tahun 2998)
		2.	Kecamatan Cimanggung	
		3.	Kecamatan Cisituh	
		4.	Kecamatan Darmaraja	
		5.	Kecamatan Ganeas	
		6.	Kecamatan Pamulihan	
		7.	Kecamatan Situraja	
		8.	Kecamatan Sumedang Selatan	
3	Taman Hutan Raya Gunung Palasari dan Gunung Kunci	Kecamatan Sumedang Selatan		Gunung Palasari: 31,22 Ha Gunung Kunci: 3,57 Ha (Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang No. 10 Tahun 2011)
4	Taman Wisata Alam Tampomas	1.	Kecamatan Buahdua	1.250 Ha (Sumber: Keputusan Menteri Pertanian Nomor 423 Tahun 1979)
		2.	Kecamatan Cimalaka	
		3.	Kecamatan Conggeang	
		4.	Kecamatan Tanjungkerta	

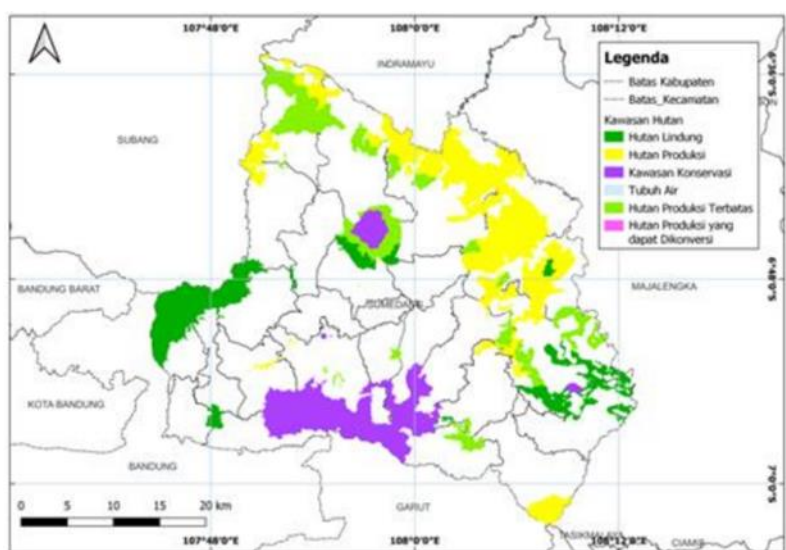
Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Sumedang 2025-2029

Cagar Alam Gunung Jagat ditetapkan sebagai cagar alam seluas 133,64 Ha berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 3585/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 2 Mei 2014. CA Gunung Jagat ini berlokasi di Kecamatan Jatigede dan Kecamatan Jatinunggal. Jenis tumbuhan di CA Gunung Jagat terbagi menjadi tiga, yaitu kelompok berkayu, kelompok Semak belukar, dan golongan *liana* dan *epiphyt*. Beberapa contoh tumbuhan yang terdapat di CA Gunung Jagat adalah Teureup (*Artocarpus elastica*), Kiara (*Ficus septica*), Manglid (*Manglietia glauca*), Burahol (*Stelechocarpus burahol*), Bungur (*Lagerstroemia indica*), Kesambi (*Schleichera oleosa*), Mindi (*Melia azedarach*), Harendong (*Melastoma malabathricum*). Kelebahe (*Liqodium clociatum*), Owar (*Flagellatia indica*), Areuy Gember (*Vibraurea chololeuca*), Anggrek Merpati (*Phalaenopsis amabilis*), Kadaka (*Drynaria sp*), dan Ketongkeng (*Telosna*

cordata). Sementara itu, beberapa satwa liar yang ada di Cagar Alam Gunung Jagat diantaranya Macan Kumbang (*Panthera pardus*), Kucing Hutan (*Felis bengalensis*), Kancil (*Tragululus javanica*), Jelarang (*Ratufa bicolor*), Kalong (*Pteropus vampyrus*), Monyet Ekor Panjang (*Macaca fascicularis*), Lutung (*Trachypitecus auratus*), Trenggiling (*Manis javanica*), dan Elang Ruyuk (*Spilomis cheela bido*).

Taman Buru Masigit Kareumbi (TBMK) adalah satu-satunya kawasan konservasi dengan fungsi sebagai Taman Buru di Pulau Jawa, dengan luas 12.420,70 Ha, yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: 298/KPTS-II/998 tanggal 27 Februari 1998 (KSDAE KLHK, 2018). Taman Buru ini berada di bagian selatan Kabupaten Sumedang, mencakup Kecamatan Cimanggung, Pamulihan, Sumedang Selatan, Garut, Cibugel, Situraja, Cisit, dan Kecamatan Darmaraja. Beberapa jenis tumbuhan yang ada di TBMK adalah Rasamala (*Altingia excelsa*), Huru Dapung (*Actinodaphne glomerata*), Beurying (*Picus fistulosa*), Jamuju (*Podocarpus imbricatus*), Puspa (*Schima wallichii*), Manglid (*Magnolia blumei*), dan Mara (*Macaranga rhizinoides*). Sementara itu, beberapa jenis satwa yang terdapat di TBMK adalah Kijang (*Muntiacus muntjak*), Meong Congkok (*Felis bengalensis*), Owa Jawa (*Hylobates moloch*), Burung Gosong (*Megapodius reinwaratii*), Saeran (*Dicrurus leucophaeus*), Musang (*Priomodon linsang*), Macan Tutul (*Panthera pardus ssp. Pardus*), dan Macan Kumbang (*Panthera pardus ssp. Melas*).

Adapun Kawasan Hutan Gunung Tampomas ditunjuk sebagai taman wisata alam berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 423/KPTS/UM/7/1979, tanggal 5 Juli 1979, dengan luas 1.250 Ha (BKSDA Jabar, 2023). TWA ini berada di tengah agak utara Kabupaten Sumedang, mencakup Kecamatan Buahdua, Cimalaka, dan Kecamatan Conggeang. Beberapa jenis flora di TWA Tampomas adalah Pasang (*Quercus sp*), Puspa (*Schima wallichii*), Rasamala (*Altingia excelsa*), dan Saninten (*Castanea argentea*). Sementara beberapa jenis satwa yang ditemukan di TWA Tampomas adalah Kancil (*Tragullus javanicus*), Lutung (*Trachypithecus auratus*), Owa Jawa (*Hylobates moloch*), Surili (*Presbytis comata*), Monyet Ekor Panjang (*Macaca fascicularis*), Bultok (*Megalaema zeylanica*), dan Elang Jawa (*Spizaetus bartelsi*). Selain itu, Kabupaten Sumedang juga memiliki Taman Hutan Raya Gunung Gunung Palasari dan Gunung Kunci seluas 31,22 Ha, serta hutan lindung seluas sekitar 9.204 Ha. Sebaran kawasan konservasi dan hutan lindung di Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada berikut.

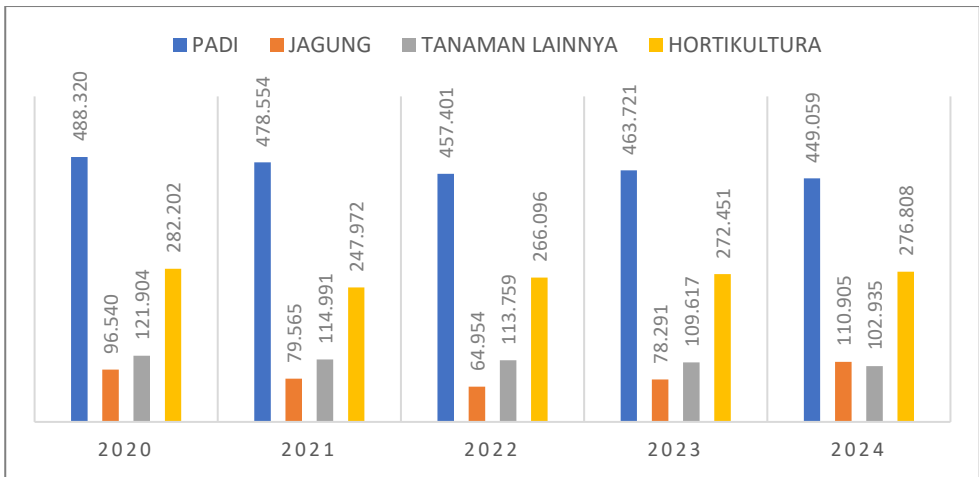


Gambar 2.5 Peta persebaran kawasan hutan konservasi dan hutan lindung di Kabupaten Sumedang dan sekitarnya tahun 2023
(Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2023)

Potensi keanekaragaman hayati di Kabupaten Sumedang dapat dilihat dari jasa lingkungan yang mendukung keanekaragaman hayati dengan klasifikasi tinggi dan sangat tinggi, seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.5. Secara umum, lokasi dengan potensi keanekaragaman hayati tinggi di Kabupaten Sumedang berada di sekitar kawasan konservasi dan hutan lindung. Wilayah-wilayah ini meliputi penutup lahan seperti hutan rimba, perkebunan/kebun, dan semak belukar. Potensi keanekaragaman hayati ini membentuk sebuah kesatuan kawasan, sehingga sangat diperlukan kerjasama dengan wilayah kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Sumedang dalam pengelolaannya. Contohnya adalah hutan lindung di barat Kabupaten Sumedang yang merupakan satu kesatuan dengan hutan lindung di Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Subang.

C. Pertanian

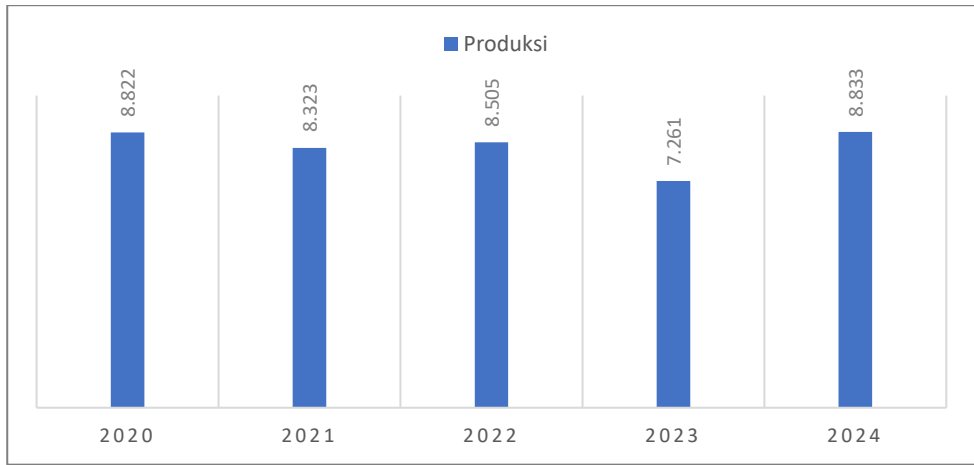
Pertanian dan peternakan merupakan salah satu urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Secara sub sektor, urusan pertanian terdiri dari 5 (lima) sub sektor yaitu pangan, perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan. Urusan pertanian di Kabupaten Sumedang memiliki potensi yang besar karena didukung oleh kondisi agroekosistem yang cocok untuk pengembangan komoditas pertanian. Selain itu juga sektor pertanian pun menjadi salah satu sektor utama yang berperan terhadap kontribusi perekonomian di Kabupaten Sumedang mengingat sebagian besar penduduk bekerja di sektor pertanian.



Grafik 2.1 Produksi Komoditas Pertanian di Kabupaten Sumedang (Ton)
Tahun 2020-2024
(Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Sumedang, 2025)

Produksi komoditas pertanian di Kabupaten Sumedang tahun 2024 yang mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2023 adalah komoditas jagung dan hortikultura, sementara produksi padi dan tanaman lainnya secara umum mengalami penurunan. Hal ini tidak terlepas dari alih fungsi lahan pertanian yang salah satunya akibat perluasan permukiman dan adanya proyek strategis nasional di Kabupaten Sumedang seperti Bendung Cipanas.

Hal ini berbeda dengan produksi komoditas perkebunan yang secara akumulatif mengalami peningkatan dari 7.261 ton tahun 2023 menjadi 8.833 ton pada tahun 2024. Perkembangan produksi komoditas dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



Grafik 2.2 Produksi Komoditas Perkebunan di Kabupaten Sumedang
Tahun 2020-2024 (Ton)
(Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Sumedang, 2025)

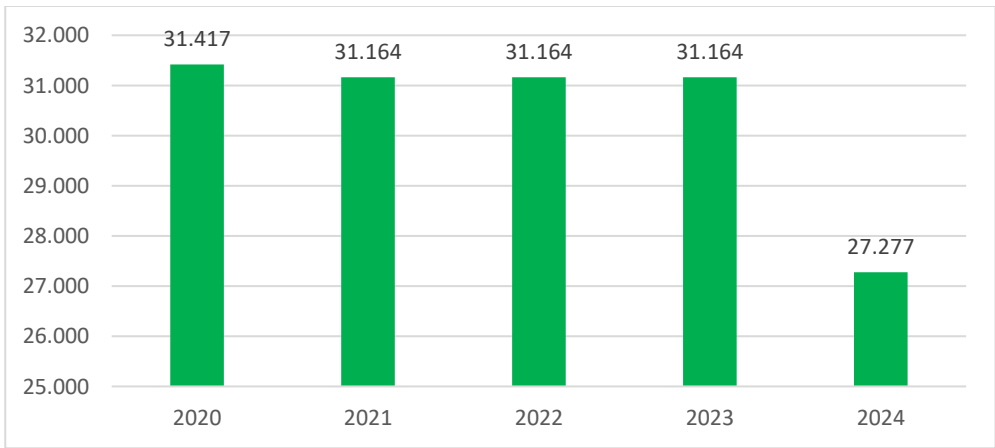
Rincian produksi komoditas perkebunan tahun 2024 sebagaimana disajikan pada table berikut.

Tabel 2.5 Rincian Produksi Komoditas Perkebunan di Kabupaten Sumedang Tahun 2024 (Ton)

No	Bulan	PRODUKSI (Ton)																				Jumlah	
		Tanaman Tahunan																		Tanaman Semusim			
		Aren	Cengkeh	Jambu Mete	Jarak	Kakao	Kapok	Karet	Kelapa dalam	Kelapa hibrida	Kemiri	Kemiri Sunan	Kenanga	Kopi Arabika	Kopi Robusta	Lada	Pinili	Pinang	Teh	Nilam	Tebu		Tembakau
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		21
1	Januari	127,32	-	-	-	2,52	-	-	138,66	5,26	-	-	-	-	-	-	-	-	29,65	-	-	131,08	434,50
2	Pebruari	122,04	-	-	-	2,36	-	-	134,36	5,51	-	-	-	-	-	-	-	-	26,46	-	-	446,24	736,97
3	Maret	126,81	-	-	-	1,41	-	-	136,88	5,33	-	-	-	-	-	-	-	-	28,43	-	-	112,36	411,22
	Triwulan I	376,18	-	-	-	6,29	-	-	409,90	16,10	-	-	-	-	-	-	-	-	84,54	-	-	689,68	1.582,69
4	April	134,96	-	-	-	2,10	-	-	158,21	5,19	-	-	-	50,97	14,09	-	4,39	-	36,38	-	-	125,13	531,43
5	Mei	126,43	-	-	-	1,76	-	-	161,77	5,59	-	-	-	328,19	127,14	-	5,51	-	29,65	-	-	79,58	865,63
6	Juni	125,92	285,49	-	-	1,71	-	-	147,55	5,33	-	-	-	474,39	120,29	-	2,05	-	26,75	0,01	-	79,48	1.268,95
	Triwulan II	387,32	285,49	-	-	5,57	-	-	467,53	16,11	-	-	-	853,55	261,52	-	11,95	-	92,77	0,01	-	284,19	2.666,02
7	Juli	129,87	635,44	-	-	1,63	-	-	154,66	5,33	-	-	-	261,98	39,01	-	-	-	25,37	-	-	26,86	1.280,14
8	Agustus	133,11	339,70	-	-	0,76	-	-	158,21	5,46	-	-	-	17,70	9,75	82,65	-	-	21,70	-	129,60	545,98	1.444,63
9	September	119,50	70,69	-	-	0,65	-	-	163,55	5,19	-	-	-	-	-	13,08	-	-	20,48	-	-	415,97	809,11
	Triwulan III	382,48	1.045,84	-	-	3,04	-	-	476,42	15,98	-	-	-	279,68	48,77	95,73	-	-	67,55	-	129,60	988,82	3.533,89
10	Oktober	134,62	-	-	-	1,24	-	-	157,86	5,19	2,03	-	-	-	-	-	-	-	19,87	-	-	79,27	400,09
11	November	130,09	-	-	-	1,39	-	-	158,39	5,06	3,57	-	-	-	-	-	-	-	21,43	-	-	9,20	329,13
12	Desember	132,81	-	-	-	1,46	-	-	159,64	4,80	1,89	-	-	-	-	-	-	-	21,12	-	-	-	321,72
	Triwulan IV	397,52	-	-	-	4,09	-	-	475,88	15,06	7,50	-	-	-	-	-	-	-	62,42	-	-	88,47	1.050,94
	JUMLAH	1.543,49	1.331,32	-	-	19,00	-	-	1.829,73	63,24	7,50	-	-	1.133,23	310,29	95,73	11,95	-	307,29	0,01	129,60	2.051,17	8.833,53

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Sumedang, 2025

Dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2028 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2028-2038, luas lahan peruntukan pertanian tanaman pangan seluas kurang lebih 30.069 Ha yang didalamnya meliputi lahan beririgasi dan lahan tidak beririgasi yang tersebar di wilayah Kabupaten Sumedang.



Grafik 2.3 Perkembangan Luas Lahan Sawah di Kabupaten Sumedang Tahun 2020-2023 (Ha)

(Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Sumedang, 2025)

Penurunan luas lahan sawah di Kabupaten Sumedang terjadi hampir merata di setiap kecamatan terutama di wilayah dengan jumlah penduduk tinggi seperti Jatinangor, Cimanggung, Tanjungsari, Sumedang Utara dan Sumedang Selatan serta di Kecamatan Conggeang akibat adanya pembangunan Bendung Cipanas.

Pada sektor pertanian, Kabupaten Sumedang telah membuat kebijakan terkait dengan perlindungan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan ketahanan pangan dan kedaulatan pangan daerah.

Tabel 2.6 Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Sumedang Tahun 2023

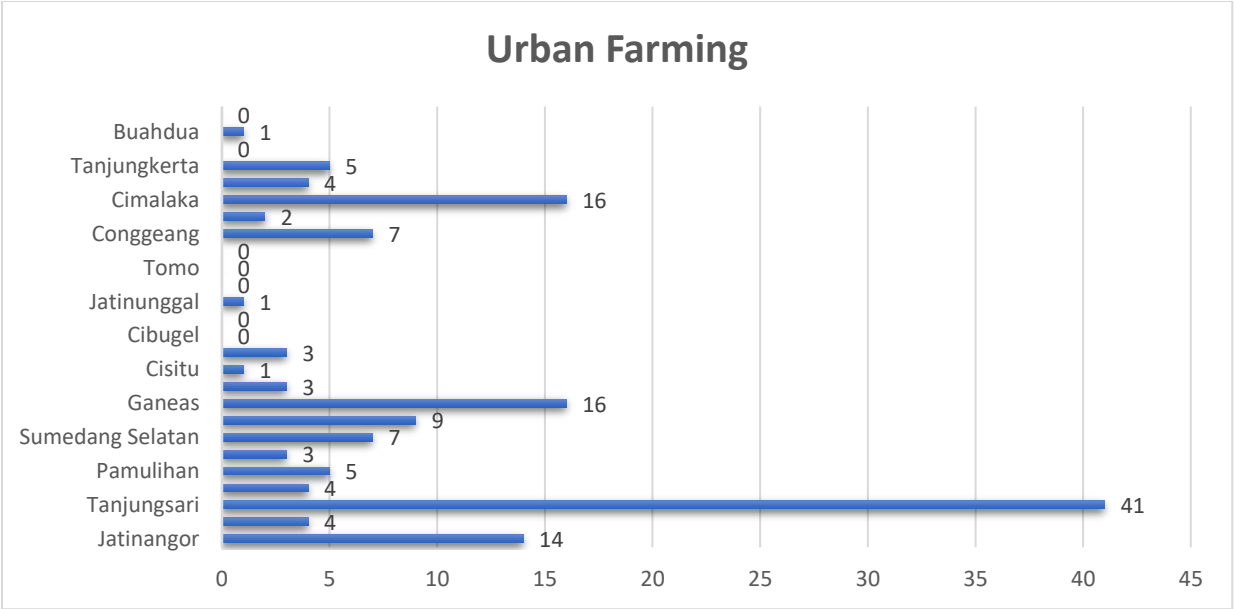
No	Kecamatan	Luas (Ha)			
		Sawah	Tegalan	LP2B	LCP2B
1	Buahdua	2.188,90	91,85	1.283,02	24,53
2	Cibugel	576,32	912,10	346,68	555,33
3	Cimalaka	838,22	107,11	639,03	14,65
4	Cimanggung	390,16	797,13	330,78	644,96
5	Cisarua	461,45	6,95	384,39	6,67
6	Cisitu	984,53	313,39	690,94	179,23
7	Conggeang	1.676,11	150,56	1203,03	93,51
8	Darmaraja	755,39	67,46	246,33	1,10
9	Ganeas	592,17	39,95	356,93	1,41
10	Jatigede	1011,92	306,10	330,66	77,20
11	Jatinangor	346,78	392,91	106,02	123,47
12	Jatinunggal	2325,23	275,17	1174,14	40,23
13	Pamulihan	627,85	1.399,42	536,00	1.041,38
14	Paseh	1.072,34	38,71	836,85	23,74
15	Rancakalong	1.012,58	406,78	890,55	337,49
16	Situraja	1.166,39	129,00	899,47	91,13
17	Sukasari	525,40	837,05	356,04	111,70
18	Sumedang Selatan	1.307,08	298,05	647,20	80,29
19	Sumedang Utara	720,14	99,17	355,77	30,76
20	Surian	805,45	166,47	343,74	109,76
21	Tanjungkerta	1.505,54	93,49	1.224,56	65,42
22	Tanjungmedar	1.315,79	1.100,29	1.070,22	818,41
23	Tanjungsari	578,88	627,08	334,22	363,46
24	Tomo	1.007,35	112,97	480,89	33,88

No	Kecamatan	Luas (Ha)			
		Sawah	Tegalan	LP2B	LCP2B
25	Ujungjaya	2.587,53	77,90	16,26	0
26	Wado	899,34	883,39	538,86	633,41
Total		27.278,85	9,730,43	15.649,61	5.503,13

Sumber. Dinas Pertanian Kabupaten Sumedang, 2024

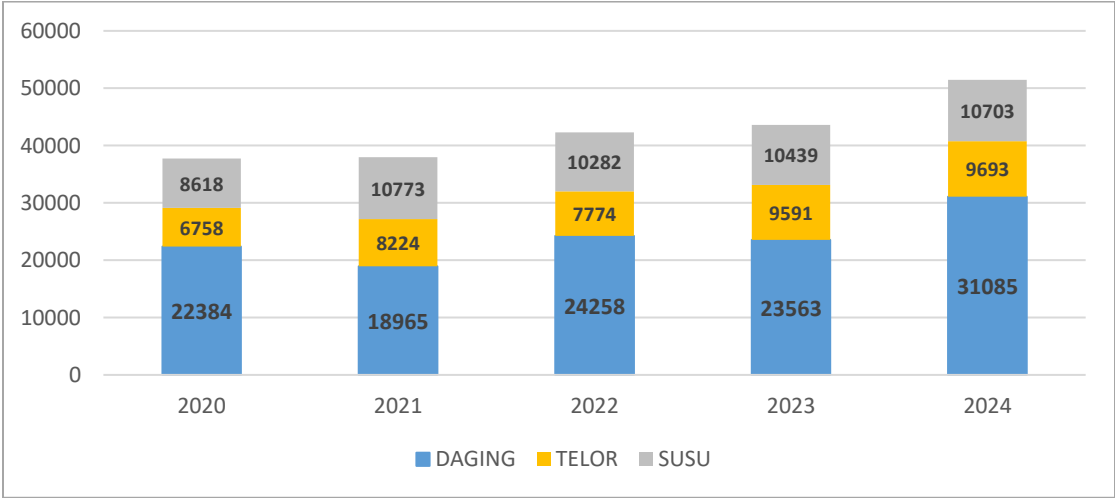
Lahan pertanian di perkotaan semakin sempit seiring dengan pertambahan penduduk perkotaan, sedangkan kebutuhan untuk konsumsi hasil pertanian cukup tinggi. Wilayah perkotaan memiliki ketergantungan hasil pertanian dari daerah lain, sehingga urban farming menjadi salah satu solusi dalam mengurangi ketergantungan tersebut sekaligus membantu pengendalian inflasi, mengembangkan ekonomi lokal, efisiensi biaya transportasi, meningkatkan partisipasi masyarakat/komunitas, dan meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan.

Beberapa aktivitas yang tergolong *urban farming* antara lain berkebun sayuran di taman kota, atap bangunan, atau dalam ruang tertutup seperti rumah kaca. Kegiatan yang dilakukan pada *urban farming* selain budidaya tanaman, dapat juga berupa usaha peternakan. Meski hanya dilakukan di beberapa wilayah perkotaan, pelaku usaha *urban farming* cukup banyak, yaitu sebesar 146 Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP) dan 146 unit Usaha Pertanian Perorangan (UTP). Kegiatan *urban farming* tersebar di seluruh Kecamatan di Kabupaten Sumedang. Pelaku kegiatan *urban farming* paling banyak berada di Kecamatan Tanjungsari sebanyak 41 RTUP dan 41unit UTP.



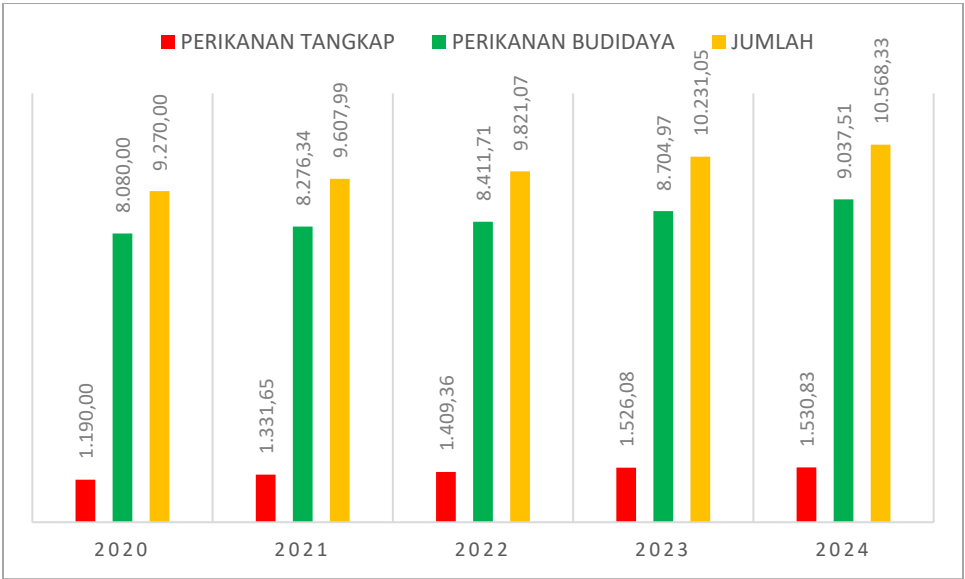
Grafik 2.4 Jumlah Rumah Tangga dan Usaha Pertanian Perorangan Urban Farming Menurut Kecamatan di Kabupaten Sumedang Tahun 2023
(Sumber: Sensus Pertanian, BPS (2023))

Selain sub sektor pangan, sub sektor peternakan di Kabupaten Sumedang juga pada periode tahun 2020-2024 secara total menghasilkan komoditas daging, telur dan susu yang terus meningkat, dengan produksi daging menjadi komoditas yang paling signifikan kenaikannya.



Grafik 2.5 Produksi Komoditas Peternakan Kabupaten Sumedang Tahun 2020-2024 (Ton)
(Sumber: Dinas Perikanan dan Peternakan Kab. Sumedang, 2025)

Untuk sub sektor perikanan di Kabupaten Sumedang juga pada periode tahun 2020-2024 menghasilkan komoditas ikan konsumsi yang terus meningkat. Pada tahun 2024 produksi ikan mencapai 10.568,33 ton dengan peningkatan signifikan pada komoditas perikanan budidaya.



Grafik 2.6 Produksi Komoditas Ikan Konsumsi Tahun 2019-2024 (Ton)
(Sumber: Dinas Perikanan dan Peternakan Kab. Sumedang, 2025)

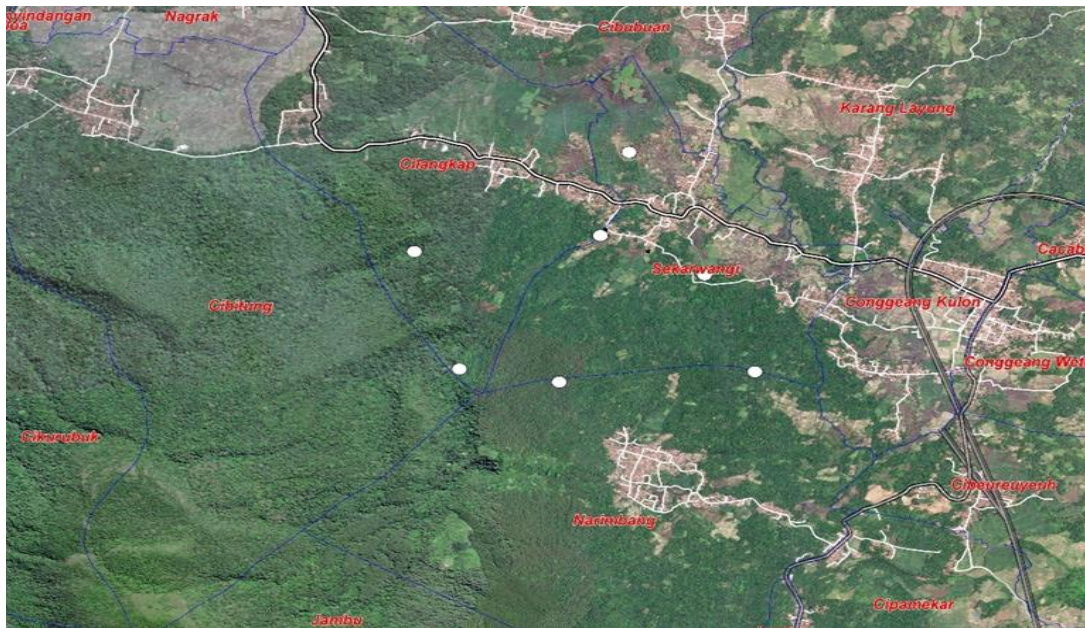
D. Geothermal (Panas Bumi)

Panas bumi merupakan salah satu energi terbarukan yang ada di Indonesia yang telah dimanfaatkan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP). Negara yang memiliki kapasitas kebangkitan dari PLTP yang besar adalah sebagai berikut (Bertani, 2012): (1) Amerika Serikat, dengan kapasitas PLTP sebesar 3.093 MW, (2) Philipina, dengan kapasitas PLTP sebesar 1.904 MW, dan (3) Indonesia, dengan kapasitas PLTP sebesar 1.197 MW.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi. Panas Bumi adalah sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas, uap air, serta batuan bersama mineral ikutan dan gas lainnya yang secara genetik tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem panas bumi. Dickson & Fanelli (2004) mendefinisikan panas bumi adalah panas yang terkandung dalam bumi yang terjadi akibat fenomena geologi.

Secara umum pemanfaatan panas bumi terdiri atas dua jenis, yaitu pemanfaatan langsung dan pemanfaatan tidak langsung. Panas bumi telah dimanfaatkan sampai dengan saat ini, baik untuk pemanfaatan langsung maupun pemanfaatan tidak langsung yaitu untuk pembangkit listrik (Fridleifsson, 2001). Pemanfaatan langsung panas bumi dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam kegiatan, antara lain pertanian, perikanan dan wisata. Pemanfaatan langsung panas bumi temperatur 20°c hingga lebih dari 100°C. Sesuai perkembangan teknologi saat ini, pemanfaatan langsung panas bumi ini dapat juga untuk pembangkit listrik. Air panas yang berasal dari manifestasi panas bumi dapat digunakan untuk menghasilkan listrik.

Kabupaten Sumedang memiliki potensi panas bumi yang signifikan, terutama di wilayah Gunung Tampomas. Kajian Badan Geologi menunjukkan bahwa Gunung Tampomas memiliki sumber daya panas bumi sebesar 100 megawatt (MW) dengan rencana pengembangan PLTP sebesar 55 MW. Gunung Tampomas telah ditetapkan menjadi salah satu Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) di Jawa Barat. Pemerintah telah merencanakan tahap eksekusi pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) yang juga menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) di Kabupaten Sumedang.



Gambar 2.6 Lokasi Geothermal (Panas Bumi) Gunung Tampomas
Kabupaten Sumedang

(Sumber: Bappppeda Sumedang 2024 (diolah))

E. Sumberdaya Air

Wilayah Kabupaten Sumedang terbagi habis oleh dua Daerah Aliran Sungai (DAS), yakni DAS Cimanuk yang berada bagian di Timur dan DAS Citarum yang berada di bagian barat Kabupaten Sumedang dengan kewenangan pengelolaannya untuk DAS Cimanuk di bawah Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk Cisanggarung dan DAS Citarum oleh BBWS Citarum.

Saat ini di kedua DAS tersebut sudah terbangun 3 bendungan besar yang juga merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN). Bendungan di DAS Cimanuk terdiri dari:

1. Bendungan Jatigede: Untuk pemenuhan kebutuhan air baku pertanian seluas +90.000 Ha di wilayah Cirebon, Indramayu, dan Majalengka Pengendalian banjir seluas +14.000 Ha dan sumber pemasok PLTA sebesar 110 MW (Jawa – Bali)

2. Bendungan Cipanas: mempunyai kapasitas 190,52 juta m³ dengan luasan 1.315,95 hektar, dibangun untuk meredam banjir hingga 487,75 m³/detik. Bendungan ini juga mengairi 9.273 hektar irigasi, menyuplai 850 liter/detik air baku (250 liter/detik untuk Kabupaten Indramayu dan 600 liter/detik untuk Kabupaten Sumedang), serta potensial untuk menghasilkan listrik 3 MW dan fungsi lainnya.

Adapun untuk bendungan di DAS Citarum yakni di sungai Cipunagara telah berdiri Bendungan Sadawarna yang sangat potensial bisa mengairi areal irigasi seluas 4.500 Ha, air baku 0,12 m³/detik, dan mereduksi banjir 117 m³/detik. Ketiga bendungan tersebut di atas memiliki potensi besar untuk dikembangkan, selain untuk irigasi dan air baku juga untuk pengembangan perikanan, energi listrik, *solar cell (renewable energy)* dan pariwisata.

2.1.1.1.3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

A. Kinerja Layanan Ekosistem/Jasa Lingkungan Hidup

Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup merupakan pertimbangan penting dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan. Keduanya dapat digunakan untuk mengetahui apakah kapasitas sumber daya yang tersedia cukup untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Daya dukung lingkungan atau *carrying capacity* dimaksudkan sebagai total maksimum populasi manusia yang dapat didukung oleh suatu lingkungan tertentu secara tak terbatas tanpa mengakibatkan degradasi lingkungan (*Feachmen, 1973 dalam Johan Iskandar, 2009*), sedangkan daya tampung lingkungan adalah merupakan kemampuan lingkungan untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Daya tampung lingkungan mengacu pada batas maksimum beban yang dapat ditoleransi oleh lingkungan tanpa mengalami degradasi atau kerusakan serius. Konsep ini penting dalam perencanaan dan pengelolaan wilayah untuk memastikan bahwa pembangunan dan aktivitas manusia tidak melebihi kapasitas lingkungan

Gambaran umum yang dapat digunakan untuk melihat kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan di suatu daerah adalah dengan menghitung Jasa Lingkungan Hidup (JLH). Jasa Lingkungan hidup/Jasa ekosistem adalah produk sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berupa manfaat baik langsung (*tangible*) dan/atau tidak langsung (*intangible*). Dengan demikian daya dukung dan daya tampung lingkungan adalah kapasitas JLH

dalam mendukung kehidupan makhluk hidup di suatu wilayah ekoregion. Ekoregion merupakan wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi antara alam dengan manusia yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).

Hal di atas menegaskan bahwa ekosistem dengan kualitas yang baik serta telah menyediakan jasa lingkungannya berdasarkan fungsi ekoregionnya maka akan membuat nilai DDDTLH pada suatu ekoregion semakin tinggi (Riqqi, et al., 2019).

Terdapat 4 (empat) jenis JLH, yaitu layanan penyediaan (*provisioning*), pengaturan (*regulating*), budaya (*cultural*), dan pendukung (*supporting*) (*Millennium Ecosystem Assessment, 2005*). Klasifikasi keempat JLH dapat dilihat pada Tabel 2.7.

Tabel 2.7 Klasifikasi Jasa Lingkungan

Klasifikasi Jasa Lingkungan		Definisi Operasional
Fungsi Penyediaan (<i>Provisioning</i>): jasa/produk yang didapat dari lingkungan		
1	Pangan	Hasil laut, pangan dari hutan (tanaman dan hewan), hasil pertanian dan perkebunan untuk pangan, hasil peternakan
2	Air bersih	Penyediaan air dari tanah (termasuk kapasitas penyimpanannya), penyediaan air dari sumber permukaan
3	Serat (<i>fiber</i>)	Hasil hutan, hasil laut, hasil pertanian dan perkebunan untuk material
4	Bahan bakar (<i>energi/fuel</i>)	Penyediaan kayu bakar dan bahan bakar yang berasal dari fosil
5	Sumber daya genetik	Penyediaan sumber daya genetik termasuk flora dan fauna
Fungsi Pengaturan (<i>Regulating</i>): manfaat yang didapatkan dari pengaturan lingkungan		
1	Iklim	Pengaturan suhu, kelembaban dan hujan, pengendalian gas rumah kaca dan karbon
2	Tata aliran air dan banjir	Siklus hidrologi, serta infrastruktur alam untuk penyimpanan air, pengendalian banjir, dan pemeliharaan air
3	Pencegahan dan perlindungan dari bencana	Infrastruktur alam pencegahan dan perlindungan dari kebakaran lahan, erosi, abrasi, longsor, badai dan tsunami
4	Pemurnian air	Kapasitas badan air dalam mengencerkan, mengurai dan menyerap pencemar
5	Pengolahan dan penguraian limbah	Kapasitas lokasi dalam menetralkan, mengurai dan menyerap limbah dan sampah
6	Pemeliharaan kualitas udara	Kapasitas mengatur sistem kimia udara

Klasifikasi Jasa Lingkungan		Definisi Operasional
7	Penyerbukan alami (<i>pollination</i>)	Distribusi habitat spesies pembantu proses penyerbukan alami
8	Pengendalian hama dan penyakit	Distribusi habitat <i>spesies trigger</i> dan pengendali hama dan penyakit
Fungsi Budaya (<i>Cultural</i>): manfaat yang tidak bersifat material/terukur dari lingkungan		
1	Spiritual dan warisan leluhur	Ruang dan tempat suci, peninggalan sejarah dan leluhur
2	Tempat tinggal dan ruang hidup (<i>sense of place</i>)	Ruang untuk tinggal dan hidup sejahtera, jangkar “kampung halaman” yang memiliki nilai sentimental
3	Rekreasi dan ekoturisme	Fitur lanskap, keunikan alam, atau nilai tertentu yang menjadi daya tarik wisata
4	Estetika	Keindahan alam yang memiliki nilai jual
5	Pendidikan dan pengetahuan	Memiliki potensi untuk pengembangan pendidikan dan pengetahuan
Fungsi Pendukung (<i>Supporting</i>): jasa lingkungan yang diperlukan manusia		
1	Pembentukan lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan	Kesuburan tanah
2	Siklus hara (<i>nutrient</i>)	Kesuburan tanah, tingkat produksi pertanian
3	Produksi primer	Produksi oksigen, penyediaan habitat spesies
4	Biodiversitas	Habitat dan keanekaragaman hayati

Sumber: Millenium Ecosystem Assessment (2005); Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2011)

Di Kabupaten Sumedang, telah dilakukan perhitungan nilai JLH berdasarkan data bentang lahan, vegetasi alami, dan penutup lahan. Perhitungan nilai JLH dilakukan menggunakan bobot dari *expert judgement* atau penilaian ahli untuk masing-masing data tersebut. Hasil perhitungan nilai JLH akan bervariasi dengan nilai maksimal 5, sesuai dengan bobot dari para pakar. Hasil penilaian tersebut kemudian diklasifikasikan menjadi 5 kelas, yaitu sangat rendah (<1,8), rendah (1,8 – 2,6), sedang (2,6 – 3,4), tinggi (3,4 – 4,2), dan sangat tinggi (4,2 – 5).

Pada Tabel 2.7. dapat dilihat luasan masing-masing JLH pada tiap kelasnya. Angka luasan dengan cetak tebal menunjukkan klasifikasi dengan luasan tertinggi di JLH tersebut. Tidak ada satupun jenis JLH yang memiliki luas dominan di klasifikasi JLH sangat tinggi. Sementara itu, terdapat tujuh jenis JLH yang luasnya dominan pada klasifikasi rendah. Ketujuh JLH tersebut adalah JLH pembentukan lapisan tanah, JLH pemeliharaan udara, JLH pendukung keanekaragaman hayati, JLH pengaturan iklim, JLH penguraian limbah, JLH penyediaan serat, dan JLH penyediaan sumber daya genetik. Selain itu, terdapat pula enam JLH yang luasnya dominan di klasifikasi sedang, seperti JLH mitigasi bencana, JLH pengaturan tata air dan banjir, JLH pengendalian

hama, JLH penyediaan air, JLH penyediaan pangan, dan JLH penyerbukan alami. Hanya terdapat dua JLH yang luasnya dominan pada klasifikasi tinggi, yaitu JLH pendukung produksi primer dan JLH pendukung siklus hara.

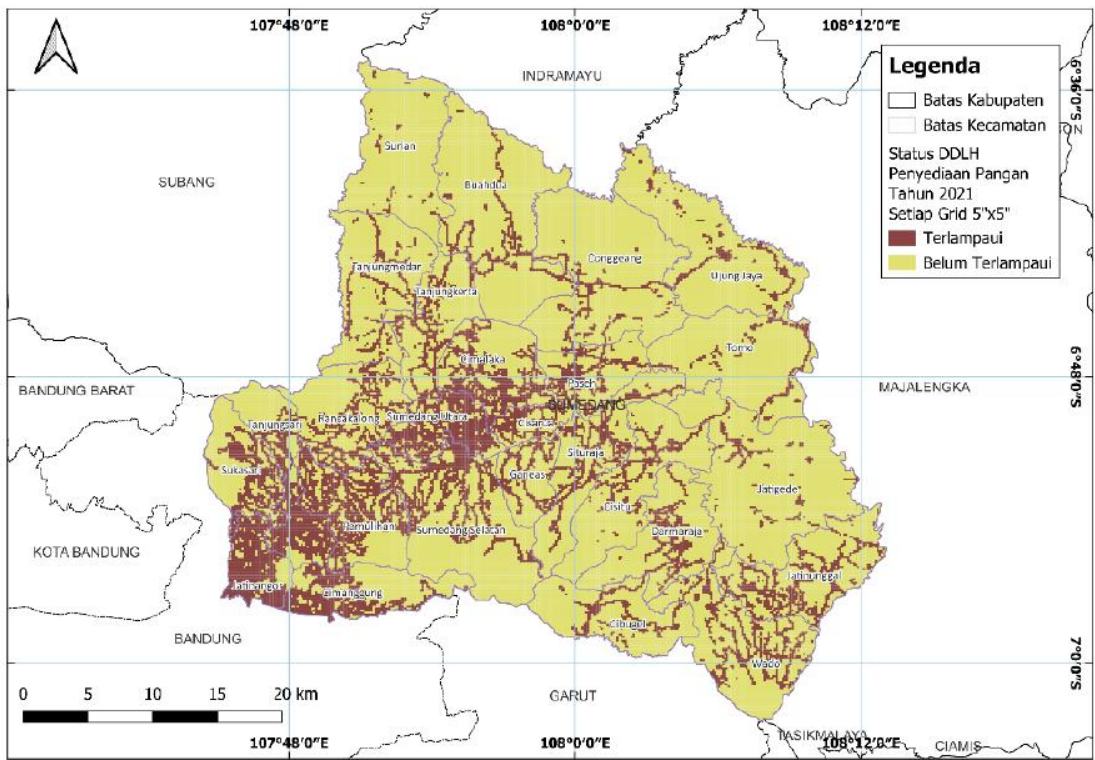
Tabel 2.8 Luas Jasa Lingkungan Hidup pada masing-masing klasifikasi dalam Hektar (Ha)

Klasifikasi Jasa Lingkungan Hidup	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
Mitigasi Bencana	0	48.859,49	63.426,33	3.531,07	39.750,95
Pembentukan Lapisan Tanah	2.055,61	80.817,50	34.320,18	6.663,46	31.711,09
Pemeliharaan Udara	4.888,91	107.396,91	6.792,59	4.782,60	31.706,83
Pendukung Keanekaragaman Hayati	6.528,46	62.956,88	42.832,14	11.589,83	31.660,52
Pendukung Produksi Primer	2.584,23	12.741,71	44.873,76	70.146,61	25.221,53
Pendukung Siklus Hara	1.340,06	7.793,95	42.749,08	90.014,15	13.670,61
Pengaturan Iklim	4.888,91	83.699,26	30.509,38	4.763,46	31.706,83
Pengaturan Tata Air dan Banjir	0	30.766,09	86.361,02	1.951,31	36.489,42
Pengendalian Hama	4.888,91	44.097,45	63.926,30	366,35	42.288,83
Penguraian Limbah	1.378,96	101.219,49	51.095,13	1.874,26	0
Penyediaan Air	1.712,64	54.482,16	94.692,76	2.229,74	2.450,53
Penyediaan Pangan	1.844,05	48.947,19	67.219,72	12.238,94	25.317,94
Penyediaan Serat	6.528,46	106.003,17	7.062,37	35.973,84	0
Penyediaan Sumber Daya Genetik	3.786,32	61.103,00	54.602,36	6.529,71	29.546,45
Penyerbukan Alami	4.888,91	44.097,45	63.299,46	6.340,83	36.941,18

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Sumedang, Tahun 2025-2045

B. Ambang Batas dan Status DDLH Penyedia Pangan

Pada Gambar 2.7, dapat dilihat hasil analisis status DDLH penyedia pangan Kabupaten Sumedang tahun 2021. Hampir semua wilayah di Kabupaten Sumedang (77,6% wilayah Kabupaten Sumedang) memiliki status daya dukung penyedia pangan yang belum melampaui.



Gambar 2.7 Status DDLH penyedia pangan di Kabupaten Sumedang Tahun 2021 dalam sistem grid 5"x5"
(Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029)

Apabila ditinjau di setiap kecamatan, akumulasi ketersediaan, kebutuhan, selisih ketersediaan, ambang batas penduduk, dan luasan yang belum melampaui ambang batas penyedia pangan di Kabupaten Sumedang terdapat pada Tabel 2.8. Berdasarkan hasil akumulasi tersebut, Kecamatan Surian memiliki luasan yang belum melampaui ambang batas DDLH penyedia pangan yang paling luas (97,3% luas wilayahnya), diikuti dengan Kecamatan Jatigede dan Kecamatan Conggeang dengan masing-masing 94,1% dan 92,4% wilayahnya belum melampaui ambang batas DDLH penyedia pangan. Sementara itu, luasan terkecil wilayah yang belum melampaui DDLH pangannya adalah Kecamatan Jatinangor sebesar 21,6% dan Kecamatan Sumedang Utara sebesar 29%. Hanya kedua kecamatan tersebut yang memiliki luas status DDLH pangan belum melampaui kurang dari 50% dari total luas wilayahnya karena merupakan wilayah padat penduduk, pusat ekonomi dan pemerintahan Kabupaten Sumedang. Selain itu, 24 dari 26 kecamatan di Kabupaten Sumedang memiliki status DDLH penyedia pangan yang baik dan belum melampaui ambang batas.

Tabel 2.9 Akumulasi ketersediaan, kebutuhan, selisih ketersediaan, ambang batas penduduk, dan status DDLH penyedia pangan disetiap Kecamatan di Kabupaten Sumedang tahun 2021

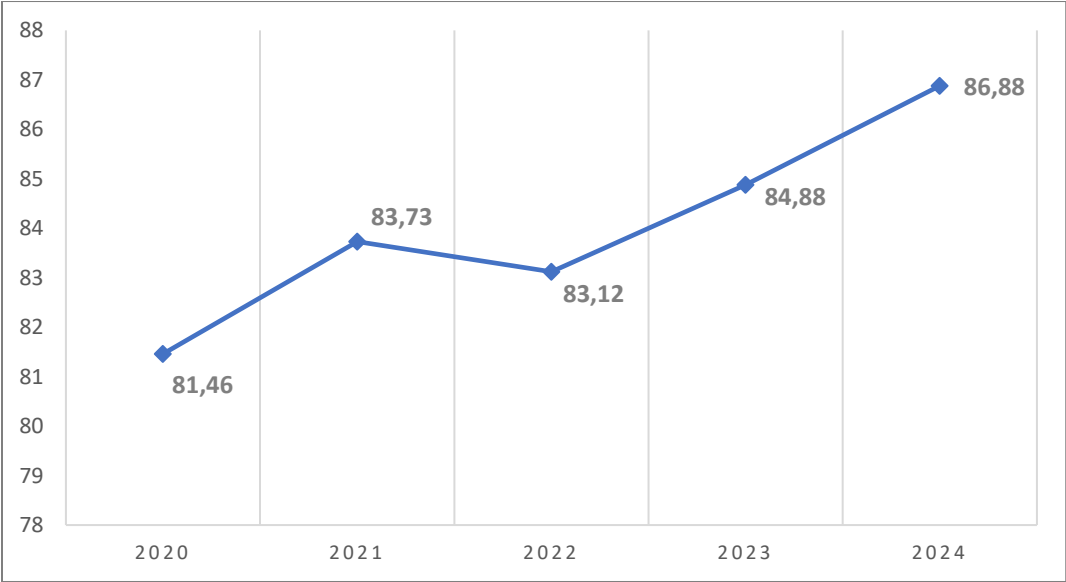
Kecamatan	Ketersediaan Pangan (juta kkal/tahun)	Kebutuhan Pangan (juta kkal/tahun)	Selisih Ketersediaan Pangan (juta kkal/tahun)	Ambang Batas Penduduk (jiwa)	Luas wilayah yang Belum Melampaui (%)	Status DDLH Pangan
BUAHDUA	75.784	25.325	50.460	96.294	90,9%	Belum Melampaui
CIBUGEL	33.669	18.701	14.967	42.960	84,9%	Belum Melampaui
CIMALAKA	31.125	48.971	-17.846	39.490	58,2%	Belum Melampaui
CIMANGGUNG	28.215	69.195	-40.980	35.868	56,2%	Belum Melampaui
CISARUA	10.138	15.927	-5.789	12.922	53,4%	Belum Melampaui
CISITU	40.598	23.823	16.774	51.839	86,2%	Belum Melampaui
CONGGEANG	68.003	22.279	45.724	86.544	92,4%	Belum Melampaui
DARMARAJA	37.541	28.101	9.440	47.985	82,2%	Belum Melampaui
GANEAS	16.538	19.929	-3.391	21.109	69,6%	Belum Melampaui
JATIGEDE	65.699	17.137	48.562	83.885	94,1%	Belum Melampaui
JATINANGOR	16.891	76.873	-59.981	21.555	21,6%	Melampaui
JATINUNGGAL	42.285	35.395	6.890	53.677	72,0%	Belum Melampaui
PAMULIHAN	35.714	49.194	-13.481	45.438	47,9%	Belum Melampaui
PASEH	22.225	29.406	-7.181	28.254	68,0%	Belum Melampaui
RANCAKALONG	37.038	31.326	5.711	47.101	70,3%	Belum Melampaui
SITURAJA	36.352	32.779	3.573	46.490	73,7%	Belum Melampaui
SUKASARI	27.391	25.682	1.709	34.827	64,4%	Belum Melampaui
SUMEDANG SELATAN	61.015	62.005	-990	78.116	73,3%	Belum Melampaui
SUMEDANG UTARA	20.604	77.665	-57.061	26.251	29,0%	Melampaui
SURIAN	46.667	8.666	38.001	59.507	97,3%	Belum Melampaui
TANJUNGKERTA	32.533	26.641	5.891	41.337	75,0%	Belum Melampaui
TANJUNGMEDAR	43.888	20.615	23.274	55.763	85,8%	Belum Melampaui
TANJUNGSARI	28.457	67.897	-39.439	36.131	50,9%	Belum Melampaui
TOMO	50.840	18.232	32.608	64.550	91,8%	Belum Melampaui
UJUNG JAYA	66.793	24.746	42.048	84.864	91,5%	Belum Melampaui
WADO	51.796	33.999	17.797	65.864	76,5%	Belum Melampaui
KABUPATEN SUMEDANG	1.027.799	910.509	117.290	1.308.621	77,6%	Belum Melampaui

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Sumedang, Tahun 2025-2045

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

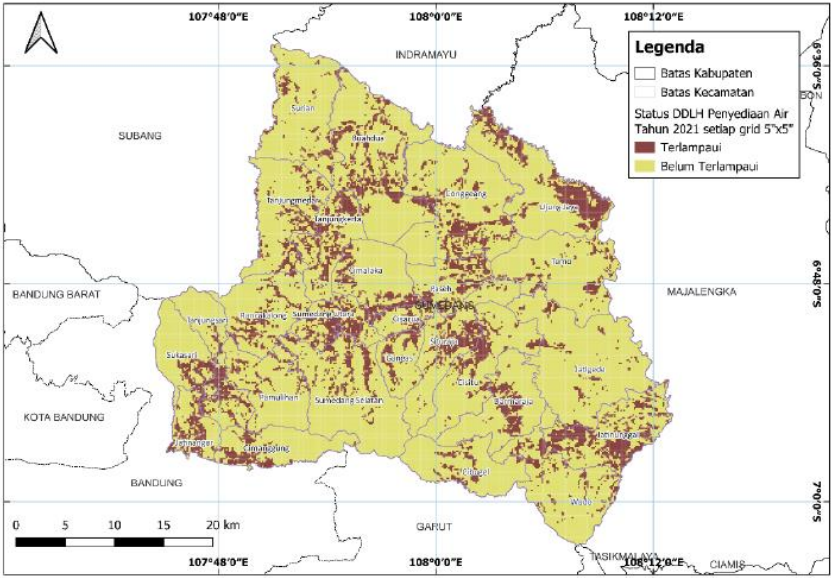
Skor Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang 2 (dua) tahun terakhir menunjukkan tren meningkat dari 84,88 tahun 2023 menjadi 86,88 pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan ketahanan pangan di Kabupaten Sumedang terus meningkat.



Grafik 2.7 Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2024
(Sumber: Badan Pangan Nasional (BAPANAS))

C. Ambang Batas dan Status DDLH Penyedia Air

Berdasarkan hasil analisis status DDLH penyedia air (Gambar 2.8) wilayah dengan status telah melampaui ambang batas sangat *sporadic* dan terdiri dari petak-petak kecil. Wilayah dengan status DDLH penyedia air telah melampaui paling luas terdapat di Kecamatan Jatinunggal, Paseh, dan Ganeas. Wilayah ini memiliki lahan pertanian yang besar. Sebaran dan luasan wilayah yang memiliki status belum dan sudah melampaui ambang batas dapat diketahui dengan pendekatan kuantitatif dan penggunaan sistem grid.



Gambar 2.8 Status DDLH penyedia air terhadap ambang batas tahun 2021 di Kabupaten Sumedang dalam sistem grid 30”x30”
(Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029)

Tabel 2.10 memperlihatkan nilai ketersediaan, kebutuhan, selisih ketersediaan, ambang batas populasi, dan luasan berstatus belum melampaui

per kecamatan secara akumulatif di Kabupaten Sumedang tahun 2021. Secara umum, 92,8% wilayah di Kabupaten Sumedang belum melampaui ambang batas lingkungan dalam hal penyediaan air. Hal tersebut berarti bahwa sebagian kebutuhan air masih dapat terpenuhi oleh ketersediaan air di tiap wilayah itu sendiri.

Tabel 2.10 Akumulasi ketersediaan, kebutuhan, selisih ketersediaan, ambang batas penduduk, dan status DDLH penyedia air di setiap kecamatan di Kabupaten Sumedang tahun 2021

Kecamatan	Ketersediaan Air (ribu m3/tahun)	Kebutuhan Air (ribu m3/tahun)	Selisih Ketersediaan Air (ribu m3/tahun)	Ambang Batas Penduduk	Luas Wilayah yang Belum Melampaui (%)	Status DDLH Air
BUAHDUA	1,220,337.3	82,432.3	86,135.1	1,028,803	94.7%	Belum Melampaui
CIBUGEL	262,272.0	31,553.6	43,457.2	526,421	94.5%	Belum Melampaui
CIMALAKA	320,708.5	30,659.3	38,684.4	509,973	93.5%	Belum Melampaui
CIMANGGUNG	500,725.9	24,669.2	38,190.1	530,052	97.4%	Belum Melampaui
CISARUA	78,972.3	14,440.9	8,145.5	114,562	89.6%	Belum Melampaui
CISITU	316,245.8	42,405.7	48,041.8	586,096	89.7%	Belum Melampaui
CONGGEANG	1,556,260.8	72,898.4	78,604.9	937,787	89.9%	Belum Melampaui
DARMARAJA	292,437.0	29,918.3	53,719.8	657,278	93.1%	Belum Melampaui
GANEAS	128,825.0	21,107.4	15,737.0	207,443	85.4%	Belum Melampaui
JATIGEDE	511,779.6	50,043.5	96,327.4	1,136,270	96.9%	Belum Melampaui
JATINANGOR	302,946.1	21,641.7	15,990.6	282,986	96.9%	Belum Melampaui
JATINUNGGAL	329,390.3	68,776.5	25,430.3	339,252	78.6%	Belum Melampaui
PAMULIHAN	306,558.3	35,920.3	43,646.5	567,636	97.8%	Belum Melampaui
PASEH	173,129.6	34,243.4	15,272.3	214,148	78.7%	Belum Melampaui
RANCAKALONG	312,792.6	39,195.1	43,321.4	541,118	92.8%	Belum Melampaui
SITURAJA	283,169.9	44,580.9	36,406.7	462,973	87.6%	Belum Melampaui
SUKASARI	491,248.9	25,628.7	35,394.8	442,093	95.8%	Belum Melampaui
SUMEDANG SELATAN	485,083.2	50,043.4	85,892.5	1,072,808	96.2%	Belum Melampaui
SUMEDANG UTARA	160,530.1	31,781.4	14,122.1	262,371	89.3%	Belum Melampaui
SURIAN	616,314.5	45,485.9	58,483.4	687,551	94.6%	Belum Melampaui
TANJUNGPURA	425,262.5	48,147.4	24,332.2	315,449	87.0%	Belum Melampaui
TANJUNGMEDAR	579,617.8	54,412.2	43,366.6	527,824	89.1%	Belum Melampaui
TANJUNGSARI	346,456.3	29,080.1	34,319.8	483,569	94.8%	Belum Melampaui
TOMO	396,029.8	40,448.6	72,817.4	865,819	99.7%	Belum Melampaui
UJUNG JAYA	666,919.5	80,380.7	68,427.6	823,261	99.6%	Belum Melampaui
WADO	402,846.3	46,660.6	68,555.0	836,398	97.1%	Belum Melampaui
KABUPATEN SUMEDANG	11,466,859.9	1,096,555.5	1,192,822.4	14,959,941	92.8%	Belum Melampaui

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029

2.1.1.1.4. Perubahan Iklim dan Ketahanan Bencana

Pemanasan global dan perubahan iklim sampai sekarang masih menjadi permasalahan utama yang harus diperhatikan karena dapat memberikan dampak pada berbagai sektor. Pada sektor pertanian perubahan iklim akan mempengaruhi pola tanam, menurunkan hasil tanaman, merubah intensitas tanam, tingkat serangan hama penyakit; dan lain sebagainya (DLH, 2019).

Dengan meningkatnya jumlah penduduk, berkurangnya luasan hutan, belum memadainya saluran pengendali banjir dan pengelolaan sampah, peningkatan bangunan yang berpotensi mengalami kerusakan dengan runtuhannya yang dapat menyebabkan adanya korban jiwa, penataan tata ruang wilayah yang belum memperhatikan risiko iklim dan meningkatnya frekuensi kejadian bencana akan menyebabkan tingkat kerentanan semakin tinggi. Kerentanan (vulnerability) adalah kondisi yang ditentukan berdasarkan faktor atau proses fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan, yang meningkatkan kerawanan (*susceptibility*) suatu komunitas untuk terkena dampak bahaya

(DLH, 2019). Semakin tinggi tingkat kerentanan maka akan berisiko pada semakin tingginya potensi dampak yang akan ditimbulkan oleh perubahan iklim.

Pengurangan risiko dan dampak, baik untuk perubahan iklim atau bencana pada umumnya, dapat dilakukan dengan melakukan kajian terkait potensi bahaya, tingkat kerentanan, dan/atau kapasitas adaptasi suatu wilayah. Seperti yang dilakukan oleh BNPB di mana membahas terkait Kajian kerentanan yang dapat diperoleh pada portal InaRISK dengan keterangan bahwa tahun dasar yang digunakan pada kajian tersebut adalah tahun 2023, serta divisualisasikan per Kecamatan oleh BPBD Kabupaten Sumedang.

Potensi bencana alam yang banyak dijumpai di Kabupaten Sumedang pada umumnya berupa gerakan tanah, erosi, banjir, angin puting beliung, dan gempa bumi. Gerakan tanah yang terjadi di Kabupaten Sumedang pada umumnya dipengaruhi oleh sifat fisik batuan dasar dan tanah pelapukan pembentuk lereng terutama pada daerah-daerah yang dibentuk oleh batuan dasar batu lempung ataupun terdapatnya lapisan batu lempung dalam batuan dasar pembentuk lereng.

Sifat fisik batuan/tanah pelapukan merupakan salah satu faktor alam penyebab terjadinya gerakan tanah disamping faktor-faktor alam lainnya seperti curah hujan, struktur geologi (perlipatan, sesar dan kekar), stratigrafi (kedudukan bidang perlapisan terhadap kemiringan lerengnya), tata guna lahan, morfologi, dan kegempaan. Kawasan rawan bencana Gerakan tanah di Kabupaten Sumedang memiliki luas kurang lebih 21.671 hektar yang tersebar di sebagian wilayah Sumedang. Sedangkan bencana banjir sering disebabkan oleh drainase yang kurang memadai dan banyaknya tutupan lahan. Secara rinci Kawasan bencana Kabupaten Sumedang disajikan pada Tabel 2.11 di bawah ini.

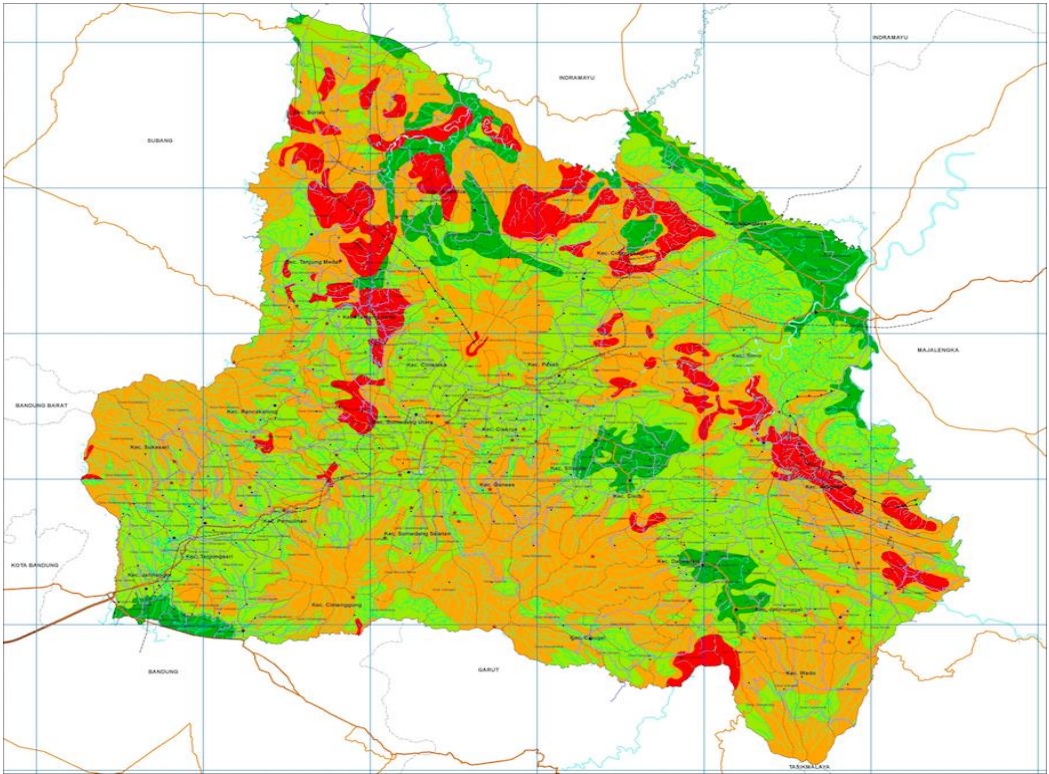
Tabel 2.11 Kawasan Rawan Bencana

No	Kawasan Bencana	Lokasi	Keterangan
1	Gerakan Tanah	Tersebar di sebagian wilayah Kabupaten, terutama di sekitar Kecamatan Surian, Kecamatan Buahdua, Kecamatan Cimalaka, Kecamatan Tanjungkerta, Kecamatan Conggeang, Kecamatan Rancakalong, Kecamatan Tomo, Kecamatan Jatigede, Kecamatan Darmaraja, dan Kecamatan Jatinunggal	Luas kurang lebih 21.671 Ha

No	Kawasan Bencana	Lokasi	Keterangan
2	Banjir	a. Kecamatan Jatinangor; b. Kecamatan Cimanggung; c. Kecamatan Ujungjaya; d. Kecamatan Tomo; e. Kecamatan Sumedang Utara; dan f. Kecamatan Sumedang Selatan.	Terjadi akibat dari drainase yang kurang memadai, tutupan lahan, dan peningkatan debit air di beberapa titik lintasan sungai.
3	Puting Beliung	a. Kecamatan Cimanggung; b. Kecamatan Cimalaka; c. Kecamatan Cisarua; d. Kecamatan Ujungjaya; dan e. Kecamatan Wado.	-
4	Gempa Bumi	a. Kecamatan Jatinangor; b. Kecamatan Cimanggung; c. Kecamatan Pamulihan; d. Kecamatan Tanjungsari; e. Kecamatan Sukasari; f. Kecamatan Rancakalong; g. Kecamatan Sumedang Utara; h. Kecamatan Sumedang Selatan; i. Kecamatan Ganeas; j. Kecamatan Cisarua; k. Kecamatan Cimalaka; l. Kecamatan Paseh; m. Kecamatan Tanjungkerta; n. Kecamatan Tanjungmedar; o. Kecamatan Situraja; p. Kecamatan Cisitu; q. Kecamatan Darmaraja; r. Kecamatan Wado; s. Kecamatan Jatinunggal; t. Kecamatan Jatigede; u. Kecamatan Tomo; v. Kecamatan Ujungjaya; w. Kecamatan Conggeang; x. Kecamatan Buahdua; dan y. Kecamatan Surian.	-

Sumber: Perda No 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038

Secara umum daerah rawan bencana di Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada Gambar 2.9 di bawah ini:



Gambar 2.9 Peta Rawan Bencana Kabupaten Sumedang
(Sumber: RTRW Kabupaten Sumedang 2018-2038)

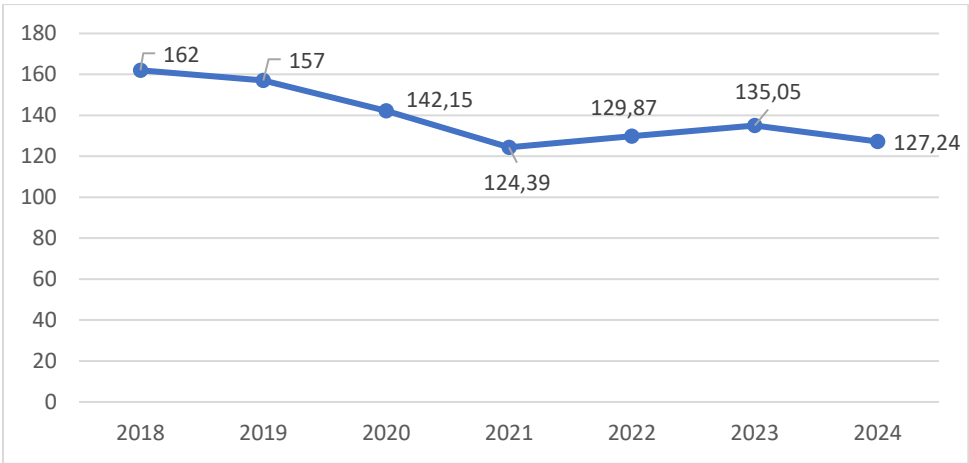
Berdasarkan data yang bersumber dari InaRISK BNPB Tahun 2023, Wilayah yang Rentan Bencana Per Kecamatan di Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut:

Tabel 2.12 Wilayah yang Rentan Per Kecamatan pada Kabupaten Sumedang

Kecamatan	Banjir	Kebakaran Hutan dan Lahan	Tanah Longsor	Kekeringan	Cuaca Ekstrem
Buahdua					
Cibugel					
Cimalaka					
Cimanggung					
Cisarua					
Cisitu					
Conggeang					
Darmaraja					
Ganeas					
Jatigede					
Jatinangor					
Jatinunggal					
Pamulihan					
Paseh					
Rancakalong					
Situraja					
Sukasari					
Sumedang Selatan					
Sumedang Utara					
Surian					
Tanjungkerta					
Tanjungmedar					
Tanjungsari					
Tomo					
Wado					
Ujung Jaya					

Sumber: InaRISK BNPB, 2023

Indeks Risiko Bencana di Kabupaten Sumedang dari tahun 2022-2023 menunjukkan tren meningkat namun kembali menurun pada tahun 2024 sebagaimana tersaji pada grafik berikut.

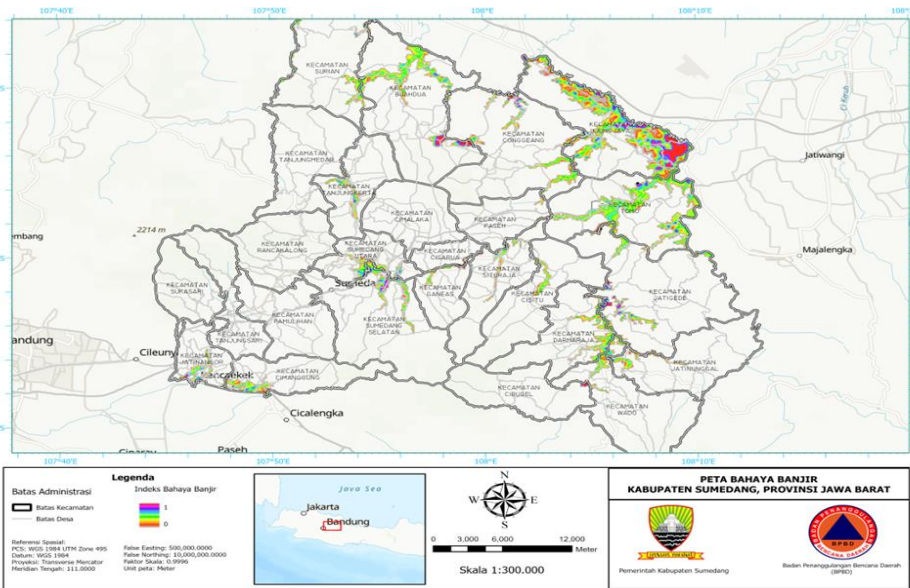


Grafik 2.8 Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2024
(Sumber: BPBD Kabupaten Sumedang, 2025)

Beberapa potensi kerentanan bencana di Kabupaten Sumedang dianalisis dengan menggunakan 4 (empat) komponen yaitu komponen sosial, fisik, ekonomi dan lingkungan. Dari analisis keempat komponen tersebut dapat digambarkan kerentanan bencana di Kabupaten Sumedang, antara lain:

1. Kerentanan Bencana Banjir

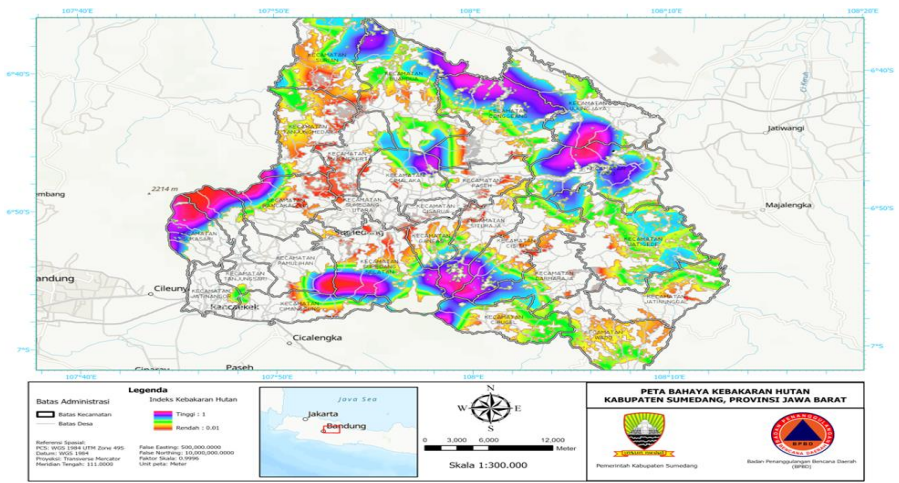
Kerentanan banjir cenderung tinggi di wilayah pinggiran sungai utama, terutama Kecamatan Sumedang Utara dan Kecamatan Ujungjaya. Di wilayah bagian utara Kabupaten Sumedang berpotensi mengalami bencana banjir lebih tinggi dikarenakan wilayah tersebut merupakan pesisir sungai.



Gambar 2.10 Peta Wilayah Kerentanan Bencana Banjir di Kabupaten Sumedang
(Sumber: KLHS RPJMD, 2024 (InaRISK BNPB, 2023))

2. Kerentanan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan

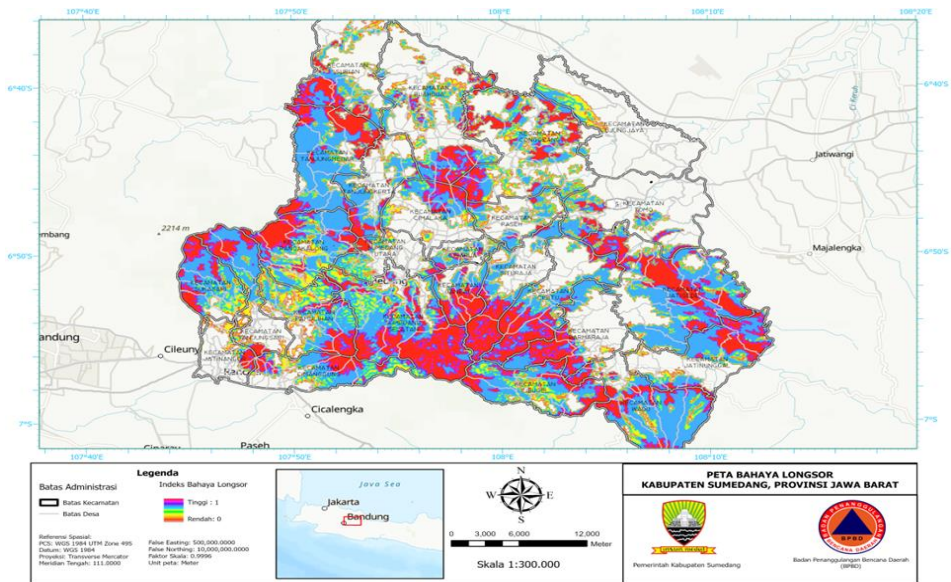
Kabupaten Sumedang terdapat 4 (empat) area yang memiliki tingkat kerentanan kebakaran hutan yang tinggi yang tersebar secara merata di seluruh area Kabupaten Sumedang. Tingkat kerentanan bencana dibedakan berdasarkan klasifikasi warna, dan wilayah dengan tingkat kerentanan kebakaran hutan dan kekeringan tinggi ditunjukkan dengan warna merah keunguan sesuai dengan gambar berikut.



Gambar 2.11 Peta Wilayah Kerentanan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Sumedang
(Sumber. KLHS RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029
(InaRISK BNPN, 2023))

3. Kerentanan Bencana Tanah Longsor

Secara keseluruhan Kabupaten Sumedang memiliki tingkat kerentanan bencana tanah longsor dari klasifikasi sedang sampai tinggi. Area yang memiliki tingkat kerentanan bencana tanah longsor tinggi paling luas terdapat di bagian selatan wilayah Sumedang, sebagaimana terlihat dari gambar berikut.

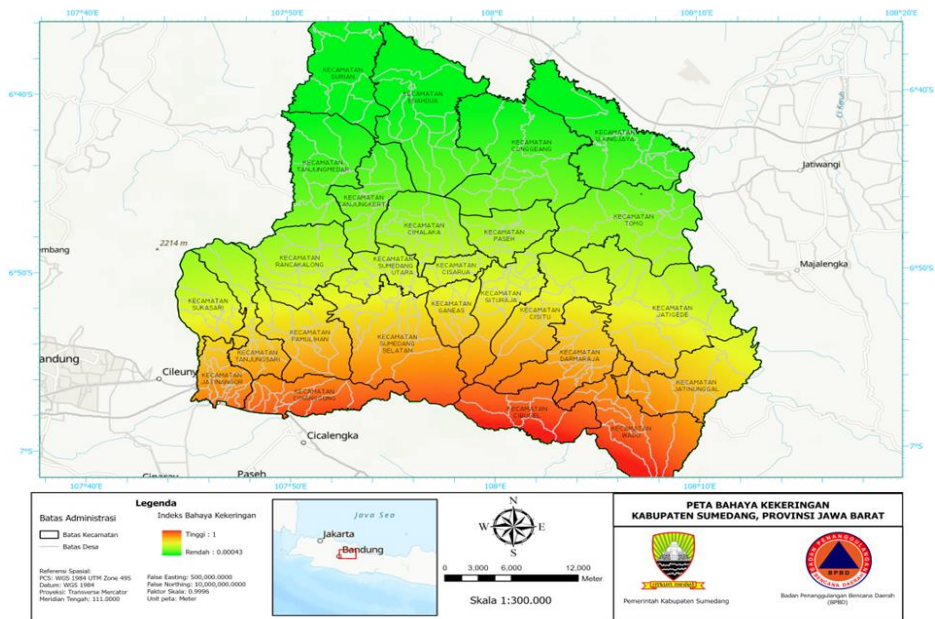


Gambar 2.12 Peta Wilayah Kerentanan Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Sumedang
(Sumber. KLHS RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029)

4. Kerentanan Bencana Kekeringan

Berdasarkan data BNPB visualisasi untuk menggambarkan tingkat kekeringan di Kabupaten Sumedang terdiri dari 4 (empat) warna yaitu hijau untuk kerentanan kekeringan rendah, kuning untuk kerentanan kekeringan sedang, oranye untuk kerentanan kekeringan sedang menuju tinggi dan warna merah untuk menggambarkan tingkat kerentanan kekeringan tinggi.

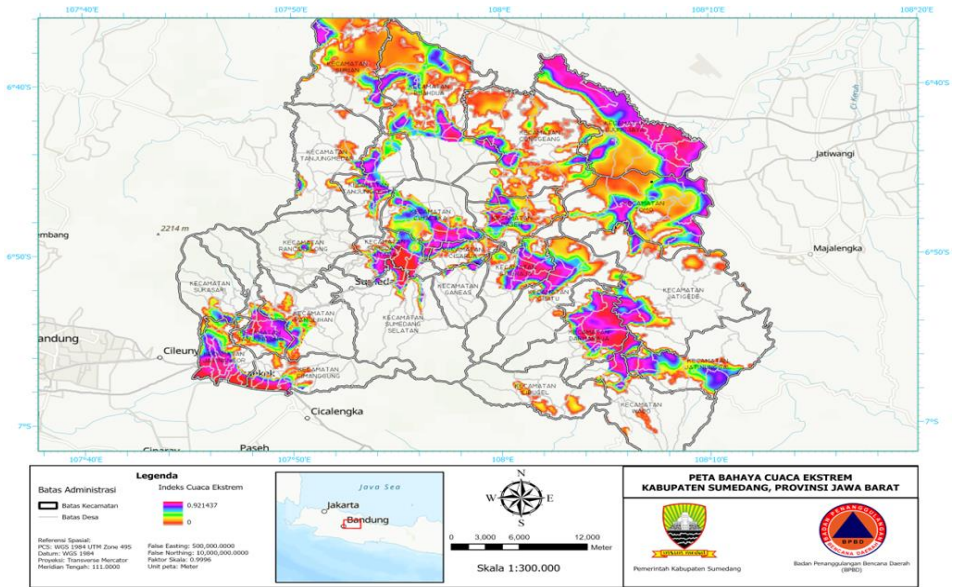
Wilayah Kabupaten Sumedang dengan tingkat bencana kekeringan sedang hingga tinggi berada di wilayah bagian selatan Kabupaten Sumedang, seperti yang ditunjukkan gambar dibawah ini.



Gambar 2.13 Peta Wilayah Kerentanan Bencana Kekeringan di Kabupaten Sumedang
(Sumber. KLHS RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029)

5. Kerentanan Bencana Cuaca Ekstrem

Tingkat klasifikasi kerentanan cuaca ekstrem memiliki 7 (tujuh) tingkatan, dan Kabupaten Sumedang memiliki kerentanan terhadap bencana cuaca ekstrem dengan skala relatif tinggi hampir di seluruh wilayahnya seperti yang dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.14 Peta Wilayah Kerentanan Bencana Cuaca Ekstrem di Kabupaten Sumedang
(Sumber. KLHS RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029)

6. Kerentanan Bencana Gempa Bumi

Kabupaten Sumedang saat ini menjadi daerah yang rawan terhadap bencana gempa bumi. Kejadian gempa bumi yang menimbulkan kerusakan terjadi pada awal tahun baru 2024 dengan dampak kerusakan yang cukup signifikan. Seiring ditemukannya sesar baru di wilayah Kabupaten Sumedang menyebabkan Kabupaten Sumedang cukup rentan terhadap bencana gempa bumi.

2.1.1.2. Aspek Demografi

Berdasarkan data kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang Tahun 2024 semester II yang tersebar di 26 Kecamatan dapat diketahui bahwa total jumlah penduduk di Kabupaten Sumedang sebanyak 1.226.660 jiwa yang terdiri atas 619.513 jiwa penduduk laki-laki dan 607.147 jiwa penduduk perempuan. Dengan demikian angka *sex ratio* Kabupaten Sumedang adalah 102,04.

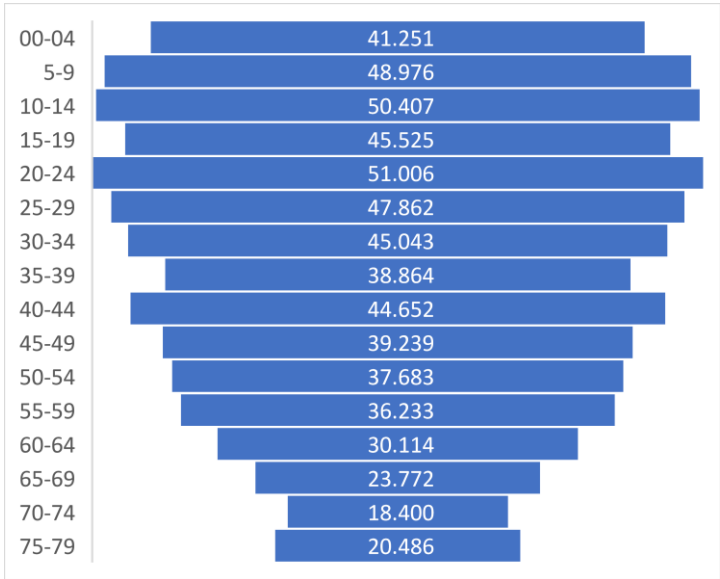
Tabel 2.13 Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, Kepadatan dan Pertumbuhan Penduduk serta Luas Wilayah Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Sumedang Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (Km ²)	Kepadatan (Jiwa/Km ²)	Pertumbuhan
1	Wado	46.842	84,27	556	840
2	Jatinunggal	47.423	72,12	658	(45)
3	Darmaraja	38.360	49,38	777	472

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (Km ²)	Kepadatan (Jiwa/Km ²)	Pertumbuhan
4	Cibugel	26.383	59,52	443	583
5	Cisitu	31.329	65,03	482	(114)
6	Situraja	43.389	43,23	1.004	(202)
7	Conggeang	29.600	106,98	277	(241)
8	Paseh	39.611	31,62	1.253	248
9	Surian	12.411	70,88	175	187
10	Buahdua	34.188	107,68	317	167
11	Tanjungsari	91.015	44,86	2.029	2.494
12	Sukasari	36.149	41,82	864	937
13	Pamulihan	67.968	50,70	1.341	2.286
14	Cimanggung	96.120	55,55	1.730	3.258
15	Jatinangor	96.329	31,60	3.048	2.693
16	Rancakalong	43.477	55,07	789	972
17	Sumedang Selatan	83.998	92,51	908	1.042
18	Sumedang Utara	104.874	30,40	3.450	2.695
19	Ganeas	26.728	22,90	1.167	475
20	Tanjungkerta	36.003	43,72	823	239
21	Tanjungmedar	28.064	60,67	463	678
22	Cimalaka	65.505	43,29	1.513	1.203
23	Cisarua	21.710	17,71	1.226	350
24	Tomo	23.903	84,74	282	(49)
25	Ujungjaya	32.211	86,23	374	(155)
26	Jatigede	23.070	106,24	217	(38)
Total Kabupaten		1.226.660	1.558,72	787	20.975

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (2025)

Selanjutnya penduduk di Kabupaten Sumedang dapat dianalisis berdasarkan jenis kelamin dan struktur umurnya sebagaimana digambarkan dalam grafik di bawah ini.



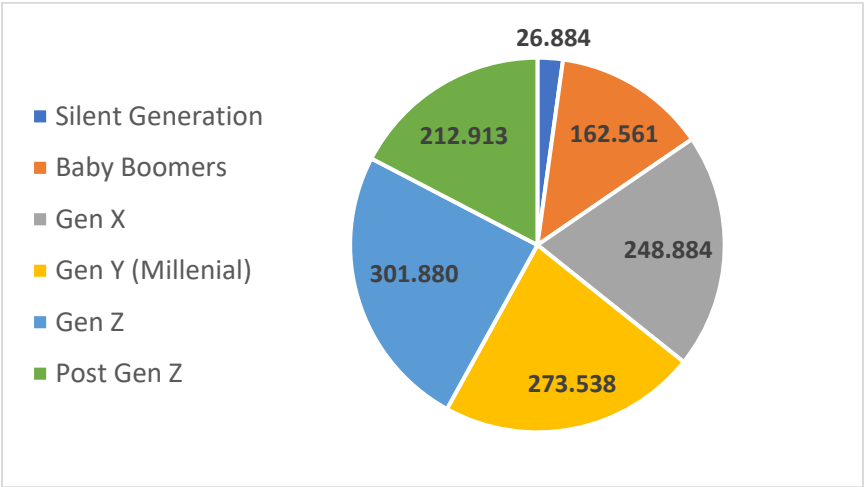
Grafik 2.9 Piramida Penduduk Kabupaten Sumedang Tahun 2024
(Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang, 2025 (diolah))

Terlihat dari bentuk piramida penduduk yang menyerupai segitiga, penduduk Kabupaten Sumedang dapat dikatakan berstruktur umur muda. Hal ini dapat dilihat dari persentase penduduk usia anak-anak (0-14 tahun) sebesar 22,21 persen, jumlah penduduk yang berusia produktif (15-64 tahun) berjumlah 67,37 persen, dan jumlah penduduk lansia (≥ 65 tahun) tergolong kecil yaitu 10,41 persen. Dengan struktur seperti tersebut diatas merupakan bonus demografi bagi Kabupaten Sumedang apabila bisa memanfaatkan struktur penduduk ini dengan kebijakan yang baik dan tepat guna.

Komposisi penduduk berstruktur umur muda ini memberikan implikasi bahwa potensi kelompok umur muda perlu mendapatkan perhatian dan pengembangan sehingga mampu menghasilkan tenaga-tenaga muda yang terampil, mandiri, dan cekatan untuk mengisi dan menciptakan peluang-peluang ekonomi yang tersedia. Struktur umur penduduk juga digunakan untuk melihat Angka Beban Tanggungan (ABT). Pada tahun 2023 ABT di Kabupaten Sumedang sebesar 48,42%. Angka ini dapat menyimpulkan bahwa terdapat 48 orang usia tidak produktif yang ditanggung oleh 100 orang penduduk usia produktif di Kabupaten Sumedang. Angka tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan dengan ABT Tahun 2023 sebesar 55 persen.

Untuk itu peningkatan kualitas sumber daya manusia serta peningkatan mutu pendidikan diperlukan sehingga kedepannya masyarakat Sumedang menjadi masyarakat yang maju. Oleh karena itu sebaiknya Pemerintah Daerah harus dapat mengelola dan memanfaatkan peluang ini dengan sebaik-baiknya,

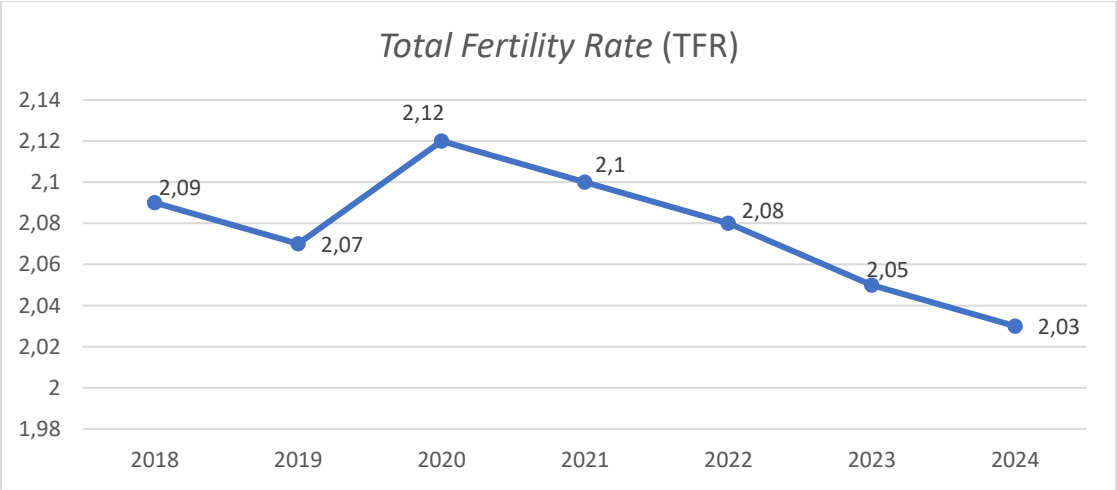
karena jika tidak dikelola dan dimanfaatkan atau tidak adanya sistem serta persiapan yang baik akan menyebabkan peningkatan angka pengangguran.



Grafik 2.10 Struktur Umur Penduduk Kabupaten Sumedang Tahun 2024
(Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang, 2025 (diolah))

Berdasarkan Grafik 2.10 menunjukkan bahwa pada Tahun 2024 komposisi penduduk sesuai struktur umur didominasi oleh generasi Z atau tahun kelahiran 1998-2013 sebanyak 301.880 orang atau 24,61% dari jumlah total penduduk dengan kisaran usia 12 sampai dengan 27 tahun. Maka dari itu Pemerintah Daerah menyediakan banyak program untuk generasi ini untuk menghadapi tantangan di masa depan sehingga diharapkan angka pengangguran terbuka dapat ditekan. Program yang disediakan diantaranya adalah program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, yang mempunyai aktivitas menyediakan pelatihan kerja secara gratis bagi angkatan kerja.

Upaya pengendalian penduduk di suatu wilayah salah satunya dapat dilihat dari angka *Total Fertility Rate* (TFR) merupakan parameter fertilitas untuk mengetahui angka kelahiran total per wanita usia subur (15-49 tahun). Angka kelahiran total (TFR) adalah jumlah anak rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan pada akhir masa reproduksinya, apabila perempuan tersebut mengikuti pola fertilitas pada saat TFR dihitung. Semakin rendah angka ini menunjukkan makin terkendalnya jumlah kelahiran penduduk. TFR di bawah 2,1 dapat mengindikasikan bahwa populasi suatu wilayah cenderung menurun dalam jangka panjang (tanpa migrasi masuk), sementara TFR di atas 2,1 menunjukkan potensi pertumbuhan populasi.



Grafik 2.11 TFR Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2024
(Sumber: DPPKBP3A Kabupaten Sumedang, 2025)

Berdasarkan grafik diatas, kelahiran total di Kabupaten Sumedang tahun 2023 adalah 2,05. Target yang ditetapkan pada tahun 2023 untuk Kabupaten Sumedang adalah 2,04 sehingga capaian kinerja tahun 2023 terhadap target nasional sudah mencapai 99,51%. Sementara untuk tahun 2024 TFR Kabupaten Sumedang adalah 2,03. Manfaat tercapainya TFR untuk masyarakat salah satunya adalah menunjang pencapaian bonus demografi dengan terciptanya SDM yang berkualitas, kecukupan pendidikan, dan kesehatan.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

Kesejahteraan ekonomi di daerah bukan hanya tentang angka statistik, tetapi juga menyangkut kualitas hidup masyarakat, akses terhadap pekerjaan layak, pendapatan yang cukup, layanan publik yang adil, dan peluang untuk berkembang. Sayangnya, ketimpangan antara pusat dan daerah masih menjadi tantangan besar di Indonesia.

Tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat yang tinggi merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap daerah. Namun manfaat tersebut harus juga dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan kata lain, aspek pemerataan menjadi pertimbangan penting dalam keberhasilan pembangunan.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama untuk mengukur sejauh mana kemajuan sebuah negara atau wilayah dalam meningkatkan kapasitas produksinya dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi bukan hanya dipandang dari segi angka produk domestik bruto (PDB), tetapi juga mencerminkan kemampuan sebuah negara untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kualitas hidup, dan mengurangi kemiskinan. Pertumbuhan yang

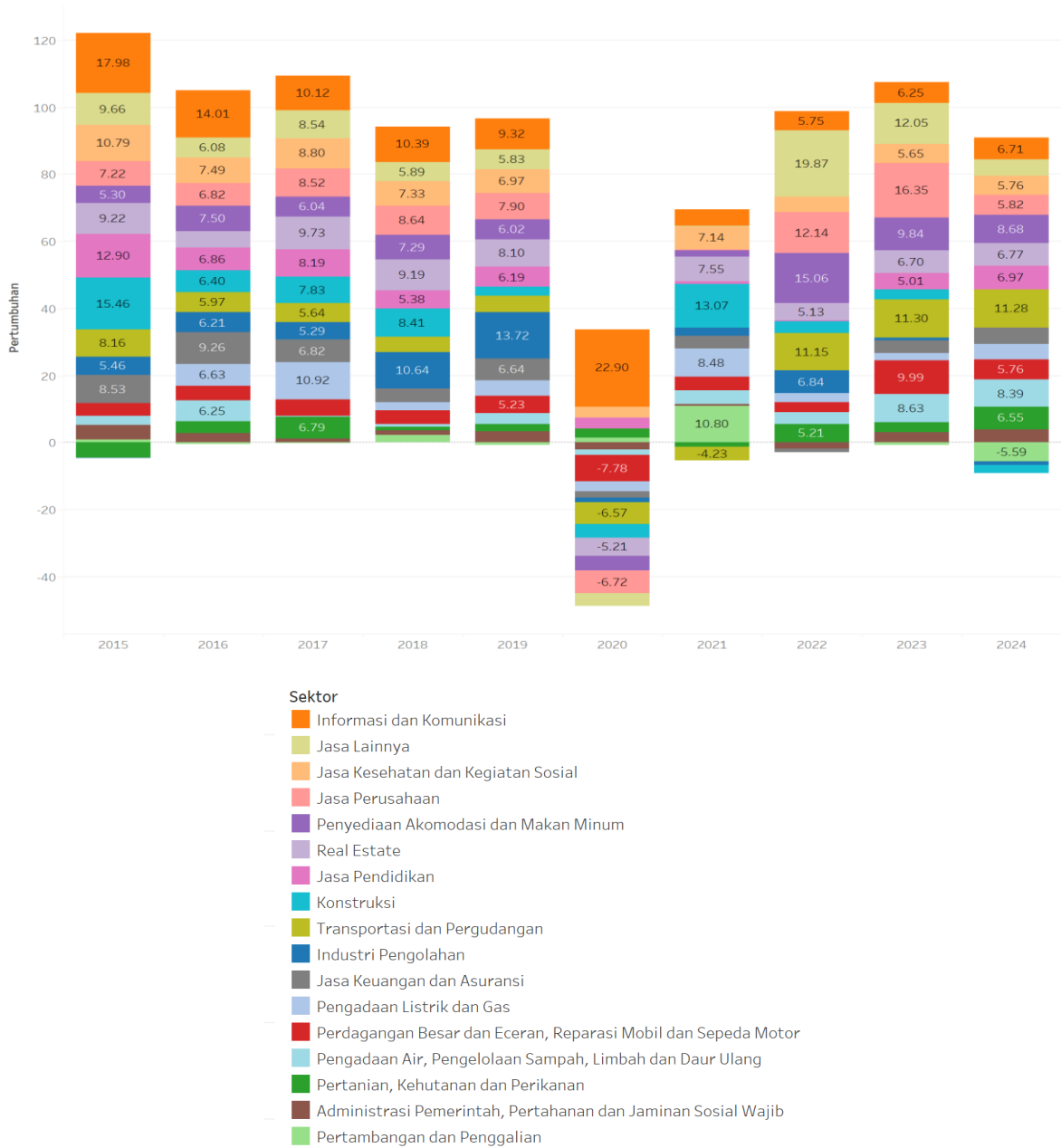
stabil dan berkelanjutan juga menciptakan landasan untuk pembangunan sosial dan infrastruktur yang lebih baik.

Namun, pertumbuhan ekonomi tidaklah seragam di seluruh sektor ekonomi. Oleh karena itu, sangat penting untuk melihat bagaimana sektor-sektor ekonomi berkontribusi terhadap pertumbuhan tersebut. Hal ini membawa kita pada pembahasan mengenai pertumbuhan sektoral, yaitu perubahan yang terjadi dalam berbagai sektor perekonomian, seperti sektor pertanian, industri, dan jasa, yang memiliki peran berbeda dalam mendorong perekonomian secara keseluruhan.

Grafik di bawah ini menunjukkan pertumbuhan lapangan usaha pada PDRB Kabupaten Sumedang dari tahun 2015 hingga 2024, yang mengilustrasikan bagaimana berbagai sektor ekonomi berkontribusi terhadap perkembangan ekonomi daerah selama periode tersebut. Secara umum, sektor-sektor utama dalam perekonomian Sumedang menunjukkan variasi dalam tingkat pertumbuhannya.

Pada tahun 2020, terjadi penurunan signifikan dalam pertumbuhan sektor-sektor ekonomi, terutama akibat dampak dari pandemi COVID-19. Sektor Informasi dan Komunikasi (warna oranye) mengalami lonjakan pertumbuhan yang sangat tinggi pada tahun 2020 dengan kontribusi mencapai 22,90%, mencerminkan adaptasi yang cepat terhadap kebutuhan digitalisasi dan teknologi. Meskipun pada tahun tersebut sektor lainnya seperti Pertanian dan Industri Pengolahan (warna hijau dan merah) mengalami penurunan yang tajam akibat gangguan pandemi, sektor Informasi dan Komunikasi menjadi sektor yang paling *resilient*, mencatatkan pertumbuhan 22,90% pada 2020.

Pertumbuhan Lapangan Usaha pada PDRB Kabupaten Sumedang 2015-2024



Grafik 2.12 Pertumbuhan Lapangan Usaha pada PDRB Kabupaten Sumedang Tahun 2015-2024

(Sumber: BPS Kabupaten Sumedang 2025, diolah)

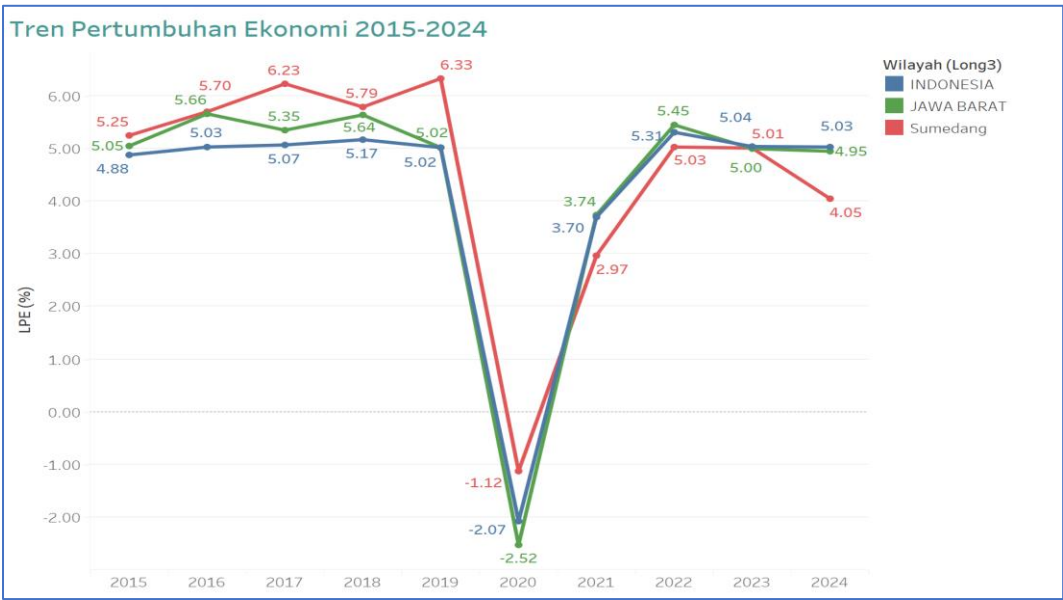
Sektor jasa lainnya, yang mencakup berbagai kegiatan non-produktif dan jasa, serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, juga mengalami pertumbuhan signifikan di tahun 2020, dengan kontribusi besar dalam mengisi *gap* yang ditinggalkan oleh sektor lainnya yang terpuruk akibat pandemi. Jasa Pendidikan (warna hijau muda) juga mengalami pertumbuhan yang relatif baik, meskipun sempat menurun tajam pada 2020 akibat penutupan sementara fasilitas pendidikan selama pandemi.

Setelah tahun 2020, grafik menunjukkan pemulihan yang relatif kuat pada beberapa sektor, seperti Pertanian (warna hijau), yang mengalami kenaikan lagi pada tahun 2021 dan 2022, mencerminkan keberlanjutan sektor

ini sebagai pilar ekonomi Sumedang. Sektor Industri Pengolahan juga menunjukkan pemulihan pasca-pandemi, meskipun lebih lambat dibandingkan sektor lainnya, dengan kontribusi yang tetap signifikan.

Pertumbuhan lapangan usaha di Sumedang menunjukkan cepatnya pertumbuhan sektor-sektor yang lebih berbasis pada jasa, seperti Informasi dan Komunikasi, dibandingkan sektor yang lebih tradisional seperti Pertanian dan Industri Pengolahan. Sektor-sektor yang lebih terdiversifikasi dan berbasis teknologi menunjukkan ketahanan yang lebih kuat terhadap krisis ekonomi global, sementara sektor-sektor tradisional lebih rentan terhadap guncangan eksternal seperti yang terjadi pada tahun 2020.

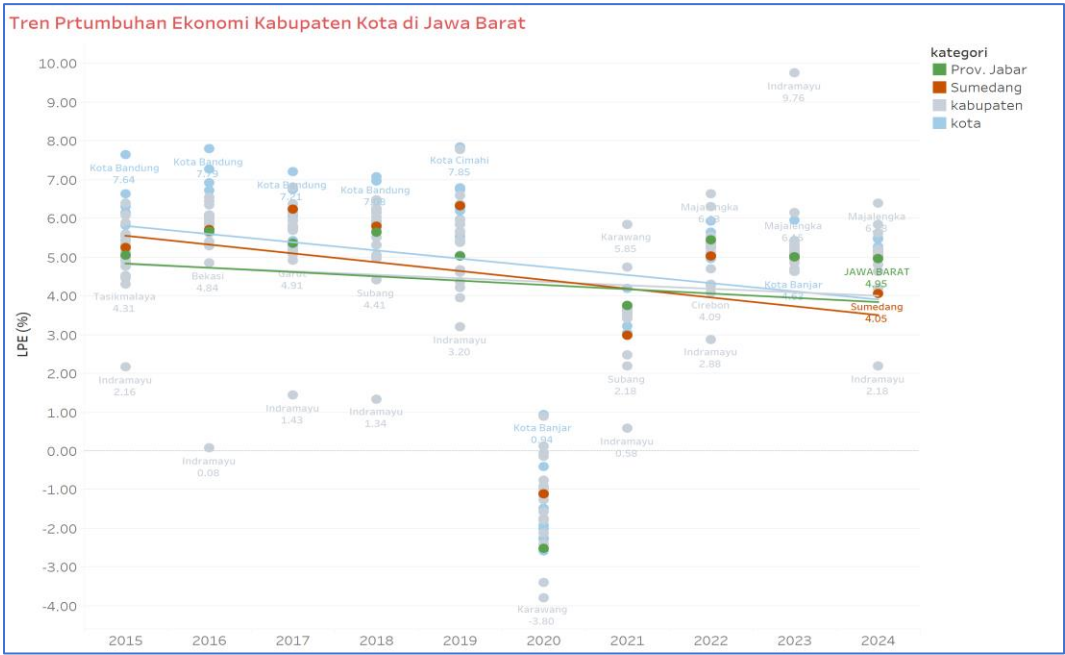
Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumedang mengalami dinamika dalam 10 tahun terakhir. Pada awal periode, sekitar tahun 2015 hingga 2019, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumedang menunjukkan angka yang relatif stabil dengan sedikit fluktuasi, mencatatkan angka sekitar 5,25% hingga 6,33%. Namun, saat memasuki tahun 2020, dampak besar dari pandemi COVID-19 sangat terlihat dalam grafik.



Grafik 2.13 Trend Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sumedang, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2015-2024
(Sumber: BPS (diolah), 2025)

Seperti yang dapat dilihat, pertumbuhan ekonomi Sumedang mengalami penurunan tajam menjadi -1,12% pada tahun tersebut, mencerminkan krisis ekonomi global yang mempengaruhi hampir semua sektor ekonomi. Penurunan ini sangat mencolok, meskipun tidak seburuk beberapa wilayah lain di regional Jawa Barat dan nasional, namun tetap menjadi tantangan berat bagi ekonomi daerah. Setelah mengalami penurunan yang dalam pada 2020, ekonomi Kabupaten Sumedang mulai menunjukkan pemulihan namun menjadi

tertinggal dibandingkan Jawa Barat secara umum dan nasional. Bahkan, di tahun 2024 LPE Sumedang semakin tertinggal karena mengalami perlambatan menjadi 4,05%.



Grafik 2.14 Trend Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2015-2024
(Sumber: BPS (diolah), 2025)

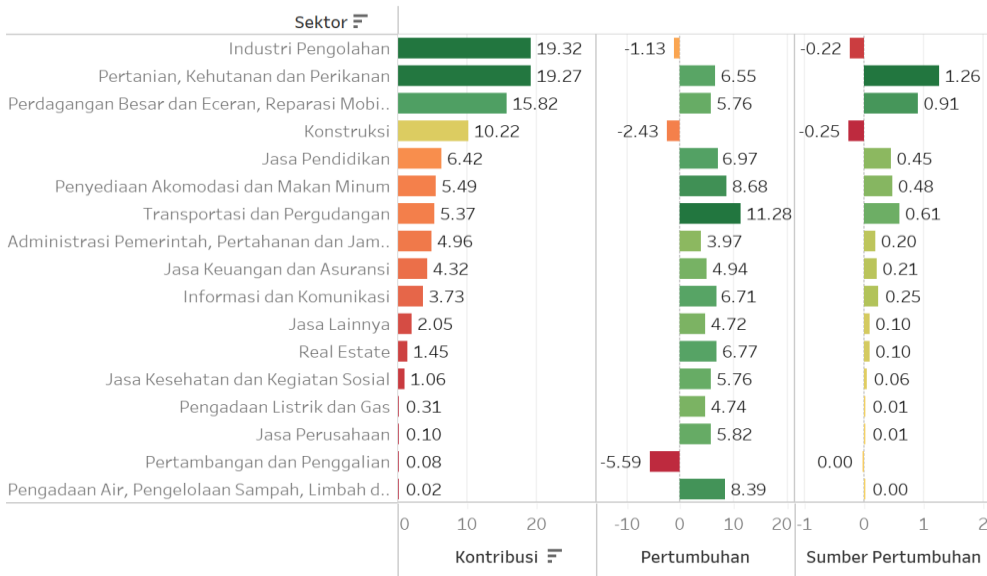
Grafik ini menggambarkan tren pertumbuhan ekonomi (LPE) Kabupaten Sumedang dibandingkan dengan beberapa kabupaten/kota lain di Jawa Barat dari tahun 2015 hingga 2024. Tren LPE menunjukkan bagaimana perekonomian daerah berkembang dan bagaimana Sumedang menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi ekonomi di tingkat provinsi dan nasional.

Secara keseluruhan, Sumedang mengalami pertumbuhan yang relatif lambat dalam beberapa tahun terakhir, dengan LPE yang tercatat pada angka 4,05% pada tahun 2024. Meskipun mengalami sedikit pemulihan pasca-pandemi, pertumbuhannya masih tertinggal dibandingkan dengan Jawa Barat yang mencatatkan LPE sekitar 4,95% pada tahun yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada pemulihan, Sumedang masih berada di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi.

Sementara itu, beberapa kabupaten lain seperti Karawang, Bekasi, dan Bandung menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan lebih stabil, dengan kontribusi besar terhadap PDRB Jawa Barat. Perbedaan ini mencerminkan diversifikasi sektor ekonomi yang lebih baik di kabupaten/kota besar, yang mengandalkan sektor industri, perdagangan, dan jasa yang lebih berkembang.

Meskipun Sumedang mengalami tantangan dalam mengejar ketertinggalannya, sektor-sektor seperti pertanian dan perdagangan masih menjadi pilar utama dalam perekonomian daerah ini, meskipun kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi tidak secepat sektor industri atau jasa.

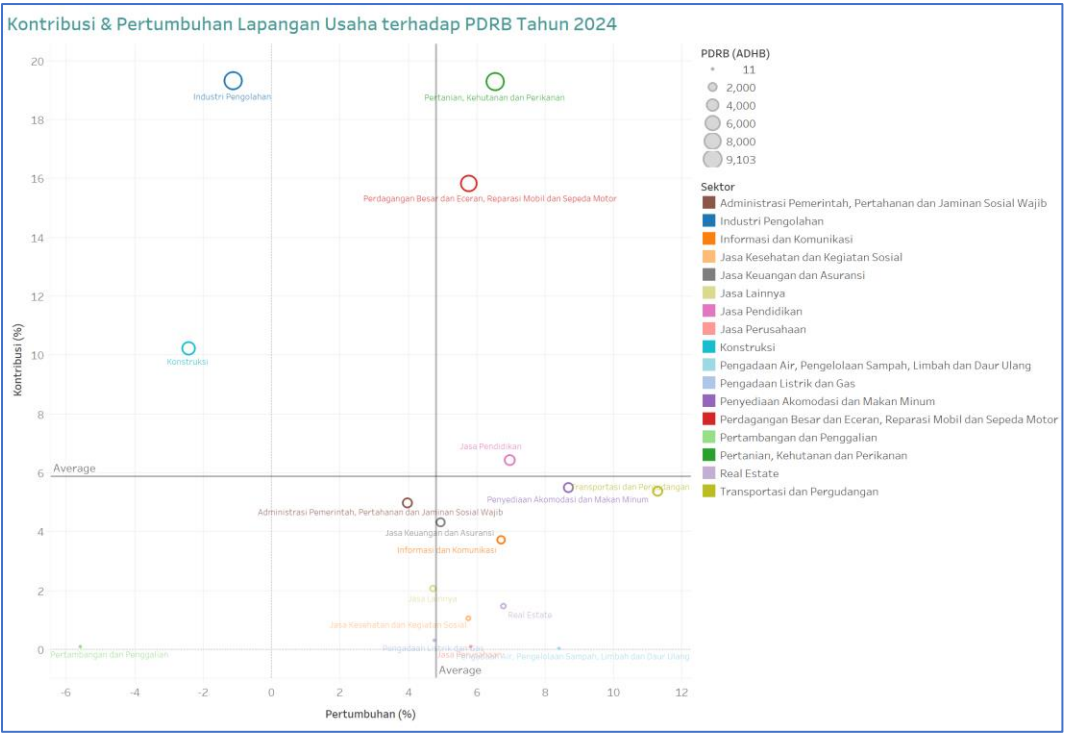
Kontribusi & Pertumbuhan Lapangan Usaha PDRB Kab. Sumedang Tahun 2024



Grafik 2.15 Capaian Kontribusi dan Pertumbuhan Lapangan Usaha PDRB Kabupaten Sumedang Tahun 2024
(Sumber: BPS (diolah), 2025)

Grafik di atas menunjukkan kontribusi sektor-sektor ekonomi terhadap PDRB Kabupaten Sumedang pada tahun 2024, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Sumedang tercatat sebesar 4,05%, dengan sektor-sektor tertentu berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan, sementara beberapa sektor mengalami kontraksi yang mengurangi laju pertumbuhan secara keseluruhan.

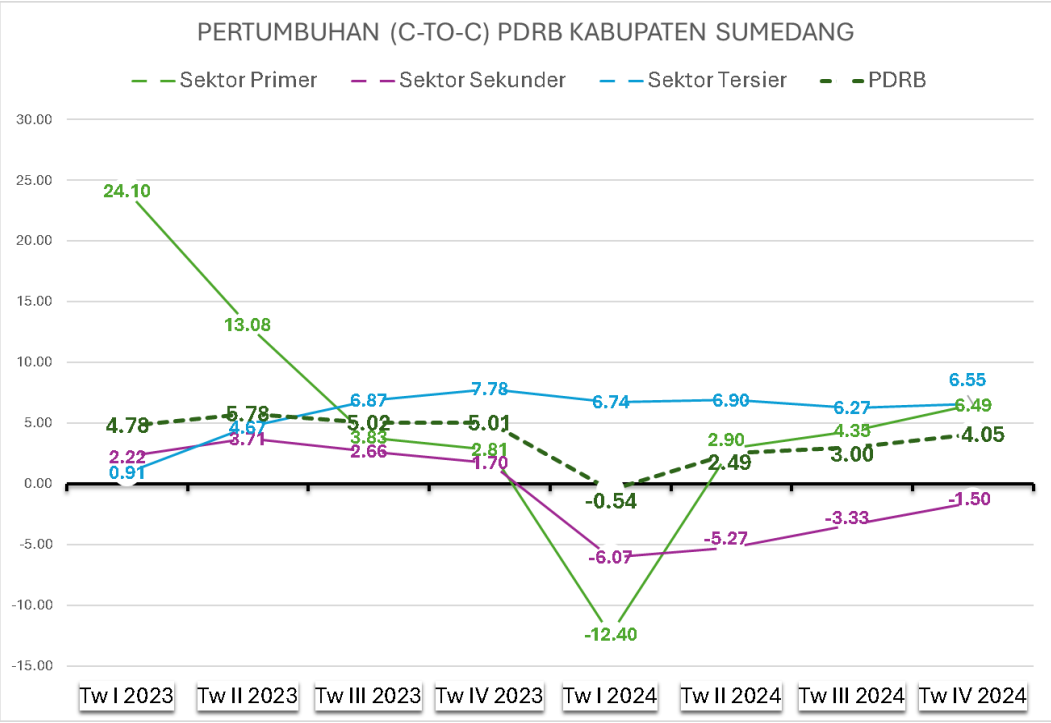
Secara khusus, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memberikan kontribusi besar terhadap LPE, dengan 1,26% dari total pertumbuhan yang disumbangkan oleh sektor ini. Sektor pertanian yang dominan ini menunjukkan pentingnya sektor primer dalam perekonomian Sumedang, meskipun pertumbuhannya lebih rendah dibandingkan sektor industri. Kontribusi ini mengindikasikan bahwa pertanian masih memainkan peran vital dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah, terutama dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan mendukung sektor-sektor lain.



Grafik 2.16 Kontribusi dan Pertumbuhan Lapangan Usaha terhadap PDRB Tahun 2024
(Sumber: BPS (diolah), 2025)

Namun, ada penurunan signifikan dalam beberapa sektor, seperti Industri Pengolahan dan Konstruksi, yang masing-masing mengalami kontraksi pada tahun 2024. Kedua sektor ini memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap PDRB Sumedang, mencapai 29,49% dari total PDRB, namun penurunan di kedua sektor ini mengurangi laju pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan. Sektor Industri Pengolahan dan Konstruksi, yang sebelumnya menjadi pilar utama dalam pembangunan infrastruktur dan industri lokal, menunjukkan tanda-tanda perlambatan akibat faktor eksternal maupun perubahan dalam pola investasi.

Dengan adanya kontraksi pada sektor-sektor penting ini, Sumedang perlu mengevaluasi kembali strategi investasi dan kebijakan industri untuk mempercepat pemulihan. Terlepas dari itu, sektor Pertanian tetap menjadi sumber pertumbuhan yang stabil, dengan sektor lainnya, seperti Perdagangan dan Jasa Pendidikan, turut memberikan kontribusi penting dalam mendukung ekonomi lokal. Keseimbangan antara sektor primer dan sektor industri serta jasa akan menjadi kunci untuk mencapai pertumbuhan yang lebih inklusif dan berkelanjutan di masa depan.



Grafik 2.17 Pertumbuhan PDRB Kabupaten Sumedang Tahun 2023-2024
(Sumber: BPS (diolah), 2025)

Perlambatan ekonomi di Sumedang sudah mulai terlihat, terutama pada sektor sekunder, sejak Triwulan I 2024. Pada sektor sekunder (digambarkan dengan garis warna ungu), yang mencakup sektor industri dan konstruksi, terdapat penurunan tajam sejak Triwulan I 2024, dengan angka -6,07% pada Triwulan I 2024 dan -5,27% pada Triwulan II 2024. Hal ini menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan dan konstruksi yang biasanya menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi Sumedang mulai mengalami perlambatan yang signifikan.

Sebaliknya, sektor primer (warna hijau) menunjukkan pertumbuhan yang positif, meskipun masih fluktuatif. Pada Triwulan I 2024, sektor ini mengalami penurunan sebesar -12,40%, tetapi mulai menunjukkan pemulihan dengan angka positif pada Triwulan II dan III 2024. Sektor tersier (warna biru), yang mencakup sektor jasa, juga mengalami penurunan ringan, tetapi secara keseluruhan kontribusinya terhadap PDRB Sumedang lebih stabil dan tidak mengalami fluktuasi tajam seperti sektor sekunder.

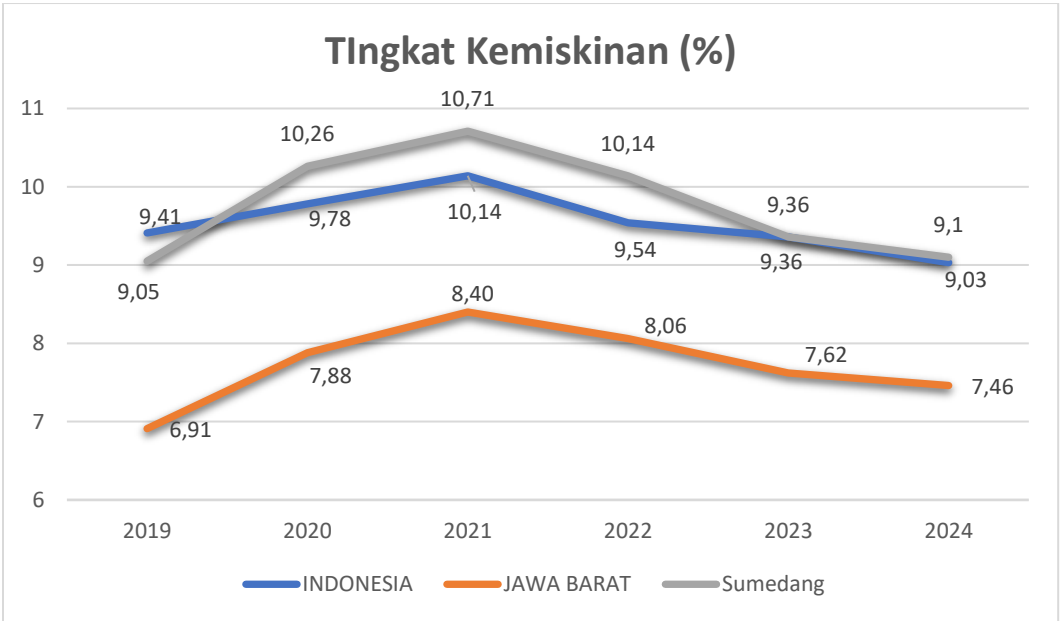
Fenomena ini mengindikasikan bahwa sektor industri dan konstruksi, yang sebelumnya memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi Sumedang, kini mulai menghadapi tantangan, yang mungkin dipicu oleh faktor eksternal seperti penurunan permintaan global, keterbatasan investasi, atau masalah dalam rantai pasokan. Sementara itu, sektor pertanian dan jasa masih mampu memberikan kontribusi positif meskipun ada penurunan di sektor sekunder.

Dengan demikian, perlambatan ekonomi Sumedang pada awal 2024 lebih jelas terlihat pada sektor-sektor yang bergantung pada industri dan konstruksi, dan ini harus menjadi perhatian penting dalam merumuskan kebijakan ekonomi ke depan untuk memastikan keseimbangan pertumbuhan antar sektor.

Tingkat kemiskinan Kabupaten Sumedang dalam kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan tren yang fluktuatif namun cenderung menurun secara keseluruhan. Pada tahun 2020, tingkat kemiskinan tercatat sebesar 10,26 persen. Angka ini sempat mengalami kenaikan pada tahun 2021 menjadi 10,71 persen, yang diduga kuat dipengaruhi oleh dampak sosial ekonomi akibat pandemi COVID-19. Memasuki tahun 2022, kondisi mulai membaik dengan penurunan tingkat kemiskinan menjadi 10,14 persen, dan berlanjut pada tahun 2023 yang mencatat penurunan cukup signifikan sebesar 0,78 persen, sehingga tingkat kemiskinan turun ke angka 9,36 persen. Penurunan ini mencerminkan pulihnya aktivitas ekonomi dan mulai berfungsinya program-program pemulihan sosial ekonomi yang dilaksanakan oleh pemerintah.

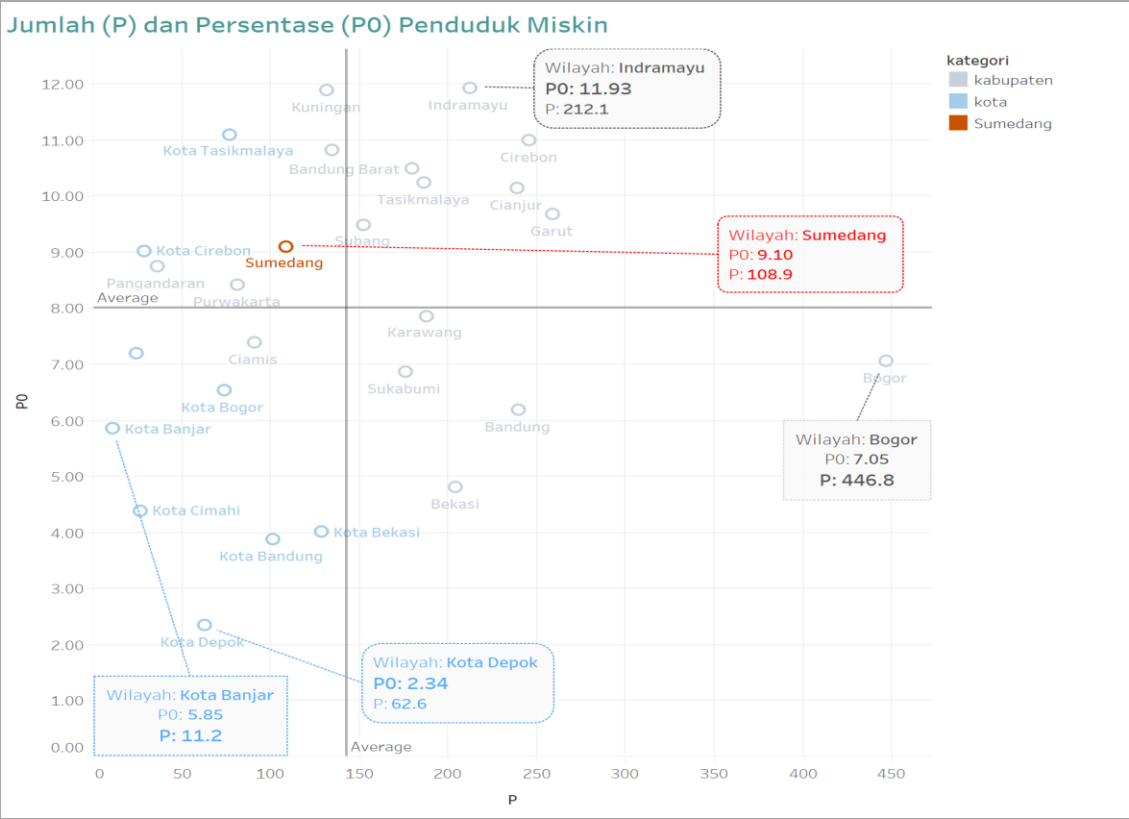
Namun, pada tahun 2024, penurunan tingkat kemiskinan tercatat hanya sebesar 0,26 persen, dengan angka kemiskinan berada di angka 9,10 persen. Penurunan yang relatif lebih lambat ini menunjukkan adanya tantangan dalam menurunkan kemiskinan ke tingkat yang lebih rendah, terutama dalam menghadapi kemiskinan struktural dan multidimensi yang memerlukan pendekatan lintas sektor dan jangka panjang.

Perkembangan angka kemiskinan di Kabupaten Sumedang menunjukan *trend* menurun pada dua tahun terakhir dimana sebelumnya mengalami kenaikan salah satunya akibat dampak Pandemi Covid-19 pada periode tahun 2020-2021.



Grafik 2.18 Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2024
(Sumber: BPS Kabupaten Sumedang (diolah), 2025)

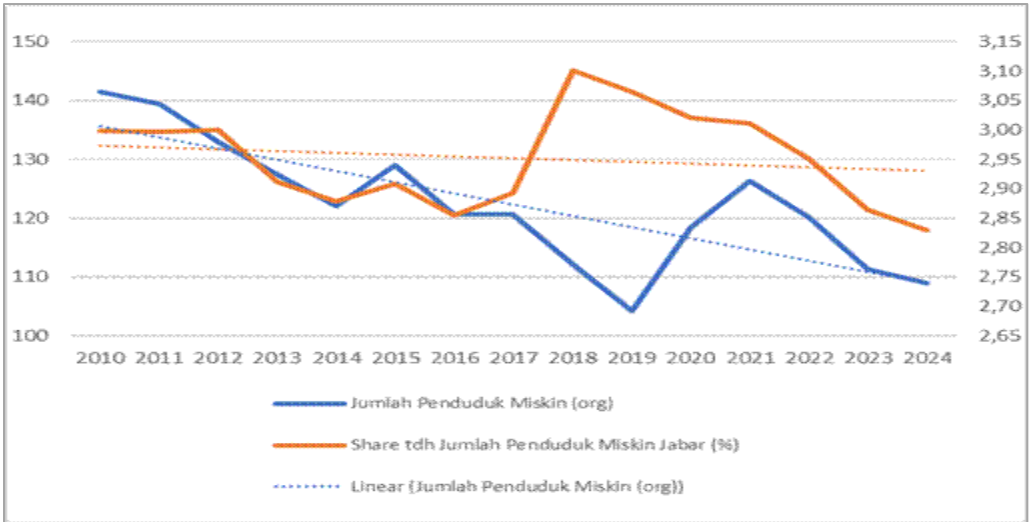
Melihat gambar diatas, tingkat kemiskinan Kabupaten Sumedang lebih tinggi daripada rata-rata Provinsi Jawa Barat. Faktor-faktor yang menyebabkan tingkat kemiskinan yang tinggi di Kabupaten Sumedang merupakan tantangan dalam sektor pertanian, akses terbatas terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, serta kurangnya lapangan kerja yang layak. Namun, upaya Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam menerapkan kebijakan penanggulangan kemiskinan tampaknya telah memberikan hasil yang positif dimana Kabupaten Sumedang mampu menurunkan tingkat kemiskinan lebih cepat dibandingkan kabupaten kota di Jawa Barat.



Gambar 2.15 Komparasi Tingkat Kemiskinan dan Pertumbuhan Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2024
(Sumber: BPS (diolah), 2025)

Tingkat kemiskinan Kabupaten Sumedang dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat tidak hanya menggambarkan situasi ekonomi lokal, tetapi juga memberikan gambaran tentang kontribusi wilayah tersebut terhadap total jumlah penduduk miskin di tingkat provinsi. Dalam analisis ini, data menunjukkan bahwa meskipun Kabupaten Sumedang memiliki tingkat kemiskinan yang masih lebih tinggi daripada rata-rata provinsi, kontribusinya terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Barat semakin menurun.

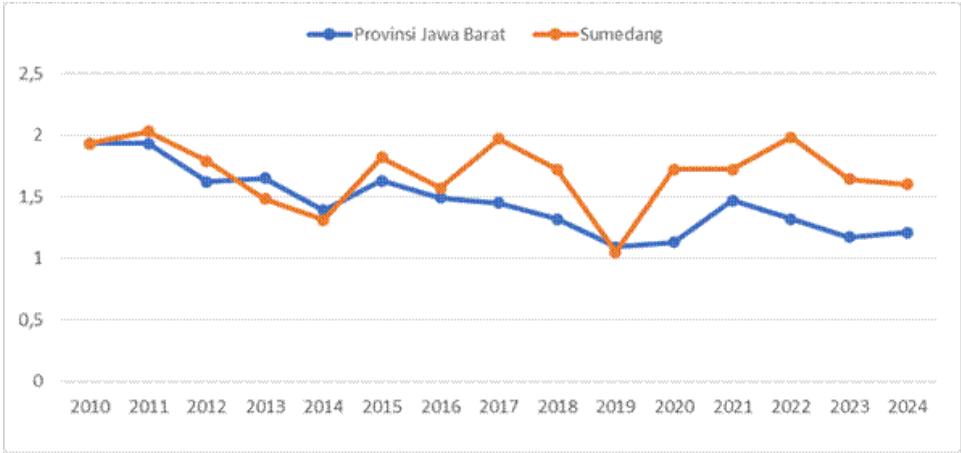
Penurunan kontribusi jumlah penduduk miskin dari Kabupaten Sumedang terhadap jumlah keseluruhan penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat menunjukkan adanya perbaikan dalam kondisi sosial ekonomi di Kabupaten Sumedang. Meskipun tingkat kemiskinan mungkin masih tinggi, penurunan ini mengindikasikan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan di tingkat lokal telah memberikan dampak positif yang signifikan.



Grafik 2.19 Komparasi Jumlah Penduduk Miskin dan Pertumbuhannya di Provinsi Jawa Barat Tahun 2024
(Sumber: BPS (diolah), 2025)

Kedalaman Kemiskinan (P1)

Selain tingkat kemiskinan yang lebih tinggi, data juga menunjukkan bahwa kedalaman kemiskinan di Kabupaten Sumedang masih lebih besar daripada Provinsi Jawa Barat secara keseluruhan. Kedalaman kemiskinan mengacu pada seberapa jauh individu atau keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan tersebut berada di bawah ambang batas tersebut, atau seberapa jauh pendapatan mereka berada di bawah garis kemiskinan relatif.



Grafik 2.20 Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Sumedang Tahun 2010-2024
(Sumber: BPS (diolah), 2025)

Implikasi dari kedalaman kemiskinan yang lebih tinggi di Kabupaten Sumedang adalah bahwa warga di wilayah ini cenderung menghadapi kesulitan ekonomi yang lebih besar daripada rata-rata warga di Provinsi Jawa Barat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun upaya telah dilakukan untuk mengurangi tingkat kemiskinan secara umum, masih ada tantangan yang signifikan dalam mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi di Kabupaten Sumedang.

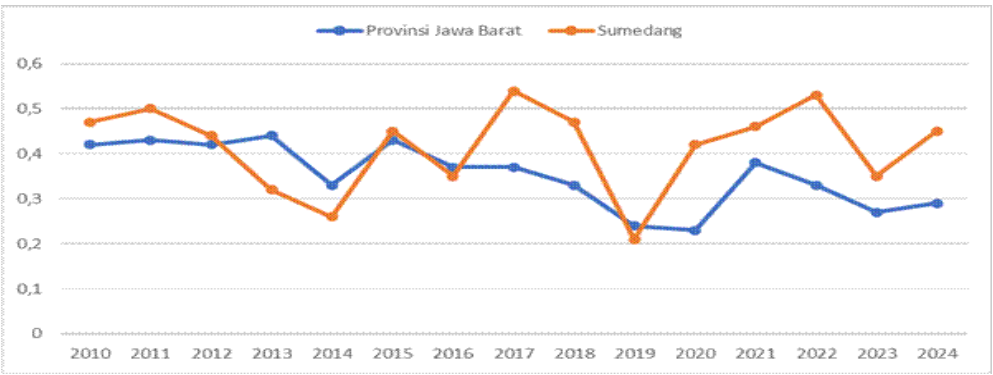
Kedalaman kemiskinan yang lebih besar dapat mengindikasikan adanya ketidaksetaraan dalam distribusi pendapatan dan akses terhadap peluang ekonomi di Kabupaten Sumedang. Hal ini dapat mencerminkan ketidakmampuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif di tingkat lokal, yang dapat mengakibatkan tekanan sosial dan ekonomi yang lebih besar bagi keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Untuk mengatasi kedalaman kemiskinan yang tinggi, diperlukan upaya yang lebih besar dan terkoordinasi dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Diperlukan program-program yang lebih efektif untuk meningkatkan akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan, pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan inklusif, serta kebijakan sosial yang mendukung seperti program bantuan sosial dan perlindungan sosial bagi keluarga yang rentan.

Keparahan Kemiskinan (P2)

Selain tingkat dan kedalaman kemiskinan yang lebih tinggi, data juga menunjukkan bahwa keparahan kemiskinan di Kabupaten Sumedang masih lebih besar daripada Provinsi Jawa Barat secara keseluruhan. Keparahan kemiskinan mengacu pada tingkat kesulitan atau penderitaan yang dialami oleh individu atau keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan tersebut, yang dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor seperti tingkat pendapatan, akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan dasar lainnya.

Implikasi dari keparahan kemiskinan yang lebih tinggi di Kabupaten Sumedang adalah bahwa warga di wilayah ini cenderung mengalami kondisi hidup yang lebih sulit daripada rata-rata warga di Provinsi Jawa Barat. Tingkat keparahan kemiskinan yang tinggi dapat menunjukkan bahwa pendapatan yang rendah dan akses terhadap layanan dasar yang terbatas mengakibatkan kondisi hidup yang tidak stabil dan berisiko bagi keluarga yang terkena dampak.

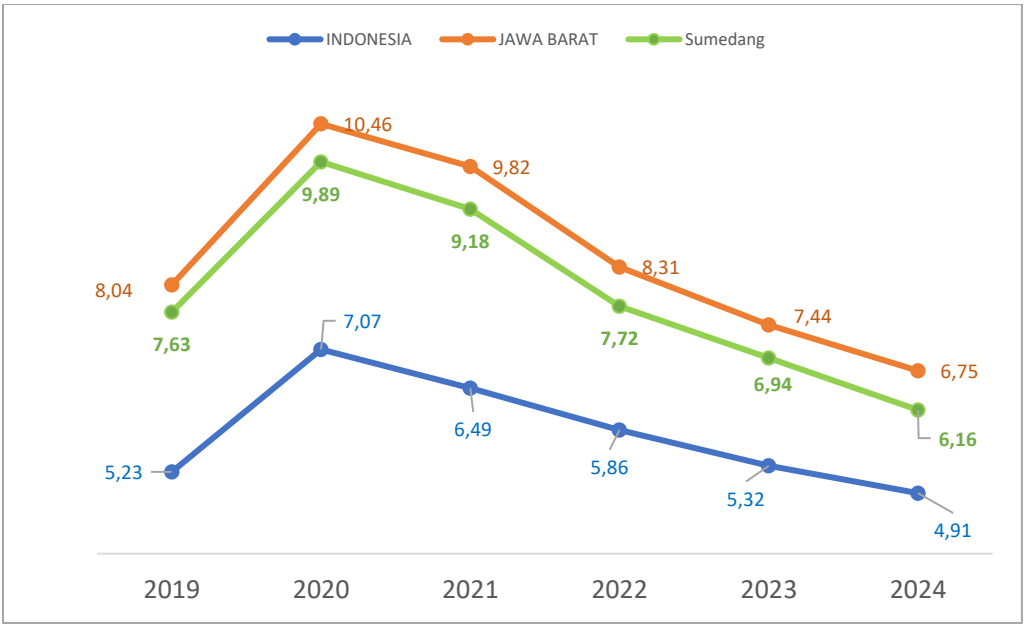


Grafik 2.21 Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Sumedang Tahun 2010-2024
(Sumber: BPS (diolah), 2025)

Keparahan kemiskinan yang tinggi juga dapat mencerminkan kurangnya resiliensi atau ketahanan ekonomi di Kabupaten Sumedang, yang membuat masyarakat rentan terhadap perubahan ekonomi atau krisis keuangan. Ini dapat mengakibatkan meningkatnya risiko kemiskinan kronis dan peningkatan ketidaksetaraan dalam distribusi kesejahteraan di wilayah tersebut.

Untuk mengatasi keparahan kemiskinan yang tinggi, diperlukan upaya yang lebih besar dalam meningkatkan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan pangan, serta mendukung upaya untuk meningkatkan pendapatan dan menciptakan lapangan kerja yang layak. Selain itu, perlunya pengembangan program-program sosial yang menasar kelompok rentan dan kerja sama antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya juga menjadi penting.

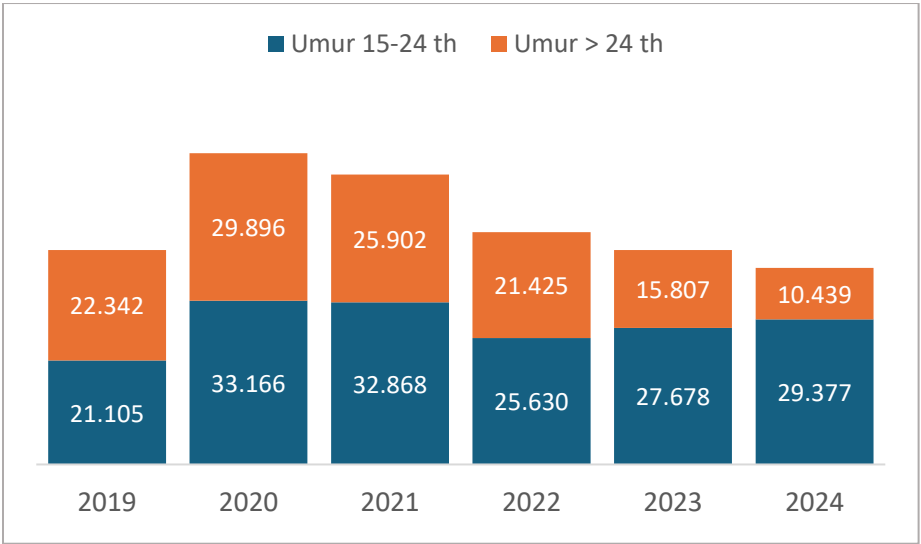
Perkembangan angka pengangguran di Kabupaten Sumedang menunjukkan tren yang terus menurun pada empat tahun terakhir.



Grafik 2.22 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (%) di Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2024
(Sumber: BPS Kabupaten Sumedang (diolah), 2025)

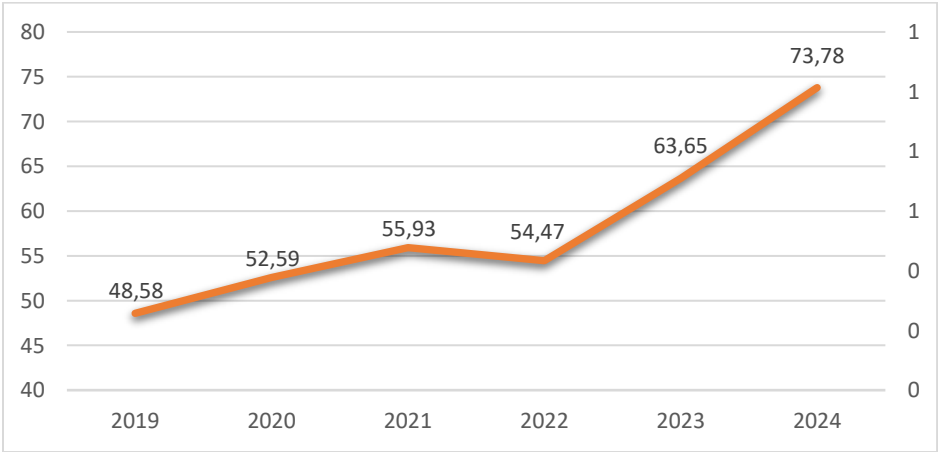
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Sumedang masih lebih rendah apabila dibandingkan dengan TPT Jawa Barat tetapi lebih tinggi apabila dibandingkan TPT Nasional. Hal ini menunjukkan perlunya percepatan penciptaan lapangan kerja formal untuk meningkatkan stabilitas ekonomi.

Apabila dilihat dari usia, TPT di Kabupaten Sumedang didominasi oleh usia muda antara 15-24 Tahun.



Grafik 2.23 Komposisi TPT berdasarkan Umur di Kabupaten Sumedang Tahun 2024
(Sumber: BPS (diolah), 2025)

Berdasarkan data BPS tahun 2024, ditengah kondisi TPT yang terus menurun dari tahun 2021-2024, tingkat pengangguran usia muda (15-24 tahun menunjukkan tren meningkat pada tahun 2023 dan 2024.



Grafik 2.24 Tren Proporsi TPT Usia Muda (15-24 Tahun) di Kabupaten Sumedang Tahun 2024
(Sumber: BPS (diolah), 2025)

Secara umum indikator ketenagakerjaan di Kabupaten Sumedang dapat digambarkan sebagaimana tabel berikut.

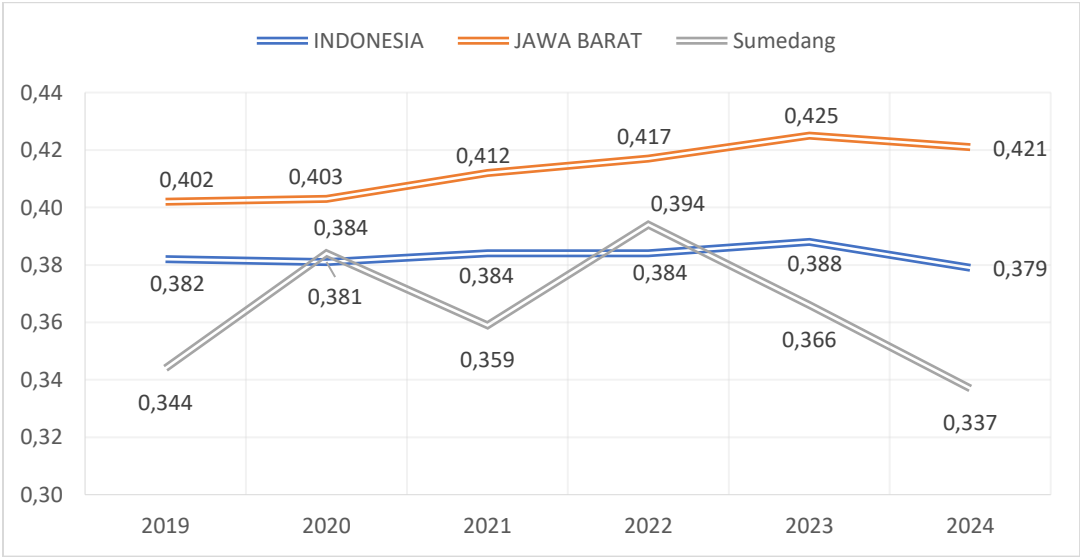
Tabel 2.14 Hubungan Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Sumedang

Variabel	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Angkatan Kerja	Orang	637,668	639,867	609,471	626159	646,454
Bukan Angkatan Kerja	Orang	286,961	294,136	333,498	297,915	287,169
TPAK	Persen	68.96	68.51	64.63	67.76	69.24
TPT	Persen	9.89	9.18	7.72	6.94	6.16

Variabel	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Pengangguran	Orang	63,062	58,770	47,055	43,485	39,816
Penduduk Bekerja	Orang	574,606	581,097	562,416	582,674	606,638
Penduduk Usia Kerja	Orang	924,629	934,003	942,969	924,074	933,623

Sumber: BPS, 2024 (diolah)

Ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten Sumedang terus menurun pada dua tahun terakhir. Nilai Rasio Gini Kabupaten Sumedang pada tahun 2024 sebesar 0,337. Kondisi ini lebih rendah apabila dibandingkan dengan Rasio Gini Nasional dan Jawa Barat. Penurunan ini menunjukkan bahwa upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi di Sumedang berhasil menekan kesenjangan pendapatan khususnya di wilayah perkotaan, sementara di perdesaan terjadi fluktuatif.



Grafik 2.25 Perkembangan Rasio Gini Kabupaten Sumedang, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2019-2024

(Sumber: BPS Kabupaten Sumedang (diolah), 2025)

2.1.2.1.1. Analisis Sektor Unggulan Daerah

Selain berguna untuk melakukan analisis pertumbuhan ekonomi, pendapatan masyarakat, dan kontribusi sektoral, data PDRB juga dapat digunakan untuk melakukan analisis sektor unggulan daerah di Sumedang. Sektor unggulan disini berarti sektor bisnis yang tidak akan habis seandainya dieksploitasi oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang. Identifikasi sektor unggulan merupakan dasar untuk memahami kondisi daerah dengan mengenali potensi, sumber daya, dan keunggulan daerah agar perencanaan pembangunan daerah lebih terarah (efektif dan efisien) dan dapat berjalan dengan baik. Dengan hasil ini, Pemerintah dapat merumuskan strategi peningkatan dan pengembangan potensi unggulan. Potensi-potensi ini berperan

sebagai modal dan panduan bagi instansi terkait untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi.

Metode analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi sektor unggulan di Sumedang yaitu *Location Quotient* (LQ), *Dynamic Location Quotient* (DLQ), *shift-share analysis*, dan *Klassen Typology*. Ketiga metode tersebut digunakan untuk mengetahui dengan cepat sektor yang dianggap unggul, berdasarkan hasil perhitungan data-data PDRB di tingkat Kabupaten Sumedang dan Provinsi Jawa Barat.

1. Analisis *Location Quotient* (LQ) dan *Dynamic Location Quotient* (DLQ)

Analisis LQ dan DLQ adalah dua metode yang saling melengkapi, digunakan untuk menganalisis spesialisasi industri atau sektor ekonomi di suatu wilayah. Analisis LQ adalah analisis yang paling sederhana dan merupakan perbandingan antara peran suatu sektor ekonomi di suatu daerah terhadap besarnya peran sektor ekonomi yang sama suatu daerah yang memiliki cakupan administratif yang lebih besar, sementara DLQ merupakan analisis LQ yang mempertimbangkan laju pertumbuhan sektor dari waktu ke waktu. Interpretasi hasil LQ dapat diartikan sebagai berikut:

- $LQ > 1$: mengindikasikan sektor unggulan (peranan sektor lebih besar di Sumedang daripada di Provinsi Jawa Barat).
- $LQ < 1$: mengindikasikan sektor non unggulan (peranan sektor lebih kecil di Sumedang daripada di Provinsi Jawa Barat).

Sedangkan interpretasi DLQ dapat diartikan sebagai berikut:

- $DLQ > 1$: menunjukkan pertumbuhan yang lebih cepat dari rata-rata pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan (memiliki potensi unggulan di masa depan).
- $DLQ < 1$: mengalami pertumbuhan yang lebih lambat daripada rata-rata pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan (tidak memiliki potensi unggulan di masa depan).

Dengan menggunakan perbandingan data PDRB ADHK Sumedang dan Provinsi Jawa Barat 3 tahun terakhir, didapat 10 (sepuluh) sektor yang berperan sebagai basis/unggulan, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.15 Analisi LQ Kabupaten Sumedang Tahun 2022-2024

Lapangan Usaha	LQ			Rata-Rata LQ	Interpretasi LQ
	2022	2023	2024		
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,34	2,40	2,54	2,43	Basis
Pertambangan & Penggalian	0,06	0,06	0,05	0,06	Non Basis
Industri Pengolahan	0,47	0,46	0,44	0,46	Non Basis

Lapangan Usaha	LQ			Rata-Rata LQ	Interpretasi LQ
	2022	2023	2024		
Pengadaan Listrik & Gas	1,16	1,18	1,25	1,20	Basis
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, & Daur Ulang	0,26	0,28	0,29	0,28	Non Basis
Konstruksi	1,40	1,36	1,25	1,34	Basis
Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor	1,09	1,15	1,17	1,14	Basis
Transportasi & Pergudangan	0,91	0,91	0,91	0,91	Non Basis
Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	1,75	1,77	1,82	1,78	Basis
Informasi & Komunikasi	1,01	0,99	0,99	1,00	Non Basis
Jasa Keuangan & Asuransi	1,56	1,56	1,58	1,57	Basis
Real Estate	1,37	1,37	1,39	1,37	Basis
Jasa Perusahaan	0,19	0,21	0,22	0,21	Non Basis
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, & Jaminan Sosial Wajib	2,85	2,87	2,77	2,83	Basis
Jasa Pendidikan	2,17	2,16	2,20	2,18	Basis
Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	1,68	1,67	1,69	1,68	Basis
Jasa lainnya	0,94	0,98	0,96	0,96	Non Basis

Sumber: Hasil Analisis BAPPERIDA Kabupaten Sumedang, 2025

Dari Tabel 2.15, didapat informasi bahwa nilai LQ terbesar secara rata-rata pada sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, & Jaminan Sosial Wajib kemudian disusul sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, namun sektor yang disebutkan pertama tersebut selama 3 tahun pemantauan nilai LQ-nya mengalami fluktuasi, yang kemungkinan disebabkan laju pertumbuhan ekonomi sektoral Kabupaten Sumedang sedang lebih besar atau lebih kecil dibandingkan dengan sektoral Provinsi Jawa Barat. Sedangkan sektor kedua, meskipun secara rata-rata bukan LQ terbesar, namun secara volatilitas paling stabil untuk dijadikan kegiatan basis. Dengan kontribusi yang cukup tinggi dan juga nilai LQ yang juga cukup tinggi dan stabil menjadikan kegiatan ini sebagai kegiatan basis yang sangat baik untuk terus didorong.

Terlepas dari hasil analisis di atas, teknik LQ belum bisa memberikan kesimpulan akhir dari sektor-sektor yang teridentifikasi sebagai sektor strategis karena kelemahannya yang tidak memperhitungkan laju pertumbuhan sektor. Perlu analisis tambahan agar hasil sektor unggulan benar-benar menggambarkan potensi Sumedang sesungguhnya. Namun sebagai tahap awal, analisis dianggap cukup memberi gambaran terhadap kemampuan Sumedang dalam sektor yang teridentifikasi.

Analisis LQ yang lebih dinamis untuk mempertimbangkan pergerakan data dari waktu ke waktu dan kelebihanannya dalam memberikan informasi tentang potensi sektor untuk menjadi unggulan di masa depan menggunakan teknik DLQ LQ Dinamis). Dengan menggunakan perbandingan data PDRB

ADHK Sumedang dan Provinsi Jawa Barat 5 tahun terakhir, ternyata didapat hasil yang menunjukkan bahwa hampir seluruh 17 sektor PDRB (kecuali sektor Transportasi dan Pergudangan) prospektif untuk berkembang di masa depan dan sektor Konstruksi serta Jasa Perusahaan memperoleh skor DLQ terbesar, sebagaimana berikut.

Tabel 2.16 Analisis DLQ Kabupaten Sumedang Tahun 2021-2024

Lapangan Usaha	LQ Dinamis				Rata-Rata DLQ	Interpretasi DLQ
	2021	2022	2023	2024		
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,853648395	0,972673046	1,050220062	1,141467366	1,005	Prospektif
Pertambangan & Penggalian	1,395149719	0,977254087	0,929012791	0,768301781	1,017	Prospektif
Industri Pengolahan	1,032532451	1,098154897	0,954316126	0,919316727	1,001	Prospektif
Pengadaan Listrik & Gas	0,880219131	0,88473066	1,067307987	1,218732537	1,013	Prospektif
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, & Daur Ulang	0,782866364	0,994548848	1,203807877	1,069124287	1,013	Prospektif
Konstruksi	1,291788904	1,195484602	0,910743249	0,699968528	1,024	Prospektif
Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor	0,971926333	0,903488381	1,162244396	0,975267707	1,003	Prospektif
Transportasi & Pergudangan	0,884521806	1,046800323	1,058293778	1,005564261	0,999	Tidak Prospektif
Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	0,997919594	1,049085526	0,955697422	0,997588669	1,000	Prospektif
Informasi & Komunikasi	0,961711931	1,044003275	0,995500031	1,00056871	1,000	Prospektif
Jasa Keuangan & Asuransi	0,945019923	0,996466097	1,015036093	1,046224589	1,001	Prospektif
Real Estate	0,880970645	1,05756827	1,044873607	1,031979063	1,004	Prospektif
Jasa Perusahaan	0,699194869	0,950278188	1,342027939	1,102365816	1,023	Prospektif
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, & Jaminan Sosial Wajib	1,125741499	1,013900734	1,042089728	0,849459109	1,008	Prospektif
Jasa Pendidikan	1,036607349	0,908827441	1,008888277	1,049675585	1,001	Prospektif
Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	1,005123092	0,970083178	1,012818509	1,012337767	1,000	Prospektif
Jasa lainnya	0,880466913	1,278804057	1,070189583	0,806103429	1,009	Prospektif

Sumber: Hasil Analisis BAPPERIDA Kabupaten Sumedang, 2025

Dengan menggabungkan hasil (*overlay*) perhitungan LQ dan DLQ, akan didapat hasil analisis komprehensif yang menunjukkan struktur ekonomi yang memiliki potensi untuk dikembangkan saat ini dan di masa depan. Jika dibuat dalam sebuah kuadran, hasil kombinasi dari kedua teknik tersebut digambarkan sebagai berikut.

Tabel 2.17 Kuadran Analisis LQ DLQ Sumedang

	DLQ>1 (Prospektif)	DLQ<1 (Tidak Prospektif)
LQ>1 (Basis)	Type I Sektor Basis, Prospektif • Perdagangan, Kehutanan, dan Perikanan • Pengadaan Listrik dan Gas • Konstruksi • Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor • Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minuman • Jasa Keuangan dan Asuransi • Real Estate • Administrasi Pemerintahan, Pendidikan, dan Jaminan Sosial Wajib • Jasa Pendidikan • Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Type III Sektor Basis, Tidak Prospektif • Transportasi dan Pergudangan
LQ<1 (Non Basis)	Type II Sektor Non Basis, Prospektif • Pertambangan dan Penggalian • Industri Pengolahan • Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang • Informasi dan Komunikasi • Jasa Perusahaan • Jasa Lainnya	Type IV Sektor Non Basis, Tidak Prospektif

Sumber: Hasil Analisis BAPPERIDA Kabupaten Sumedang, 2025

Lima sektor yang berada pada kuadran I (type I), memiliki potensi untuk menjadi sektor unggulan dengan pertumbuhan yang pesat, sedangkan sektor-sektor yang berada pada kuadran II (type II) akan mengalami reposisi dari saat ini yang bukan sektor unggulan, menjadi unggulan di masa depan.

2. Analisis Shift-share

Selain menggunakan LQ dan DLQ, untuk menemukan potensi serta sektor unggulan Sumedang juga dapat menggunakan *shift-share analysis*. Analisis *shift-share* digunakan untuk menganalisis peranan suatu sektor ataupun pergeseran suatu sektor di daerah terhadap sektor yang sama dalam perekonomian daerah administratif di atasnya. Analisis ini membandingkan laju pertumbuhan suatu sektor di wilayah yang sempit terhadap wilayah yang lebih luas. Dengan analisis ini, dapat memahami bagaimana struktur ekonomi suatu wilayah berubah, bagaimana sektor unggulan bergeser, serta bagaimana kinerja ekonomi wilayah tersebut jika dibandingkan wilayah lainnya.

Analisis *shift share* memiliki tiga komponen yaitu:

1. *National/regional share*, untuk melihat bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi nasional/provinsi terhadap daerah (kabupaten/kota). Hal ini dilakukan dengan cara menganalisis perubahan pengerjaan agregat secara sektoral dibandingkan dengan perubahan pada sektor yang sama di perekonomian yang dijadikan acuan.

2. *Proportional shift*, untuk mengukur perubahan pertumbuhan atau penurunan pada daerah dibandingkan dengan perekonomian yang lebih besar yang dijadikan acuan. Pengukuran ini dapat mengetahui apakah perekonomian daerah terkonsentrasi pada sektor-sektor yang tumbuh lebih cepat dibanding perekonomian yang dijadikan acuan.
3. *Differential shift*, untuk menentukan seberapa jauh daya saing suatu sektor ekonomi di daerah (lokal) dengan perekonomian yang cakupannya lebih besar yang dijadikan acuan.

Dengan menggunakan perbandingan data PDRB ADHK Sumedang dan Provinsi Jawa Barat masing-masing pada tahun pantauan 2012 dan 2024 didapat hasil perhitungan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.18 Analisis *Shift-share* Kabupaten Sumedang

Lapangan Usaha	Pertumbuhan Proporsional (PP, %)	Pertumbuhan Pangsa Wilayah (PPW, %)	Pergeseran Bersih (PB, %)	Interpretasi PP	Interpretasi PPW	Interpretasi PB
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-35,52	3,92	-31,60	Tidak Bertumbuh Cepat	Berdaya Saing	Tumbuh Lamban
Pertambangan & Penggalian	-71,69	21,52	-50,17	Tidak Bertumbuh Cepat	Berdaya Saing	Tumbuh Lamban
Industri Pengolahan	-5,09	11,90	6,81	Tidak Bertumbuh Cepat	Berdaya Saing	Progresif
Pengadaan Listrik & Gas	-63,84	60,95	-2,89	Tidak Bertumbuh Cepat	Berdaya Saing	Tumbuh Lamban
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, & Daur Ulang	26,21	-39,77	-13,56	Bertumbuh Cepat	Tidak Berdaya Saing	Tumbuh Lamban
Konstruksi	2,64	9,95	12,59	Bertumbuh Cepat	Berdaya Saing	Progresif
Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor	-18,30	7,87	-10,43	Tidak Bertumbuh Cepat	Berdaya Saing	Tumbuh Lamban
Transportasi & Pergudangan	36,00	-23,60	12,40	Bertumbuh Cepat	Tidak Berdaya Saing	Progresif
Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	31,14	3,78	34,92	Bertumbuh Cepat	Berdaya Saing	Progresif
Informasi & Komunikasi	210,94	-42,40	168,54	Bertumbuh Cepat	Tidak Berdaya Saing	Progresif
Jasa Keuangan & Asuransi	-1,95	2,87	0,92	Tidak Bertumbuh Cepat	Berdaya Saing	Tumbuh Lamban
Real Estate	47,14	-16,42	30,72	Bertumbuh Cepat	Tidak Berdaya Saing	Progresif
Jasa Perusahaan	16,40	21,94	38,34	Bertumbuh Cepat	Berdaya Saing	Progresif
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, & Jaminan Sosial Wajib	-38,71	-7,62	-46,33	Tidak Bertumbuh Cepat	Tidak Berdaya Saing	Tumbuh Lamban
Jasa Pendidikan	39,92	-2,69	37,22	Bertumbuh Cepat	Tidak Berdaya Saing	Progresif
Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	63,56	9,90	73,46	Bertumbuh Cepat	Berdaya Saing	Progresif
Jasa lainnya	42,69	8,99	51,68	Bertumbuh Cepat	Berdaya Saing	Progresif

Sumber: Hasil Analisis BAPPERIDA Kabupaten Sumedang, 2025

Interpretasi pertumbuhan proporsional “Bertumbuh Cepat”/positif mengandung makna pertumbuhan sektoral Provinsi Jawa Barat lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan total Provinsi Jawa Barat, yang menyebabkan pertumbuhan sektoral di Kabupaten Sumedang bertumbuh cepat, karena

mendapatkan efek pertumbuhan yang juga cepat dari pertumbuhan Provinsi Jawa Barat. Sebaliknya, jika pertumbuhan proporsional “Tidak Bertumbuh Cepat”/negatif mengandung makna pertumbuhan sektoral Provinsi Jawa Barat lebih rendah dibandingkan pertumbuhan total Provinsi Jawa Barat, yang menyebabkan pertumbuhan sektoral di Sumedang tidak tumbuh cepat/tergolong lamban, karena mendapatkan efek pertumbuhan yang juga tidak cepat dari pertumbuhan Provinsi Jawa Barat.

Pertumbuhan pangsa wilayah yang “Berdaya Saing”/positif mengandung makna daya saing sektoral di Sumedang lebih tinggi dibanding Provinsi Jawa Barat. Sebaliknya “Tidak Berdaya Saing”/negatif mengandung makna daya saing sektoral di Kabupaten Sumedang lebih rendah/tidak punya daya saing dibandingkan Provinsi Jawa Barat. Sektor Pengadaan Listrik dan Gas serta Jasa Perusahaan Sumedang adalah dua sektor yang paling memiliki daya saing relatif dibandingkan sektoral Provinsi Jawa Barat.

Sedangkan jika pergeseran bersih berkriteria “Progresif”/positif artinya pertumbuhan sektoral di Sumedang tersebut maju/progresif, dan jika negatif/”Tumbuh Lamban” diartikan sebaliknya. Sektor Informasi dan Komunikasi memiliki pergeseran bersih terbesar sehingga diartikan bahwa sektor tersebut paling progresif dari seluruh sektor yang ada.

Dari hasil analisis, secara umum ada beberapa sektor yang memenuhi ketiga kategori bertumbuh cepat, berdaya saing, dan progresif, yakni sektor Konstruksi; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Jasa Perusahaan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; serta Jasa Lainnya.

3. Analisis *Klassen Typology*

Analisis tipologi *Klassen* digunakan untuk melihat pola dan struktur pertumbuhan ekonomi suatu daerah dengan membagi sektor-sektor ekonomi dalam empat kuadran berdasarkan pertumbuhan dan kontribusi masing-masing sektor terhadap PDRB: sektoral maju dan cepat tumbuh, sektoral maju tapi tertekan, sektoral potensial berkembang cepat, dan sektoral relatif tertinggal. Elaborasi dari 4 kuadran tersebut yaitu:

- **Cepat Maju dan Cepat Tumbuh (kuadran I):**

Laju pertumbuhan dan kontribusi sektoral PDRB Sumedang lebih tinggi dari rata-rata sektoral Provinsi Jawa Barat. Ini menunjukkan bahwa sektoral tersebut memiliki potensi ekonomi yang kuat dan pertumbuhan pesat.

▪ **Potensial Berkembang (kuadran II):**

Laju pertumbuhan sektoral Sumedang lebih tinggi, tetapi kontribusi sektoral PDRBnya masih di bawah Provinsi Jawa Barat. Ini bisa menunjukkan bahwa sektoral tersebut memiliki potensi pertumbuhan yang besar, tetapi perlu meningkatkan produktivitas/output sektornya.

▪ **Maju Tapi Tertekan (kuadran III):**

Kontribusi sektoral PDRB Sumedang lebih tinggi, tetapi laju pertumbuhan sektoralnya lebih rendah dibandingkan Provinsi Jawa Barat. Ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti stagnasi sektor ekonomi atau adanya tantangan dalam menciptakan lapangan kerja.

▪ **Relatif Tertinggal (kuadran IV):**

Sektor ini memiliki laju pertumbuhan PDRB dan kontribusi sektoral yang lebih rendah dibanding Provinsi Jawa Barat. Ini menunjukkan bahwa sektor tersebut membutuhkan perhatian khusus dalam pembangunan ekonomi dan peningkatan produktivitasnya.

Dengan menggunakan perbandingan data PDRB ADHB Sumedang dan Provinsi Jawa Barat selama lima tahun terakhir didapat hasil perhitungan *Klassen Typology* sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.19 Analisis *Klassen Typology* Kabupaten Sumedang

Lapangan Usaha	Provinsi Jawa Barat		Sumedang			Kuadran
	Rata-rata Pertumbuhan (%)	Rata-rata Komposisi (%)	Rata-rata Pertumbuhan (%)	Rata-rata Komposisi (%)	Keterangan	
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,56	8,64	6,77	19,00	Sektor pertumbuhan cepat	1
Pertambangan & Penggalan	4,48	1,08	7,64	0,08	Sektor potensial berkembang	2
Industri Pengolahan	8,10	41,68	6,42	19,90	Sektor relatif tertinggal	4
Pengadaan Listrik & Gas	4,75	0,48	2,11	0,36	Sektor relatif tertinggal	4
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, & Daur Ulang	7,49	0,10	6,98	0,02	Sektor relatif tertinggal	4
Konstruksi	8,66	8,43	8,14	10,72	Sektor maju tapi tertekan	3
Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor	7,67	14,48	9,67	15,12	Sektor pertumbuhan cepat	1
Transportasi & Pergudangan	12,97	5,55	10,65	4,94	Sektor relatif tertinggal	4
Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	10,05	2,91	12,88	4,88	Sektor pertumbuhan cepat	1
Informasi & Komunikasi	7,25	3,87	6,30	3,78	Sektor relatif tertinggal	4
Jasa Keuangan & Asuransi	7,72	2,85	6,64	4,39	Sektor maju tapi tertekan	3

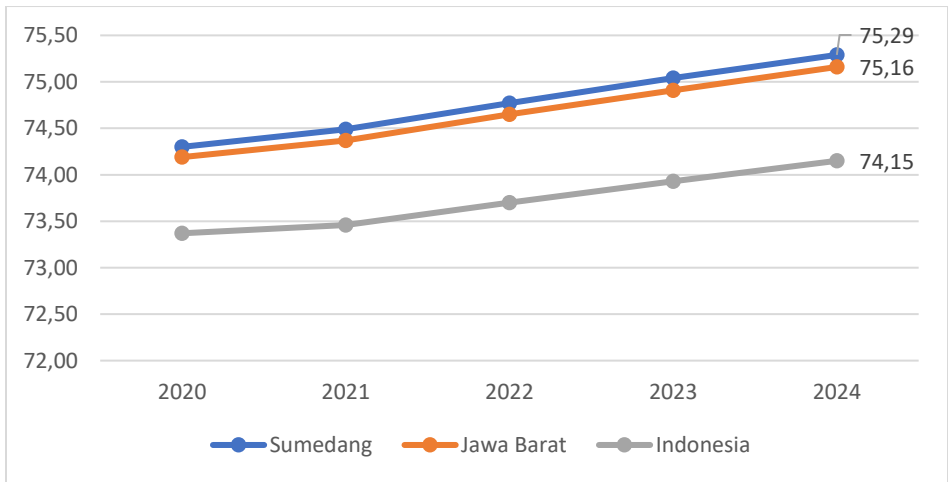
Tabel 2.21 *Overlay Analisis Sektor Unggulan di Sumedang*

Lapangan Usaha	Analisis LQ	Analisis DLQ	Analisis Shift-share			Analisis Klassen
			Pertumbuhan Proporsional	Pertumbuhan Pangsa Wilayah	Pergeseran Bersih	
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Basis	Prospektif	Tidak Bertumbuh Cepat	Berdaya Saing	Tumbuh Lamban	Sektor pertumbuhan cepat
Pertambangan & Penggalian	Non Basis	Prospektif	Tidak Bertumbuh Cepat	Berdaya Saing	Tumbuh Lamban	Sektor potensial berkembang
Industri Pengolahan	Non Basis	Prospektif	Tidak Bertumbuh Cepat	Berdaya Saing	Progresif	Sektor relatif tertinggal
Pengadaan Listrik & Gas	Basis	Prospektif	Tidak Bertumbuh Cepat	Berdaya Saing	Tumbuh Lamban	Sektor relatif tertinggal
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, & Daur Ulang	Non Basis	Prospektif	Bertumbuh Cepat	Tidak Berdaya Saing	Tumbuh Lamban	Sektor relatif tertinggal
Konstruksi	Basis	Prospektif	Bertumbuh Cepat	Berdaya Saing	Progresif	Sektor maju tapi tertekan
Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor	Basis	Prospektif	Tidak Bertumbuh Cepat	Berdaya Saing	Tumbuh Lamban	Sektor pertumbuhan cepat
Transportasi & Pergudangan	Non Basis	Tidak Prospektif	Bertumbuh Cepat	Tidak Berdaya Saing	Progresif	Sektor relatif tertinggal
Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	Basis	Prospektif	Bertumbuh Cepat	Berdaya Saing	Progresif	Sektor pertumbuhan cepat
Informasi & Komunikasi	Non Basis	Prospektif	Bertumbuh Cepat	Tidak Berdaya Saing	Progresif	Sektor relatif tertinggal
Jasa Keuangan & Asuransi	Basis	Prospektif	Tidak Bertumbuh Cepat	Berdaya Saing	Tumbuh Lamban	Sektor maju tapi tertekan
Real Estate	Basis	Prospektif	Bertumbuh Cepat	Tidak Berdaya Saing	Progresif	Sektor maju tapi tertekan
Jasa Perusahaan	Non Basis	Prospektif	Bertumbuh Cepat	Berdaya Saing	Progresif	Sektor potensial berkembang
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, & Jaminan Sosial Wajib	Basis	Prospektif	Tidak Bertumbuh Cepat	Tidak Berdaya Saing	Tumbuh Lamban	Sektor pertumbuhan cepat
Jasa Pendidikan	Basis	Prospektif	Bertumbuh Cepat	Tidak Berdaya Saing	Progresif	Sektor maju tapi tertekan
Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	Basis	Prospektif	Bertumbuh Cepat	Berdaya Saing	Progresif	Sektor maju tapi tertekan
Jasa lainnya	Non Basis	Prospektif	Bertumbuh Cepat	Berdaya Saing	Progresif	Sektor potensial berkembang

Sumber: Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bapperida, 2025

2.1.2.2. Kesehatan Untuk Semua

Perkembangan Usia Harapan Hidup (UHH) di Indonesia, Jawa Barat, dan Kabupaten Sumedang dari tahun 2019 hingga 2023 memperlihatkan pola yang sedikit berbeda. Secara nasional, UHH di Indonesia menunjukkan peningkatan yang stabil dari 71,5 tahun pada tahun 2019 menjadi 74,15 tahun pada tahun 2024. Meskipun peningkatan ini tidak terlalu besar, tren ini mencerminkan adanya perbaikan dalam pelayanan kesehatan dan kualitas hidup masyarakat secara umum.

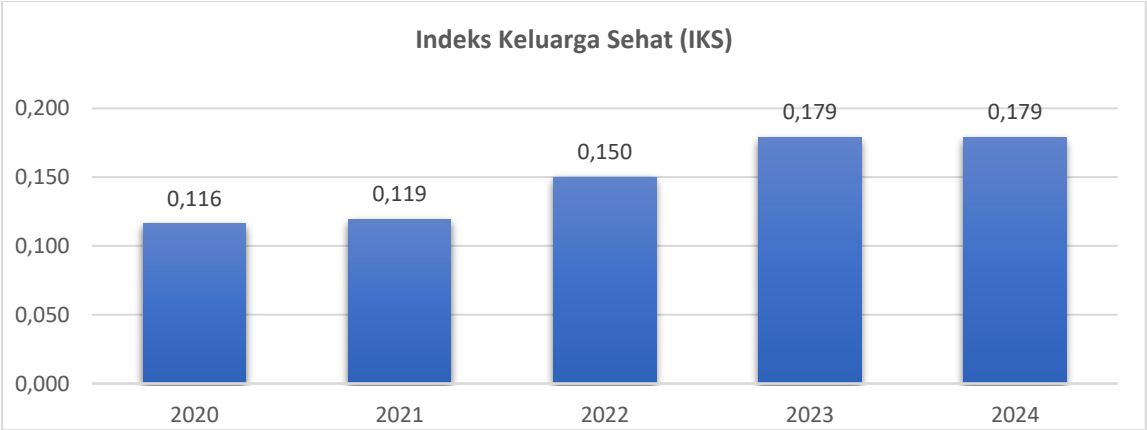


Grafik 2.26 Capaian Usia Harapan Hidup Kabupaten Sumedang, Jawa Barat dan Indonesia Tahun 2020 – 2024
(Sumber: BPS Kabupaten Sumedang (diolah), 2025)

Di tingkat provinsi, Jawa Barat memperlihatkan kinerja yang lebih baik dalam hal UHH. Pada tahun 2019, UHH Jawa Barat berada di sekitar 73,5 tahun dan terus meningkat hingga mencapai 75,16 tahun pada tahun 2024. Peningkatan yang lebih signifikan ini menunjukkan efektivitas program kesehatan dan upaya peningkatan kualitas hidup yang dilakukan oleh pemerintah provinsi Jawa Barat. Kabupaten Sumedang menunjukkan capaian UHH yang lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata Nasional dan Provinsi. Pada tahun 2019, UHH Sumedang berada di sekitar 75,29 tahun, lebih rendah dibandingkan dengan Jawa Barat tetapi masih di atas rata-rata Nasional. Namun, Sumedang mengalami peningkatan yang cukup signifikan, terutama setelah tahun 2021. Pada tahun 2024, UHH Sumedang mencapai 75,04 tahun, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan Jawa Barat dan jauh di atas rata-rata nasional.

Perbedaan ini mencerminkan keberhasilan program kesehatan di Sumedang yang mungkin lebih terfokus dan efektif. Program kesehatan masyarakat yang komprehensif, akses yang lebih baik ke layanan kesehatan, dan inisiatif lokal yang kuat dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat kemungkinan besar berkontribusi pada peningkatan signifikan ini.

Secara keseluruhan, meskipun UHH Sumedang masih lebih tinggi dibandingkan dengan Jawa Barat dan Nasional, tren peningkatan yang signifikan menunjukkan bahwa dengan terus diimplementasikannya kebijakan dan program kesehatan yang efektif, Kabupaten Sumedang dapat terus mempertahankan dan bahkan meningkatkan capaian UHH-nya di masa depan. Analisis ini juga menunjukkan pentingnya peran program dan kebijakan lokal dalam mempengaruhi indikator kesehatan masyarakat secara keseluruhan.



Grafik 2.27 Capaian Indeks Keluarga Sehat di Kabupaten Sumedang Tahun 2020-2024

(Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang (2024))

Keluarga yang tergolong dalam keluarga sehat adalah keluarga dengan IKS > 0,8 sesuai dengan pernyataan yang disampaikan dalam pedoman Program Indonesia Sehat-Pendekatan Keluarga (PIS-PK) Kementerian Kesehatan.

Perkembangan Indeks Keluarga Sehat di Kabupaten Sumedang selama periode tahun 2020-2024 semakin baik. Bahkan pada tahun 2020 saat Pandemi Covid-19 merebak tidak sampai menurunkan Indeks Kesehatan Keluarga di Kabupaten Sumedang.

Tabel 2.22 Indikator Kesehatan di Kabupaten Sumedang Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Prevalensi Stunting (SSGI)	-	22	27,6	-	17,1
2	Prevalensi Stunting (EPPGBM)	17,5	10,99	8,27	7,89	7,32
3.	Prevalensi Stunting (Survei Kesehatan Indonesia)	-	-	-	14,4	-
3	Jumlah Kematian Balita (orang)	157	186	233	196	202
4	Jumlah Kematian Ibu (orang)	21	36	17	22	21

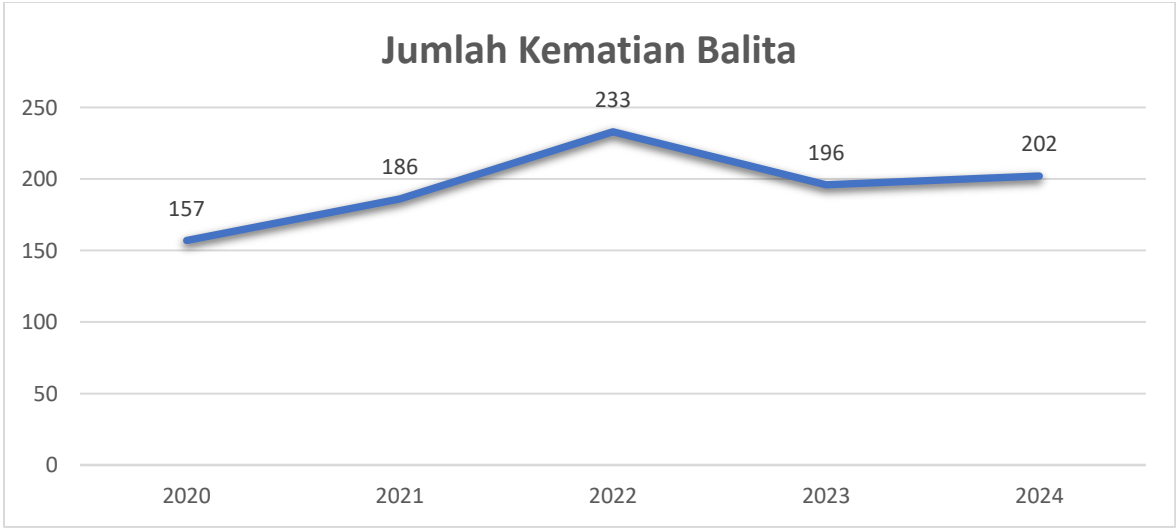
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang (2024)

Stunting merupakan kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur dibandingkan dengan menggunakan standar WHO. Prevalensi stunting merupakan indikator untuk mengukur persentase anak balita yang tingginya di bawah ketinggian rata-rata penduduk acuan. Stunting pada anak-anak mencerminkan efek dari kekurangan gizi yang kronis dan menderita penyakit berulang yang disebabkan oleh latar belakang sosial dan ekonomi yang buruk.

Berdasarkan data pada tabel di atas, terkait dengan data prevalensi stunting terdapat 2 (dua) data yang dihasilkan, 1) data berdasarkan Elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM); 2) data berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia. Melalui kedua cara perhitungan data tersebut didapatkan perbedaan data prevalensi stunting yang cukup signifikan, hal ini dikarenakan adanya perbedaan metode pengumpulan data. Data yang dihasilkan berdasarkan EPPGBM dilakukan melalui pengisian aplikasi oleh kader posyandu di seluruh wilayah setiap bulan penimbangan. Survei Kesehatan Indonesia merupakan survei integrasi antara Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dengan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI). SSGI dilakukan dengan memilih rumah tangga balita hasil pemutakhiran secara *systematic sampling* dengan *implicit stratification* pendidikan kepala rumah tangga, dalam hal ini dilakukan dengan sampel sebanyak 1.162 balita pada tahun 2023.

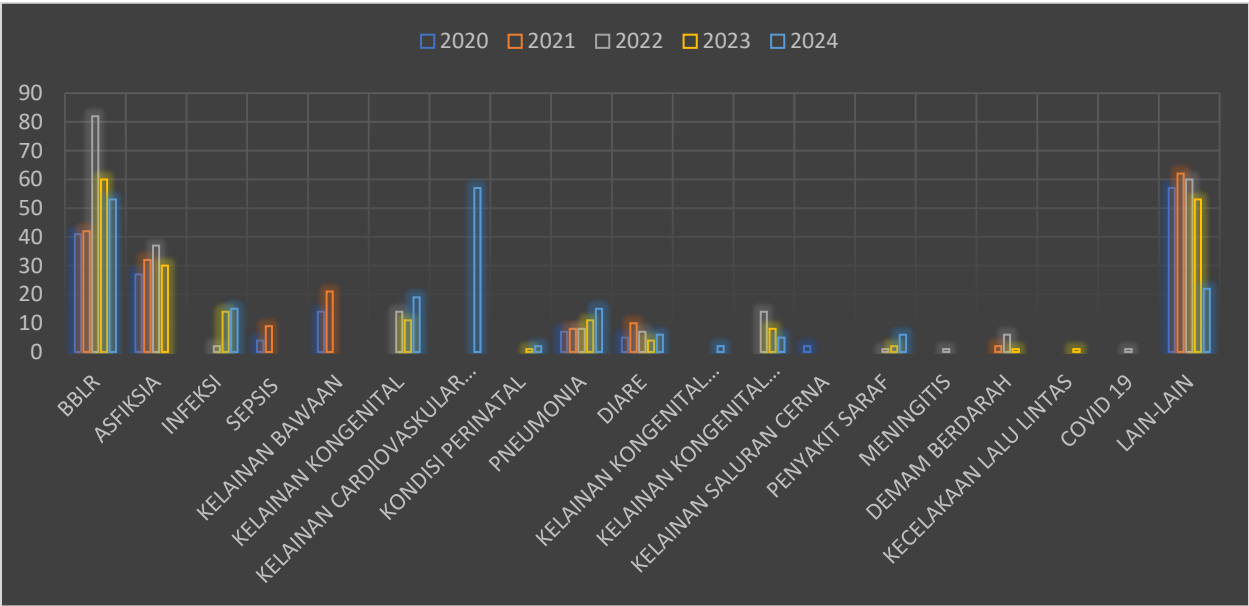
Tren pravalensi stunting Kabupaten Sumedang terus mengalami penurunan. Keberhasilan ini merupakan dampak dari efektifnya pelaksanaan program penurunan stunting baik program intervensi spesifik dan intervensi sensitif. Penggunaan teknologi juga menjadi bagian penting dalam proses penurunan stunting baik dari aspek perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi.

Data jumlah kematian balita tahun 2024 bertambah 6 menjadi 202 balita dari 196 balita pada Tahun 2023 dengan penyebab kematian terbesar karena kelainan *cardiovaskular* dan *respiratori*.



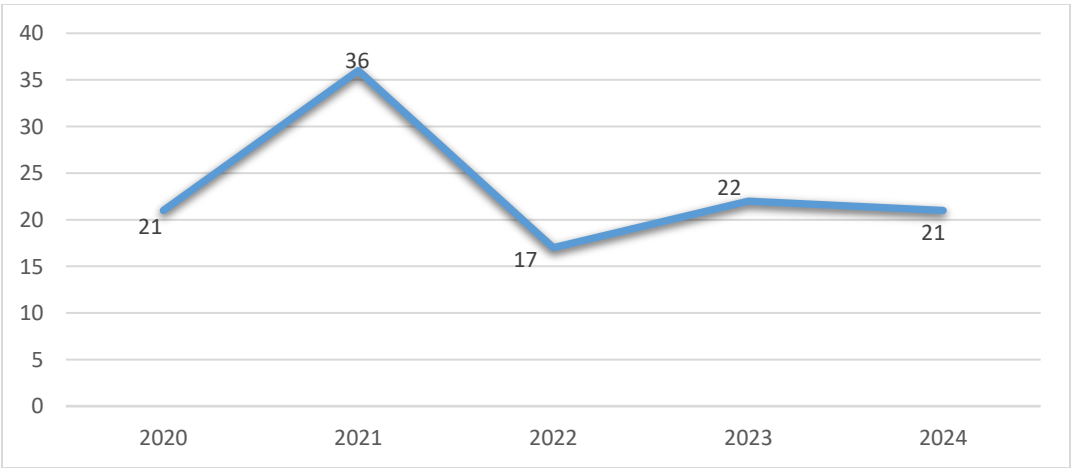
Grafik 2.28 Jumlah Kematian Balita Kabupaten Sumedang Tahun 2020-2024
(Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang (2024))

Dan untuk penyebab kematian balita untuk tahun 2020-2024 digambarkan pada grafik di bawah ini.

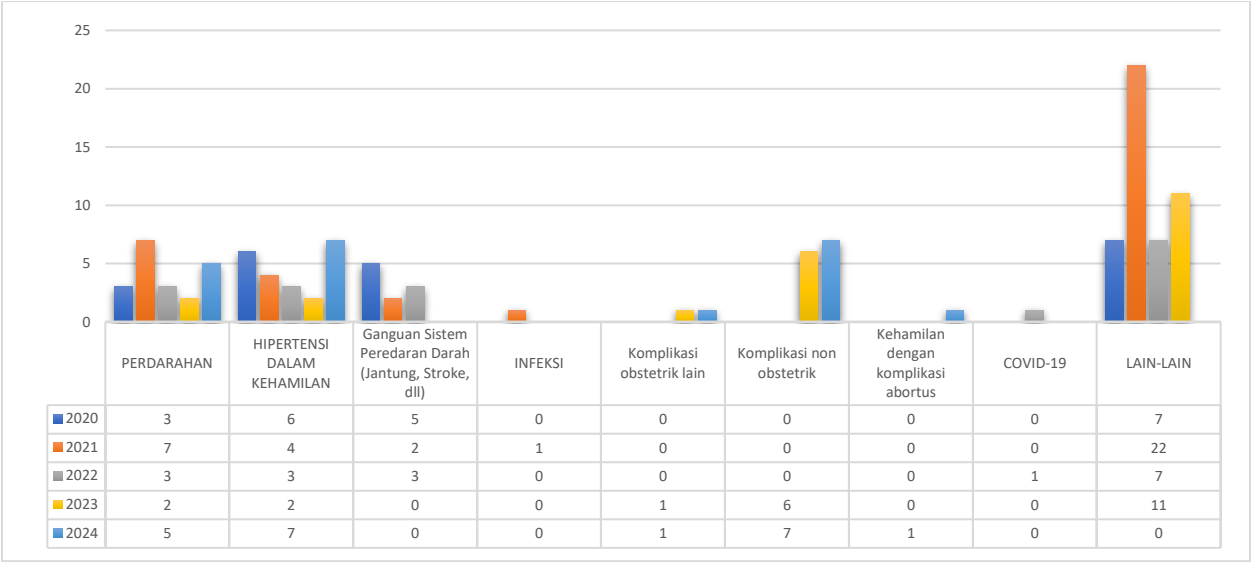


Grafik 2.29 Penyebab Kematian Balita Kabupaten Sumedang Tahun 2020-2024
(Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang (2024))

Sedangkan untuk data Jumlah Kematian Ibu mencerminkan kualitas pelayanan kesehatan selama hamil, penanganan persalinan dan masa nifas. Jumlah kematian ibu dan penyebab kematian ibu digambarkan pada grafik berikut.



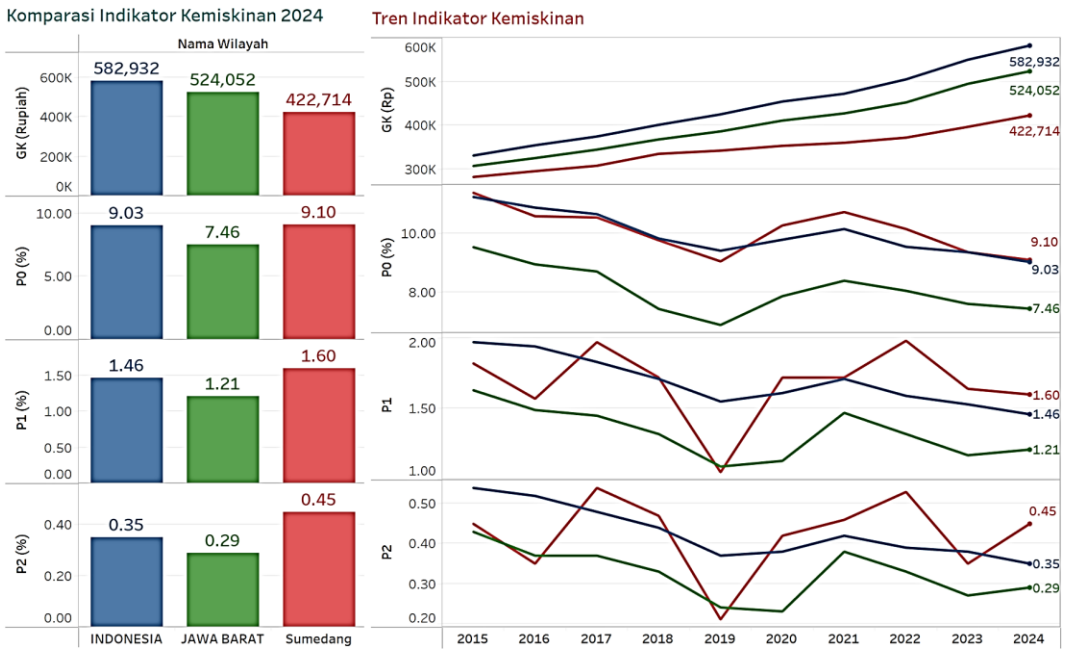
Grafik 2.30 Jumlah Kematian Ibu Kabupaten Sumedang Tahun 2024
(Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang (2024))



Grafik 2.31 Penyebab Kematian Ibu Kabupaten Sumedang Tahun 2024
(Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang (2024))

2.1.2.3. Kemiskinan

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Sumedang menunjukkan tren penurunan, meskipun kedalaman kemiskinan (P1) dan keparahan kemiskinan (P2) menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk miskin masih jauh di bawah garis kemiskinan. Indikator kemiskinan di Kabupaten Sumedang pada tahun 2024, dapat dilihat bahwa meskipun terjadi perbaikan pada beberapa aspek, tantangan terkait kemiskinan masih menjadi isu yang signifikan.



Grafik 2.32 Komparasi Indikator Kemiskinan Tahun 2024
(Sumber: BPS Kabupaten Sumedang, 2025 (Diolah))

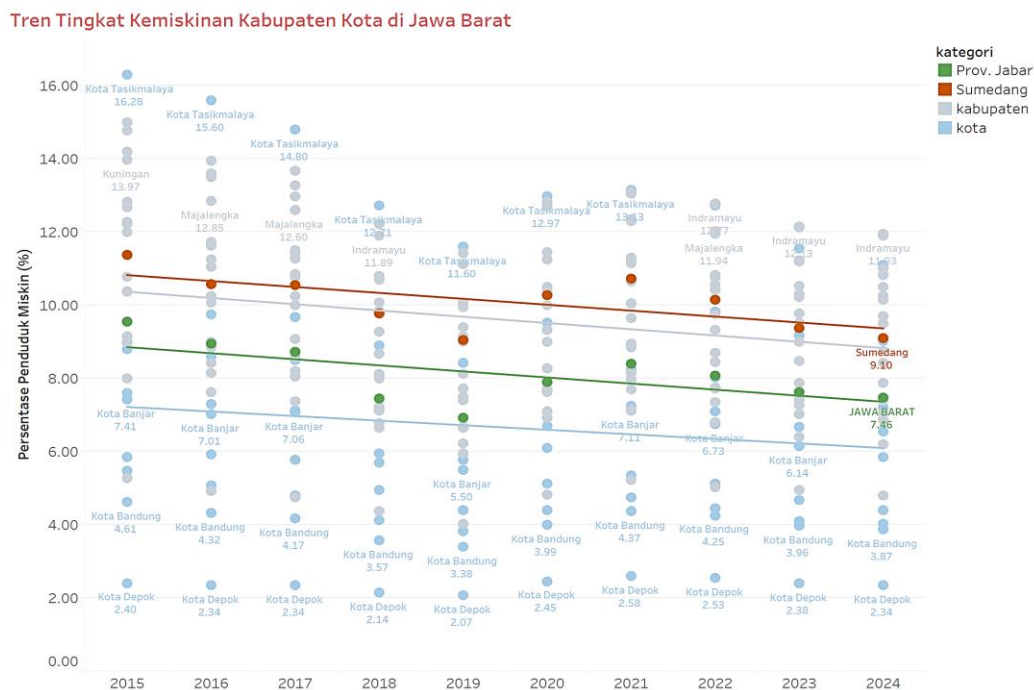
Pada Garis Kemiskinan (GK), Sumedang memiliki angka yang lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata Jawa Barat dan Indonesia. Hal ini mencerminkan adanya penurunan yang relatif stabil dalam garis kemiskinan,

namun masih tertinggal jika dibandingkan dengan wilayah lain. Sumedang perlu mempercepat perbaikan di sektor ekonomi untuk mengurangi gap ini agar bisa mencapai kesejahteraan yang lebih merata di masyarakat.

Dalam hal Persentase Penduduk Miskin (PO), Sumedang tercatat dengan angka yang sedikit lebih tinggi daripada Jawa Barat, meskipun masih lebih rendah dibandingkan dengan Indonesia. Angka ini menunjukkan bahwa meskipun ada penurunan, kemiskinan masih mempengaruhi sebagian besar penduduk Sumedang, dan kebijakan yang lebih terfokus pada peningkatan daya beli masyarakat dan pemberdayaan ekonomi akan sangat diperlukan untuk mengurangi angka kemiskinan lebih lanjut.

Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1) di Sumedang mengalami angka yang lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata provinsi, menunjukkan bahwa penduduk miskin di Sumedang masih mengalami kesulitan yang cukup dalam untuk keluar dari kemiskinan. Kedalaman kemiskinan yang relatif tinggi ini mengindikasikan bahwa meskipun ada penurunan angka kemiskinan, terdapat segmen masyarakat yang masih sangat rentan secara ekonomi dan memerlukan perhatian khusus dalam hal pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses ke sumber daya.

Keparahan Kemiskinan (P2) di Sumedang juga menunjukkan angka yang lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi dan Nasional, yang mengindikasikan bahwa ketimpangan sosial masih menjadi masalah yang perlu segera ditangani. P2 yang relatif tinggi menunjukkan bahwa kemiskinan di Sumedang tidak hanya melibatkan banyak orang, tetapi juga memiliki dampak yang lebih dalam pada kualitas hidup mereka. Ini menggarisbawahi pentingnya kebijakan yang fokus pada pengurangan ketimpangan dan penguatan program perlindungan sosial.



Grafik 2.33 Tren Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Barat
Tahun 2024
(Sumber: BPS Kabupaten Sumedang, 2025 (Diolah))

Berdasarkan tren tingkat kemiskinan yang ditampilkan, posisi Kabupaten Sumedang menunjukkan perbaikan, meskipun masih berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Barat dan kota-kota besar lainnya. Sumedang menunjukkan penurunan yang relatif stabil dalam tingkat kemiskinan selama beberapa tahun terakhir, namun tetap berada pada posisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah-wilayah seperti Kota Depok, Kota Bandung, dan Kota Banjar, yang mengalami penurunan tingkat kemiskinan jauh lebih signifikan.

Jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat, yang juga menunjukkan tren penurunan yang stabil, Sumedang sedikit tertinggal. Namun, Sumedang lebih baik dari beberapa kabupaten lainnya seperti Tasikmalaya dan Majalengka, yang masih memiliki angka kemiskinan yang lebih tinggi. Tantangan terbesar di Sumedang adalah meningkatkan pendapatan masyarakat miskin dan mengurangi ketimpangan, terutama bagi kelompok miskin ekstrem.

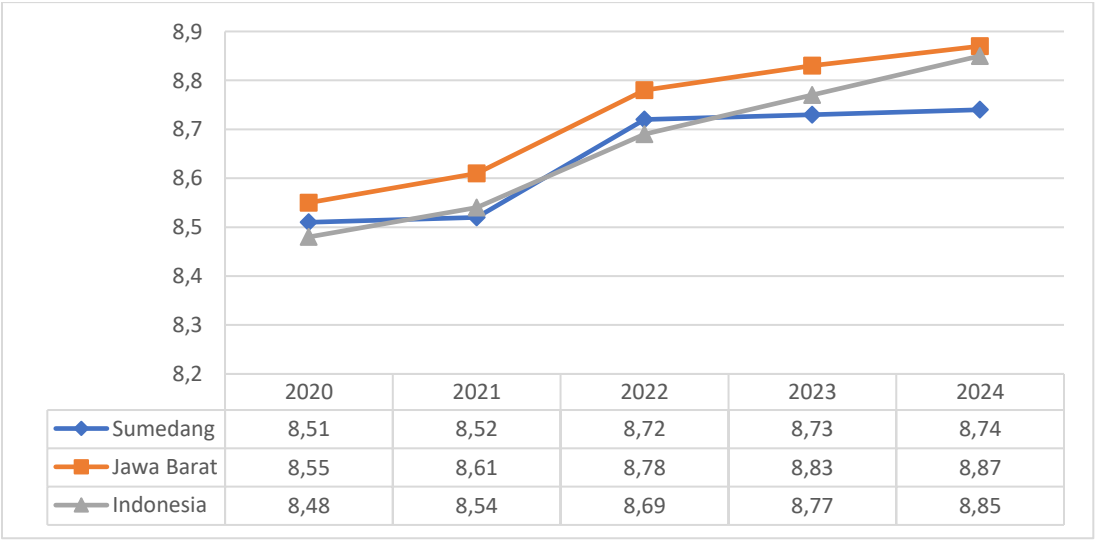
Upaya yang akan dilakukan dalam menangani kemiskinan secara berkelanjutan dilakukan melalui upaya menurunkan beban pengeluaran masyarakat miskin dengan melaksanakan program-program perlindungan sosial. Selanjutnya upaya peningkatan pendapatan masyarakat miskin dilakukan dengan melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dan program usaha mikro kecil dan menengah. Kemiskinan juga timbul akibat dari kondisi infrastruktur dasar yang tidak memadai. Oleh sebab itu, program

peningkatan infrastruktur dasar meliputi pembangunan jalan, jembatan, irigasi dan sarana pelayanan dasar akan dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan.

2.1.2.4. Pendidikan yang berkualitas dan Merata

Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Indonesia, Jawa Barat, dan Kabupaten Sumedang dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren peningkatan. Secara nasional, RLS di Indonesia mengalami kenaikan dari 8,48 tahun pada tahun 2020 menjadi 8,85 tahun pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan upaya yang berhasil dalam memperpanjang masa pendidikan di tingkat nasional, menunjukkan keberhasilan program-program pendidikan yang dicanangkan oleh pemerintah pusat.

Di tingkat Provinsi, Jawa Barat juga menunjukkan peningkatan yang konsisten dalam RLS. Pada tahun 2020, RLS Jawa Barat berada di sekitar 8,55 tahun dan terus meningkat hingga mencapai 8,87 tahun pada tahun 2024. Kinerja Jawa Barat ini menggambarkan efektivitas dari program pendidikan yang dijalankan oleh Pemerintah Provinsi, termasuk upaya untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di seluruh wilayah provinsi.



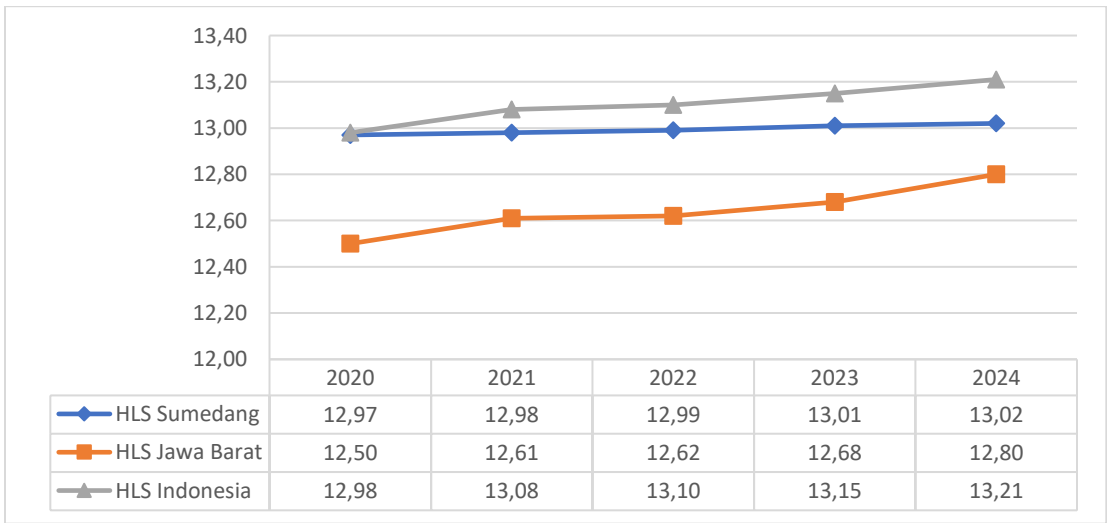
Grafik 2.34 Capaian Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat dan Indonesia Tahun 2020 – 2024
(Sumber: BPS Kabupaten Sumedang, 2025)

RLS Kabupaten Sumedang di tahun 2020 di angka 8,51 tahun lebih tinggi dari angka RLS Nasional namun lebih rendah dari angka RLS Provinsi, dan tahun 2024 angka RLS Kabupaten Sumedang sebesar 8,74 tahun lebih rendah dibandingkan angka RLS Nasional dan angka RLS Provinsi. Kenaikan angka RLS Kabupaten Sumedang dari tahun 2022-2024 hanya 0,01 setiap tahunnya.

Secara keseluruhan, meskipun RLS Sumedang silih berganti posisi dengan angka RLS Nasional, tren yang terus meningkat yang kuat menunjukkan bahwa dengan terus diimplementasikannya kebijakan pendidikan yang efektif, Kabupaten Sumedang dapat mencapai dan bahkan melampaui rata-rata nasional di masa depan. Analisis ini juga menekankan pentingnya peran program dan kebijakan lokal dalam meningkatkan indikator pendidikan di tingkat kabupaten.

Dalam grafik Harapan Lama Sekolah (HLS) (Tahun) periode tahun 2020-2024 dibawah, kita dapat melihat posisi Kabupaten Sumedang yang selalu dibawah angka HLS Nasional tetapi di atas angka HLS Provinsi Jawa Barat. Fenomena yang terlihat di grafik ini, ketiga wilayah ini mengalami tren yang terus meningkat, tetapi angka HLS Kabupaten Sumedang peningkatannya tren peningkatan tiap tahunnya yang paling rendah, dengan garis grafik yang landai dan moderat dibandingkan angka HLS Nasional dan HLS Provinsi Jawa Barat yang lebih cepat peningkatannya.

Angka-angka HLS Kabupaten Sumedang pada periode tahun 2020-2024 ini trennya terus meningkat hanya kenaikannya 0,01 tiap tahunnya kecuali dari tahun 2022 ke 2023 naik 0,02 poin. Tahun 2020 12,97 tahun, naik di tahun-tahun berikutnya menjadi 12,98; 12,99; 13,01; dan 13,02 pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024.



Grafik 2.35 Capaian Harapan Lama Sekolah (Tahun) di Kabupaten Sumedang Jawa Barat dan Indonesia Tahun 2020 – 2024
(Sumber: BPS Kabupaten Sumedang, 2025)

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun Sumedang memiliki HLS yang cukup baik pada awal periode, peningkatan di tingkat Jawa Barat dan Nasional menunjukkan tren yang lebih kuat dan stabil. Pemerintah Kabupaten Sumedang perlu memperhatikan dan mungkin mengadopsi

beberapa kebijakan atau strategi dari tingkat Provinsi dan Nasional untuk lebih meningkatkan HLS-nya.

Era globalisasi ditandai dengan tuntutan bagi setiap masyarakat untuk memiliki berbagai kompetensi atau kemampuan agar mampu bersaing. Salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh seluruh masyarakat Indonesia adalah kemampuan literasi dan numerasi. Dengan demikian pada tahun 2021 evaluasi belajar siswa yang disebut Ujian Nasional (UN) digantikan dengan sistem Asessmen Nasional (AN).

Pelaksanaan AN menggunakan sistem sampel dengan jumlah peserta yang terbatas dari setiap sekolah, akan mengevaluasi dan memetakan sistem pendidikan berupa input, proses dan hasil melalui 3 (tiga) bagian aspek pelaksanaan, salah satunya adalah Asessmen Kompetensi Minimal (AKM) yang dirancang dengan tujuan untuk mengukur tingkat pencapaian peserta didik dari hasil belajar kognitif pada bidang literasi dan numerasi.

Kompetensi literasi adalah kemampuan siswa untuk mengakses, menggunakan, menafsirkan dan mengkomunikasikan informasi dan ide melalui berbagai teks. Asessmen literasi bertujuan untuk mengukur kemampuan siswa dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi dan merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah.

Kompetensi numerasi adalah untuk memahami dan menggunakan angka dan simbol matematika dasar, serta menganalisis informasi dalam grafik, tabel dan bagan atau untuk mengaplikasikan bilangan atau keterampilan hitung untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari dalam berbagai jenis konteks yang relevan. Kemampuan numerasi yang baik dapat membantu siswa menghadapi tantangan matematika, menyelesaikan masalah dan berpikir secara logis.

Penguatan literasi dan numerasi pada peserta didik memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari tingkat pusat, daerah, hingga satuan pendidikan, karena penguatan literasi dan numerasi merupakan suatu program pada urusan pendidikan yang akan berkelanjutan. Dengan demikian, Kabupaten Sumedang menjadikan persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi dan numerasi yang memenuhi kompetensi minimum sebagai Indikator Kinerja Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan

Dasar, dan Pendidikan Menengah. Sebelum Tahun 2023 data mutu pendidikan terpisah-pisah (UN, akreditasi, survei). Rapor Pendidikan menggabungkan hasil Asesmen Nasional, Data Pokok Pendidikan (Dapodik), dan evaluasi daerah menjadi satu sistem digital.

Pada 2023 momen pertama seluruh daerah memiliki *dashboard* rapor pendidikan yang seragam di bawah Permendikbudristek No. 9 Tahun 2022, Sehingga tahun 2023 menjadi tahun pertama evaluasi mutu pendidikan dilakukan dengan data pembelajaran pasca-pandemi, sehingga Rapor Pendidikan bisa memotret kondisi terbaru untuk merancang intervensi maka Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mulai menerapkan Rapor Pendidikan secara penuh sebagai instrumen tunggal evaluasi mutu pendidikan pada semua jenjang. Kebijakan ini dilaksanakan sebagai bagian dari program Merdeka Belajar untuk memperkuat perencanaan berbasis data dan meningkatkan akuntabilitas kinerja pendidikan di tingkat satuan pendidikan, daerah, maupun nasional.

Berikut realisasi persentase siswa dengan kompetensi literasi dan numerasi yang memenuhi kompetensi minimum yang tertuang pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.23 Capaian Persentase Siswa dengan Kompetensi Literasi dan Numerasi yang Memenuhi Kompetensi Minimum Tahun 2020-2024

No	Indikator	Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase siswa dengan kompetensi literasi	-	-	-	56,18	82,67
2.	Persentase siswa dengan kompetensi numerasi	-	-	-	49,4	77,90

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang (2024)

2.1.2.5. **Perlindungan Sosial yang Adaptif**

Perlindungan sosial yang adaptif adalah pendekatan perlindungan sosial yang dirancang untuk bisa merespons dan menyesuaikan diri terhadap berbagai risiko dan guncangan, baik yang bersifat mendadak (seperti bencana alam atau pandemi) maupun yang bertahap (seperti perubahan iklim atau transformasi ekonomi).

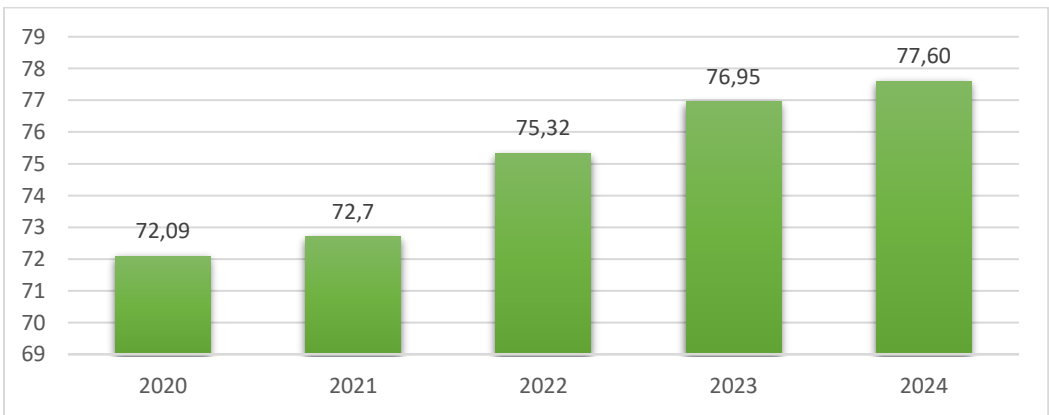
Tujuan utama dari perlindungan sosial yang adaptif adalah meningkatkan ketahanan masyarakat-terutama kelompok rentan-dalam menghadapi risiko sosial, ekonomi, maupun bencana, dengan sistem yang fleksibel dan responsif.

Perlindungan sosial adaptif menggabungkan 3 sistem:

- 1. Sistem Perlindungan Sosial Reguler seperti PKH, BPNT, JKN, bantuan disabilitas, dan lain-lain.
- 2. Manajemen Risiko Bencana: penanganan darurat, evakuasi, pemulihan pasca-bencana.
- 3. Adaptasi Perubahan Iklim: dukungan terhadap mata pencaharian yang terancam, seperti pertanian terdampak kekeringan atau banjir.

2.1.2.6. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Indeks Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Sumedang naik dari 72,09 (Tahun 2020) menjadi 77,60 (Tahun 2024). Angka 77,60 menunjukkan populasi masyarakat di 26 kecamatan se-Kabupaten Sumedang masuk pada kategori kerukunan tinggi.



Grafik 2.36 Capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Sumedang Tahun 2022-2024

(Sumber: Bagian Kesra Setda Kabupaten Sumedang, 2025)

Upaya pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan budaya lokal menjadi hal yang sangat penting dalam upaya melestarikan budaya lokal di Kabupaten Sumedang. Modernisasi yang semakin menguat di Tengah perkembangan global mengakibatkan berkurangnya apresiasi terhadap budaya lokal. Hal ini tentunya perlu diperhatikan seiring dengan teknologi informasi yang berkembang cepat perlu dioptimalkan pemanfaatannya untuk pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya, serta pembinaan sumber daya manusia kebudayaan dan lembaga kebudayaan. Saat ini di Provinsi Jawa Barat terdapat 147 Kampung Budaya yang menjadi kekuatan dalam mempertahankan dan melestarikan budaya yang ada Dimana 21 Kampung Budaya diantaranya ada di Kabupaten

Sumedang, yaitu: Sakurjaya, Cikuleu, Ujungjaya, Cibuluh, Rancakalong, Cicere, Cibunar, Pasirbiru, Pamekaran, Cigumentong, Sindulang, Karedok, Ungkal, Mekarasih, Cibubuan, Padaasih, Cijolang, Kutamaya, Cijeler, Pajagan dan Cihawir.



Gambar 2.16 Sebaran Kampung Budaya di Jawa Barat
(Sumber: DPMD Provinsi Jawa Barat, 2025)

Sementara itu di Kabupaten Sumedang terdapat 25 Lembaga adat desa yang tersebar di 13 Kecamatan sebagai berikut:

Tabel 2.24 Lembaga Adat Desa di Kabupaten Sumedang

No	Lembaga Adat Desa	Desa	Kecamatan
1	Kampung Pawenang	Pawenang	Jatinunggal
2	Kampung Cikuleu & Ujungjaya	Sukarjaya	Ujungjaya
3	Kampung Ujungjaya	Ujungjaya	Ujungjaya
4	Kampung Cibuluh	Cibuluh	Ujungjaya
5	Kampung Ujungjaya	Ujungjaya	Ujungjaya
6	Kampung Dangiag Jagakerti	Cipelang	Ujungjaya
7	Kampung Rancakalong	Rancakalong	Rancakalong
8	Kampung Cijere	Nagarawangi	Rancakalong
9	Kampung Cibunar	Cibunar	Rancakalong
10	Kampung Pasirbiru	Pasirbiru	Rancakalong
11	Kampung Pamekaran	Pamekaran	Rancakalong
12	Kampung Cigumentong	Sindulang	Cimanggung
13	Kampung Sekarwangi	Sekarwangi	Buahdua
14	Kampung Musaraka/kampung adat Karedok	Karedok	Jatigede
15	Kampung Mekarasih	Mekarasih	Jatigede
16	Kampung Ungkal	Ungkal	Conggeang
17	Kampung Cibubuan	Cibubuan	Conggeang
18	Kampung Padasih	Padasih	Conggeang
19	Kampung Congeangkulon	Congeangkulon	Conggeang
20	Kampung Cijolang, Citengah, Cisoka	Citengah	Sumedang Selatan
21	Kampung Cihawing, Karanganyar	Karangpakuan	Darmaraja
22	Kampung Kutamaya	Padasuka	Sumnedang Utara
23	Kampung Cijeler, Cisambeng, Cibogor, Cigumiwang	Cijeler	Situraja
24	Kampung Pajagan, Cicau	Pajagan	Cisitu
25	Kampung Cinanggerang	Cinanggerang	Pamulihan

Sumber: DPMD Kabupaten Sumedang, 2025

Selain lembaga adat desa, Kabupaten Sumedang memiliki kesenian tradisional yang merupakan ciri khas serta menggambarkan karakteristik dan kearifan lokal masyarakat Kabupaten Sumedang. Adapun beberapa kesenian tradisional dimaksud antara lain sebagai berikut:

1. Karinding (Lokasi Gn. Kerenceng, Sukajaya, Kec. Sumedang Selatan, Kab. Sumedang)



Gambar 2.17 Kesenian Tradisional Karinding
(Sumber: *DISPARBUPORA Kabupaten Sumedang, 2025*)

“Karinding” adalah alat musik tradisional Sunda yang terbuat dari bambu atau pelepah aren. Alat ini dimainkan dengan cara ditiup dan dipukul ringan untuk menghasilkan getaran suara yang khas. Dulu, Karinding digunakan tidak hanya sebagai hiburan, tetapi juga sebagai alat komunikasi dan sarana untuk berhubungan dengan alam. Suaranya yang halus dan berirama mencerminkan kedekatan masyarakat Sunda dengan lingkungan serta nilai-nilai spiritual yang mereka anut. Kini, karinding kembali diangkat sebagai warisan budaya yang patut dilestarikan oleh generasi muda.

2. Ketuk Tilu (Lokasi Buah Dua, Situraja, Darmaraja Kabupaten Sumedang)



Gambar 2.18 Kesenian Tradisional Ketuk Tilu
(Sumber: DISPARBUPORA Kabupaten Sumedang, 2025)

Ketuk Tilu adalah seni tradisional yang termasuk dalam tari pergaulan, di mana penarinya adalah laki-laki (pamogoran/jawara) dan perempuan (ronggeng) yang menari dengan gerakan-gerakan menggembirakan. Selain dari gerakannya, ekspresi para penari pun menggambarkan kegembiraan dari tarian satu ini. Sebelum dimulai, penampilan biasanya diawali dengan musik pengiring untuk mengumpulkan para penonton. Untuk menarik penonton, maka dibutuhkan pengiring musik yang mengundang rasa penasaran maupun minat penonton untuk menyaksikan pertunjukan tari sebagai hiburan. Setelah para penonton berkerumun, barulah para penari memasuki area tari dengan lagu berenuk naek kembang beureum.

3. Pencak Silat (Tersebar diseluruh wilayah Kabupaten Sumedang)

Penca Silat adalah seni bela diri tradisional yang tumbuh dari kearifan lokal masyarakat Sunda. Lebih dari sekadar teknik bertarung, penca silat mengandung nilai-nilai filosofi, etika, dan spiritualitas yang mendalam. Gerakannya luwes namun penuh tenaga, mencerminkan keseimbangan antara kekuatan dan kelembutan. Dalam budaya Sunda, penca silat juga menjadi bagian dari pertunjukan seni, sering dipadukan dengan musik tradisional seperti kendang penca. Warisan leluhur ini tidak hanya mengajarkan ketangkasan, tapi juga membentuk karakter, menghormati guru, dan menjunjung tinggi tata krama.



Gambar 2.19 Kesenian Tradisional Pencak Silat
(Sumber: DISPARBUPORA Kabupaten Sumedang, 2025)

4. Seni Reak (Lokasi Kecamatan Rancakalong, Tanjungsari, Sukasari, Jatinangor, dan Cimanggung)



Gambar 2.20 Kesenian Tradisional Reak
(Sumber: DISPARBUPORA Kabupaten Sumedang, 2025)

Seni Reak adalah salah satu kesenian tradisional khas Jawa Barat, khususnya berkembang di daerah Bandung dan sekitarnya. Kesenian ini biasanya ditampilkan dalam bentuk arak-arakan yang diiringi musik tradisional, tari-tarian, dan pertunjukan kuda lumping. Reak sering dikaitkan dengan unsur magis karena beberapa penarinya bisa mengalami trance atau kesurupan saat pertunjukan berlangsung. Awalnya, Reak digunakan untuk merayakan khitanan atau acara adat lainnya, namun kini juga menjadi bagian dari pertunjukan budaya yang memperkaya warisan seni Sunda.

5. Seni Tutunggulan (Lokasi Dusun Wareng, Pangadegan Rancakalong, Kabupaten Sumedang)



Gambar 2.21 Kesenian Tradisional Tutunggulan
(Sumber: DISPARBUORA Kabupaten Sumedang, 2025)

Seni Tutunggulan adalah kesenian tradisional khas Sunda yang berasal dari Jawa Barat. Kesenian ini menggunakan alat musik utama berupa lesung dan alu, yang dulunya dipakai untuk menumbuk padi. Ritme yang dihasilkan dari tabuhan ini menciptakan bunyi yang khas dan dinamis, sering dikombinasikan dengan gerakan tari sederhana. Awalnya, Tutunggulan dimainkan sebagai hiburan saat panen atau kegiatan gotong royong di desa, namun kini tampil sebagai bagian dari pelestarian budaya Sunda yang sarat nilai kebersamaan dan tradisi agraris.

6. Tari Jayengrana Kasumedangan (Lokasi Kabupaten Sumedang (Sumedang Selatan))

Tarian Jayengrana Kasumedangan diciptakan tahun 1942 adalah salahsatu karya Maestro tari R. Ono Lesmana Kartadikoesoemah yang menggambarkan kegembiraan atas Kemenangan Amir Hamzah dalam peperangan. Tarian Jayengrana Kasumedangan telah menjadi Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Nasional tahun 2022.



Gambar 2.22 Kesenian Tradisional Tari Jayengrana Kasumedangan
(Sumber: DISPARBUPORA Kabupaten Sumedang, 2025)

7. Tari Jakasona Kasumedangan (Lokasi Kabupaten Sumedang)



Gambar 2.23 Kesenian Tradisional Tari Jakasona dan Topeng Klana Kasumedangan
(Sumber: DISPARBUPORA Kabupaten Sumedang, 2025)

Tarian Jakasona diciptakan tahun 1947 dan Tari Topeng Klana diciptakan pada tahun 1942 oleh R.Ono Lesmana Kartadikoesoemah. Tari Jakasona adalah tarian yang sumber inspirasi dari Legenda sangkuriang yang menggambarkan pemuda yang berkelana, yang biasa hidup mandiri dan penuh dedikasi meskipun mengalami kekecewaan dalam bercinta. Tari ini termasuk dalam rumpun tari wayang gaya Kasumedangan, yang memiliki ciri khas tersendiri dalam gerakan, musik, dan busana. Tari Jakasona menjadi salah satu tari yang populer dan sering ditampilkan dalam berbagai acara di Sumedang, khususnya yang berkaitan dengan seni dan budaya.

8. Tari Topeng Klana Kasumedangan (Lokasi Kabupaten Sumedang)



Gambar 2.24 Kesenian Tradisional Tari Topeng Klana Kasumedangan
(Sumber: DISPARBUPORA Kabupaten Sumedang, 2025)

Topeng Klana Kasumedangan adalah salah satu bentuk seni tari topeng tradisional dari daerah Sumedang, Jawa Barat. Tari Topeng Klana Kasumedangan menggambarkan Dewi Sekar Kendoja terkabul kesaktiannya dan menyamar untuk melawan musuhnya yaitu Raja Barun. Kesenian ini tidak hanya menyajikan keindahan gerak, tetapi juga sarat makna filosofis dan nilai moral yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat Sumedang.

9. Tari Jaipongan (Lokasi tersebar di wilayah Kabupaten Sumedang)



Gambar 2.25 Kesenian Tradisional Tari Jaipongan
(Sumber: DISPARBUPORA Kabupaten Sumedang, 2025)

Jaipongan adalah seni tari tradisional modern yang berasal dari Jawa Barat, diciptakan oleh Gugum Gumbira pada tahun 1970-an. Tarian ini menggabungkan elemen pencak silat, ketuk tilu, dan ronggeng, dengan iringan musik khas Sunda seperti kendang, gong, dan rebab. Jaipongan dikenal dengan

gerakannya yang lincah, enerjik, dan penuh ekspresi, serta menjadi simbol semangat dan keceriaan masyarakat Sunda. Kini, Jaipongan tidak hanya tampil di acara adat, tetapi juga di panggung seni nasional dan internasional sebagai identitas budaya Jawa Barat.

10. Kuda Renggong (Lokasi Kabupaten Sumedang)



Gambar 2.26 Kesenian Tradisional Kuda Renggong
(Sumber: DISPARBUPORA Kabupaten Sumedang, 2025)

Kuda Renggong adalah kesenian tradisional khas Sumedang, Jawa Barat, yang menampilkan kuda yang telah dilatih untuk menari mengikuti irama musik. Biasanya dipertunjukkan dalam arak-arakan saat acara khitanan atau perayaan adat lainnya. Kata "renggong" berasal dari kata ronggeng yang berarti menari. Kuda yang digunakan dihias dengan ornamen warna-warni dan diiringi musik tradisional yang meriah. Kesenian ini mencerminkan keharmonisan antara manusia dan hewan, serta menjadi kebanggaan budaya masyarakat Sunda.

11. Songah (Lokasi Citengah, Kabupaten Sumedang)

Songah (Songah Citengah) adalah sebuah alat Musik Ritmis tidak bernada yang dibuat oleh Desa Citengah Kec. Sumedng Seletan Kab. Sumedang Jawa Barat. Alat Musik ini terinsirasi dari sebuah alat Rumah Tangga berupa Songah/alat meniup api berbahan dasar Bumbu, agar api menyala pada tungku/hawu. Satu set alat musik Songah terdiri dari Songsong besar, Songsong Kecil, Hatong besar, kokoproak dan hatong kecil. berdasarkan kreativitas dan inovasi, kini songah memiliki alat musik pendukung bernada seperti Hatong renteng, hatong akor dll. selain itu songah juga bisa berkolaborasi dengan alat musik lainnya.



Gambar 2.27 Kesenian Tradisional Songah
(Sumber: DISPARBUPORA Kabupaten Sumedang, 2025)

12. Seni Kriya Wayang Golek (Lokasi Pamulihan, Kabupaten Sumedang)

Sentra Seni Ukir Wayang Golek di Pamulihan, Sumedang, merupakan pusat kerajinan tradisional yang terkenal dengan pembuatan wayang golek khas Sunda. Di sini, para pengrajin ahli mengukir boneka kayu dengan detail halus dan ekspresi wajah yang hidup, mengikuti cerita pewayangan yang kaya nilai budaya dan sejarah. Sentra ini tidak hanya menjaga kelestarian seni ukir dan wayang golek, tetapi juga menjadi pusat pendidikan budaya dan destinasi wisata seni di Sumedang. Melalui karya mereka, tradisi pewayangan terus hidup dan diteruskan ke generasi muda.



Gambar 2.28 Kesenian Tradisional Wayang Golek
(Sumber: DISPARBUPORA Kabupaten Sumedang, 2025)

13. Rengkong (Lokasi Rancakalong, Kabupaten Sumedang)



Gambar 2.29 Kesenian Tradisional Rengkong
(Sumber: DISPARBUPORA Kabupaten Sumedang, 2025)

Seni Rengkong diambil dari nama sebuah alat yang dipergunakan seni tertentu, yaitu sebuah pikulan tersebut dari bambu bitung batangan (leunjeuran) yang panjangnya sekitar 2,5 m yang dipotong tepat pada ruasnya. sehingga ujungnya merupakan rua-ruas tertutup. Seni Rengkong atau ada juga yang menyebut dengan istilah seni Gotong Pare (Banten Kidul), pada dasarnya merupakan seni tradisi masyarakat sunda, dalam tradisi yang biasanya dilakukan setelah panen dan sekaligus sebagai ungkapan dilakukan setelah panen dan sekaligus ungkapan rasa syukur dan gembira hasil panen.

14. Seni Tayuban dan Ibing Keurseus (Lokasi Kabupaten Sumedang)



Gambar 2.30 Kesenian Tradisional Tayuban dan Ibing Keurseus
(Sumber: DISPARBUPORA Kabupaten Sumedang, 2025)

Tari Tayub (Ibing Tayub) merupakan salah satu jenis tarian yang hidup di Jawa Barat. Istilah "Tayub" pada tari tayub sejalan dengan sejarah perwujudan berasal dari jawa "Sayub" atau "Nyabub". Tarian ini muncul di Jawa barat terutama di Sumedang. Tayuban atay kemudian berkembang menjadi ibing Keurseus muncul pada pesta - pesta perayaan daur hidup seperti khitanan, perkawinan dan perayaan-perayaan kenegaraan seperti hari jadi dan peringatan hari-hari besar.

15. Angklung Jenghung (Lokasi Cirangkong, Kabupaten Sumedang)



Gambar 2.31 Kesenian Tradisional Angklung Jenghung
(Sumber: DISPARBUPORA Kabupaten Sumedang, 2025)

Angklung Jenglung yang berkaitan dengan Bambu yang dijadikan bahan pembuatannya, yaitu diambil dari 9 (sembilan) pasir (bukit). Artinya satu angklung dibuat dari bambu yang diambil dari satu bukit, sehingga Angklung Jenglung terdapat 9 buah, karena bambu yang dibuat sebagai bahan angklung diambil dari 9 bukit (pasir). Angklung Jenglung ini bernada salendro, namun kondisinya saat ini nada/suaranya sudah pales (sumbang).

16. Beluk Cirangkong (Lokasi Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang)

Beluk adalah bentuk seni suara bebas dengan pupuh sebagai rumpaka yang banyak menggunakannada tinggi (menurut Supandi). Beluk berasal dari kata meluk yaitu melagu dengan menggunakan nada tinggi dengan ornamen meliuk mengalun meliku-liku (pendapat Enip Sukanda). Penyajian seni Beluk biasanya dilaksanakan di dalam rumah (tempat tertutup) yang dilaksanakan pada saat kelahiran bayi, sunatan, perkawinan, syukuran bayi dan resepsi.



Gambar 2.32 Kesenian Tradisional Beluk Cirangkong
(Sumber: DISPARBUPORA Kabupaten Sumedang, 2025)

17. Bangreng (Terebang dan Ronggeng, Lokasi Kabupaten Sumedang)

Terbang adalah alat bunyi-bunyian yang terbuat dari kayu dengan muka bulat yang berkulit, seperti rebana. Sedangkan kata Ronggeng adalah juru kawih merangkap penari wanita dalam ketuk tilu dengan tarian dan nyanyian melayani tarian pria yang menghadapinya.

Seni Bangreng sebagai seni tradisional khas Sumedang, merupakan metamorfosa dari seni Terbang yang pada mulanya berfungsi sebagai sarana dakwah agama Islam. Bangreng merupakan seni pertunjukan yang berkembang di Kabupaten Sumedang. Kesenian bangreng terlahir dari kesenian terbang yang berkembang menjadi kesenian gembyung, dan kemudian berkembang lagi menjadi kesenian bangreng.



Gambar 2.33 Kesenian Tradisional Bangreng (Terebang dan Ronggeng)
(Sumber: DISPARBUPORA Kabupaten Sumedang, 2025)

18. Umbul (Lokasi Situraja, Kabupaten Sumedang)



Gambar 2.34 Kesenian Tradisional Umbul
(Sumber: DISPARBUPORA Kabupaten Sumedang, 2025)

Tari umbul merupakan tari khas Situraja, Kabupaten Sumedang. Pada awalnya Tari Umbul dikenal sebagai tarian dalam pertunjukan Reog, tarian tersebut mengandung unsur erotik dan humoris yang menjadi ciri khasnya. ada juga yang berpendapat bahwa Tari Umbul berasal dari daerah Indramayu, yang dibawa oleh salah seorang seniman bernama Kalsip, kemudian berkembang di daerah Sumedang. Menurut Bapak Dadi (Seniman dan Budayawan Desa Cijeler) Tari Umbul diperkirakan muncul pada tahun 1940, Tari Umbul berkembang di Desa Pasireungit, Kecamatan Paseh melalui sebuah perkumpulan seni yang dinamakan Seni Umbul Pangreka Budi. Selain di Kecamatan Paseh, Tari Umbul juga tumbuh di Kecamatan Situraja, Kabupaten Sumedang.

19. Seni Calung (Lokasi Conggeang, Kabupaten Sumedang)

Calung berfungsi sebagai seni pertunjukkan yang menampilkan kolaborasi antara seni musik, vokal, dan humor. Sebetulnya seni Calung ini hampir ada di semua Desa. Calung memiliki peran penting dalam budaya masyarakat Jawa Barat terutama perannya dalam aspek hiburan masyarakat sekitar.



Gambar 2.35 Kesenian Tradisional Calung
(Sumber: DISPARBUPORA Kabupaten Sumedang, 2025)

20. Goong Renteng/Koromong (Lokasi Cisarua, Darmaraja, Rancakalong, Kabupaten Sumedang)

Istilah “goong renteng” merupakan perpaduan dari kata “goong” dan “renteng”. Kata ‘goong’ merupakan istilah kuno Sunda yang berarti gamelan, sedangkan kata ‘renteng’ berkaitan dengan penempatan pencon-pencon kolenang (bonang) yang diletakkan secara berderet/berjejer, atau ngarenteng dalam bahasa Sunda. Jadi, secara harfiah goong renteng adalah goong (pencon) yang diletakkan/disusun secara berderet (ngarenteng). Koromong merupakan kesenian gamelan yang merupakan warisan para raja-raja Sumedang tempo dulu. Kaslian alatnya pun masih dipertahankan sejak pertama dimainkan, paruh abad ke-15 sampai abad ke-16.



Gambar 2.36 Kesenian Tradisional Goong Renteng/Koromong
(Sumber: DISPARBUPORA Kabupaten Sumedang, 2025)

21. Ajeng Kasumedangan (Lokasi Ujungjaya, Kabupaten Sumedang)

Seni Ajeng adalah salah satu kesenian asli Kabupaten Sumedang, tepatnya berasal dari Desa Cipelang, Kecamatan Ujungjaya. “Ajéng” adalah nama sebuah kesenian dan juga nama seperangkat alat musik. Alat musik ini dulunya ditemukan dalam sebuah penggalian yang dilakukan oleh Eyang Jagakerti dalam pembuatan saluran air, ketika sedang menggali tana. Tiba-tiba pada kedalaman tertentu Eyang Jagakerti menemukan seperangkat alat musik, alat-alat musik tersebut terkubur dan terlilit di tengah akar-akar tanaman yang sangat banyak. Sehingga dulunya alat musik ini dinamai Jangkar Alam, karena ditemukan di tengah lilitan-lilitan akar. Kesenian Jangkar Alam masih selalu dimainkan sebagai salah satu wasiat Jagakerti untuk melestarikan kesenian tersebut. Alat musik Jangkar Alam selanjutnya diwariskan secara turun-temurun pada keturunannya, sebagai sebuah pusaka (benda bersejarah).



Gambar 2.37 Kesenian Tradisional Ajeng Kasumedangan
(Sumber: DISPARBUPORA Kabupaten Sumedang, 2025)

Di kabupaten Sumedang saat ini terdapat 2 (dua) museum yaitu museum Prabu Geusan Ulun yang merupakan salah satu cagar budaya di Kabupaten Sumedang terletak di pusat kota Sumedang serta site museum Lembah Cisaar yang terletak di desa Jembarwangi Kecamatan Tomo.

Selain kesenian tradisional di Kabupaten Sumedang terdapat 39 cagar budaya sebagai berikut:

Tabel 2.25 Data Cagar Budaya Kabupaten Sumedang

No	Nama Cagar Budaya	Alamat	Jenis Cagar Budaya	Keterangan	Gambar	Surat Keputusan Bupati
1.	Makam Cut Nyak Dien	Desa Sukajaya, Kec. Sumedang Selatan, Sumedang	STRUKTUR	Makam Cut Nyak Dien terletak di kompleks pemakaman anggota keluarga milik Siti Khodijah yang berjarak beberapa ratus meter arah selatan Kota Sumedang. Siti Khodijah merupakan sosok yang merawat Cut Nyak Dien selama di pengasingannya di Sumedang. Kondisi makam masih terawat, terjaga serta mempunyai juru pelihara makam.		SK Bupati Sumedang Nomor 363 Tahun 2022 ttg Perubahan Kedua atas SK Bupati Sumedang Nomor 645/KEP.500-DISPARBUDPORA/2017 ttg Penetapan CB Peringkat Kabupaten
2.	Monumen Lingga	Alun-alun Sumedang, Kel. Regol Wetan, Kec. Sumedang Selatan, Sumedang	STRUKTUR	Monumen Lingga merupakan tugu peringatan yang diperuntukan mengenang jasa-jasa Bupati Sumedang Pangeran Aria Soeria Atmadja. Bentuk bangunan utama dari monumen berbentuk lingga yang terbagi menjadi tiga bagian, yaitu dasar, badan dan puncak.		SK Bupati Sumedang Nomor 363 Tahun 2022 ttg Perubahan Kedua atas SK Bupati Sumedang Nomor 645/KEP.500-DISPARBUDPORA/2017 ttg Penetapan CB Peringkat Kabupaten

No	Nama Cagar Budaya	Alamat	Jenis Cagar Budaya	Keterangan	Gambar	Surat Keputusan Bupati
3.	Gedung Bumi Kaler	Kawasan Museum Prabu Geusan Ulun, Kel. Regol Wetan, Kec. Sumedang Selatan, Sumedang	BANGUNAN	Gedung Bumi Kaler merupakan bangunan yang terdiri dari beberapa ruang yang saat sekarang digunakan sebagai gedung utama Museum Prabu Geusan Ulun. Gedung ini dibuat dengan konstruksi panggung/berkolong dengan konstruksi utama terbuat dari bahan kayu. Dibangun pada tahun 1850 pada masa pemerintahan Pangeran Soeria Koesoema Adinata.		SK Bupati Sumedang Nomor 363 Tahun 2022 ttg Perubahan Kedua atas SK Bupati Sumedang Nomor 645/KEP.500-DISPARBUDPORA/2017 ttg Penetapan CB Peringkat Kabupaten
4.	Benteng Gunung Gadung	Kp. Gunung Gadung, Desa Sukajaya, Kec. Sumedang Selatan, Sumedang	SITUS	Situs Gunung Gadung merupakan bangunan pertahanan kolonial Belanda yang dibangun untuk mempertahankan kekuasaannya di daerah yang sebelumnya bernama Priangan. Secara keseluruhan Benteng Gunung Gadung terdiri dari tiga kompleks tinggalan. Benteng pertama terletak di Pasir Laja, yang kedua terletak di Pasir Kolecer dan ketiga berada di Gunung Darmaga.		SK Bupati Sumedang Nomor 363 Tahun 2022 ttg Perubahan Kedua atas SK Bupati Sumedang Nomor 645/KEP.500-DISPARBUDPORA/2017 ttg Penetapan CB Peringkat Kabupaten

No	Nama Cagar Budaya	Alamat	Jenis Cagar Budaya	Keterangan	Gambar	Surat Keputusan Bupati
5.	Benteng Gunung Koentji (Kunci)	Kel. Kotakulon, Kec. Sumedang Selatan, Sumedang	SITUS	Benteng Gunung Koentji dibangun antara tahun 1914-1917. Benteng tersebut dibangun di Sumedang oleh pemerintah kolonial Belanda dalam menghadapi Perang Dunia I juga dalam rangka menghadapi situasi politik di Sumedang sendiri yang tidak menentu. Benteng ini menempati lahan kurang 3,8 Ha berada di atas bukit yang strategis yang terdapat 17 ruang/kamar-kamar yang kesemuanya dihubungkan oleh anak tangga.		SK Bupati Sumedang Nomor 363 Tahun 2022 ttg Perubahan Kedua atas SK Bupati Sumedang Nomor 645/KEP.500-DISPARBUDPORA/2017 ttg Penetapan CB Peringkat Kabupaten
6.	Benteng Gunung Palasari	Kel. Kotakulon, Kec. Sumedang Selatan, Sumedang	SITUS	Gunung Palasari merupakan lokasi tinggalan yang terdiri dari bangunan perbentengan yang dibangun dengan teknik beton yang dikamuflase dengan lingkungan sekitarnya, di bagian puncak Gunung Palasari. Terdiri dari 8 bangunan inti yang terpisah satu dengan yang lainnya, struktur yang mempunyai bak air, struktur pintu gerbang, dan struktur yang menyerupai pendopo di dekat beberapa bangunan inti. Situs ini diduga memiliki fungsi sebagai depot logistik, gudang persenjataan dan tempat pengawasan pemerintah kolonial Belanda.		SK Bupati Sumedang Nomor 363 Tahun 2022 ttg Perubahan Kedua atas SK Bupati Sumedang Nomor 645/KEP.500-DISPARBUDPORA/2017 ttg Penetapan CB Peringkat Kabupaten

No	Nama Cagar Budaya	Alamat	Jenis Cagar Budaya	Keterangan	Gambar	Surat Keputusan Bupati
7.	Gedung Disparbudpora	Jl. Prabu Geusan Ulun No. 36, Kel. Regol Wetan, Kec. Sumedang Selatan, Sumedang	BANGUNAN	Gedung Disparbudpora diketahui didirikan pada tahun 1939 oleh pemerintah kolonial Belanda. Bangunan bergaya arsitektur <i>Art Deco Geometric</i> ini pertama kali difungsikan sebagai gedung Rehentschaap Raad atau Gedung Dewan Perwakilan Rakyat untuk wilayah Priangan. Setelah kemerdekaan gedung ini kerap kali berubah fungsi disesuaikan dengan instansi pemerintah yang menggunakannya, di antaranya pernah digunakan sebagai kantor BKD. Saat ini gedung difungsikan sebagai kantor Disparbudpora		SK Bupati Sumedang Nomor 363 Tahun 2022 ttg Perubahan Kedua atas SK Bupati Sumedang Nomor 645/KEP.500-DISPARBUDPORA/2017 ttg Penetapan CB Peringkat Kabupaten
8.	Struktur Jembatan Cincin Cikuda	Desa Hegarmanah, Kec. Jatinangor, Sumedang	STRUKTUR	Jembatan Cincin Cikuda menghubungkan dua kawasan perbukitan yang dipisahkan oleh aliran Cikeruh. Jembatan Cincin atau jembatan kereta api Cikuda adalah jembatan bekas jalur kereta api yang menghubungkan Jatinangor, Tanjungsari, Rancaekek yang dibangun sekitar tahun 1888. Pada saat itu, jembatan ini digunakan sebagai penunjang lancarnya kegiatan perkebunan, sarana angkut hasil kebun karet yang berdampak besar pada		SK Bupati Sumedang Nomor 363 Tahun 2022 ttg Perubahan Kedua atas SK Bupati Sumedang Nomor 645/KEP.500-DISPARBUDPORA/2017 ttg Penetapan CB Peringkat Kabupaten

No	Nama Cagar Budaya	Alamat	Jenis Cagar Budaya	Keterangan	Gambar	Surat Keputusan Bupati
				perkembangan sosial ekonomi dan politik pada masanya.		
9.	Struktur Jembatan Cincin Kuta Mandiri	Jl. Staat Spoors, Desa Cilayung, Kec. Jatinangor, Sumedang	STRUKTUR	Jembatan Cincin Kuta Mandiri merupakan bagian dari jalur kereta api yang Jembatan Cincin Tanjungsari merupakan bagian dari kereta api yang dibangun pada masa pemerintah kolonial Belanda sekitar tahun 1888. Terbuat dari konstrukti beton dengan bentuk tiang utama penyangga jembatan berbentuk prisma.		SK Bupati Sumedang Nomor 363 Tahun 2022 ttg Perubahan Kedua atas SK Bupati Sumedang Nomor 645/KEP.500-DISPARBUDPORA/2017 ttg Penetapan CB Peringkat Kabupaten
10.	Makuta Koleksi Museum Prabu Geusan Ulun	Kawasan Museum Prabu Geusan Ulun, Kel. Regol Wetan, Kec. Sumedang Selatan, Sumedang	BENDA	Makuta Koleksi Museum Prabu Geusan Ulun dipajang di Gedung Pusaka. Bahan dari makuta adalah logam mulia. Makuta ini menggambarkan seni yang terkait dengan sejarah kerajaan masa lalu, dibuat dengan gaya yang khas karya seni di Kabupaten Sumedang.		SK Bupati Sumedang Nomor 363 Tahun 2022 ttg Perubahan Kedua atas SK Bupati Sumedang Nomor 645/KEP.500-DISPARBUDPORA/2017 ttg Penetapan CB Peringkat Kabupaten

No	Nama Cagar Budaya	Alamat	Jenis Cagar Budaya	Keterangan	Gambar	Surat Keputusan Bupati
11.	Meriam Koleksi Museum Prabu Geusan Ulun	Kawasan Museum Prabu Geusan Ulun, Kel. Regol Wetan, Kec. Sumedang Selatan, Sumedang	BENDA	Meriam koleksi Museum Prabu Geusan Ulun ini terletak di dalam Gedung Srimanganti. Bahan dari meriam adalah logam campuran dengan panjang 157 cm. Menurut sejarah lisan, meriam ini merupakan salah satu meriam peninggalan pemerintah Kolonial Belanda di Benteng Gunung Koentji.		SK Bupati Sumedang Nomor 363 Tahun 2022 ttg Perubahan Kedua atas SK Bupati Sumedang Nomor 645/KEP.500-DISPARBUDPORA/2017 ttg Penetapan CB Peringkat Kabupaten
12.	Bunker Jatisari	Desa Jatisari, Kec. Tanjungsari, Sumedang	BANGUNAN	Bunker Jatisari merupakan bunker peninggalan pemerintah kolonial Belanda. Kuat dugaan pembangunan bunker dilakukan bersamaan dengan terus berkembangnya perkembangan Bandung sebagai kota sarana strategis, maka setelah Perang Dunia I pemerintah kolonial Belanda mulai menyiapkan konsep pertahanan bagi Kota Bandung.		SK Bupati Sumedang Nomor 363 Tahun 2022 ttg Perubahan Kedua atas SK Bupati Sumedang Nomor 645/KEP.500-DISPARBUDPORA/2017 ttg Penetapan CB Peringkat Kabupaten

No	Nama Cagar Budaya	Alamat	Jenis Cagar Budaya	Keterangan	Gambar	Surat Keputusan Bupati
13.	Pendopo Kecamatan Sumedang Utara	Jl. Pendopo Tegal Kalong, Kel. Talun, Kec. Sumedang Utra, Sumedang	BANGUNAN	Bangunan pendopo sampai kini masih asli bentuknya, merupakan bangunan terbuka dengan atap berbentuk limasan. Bagian puncak bangunan terdapat bagian kemuncak (memolo) dengan bentuk menara ratna. Dalam sejarahnya, dahulu bangunan ini merupakan bangunan pendopo dari Kawedanaan Sumedang Larang.		SK Bupati Sumedang Nomor 363 Tahun 2022 ttg Perubahan Kedua atas SK Bupati Sumedang Nomor 645/KEP.500-DISPARBUDPORA/2017 ttg Penetapan CB Peringkat Kabupaten
14.	Prasasti Pembangunan Jalan raya Pos (Postweg) di Cadas Pangeran	Desa Ciherang, Kec. Sumedang Selatan, Sumedang	BENDA	Prasasti ini berisi berita tentang kegiatan pembobokan bukit cadas di lokasi yang saat sekarang disebut sebagai Cadas Pangeran. Kegiatan pembobokan batu cadas untuk kepentingan pembangunan jalan yang melewati kawasan bukit batu cadas tersebut merupakan bagian dari jalur jalan raya pos (<i>postweg</i>)		SK Bupati Sumedang Nomor 363 Tahun 2022 ttg Perubahan Kedua atas SK Bupati Sumedang Nomor 645/KEP.500-DISPARBUDPORA/2017 ttg Penetapan CB Peringkat Kabupaten

No	Nama Cagar Budaya	Alamat	Jenis Cagar Budaya	Keterangan	Gambar	Surat Keputusan Bupati
15.	Rumah Cut Nyak Dien	Kel. Kotakulon, Kec. Sumedang Selatan, Sumedang	BANGUNAN	Bangunan rumah bekas tinggal Cut Nyak Dien berdasarkan bentuk dan gaya konstruksinya dapat dikategorikan sebagai bangunan dengan gaya arsitektur lokal rumah sunda dengan bentuk rumah panggung. Rumah ini merupakan rumah pengungsian sementara Cut Nyak Dien pada masa pembuangannya di wilayah Sumedang.		SK Bupati Sumedang Nomor 363 Tahun 2022 ttg Perubahan Kedua atas SK Bupati Sumedang Nomor 645/KEP.500-DISPARBUDPORA/2017 ttg Penetapan CB Peringkat Kabupaten
16.	Siger Koleksi Museum Prabu Geusan Ulun	Kawasan Museum Prabu Geusan Ulun, Kel. Regol Wetan, Kec. Sumedang Selatan, Sumedang	BENDA	Siger Koleksi MPGU terbuat dari logam mulia yang terletak di komplek pendopo Kabupaten Sumedang. Siger ini dipajang di Gedung Pusaka bersama Makuta dan perhiasan lainnya didalam sebuah lemari kaca berbentuk segitiga. Siger ini bukti karya budaya yang monumental dan merupakan wujud dari bentuk pencapaian teknologi dan seni. Selain memiliki nilai sejarah, juga unik dan langka.		SK Bupati Sumedang Nomor 363 Tahun 2022 ttg Perubahan Kedua atas SK Bupati Sumedang Nomor 645/KEP.500-DISPARBUDPORA/2017 ttg Penetapan CB Peringkat Kabupaten

No	Nama Cagar Budaya	Alamat	Jenis Cagar Budaya	Keterangan	Gambar	Surat Keputusan Bupati
17.	Gedung Srimanganti	Kawasan Museum Prabu Geusan Ulun, Kel. Regol Wetan, Kec. Sumedang Selatan, Sumedang	BANGUNAN	Gedung Srimanganti merupakan bangunan yang terdiri dari beberapa ruang yang saat sekarang digunakan sebagai gedung utama Museum Prabu Geusan Ulun. Gedung ini terdiri atas pendopo dan serambi di keempat arah mata angin dan pintu masuknya juga di keempat arah. Jendela di gedung ini terbuat dari kayu dan kaca, bentuk atas setengah lingkaran dan ada hiasan bunga di bagian muka lingkungan dan ada yang polos dengan jelusi.		SK Bupati Sumedang Nomor 363 Tahun 2022 ttg Perubahan Kedua atas SK Bupati Sumedang Nomor 645/KEP.500-DISPARBUDPORA/2017 ttg Penetapan CB Peringkat Kabupaten
18.	Struktur Bendungan Ragadiem	Kel. Kotakulon, Kec. Sumedang Selatan, Sumedang	STRUKTUR	Bendungan Ragadiem merupakan satu-satunya struktur DAM yang dibangun di era Kolonial untuk mengatur penggunaan di aliran Sungai Cipelas. Dengan luas lingkungan 500 m2, bendungan ini memiliki tujuh pintu air yang masing-masing pintu memiliki lebar 4 m.		SK Bupati Sumedang Nomor 363 Tahun 2022 ttg Perubahan Kedua atas SK Bupati Sumedang Nomor 645/KEP.500-DISPARBUDPORA/2017 ttg Penetapan CB Peringkat Kabupaten

No	Nama Cagar Budaya	Alamat	Jenis Cagar Budaya	Keterangan	Gambar	Surat Keputusan Bupati
19.	Wisma Gending	Jl. Pangeran Santri No. 43, Kel. Kotakulon, Kec. Sumedang Selatan, Sumedang	BANGUNAN	Wisma Gending secara arsitektural sangat unik dan menarik. Bagunan bagian depan memiliki jendela kaca dengan bentuk melengkung di atas, mirip dengan lengkungan Romanesk. Luas lokasi ini sekitar 2 Ha.		SK Bupati Sumedang Nomor 363 Tahun 2022 ttg Perubahan Kedua atas SK Bupati Sumedang Nomor 645/KEP.500-DISPARBUDPORA/2017 ttg Penetapan CB Peringkat Kabupaten
20.	Monumen Loji	Desa Sayang, Kec. Jatinangor, Sumedang	BANGUNAN	Monumen Loji dikenal sebagai Menara Sirine, dan Menara Baron Van Baud. Disebutkan dahulu di atas menara terdapat sirine yang digunakan sebagai penanda waktu untuk pegawai perkebunan karet yang dikelola oleh Baron Van Baud (1816-1879). Pada masa pemerintahan kolonial Belanda digunakan untuk waktu kerja penyardap karet.		SK Bupati Sumedang Nomor 363 Tahun 2022 ttg Perubahan Kedua atas SK Bupati Sumedang Nomor 645/KEP.500-DISPARBUDPORA/2017 ttg Penetapan CB Peringkat Kabupaten

No	Nama Cagar Budaya	Alamat	Jenis Cagar Budaya	Keterangan	Gambar	Surat Keputusan Bupati
21.	Situs Gunung Lingga	Dsn. Sempurmayung, Desa Cimarga, Kec. Cisisu, Sumedang	SITUS	Situs Gunung Lingga berdasarkan sejarah tradisional merupakan makam dari salah satu tokoh sejarah Kabupaten Sumedang yang bernama Prabu Tajimalela. Situs Gunung Lingga memiliki tinggalan budaya kebendaan berupa sebaran batuan dengan jenis andesit yang memiliki pola membentuk punden berundak dengan dua batu tegak pada bagian puncak.		SK Bupati Nomor 135 Tahun 2022 ttg Penetapan Struktur dan Situs CB Peringkat Kabupaten Sumedang
22.	Situs Dayeuhluhur	Dsn. Dayeuhluhur, Desa Dayeuhluhur, Kec. Ganeas, Sumedang	SITUS	Dalam Situs Dayeuhluhur terdapat kompleks yang terbagi kedalam 3 bagian besar. Bagian pertama merupakan kompleks makam umum dan juga para juru kunci kompleks makam, bagian kedua dengan tanah yang lebih tinggi di sebelah utara bagian yang pertama berisi makam Ratu Harisbaya dan beberapa makam lainnya dan bagian ketiga bagian belakang dan teratas berisi makam Prabu Geusan Ulun, makam Rangga Gempol I, makam Kyai Demang Cipaku dan beberapa makam lainnya yang tidak dikenal.		SK Bupati Nomor 135 Tahun 2022 ttg Penetapan Struktur dan Situs CB Peringkat Kabupaten Sumedang

No	Nama Cagar Budaya	Alamat	Jenis Cagar Budaya	Keterangan	Gambar	Surat Keputusan Bupati
23.	Situs Jaya Perkasa	Dsn. Dayeuhluhur, Desa Dayeuhluhur, Kec. Ganeas, Sumedang	SITUS	Makam Embah Jayaperkasa terdapat di sebelah selatan Kantor Desa Dayeuhluhur. Makam terletak di puncak Gunung Rengganis. Menuju makam, melalui jalan menanjak berteras yang terbuat dari semen. Makam diletakkan pada lokasi tertinggi di situs. Makam dikelilingi pagar kawat dengan pintu terdapat di sisi utara. Makam Embah Jaya Perkasa bukan merupakan kubur, tetapi sebagai tempat <i>ngahyang</i> .		SK Bupati Nomor 135 Tahun 2022 ttg Penetapan Struktur dan Situs CB Peringkat Kabupaten Sumedang
24.	Situs Cigobang	Dsn. Cigobang, Desa Cikondang, Kec. Ganeas, Sumedang	SITUS	Situs Cigobang berada di blok Gunung Goong. Situs merupakan kompleks makam dengan tokoh utama Nyi Mas Cukang Gedung Waru, istri kedua dari Prabu Geusan Ulun.		SK Bupati Nomor 135 Tahun 2022 ttg Penetapan Struktur dan Situs CB Peringkat Kabupaten Sumedang

No	Nama Cagar Budaya	Alamat	Jenis Cagar Budaya	Keterangan	Gambar	Surat Keputusan Bupati
25.	Struktur Panday	Jl. Kebonkol Lingkungan Panday, Kel. Regol Wetan, Kec. Sumedang Selatan, Sumedang	STRUKTUR	Struktur berupa satu makam Pangeran Rangka Gede. Kondisi sekarang merupakan makam bertingkat dua, berdenah segi empat dan orientasi utara selatan. Kondisi sekarang, makam terdiri dari jirat dan nisan.		SK Bupati Nomor 135 Tahun 2022 ttg Penetapan Struktur dan Situs CB Peringkat Kabupaten Sumedang
26.	Situs Pasarean Gede	Lingkungan Pasarean, Kel. Kota Kulon, Kec. Sumedang Selatan, Sumedang	SITUS	Situs Pesarean Gede berlokasi di Gunung Ciung merupakan kompleks makam yang sekarang menyatu dengan pemukiman. Areal kompleks makam terdapat dua pintu, pintu pertama atau pintu depan melalui Jl. P. Geusan Ulun, sedangkan pintu kedua melalui Jalan Kutamaya. Situs ini merupakan kompleks pemakaman Ratu Pucuk Umun dan suaminya, Pangeran Santri, beserta para keturunannya.		SK Bupati Nomor 135 Tahun 2022 ttg Penetapan Struktur dan Situs CB Peringkat Kabupaten Sumedang

No	Nama Cagar Budaya	Alamat	Jenis Cagar Budaya	Keterangan	Gambar	Surat Keputusan Bupati
27.	Situs Gunung Puyuh	Desa Sukajaya, Kel. Regol Wetan, Kec. Sumedang Selatan, Sumedang	SITUS	Situs Gunung Puyuh berada di sebuah bukit yang dikenal dengan nama Gunung Puyuh. Situs Gunung Puyuh merupakan kompleks makam para bupati Sumedang dan keluarga keturunan Prabu Geusan Ulun. Situs Gunung Puyuh ini identik dengan situs Pangeran Soegih.		SK Bupati Nomor 135 Tahun 2022 ttg Penetapan Struktur dan Situs CB Peringkat Kabupaten Sumedang
28.	Situs Buyut Lengka	Dusun Kaduwulung, Desa Kaduwulung, Kec. Situraja, Sumedang	SITUS	Situs Buyut Lengka merupakan kompleks makam yang dikeramatkan. Kompleks makam dikelilingi oleh pagar bambu dengan ketinggian 90-110 cm dengan dibagi 3 bagian, sisi barat, tengah, dan timur. Jumlah makam di situs ini adalah 20 makam.		SK Bupati Nomor 135 Tahun 2022 ttg Penetapan Struktur dan Situs CB Peringkat Kabupaten Sumedang

No	Nama Cagar Budaya	Alamat	Jenis Cagar Budaya	Keterangan	Gambar	Surat Keputusan Bupati
29.	Situs Marongge/Gunung Hade	Desa Marongge, Kec. Tomo, Sumedang	SITUS	Situs Marongge merupakan kompleks makam yang berada di puncak Gunung Hade. Terdapat makam empat orang putri bersaudara yang berasal dari Mataram, yaitu Nyi Mas Gabug, Nyi Mas Setayu, Nyi Mas Naibah dan Nyi Mas Naidah, serta sebuah makam berupa struktur batu andesit yang dikenal sebagai makam Embah Putih Jagariksa.		SK Bupati Nomor 135 Tahun 2022 ttg Penetapan Struktur dan Situs CB Peringkat Kabupaten Sumedang
30.	Situs Astana Gede Cipaku	Desa Cipaku, Kec. Darmaraja, Sumedang	SITUS	Di Situs Astana Gede Pakualam terdapat makam Prabu Lembu Agung, Nyi Mas Siti Sujiah dan Embah Jalul, serta Kyai Demang Cipaku yang tergenang air Waduk Jatigede.		SK Bupati Nomor 135 Tahun 2022 ttg Penetapan Struktur dan Situs CB Peringkat Kabupaten Sumedang

No	Nama Cagar Budaya	Alamat	Jenis Cagar Budaya	Keterangan	Gambar	Surat Keputusan Bupati
31.	Situs Pasir Cengkok	Dsn. Cimalela, Desa Mulyajaya, Keec. Wado, Sumedang	SITUS	Situs Cengkok merupakan kompleks pemakaman tua yang terdiri atas makam Aria Nanggadisuta dan beberapa batu tegak yang dipercaya sebagai makam yang dibangun mengelilingi makam Aria Nanggadisuta.		SK Bupati Nomor 135 Tahun 2022 ttg Penetapan Struktur dan Situs CB Peringkat Kabupaten Sumedang
32.	Situs Pasir Putrapada	Dsn. Legok, Desa Sirnasari, Kec. Jatinunggal, Sumedang	SITUS	Situs Putrapada oleh masyarakat setempat disebut juga dengan makam Aria Sacagati. Situs Putrapada merupakan sebuah makam yang ditempatkan pada lahan yang lebih tinggi dari lokasi sekitarnya. Makam berbentuk punden berundak/berteras tiga dan makam Aria Sacagati berada pada teras yang paling tinggi.		SK Bupati Nomor 135 Tahun 2022 ttg Penetapan Struktur dan Situs CB Peringkat Kabupaten Sumedang

No	Nama Cagar Budaya	Alamat	Jenis Cagar Budaya	Keterangan	Gambar	Surat Keputusan Bupati
33.	Situs Kabuyutan Citembong Girang	Blok Kabuyutan, Dsn. Ganeas, Desa Ganeas, Kec. Ganeas, Sumedang	SITUS	Kabuyutan Citembong Girang oleh masyarakat setempat disebut juga dengan petilasan (maqom) Aji Putih ketika belum mendirikan Kerajaan Tembong Agung di Darmaraja. Lokasi kabuyutan berada di puncak bukit, sisi selatan jalan Desa Ganeas. Kondisi sekarang, untuk menuju kabuyutan melalui jalan tanah berbatu dan menanjak		SK Bupati Nomor 483 Tahun 2022 ttg Penetapan Struktur dan Situs CB Peringkat Kabupaten Sumedang
34.	Situs Kompleks Makam Keramat Embah Nanggan	Blok Cihuni, Dsn. Cileuweung, Desa Sukawening, Kec. Ganeas, Sumedang	SITUS	Lokasi makam Embah Nanggan berada di tepian Sungai Cisudajaya. Kompleks makam terdiri atas dua makam, yaitu Keramat Embah Nanggan dan Embah Batara Kusumah. Posisi makam Embah Nanggan berada di ±100 meter sebelah barat daya Embah Batara Kusum		SK Bupati Nomor 483 Tahun 2022 ttg Penetapan Struktur dan Situs CB Peringkat Kabupaten Sumedang

No	Nama Cagar Budaya	Alamat	Jenis Cagar Budaya	Keterangan	Gambar	Surat Keputusan Bupati
35.	Situs Embah Nuridin	Blok Buyut Nur Sidiq, Dsn. Tarikolot, Desa Mekarmulya, Sumedang	SITUS	Tinggalan utama yang disebut sebagai Situs Embah Nuridin adalah struktur makam kuno yang terbuat dari susunan boulder andesit yang sudah mengalami pembundaran, terdiri dari 3 makam yang terletak di dalam pagar batu yang juga terbuat dari susunan boulder andesit yang sudah mengalami pembundaran.		SK Bupati Nomor 483 Tahun 2022 ttg Penetapan Struktur dan Situs CB Peringkat Kabupaten Sumedang
36.	Situs Makam Karomah Cikadu	Blok Sirah Cikadu, Dsn. Cikadu, Dsa Cikadu, Kec. Situraja, Sumedang	SITUS	Tinggalan utama yang disebut sebagai Situs Makam Karomah Cikadu adalah dua struktur makam kuno, yaitu Makam Embah Dalem Wirakara di bagian selatan dan Makam Embah Sumadikara dan Natadikara di bagian utara kompleks makam. Kedua struktur makam tersebut dibuat dari susunan boulder andesit yang sudah mengalami pembundaran.		SK Bupati Nomor 483 Tahun 2022 ttg Penetapan Struktur dan Situs CB Peringkat Kabupaten Sumedang

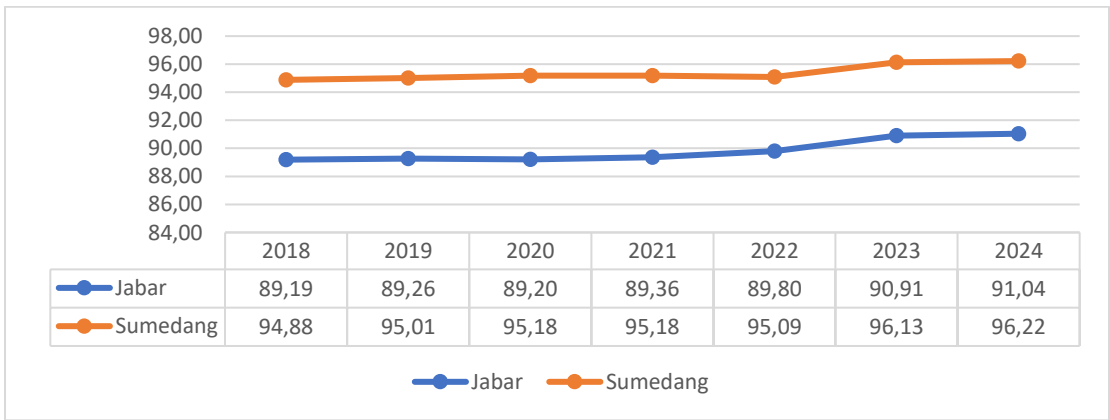
No	Nama Cagar Budaya	Alamat	Jenis Cagar Budaya	Keterangan	Gambar	Surat Keputusan Bupati
37.	Situs Pasir Ipis	Blok Pasir Ipis, Desa Darmawangi, Kec. Tomo, Sumedang	SITUS	Lokasi temuan berupa gundukan bukit memanjang barat timur dengan ukuran diameter sekitar kurang lebih 5x 10 m dengan tinggi sekitar 5 meter. Deposit fosil berada di Formasi Citalang dengan litologi berupa pasir halus lempung coklat kehitaman dengan perkiraan umur sekitar 2-1,5 juta tahun yang lalu.		SK Bupati Nomor 483 Tahun 2022 ttg Penetapan Struktur dan Situs CB Peringkat Kabupaten Sumedang
38.	Struktur Raden Aria Wiraradja I	Blok Pasarean Pasir Ipis, Dsn Darmawangi, Desa Darmawangi, Kec. Tomo, Sumedang	STRUKTUR	Raden Raden Aria Wiraraja I merupakan adik dari Raden Rangga Gede putra dari Prabu Geusan Ulun dari Permaisuri Nyi Mas Cukang Gedeng Waru. Kompleks makam berpagar keliling dengan panjang 24 m dan lebar 12,5 m.		SK Bupati Nomor 483 Tahun 2022 ttg Penetapan Struktur dan Situs CB Peringkat Kabupaten Sumedang

No	Nama Cagar Budaya	Alamat	Jenis Cagar Budaya	Keterangan	Gambar	Surat Keputusan Bupati
39.	Struktur Makam Paranantaka	Blok Cibayawak, Dsn. Cibengkung, Desa Jembarwangi, Kec. Tomo, Sumedang	STRUKTUR	Makam Pranantaka berada di Tanah Kas Desa Jembarwangi. Pranantaka merupakan Kepala Desa Darmawangsi pada masa Pemerintahan Pangeran Panembahan		SK Bupati Nomor 483 Tahun 2022 ttg Penetapan Struktur dan Situs CB Peringkat Kabupaten Sumedang

Sumber: DISPARBUDPORA Kabupaten Sumedang, 2025

2.1.2.7. Keluarga berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Indikator IPG terdiri dari Angka Harapan Hidup (AHH) Perempuan, Angka Melekat Huruf (AMH) Perempuan, Rata-Rata Lama Sekolah dan Sumbangan pendapatan. IPG Kabupaten Sumedang pada Tahun 2023 sebesar 96,13 poin, dan pada tahun 2024 menjadi 96,22 poin atau naik 0,09 poin dibanding tahun 2023. Nilai IPG ini mengindikasikan bahwa di Kabupaten Sumedang pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan telah setara atau lebih baik jika dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Jawa Barat.

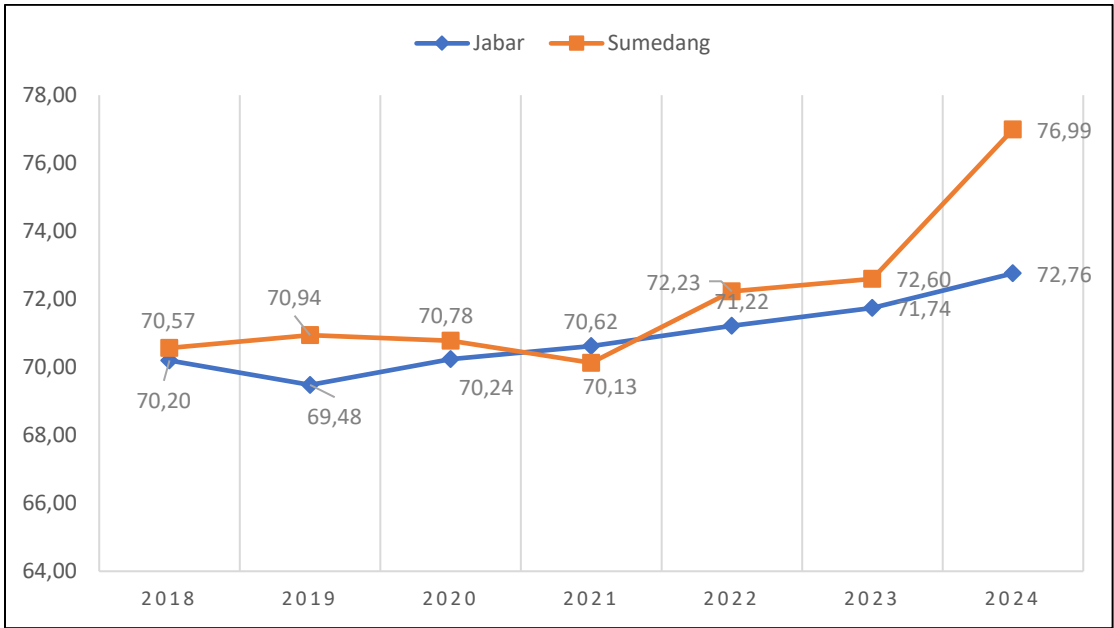


Grafik 2.37 IPG Kabupaten Sumedang dan Jawa Barat Tahun 2018-2024
(Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat (diolah), 2025)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur terlaksananya keadilan dan kesetaraan gender. IDG mengukur partisipasi aktif perempuan pada kegiatan ekonomi dengan indikator persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja, keterlibatan perempuan di parlemen, dan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan, sehingga IDG dapat digunakan untuk mengukur pencapaian kapabilitas perempuan dalam berbagai bidang kehidupan.

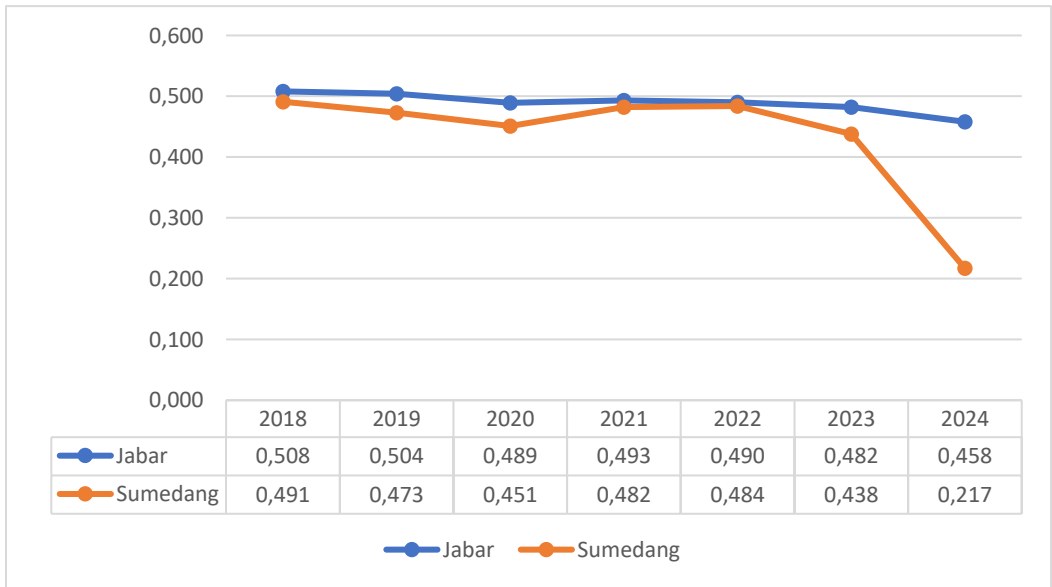
IDG Kabupaten Sumedang Tahun 2024 sebesar 76,99 meningkat dibanding Tahun 2023 yang mencapai 72,60 poin. Nilai IDG Kabupaten Sumedang berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Barat yang baru mencapai 72,76 poin pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa di Kabupaten Sumedang perempuan berperan lebih aktif dalam bidang

ekonomi, partisipasi politik dan pengambilan keputusan dibanding tahun sebelumnya.



Grafik 2.38 IDG Kabupaten Sumedang dan Jawa Barat Tahun 2018-2024
(Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat (diolah), 2025)

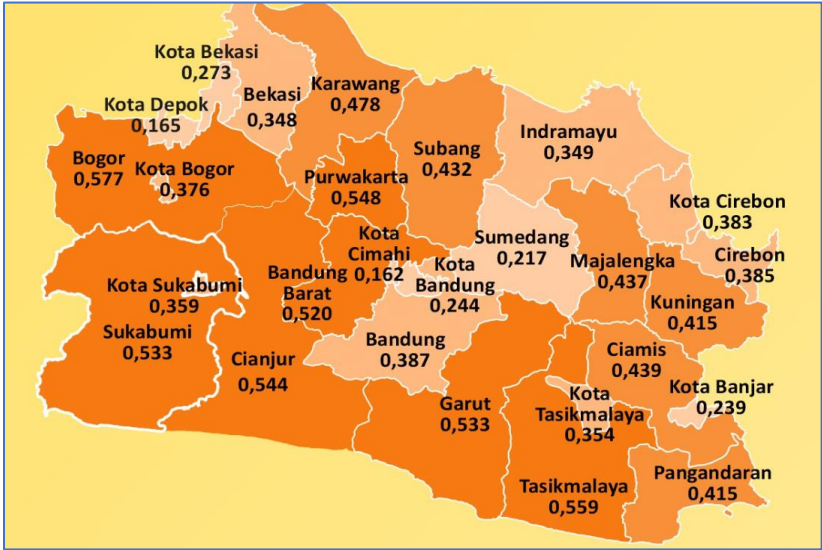
Indeks Ketimpangan Gender (IKG) menggambarkan kerugian/kegagalan (loss) dari pencapaian pembangunan manusia akibat adanya ketidaksetaraan gender yang diukur dari aspek kesehatan, pemberdayaan, serta akses dalam pasar tenaga kerja. Semakin kecil IKG berarti semakin rendah ketimpangan gender, dan sebaliknya.



Grafik 2.39 IKG Kabupaten Sumedang dan Jawa Barat Tahun 2018-2024
(Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat (diolah), 2025)

IKG dinilai rendah jika nilainya kurang dari 0,399, menengah bawah jika IKG berada dalam interval 0,400-0,449, menengah atas jika IKG berada pada interval 0,450-0,499 dan dinilai tinggi jika IKG di atas atau sama dengan 0,500.

IKG Sumedang tahun 2024 sebesar 0,217 poin masuk kategori ketimpangan rendah. Hal ini menunjukkan penurunan ketimpangan dibanding tahun 2023 yang mencapai 0,438. Nilai ini lebih rendah dari IKG Jabar sebesar 0,458.



Gambar 2.38 IKG Kab/Kota Jabar Tahun 2024
(Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat (diolah), 2025)

Mencermati ketimpangan gender di Kabupaten Sumedang yang sudah masuk kategori rendah, maka peran semua pihak dibutuhkan untuk mempertahankan dan meningkatkan perbaikan dalam berbagai dimensi agar perempuan memiliki kesempatan lebih untuk meningkatkan akses dan kapasitasnya.

2.1.3. Aspek Daya Saing Daerah

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengukur Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) sebagai upaya penyediaan data dasar tahunan bagi daerah. IDSD sendiri merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah.

Daya saing daerah memiliki beberapa aspek yang terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah dan infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

Berdasarkan pengukuran Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Tahun 2024 yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), bahwa Kabupaten Sumedang masuk pada kategori Daya Saing Tinggi dengan nilai 3,92. Nilai tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yang berada pada nilai 3,48 dari hasil pengukuran terhadap 4 komponen dan 12 pilar yang dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 2.26 Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Sumedang Tahun 2022-2024

Tahun	Komponen Lingkungan Pendukung					Komponen SDM	Komponen Pasar					Komponen Ekosistem Inovasi		Nilai IDSD
	Pilar 1: Institusi	Pilar 2: Infrastruktur	Pilar 3: Adopsi TIK	Pilar 4: Stabilitas Ekonomi Makro	Pilar 5: Kesehatan	Pilar 6: Keterampilan	Pilar 7: Pasar Produk	Pilar 8: Pasar Tenaga Kerja	Pilar 9: Sistem Keuangan	Pilar 10: Ukuran Pasar	Pilar 11: Dinamisme Bisnis	Pilar 12: Kapabilitas Inovasi		
2022	4,45	2,11	3,39	2,66	4,08	3	3,35	2,57	3,34	1,6	5	3,84		3,28
2023	4,58	2,37	4,58	2,77	4,07	3,24	3,35	2,72	2,6	4,52	3,2	3,79		3,48
2024	4,62	3,58	4,63	3,62	4,02	3,67	4,41	2,86	2,2	4,55	5	3,92		3,92

Sumber: Indeks Daya Saing Daerah BRIN, 2025

Berdasarkan hasil pengukuran Indeks Daya Saing Daerah Tahun 2024, beberapa pilar masih memiliki nilai yang rendah, yaitu Pilar Infrastruktur (3,58); Pilar Stabilitas Ekonomi Makro (3,62); Pilar Keterampilan (3,67); Pilar Pasar Tenaga Kerja (2,86); Pilar Sistem Keuangan (2,20) serta Pilar Kapabilitas Inovasi (3,92). Pilar tersebut harus dioptimalkan agar Daya Saing Daerah Kabupaten Sumedang dapat meningkat. Sedangkan pilar yang telah memiliki nilai yang tinggi diantaranya Pilar Institusi (4,62); Pilar Adopsi TIK (4,63); Pilar Kesehatan (4,02); Pilar Pasar Produk (4,41) dan Pilar Ukuran Pasar (4,55). Tingginya nilai pada pilar tersebut didukung oleh Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE); jangkauan jaringan internet; tingginya Angka Harapan Hidup; serta tingginya PDRB. Pilar yang memiliki nilai maksimal adalah Dinamisme Bisnis (5,00). Pilar yang meningkat pesat dari Tahun 2023 adalah Pilar Dinamisme Bisnis (meningkat 1,8 point) dan Pilar Infrastruktur (meningkat 1,21 point).

2.1.3.1. Daya Saing Sumber Daya Manusia

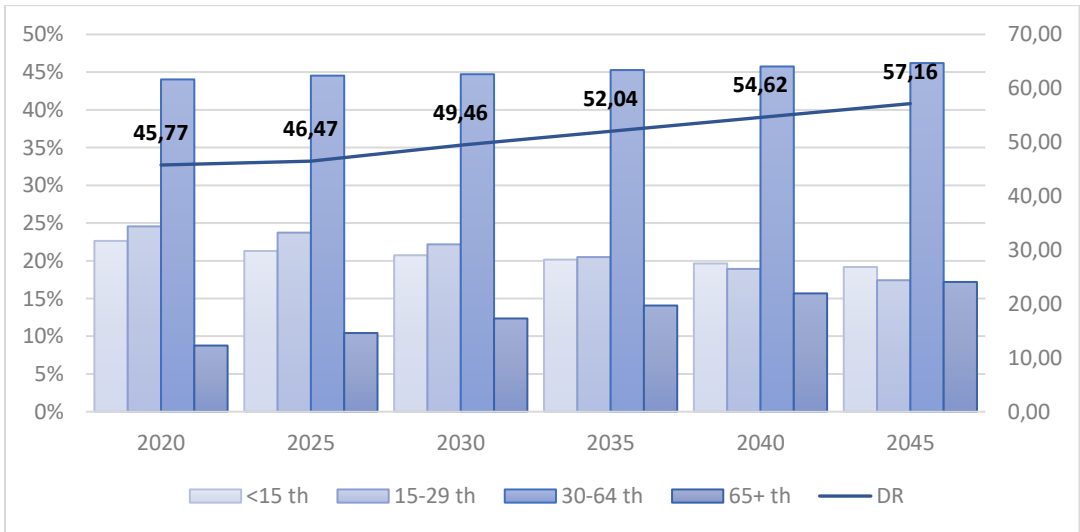
Kabupaten Sumedang tengah menghadapi dinamika kependudukan yang penting untuk diperhatikan, khususnya terkait peningkatan beban ketergantungan yang terus menunjukkan tren naik dari tahun ke tahun. Beban ketergantungan adalah rasio jumlah penduduk usia non-produktif (di bawah 15 tahun dan di atas 65 tahun) terhadap penduduk usia produktif (15–64 tahun). Berdasarkan grafik proyeksi, rasio ini terus mengalami peningkatan dari angka 45,77 pada tahun 2020 hingga diproyeksikan mencapai 57,16 pada tahun 2045. Kenaikan ini menunjukkan bahwa secara perlahan, proporsi penduduk yang membutuhkan dukungan ekonomi dari kelompok usia produktif semakin besar.

Tahun 2024 menjadi salah satu titik penting dalam transisi demografi Sumedang. Dengan rasio ketergantungan sebesar 0,4729 atau 47,29%, berarti dari setiap 100 orang usia produktif, terdapat sekitar 47 orang yang bergantung pada mereka secara ekonomi dan sosial. Ini menjadi tantangan nyata, karena semakin besar beban ketergantungan, semakin tinggi pula tekanan terhadap layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial yang harus ditanggung oleh angkatan kerja aktif.

Perubahan struktur usia ini juga terlihat jelas dari piramida penduduk antara tahun 2023 dan proyeksi 2045. Jika pada tahun 2023 masih terlihat dominasi usia muda, maka pada 2045 bentuk piramida berubah menjadi lebih gemuk di kelompok usia tengah dan atas, mengindikasikan peningkatan populasi lansia. Kondisi ini mencerminkan bahwa Sumedang akan memasuki fase aging population, di mana penduduk lanjut usia menjadi kelompok signifikan dalam komposisi penduduk secara keseluruhan. Tanpa persiapan yang matang, hal ini dapat menjadi beban ekonomi yang berat bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Namun, di balik tantangan tersebut, terdapat peluang besar yang harus dimanfaatkan. Penduduk usia muda, terutama kelompok 20–34 tahun yang mendominasi piramida penduduk 2023, merupakan aset potensial yang dapat menopang perekonomian daerah di masa depan. Masa ini merupakan fase bonus demografi, yaitu ketika jumlah penduduk usia produktif berada dalam puncaknya. Apabila pemerintah mampu mengelola potensi ini dengan baik melalui peningkatan keterampilan, pengembangan pendidikan vokasi, serta dukungan terhadap wirausaha dan industri kreatif maka Sumedang tidak hanya mampu menahan laju beban ketergantungan, tetapi juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara signifikan.

Dengan demikian, peningkatan beban ketergantungan harus disikapi bukan hanya sebagai tantangan, tetapi juga sebagai momentum untuk melakukan transformasi struktural di bidang pendidikan, ketenagakerjaan, dan ekonomi. Peran pemuda akan sangat menentukan arah dan kekuatan perekonomian Sumedang di masa depan, terutama dalam menjawab tantangan era masyarakat menua (*aging society*) yang tak terelakkan.



Grafik 2.40 Komposisi Penduduk dan Rasio Ketergantungan
(Sumber: BPS (diolah), 2024)

2.1.3.2. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

1. Inovasi

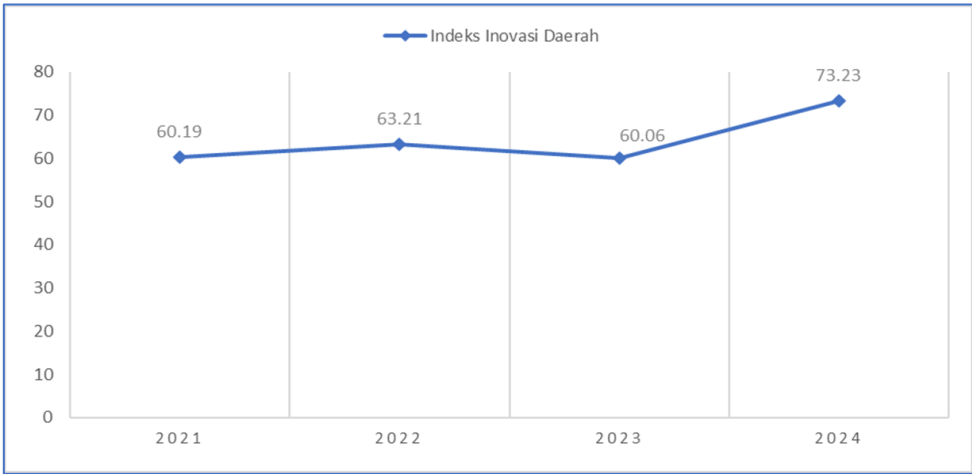
Kemajuan suatu daerah sangat ditentukan oleh inovasi yang dilakukan daerah tersebut. Untuk itu maka diperlukan adanya kreativitas daerah untuk meningkatkan daya saingnya. Berdasarkan banyak bukti empiris, inovasi merupakan faktor kunci untuk keberhasilan pencapaian daya saing sebuah daerah. Inovasi tidak dapat berkembang dengan sendirinya, melainkan harus didukung berbagai elemen lain. Dukungan nyata agar inovasi dapat berkembang dengan optimal adalah dengan membangun suatu sistem, yaitu sistem inovasi.

Batasan atau definisi tentang inovasi sangatlah beragam, tetapi secara umum, yang dimaksud dengan inovasi adalah penerapan atau implementasi dari sesuatu yang baru. Lebih luas lagi, inovasi merupakan tindakan penerapan ide-ide baru yang menciptakan nilai bagi organisasi bisnis, pemerintah, dan masyarakat. Bisa dikatakan bahwa inovasi merupakan (penerapan) cara yang lebih baik dan cerdas dalam melakukan sesuatu.

Dalam konteks daerah, pembangunan berbasis inovasi sudah menjadi keniscayaan, bahkan sudah menjadi kebutuhan. Hal ini seiring dengan tumbuhnya kesadaran bersama bahwa majunya suatu daerah sangat ditentukan oleh inovasi yang dilakukan daerah tersebut. Untuk itu maka diperlukan adanya acuan kebijakan terhadap berbagai kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kreativitas keinovasian daerah. Peningkatan keinovasian masyarakat serta merta akan meningkatkan dan memacu kreativitas untuk meningkatkan daya saing daerah.

Sistem Inovasi Daerah merupakan suatu bentuk cara pandang/pendekatan pembangunan daerah yang dilakukan secara sistematis, inovatif, holistik, berkelanjutan, dengan lebih menekankan kerja kolaboratif antar stakeholders pembangunan daerah. Sistem Inovasi Daerah juga dapat dikatakan sebagai suatu kesatuan dari sehimpunan pelaku pembangunan, kelembagaan (termasuk kebijakan), hubungan interaksi dan proses produktif yang mempengaruhi arah perkembangan dan kecepatan inovasi dan difusi inovasi, termasuk teknologi, dan praktek baik/terbaik serta proses pembelajarannya.

Inovasi yang telah disusun oleh Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, akan dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri RI melalui pengukuran Indeks Inovasi Daerah (IID) dan pemberian penghargaan *Innovative Government Award* (IGA) setiap tahunnya. Perkembangan Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Sumedang dalam kurun waktu 2021-2024 adalah sebagai berikut:



Grafik 2.41 Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021-2024

(Sumber: Indeks Inovasi Daerah Kemendagri, 2024)

Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Sumedang dalam kurun waktu 3 tahun terakhir mengalami fluktuasi. Hal tersebut sangat dipengaruhi oleh kematangan inovasi yang dinilai oleh Kementerian Dalam Negeri melalui 2 aspek yakni aspek Satuan Pemerintah Daerah yang terbagi menjadi 3 variabel dan 15 indikator. Serta Aspek Satuan Inovasi terbagi menjadi 5 variabel dan 20 indikator. Pada tahun 2021 Kabupaten Sumedang memperoleh Indeks Inovasi sebesar 60,19 dan mengalami kenaikan pada Tahun 2022 dengan indeks 63,21. Sedangkan pada Tahun 2023 mengalami sedikit penurunan menjadi 60,06 point. Kenaikan yang signifikan pada tahun 2024 menjadi 73,23 point. Prestasi yang didapatkan tersebut

diharapkan menjadi pondasi untuk memperoleh predikat kategori Kabupaten Terinovatif. Adapun hasil Hasil pengukuran Indeks Inovasi Daerah tahun 2024 dapat dijelaskan melalui diagram berikut ini:



Grafik 2.42 Hasil Pengukuran Komponen Indeks Inovasi Daerah Tahun 2024
(Sumber: Indeks Inovasi Daerah Kemendagri, 2024)

Variabel yang memiliki indeks tinggi diantaranya adalah Sumber Daya Manusia (100 point), Ekosistem Inovasi dan Kajian (100 point), Infrastruktur (96,67 point), Output Pengetahuan dan Teknologi (83,33), Institusi (78,33 point), Kecepatan Bisnis Proses (76,19 point). Sedangkan variable yang masih rendah adalah Kecanggihan Produk (66,67 point) dan Jumlah Inovasi dan Hasil Kreatif (59,22 point).

Dari hasil pengukuran Indeks Inovasi Daerah (IID) tersebut dapat diketahui bahwa inovasi yang disusun oleh Perangkat Daerah di Kabupaten Sumedang, tingkat kematangannya belum optimal. Inovasi tersebut sudah berjalan dengan baik dilapangan, namun belum dilengkapi dengan data dukung administrasi.

Kabupaten Sumedang memiliki beberapa inovasi unggulan yang menjuarai beberapa event inovasi tingkat nasional dan provinsi. Diantaranya penilaian inovasi tingkat nasional lainnya yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi. Inovasi yang lolos menjadi Top Inovasi yaitu Pantasi Mart (Pusat Pengadaan Fasilitas Sanitasi Masyarakat – Top 40/2017) dan Angka Stunting Sumedang Turun 20 Persen Dalam Waktu 3 Tahun dengan Aplikasi SIMPATI – Top 45/2023. Sedangkan di tingkat provinsi melalui Kompetisi Inovasi Jawa Barat (KIJB), Kabupaten Sumedang telah menjuarai sebanyak 4 kali berturut-turut. Adapun inovasi tersebut adalah Sakip Desa (Juara 1 KIJB 2020); E Office Kabupaten Sumedang (Juara 1 KIJB 2021); Penurunan

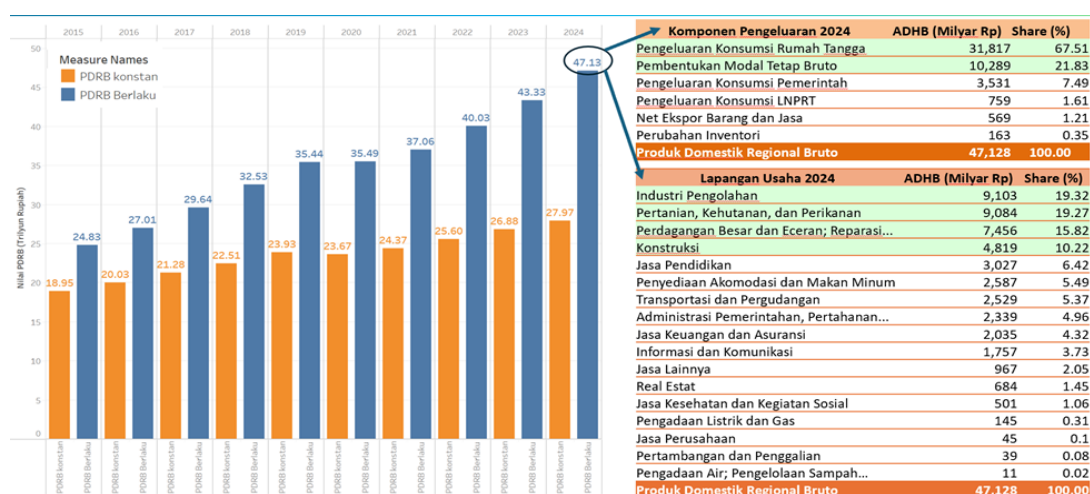
stunting melalui Aplikasi SIMPATI (Juara 1 KIJB 2022); dan WA KEPO (Juara 1 dan *Best of The Best Innovation* KIJB 2023). Sedangkan Tahun 2024, Inovasi Sistem Informasi Cegah Kematian Persalinan (SICAKEP) menjadi TOP 25 KIJB 2024.

Untuk menjaga agar semangat berinovasi tetap tinggi, maka dilaksanakan lomba inovasi tingkat kabupaten melalui Gelar Inovasi Daerah yang dilaksanakan setiap tahunnya. Inovasi tersebut dinilai secara objektif oleh tim penilai independent. Peserta gelar inovasi terbagi menjadi 3 kategori yang meliputi Perangkat Daerah Kabupaten, Kecamatan dan Desa yang telah mengusulkan inovasinya melalui aplikasi SIKOMPLIT (Sistem Informasi Kompilasi Inovasi Terintegrasi) pada E-Office Kabupaten Sumedang. Kedepannya, inovasi yang dilombakan tidak hanya terbatas pada 3 kategori tersebut, namun akan diperluas lagi sehingga dapat memotret kondisi inovasi di Kabupaten Sumedang secara lebih komprehensif.

2. Produktifitas Ekonomi

Struktur ekonomi Kabupaten Sumedang sejak 2019 masih didominasi 3 sektor utama (Industri, Pertanian, dan Perdagangan). Di tahun 2024 sektor industri pengolahan menjadi sumber pertumbuhan PDRB. Dari sisi pengeluaran, peran konsumsi rumah tangga sangat menentukan perekonomian Sumedang.

Seiring berfungsinya tol Cisumdawu dan Bandara Kertajati, serta pengembangan Kawasan wisata Jatigede, Kawasan perkotaan Jatinangor, Sumedang Industrialpolis, Kabupaten Sumedang berpeluang mengakselerasi ekonomi wilayah melalui kegiatan industri, pariwisata, perdagangan, dan pertanian yang berkelanjutan dengan inovasi dan kolaborasi antar para pemangku kepentingan.



Grafik 2.43 Tren dan Komposisi PDRB Kabupaten Sumedang
(Sumber: BPS Kabupaten Sumedang, 2024)

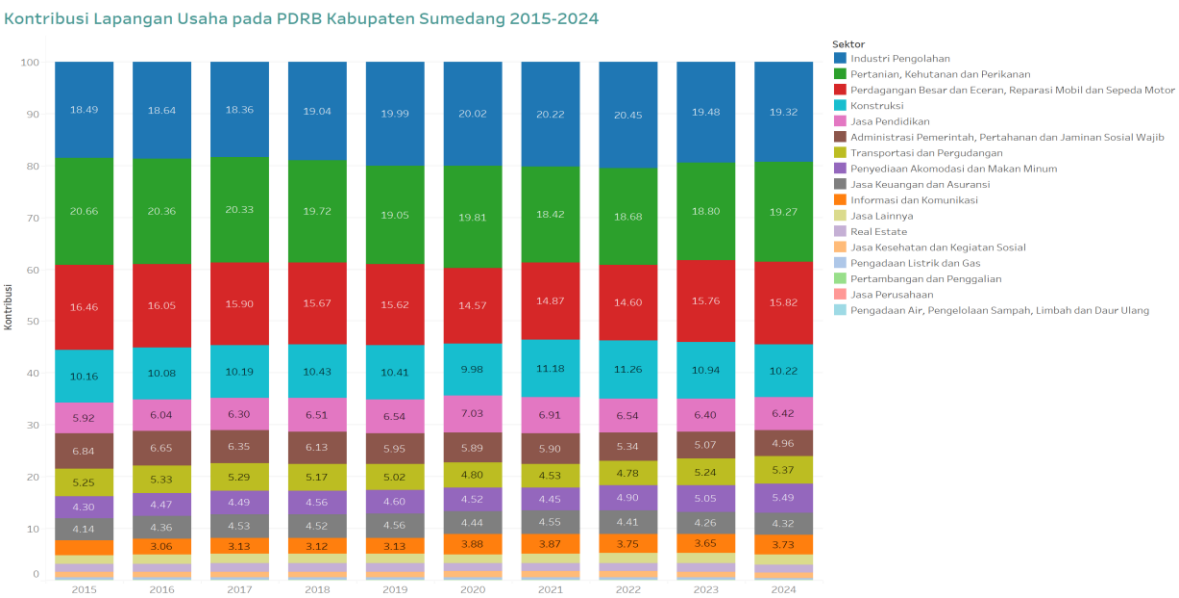
PDRB Konstan mengalami kenaikan stabil dari tahun 2015 (Rp 18,95 triliun) hingga 2024 (Rp 27,97 triliun). PDRB Berlaku menunjukkan pertumbuhan lebih signifikan karena faktor inflasi, meningkat dari Rp 24,83 triliun pada 2015 menjadi Rp 47,13 triliun pada 2024. Pertumbuhan PDRB berlangsung positif selama periode 2015–2024, dengan PDRB Berlaku tumbuh lebih cepat dibandingkan PDRB Konstan akibat pengaruh inflasi.

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga adalah komponen terbesar, menyumbang 67,51% dari total PDRB. Hal ini menunjukkan bahwa konsumsi masyarakat merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sumedang. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) menyumbang 21,83%, menunjukkan pentingnya investasi dalam infrastruktur dan aset tetap untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah menyumbang 7,49%, menunjukkan peran aktif pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi melalui anggaran publik. Net Ekspor Barang dan Jasa memiliki kontribusi sebesar 1,21%, yang relatif kecil, menunjukkan bahwa ekspor belum menjadi sumber pendapatan utama bagi Kabupaten Sumedang.

Industri Pengolahan dan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menjadi dua lapangan usaha terbesar, masing-masing menyumbang 19,32% dan 19,27% dari total PDRB. Ini menunjukkan pentingnya sektor industri manufaktur dan pertanian dalam perekonomian Kabupaten Sumedang. Perdagangan Besar dan Eceran serta Konstruksi juga memberikan kontribusi signifikan, masing-masing sebesar 15,82% dan 10,22%. Sektor perdagangan menunjukkan perkembangan yang baik, sedangkan konstruksi mencerminkan aktivitas pembangunan

infrastruktur. Jasa Pendidikan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, serta Transportasi dan Pergudangan juga memiliki peran penting, masing-masing menyumbang 6,42%, 5,49%, dan 5,37%. Sektor lain seperti Administrasi Pemerintahan, Jasa Keuangan dan Asuransi, serta Informasi dan Komunikasi memiliki kontribusi moderat, sekitar 4%-6%. Sektor Real Estat, Jasa Kesehatan, dan Pertambangan memiliki kontribusi lebih rendah, menunjukkan bahwa mereka belum menjadi pilar utama pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sumedang.

Adapun perkembangan Kontribusi Lapangan Usaha Pada PDRB Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut.



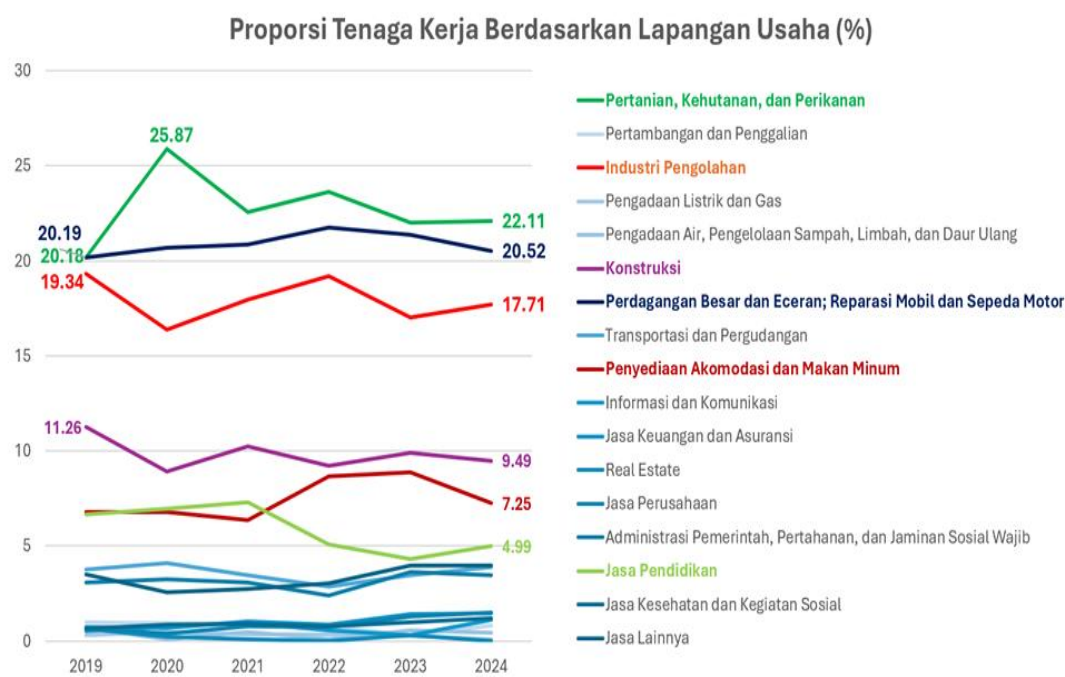
Grafik 2.44 Tren Kontribusi PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2015-2024
(Sumber: BPS Kabupaten Sumedang, 2024)

Kontribusi sektor industri pengolahan cenderung stabil atau mengalami peningkatan kecil dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015, kontribusinya sebesar 18,49%, dan pada 2024 meningkat menjadi 19,32%. Sektor ini tetap menjadi pilar penting dalam pertumbuhan ekonomi daerah, menunjukkan stabilitas dan potensi industri manufaktur di Kabupaten Sumedang. Kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan cukup stabil, dengan angka antara 19%–21%. Pada tahun 2015, kontribusinya sebesar 20,66%, dan pada 2024 turun menjadi 19,27%. Sektor pertanian tetap menjadi tulang punggung ekonomi daerah, meskipun ada indikasi perlambatan pertumbuhan dibandingkan sektor lainnya. Ini menunjukkan pentingnya diversifikasi sektor ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada sektor primer.

Kontribusi sektor perdagangan cenderung stabil, dengan angka sekitar 15%–16%. Pada tahun 2015, kontribusinya sebesar 16,46%, dan pada 2024 meningkat menjadi 15,82%. Sektor ini berperan penting dalam menjaga daya beli masyarakat dan aktivitas ekonomi lokal. Namun, pertumbuhannya tampak stagnan dibandingkan sektor lain seperti industri pengolahan.

Sektor konstruksi memiliki kontribusi yang cukup signifikan, meskipun lebih rendah dibandingkan sektor utama lainnya. Kontribusi sektor konstruksi cenderung stabil, dengan angka sekitar 10%–11%. Pada tahun 2015, kontribusinya sebesar 10,16%, dan pada 2024 meningkat menjadi 10,22%. Sektor ini mencerminkan aktivitas pembangunan infrastruktur dan perkembangan properti di Kabupaten Sumedang. Stabilitas kontribusinya menunjukkan bahwa ada kebutuhan akan investasi infrastruktur yang terus berlanjut.

Perkembangan proporsi tenaga kerja berdasarkan lapangan usaha dapat dilihat pada gambar berikut:



Grafik 2.45 Proporsi Tenaga Kerja Berdasarkan Lapangan Usaha (%)
Tahun 2019-2024

(Sumber: Sakernas BPS, 2019-2024)

Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan memiliki proporsi tenaga kerja tertinggi dibandingkan sektor lainnya. Pada tahun 2019, proporsinya sebesar 20,19%, naik menjadi puncak 25,87% pada tahun 2020, lalu mengalami penurunan perlahan menjadi 22,11% pada tahun 2024. Sektor pertanian tetap menjadi penyedia lapangan pekerjaan terbesar di

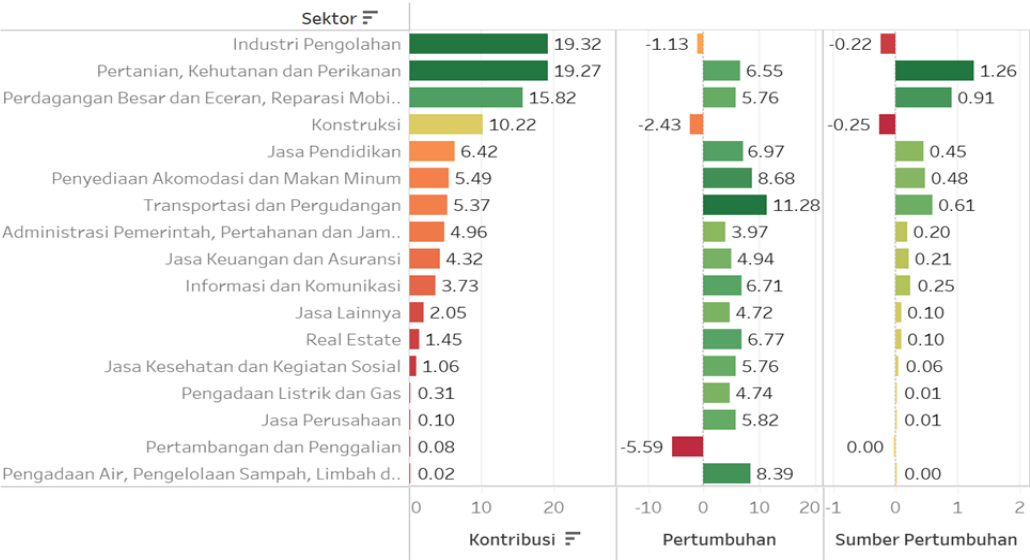
Kabupaten Sumedang, meskipun ada indikasi perlambatan pertumbuhan serapan tenaga kerja setelah mencapai puncak pada 2020. Hal ini dapat disebabkan oleh transformasi teknologi atau migrasi tenaga kerja ke sektor lain.

Proporsi tenaga kerja dalam sektor Industri Pengolahan cenderung stabil, dengan angka antara 19,34% hingga 17,71%. Pada tahun 2019, proporsinya sebesar 19,34%, turun menjadi 17,71% pada tahun 2024. Sektor industri pengolahan memiliki kontribusi yang signifikan, namun pertumbuhannya relatif stagnan atau mengalami penurunan lemah. Ini bisa disebabkan oleh tantangan seperti kompetisi global, ketidakpastian ekonomi, atau kurangnya investasi baru.

Sektor Konstruksi memiliki proporsi tenaga kerja yang lebih rendah dibandingkan dua sektor utama di atas. Pada tahun 2019, proporsinya sebesar 11,26%, meningkat menjadi 10,00% pada tahun 2021, lalu turun menjadi 9,49% pada tahun 2024. Sektor konstruksi memiliki peran penting dalam menyediakan lapangan pekerjaan, meskipun tidak sebesar sektor pertanian atau industri. Penurunan proporsi tenaga kerja pada tahun-tahun terakhir mungkin disebabkan oleh perlambatan aktivitas pembangunan infrastruktur atau proyek-proyek besar.

PDRB per Kapita Kabupaten Sumedang relatif lebih resiliens saat terjadi pandemi Covid-19 yang masih tumbuh positif, namun gap nya masih cukup lebar.

Kontribusi & Pertumbuhan Lapangan Usaha PDRB Kab. Sumedang Tahun 2024

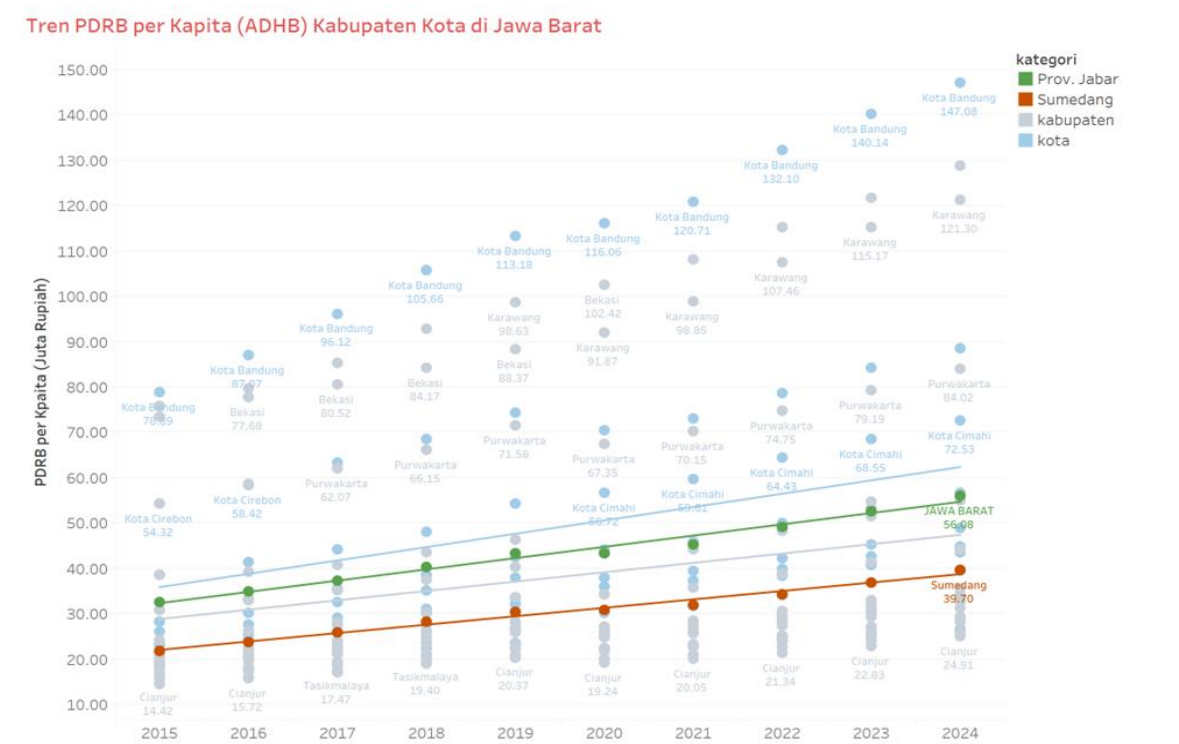


Grafik 2.46 Kontribusi Pertumbuhan Lapangan Usaha PDRB Kabupaten Sumedang Tahun 2024
(Sumber: BPS Kabupaten Sumedang, 2024)

Industri Pengolahan berkontribusi sebesar 19,32% dari total PDRB, menjadikannya salah satu sektor terbesar. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan berkontribusi 19,27%, hampir sama dengan industri pengolahan. Perdagangan besar dan eceran berkontribusi sebesar 15,82%, menjadi sektor ketiga terbesar. Sektor yang Tumbuh Positif adalah Transportasi dan Pergudangan dimana mengalami pertumbuhan tertinggi (+11,28%), menunjukkan perkembangan aktif dalam logistik dan distribusi. Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang mengalami pertumbuhan signifikan (+8,39%), mencerminkan perhatian terhadap infrastruktur lingkungan. Jasa Pendidikan mengalami pertumbuhan (+6,97%), menunjukkan pentingnya investasi dalam pendidikan. Sektor seperti Real Estate, Jasa Lainnya, Informasi dan Komunikasi juga mengalami pertumbuhan positif, meskipun lebih rendah.

Sedangkan sektor yang mengalami kontraksi diantaranya adalah Industri Pengolahan: Mengalami kontraksi (-1,13%), menunjukkan perlambatan aktivitas manufaktur. Konstruksi mengalami kontraksi (-2,43%), menunjukkan penurunan aktivitas pembangunan infrastruktur. Pertambangan dan Penggalan mengalami kontraksi paling besar (-5,59%).

Perbandingan PDRB Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2024 dapat dilihat pada grafik berikut.



Grafik 2.47 Perbandingan PDRB Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2024
(Sumber: BPS Kabupaten Sumedang, 2024)

Secara keseluruhan, PDRB per kapita di Jawa Barat mengalami pertumbuhan positif dari tahun 2015 hingga 2024. Kota seperti Bandung, Bekasi, Karawang, dan Cimahi memiliki PDRB per kapita tertinggi, sementara kabupaten seperti Tasikmalaya, Cianjur, dan Sumedang memiliki PDRB per kapita yang lebih rendah. Kabupaten Sumedang mengalami pertumbuhan stabil, meskipun laju pertumbuhannya relatif lebih lambat dibandingkan beberapa kota besar seperti Bandung atau Bekasi. Nilai PDRB per kapita Kabupaten Sumedang tetap berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Barat (Rp 56,08 juta pada 2024).

Kabupaten Sumedang terus berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Barat selama periode analisis. Meskipun mengalami pertumbuhan, laju pertumbuhan Kabupaten Sumedang lebih lambat dibandingkan beberapa kota besar seperti Bandung, Bekasi, dan Karawang. Kabupaten Sumedang mengalami pertumbuhan PDRB per kapita yang stabil, namun masih berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Barat. Pertumbuhan ini didorong oleh sektor pertanian dan perdagangan, tetapi kurangnya diversifikasi ekonomi dan infrastruktur yang kurang mendukung menjadi tantangan utama. Kabupaten Sumedang memiliki potensi untuk berkembang lebih cepat melalui diversifikasi ekonomi, pengembangan infrastruktur, dan investasi dalam sektor modern seperti teknologi informasi dan pariwisata.

2.1.3.3. Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

Ekonomi hijau adalah model pembangunan ekonomi untuk menunjang pembangunan berkelanjutan dengan fokus pada investasi, kapital dan infrastruktur, lapangan kerja dan keterampilan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan.

Penerapan ekonomi hijau dalam pembangunan berarti mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan lingkungan ke dalam kebijakan, perencanaan, dan kegiatan ekonomi, agar pembangunan tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial.

Aspek kunci dan ruang lingkup ekonomi hijau yaitu:

- Menciptakan peluang kerja baru (green jobs) dan investasi baru (green investment).
- Mendorong pertumbuhan ekonomi yang rendah karbon.
- Meningkatkan daya dukung SDA dan Lingkungan Hidup.

Selain meningkatkan ekonomi dan mata pencaharian dalam jangka pendek Ekonomi Hijau juga melindungi kesejahteraan untuk jangka panjang.

Konsep Pembangunan Indeks Ekonomi Hijau Indonesia adalah bahwa Indeks Ekonomi Hijau dikembangkan berdasarkan PRK dengan mengadopsi konsep pembangunan Ekonomi Hijau dengan disesuaikan dengan karakteristik Indonesia. Mempertimbangkan ketersediaan dan aksesibilitas data teknis untuk dapat diproyeksi untuk mendukung proses pengukuran yang berkelanjutan.

Indeks Ekonomi Hijau ditujukan sebagai alat untuk mengukur progres dan capaian transformasi ekonomi menuju Ekonomi Hijau secara *tangible*, representatif, dan akurat.

Dalam RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029, penurunan emisi GRK menjadi salah satu sasaran Visi Indonesia Emas tahun 2045 dan penerapan Ekonomi hijau diintegrasikan sebagai salah satu *goals*, dan merupakan salah satu indikator makro pembangunan. Ekonomi Hijau merupakan salah satu strategi transformasi ekonomi, dimana dengan melalui ekonomi hijau dengan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim.

Ekonomi biru adalah pendekatan pembangunan ekonomi yang berfokus pada pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan pelestarian ekosistem laut. Ciri-ciri ekonomi biru:

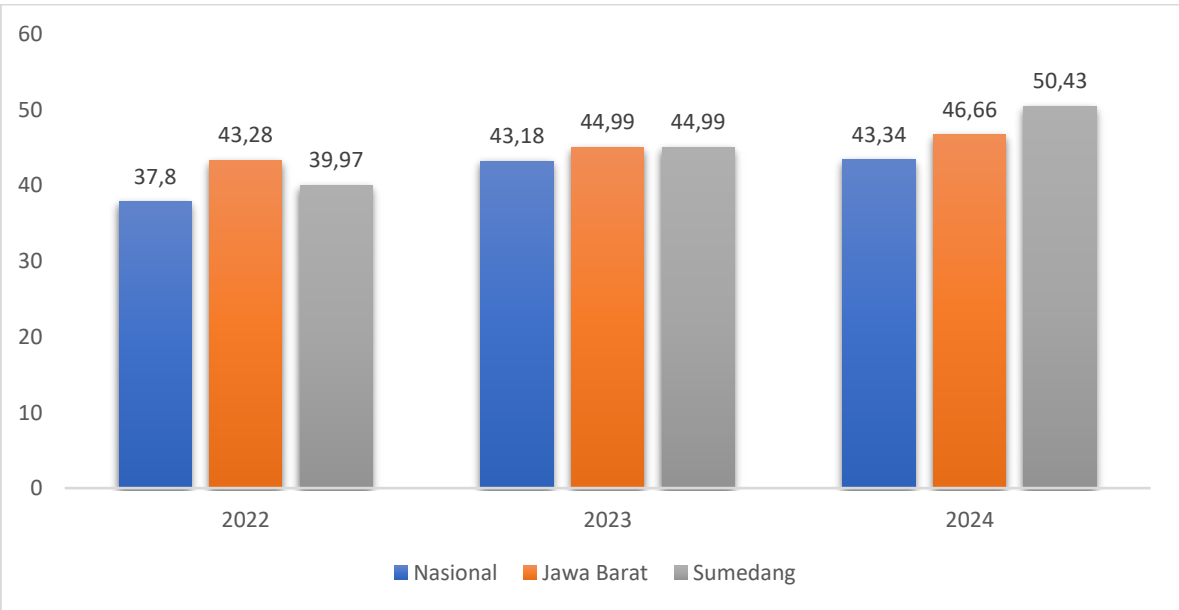
- Pemanfaatan laut untuk perikanan, pariwisata, energi laut, dan bioteknologi laut.
- Menjaga kesehatan ekosistem laut dan pesisir.
- Mengurangi pencemaran laut dan penangkapan ikan yang berlebihan.
- Mendorong inovasi berbasis laut.

2.1.3.4. Transformasi Digital

Pembangunan Teknologi Informasi dan komunikasi di Kabupaten Sumedang telah dimulai secara massif pada saat pandemi Covid-19 Tahun 2020 yang menuntut layanan publik harus tetap berjalan sekalipun di masa pandemi. Pengembangan berbagai aplikasi layanan publik dan pengembangan infrastruktur jaringan seperti fiber optic yang sudah sampai di 277 Desa dan Kelurahan se-Kabupaten Sumedang ditunjang dukungan

penyuh dari Kepala Daerah menjadikan perubahan signifikan pada wajah transformasi digital di Kabupaten Sumedang.

Transformasi digital telah mengubah secara signifikan cara berinteraksi dan berorganisasi, serta memberikan kontribusi besar bagi perekonomian. Penggunaan internet sebagai cara baru berinteraksi di kalangan masyarakat telah menggeser kebiasaan dari pertemuan konvensional ke pertemuan pada platform media sosial, sehingga dapat dikatakan bahwa masyarakat telah bertransformasi. Pengukuran Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) diperlukan untuk mengidentifikasi serta mengukur tingkat kesiapan dan kapasitas masyarakat dalam menghadapi era digital. Hasil pengukuran IMDI diharapkan menjadi pedoman dalam merumuskan kebijakan dan program pengembangan SDM digital yang komprehensif dan tepat sasaran. Grafik perkembangan IMDI di Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat dan Nasional dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 2.48 Indeks Literasi Masyarakat Digital Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat dan Nasional pada Tahun 2022 – 2024
(Sumber: Kementerian Komunikasi dan Digital, 2025)

IMDI Kabupaten Sumedang pada tahun 2024 termasuk dalam kategori tinggi, bahkan mengalahkan Provinsi Jawa Barat Berikut kategori IMDI terbagi menjadi 5 (lima) kelompok:

Tabel 2.27 Distribusi Kategori IMDI

No	Nilai	Kategori
1	< 30,88	Sangat Rendah
2	30,88 - 36,27	Rendah
3	36,28 - 47,06	Cukup
4	47,07 - 52,47	Tinggi
5	> 52,47	Sangat Tinggi

Sumber: Kementerian Komunikasi dan Digital, 2025

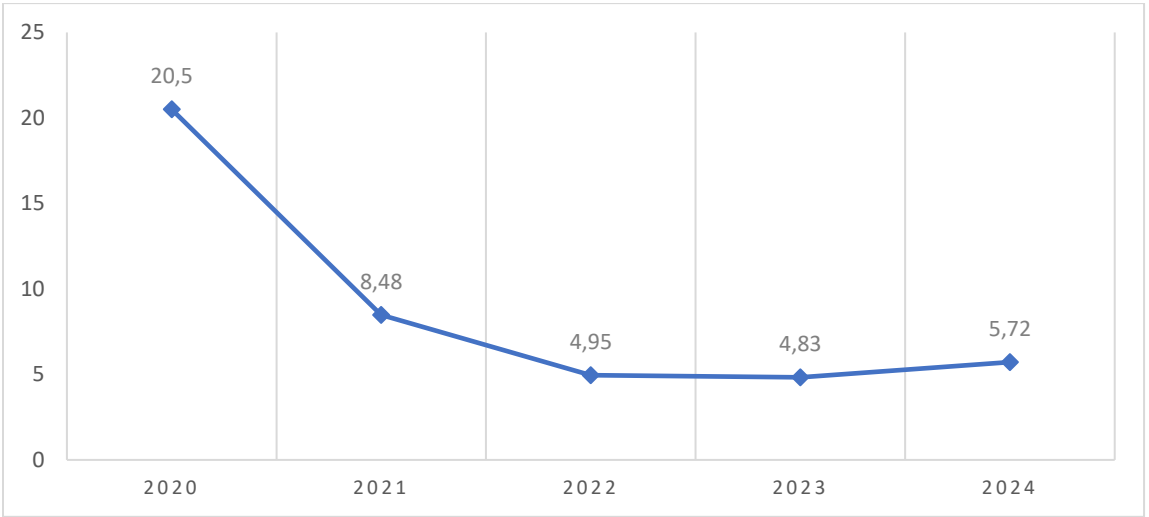
2.1.3.5. Integrasi Ekonomi, Domestik dan Global

Dalam Upaya mendorong daya saing Investasi di Kabupaten Sumedang saat ini sudah terbit Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif Kemudahan Investasi yang telah ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Sumedang Nomor 126 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif Kemudahan Investasi sehingga akan menjamin adanya kepastian hukum dan sebagai pedoman dalam Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi di Daerah.

Dengan adanya regulasi ini adalah untuk diharapkan akan meningkatkan investasi di daerah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kemampuan dan daya saing daerah, mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Hasil analisis mengenai nilai ICOR (*Incremental Capital Output Ratio*) Kabupaten Sumedang dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan beberapa tren yang signifikan, terutama dampak dari pandemi COVID-19. Nilai ICOR terendah dalam 13 tahun terakhir dicapai tahun 2019, sebelum terjadinya pandemi Covid-19. Angka ini menunjukkan efisiensi yang relatif baik dalam investasi untuk menghasilkan output ekonomi. ICOR yang lebih rendah menunjukkan bahwa investasi yang dilakukan pada tahun ini cukup efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Lonjakan besar dalam ICOR pada tahun 2020 mengindikasikan penurunan efisiensi investasi yang drastis. Hal ini disebabkan oleh gangguan ekonomi yang parah akibat pandemi COVID-19. Investasi yang dilakukan selama tahun 2020 tidak mampu menghasilkan pertumbuhan output yang signifikan karena pembatasan aktivitas ekonomi, gangguan rantai pasok, dan penurunan permintaan agregat.



Grafik 2.49 Perkembangan ICOR Kabupaten Sumedang Tahun 2015-2024
(Sumber: BPS Kabupaten Sumedang, 2024)

Seiring pemulihan pandemi Covid-19, penurunan ICOR menunjukkan bahwa efisiensi investasi terus membaik, mendekati tingkat pra-pandemi. Ini menandakan bahwa ekonomi Sumedang mulai stabil dan investasi mulai memberikan hasil yang lebih baik dalam hal pertumbuhan output. Nilai ICOR Kabupaten Sumedang pada tahun 2024 sebesar 5,72 mengalami kenaikan dibanding tahun 2023 dimana ICOR tahun 2023 sebesar 4,83. Hal ini mengindikasikan bahwa untuk meningkatkan 1 triliun rupiah pada PDRB maka diperlukan 5,72 triliun investasi. Hal ini menunjukkan perlunya upaya perbaikan lebih lanjut dalam efisiensi investasi. Terkait hal ini beberapa upaya yang perlu dilakukan untuk mendorong investasi antara lain:

1. Meningkatkan Efisiensi Investasi
Pemerintah daerah perlu terus mendorong investasi yang lebih efisien dengan fokus pada sektor-sektor produktif dan berpotensi tinggi untuk pertumbuhan.
2. Penguatan Infrastruktur
Investasi dalam infrastruktur dasar seperti transportasi, pengairan, dan digitalisasi dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi ekonomi secara keseluruhan.
3. Diversifikasi Ekonomi
Mendorong diversifikasi ekonomi dengan mengembangkan sektor-sektor baru yang potensial dapat mengurangi ketergantungan pada sektor-sektor tertentu yang mungkin lebih rentan terhadap guncangan eksternal.

4. Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja

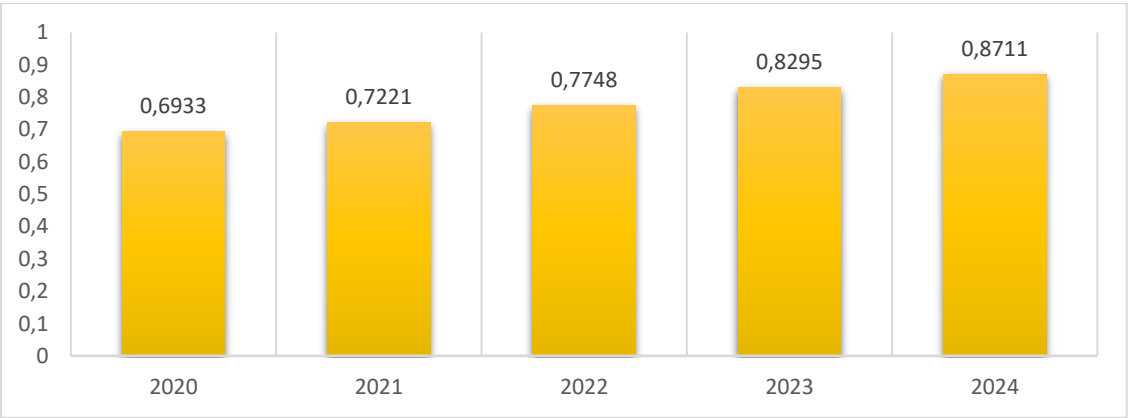
Menginvestasikan dalam pendidikan dan pelatihan vokasional untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja, sehingga dapat mendukung produktivitas yang lebih tinggi dan efisiensi investasi.

5. Melalui langkah-langkah tersebut, Kabupaten Sumedang dapat terus memperbaiki efisiensi investasi dan stabilitas ekonominya, serta membangun daya saing yang lebih kuat di masa mendatang.

6. Selain dukungan regulasi, kondusifitas wilayah juga sangat berperan dalam mendukung daya saing iklim investasi. Terkait hal tersebut, dalam rangka Penyelenggaraan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban terutama kerukunan umat beragama di Kabupaten Sumedang telah terbentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang berperan dalam menciptakan kehidupan keagamaan yang rukun, harmoni, damai, serta keseimbangan, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, bermasyarakat, bernegara maupun kehidupan beragama; dengan tujuan menguatkan Komitmen kebangsaan, memelihara toleransi, membangun tindakan anti kekerasan serta penerimaan terhadap tradisi.

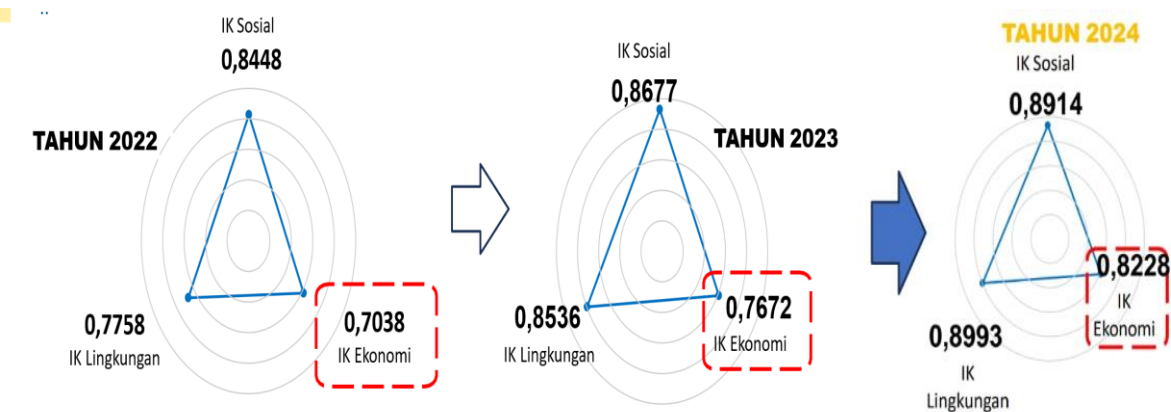
2.1.3.6. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Terkait dengan Pembangunan Desa, salah satu indikator keberhasilan yang saat ini digunakan adalah Indeks Desa Membangun (IDM) yang merupakan indeks komposit yang dibentuk berdasarkan 3 (tiga) indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi, dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. IDM memotret perkembangan kemandirian desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. IDM mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan kewenangannya serta partisipasi masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah desa.



Grafik 2.50 IDM Kabupaten Sumedang Tahun 2020-2024
(Sumber: DPMD Kabupaten Sumedang, 2025)

Pada 2020-2024 IDM Kabupaten Sumedang sudah mengalami kenaikan status menjadi maju dan pada tahun 2024 menjadi berstatus Mandiri dengan indeks sebesar 0,8711 meningkat dibanding tahun 2023 dari indeks sebesar 0,8295. Jika dilihat dari nilai IDM nya, Kabupaten Sumedang selalu mengalami kenaikan yang cukup signifikan.

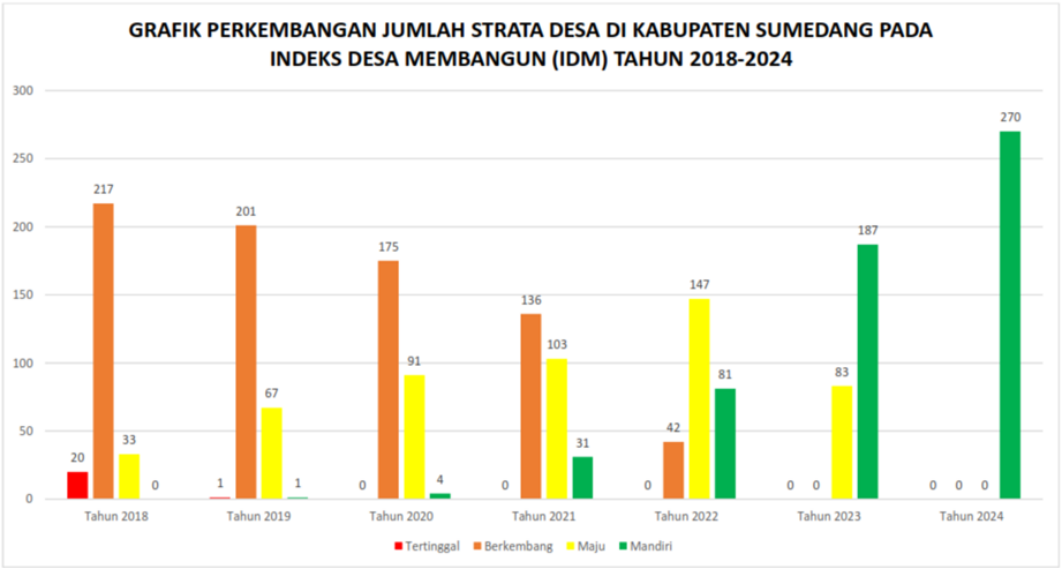


Gambar 2.39 Nilai Indeks komposit IDM Kabupaten Sumedang Tahun 2022-2024
(Sumber: DPMD Kabupaten Sumedang, 2025)

Dari ketiga indeks komposit IDM, pada tahun 2024 Kabupaten Sumedang memiliki nilai tertinggi pada Indeks Ketahanan Lingkungan sebesar 0,8993, nilai Indeks Ketahanan Sosial sebesar 0,8914, dan nilai terendah pada Indeks Ketahanan Ekonomi yaitu sebesar 0,8228. Hal ini menjadi rekomendasi bagi Pemerintah maupun stakeholders dalam membangun desa untuk dapat meningkatkan pada pengembangan aspek ekonomi.

Status Desa dibagi menjadi 4 (empat) kriteria yaitu Desa tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju dan Desa Mandiri. Status desa di Kabupaten Sumedang terus meningkat, tergambarkan dengan tren positif terkait status desa. Sejak Tahun 2020 sudah tidak ada status Desa tertinggal di

Kabupaten Sumedang didukung dengan adanya intervensi Pemerintah Daerah dalam mengembangkan berbagai faktor mulai dari peningkatan infrastruktur, pengembangan ekonomi, pengembangan pertanian dan peternakan, peningkatan layanan kesehatan, memperluas akses teknologi dan pusat informasi sampai peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan. Peningkatan status desa dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 2.51 Status Desa di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2024
(Sumber: DPMD Kabupaten Sumedang, 2025)

Berdasarkan grafik diatas dapat diketahui bahwa jumlah status desa berkembang dan desa maju terus mengalami penurunan yang diikuti dengan penambahan jumlah status desa mandiri. Tahun 2024 sudah tidak ada lagi desa berkembang di Kabupaten Sumedang. Pemerintah Daerah terus mengupayakan peningkatan status desa mandiri melalui : 1) peningkatan infrastruktur yang berkelanjutan meliputi pemeliharaan dan peningkatan jalan, memperluas jaringan air bersih, meningkatkan akses terhadap listrik; 2) peningkatan kualitas Pendidikan melalui pelatihan vokasi, program beasiswa dan meningkatkan fasilitas sekolah; 3) pengembangan ekonomi dan kewirausahaan dengan melakukan pengembangan berbagai sektor ekonomi baru, mendukung pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah, serta membantu pengusaha lokal, petani dan nelayan untuk mendapatkan akses pasar; 4) peningkatan layanan kesehatan dan penguatan tata kelola desa.

2.1.3.7. Stabilitas Ekonomi Makro

Stabilitas Ekonomi Makro adalah kondisi di mana perekonomian suatu negara berjalan secara seimbang dan berkelanjutan, tanpa gejolak

besar yang dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan iklim investasi. Stabilitas ekonomi makro daerah bukan hanya tugas pemerintah provinsi atau kabupaten. Ia adalah hasil kolaborasi antara Pemerintah daerah, Dunia usaha, Akademisi dan Masyarakat sipil

Dengan menjaga stabilitas ekonomi lokal, maka akan tercipta fondasi kuat untuk pertumbuhan inklusif, pemerataan kesejahteraan, dan ketahanan bangsa di tengah ketidakpastian global.

Pentingnya menjaga stabilitas ekonomi makro daerah:

- 1. Menjaga Daya Beli Masyarakat
Apabila harga-harga melonjak (terutama pangan dan energi), masyarakat paling bawah akan paling terdampak. Stabilitas harga berarti stabilitas sosial.
- 2. Menarik Investasi
Daerah yang stabil secara ekonomi akan lebih dipercaya oleh investor lokal maupun asing.
- 3. Menjamin Keberlanjutan Pembangunan
Tanpa ekonomi yang sehat, program pembangunan akan terhambat karena pendanaan dan daya dukung fiskal yang lemah.

Dalam konteks RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), stabilitas ekonomi makro menjadi landasan penting dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah agar pertumbuhan ekonomi dapat berjalan berkelanjutan, inklusif, dan adaptif terhadap dinamika nasional maupun global. Indikator Stabilitas Ekonomi Makro dalam RPJMD dapat dilihat pada Tabel 2.28 dibawah.

Tabel 2.28 Indikator Stabilitas Ekonomi Makro

Indikator	Sasaran dalam RPJMD
Pertumbuhan Ekonomi Daerah	≥ rata-rata nasional
Tingkat Inflasi Daerah	2-4% (mengikuti target nasional)
Tingkat Kemiskinan	Menurun setiap tahun
Pengangguran Terbuka	<5% (disesuaikan dengan baseline daerah)
Peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah)	Berkelanjutan & efisien

Sumber: Analisis BAPPPEDA Kabupaten Sumedang, 2025

2.1.4. Aspek Pelayanan Umum

2.1.4.1. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

Reformasi Birokrasi pada hakekatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap system penyelenggaraan pemerintahan yang berujung pada perbaikan kinerja birokrasi yang menjadi suatu kebutuhan untuk menjawab tuntutan masyarakat yang semakin tinggi. Arah perubahan tersebut lebih diorientasikan pada upaya peningkatan kualitas regulasi, peningkatan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sehingga pada akhirnya nanti diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah. Terkait dengan hal tersebut, pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Sumedang diperlukan suatu instrument kebijakan yang dapat menjadi tolok ukur dari keberlanjutan pelaksanaan birokrasi tersebut.

Reformasi Birokrasi merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang berujung pada perbaikan kinerja birokrasi.

Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang telah menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020-2024, di mana dirasakan terdapat kekurangan pada aspek manajemen SDM, kepemimpinan, kebijakan, penentuan perundang-undangan, SOP, sistem penganggaran berbasis kinerja, tingkat transparansi dan akuntabilitas birokrasi, penyusunan perencanaan kinerja, tugas pokok dan fungsi, serta kewenangan dalam struktur organisasi.

Untuk mengatasi permasalahan di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang mengagendakan Reformasi Birokrasi mencakup 9 (Sembilan) program, yaitu:

1. Program Manajemen Perubahan;
2. Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur;
3. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
4. Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
5. Program Penguatan Pengawasan;
6. Program Penataan dan Penguatan Organisasi;
7. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan;

8. Program Penataan Tata Laksana; dan
9. Program Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

Hasil yang diharapkan setelah pelaksanaan Reformasi Birokrasi antara lain:

1. Terwujudnya budaya pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme;
2. Meningkatnya integritas, profesionalisme dan citra aparatur sebagai pelayanan masyarakat;
3. Meningkatnya kualitas penyusunan dan penerapan regulasi daerah yang efektif, efisien, harmonis dan tidak tumpang tindih;
4. Terlaksananya perlindungan hukum bagi Aparatur Sipil Negara dan masyarakat miskin secara professional;
5. Terwujudnya organisasi kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran;
6. Penerapan system, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif dan efisien, serta berbasis e-government;
7. Dapat meningkatkan manajemen kinerja individu, menyempurnakan sistem informasi manajemen kepegawaian yang terintegrasi, dan meningkatkan profesionalisme pegawai;
8. Dapat meningkatkan kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, meningkatkan penerapan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, dan mempertahankan opini WTP dari BPK;
9. Penerapan SAKIP dan akuntabilitas aparatur semakin meningkat di semua Perangkat Daerah, menyempurnakan integrasi perencanaan, penganggaran dan manajemen kinerja, serta keterlibatan Kepala Perangkat Daerah mulai dari perencanaan, penilaian kinerja dan pelaporan kinerja semakin meningkat, sehingga dapat mempertahankan dan meningkatkan nilai SAKIP dari B menjadi A; dan
10. Dapat meningkatkan kualitas pelayanan public sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.

Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2024 berdasarkan publikasi Kementerian PANRB, menembus angka 89,65. Demikian juga capaian indikator lainnya di tahun 2024, seperti Indeks Profesionalitas ASN (IPA) berdasarkan informasi dari BKN, menembus 83,75, ini pun sama menjadi salah satu yang terbaik di

tingkat nasional. Terkait Indeks Pelayanan Publik, Kementerian PANRB memberikan apresiasi kepada Pemda Kabupaten Sumedang sebagai salah satu yang terbaik tingkat nasional dengan capaian sebesar 4,58. Untuk Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP dari BPKP, capaiannya cukup baik yakni ada pada level 3 (3,395). Adapun untuk Kepatuhan Pelayanan Publik yang disampaikan oleh Ombudsman, nilainya cukup baik sebesar 92,90. Sedangkan untuk hasil MCP yang dirilis KPK, nilainya menembus 91.

Indikator lainnya untuk melihat kinerja birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, dilihat dari capaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dipublikasikan Kementerian PANRB, dimana pada tahun 2024 mencapai 77,44, salah satu yang terbaik di tingkat Jawa Barat maupun Nasional. Terakhir, untuk Indeks Sistem Merit tahun 2023 sebagaimana disampaikan KASN mencapai 348, terbaik pertama tingkat nasional untuk kategori kabupaten.

Tabel 2.29 Capaian Indikator Reformasi Birokrasi Pemda Kabupaten Sumedang Tahun 2022-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	Keterangan
1	Nilai Reformasi Birokrasi (Poin)	66,74	68,75	71,82	81,98	89,65	A (Kementerian PANRB)
2	Nilai SAKIP (Poin)	71,53	75,26	76,15	77,16	77,44	Kategori BB (Kementerian PANRB)
3	Indeks Sistem Merit (Poin)	301,5	328,5	343,5	348	353	Sangat Baik (KASN)
4	Indeks Profesionalitas ASN (Poin)	63,74	63,74	63,9	83,2	83,75	Meningkat (BKN)
5	Indeks Pelayanan Publik (Poin)	Tidak ada penilaian	4,56	4,66	4,19	4,58	Meningkat dibanding Tahun 2023 (Kementerian PANRB)
6	Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Poin)	Tidak ada penilaian	76,57	79,57	92,35	92,9	A (Ombudsman)
7	Maturitas SPIP (Poin)	Tidak ada penilaian	Tidak ada penilaian	2,8	3,2	3,395	Kapabilitas APIP Level 3 (BPKP)
8	Nilai MCP KPK (Poin)	77,41	87,76	95,45	91,5	91	Indikator penilaian tiap tahun berbeda

Sumber: BAPPPEDA Kabupaten Sumedang (2025)

Berdasarkan berbagai indikator tersebut di atas, tampak bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang telah menunjukkan kinerja yang

sangat baik di tingkat Jawa Barat maupun tingkat Nasional. Sebuah capaian luar biasa, yang dapat diraih dalam tempo 4 (empat) tahun. Sebelumnya pada tahun 2018, kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang termasuk salah satu yang terbawah di Jawa Barat. Salah satu contohnya, capaian SAKIP Kabupaten Sumedang 48,58 atau peringkat ke 27 dari 27 Kabupaten/Kota se Jawa Barat.

Salah satu indikator yang dapat mengukur Tingkat kualitas pelayanan publik di suatu Kabupaten/Kota adalah Indeks Pelayanan Publik yang pengukurannya dilakukan oleh Kementerian PAN RB. Nilai Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Sumedang berdasarkan data yang dirilis Kementerian PANRB untuk Tahun 2023 adalah 4,58. Nilai ini sedikit meningkat dibanding tahun 2023 yang mencapai 4,19 poin.

Selain Indeks Pelayanan Publik, hasil penilaian Lembaga Ombudsman selama 2 (dua) tahun terakhir menunjukkan kualitas pelayanan public yang semakin baik dilihat dari sisi kepatuhan dalam menerapkan standar pelayanan. Nilai Tahun 2023 hasil penilaian Ombudsman adalah 92,35 dengan kategori A (opini Kualitas Tinggi). Untuk tahun 2024 nilai kepatuhan semakin baik pada angka 92,90 dengan kategori A (opini Kualitas Tertinggi).

Tabel 2.30 Hasil Penilaian Kepatuhan atas Penerapan Standar Pelayanan Publik

HASIL PENILAIAN OMBUDSMAN					
2022			2023		
NILAI	KATEGORI	OPINI	NILAI	KATEGORI	OPINI
79,57	B	KUALITAS TINGGI	92,35	A	KUAIITAS TERTINGGI

N0	UNIT LAYANAN	NILAI 2022	NILAI 2023	KATEGORI	OPINI
1.	Dinas Sosial	87,44	91,68	A	Kualitas Tertinggi
2.	Dinas Penanaman Modal,Pelayanan terpadu Satu Pintu	85,38	93,39	A	Kualitas Tertinggi
3.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	79,83	92,61	A	Kualitas Tertinggi
4.	Dinas Pendidikan	79,29	87,52	B	Kualitas Tinggi
5.	UPTD Puskesmas Ranap Situ	80,97	94,64	A	Kualitas Tertinggi
6.	UPTD Puskesmas Ranap Sumedang Selatan	64,53	94,24	A	Kualitas Tertinggi
	Rata-Rata	79,57	92,35	A	Kualitas Tertinggi

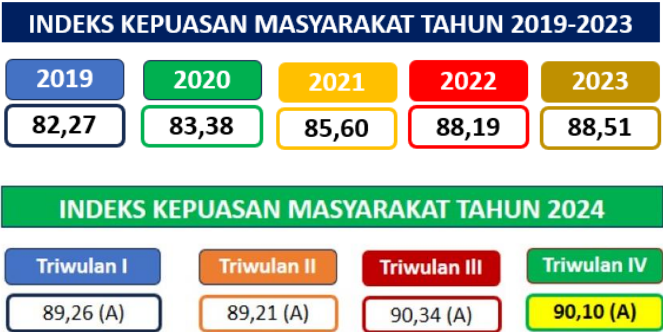
UPDATE HASIL PENILAIAN OMBUDSMAN 2024

No.	Unit Layanan	Dimensi Penilaian				Nilai
		Input (21.85)	Proses (32.37)	Output (24.24)	Pengaduan (21.54)	
1	Puskesmas Cimalaka	21.15	32.37	23,02	19.42	95.95
2	Puskesmas Sukamantri	20.53	32.37	23,07	19.42	95.38
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	19.97	32.37	22,32	19.95	94.60
4	Dinas Pendidikan	18.49	30.00	22,95	19.95	91.38
5	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	19.85	30.33	23,27	17.36	90.81
6	Dinas Sosial	17.12	29.48	23,27	19.42	89.29
Nilai Akhir dan Zona		92,90				
Kategori		A				
Opini		KUALITAS TERTINGGI				

Sumber: Ombudsman, 2024 (diolah)

Hasil Survey Kepuasan Masyarakat juga menunjukkan kinerja pelayanan publik di Kabupaten Sumedang semakin baik berdasarkan hasil penilaian dari pengguna layanan.

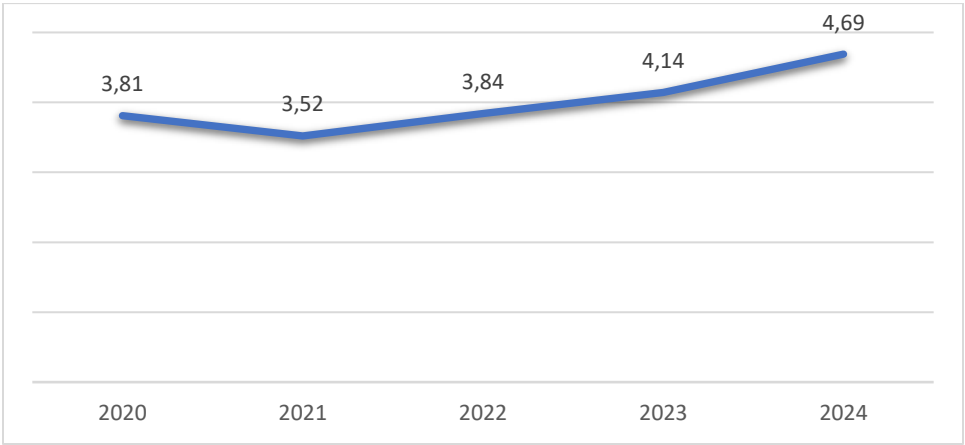
Tabel 2.31 Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Sumedang



Sumber: Bagian Organisasi Setda Kabupaten Sumedang, 2025

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE dengan harapan menghasilkan pelayanan yang berkualitas dan optimal.

Berikut merupakan capaian nilai SPBE Kabupaten Sumedang Tahun 2020-2024.



Grafik 2.52 Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2020-2024

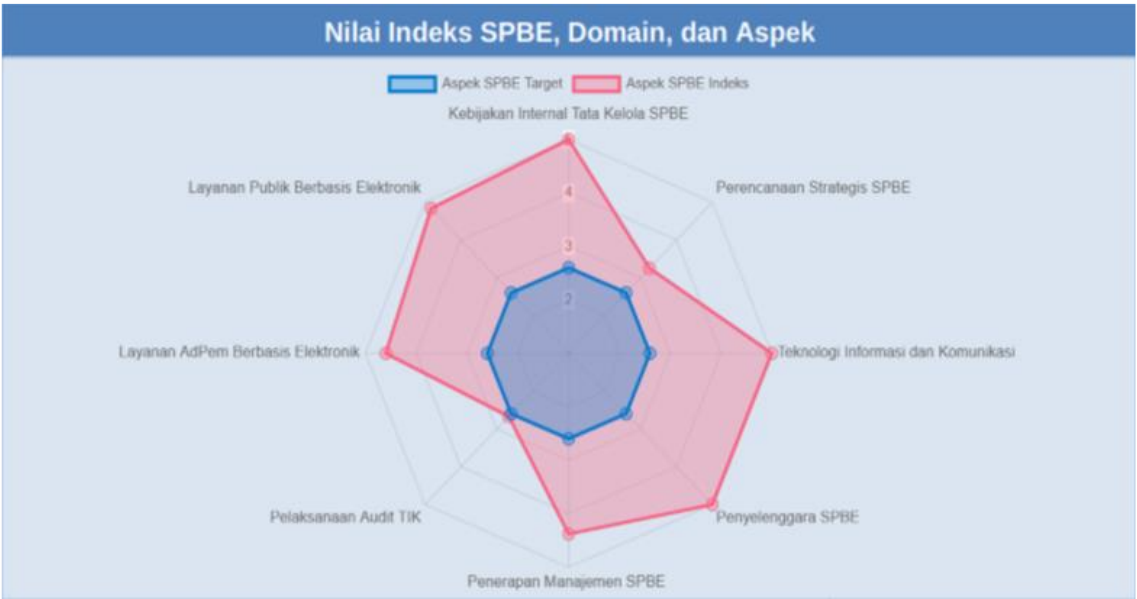
(Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik, 2025)

Nilai SPBE diperoleh dari akumulasi nilai masing-masing Domain penyangga SPBE. Pada Laporan Hasil Evaluasi SPBE Kabupaten Sumedang yang dihasilkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, diperoleh nilai per Domain dan Sub Domain sebagai berikut:

Tabel 2.32 Nilai Domain dan Sub Domain SPBE Kabupaten Sumedang Tahun 2024

Nama Indeks	Nilai
Domain Kebijakan SPBE	5,00
Kebijakan internal Tata Kelola SPBE	5,00
Domain Tata Kelola SPBE	4,30
Perencanaan Strategis SPBE	3,25
Teknologi Informasi dan Komunikasi	5,00
Penyelenggara SPBE	5,00
Domain Manajemen SPBE	3,91
Penerapan Manajemen SPBE	4,38
Audit TIK	2,67
Domain Layanan SPBE	4,69
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	4,60
Layanan Publik Berbasis Elektronik	4,83

Sumber: Kementerian PAN-RB, 2025



Gambar 2.40 Nilai Indeks SPBE, Domain dan Aspek
(Sumber: Kementerian PAN-RB, 2025)

Perolehan nilai tersebut berkat daya dukung berupa:

1. Telah terbitnya Peraturan Bupati Nomor 104 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang telah secara lengkap memuat berbagai komponen SPBE, Peraturan tersebut telah direview dan ditindak lanjuti;
2. Adanya dokumen lengkap peta Proses Bisnis pada aspek perencanaan strategis;
3. Adanya standar pengembangan aplikasi dan pemanfaatan sistem penghubung layanan pada aspek teknologi dan komunikasi;
4. Adanya kolaborasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dengan pemangku kepentingan baik pihak swasta maupun masyarakat dalam penyelenggaraan SPBE;
5. Terpenuhinya pelaksanaan audit dengan perangkat standar nasional;
6. Pemanfaatan aplikasi-aplikasi umum Pusat secara optimal. Pemanfaatan tersebut telah direview dan ditindaklanjuti; dan
7. Tercapainya proses tahapan integrasi pada aspek layanan publik serta melakukan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan Kabupaten.

Untuk pencapaian yang lebih baik, perlu dilakukan proses evaluasi pada berbagai aspek tidak hanya dilakukan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik saja, tetapi juga dilakukan oleh Perangkat Daerah lain terkait aspek SPBE. Dokumen Arsitektur SPBE perlu diperbarui sesuai dengan format terbaru. Konten Arsitektur SPBE dan Peta

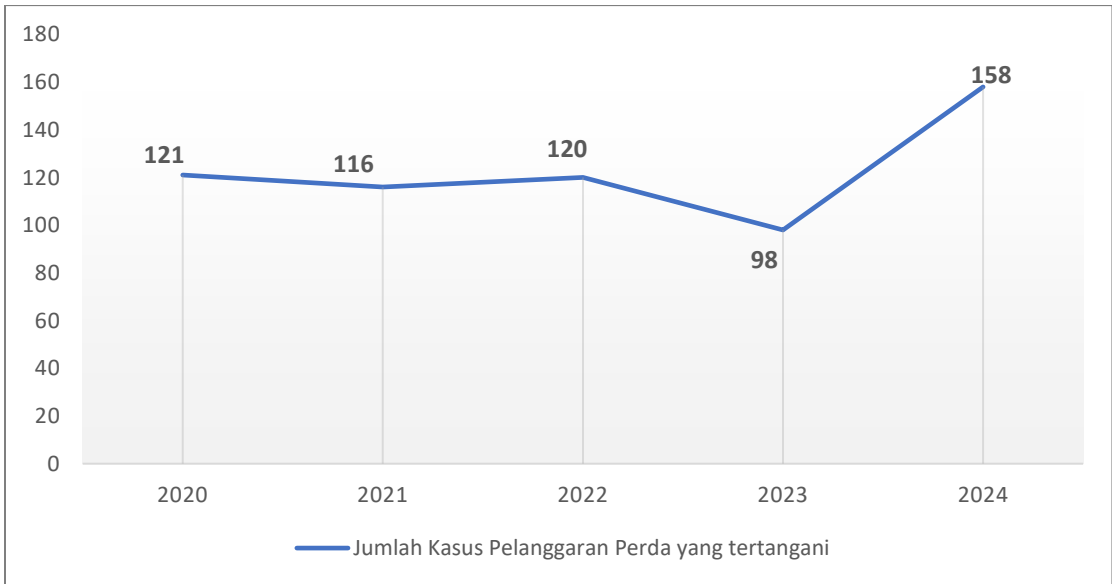
Rencana harus diselaraskan dengan dokumen Renja Perangkat Daerah. Perlunya standar proses pengembangan aplikasi yang mengikuti kebutuhan namun tetap memenuhi dokumentasi SDLC. Diperlukan pemberdayaan pada Perangkat Daerah yang mempunyai peran masing-masing indikator SPBE sesuai tugas dan fungsi pokok serta diperlukan kerja Tim Koordinasi SPBE. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi perlu melibatkan Inspektorat sebagai PIC utama dan Manajemen SPBE perlu dilaksanakan pada semua aktivitas oleh semua Perangkat Daerah.

2.1.4.2. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

Penegakan Perda merupakan wujud awal dari terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat. Jenis pelanggaran Perda yang banyak terjadi di Kabupaten Sumedang meliputi: 1) Pelanggaran Perda/Perkada terkait dengan Pembangunan bangunan dan Gedung yang belum memiliki izin; 2) Pengendalian dan pengawasan monitoring pajak; 3) Pelanggaran Perda/Perkada terkait peredaran minuman beralkohol dan WTS; 4) Pelanggaran Perda/Perkada terkait dengan jenis usaha dan/atau kegiatan yang harus dilengkapi SPPL (pertambangan, disposal, dll); dan 5) pelanggaran Perda/Perkada terkait adanya keramba jarring apung di Kawasan Waduk Jatigede.

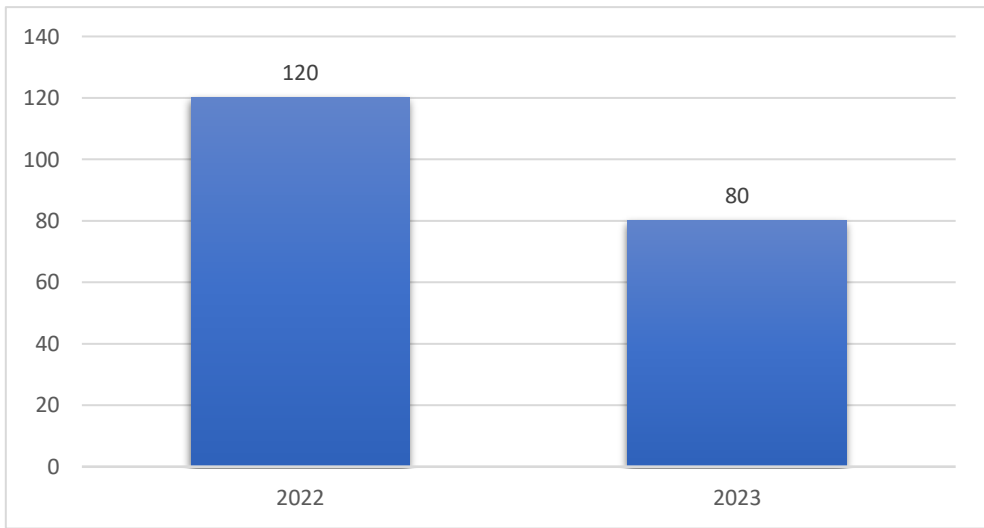
Dalam pelaksanaannya diperlukan suatu kemampuan untuk menangani berbagai pelanggaran yang menyangkut ketertiban. Jumlah kasus pelanggaran Perda yang tertangani menunjukkan tren fluktuatif setiap tahunnya terutama sejak tahun 2021 sebanyak 116 kasus yang tertangani lalu Tahun 2022 naik menjadi 120 kasus yang tertangani. Pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 98 kasus tertangani dan pada tahun 2024 meningkat mencapai 158 kasus tertangani dan merupakan penanganan kasus terbanyak selama 5 (lima) tahun terakhir. Sosialisasi Perda yang kurang efektif mengakibatkan dangkalnya pemahaman masyarakat akan suatu Perda, yang pada akhirnya berpotensi besar terhadap timbulnya masalah yang bisa membahayakan kepentingan masyarakat.

Pananganan gangguan akibat anak jalanan, penanganan peredaran minuman beralkohol dan penertiban reklame, baligo dan iklan komersil tetap menjadi jenis pelanggaran yang paling banyak ditangani pada Tahun 2024. Berikut adalah tren Jumlah pelanggaran Perda yang tertangani.



Grafik 2.53 Jumlah Kasus Pelanggaran Perda yang Tertangani di Kabupaten Sumedang Tahun 2020-2024
(Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang, 2025)

Selain itu maraknya kasus pelanggaran peredaran rokok ilegal pun menjadi salah satu permasalahan di Kabupaten Sumedang. Adanya kasus peredaran rokok ilegal karena dipicu oleh harga rokok yang terus naik. Meskipun demikian propaganda Pemerintah “Gempur Peredaran Rokok Ilegal” berdampak pada jumlah kasus yang terjadi di Tahun 2023 yang turun menjadi 80 kasus dari 120 kasus di tahun sebelumnya. Satpol PP Kabupaten Sumedang berkoordinasi dengan Bea Cukai terus melakukan pemberantasan peredaran rokok ilegal terutama di wilayah-wilayah perbatasan seperti Kecamatan Wado, Jatinunggal, Ujungjaya dan Cimanggung. Berikut adalah data kasus Peredaran Rokok Ilegal di Kabupaten Sumedang.



Grafik 2.54 Jumlah Kasus Peredaran Rokok Ilegal Kabupaten Sumedang Tahun 2022-2023
(Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang, 2024)

2.1.4.3. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Bardaya Gentar Kawasan

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengukur Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) sebagai upaya penyediaan data dasar tahunan bagi daerah. IDSD sendiri merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah.

Daya saing daerah memiliki beberapa aspek yang terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah dan infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

Berdasarkan pengukuran Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Tahun 2024 yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), bahwa Kabupaten Sumedang masuk pada kategori Daya Saing Tinggi dengan nilai 3,92. Nilai tersebut meningkat dari tahun 2023 sebesar 3,48 dari hasil pengukuran terhadap 4 komponen dan 12 pilar yang dapat dijelaskan pada table berikut. Dengan skor 3.92, Kabupaten Sumedang mencetak sejarah baru dalam pemeringkatan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Tahun 2024 dengan berhasil menduduki peringkat ke-6 nasional sebagai salah satu kabupaten paling maju di Indonesia, melampaui berbagai daerah lain yang selama ini dikenal lebih unggul secara ekonomi.

Prestasi ini menempatkan Sumedang dalam posisi strategis, sejajar dengan kabupaten progresif seperti Banyumas dan Semarang, serta lebih unggul dari daerah-daerah seperti Klaten, Sidoarjo, hingga Jombang. Lonjakan daya saing Sumedang didorong oleh peningkatan pesat dalam beberapa pilar kunci seperti Dinamisme Bisnis, Pasar Produk, Stabilitas Ekonomi Makro, dan Infrastruktur.

Kemajuan ini mencerminkan semakin kuatnya fondasi ekonomi Sumedang dalam menghadapi tantangan pembangunan serta keberhasilan pemerintah daerah dalam mendorong reformasi struktural, iklim usaha yang sehat, dan efisiensi pelayanan publik.

Posisi ini juga menempatkan Kabupaten Sumedang ada di Peringkat ke-1 diantara Kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Barat dan peringkat ke-8 dibawah 7 (tujuh) kota yang ada di Jawa Barat.



Grafik 2.55 Perbandingan Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2024
(Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), 2025)

Dari 12 pilar utama yang dianalisis, kekuatan utama Kabupaten Sumedang terletak pada pilar dinamisasi bisnis, Adopsi TIK, Institusi, Ukuran Pasar, Pasar Produk serta Kesehatan.

Namun, di balik kekuatan tersebut, Sumedang juga menghadapi tantangan besar yang dapat menghambat peningkatan daya saing secara menyeluruh. Pilar infrastruktur dan pasar tenaga kerja msih perlu terus didorong. Di samping itu, sektor keuangan juga menunjukkan kondisi masih lemah dengan skor 2,20, terutama karena terbatasnya akses pembiayaan untuk UMKM. Tantangan lainnya hadir dari sektor ketenagakerjaan, yang mencatat skor rendah dalam hal tingkat pengangguran terbuka dan kesulitan menemukan tenaga kerja terampil.

Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, beberapa rekomendasi strategis telah disusun. Peningkatan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan distribusi air bersih menjadi prioritas utama. Di sisi ekonomi, pemerintah daerah disarankan untuk memperluas akses kredit bagi UMKM melalui kerja sama dengan lembaga keuangan dan fintech, serta menyederhanakan birokrasi perizinan usaha. Selain itu, reformasi di

sektor ketenagakerjaan juga perlu dilakukan melalui pelatihan vokasi berbasis industri, kemitraan dengan dunia usaha, dan program sertifikasi tenaga kerja. Optimalisasi pemanfaatan teknologi digital di sektor publik dan ekonomi, serta pembangunan ekosistem inovasi melalui kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan pelaku bisnis juga menjadi bagian penting dari strategi penguatan daya saing jangka panjang.

Secara keseluruhan, Sumedang memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Barat, terutama melalui kekuatan digitalisasi dan tata kelola pemerintahan yang unggul. Namun, potensi ini hanya dapat diwujudkan jika pemerintah daerah mampu mengatasi hambatan utama yang ada, terutama pada aspek infrastruktur, keuangan, dan ketenagakerjaan, serta mendorong kolaborasi yang lebih kuat antara sektor publik dan swasta.

Tabel 2.33 Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Tahun 2022-2024

No	Komponen	Pilar	2022	2023	2024
1	Komponen Lingkungan Pendukung	Pilar 1: Institusi	4,45	4,58	4,62
		Pilar 2: Infrastruktur	2,11	2,37	3,58
		Pilar 3: Adopsi TIK	3,39	4,58	4,63
		Pilar 4: Stabilitas Ekonomi Makro	2,66	2,77	3,62
2	Komponen SDM	Pilar 5: Kesehatan	4,08	4,07	4,02
		Pilar 6: Keterampilan	3,00	3,24	3,67
3	Komponen Pasar	Pilar 7: Pasar Produk	3,35	3,35	4,41
		Pilar 8: Pasar Tenaga Kerja	2,57	2,72	2,86
		Pilar 9: Sistem Keuangan	3,34	2,60	2,20
		Pilar 10: Ukuran Pasar	1,60	4,52	4,54
4	Komponen Ekosistem Inovasi	Pilar 11: Dinamisme Bisnis	5,00	3,20	5,00
		Pilar 12: Kapabilitas Inovasi	3,84	3,79	3,92
Nilai IDSD			3,28	3,48	3,92

Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), 2025

2.1.4.4. Kinerja setiap urusan pemerintahan daerah

1. Urusan Pendidikan

Tabel 2.34 IKK Urusan Pendidikan Kabupaten Sumedang Tahun 2020 – 2024

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	99,10	98,99	92,0395	93,15	94,01

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
2.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	99,33	98,15	97,462	97,67	97,01
3.	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	98,04	99,04	90,269	91,76	94,34
4.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	92,47	47,90	53,468	82,71	97,92

Sumber: LPPD Kabupaten Sumedang 2020 – 2024

2. Urusan Kesehatan

Tabel 2.35 IKK Urusan Kesehatan Kabupaten Sumedang Tahun 2020 – 2024

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	%	0,05	0,05	0,06	0,80	1,04
2.	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	%	66,67	100	100	100	80
3.	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	98,12	100	100	100	93,84
4.	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100	100	100	100	99,96
5.	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100	100	100	100	97,64
6.	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	88,10	100	100	100	95,71
7.	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	98,83	96,59	71,57	92,76	88,53
8.	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	95,70	96,32	97,02	97,23	54,12
9.	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas	%	52,62	77,88	84,28	100	100

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
	mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar						
10.	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	91,40	98,69	98,90	98,55	84,62
11.	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	96,14	97,40	98,45	98,26	100
12.	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	94,55	80,52	98,20	97,61	100
13.	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	42,06	100	100	100	100
14.	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	63,24	66,92	100	100	100

Sumber: LPPD Kabupaten Sumedang 2020 – 2024

➤ **Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Tabel 2.36 IKK Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang Tahun 2020 – 2024

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/ Kota	%	0	0	85,64	61,17	79,05
2.	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	%	0	0	1	0	1
3.	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/ kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	64,46	67,20	68,62	70,20	71,39
4.	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum	%	81,31	78,65	75,93	76,15	76,48

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
	melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota						
5.	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	4,99	68,07	67,98	68,23	68,52
6.	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	%	0	100	100	100	100
7.	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	%	76,96	83,21	86,54	88,24	87,53
8.	Rasio tenaga operator/ teknisi analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	52,08	61,11	71,75	86,34	48,34
9.	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	0	100	100	100	100

Sumber: LPPD Kabupaten Sumedang 2020 – 2024

➤ **Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

Tabel 2.37 IKK Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Sumedang Tahun 2020 – 2024

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	%	0	17,04	100	100	100
2.	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/ kota	%	0	0	100	94,81	0
3.	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	%	0	1,75	2,737	3,87	3,63
4.	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	0,28	1,77	1,66	2,57	2,69

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
5.	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	N/A	4,06	4.84	7,15	7,58

Sumber: LPPD Kabupaten Sumedang 2020 – 2024

➤ **Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

Tabel 2.38 IKK Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sumedang Tahun 2020 – 2024

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	100	100
2.	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	100	100	100	100
3.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Orang/%	1.158.444	691534	100	100	100
4.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang/%	1.158.444	2669	100	100	89,53
5.	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang/ kejadian	93	282100	100	100	100
6.	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	80.64	84,16	73,864	89,83	71,34
7.	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	menit	86.01	69,53	6,42	9,21	7,05

Sumber: LPPD Kabupaten Sumedang 2020 – 2024

➤ **Urusan Sosial**

Tabel 2.39 IKK Urusan Sosial Kabupaten Sumedang Tahun 2020 – 2024

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	%	10,74	65,68	100	100	100
2.	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100	42,54	100	100	100

Sumber: LPPD Kabupaten Sumedang 2020 – 2024

➤ **Urusan Tenaga Kerja**

Tabel 2.40 IKK Urusan Tenaga Kerja Kabupaten Sumedang Tahun 2020 – 2024

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	100	97,14	100	100	81,25
2.	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	5,19	6,81	8,62	9,37	10,76
3.	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp	1,354	53108563.017	38,60	43,54	35,33
4.	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/ PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	100	100	17,71	65,83	4,56
5.	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar	%	44,48	41,99	39,74	43,49	47,79

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi						

Sumber: LPPD Kabupaten Sumedang 2020 – 2024

➤ **Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Tabel 2.41 IKK Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang Tahun 2020 – 2024

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	2,93	39,78	0,211	45,65	41,34
2.	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	%	0	0,004	0,0027	100	100
3.	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	%	0	2,77	3,42	13,20	8,56

Sumber: LPPD Kabupaten Sumedang 2020 – 2024

➤ **Urusan Pangan**

Tabel 2.42 IKK Urusan Pangan Kabupaten Sumedang Tahun 2020 – 2024

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	%	0.73	295,304	295,57	11,72	63,86

Sumber: LPPD Kabupaten Sumedang 2020 – 2024

➤ **Urusan Pertanian**

Tabel 2.43 IKK Urusan Pertanian Kabupaten Sumedang Tahun 2020 – 2024

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin	%	100	100	100	100	100

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
	lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan						
2.	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	%	N/A	33,34	87,5	100	75
3.	Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	%	49,12	61,51	100	100	100
4.	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	%	N/A	100	100	100	1,5
5.	Tersedianya tanah untuk masyarakat	%	N/A	100	100	100	100
6.	Penanganan sengketa tanah Garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	N/A	100	100	100	100

Sumber: LPPD Kabupaten Sumedang 2020 – 2024

➤ **Urusan Lingkungan Hidup**

Tabel 2.44 IKK Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumedang Tahun 2020 – 2024

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/ Kota	Poin	68.18	62,26	63,35	65,02	62,47
2.	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota	%	67.60	76,90	85,284	81,73	34,70
3.	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab.	%	18.18	4,35	48,571	51,85	60

Sumber: LPPD Kabupaten Sumedang 2020 – 2024

➤ **Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Tabel 2.45 IKK Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Sumedang Tahun 2020 – 2024

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Perekaman KTP Elektronik	%	97,62	97,84	97,29	99,56	99,45
2.	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	3,81	38,23	33,44	51,16	60,69
3.	Kepemilikan akta kelahiran	%	91,31	97,67	96,99	97,20	96,10
4.	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	%	7,94	41,82	92,72	98,18	100

Sumber: LPPD Kabupaten Sumedang 2020 – 2024

➤ **Urusan Pemerintahan Masyarakat Desa**

Tabel 2.46 IKK Urusan Pemerintahan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Sumedang Tahun 2020 – 2024

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase pengentasan desa tertinggal	%	100	0	0	0	100
2.	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	100	100	31,61	193,02	100

Sumber: LPPD Kabupaten Sumedang 2020 – 2024

➤ **Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Tabel 2.47 IKK Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Sumedang Tahun 2020 – 2024

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	TFR (Angka Kelahiran Total)	Poin	2,12	2,1	2,08	2,05	2,027
2.	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (modern contraceptive prevalence Rate/mCPR)	%	82,24	81,18	79,94	80,62	81,98

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
3.	Persentase kebutuhan ber- KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	1 peserta	8,48	9,57	8,06	8,69

Sumber: LPPD Kabupaten Sumedang 2020 – 2024

➤ **Urusan Perhubungan**

Tabel 2.48 IKK Urusan Perhubungan Kabupaten Sumedang Tahun 2020 – 2024

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Rasio konektivitas kabupaten	%	0,49	0,42	72	0,77	0,49
2.	V/C Ratio di jalan kab/kota	%	0,78	0,54	0,20	0,31	0,26

Sumber: LPPD Kabupaten Sumedang 2020 – 2024

➤ **Urusan Komunikasi dan Informatika**

Tabel 2.49 IKK Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumedang Tahun 2020 – 2024

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang terhubung dengan aksess internet yang disediakan oleh dinas KOMINFO	%	100	100	100	100	100
2.	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	N/A	100	100	85,07	100
3.	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	N/A	90,21	74,29	100	97,4

Sumber: LPPD Kabupaten Sumedang 2020 – 2024

➤ **Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

Tabel 2.50 IKK Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 – 2024

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	%	34,78	34,78	38,794	18,36	43,31
2.	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	%	2,56	5,80	8,867	5,52	8,69

Sumber: LPPD Kabupaten Sumedang 2020 – 2024

➤ **Urusan Penanaman Modal**

Tabel 2.51 IKK Urusan Penanaman Modal Kabupaten Sumedang Tahun 2020 – 2024

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten /Kota	%	-3,99	260,003	-128,796	9,07	15,43

Sumber: LPPD Kabupaten Sumedang 2020 – 2024

➤ **Urusan Kepemudaan dan Olahraga**

Tabel 2.52 IKK Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang Tahun 2020 – 2024

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	10,28	10,30	10,03	9,19	9,35
2.	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	1,79	34.40	21,07	21,06	25,34
3.	Peningkatan Prestasi Olahraga	%	0	20	92	5	38

Sumber: LPPD Kabupaten Sumedang 2020 – 2024

➤ **Urusan Statistik**

Tabel 2.53 IKK Urusan Statistik Kabupaten Sumedang Tahun 2020 – 2024

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100
2.	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100

Sumber: LPPD Kabupaten Sumedang 2020 – 2024

➤ **Urusan Persandian**

Tabel 2.54 IKK Urusan Persandian Kabupaten Sumedang Tahun 2020 – 2024

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	100	9303,448	20,03	82,94	85,11

Sumber: LPPD Kabupaten Sumedang 2020 – 2024

➤ **Urusan Kebudayaan**

Tabel 2.55 IKK Urusan Kebudayaan Kabupaten Sumedang Tahun 2020 – 2024

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Terlestarikannya cagar budaya	%	80,95	100	100	100	100

Sumber: LPPD Kabupaten Sumedang 2020 – 2024

➤ **Urusan Perpustakaan**

Tabel 2.56 IKK Urusan Perpustakaan Kabupaten Sumedang Tahun 2020 – 2024

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	0,01	65,32	48,71	67,27	72,27
2.	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Indeks	0,01	9,85	12,16	14,42	64,97

Sumber: LPPD Kabupaten Sumedang 2020 – 2024

➤ **Urusan Kearsipan**

Tabel 2.57 IKK Urusan Kearsipan Kabupaten Sumedang
Tahun 2020 – 2024

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	%	2.089,50	100	78,98	76,37	76,4
2.	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	1	0	1	66,67	50

Sumber: LPPD Kabupaten Sumedang 2020 – 2024

➤ **Urusan Kelautan dan Perikanan**

Tabel 2.58 IKK Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumedang
Tahun 2020 – 2024

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kab/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)	Ton	9,269,264	17,884,331	100,148	101,3	101,7

Sumber: LPPD Kabupaten Sumedang 2020 – 2024

➤ **Urusan Pariwisata**

Tabel 2.59 IKK Urusan Pariwisata Kabupaten Sumedang
Tahun 2020 – 2024

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase prtumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	-6,17	-100	11410	5,37	13,95
2.	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan nusantara per kebangsaan	%	8,28	-26,19	97,92	40,61	0,42
3.	Tingkat Hunian Akomodasi	%	10,68	12,61	15,47	22,53	8,49
4.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	0	2.272.171.200	4,682	5,054	5,48
5.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	1.612.598.013.900	16.233.385.133	5,220	6,44	5,96

Sumber: LPPD Kabupaten Sumedang 2020 – 2024

➤ **Urusan Pertanian**

Tabel 2.60 IKK Urusan Pertanian Kabupaten Sumedang
Tahun 2020 – 2024

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Ton/Ha	5,699	0,049	694,195	6,74	687,9
2.	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	%	100	-100	0	-62,85	-17,8

Sumber: LPPD Kabupaten Sumedang 2020 – 2024

➤ **Urusan Kehutanan**

Tabel 2.61 IKK Urusan Kehutanan Kabupaten Sumedang
Tahun 2020 – 2024

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga		-	1 Dok. Rencana Pengelolaan Tahura	1	1	1

Sumber: LPPD Kabupaten Sumedang 2020 – 2024

➤ **Urusan Perdagangan**

Tabel 2.62 IKK Urusan Perdagangan Kabupaten Sumedang
Tahun 2020 – 2024

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/ IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	100	9,304	9,304	23,41	22,43
2.	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	66,88	40,081	32,887	202,35	100
3.	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	4,66	4,947	5,315	6,66	6,87

Sumber: LPPD Kabupaten Sumedang 2020 – 2024

➤ **Urusan Perindustrian**

Tabel 2.63 IKK Urusan Perindustrian Kabupaten Sumedang
Tahun 2020 – 2024

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten / Kota	%	12,05	3,027	-29,63	-74	-28
2.	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	%	0	0	1	100	100
3.	Persentase jumlah hasil pemantauan dan	%	100	100	100	100	100

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
	pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait						
4.	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100	0	100	1 Dok. Suket	0
5.	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten	%	100	100	100	1 Dok. Suket	0
6.	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	%	Ada	0	75	75	70,59

Sumber: LPPD Kabupaten Sumedang 2020 – 2024

➤ **Urusan Transmigrasi**

Tabel 2.64 IKK Urusan Transmigrasi Kabupaten Sumedang Tahun 2020 – 2024

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	kawasan	-	2	1	1 Dok. Suket	1
2.	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	pemukiman	-	0	1	1 Dok. Suket	nihil
3.	Jumlah satuan pemukiman yang dibina	pemukiman	-	-	-	120 KK	1

Sumber: LPPD Kabupaten Sumedang 2020 – 2024

2.1.5. Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib

yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Berkenaan hal tersebut, pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah mengamanatkan agar Pemerintah Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) terdiri dari 6 (enam) urusan yaitu (1) Urusan Pendidikan, (2) Urusan Kesehatan, (3) Urusan Pekerjaan Umum, (4) Urusan Perumahan Rakyat, (5) Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dan (6) Urusan Sosial. Sedangkan muatan SPM mencakup jenis pelayanan dasar, mutu pelayanan dasar dan penerima pelayanan dasar. Setiap jenis pelayanan dasar harus memiliki mutu pelayanan dasar.

2.1.5.1. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan

Jenis SPM urusan Pendidikan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Pendidikan terdiri atas:

1) Pendidikan Anak Usia Dini

Sasaran dari jenis pelayanan dasar untuk Pendidikan PAUD adalah bagi anak usia dini 1 (satu) tahun pra SD/MI/ sederajat, yang artinya setiap anak usia 5–6 tahun wajib mendapatkan layanan PAUD minimal selama 1 tahun sebelum masuk Sekolah Dasar, sehingga ditargetkan anak usia 5-6 tahun harus terlayani PAUD yang diukur dari capaian jumlah anak usia 5-6 tahun yang terdaftar di Lembaga PAUD formal maupun non formal (TK, KB, SPS dan TPA).

2) Pendidikan Dasar

Pendidikan dasar terbagi ke dalam 2 (dua) sasaran pelayanan yaitu 1) layanan pendidikan dasar SD/MI/ sederajat yang diperuntukan bagi anak usia 7-12 tahun; 2) layanan pendidikan dasar tingkat lanjutan SMP/MTs/ sederajat yang diperuntukan bagi anak usia 13-15 tahun, yang artinya anak di rentang usia 7-15 tahun wajib mendapatkan layanan Pendidikan dasar.

3) Pendidikan Kesetaraan

Pendidikan kesetaraan diperuntukan bagi warga negara dengan usia 16-21 tahun atau lebih yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan

menengah melalui jalur formal, serta tidak berkesempatan mengikuti pendidikan reguler karena berbagai kendala seperti sosial, ekonomi, geografis, dan lain-lain. Layanan Pendidikan yang disediakan melalui Pendidikan kesetaraan meliputi : 1) Program Paket A (setara SD); 2) Paket B (setara SMP); dan 3) Paket C (setara SMA/SMK). Untuk menghitung hasil capaian Pendidikan kesetaraan dihasilkan dari target atau jumlah warga yang terdata.

Adapun hasil capaian SPM Kabupaten Sumedang untuk urusan Pendidikan Tahun 2024, disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.65 Capaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2024

No	Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian (%)
			Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah yang Terlayani	Jumlah yang Belum Terlayani	
1	Pendidikan Anak Usia Dini - Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Orang	37.200	34.366	2.834	92,38
2	Pendidikan Dasar - Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Orang	172.757	164.772	7.985	95,38
3	Pendidikan Kesetaraan - Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Orang	7.233	6.001	1.232	82,97

Sumber: Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Sumedang Tahun 2024

Dari data diatas dapat diketahui bahwa capaian layanan SPM bidang pendidikan belum mencapai 100 persen bahkan untuk layanan Pendidikan

kesetaraan masih berada dibawah 90 persen. Beberapa permasalahan yang dapat dianalisis berdasarkan hasil capaian SPM bidang Pendidikan tersebut diatas antara lain:

- a. Kurangnya kesadaran orang tua tentang pentingnya PAUD;
- b. Masih banyak PAUD yang belum terakreditasi;
- c. Usia peserta didik dibawah 7 tahun dan diatas 13 tahun masih bersekolah di tingkat SD;
- d. Usia peserta didik dibawah 13 tahun dan diatas 15 tahun masih bersekolah di Tingkat SMP;
- e. Peserta didik yang berada di wilayah perbatasan bersekolah di luar Kabupaten atau dari luar Kabupaten bersekolah ke Kabupaten Sumedang, sehingga angka partisipasi tidak akurat;
- f. Terdapat ketimpangan jumlah guru untuk mata pelajaran tertentu;
- g. Guru enggan ditugaskan di tempat yang terpencil;
- h. Kualitas layanan pendidikan belum merata, baik dari segi tenaga pendidik, sarana-prasarana, maupun kurikulum;
- i. Rendahnya minat masyarakat terhadap program kesetaraan karena stigma negatif atau kurangnya informasi; dan
- j. Belum optimalnya pendataan warga yang butuh layanan pendidikan kesetaraan.

Disamping permasalahan yang disebutkan diatas, terdapat beberapa faktor pendorong pencapaian layanan SPM bidang Pendidikan adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Perguruan Tinggi, LPMP, Perusahaan, Pegiat dan Praktisi Pendidikan untuk meningkatkan kompetensi guru sesuai kebutuhan KBM khususnya berbasis lingkungan dan budaya sekitar;
- b. Pemerintah daerah melakukan rekrutmen dan seleksi guru kontrak daerah sesuai analisis kebutuhan; dan
- c. Adanya bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang salah satu manfaatnya adalah untuk operasional sekolah, terutama Program Indonesia Pintar (PIP) terhadap anak dari keluarga miskin.

2.1.5.2. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan

SPM bidang Kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 terdiri dari 12 indikator, yaitu:

1) Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Kesehatan ibu hamil merupakan masalah kesehatan yang harus mendapat prioritas utama dalam pembangunan, karena menentukan kualitas sumber daya manusia pada masa mendatang. Jenis pelayanan yang diberikan kepada ibu hamil harus sesuai dengan standar yang artinya ibu hamil wajib mendapatkan pelayanan pemeriksaan kehamilan minimal empat kali pemeriksaan kehamilan (ANC - Antenatal Care), yaitu 1 (satu) kali di trimester I, 1 (satu) kali di trimester II dan 2 (dua) kali di trimester III dan pemeriksaan harus dilakukan tenaga kesehatan (dokter, bidan, atau perawat terlatih).

2) Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Pelayanan kesehatan ibu bersalin adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan kepada ibu sejak dimulainya persalinan hingga 6 (enam) jam sesudah melahirkan. Pelayanan ini bertujuan untuk menjamin persalinan yang aman, pencegahan komplikasi, penanganan kegawatdaruratan dan menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Pelayanan Kesehatan ibu bersalin harus mendapatkan pelayanan sesuai standar yaitu 1) Pelayanan harus dilakukan oleh tenaga kesehatan terlatih (dokter/bidan/perawat); dan 2) Dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan, baik Puskesmas, Klinik, Rumah Sakit, atau Poskesdes dengan kelengkapan standar.

3) Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Salah satu bentuk pelayanan kesehatan bayi baru lahir (0-28 hari) berupa kunjungan neonatal (KN) yakni kontak neonatal dengan tenaga kesehatan minimal 3 (tiga) kali untuk mendapatkan pelayanan dan pemeriksaan kesehatan neonatal, baik di dalam maupun di luar fasilitas kesehatan seperti di bidan, polindes dan kunjungan ke rumah. Pelayanan ini merupakan salah satu Upaya untuk memastikan bayi lahir dalam keadaan sehat dan bertahan hidup, deteksi dini kelainan atau gangguan, dan penanganan dini komplikasi neonatal. Ruang lingkup pelayanan kesehatan bayi baru lahir meliputi:

- a. Kunjungan Neonatal (KN) minimal 3 kali dengan jadwal kunjungan 1) KN 1: 6 – 48 jam setelah lahir; 2) KN 2: hari ke-3 sampai ke-7; 3) KN 3: hari ke-8 sampai ke-28.
- b. Imunisasi dasar (Hepatitis);
- c. Pemantauan berat badan, Panjang badan dan status menyusui;

- d. Pemberian edukasi kepada ibu tentang perawatan bayi;
- e. Deteksi dini gangguan seperti infeksi, hipotermia dan kelainan bawaan.

4) Pelayanan Kesehatan Balita

Balita diartikan sebagai salah satu periode usia dengan rentang usia mulai 12-59 bulan. Pelayanan Kesehatan balita bertujuan untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan balita, mendeteksi secara dini masalah gizi, tumbuh kembang dan penyakit, serta mencegah kematian balita.

5) Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

Usia Pendidikan Dasar berkisar antara 6-15 Tahun. Sasaran dari pelayanan kesehatan pada usia Pendidikan dasar adalah anak usia sekolah yang berada dalam kuasa asuh dari orang tua/wali, maka informasi penjangkauan kesehatan/pemeriksaan berkala perlu diberikan untuk orangtua/wali. Pelayanan berupa kegiatan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui secara dini masalah-masalah kesehatan anak sekolah sehingga dapat dilakukan tindakan secepatnya agar terhindar dari keadaan yang lebih buruk, selain itu juga dengan adanya pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar dapat diperoleh data dan informasi mengenai perkembangan anak.

6) Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif

Usia produktif berkisar antara 15-59 Tahun dan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam bentuk edukasi (termasuk keluarga berencana) dan skrining Kesehatan. Skrining usia produktif merupakan salah satu indikator SPM bidang Kesehatan yang tujuannya sebagai Upaya pencegahan penyakit tidak menular (PTM), deteksi dini faktor resiko Kesehatan dan peningkatan kualitas hidup usia kerja.

7) Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut

Pelayanan kesehatan pada usia lanjut diberikan kepada setiap warga yang telah berusia 60 tahun ke atas. Tujuan dari pelayanan kesehatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran pada lansia untuk memelihara kesehatan sendiri, meningkatkan kemampuan serta peran serta keluarga dan masyarakat dalam mengatasi kesehatan lansia, meningkatkan jenis dan jangkauan pelayanan lansia serta meningkatkan mutu pelayanan kesehatan lansia.

8) Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Hipertensi disebut sebagai the silent killer karena sering tanpa keluhan, sehingga penderita tidak mengetahui dirinya menyandang hipertensi dan baru diketahui setelah terjadi komplikasi. Hipertensi merupakan penyakit yang berada pada 10 (sepuluh) besar penyakit di Kabupaten Sumedang. tujuan dari pelayanan SPM ini adalah untuk menekan angka komplikasi akibat hipertensi, mengendalikan tekanan darah penderita dan meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas Masyarakat.

9) Pelayanan Kesehatan Penderita *Diabetes Melitus (DM)*

Sasaran dari program pelayanan kesehatan untuk penderita diabetes melitus adalah penduduk usia ≥ 15 tahun yang telah terdiagnosis menderita Diabetes Melitus Tipe 2 atau menunjukkan gejala klinis yang mengarah ke diabetes melitus. melalui pelayanan.

10) Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ)

Sasaran dari pelayanan SPM kali ini adalah penduduk yang mengalami gangguan jiwa berat, seperti skizofrenia, bipolar, psikosis berat, atau gangguan jiwa kronis lainnya yang ditetapkan oleh tenaga kesehatan jiwa (dokter atau psikiater), dengan tujuan untuk menjamin ODGJ mendapatkan pengobatan dan pemantauan berkala, mencegah kambuh dan kekambuhan yang berulang serta mendukung rehabilitasi social dan integrasi kemabali ke masyarakat.

11) Pelayanan Kesehatan Orang Terduga *Tuberkulosis*

Tuberkulosis (TBC) adalah penyakit menular yang umumnya menyerang paru-paru, tetapi juga dapat menyerang organ lain seperti tulang, kelenjar getah bening, ginjal, bahkan otak. Tujuan dari pelayanan Kesehatan ini adalah untuk menemukan kasus secara aktif dan dini, menjamin penderita TBC mendapatkan pengobatan dan mencegah penularan dan pemutusan mata rantai penularan.

12) Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (*Human Immunodeficiency Virus (HIV)*)

HIV (Human Immunodeficiency Virus) adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Jika tidak ditangani, HIV bisa berkembang menjadi AIDS (Acquired Immuno Deficiency Syndrome), yaitu tahap akhir

infeksi HIV saat daya tahan tubuh sangat lemah. Pelayanan Kesehatan ini diberikan kepada orang dengan risiko tinggi tertular HIV, seperti Pasangan dari Orang dengan HIV/AIDS (ODHA), pekerja seks dan pelanggannya, Homoseksual, pengguna narkoba suntik dan Ibu hamil yang terdiagnosis HIV positif. Adapun tujuan dari pelayanan ini adalah untuk deteksi dini infeksi HIV melalui tes sukarela (VCT) dan skrining, mencegah penularan HIV lebih lanjut ke pasangan atau bayi dan memulai pengobatan dini (ART) bagi yang terdiagnosis HIV.

Adapun hasil capaian SPM Kabupaten Sumedang dari ke-12 indikator untuk Bidang Kesehatan Tahun 2024, disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.66 Capaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2024

No	Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian (%)
			Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah yang Terlayani	Jumlah yang Belum Terlayani	
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Orang	14.673	13.770	903	93,85
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Orang	14.673	14.668	5	99,97
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Orang	14.680	14.334	346	97,64
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Orang	65.543	62.735	2.808	95,72
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Orang	153.920	153.920	0	100
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Orang	522.186	413.929	108.257	79,27
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Orang	181.122	181.122	0	100
8	Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi	Orang	143.937	121.808	22.129	84,63
9	Pelayanan Kesehatan pada Penderita <i>Diabetes Melitus</i>	Orang	21.763	21763	0	100
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	Orang	1.757	1.757	0	100
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Orang	25.486	25.486	0	100
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus	Orang	22.937	22.937	0	100

No	Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian (%)
			Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah yang Terlayani	Jumlah yang Belum Terlayani	
	yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)					

Sumber: Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Sumedang Tahun, 2024

Dari data diatas dapat diketahui bahwa capaian layanan SPM bidang Kesehatan belum seluruhnya mencapai 100 persen meskipun sudah terdapat beberapa indikator yang 100 persen. Beberapa permasalahan yang dapat dianalisis berdasarkan hasil capaian SPM bidang Kesehatan tersebut diatas terutama untuk indikator dengan capaian yang masih dibawah 90 persen, antara lain:

- a. Kesadaran Masyarakat untuk melakukan skirining Kesehatan masih rendah;
- b. Belum semua Perempuan usia produktif (usia 30-50 tahun) terakses pemeriksaan IVA atau papsmear untuk mendeteksi dini kanker leher rahim;
- c. Masih rendahnya pemahaman ibu hamil tentang pentingnya pemeriksaan kehamilan (*Antenatal care*);
- d. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk rutin cek tekanan darah;
- e. Dari tiga puluh lima UPTD Puskesmas yang ada di Kabupaten Sumedang, memiliki karakteristik dan sebaran tenaga (SDM) kesehatan yang berbeda dan belum merata baik dari jumlah maupun kualitas/kemampuan dalam menunjang pencapaian target SPM bidang Kesehatan; dan
- f. Belum adanya poli khusus geriatric di Kabupaten Sumedang.

Disamping permasalahan yang disebutkan diatas, terdapat beberapa faktor pendorong pencapaian layanan SPM bidang Kesehatan adalah sebagai berikut:

- a. Untuk meningkatkan kompetensi SDM Kesehatan dilakukan beberapa pelatihan khususnya yang berkaitan dengan pelayanan kebidanan seperti pelatihan Pertolongan Pertama Gawat Darurat Obstetri dan Neonatus (PPGDON) serta sosialisasi, seminar dan transfer pengetahuan yang dilakukan oleh dokter spesialis kandungan kepada tenaga kesehatan yang ada di Puskesmas;

- b. Optimalisasi peran bidan desa dan Puskesmas;
- c. Optimalisasi kolaborasi lintas sektor: Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan sekolah (UKS/Trias UKS).

2.1.5.3. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

SPM bidang pekerjaan umum menjamin pelayanan dasar kepada masyarakat di bidang infrastruktur dasar yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah yang, meliputi:

1) Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari

Tujuan dari pelayanan SPM ini adalah untuk menjamin setiap penduduk memiliki akses terhadap air minum yang aman dan cukup secara kuantitas dan berkelanjutan. Jenis pelayanan ini diberikan kepada penduduk miskin, kelompok rentan (anak-anak, lansia dan kelompok berkebutuhan khusus), wilayah dengan keterbatasan akses air minum.

2) Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik

Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari aktivitas sehari-hari manusia yang berhubungan dengan pemakaian air. Air limbah rumah tangga dapat berupa air sisa deterjen, air sabun dan air tinja. Air limbah rumah tangga berpotensi dapat merusak ekosistem air, mencemari tanah, serta berpengaruh terhadap sumber air minum masyarakat. Tujuan dari pelayanan SPM ini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup Masyarakat melalui akses sanitasi aman dan layak serta menurunkan risiko pencemaran lingkungan dan penyakit berbasis air.

Adapun hasil capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Sumedang Tahun 2024, disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.67 Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2024

No	Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian (%)
			Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah yang Terlayani	Jumlah yang Belum Terlayani	
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum	Orang	4.952	5.584	0	100
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Orang	4.040	4.040	0	100

Sumber: Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Sumedang Tahun, 2024

Dari data diatas dapat diketahui bahwa capaian layanan SPM bidang Pekerjaan Umum telah mencapai 100 persen namun meskipun demikian masih terdapat permasalahan dalam pencapaian layanan tersebut. Berikut adalah hasil analisis permasalahan berdasarkan hasil capaian SPM bidang Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut:

- a. Masih terdapat rumah tangga masih bergantung pada sumber air tidak aman seperti sumur dangkal dan sungai;
- b. Masih terbatasnya kapasitas PDAM;
- c. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sanitasi aman;
- d. Minimnya anggaran dan sumber daya untuk pengelolaan air limbah; dan
- e. Keahlian atau kemampuan sumber daya manusia terbatas.

Disamping permasalahan yang disebutkan diatas, faktor pendorong pencapaian layanan SPM bidang Pekerjaan Umum salah satunya adalah dengan melakukan koordinasi dengan PDAM, Dinas PUPR, dan pihak swasta untuk pengembangan infrastruktur.

2.1.5.4. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan dan Permukiman

SPM bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman menjamin pelayanan kepada penduduk miskin dan kelompok rentan berupa pemenuhan hunian layak huni dan permukiman yang sehat, meliputi:

1) Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota

Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana merupakan salah satu alternatif untuk menjamin korban bencana memiliki tempat tinggal yang layak dan aman setelah terjadinya bencana serta mengurangi kerentanan sosial dan ekonomi akibat kehilangan tempat tinggal dengan tujuan untuk mendorong percepatan pemulihan kehidupan sosial Masyarakat terdampak.

2) Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi merupakan pelayanan kepada masyarakat yang terdampak

relokasi akibat program/kegiatan pembangunan Pemerintah Daerah, dengan cara memfasilitasi penyediaan rumah yang layak huni dan aman sebagai bentuk perlindungan hak dasar atas tempat tinggal.

Adapun hasil capaian SPM Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumedang Tahun 2024, disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.68 Capaian SPM Bidang Perumahan dan Kawsan Permukiman Tahun 2024

No	Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian (%)
			Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah yang Terlayani	Jumlah yang Belum Terlayani	
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana	Orang	81	81	0	100
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0	100

Sumber: Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Sumedang Tahun, 2024

Dari data diatas dapat diketahui bahwa capaian layanan SPM bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman telah mencapai 100 persen. Adapun untuk SPM terkait dengan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah, belum pernah terjadi di Kabupaten Sumedang sampai dengan Tahun 2024. Dikarenakan program-program Pemerintah Daerah lebih dititikberatkan pada program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti program dalam upaya penurunan kemiskinan, pengangguran dan stunting serta memperbaiki fasilitas umum dalam upaya mendukung peningkatan perekonomian masyarakat. Namun meskipun capaian telah 100 perman, masih terdapat permasalahan dalam pencapaian layanan tersebut. Berikut adalah hasil analisis permasalahan berdasarkan hasil capaian SPM bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut:

- a. Lahan yang akan dijadikan tempat relokasi terkadang tidak sesuai;

- b. Sering adanya penolakan dari warga terkait dengan lokasi relokasi dikarenakan tidak strategis atau jauh dari sumber perekonomian;
- c. Belum optimalnya data dan pemetaan korban pasca bencana.

Disamping permasalahan yang disebutkan diatas, faktor pendorong pencapaian layanan SPM bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman salah satunya adalah dengan melakukan koordinasi dengan BPBD, Dinas terkait, dan Masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan relokasi ataupun pembangunan rumah, serta dengan mengajukan bantuan stimulan atau Pembangunan rumah ke Provinsi atau Pemerintah Pusat.

2.1.5.5. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Tujuan dari pelayanan SPM bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat adalah untuk menjamin masyarakat hidup dengan rasa aman dan tenteram, meningkatkan respon cepat terhadap potensi gangguan ketertiban dan keamanan dan menyediakan dukungan perlindungan kepada masyarakat dalam situasi darurat atau bencana. Jenis Pelayanan Dasar SPM Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagai berikut:

1) Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Ketenteraman dan ketertiban umum merupakan keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tentram, tertib dan teratur. Jenis pelayanan diberikan diberikan kepada Masyarakat alam bentuk penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum. Tujuannya adalah untuk 1) Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam menjaga ketertiban; 2) Mewujudkan lingkungan masyarakat yang aman, tertib, dan nyaman; dan 3) Mencegah dan menindak gangguan ketenteraman, seperti pelanggaran peraturan daerah, keributan di ruang publik dan gangguan fasilitas umum.

2) Pelayanan Informasi Rawan Bencana

Pelayanan informasi rawan bencana merupakan pelayanan informasi kepada Masyarakat tentang potensi dan kerentanan wilayah terhadap bencana, dengan tujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan masyarakat terhadap ancaman bencana dengan cara memberikan akses informasi rawan bencana yang cepat, akurat, dan

mudah dipahami, meningkatkan kesadaran dan kesiapan masyarakat terhadap potensi bencana dan mengurangi risiko dan dampak bencana melalui deteksi dini dan mitigasi. Pelayanan informasi rawan bencana dapat disampaikan melalui media cetak, media elektronik maupun media sosial.

3) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana

Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana merupakan bagian dari kegiatan mitigasi bencana. Jenis pelayanannya berupa pencegahan bencana dan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana, dengan tujuan untuk mengurangi risiko dan dampak bencana melalui upaya preventif, meningkatkan kapasitas masyarakat dan kelembagaan dalam menghadapi bencana dan mewujudkan masyarakat yang tanggap, tangguh, dan siap siaga bencana. Metode pelaksanaan pelayanan SPM ini melalui pelatihan, simulasi dan sosialisasi di masyarakat, sekolah, tempat bekerja maupun di wilayah siaga bencana.

4) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Tujuan dari jenis pelayanan dasar ini adalah untuk memberikan pelayanan penyelamatan jiwa dan evakuasi korban ketika terjadi bencana, agar dapat meminimalkan jumlah korban jiwa dan luka serta kerusakan yang lebih besar.

5) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran

Jenis pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran merupakan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam bentuk penyelamatan jiwa manusia dan harta benda, serta evakuasi korban kebakaran secara cepat dan tepat. Tujuannya adalah meminimalkan korban jiwa dan luka akibat kebakaran, menyelamatkan masyarakat dari bangunan atau area terdampak kebakaran dan mengurangi kerugian material dan mempercepat proses penanganan kebakaran.

Adapun hasil capaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sumedang Tahun 2024, disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.69 Capaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2024

No	Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian (%)
			Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah yang Terlayani	Jumlah yang Belum Terlayani	
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Orang	16	16	0	100
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Orang	802.350	802.350	0	100
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Orang	856	856	0	100
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	2.483	2.483	0	100
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Orang	116.703	116.703	0	100

Sumber: Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Sumedang Tahun, 2024

Dari data diatas dapat diketahui bahwa capaian layanan SPM bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat telah mencapai 100 persen namun meskipun demikian masih terdapat permasalahan dalam pencapaian layanan tersebut. Berikut adalah hasil analisis permasalahan berdasarkan hasil capaian SPM bidang Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat terhadap perda/perkada;
- b. Terbatasnya ketersediaan SDM terutama PPNS di Satpol PP;
- c. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang pencapaian SPM seperti mobil dan peralatan pemadam kebakaran, perahu dan logistik penunjang kebencanaan;
- d. Masih banyak daerah belum memiliki rencana kontinjensi atau sistem peringatan dini atau *Early Warning System* (EWS);
- e. Belum tersedianya data dan peta rawan bencana yang telah dimutakhirkan.

Disamping permasalahan yang disebutkan diatas, terdapat beberapa faktor pendorong dalam pencapaian layanan SPM bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, antara lain:

- a. Penguatan koordinasi dengan Babinsa dan Linmas;
- b. Kolaborasi aktif dengan BMKG, BNPB, TNI/POLRI dan Pemerintah daerah;
- c. Pengembangan desa tangguh bencana; dan
- d. Simulasi evakuasi rutin bekerja sama dengan sekolah, rumah sakit, dan Masyarakat.

2.1.5.6. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial

Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang sosial ditujukan untuk menjamin hak warga negara atas pelayanan dasar di bidang kesejahteraan social. Beberapa komponen utama SPM bidang sosial, diantaranya:

1) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti

Pelayanan SPM ini bertujuan untuk memberikan layanan rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas terlantar yang tidak berada di dalam panti dapat mandiri. Bentuk layanannya biasaya berupa pelatihan keterampilan, bantuan alat bantu, terapi, dan reintegrasi sosial.

2) Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti

Pelayanan SPM ini bertujuan untuk memberikan layanan dasar rehabilitasi sosial bagi anak terlantar yang berada di luar panti agar mendapatkan perlindungan, pembinaan, dan layanan social, dengan bentuk pelayanan seperti rehabilitasi sosial, konseling dan pengasuhan sementara.

3) Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti

Pelayanan SPM ini bertujuan untuk memberikan layanan rehabilitasi sosial dasar kepada lanjut usia (lansia) terlantar di luar panti agar tetap dapat hidup mandiri dan layak. Bentuk pelayanannya berupa memberikan bantuan sosial dan pelayanan medis.

4) Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti

SPM ini menyediakan layanan rehabilitasi sosial dasar bagi tuna sosial, khususnya gelandangan dan pengemis yang hidup di luar panti,

dengan tujuan untuk menurunkan jumlah gelandangan dan pengemis. Bentuk pelayanannya berupa pembinaan, pelatihan keterampilan, dan pemulangan ke daerah asal.

5) Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Bagi Korban Bencana

Tujuan dari pelayanan ini adalah memberikan perlindungan sosial dasar dan jaminan sosial minimum bagi individu atau kelompok masyarakat yang menjadi korban bencana, baik pada saat tanggap darurat maupun pasca-bencana, agar mereka tetap dapat bertahan hidup. Bentuk layanannya berupa distribusi bantuan kebutuhan dasar, pelayanan psikososial berupa dukungan mental dan trauma healing, bantuan pemulihan social berupa santunan uang dan hunian sementara.

Adapun hasil capaian SPM Bidang Sosial Kabupaten Sumedang Tahun 2024, disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.70 Capaian SPM Bidang Sosial Tahun 2024

No	Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian (%)
			Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah yang Terlayani	Jumlah yang Belum Terlayani	
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Orang	206	206	0	100
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	Orang	62	62	0	100
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	Orang	212	212	0	100
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	Orang	42	42	0	100
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Bagi Korban Bencana	Orang	2.638	2.638	0	100

Sumber: Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Sumedang Tahun, 2024

Dari data diatas dapat diketahui bahwa capaian layanan SPM bidang Sosial telah mencapai 100 persen namun meskipun demikian masih terdapat permasalahan dalam pencapaian layanan tersebut. Berikut adalah hasil analisis permasalahan berdasarkan hasil capaian SPM bidang Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya verifikasi data PPKS di Basis Data Terpadu (BDT) sehingga belum semua Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dapat tertangani;
- b. Tingginya mobilitas dan keberulangan gelandangan/pengemis terutama di wilayah perkotaan;
- c. Belum adanya keterbatasan jumlah rumah singgah;
- d. Masih tingginya angka eksploitasi anak di jalanan; dan
- e. Pada saat terjadi bencana terkadang data korban bencana tidak segera tersedia dan terverifikasi.

Disamping permasalahan yang disebutkan diatas, terdapat beberapa faktor pendorong dalam pencapaian layanan SPM bidang Sosial, antara lain dengan optimalisasi koordinasi lintas sektor, penyediaan rumah singgah meskipun belum optimal, pelatihan TAGANA dan pekerja sosial untuk respon darurat dan peningkatan integrasi layanan sosial dengan BPBD, PMI, dan LSM.

2.1.6. Kerjasama Daerah

Data kerja sama pada periode 2020–2024 menunjukkan dinamika yang cukup signifikan dalam pola kolaborasi. Pada tahun 2020, total kerja sama tercatat sebanyak 40 kegiatan, yang terdiri dari 19 KESBER, 13 PKS, dan 8 NPHD, tanpa adanya kerja sama luar negeri. Memasuki 2021, jumlah kerja sama meningkat menjadi 57, dengan dominasi PKS sebanyak 28 kegiatan, disusul oleh KESBER (20) dan NPHD (9). Pada 2022, tren peningkatan ini berlanjut dengan total 93 kerja sama, termasuk penandatanganan *Letter of Intent* (LOI) dengan Makinohara sebagai satu-satunya kerja sama luar negeri saat itu.

Lonjakan besar terjadi pada 2023, di mana total kerja sama mencapai puncaknya yaitu 188 kegiatan, didorong oleh peningkatan signifikan pada KESBER (87), PKS (55), dan NPHD (45), serta adanya kerja sama luar negeri dengan Korea. Namun, memasuki 2024, terjadi penurunan drastis dalam jumlah kerja sama menjadi hanya 70 kegiatan, dengan KESBER sebanyak 41, PKS sebanyak 22, dan NPHD sebanyak 7, tanpa adanya kerja sama luar

negeri. Secara keseluruhan, data ini menggambarkan bahwa kerja sama cenderung meningkat hingga 2023, tetapi mengalami penurunan tajam pada 2024, sementara kerja sama luar negeri masih sangat terbatas dan hanya tercatat dua kali selama periode ini.

Tabel 2.71 Kerja Sama Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang
Periode 2020-2024

Tahun	KSDD / KSDPK / SINERGITAS			Kerja Sama Luar Negeri	Total
	Kesepakatan Bersama (KESBER)	Perjanjian kerjasama (PKS)	Naskah Perjanjian Hibah Daerah NPHD)		
2020	19	13	8	-	40
2021	20	28	9	-	57
2022	37	40	15	LOL dengan Makinohara	93
2023	87	55	45	LOL dengan Korea	188
2024	41	22	7	-	70

Sumber: Bagian Kerjasama SETDA Kabupaten Sumedang, 2025

Terdapat tren peningkatan jumlah kerja sama hingga 2023, tetapi kemudian menurun tajam pada 2024. Hal ini salah satunya disebabkan oleh faktor eksternal seperti perubahan kebijakan, keterbatasan sumber daya, atau kondisi global. Peningkatan signifikan pada tahun 2023 menunjukkan bahwa tahun 2023 merupakan periode puncak aktivitas kerja sama. Hal ini bisa dipengaruhi oleh program strategis tertentu, momentum politik, atau dorongan kebijakan yang mendukung peningkatan kolaborasi.

2.1.7. Rencana Pembangunan Infrastruktur oleh APBN dan/atau APBD

2.1.8. BUMD yang Mendukung Kinerja Pelayanan Pemda

BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) memiliki peran strategis dalam mendukung kinerja pelayanan Pemerintah Daerah (Pemda), antara lain:

- 1) Penyediaan Layanan Publik
- BUMD dapat menyediakan layanan dasar seperti air bersih, layanan perbankan yang mendukung kesejahteraan masyarakat.

- 2) Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Melalui keuntungan usaha, BUMD dapat memberikan dividen ke kas daerah yang bisa digunakan untuk program sosial dan infrastruktur.
- 3) Pendorong Ekonomi Lokal
 BUMD dapat menjadi motor penggerak ekonomi lokal dengan menyerap tenaga kerja dan memajukan sektor unggulan daerah seperti pertanian, pariwisata, dan perdagangan.
- 4) Menjaga Ketersediaan dan Stabilitas Harga Barang Strategis
 Dalam kondisi tertentu seperti inflasi atau krisis, BUMD bisa intervensi pasar untuk menstabilkan harga.
- 5) Digitalisasi Layanan Publik
 BUMD berbasis teknologi dapat membantu pemda dalam pelayanan digital, seperti pembayaran pajak online atau layanan perizinan.

Tabel 2.72 Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Sumedang Berdasarkan Jenis Usaha

No	Nama BUMD	Jenis usaha	Perda pendirian
1	Perumda BPR Bank Sumedang	Jasa keuangan/Perbankan	Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang
2	Perumda Air Minum Tirta Medal	Air Minum	Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Derah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang
3	PT. Lembaga Keuangan Mikro	Jasa keuangan	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Hasil Konsolidasi atau Merger Menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 186);
4	PT. Kampung Makmur	Aneka usaha	Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perseroan Terbatas Kampung Makmur (Perseroda)

Sumber: Bagian Ekonomi SETDA, 2025

2.2. Gambaran Keuangan Daerah

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah suatu sistem penyelenggaraan keuangan yang mengatur hak dan kewajiban keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara adil, transparan, akuntabel, dan selaras berdasarkan undang-undang.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Ruang Lingkup Keuangan Daerah meliputi:

1. Hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
2. Kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak lain;
3. Penerimaan Daerah;
4. Pengeluaran Daerah;
5. Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai.

Keuangan daerah merupakan komponen daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menyatu dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD sebagai bentuk penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah serta tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, disusun dalam suatu struktur yang menggambarkan besarnya pendanaan atas berbagai sasaran yang hendak dicapai sesuai tugas, pokok dan fungsi dengan memperhatikan kondisi, potensi, aspirasi dan kebutuhan riil di masyarakat untuk suatu tahun tertentu.

Dengan demikian APBD dijadikan salah satu bentuk instrumen kebijakan untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di Daerah. Oleh karena itu, untuk dapat melakukan analisis pengelolaan keuangan daerah diperlukan analisis pelaksanaan APBD selama 5 (lima) tahun, yang dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah.

Gambaran kinerja keuangan daerah Kabupaten Sumedang secara umum disajikan realisasi anggaran dan kinerja keuangan untuk periode Tahun Anggaran 2020-2024 sebagai dasar dalam merumuskan proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang untuk 5 (lima) tahun ke depan dari Tahun 2026-2030.

Perencanaan pembangunan daerah perlu mempertimbangkan keuangan daerah dengan menganalisis pengelolaan keuangan daerah yang ada pada anggaran pendapatan dan belanja daerah. Sehingga dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sumedang tahun 2026-2030 ini dilakukan analisis terhadap kinerja APBD dan neraca keuangan daerah tahun 2020-2024.

Berdasarkan Pasal 27 dan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan satu kesatuan yang disusun dalam struktur tertentu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) meliputi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan uraian sebagai berikut:

1. Pendapatan terdiri dari:
 - a. Pendapatan Asli Daerah, meliputi;
 - 1) Pajak daerah;

- 2) Retribusi daerah;
 - 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
- b. Pendapatan Transfer, meliputi:
- 1) Transfer Pemerintah Pusat;
 - 2) Transfer antar-daerah.
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, meliputi:
- 1) Hibah;
 - 2) Dana Darurat; dan/atau;
 - 3) Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Klasifikasi Belanja Terdiri atas:
- a. Belanja Operasi;
- 1) Belanja Pegawai;
 - 2) Belanja Barang dan Jasa;
 - 3) Belanja Bunga;
 - 4) Belanja Subsidi;
 - 5) Belanja Hibah;
 - 6) Belanja Bantuan Sosial.
- b. Belanja Modal:
- 1) Belanja Tanah;
 - 2) Belanja Peralatan dan Mesin;
 - 3) Belanja Gedung dan Bangunan;
 - 4) Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi;
 - 5) Belanja Aset Tetap Lainnya;
 - 6) Belanja Aset Lainnya;
- c. Belanja Tidak Terduga:
- 1) Keadaan darurat;
 - 2) Keperluan mendesak;
 - 3) Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau;
 - 4) Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- d. Belanja Transfer:
- 1) Belanja Bagi Hasil; dan

2) Belanja Bantuan Keuangan.

e. Pembiayaan Terdiri dari:

1) Penerimaan Pembiayaan; dan

2) Pengeluaran Pembiayaan.

Pengelolaan keuangan daerah pada tahun 2020-2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana secara pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan, laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sumedang telah mendapatkan reviu dari BPK RI dengan hasil Opini BPK berupa “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”. Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan administrasi keuangan Pemda Kabupaten Sumedang telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku dan merupakan salah satu bukti kualitas pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang baik.

Laporan Keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu (Sumber: SAP).

Peran masing-masing komponen laporan keuangan terhadap pengambilan kebijakan pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Peran Informasi keuangan yang disajikan dalam LRA terhadap pengambilan keputusan manajerial adalah bahwa data yang terdapat dalam LRA mampu memberikan informasi yang memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*) dan manfaat prediktif (*predictive value*) dalam mendukung pengambilan Keputusan manajemen pemerintah daerah.

- a. Manfaat umpan balik (*feedback value*) diperoleh dari data yang menggambarkan tingkat realisasi pencapaian target pendapatan daerah dan realisasi belanja daerah/penyerapan anggaran. Data tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan evaluasi atas kinerja keuangan masa lalu, serta untuk memperbaiki perencanaan penganggaran pada tahun berikutnya.
- b. Manfaat prediktif (*predictive value*), dapat diperoleh dari informasi pembiayaan surplus/defisit anggaran. Berdasarkan informasi tersebut,

dapat dihitung perkiraan alokasi untuk pembayaran angsuran pinjaman pada anggaran tahun berikutnya atau menaksir pendapatan daerah dari optimalisasi dana idle yang diinvestasikan.

Kedua manfaat tersebut akan dapat dimanfaatkan oleh para pengambil Keputusan apabila penyajian kuantitatif dalam LRA tersebut dilengkapi dengan informasi kualitatif yang disajikan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) yang merupakan salah satu komponen laporan keuangan pemerintah daerah. Dalam CALK disajikan informasi tentang hambatan atau kendala dalam pencapaian target pendapatan daerah atau penyerapan anggaran belanja, tingkat beban bunga atas pinjaman atau pendapatan bunga dari optimalisasi dana idle yang diinvestasikan.

Informasi yang diperoleh dari LRA dan penjelasan dalam CALK terkait rincian pos-pos yang terdapat dalamnya dapat dijadikan sebagai alat dalam pengambilan kebijakan antara lain:

1. Dari sisi pendapatan daerah, bagaimana kebijakan yang akan diambil pemerintah daerah untuk mengatasi hambatan/kendala dalam merealisasikan pendapatan daerah baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah maupun dari Pemerintah Pusat dan Propinsi. Bagaimana strategi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dilihat dari tingkat kepatuhan pembayaran pajak dan retribusi, apakah diperlukan tindakan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dan retribusi daerah melalui penagihan pajak dan retribusi serta bagaimana koordinasi yang harus dilakukan dalam proses pencairan dana perimbangan dari pemerintah pusat.
2. Dari sisi belanja daerah, bagaimana kebijakan yang akan diambil dalam rangka efisiensi belanja pegawai yang semakin meningkat, efektivitas dan standardisasi belanja pegawai, efisiensi belanja administrasi perkantoran, serta pemenuhan belanja pelayanan publik melalui program dan kegiatan yang dapat mengakselerasi tingkat kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan dan tingkat pengangguran.
3. Dalam pengelolaan pinjaman daerah, dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan tentang berapa pinjaman maksimal yang dapat diperoleh, tingkat suku bunga, serta besaran angsuran setiap tahun yang harus dilokasikan dalam APBD tahun anggaran berikutnya.
4. Dibandang investasi dalam hal terdapat dana surplus, apakah akan dilaksanakan penyertaan modal pada BUMN/BUMD, atau akan

dialihkan pada investasi lainnya yang lebih memberikan manfaat pendapatan bagi Pemerintah Daerah.

2.2.1. Realisasi Data APBD Tahun 2020-2024

Tabel 2.73 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	REALISASI TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	PENDAPATAN DAERAH					
A.	Pendapatan Asli Daerah	444.430.247.449,44	470.281.819.936,29	518.986.812.154,84	518.684.991.990,44	566.234.387.379,16
	Pajak Daerah	180.222.612.157,00	198.326.131.839,00	221.379.897.839,00	222.791.864.642,00	242.774.020.628,00
	Retribusi Daerah	8.300.206.720,00	6.731.513.966,00	9.276.092.781,00	8.473.124.358,00	300.554.502.830,00
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	10.929.327.383,00	11.164.520.965,00	12.643.497.231,00	12.491.956.500,00	11.880.680.700,00
	Lain - Lain PAD yang Sah	244.978.101.189,44	254.059.653.166,29	275.687.324.303,84	274.928.046.490,44	11.025.183.221,16
B.	Pendapatan Transfer	2.318.347.156.451,00	2.233.686.395.115,00	2.365.573.220.560,00	2.326.100.313.524,00	2.485.804.727.800,00
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.628.340.815.970,00	1.892.016.917.253,00	2.039.555.091.538,00	2.020.724.604.782,00	2.216.858.539.145,00
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	306.391.730.000,00	341.669.477.862,00	326.018.129.022,00	305.375.708.742,00	268.946.188.655,00
	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	134.266.775.232,00	-	-	-	
	Bantuan Keuangan	249.347.835.249,00	-	-	-	
C.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah	141.612.082.721,00	131.896.910.224,00	3.411.071.029,00	537.133.033,00	4.989.810.365,00
	JUMLAH PENDAPATAN	2.904.389.486.621,44	2.835.865.125.275,29	2.887.971.103.743,84	2.845.322.438.547,44	3.057.106.824.233,16
2.	BELANJA					
A.	BELANJA OPERASI	1.949.881.150.929,00	1.955.814.792.559,00	2.057.716.538.601,00	2.067.545.086.538,00	2.261.695.440.153,00
	Belanja Pegawai	1.176.209.206.916,00	1.182.261.056.674,00	1.169.624.519.375,00	1.136.204.761.480,00	1.211.094.932.494,00
	Belanja Barang dan Jasa	738.886.933.513,00	709.093.186.272,00	803.235.286.510,00	855.904.168.659,00	924.352.551.239,00
	Belanja Bunga	0	500.587.500,00	0	0	0
	Belanja Subsidi	0	0	95.782.500,00	450.000.000,00	700.000.000,00
	Belanja Hibah	33.562.360.500,00	59.369.641.613,00	78.047.993.016,00	65.146.756.399,00	121.284.456.420,00
	Belanja Bantuan Sosial	1.222.650.000,00	4.590.320.500,00	6.712.957.200,00	9.839.400.000,00	4.263.500.000,00

NO	URAIAN	REALISASI TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
B.	BELANJA MODAL	498.497.676.052,00	353.171.282.580,00	480.578.259.481,00	405.717.844.656,00	372.319.512.856,00
C.	BELANJA TIDAK TERDUGA	46.401.777.454,00	23.812.747.069,00	2.786.124.220,00	6.967.211.399,00	1.262.126.299,00
D.	BELANJA TRANSFER	373.484.680.048,00	379.331.582.631,00	389.855.052.943,00	439.705.184.266,00	447.760.897.239,00
	Belanja Bagi Hasil	20.044.107.816,00	23.441.269.922,00	29.486.323.500,00	30.551.038.950,00	31.519.669.750,00
	Belanja Bantuan Keuangan	353.440.572.232,00	355.890.312.709,00	360.368.729.443,00	409.154.145.316,00	416.241.227.489,00
	JUMLAH BELANJA	2.868.265.284.483,00	2.712.130.404.839,00	2.930.935.975.245,00	2.919.935.326.859,00	3.083.037.976.547,00
	SURPLUS/ (DEFISIT)	36.124.202.138,44	123.734.720.436,29	-42.964.871.501,16	-74.612.888.311,56	-26.009.051.002,84
3.	PEMBIAYAAN					
	Penerimaan Pembiayaan					
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	112.930.843.943,17	117.474.646.639,61	232.339.367.075,90	161.530.195.031,74	56.002.538.428,18
	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	40.614.170.831,00
	Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	51.000.000.000,00	0	0	85.231.708,00	0
	Penerimaan Kembali Pinjaman melalui BLUD	0	7.000.000.000,00	0	0	0
	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Masyarakat					64.878.560,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	163.930.843.943,17	124.474.646.639,61	232.339.367.075,90	161.615.426.739,74	96.681.587.819,18
	Pengeluaran Pembiayaan					
	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	15.000.000.000,00	25.000.000.000,00	0
	Penyertaan Modal	9.400.000.000,00	8.870.000.000,00	12.329.670.795,00	6.000.000.000,00	2.000.000.000
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	73.180.399.442,00	0	0	0	0
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	71.000.000.000,00	0	0	0	0
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	2.180.399.442,00	0	0	0	0

NO	URAIAN	REALISASI TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0	7.000.000.000,00	0	0	0
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	82.580.399.442,00	15.870.000.000,00	27.329.670.795,00	31.000.000.000,00	2.000.000.000,00
	Pembiayaan NETTO	81.350.444.501,17	108.604.646.639,61	205.009.696.280,90	130.615.426.739,74	94.681.587.819,18
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	117.474.646.639,61	232.339.367.075,90	162.044.824.779,74	56.002.538.428,18	68.672.536.816,34

Sumber:

- 1) Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 (audited BPK RI)
- 2) Laporan Realisasi APBD (LRA) Tahun Anggaran 2024 (Database SIPKD per 31 Desember 2024)

Tabel 2.74 Neraca Daerah Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	TAHUN					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	ASET						
1.1.	ASET LANCAR	197.856.046.636,21	325.915.892.336,96	266.311.138.675,32	184.640.788.747,37	200.021.836.818,95	6,02
1.1.1 .	Kas dan Setara Kas	117.474.983.002,61	232.029.252.155,90	161.546.137.893,74	56.002.538.428,18	68.680.493.163,34	6,11
1.1.2 .	Investasi Jangka Pendek	-	-	-	-	-	-
1.1.3 .	Piutang Pendapatan	82.648.849.278,33	97.685.121.249,00	112.260.901.550,88	136.619.697.167,00	128.627.224.487,00	12,24
1.1.4 .	Piutang Lainnya	247.336.700,00	122.416.700,00	8.383.300,00	51.500.000,00	17.501.809.752,68	8,564
1.1.5 .	Penyisihan Piutang	(28.539.322.500,29)	(35.964.394.510,67)	(41.862.755.145,35)	(49.225.746.431,53)	(54.140.210.501,35)	17,50
1.1.6 .	Beban Dibayar Dimuka	315.939.700,31	259.198.630,14	131.698.630,14	57.236.438,36	389.452.810,77	114,18
1.1.7 .	Persediaan	25.708.260.455,25	31.784.298.112,59	34.226.772.445,91	41.135.563.145,36	38.963.067.106,51	11,56
1.2.	INVESTASI JANGKA PANJANG	108.755.751.125,34	138.049.272.383,73	145.306.878.217,91	155.958.119.420,18	161.614.426.055,09	10,79
1.2.1	Investasi Non Permanen	1.161.713.218,25	1.013.282.596,00	1.000.932.571,62	890.688.754,25	857.014.192,00	(7,20)
1.2.2	Investasi Permanen	107.594.037.907,09	137.035.989.787,73	144.305.945.646,29	155.067.430.665,93	160.757.411.863,09	10,95
1.3.	ASET TETAP	2.999.729.426.716,04	3.060.050.155.275,52	3.306.846.836.622,22	3.445.043.021.626,89	3.438.257.592.731,49	3,51
1.3.1 .	Tanah	422.896.537.255,73	433.690.528.646,73	582.116.454.610,77	779.803.484.596,70	826.769.587.433,67	19,19
1.3.2 .	Peralatan dan Mesin	1.251.587.053.191,91	1.359.768.122.700,89	1.525.702.360.148,95	1.620.650.976.708,34	1.742.547.528.018,09	8,65
1.3.3 .	Gedung dan Bangunan	1.282.934.922.612,71	1.372.194.664.552,32	1.541.028.614.238,83	1.669.060.803.578,38	1.801.994.289.267,68	8,88
1.3.4 .	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.765.379.833.035,32	2.850.481.458.311,11	3.051.233.809.417,23	3.230.891.609.798,35	3.339.264.648.309,31	4,84
1.3.5 .	Aset tetap lainnya	183.651.455.691,37	196.060.575.980,47	212.813.927.498,19	231.399.529.043,12	249.176.211.516,11	7,93

NO	URAIAN	TAHUN					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
1.3.6 .	Konstruksi dalam pengerjaan	11.508.274.800,00	83.336.411.117,00	42.865.020.217,00	13.664.221.546,00	17.286.071.500,00	133,49
1.3.7 .	Akumulasi Penyusutan	(2.918.228.649.871,00)	(3.235.481.606.033,00)	(3.648.913.349.508,75)	(4.100.427.603.644,00)	(4.538.780.743.313,37)	11,68
1.4.	ASET LAINNYA	45.381.383.891,37	3.795.589.724,56	16.234.243.871,75	6.985.501.044,99	10.661.248.245,51	8,11
1.4.1 .	Tagihan penjualan angsuran	-	-	-	-	-	-
1.4.2 .	Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah	40.125.412,00	254.472.912,00	342.006.312,00	346.289.612,00	327.393.523,08	141,10
1.4.3 .	Kemitraan dengan pihak Ketiga	-	69.173.543,00	69.173.543,00	69.173.543,00	69.173.543,00	-
1.4.4 .	Aset Tidak Berwujud	43.397.510.805,59	44.753.675.421,89	46.127.823.312,26	49.464.493.935,26	52.994.565.935,26	5,14
1.4.5 .	Aset Lain-lain	33.225.567.830,49	33.378.205.820,49	43.926.696.727,67	42.718.990.580,32	38.022.230.292,65	4,58
1.4.6 .	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(31.281.820.156,71)	(41.474.370.496,33)	(42.951.089.531,93)	(44.216.328.631,59)	(45.867.183.912,39)	10,71
1.4.7 .	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	-	(33.185.567.476,49)	(42.527.887.464,25)	(41.397.117.994,00)	(36.738.626.136,09)	3,56
1.4.8 .	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	-	-	11.247.520.973,00	29.576.034.000,00	1.853.695.000,00	
	JUMLAH ASET DAERAH	3.351.722.608.368,96	3.527.810.909.720,77	3.734.699.097.387,20	3.792.627.430.839,43	3.810.555.103.851,04	3,29
2	KEWAJIBAN						
2,1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	39.212.641.743,00	45.767.985.652,15	91.757.733.513,40	54.253.007.721,49	50.217.040.528,49	17,22
2.1.1 .	Utang perhitungan pihak ketiga	336.363,00	9.987.632.008,00	3.277.500,00	-	-	742.275
2.1.2 .	Utang Bunga	-	-	-	-	-	-
2.1.3 .	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-	-	-	-	-

NO	URAIAN	TAHUN					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
2.1.4 .	Pendapatan Diterima Dimuka	607.619.000,00	1.202.786.157,15	2.367.125.480,40	2.209.452.472,49	1.739.428.185,99	41,70
2.1.5 .	Utang Belanja	38.583.836.380,00	34.329.288.637,00	82.764.944.871,00	51.810.728.979,00	66.136.331.708,88	30,08
2.1.6 .	Utang Jangka Pendek Lainnya	20.850.000,00	248.278.850,00	6.622.385.662,00	232.826.270,00	-	865,40
	JUMLAH KEWAJIBAN	39.212.641.743,00	45.767.985.652,15	91.757.733.513,40	54.253.007.721,49	50.217.040.528,49	17,22
3	EKUITAS						
3,1	EKUITAS	3.312.509.966.625,96	3.482.042.924.068,62	3.631.693.842.900,80	3.738.374.423.117,94	3.742.679.343.956,17	3,12
3.1.1 .	Ekuitas	3.312.509.966.625,96	3.482.042.924.068,62	3.631.693.842.900,80	3.738.374.423.117,94	3.742.679.343.956,17	3,12
	JUMLAH EKUITAS DANA	3.312.509.966.625,96	3.482.042.924.068,62	3.642.941.363.873,80	3.738.374.423.117,94	3.742.679.343.956,17	3,12
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	3.351.722.608.368,96	3.527.810.909.720,77	3.734.699.097.387,20	3.792.627.430.839,43	3.810.555.103.851,04	3,28

Sumber: Diolah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang, 2025

Dari Tabel 2.66 dapat dilihat aset Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 5,25% dari Tahun 2020 yang dipengaruhi oleh kenaikan nilai Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, serta penurunan Aset Lainnya. Kemudian, dari Tahun 2021 ke tahun 2022 kembali menunjukkan kenaikan sebesar 6,29% yang dipengaruhi oleh kenaikan Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan, Aset Lainnya, serta penurunan Aset Lancar. Sama halnya dengan kenaikan nilai aset pada tahun-tahun sebelumnya, nilai aset tahun 2023 kembali mengalami kenaikan sebesar 3,01% dari tahun 2022. Kenaikan ini dipengaruhi oleh kenaikan nilai Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan, Aset Lainnya serta penurunan pada Aset Lancar.

Dari sisi Kewajiban, terdapat kenaikan sebesar 16,72% pada nilai Kewajiban Tahun 2021 dari tahun 2020 yang dipengaruhi oleh kenaikan nilai Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Pendapatan Diterima di Muka, Utang Belanja, serta penurunan nilai Utang Jangka Pendek Lainnya. Selanjutnya, nilai Kewajiban tahun 2022 kembali mengalami kenaikan dari nilai kewajiban tahun 2021 yaitu sebesar 100,48%. Kenaikan yang signifikan ini disebabkan oleh kenaikan pada seluruh komponen kewajiban yaitu Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Pendapatan Diterima di Muka, Utang Belanja, serta Utang Jangka Pendek Lainnya. Berbeda halnya dengan tahun-tahun sebelumnya, nilai Kewajiban tahun 2023 mengalami penurunan sebesar -40,87% dari kewajiban tahun 2022 yang disebabkan oleh adanya penurunan pada seluruh komponen kewajiban.

Selanjutnya, Ekuitas Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang secara umum mengalami kenaikan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 dimana tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 5,12% dari Ekuitas tahun 2020, tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 5,05% dari tahun 2021 serta tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 4,11% dari tahun 2022.

Rata-rata persentase kenaikan Jumlah Kewajiban dan Ekuitas selama tiga tahun terakhir sebesar 4,85%, masing-masing secara berturut-turut mengalami kenaikan yaitu dari tahun 2020 ke 2021 sebesar 5,25%, tahun 2021 ke 2022 sebesar 6,29% serta dari tahun 2022 ke 2023 sebesar 3,01%.

2.2.2. Proyeksi Keuangan Daerah Tahun 2026-2030

Sebelum diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (“UU HKPD”) pengaturan pendapatan daerah diatur dalam beberapa undang-undang, yaitu pendapatan daerah berupa pajak dan retribusi diatur di dalam Undang-undang Nomor Tahun 28 Tahun 2009 Tentang pajak dan retribusi daerah (“UU PDRD”). Sementara dana perimbangan yang berupa Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (“UU Perimbangan Keuangan”). Namun dalam UU HKPD, sumber-sumber pendanaan Daerah diatur secara terintegrasi di dalam UU HKPD.

Di dalam UU HKPD didesain untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah dengan meningkatkan pendapatan asli daerah, melaksanakan transfer ke daerah yang berkualitas dan memperluas akses pembiayaan. Peningkatan kapasitas fiskal daerah dapat dicapai dengan memperkuat desentralisasi fiskal agar kesejahteraan masyarakat di Indonesia lebih merata. Untuk mengoptimalkan desentralisasi fiskal, UU HKPD disusun berdasarkan 4 (empat) pilar yaitu ketimpangan vertikal dan horizontal yang menurun, penguatan *local taxing power*, peningkatan kualitas belanja daerah, dan harmonisasi belanja pusat dan daerah.

Dalam upaya menurunkan ketimpangan vertikal dan horizontal, UU HKPD merancang ulang pengelolaan transfer ke daerah dengan mereformulasi DBH, DAU, DAK, Dana Otonomi Khusus, Dana Istimewa dan Dana Desa dengan mengedepankan kinerja Daerah sehingga dapat memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan di Daerah sekaligus mendorong tanggung jawab Daerah dalam memberikan layanan publik. Alokasi DBH akan disusun dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan 1 (satu) tahun sebelumnya dalam rangka memberikan kepastian penerimaan bagi Daerah. Oleh karena itu, kinerja Daerah dalam memperkuat penerimaan negara akan diperhitungkan begitu pula perbaikan lingkungan yang terdampak kegiatan eksploitasi. Reformulasi DAU dilakukan melalui penghitungan kebutuhan fiskal berdasarkan unit cost dan target layanan, serta penghitungan kapasitas fiskal sesuai dengan potensi pendapatan Daerah sehingga lebih mencerminkan kebutuhan dan kapasitas fiskal secara riil.

Sementara itu, DAK akan lebih difokuskan pada upaya mendukung Daerah untuk mencapai prioritas nasional sekaligus menjaga pemerataan serta keseimbangan tingkat layanan antar daerah.

Menindaklanjuti uraian di atas, arah kebijakan dalam mendorong peningkatan pendapatan daerah untuk 5 (lima) tahun ke depan sebagai berikut:

1. Peningkatan sistem pemungutan dan sistem pengawasan dan penyesuaian regulasi yang berlaku.
2. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM pengelola pendapatan daerah.
3. Meningkatkan akurasi perhitungan potensi Pendapatan Asli Daerah yang dapat dijadikan sumber-sumber pendapatan baru.
4. Mendayagunakan kekayaan atau asset-aset yang *idle*, dengan melakukan kerja sama dengan pihak ketiga.
5. Koordinasi dan konsultasi yang intens Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.
6. Digitalisasi pengelolaan Pendapatan Daerah.

Agar arah kebijakan pendapatan selaras dengan kebutuhan belanja, maka dirumuskan arah kebijakan belanja daerah selama 5 (lima) tahun ke depan sebagai berikut:

1. Belanja Wajib dan Mengikat
 - a. Pemenuhan belanja pegawai sebesar 30% dilakukan dengan strategi pengadaan ASN melalui moratorium penerimaan pegawai ASN (*zero growth*) dan penerimaan Pegawai ASN di bawah jumlah pensiun tahun bersangkutan (*minus growth*).
 - b. Pemenuhan Target Standar Pelayanan Minimal (SPM).
 - c. Pemenuhan Kebutuhan Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar.
 - d. Pemenuhan Belanja *Mandatory Spending*.
2. Belanja Program Strategis Daerah
 - a. Belanja Prioritas pencapaian Visi, Misi dan Program Unggulan Kepala Daerah.
 - b. Pendanaan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.
 - c. Meningkatkan Penerimaan Daerah pada Sektor Pendapatan Asli Daerah.
 - d. Sinkronisasi Data terkait indikator-indikator untuk Peningkatan Dana Transfer kepada Pemerintah Kabupaten Sumedang.

3. Belanja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Lainnya.

Selain pendapatan dan belanja daerah yang telah dibahas sebelumnya maka perlu disusun arah kebijakan pembiayaan 5 (lima) tahun ke depan. Arah kebijakan pembiayaan harus terkait dengan penyelesaian permasalahan-permasalahan pembangunan daerah maupun pemanfaatan potensi-potensi daerah. Agar kebijakan pembiayaan daerah lebih terarah dan memberikan kontribusi yang positif di dalam upaya menggali alternatif sumber-sumber pembiayaan pembangunan, maka kebijakan penerimaan pembiayaan daerah diarahkan pengelolaan SiLPA daerah, sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah diarahkan untuk pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, cadangan dan pembiayaan pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah Serentak. Proyeksi kerangka pendanaan dapat di lihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.75 Proyeksi Kerangka Pendanaan Tahun 2026-2030

NO	URAIAN	BASELINE TAHUN 2024	PROYEKSI TAHUN				
			2026	2027	2028	2029	2030
4	PENDAPATAN DAERAH						
04.01	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	566.234.387.379,16	711.450.420.094,00	739.304.883.040,00	772.314.980.200,00	806.989.842.613,00	842.929.997.004,00
04.01.01	Pajak Daerah	242.774.020.628,00	339.733.678.370,00	352.775.346.684,00	368.525.335.946,00	385.018.836.185,00	402.291.771.620,00
04.01.02	Retribusi Daerah	300.554.502.830,00	353.399.303.636,00	367.672.282.938,00	384.757.405.819,00	402.763.483.051,00	421.260.115.640,00
04.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	11.880.680.700,00	11.690.649.690,00	12.497.003.418,00	12.556.988.435,00	12.617.273.377,00	12.677.859.744,00
04.01.04	Lain - Lain PAD yang Sah	11.025.183.221,16	6.626.788.398,00	6.360.250.000,00	6.475.250.000,00	6.590.250.000,00	6.700.250.000,00
04.02	PENDAPATAN TRANSFER	2.485.804.727.800,00	2.324.860.911.078,00	2.423.122.818.164,00	2.462.125.847.085,00	2.501.872.241.119,00	2.542.378.501.786,00
04.02.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.216.858.539.145,00	2.200.958.349.370,00	2.284.948.495.892,00	2.321.733.318.263,00	2.359.221.572.345,00	2.397.429.032.808,00
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	268.946.188.655,00	123.902.561.708,00	138.174.322.272,00	140.392.528.822,00	142.650.668.774,00	144.949.468.978,00
04.03	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	4.989.810.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	3.057.028.925.544,16	3.036.311.331.172,00	3.162.427.701.204,00	3.234.440.827.285,00	3.308.862.083.732,00	3.385.308.498.790,00
5	BELANJA						
05.01	Belanja Operasi	2.261.695.440.153,00	2.061.639.770.616,00	2.049.578.352.462,79	2.159.036.579.839,32	2.206.719.812.990,52	2.203.639.922.950,52
05.02	Belanja Modal	372.319.512.856,00	574.654.537.977,00	696.160.213.909,99	727.780.190.852,56	810.192.145.119,87	829.046.797.076,22
05.03	Belanja Tidak Terduga	1.262.126.299,00	20.000.000.000,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00
05.04	Belanja Transfer	447.760.897.239,00	445.155.173.650,00	468.471.164.412,40	479.009.546.585,91	489.912.281.339,81	501.117.001.155,31
	JUMLAH BELANJA	3.083.037.976.547,00	3.101.449.482.243,00	3.229.209.730.785,18	3.380.826.317.277,83	3.521.824.239.450,24	3.548.803.721.182,09
	SURPLUS/ (DEFISIT)	(26.009.051.002,84)	(65.138.151.071,00)	(66.782.029.581,18)	(146.385.489.992,83)	(212.962.155.718,24)	(163.495.222.392,09)
3.	PEMBIAYAAN						
3.1	Penerimaan Pembiayaan	96.681.587.819,18	50.000.000.000,00	40.000.000.000,00	30.000.000.000,00	60.000.000.000,00	10.000.000.000,00

NO	URAIAN	BASELINE TAHUN 2024	PROYEKSI TAHUN				
			2026	2027	2028	2029	2030
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	2.000.000.000,00	17.559.375.250,00	30.200.000.000,00	28.500.000.000,00	10.000.000.000,00	12.260.259.029,35
	Pembiayaan NETTO	94.681.587.819,18	32.440.624.750,00	9.800.000.000,00	1.500.000.000,00	50.000.000.000,00	-2.260.259.029,35
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	68.672.536.816,34	(32.697.526.321,00)	(56.982.029.581,18)	(144.885.489.992,83)	(162.962.155.718,24)	(165.755.481.421,44)

Sumber: BAPENDA dan BKAD Kabupaten Sumedang, 2025 (diolah)

2.3. Permasalahan dan Isu Strategis

2.3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan Pembangunan kabupaten Sumedang mencakup (1) Aspek Geografi, (2) Aspek Demografi, (3) Aspek Kesejahteraan Masyarakat, (4) Aspek Daya Saing dan (5) Aspek Pelayanan Umum. Aspek-aspek tersebut sesungguhnya saling berhubungan satu dengan lainnya. Permasalahan dari setiap aspek diidentifikasi berdasarkan gambaran umum wilayah dan hasil analisis capaian/kinerja penyelenggaraan pembangunan yang menyertakan catatan-catatan kondisi dan permasalahan dalam pembangunan Kabupaten Sumedang di periode pembangunan sebelumnya.

2.3.1.1. Aspek Geografi

a. Struktur Geologi

Sebagian besar wilayah Kabupaten Sumedang berada di daerah dengan topografi pegunungan dan berbukit yang memiliki ketinggian 25 sampai 1.667 meter di atas permukaan laut. Kabupaten Sumedang merupakan daerah dengan tingkat gerakan tanah rendah hingga tinggi. Luas kawasan rawan bencana gerakan tanah mencapai kurang lebih 21.671 (dua puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh satu) hektar tersebar di sebagian Wilayah Kabupaten. Struktur geologi Kabupaten Sumedang tersusun dari jenis batuan aluvial, produk gunung api muda, dan produk gunung api tua. Proses pelapukan yang terjadi pada batuan vulkanik akan menyebabkan terbentuknya batuan lapuk dan tanah yang bersifat residual. Sifat dari tanah residual sendiri yaitu mudah terlepas dan rentan akan terjadinya proses tanah longsor.

Disamping itu, Kabupaten Sumedang dilalui sejumlah sumber gempa patahan aktif yang berpotensi menyebabkan terjadinya gempa di antaranya Sesar Lembang, Sesar Baribis, Sesar Cicalengka, Sesar Cileunyi-Tanjungsari dan Sesar Tomo. Pada akhir tahun 2023 terjadi gempa bumi di wilayah Kabupaten Sumedang yang bersumber dari sesar baru yang aktif akibat dari aktivitas sesar aktif yaitu Sesar Cileunyi-Tanjungsari. Akibat gempa bumi tersebut ditemukan sesar aktif baru yang melewati Sumedang yaitu Sesar Cipeles (*Sumber BMKG, Tahun 2024*).

b. Ancaman Perubahan Iklim dan Cuaca Ekstrem

Bencana yang terjadi di Kabupaten Sumedang tidak lepas dari

pengaruh perubahan iklim dan cuaca ekstrim. Selain dipengaruhi struktur geologi, risiko bencana pergerakan tanah longsor semakin meningkat ketika curah hujan tahunan ekstrim diatas 3.000 mm atau saat fenomena la nina terjadi di wilayah Indonesia khususnya Jawa Barat. Bencana banjir juga kerap terjadi pada wilayah Kecamatan Cimanggung, Kecamatan Jatinangor dan Kecamatan Sumedang Selatan saat curah hujan tinggi.

Ketika terjadi perubahan iklim dengan curah hujan yang rendah atau saat adanya fenomena el nino beberapa wilayah di timur dan utara Kabupaten Sumedang rentan mengalami kekeringan. Sedangkan Kecamatan Cimanggung dan Kecamatan Jatinangor rentan kekeringan akibat daya dukung air yang telah melampaui ambang batas.

Bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor dan kekeringan menyebabkan kerugian pada sektor pertanian, ketahanan pangan dan permukiman. Perubahan iklim dan cuaca ekstrim juga menyebabkan timbulnya penyakit seperti Demam Berdarah Dengue (DBD), Diare, dan Infeksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA).

c. Alih Fungsi Lahan Khususnya Lahan Produktif

Kabupaten Sumedang merupakan salah satu daerah pertanian di Jawa Barat. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan memberikan kontribusi rata-rata 20% dari total PDRB Kabupaten Sumedang. Dalam dua dekade terakhir terdapat sejumlah proyek strategis nasional yang mengharuskan terjadinya alih fungsi lahan produktif di Kabupaten Sumedang. Proyek strategis nasional tersebut antara lain Bendungan Jatigede, Jalan Tol Cisumdawu, Bendungan Sadawarna, dan Bendungan Cipanas.

Meskipun alih fungsi lahan pertanian mencapai lebih dari 1.000 hektar, namun Pemerintah Daerah melakukan upaya untuk meningkatkan produktivitas produksi pertanian dan pencetakan sawah baru. Namun disisi lain alih fungsi lahan pertanian juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan peningkatan petani gurem di Kabupaten Sumedang.

Alih fungsi lahan produktif juga disebabkan urban sprawl atau penyebaran permukiman yang tidak terkendali dari Kawasan Metropolitan Bandung telah menyebabkan. Urban Sprawl akan berpotensi meningkat di wilayah yang berdekatan dengan Kawasan Segitiga Emas Rebana. Pembangunan permukiman di Kabupaten Sumedang juga mendesak ke lahan yang berada di lereng dengan kemiringan landai dan agak curam.

2.3.1.2. Aspek Demografi

Pertambahan penduduk yang eksponensial akan berdampak pada pembangunan kualitas sumber daya manusia, kesetaraan peluang dalam aktivitas ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup dan tekanan terhadap lingkungan hidup. Dengan proyeksi rata-rata pertambahan penduduk 0,65% hingga tahun 2045, diperlukan peningkatan dan pemerataan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, hunian, sanitasi, air bersih, pangan dan energi. Peningkatan pelayanan dasar perlu memperhatikan pada kelompok perempuan dan usia lanjut yang diproyeksi akan semakin meningkat.

Kabupaten Sumedang tetap memperoleh bonus demografi pada rentang usia 30-44 tahun. Bonus demografi akan menjadi modal dalam peningkatan perekonomian. Oleh karena itu infrastruktur konektivitas dan mobilitas masyarakat akan semakin dibutuhkan. Infrastruktur jalan harus dapat menghubungkan seluruh wilayah simpul-simpul perekonomian. Begitu pula jaringan telekomunikasi dan informasi yang dapat menjangkau seluruh wilayah.

Peningkatan kepadatan penduduk diproyeksikan masih berada di Kecamatan Jatinganor, Kecamatan Cimanggung, Kecamatan Tanjungsari dan Kecamatan Pamulihan. Kepadatan di empat kecamatan tersebut akibat peningkatan kebutuhan hunian di Wilayah Metropolitan Bandung. Kepadatan penduduk juga tetap terkonsentrasi di Kecamatan Sumedang Utara, Kecamatan Sumedang Selatan dan Kecamatan Cimalaka sebagai wilayah perkotaan Kabupaten Sumedang. Peningkatan kepadatan penduduk dapat terjadi di Kecamatan Buahdua, Kecamatan Ujungjaya dan Kecamatan Tomo sebagai dampak pengembangan Kawasan Segitiga Rebana.

Sistem pengelolaan sampah dan limbah perlu dipersiapkan sebagai eksternalitas pertambahan penduduk dan aktivitas sosial ekonominya. Pengelolaan sampah harus dimulai dengan mengurangi timbunan sampah dari rumah tangga dan pengolahan sampah di tingkat lingkungan. Aktivitas ekonomi yang meningkat juga perlu menjaga kawasan lindung dalam tata ruang sehingga tetap dapat mempertahankan keberlanjutan ekosistem dan keanekaragaman hayati.

2.3.1.3. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.3.1.3.1. Kesejahteraan Ekonomi

a. Kualitas Sumber Daya Manusia

Peningkatan kualitas sumber daya manusia tetap perlu diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan daerah tahun 2025-2029. Pemerintah daerah perlu mengoptimalkan peningkatan sumber daya manusia untuk menumbuhkan produktivitas. Pada aspek pendidikan, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Sumedang masih tergolong rendah. Pembangunan pendidikan selama dua puluh tahun terakhir menghantarkan capaian RLS tahun 2024 sampai dengan 8,74 tahun dan HLS tahun 2024 sampai dengan 13,02 tahun.

Adapun pengeluaran per kapita yang mengindikasikan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baru mencapai 11,59 juta rupiah pada tahun 2024.

Pembangunan manusia yang diukur melalui indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2024 mencapai 74,57 poin meningkat dibanding tahun 2023 yang mencapai 74,02 poin.

Selain itu Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Indikator IPG terdiri dari Angka Harapan Hidup (AHH) Perempuan, Angka Melek Huruf (AMH) Perempuan, Rata-Rata Lama Sekolah dan Sumbangan pendapatan. IPG Kabupaten Sumedang pada Tahun 2024 sebesar 96,22 poin, meningkat dibanding tahun 2023 yang mencapai 96,13 poin. Nilai IPG ini mengindikasikan bahwa di Kabupaten Sumedang pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan telah setara atau lebih baik jika dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Jawa Barat.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur terlaksananya keadilan dan kesetaraan gender. IDG mengukur partisipasi aktif perempuan pada kegiatan ekonomi dengan indikator persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja, keterlibatan perempuan di parlemen, dan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan, sehingga IDG dapat digunakan untuk mengukur pencapaian kapabilitas perempuan dalam berbagai bidang

kehidupan.

IDG Kabupaten Sumedang Tahun 2024 mencapai 76,99 poin, meningkat disbanding tahun 2023 yang mencapai 72,60 poin atau di atas Provinsi Jawa Barat dengan 72,76 poin. Hal ini mengindikasikan bahwa di Kabupaten Sumedang perempuan berperan lebih aktif dalam bidang ekonomi, partisipasi politik dan pengambilan keputusan dibanding tahun sebelumnya.

Capaian Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Sumedang tahun 2024 sebesar 0,217 poin masuk kategori ketimpangan rendah. Hal ini penurunan signifikan dibandingkan capaian tahun 2023 yang mencapai 0,438 poin. Nilai ini lebih rendah dari IKG Jabar sebesar 0,458 poin. Mencermati ketimpangan gender di Kabupaten Sumedang masuk katagori rendah, maka peran semua pihak dibutuhkan untuk terus mempertahankan dan meningkatkan upaya di berbagai dimensi agar perempuan memiliki kesempatan lebih untuk meningkatkan akses dan kapasitasnya.

Masih tingginya tingkat kemiskinan dan ketimpangan menjadi penyebab rendahnya kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Sumedang. Faktor lainnya adalah keterbatasan dan ketidaksetaraan akses pendidikan, kesehatan dan pekerjaan.

b. Penguatan Nilai-nilai Agama dan Budaya

Keseimbangan pembangunan selain pembangunan secara fisik tapi harus juga di perkuat dan mempertahankan nilai-nilai agama dan budaya. Hal tersebut akan membangun kekuatan secara mental dan spiritual sehingga dapat tercipta situasi yang kondusif dan harmonis dalam berbagai aspek pembangunan.

Selain dukungan regulasi, kondusifitas wilayah juga sangat berperan dalam mendukung iklim investasi dan pembangunan. Terkait hal tersebut, dalam rangka Penyelenggaraan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban terutama kerukunan umat beragama di Kabupaten Sumedang telah terbentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang berperan dalam menciptakan kehidupan keagamaan yang rukun, harmoni, damai, serta keseimbangan, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, bermasyarakat, bernegara maupun kehidupan beragama; dengan tujuan menguatkan Komitmen kebangsaan, memelihara toleransi, membangun tindakan anti kekerasan serta penerimaan terhadap tradisi.

Selain itu upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan budaya lokal menjadi hal yang sangat penting dalam upaya melestarikan budaya lokal di Kabupaten Sumedang.

Modernisasi yang semakin menguat di Tengah perkembangan global mengakibatkan berkurangnya menjaga nilai-nilai agama dan budaya. Hal ini tentunya perlu diperhatikan seiring dengan teknologi informasi yang berkembang cepat perlu dioptimalkan pemanfaatannya untuk menjaga nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan.

2.3.1.4. Aspek Daya Saing

2.3.1.4.1. Daya Saing Ekonomi Daerah

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sumedang masih lambat, hal tersebut dikarenakan Struktur ekonomi Kabupaten Sumedang sejak 2019 masih didominasi 3 sektor utama (Industri, Pertanian, dan Perdagangan), sehingga sangat rentan terhadap guncangan eksternal dapat di cirikan ketergantungan terhadap Industri pengolahan yang berkontribusi paling tinggi terhadap PDRB sebesar 19,32% pada Tahun 2024 yang terus menurun dari tahun 2023, dikarenakan Kawasan industri hanya di beberapa kecamatan yaitu Kecamatan Cimanggung dan Jatinangor. Sedangkan untuk sektor pertanian masih mendominasi tenaga kerja namun secara proporsi terus menurun sejak tahun 2020 dikarenakan profesi sebagai petani bukan menjadi harapan untuk generasi muda. Kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mencapai 19,27%. Sementara untuk sektor perdagangan berkontribusi sebesar 15,82%.

Dengan perkembangan teknologi yang semakin meningkat belum dapat berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat dan masih terbatasnya kapasitas fiskal menjadi salah satu faktor penyebab program pembangunan belum menjangkau seluruh wilayah dan terasa oleh seluruh lapisan masyarakat.

Berbagai sektor perekonomian masih belum dikembangkan optimal dalam rangka meningkatkan produktivitas perekonomian daerah. Sektor- sektor tersebut antara lain meliputi pariwisata, kelautan dan perikanan, ekonomi kreatif, serta industri pengolahan skala kecil (IKM/UMKM).

2.3.1.4.2. Daya Saing Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi pusat dari pembangunan sosial ekonomi karena mempunyai kemampuan dinamis dalam melakukan kegiatan dalam proses pembangunan. Salah satu indikator yang menentukan daya saing SDM adalah tingkat Pendidikan.

Rata-rata Lama sekolah (RLS) di Kabupaten Sumedang sampai tahun 2024 berdasarkan data dari BPS baru 8,74 tahun. Capaian ini masih lebih rendah dibanding RLS Provinsi Jawa Barat dan RLS Nasional. Sementara untuk Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Sumedang sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang terus meningkat. Harapan lama sekolah anak usia tertentu di Kabupaten Sumedang Tahun 2024 adalah 13,02 tahun. Lebih tinggi dibanding HLS Provinsi Jawa Barat namun masih berada di bawah HLS Nasional. Tingkat Pendidikan ini tentunya akan memperbesar peluang untuk anak mendapatkan pekerjaan di masa yang akan datang.

Salah satu indikator lainnya yang dapat menggambarkan daya saing sumber daya manusia adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Berdasarkan data BPS, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Sumedang pada tahun 2024 mencapai 69,24%, meningkat dibanding tahun 2023 yang mencapai 67,76%, artinya bahwa pada tahun 2024 menggambarkan semakin banyak penduduk usia kerja yang kembali mendapatkan pekerjaan.

2.3.1.4.3. Daya Saing Infrastruktur Wilayah

Kondisi jalan mantap merujuk pada kondisi jalan yang layak untuk dilalui kendaraan dan tidak mengalami kerusakan signifikan yang dapat menghambat kelancaran lalu lintas atau membahayakan keselamatan pengguna jalan. Suatu jalan dinyatakan dalam kondisi mantap apabila Permukaan jalan rata, tidak berlubang, dan tidak bergelombang secara signifikan meskipun ada sedikit kerusakan namun masih bisa dilewati dengan aman dan nyaman.

Jaringan jalan dalam kondisi mantap di Kabupaten Sumedang menunjukkan tren meningkat secara signifikan dari tahun 2020 hingga 2023. Puncak capaian terjadi pada tahun 2023 sebesar 88,24% yang menandakan keberhasilan dalam program pembangunan dan pemeliharaan jalan. Namun, pada tahun 2024 terjadi sedikit penurunan

menjadi 87,54%. Adanya penambahan ruas jalan baru serta kerusakan akibat bencana alam atau cuaca serta keterbatasan anggaran untuk pemeliharaan jalan menjadi salah satu faktor penurunan capaian.

Jembatan merupakan bagian penting dari infrastruktur transportasi yang berfungsi menghubungkan wilayah, mendukung konektivitas antar-wilayah, serta menunjang kelancaran distribusi barang dan mobilitas penduduk. Kondisi jembatan yang mantap mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pemeliharaan rutin, rehabilitasi, serta pembangunan jembatan baru salah satu upaya yang dilakukan agar jembatan berada dalam kondisi mantap sesuai dengan standar yang ditetapkan. Pada Tahun 2024 tercatat panjang jembatan dalam kondisi mantap adalah 2.819,08 meter.

Pengelolaan sistem irigasi yang efektif merupakan salah satu elemen penting dalam mendukung ketahanan pangan dan produktivitas pertanian di tingkat daerah. Daerah irigasi yang tertata dengan baik berperan besar dalam menjamin ketersediaan air bagi lahan pertanian secara merata, berkelanjutan, dan tepat waktu. Tiga pilar pengelolaan sumber daya air meliputi: konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.

Panjang jaringan irigasi di Kabupaten Sumedang mencapai 2.115.811 meter yang mengairi lahan seluas 30.069 Ha, dari luasan tersebut terbagi menjadi 3 (tiga) kondisi irigasi yang mengairi, yaitu irigasi dengan kondisi baik, rusak ringan dan rusak berat. Luasan areal yang terairi irigasi baik dengan kondisi baik, rusak ringan ataupun rusak berat sangat fluktuatif. Akan tetapi di Tahun 2024, areal yang diairi oleh irigasi kondisi baik semakin bertambah menjadi 21.469 Ha dari 21.108 Ha di tahun 2023. Hal ini akibat dari adanya rehabilitasi ataupun perbaikan kondisi irigasi yang rusak berat. Sehingga di tahun 2024 areal yang diairi irigasi dengan kondisi rusak berat mengalami penurunan dari 3.765 Ha menjadi 3.404 Ha. Begitupun dengan panjang irigasi primer dan sekunder yang mengalami peningkatan panjang irigasi dengan kondisi baik di tahun 2024.

Peningkatan kondisi irigasi baik dari sisi luasan areal maupun panjangnya sangat berpengaruh terhadap rasio jaringan irigasi yang telah mencapai 70,37 persen. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa sistem irigasi di Kabupaten Sumedang berfungsi optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi kegiatan pertanian serta pengelolaan sumber daya air.

Adapun sarana penyedia air untuk irigasi di Kabupaten Sumedang berasal dari 15 titik mata air dan 3 (tiga) buah bendungan, yaitu Bendungan Jatigede, Bendungan Cipanas dan Bendungan Sentig.

Infrastruktur perumahan dan permukiman menjadi sektor yang perlu mendapat perhatian karena menjadi urusan wajib pelayanan dasar dan bersifat konkuren dalam rangka penyediaan akses Masyarakat terhadap pelayanan dasar (air minum, sanitasi dan perumahan) untuk pemenuhan kebutuhan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Di Kabupaten Sumedang sampai tahun 2024 persentase cakupan pelayanan akses air minum layak baru 82,34% yang terus diupayakan melalui program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Untuk akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan di Kabupaten Sumedang sampai tahun 2024 realiasi baru mencapai 24,39%.

Dari sisi penanganan persampahan, Kabupaten Sumedang dibagi kedalam 3 (tiga) wilayah, yaitu:

1. Wilayah I Jatinangor meliputi 8 kecamatan;
2. Wilayah II Sumedang Kota meliputi 9 kecamatan; dan
3. Wilayah III Jatigede meliputi 9 kecamatan.

Sampah merupakan salah satu tantangan utama dalam upaya mewujudkan lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Permasalahan persampahan tidak hanya berkaitan dengan estetika kota, tetapi juga berdampak langsung terhadap kualitas lingkungan, kesehatan masyarakat, serta keberlanjutan sumber daya alam. Pengelolaan sampah merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga kebersihan, kesehatan, dan keberlanjutan lingkungan hidup. Dengan meningkatnya aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat, volume sampah yang dihasilkan juga terus bertambah setiap tahunnya. Jika tidak dikelola secara baik dan benar, sampah dapat menjadi sumber pencemaran lingkungan, penyakit, serta berbagai masalah perkotaan.

Pemerintah Kabupaten Sumedang terus melakukan pengelolaan sampah, sehingga jumlah sampah yang dikelola menunjukan tren positif. Pada tahun 2023 jumlah sampah yang dikelola meningkat 5.105,53 ton dari tahun sebelumnya menjadi 61.896,40 ton (35,41%). Pengelolaan sampah ini dilakukan melalui metode pengurangan sampah (pendaur ulangan sampah) dan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir. Meskipun

demikian Pengelolaan sampah di Kabupaten Sumedang masih belum terlaksana secara optimal, karena jumlah sampah yang tidak dikelola masih tinggi jika dibandingkan dengan jumlah sampah yang terkelola.

Untuk sektor perumahan, sejak tahun 2021 dikembangkan indikator Persentase Rumah Tangga Hunian Layak (RTHL) yang memiliki definisi operasional yakni rumah yang harus memenuhi keseluruhan aspek: 1) secara teknis memenuhi syarat ketahanan bangunan; 2) memiliki luas per kapita minimal 7,2 m²; 3) memiliki akses air minum layak; dan 4) memiliki akses sanitasi layak.

Capaian Persentase RTHL Kabupaten Sumedang 3 (tiga) tahun terakhir (2019-2023) terus menurun, Tahun 2022 pada angka 66,75 dan terakhir pada angka 59,63 di tahun 2023.

Sebelum tahun 2021 penyelenggaraan infrastruktur permukiman diukur dengan indikator cakupan pelayanan air minum, cakupan pelayanan air limbah, dan cakupan pelayanan persampahan. Namun sejak tahun 2021 indikator penyelenggaraan infrastruktur permukiman diubah untuk menyesuaikan dengan *Sustainable Development Goals (SDG's)*.

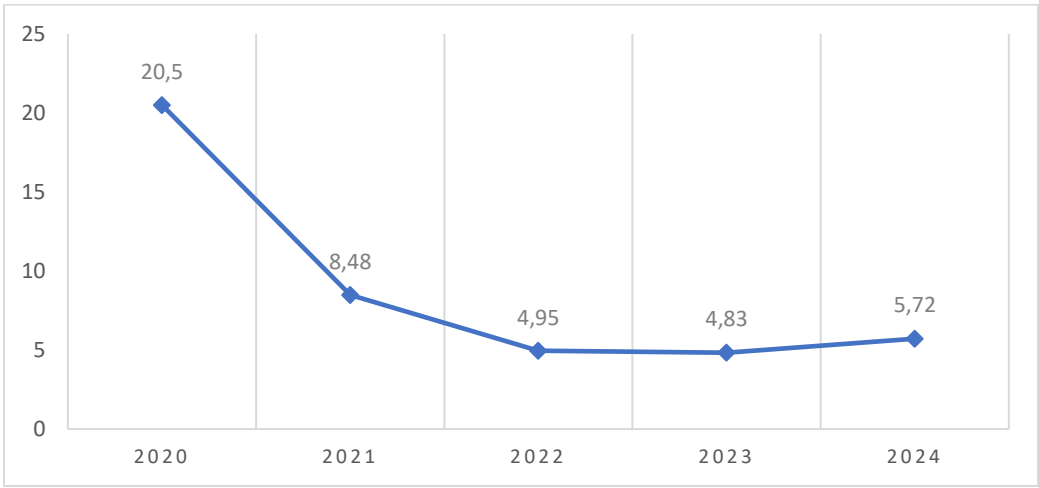
2.3.1.4.4. Daya Saing Iklim Investasi

Dalam Upaya mendorong daya saing Investasi di Kabupaten Sumedang saat ini sudah terbit Saat ini telah terbit Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif Kemudahan Investasi yang telah ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Sumedang Nomor 126 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif Kemudahan Investasi sehingga akan menjamin adanya kepastian hukum dan sebagai pedoman dalam Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi di Daerah.

Dengan adanya regulasi ini adalah untuk diharapkan akan meningkatkan Investasi di Daerah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kemampuan dan daya saing Daerah, mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Hasil analisis mengenai nilai ICOR (*Incremental Capital Output Ratio*) Kabupaten Sumedang dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan beberapa tren yang signifikan, terutama dampak dari pandemi COVID-19. Nilai ICOR terendah dalam 13 tahun terakhir dicapai tahun 2019, sebelum

terjadinya pandemi Covid-19. Angka ini menunjukkan efisiensi yang relatif baik dalam investasi untuk menghasilkan output ekonomi. ICOR yang lebih rendah menunjukkan bahwa investasi yang dilakukan pada tahun ini cukup efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.



Grafik 2.56 Tren ICOR Kabupaten Sumedang Tahun 2020-2024
(Sumber: Diolah Bapppeda Kab. Sumedang, 2025)

Lonjakan besar dalam ICOR pada tahun 2020 mengindikasikan penurunan efisiensi investasi yang drastis. Hal ini disebabkan oleh gangguan ekonomi yang parah akibat pandemi Covid-19. Investasi yang dilakukan selama tahun 2020 tidak mampu menghasilkan pertumbuhan output yang signifikan karena pembatasan aktivitas ekonomi, gangguan rantai pasok, dan penurunan permintaan agregat.

Seiring pemulihan pandemi Covid-19, penurunan ICOR menunjukkan bahwa efisiensi investasi terus membaik, mendekati tingkat pra-pandemi. Ini menandakan bahwa ekonomi Sumedang mulai stabil dan investasi mulai memberikan hasil yang lebih baik dalam hal pertumbuhan output. Pencapaian di tahun 2023 sebesar 4,83 mengindikasikan untuk meningkatkan 1 triliun rupiah pada PDRB maka diperlukan 4,83 triliun investasi. Angka ini menunjukkan bahwa efisiensi investasi pada tahun 2023 hampir kembali ke tingkat pra-pandemi (2019). Namun demikian pada tahun 2024 ICOR Kabupaten Sumedang Kembali mengalami kenaikan menjadi 5,72 artinya untuk meningkatkan 1 triliun rupiah pada PDRB maka diperlukan 5,72 triliun investasi. Hal ini menunjukkan perlunya berbagai upaya untuk perbaikan lebih lanjut dalam efisiensi investasi.

2.3.1.5. Aspek Pelayanan Umum

2.3.1.5.1. Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi pada hakekatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap system penyelenggaraan pemerintahan yang berujung pada perbaikan kinerja birokrasi yang menjadi suatu kebutuhan untuk menjawab tuntutan masyarakat yang semakin tinggi. Arah perubahan tersebut lebih diorientasikan pada upaya peningkatan kualitas regulasi, peningkatan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sehingga pada akhirnya nanti diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah. Terkait dengan hal tersebut, pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Sumedang diperlukan suatu instrument kebijakan yang dapat menjadi tolok ukur dari keberlanjutan pelaksanaan birokrasi tersebut.

Reformasi Birokrasi merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang berujung pada perbaikan kinerja birokrasi.

Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang telah menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020-2024, di mana dirasakan terdapat kekurangan pada aspek manajemen SDM, kepemimpinan, kebijakan, penentuan perundang-undangan, SOP, sistem penganggaran berbasis kinerja, tingkat transparansi dan akuntabilitas birokrasi, penyusunan perencanaan kinerja, tugas pokok dan fungsi, serta kewenangan dalam struktur organisasi.

Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2024 berdasarkan publikasi Kementerian PANRB, menembus angka 89,62. Demikian juga capaian indikator lainnya di tahun 2024, seperti Indeks Profesionalitas ASN (IPA) berdasarkan informasi dari BKN, menembus 83,75, ini pun sama menjadi salah satu yang terbaik di tingkat nasional. Terkait Indeks Pelayanan Publik, Kementerian PANRB memberikan apresiasi kepada Pemda Kabupaten Sumedang sebagai salah satu yang terbaik tingkat nasional dengan capaian sebesar 4,58. Untuk Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP dari BPKP, capaiannya cukup baik yakni ada pada level 3. Adapun untuk Kepatuhan Pelayanan Publik yang

disampaikan oleh Ombudsman, nilainya juga sangat baik mencapai 92,90. Sedangkan untuk hasil MCP yang dirilis KPK, nilainya menembus 91.

Indikator lainnya untuk melihat kinerja birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, dilihat dari capaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dipublikasikan Kementerian PANRB, dimana pada tahun 2024 mencapai 77,44, salah satu yang terbaik di tingkat Jawa Barat maupun Nasional.

Namun dengan Indeks Reformasi Birokrasi di Kabupaten Sumedang yang sudah cukup baik belum dapat berdampak langsung terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.3.1.5.2. Pelayanan Publik

Salah satu indikator yang dapat mengukur Tingkat kualitas pelayanan public di suatu Kabupaten/Kota adalah Indeks Pelayanan Publik yang pengukurannya dilakukan oleh Kementerian PAN RB. Nilai Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Sumedang berdasarkan data yang dirilis Kementerian PANRB untuk Tahun 2024 adalah 4,58. Nilai ini sedikit meningkat dibanding tahun 2023 yang mencapai 4,19 poin.

Selain Indeks Pelayanan Publik, hasil penilaian Lembaga Ombudsman selama 2 (dua) tahun terakhir menunjukkan kualitas pelayanan public yang semakin baik dilihat dari sisi kepatuhan dalam menerapkan standar pelayanan. Nilai Tahun 2023 hasil penilaian Ombudsman adalah 92,35 dengan kategori A. Untuk tahun 2024 nilai kepatuhan semakin baik pada angka 92,90 dengan kategori A (opini Kualitas Tertinggi).

Dari hasil penilaian tersebut belum berdampak terhadap optimalisasi pelayanan kepada masyarakat secara merata di setiap wilayah karena perlu dukungan sarana prasarana dan Sumber Daya aparatur pelayanan yang memadai.

2.3.1.5.3. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE dengan harapan menghasilkan pelayanan yang berkualitas dan optimal.

Nilai SPBE diperoleh dari akumulasi nilai masing-masing Domain penyangga SPBE. Pada Laporan Hasil Evaluasi SPBE Kabupaten Sumedang yang dihasilkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Untuk pencapaian yang lebih baik, perlu dilakukan proses evaluasi pada berbagai aspek tidak hanya dilakukan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik saja, tetapi juga dilakukan oleh Perangkat Daerah lain terkait aspek SPBE. Dokumen Arsitektur SPBE perlu diperbarui sesuai dengan format terbaru. Konten Arsitektur SPBE dan Peta Rencana harus diselaraskan dengan dokumen Renja Perangkat Daerah. Perlunya standar proses pengembangan aplikasi yang mengikuti kebutuhan namun tetap memenuhi dokumentasi SDLC. Diperlukan pemberdayaan pada Perangkat Daerah yang mempunyai peran masing-masing indikator SPBE sesuai tugas dan fungsi pokok serta diperlukan kerja Tim Koordinasi SPBE. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi perlu melibatkan Inspektorat sebagai PIC utama dan Manajemen SPBE perlu dilaksanakan pada semua aktivitas oleh semua Perangkat Daerah.

2.3.1.5.4. Inovasi Daerah

Kemajuan suatu daerah sangat ditentukan oleh inovasi yang dilakukan daerah tersebut. Untuk itu maka diperlukan adanya kreativitas daerah untuk meningkatkan daya saingnya. Berdasarkan banyak bukti empiris, inovasi merupakan faktor kunci untuk keberhasilan pencapaian daya saing sebuah daerah. Inovasi tidak dapat berkembang dengan sendirinya, melainkan harus didukung berbagai elemen lain. Dukungan nyata agar inovasi dapat berkembang dengan optimal adalah dengan membangun suatu sistem, yaitu sistem inovasi.

Batasan atau definisi tentang inovasi sangatlah beragam, tetapi secara umum, yang dimaksud dengan inovasi adalah penerapan atau implementasi dari sesuatu yang baru. Lebih luas lagi, inovasi merupakan tindakan penerapan ide-ide baru yang menciptakan nilai bagi organisasi bisnis, pemerintah, dan masyarakat. Bisa dikatakan bahwa inovasi merupakan (penerapan) cara yang lebih baik dan cerdas dalam melakukan sesuatu.

Seiring berjalannya waktu, perkembangan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terus meningkat. Hal tersebut ditandai dengan meningkatnya penyusunan inovasi di Kabupaten

Sumedang. Dalam kurun waktu 2021-2022 telah tersusun sebanyak 330 inovasi.

Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Sumedang dalam kurun waktu 3 tahun terakhir mengalami fluktuasi. Hal tersebut sangat dipengaruhi oleh kematangan inovasi yang dinilai oleh Kementerian Dalam Negeri melalui 2 aspek yakni aspek Satuan Pemerintah Daerah yang terbagi menjadi 3 variabel dan 15 indikator. Serta Aspek Satuan Inovasi terbagi menjadi 5 variabel dan 20 indikator. Pada tahun 2021 Kabupaten Sumedang memperoleh Indeks Inovasi sebesar 60,19 dan mengalami kenaikan pada Tahun 2022 dengan indeks 63,21. Sedangkan pada Tahun 2023 mengalami sedikit penurunan menjadi 60,06 point. Kenaikan yang signifikan pada tahun 2024 menjadi 73,23 point. Prestasi yang didapatkan tersebut diharapkan menjadi pondasi untuk memperoleh predikat kategori Kabupaten Terinovatif

Dari hasil pengukuran Indeks Inovasi Daerah (IID) tersebut dapat diketahui bahwa inovasi yang disusun oleh Perangkat Daerah di Kabupaten Sumedang, tingkat kematangannya belum optimal. Inovasi tersebut sudah berjalan dengan baik dilapangan, namun belum dilengkapi dengan data dukung administrasi.

Kinerja Pembangunan pada Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebelumnya telah menunjukkan hasil yang cukup baik, namun masih terdapat kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan itu dibuat. Tantangan dan permasalahan pembangunan kedepan dari seluruh aspek akan semakin besar, sehingga kita perlu meningkatkan kinerja pembangunan dan memanfaatkan berbagai potensi dan peluang yang ada. Beberapa permasalahan utama yang dihadapi Kabupaten Sumedang akan menjadi fokus dalam merumuskan berbagai kebijakan pembangunan dalam kurun waktu tahun 2025-2029 mendatang.

Berdasarkan uraian diatas, pada tabel 2.76 dapat dilihat skematis rangkuman permasalahan yang dihadapi Kabupaten Sumedang berdasarkan aspek-aspek sebagaimana telah dijelaskan. Selanjutnya dari berbagai permasalahan-permasalahan tersebut, dapat dikenali akar permasalahan pada setiap aspek.

Tabel 2.76 Kerangka Permasalahan Pembangunan Kabupaten Sumedang

No	Aspek Pembangunan Daerah	Permasalahan	Uraian Masalah	Akar Masalah
1.	Geografi	Struktur Geologi	Struktur geologi yang rawan bencana	Kabupaten Sumedang masuk dalam Kawasan gempa yaitu Sesar Lembang, Sesar Baribis, Sesar Cicalengka, Sesar Cileunyi-Tanjungsari dan Sesar Tomo serta sesar patahan baru (sesar cipeles).
				Secara geografis menjadi zona merah kawasan rawan longsor.
				Belum optimalnya kinerja penanggulangan bencana terutama pada aspek kelembagaan, efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana, kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana, dan sistem pemulihan pasca bencana.
		Ancaman perubahan iklim dan cuaca ekstrim	Bencana hidrometeorologi	Resiko Banjir masih tinggi di beberapa wilayah (Cimanggung, Jatinangor, Ujungjaya, Sumedang Utara dan Selatan).
				Tingginya ancaman kekeringan terhadap produktivitas pertanian.
				Masih rendahnya peningkatan kualitas lingkungan hidup, Adaptasi Perubahan Iklim dan Mitigasi Bencana.
		Alih fungsi lahan khususnya lahan produktif	Berkurangnya Lahan produktif	Proyek Strategis Nasional (Tol Cisumdawu, Waduk Jatigede, Waduk Sadawarna dan Waduk Cipanas) yang mengurangi lahan produktif.
				Masih Rendahnya mencetak lahan pertanian dan sawah baru.
				Masuk ke Kawasan strategis Nasional (Kawasan Rebana dan Cekungan Bandung).
				Peningkatan penyebaran Kawasan permukiman dan perumahan.

No	Aspek Pembangunan Daerah	Permasalahan	Uraian Masalah	Akar Masalah
				Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang belum mempertimbangkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan.
2.	Aspek Demografi	Pertumbuhan Penduduk	Laju pertumbuhan penduduk	Tingginya tingkat kelahiran.
				Penanganan penduduk usia tua belum optimal.
				Tingginya angka urbanisasi dari pedesaan ke perkotaan.
3.	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	Kesejahteraan Ekonomi	Kemiskinan	Tingginya angka kemiskinan di sektor pertanian antara lain pendapatan yang rendah, pola pertanian yang masih subsisten, penguasaan dan akses lahan yang makin terbatas, perubahan iklim, rendahnya kemampuan untuk melakukan pengolahan hasil pertanian, keterbatasan akses pasar, dan rantai niaga yang tidak efektif.
				Kebijakan yang belum menerapkan konsep <i>pro poor</i> , <i>pro job</i> , <i>pro growth</i> , dan <i>pro environment</i> dengan memperhatikan <i>community empowerment</i> .
				Masih ditemukan belum tepat sasaran terkait bantuan Sosial.
				Belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam.
		Ketimpangan		Ketimpangan di perkotaan lebih tinggi karena disparitas upah tenaga kerja yang lebih lebar dan diversitas jenis pekerjaan yang lebih beragam.
				Ketimpangan akses pemerataan pembangunan ekonomi.
				Kebijakan yang mengatur redistribusi pendapatan dan pajak belum menjadi instrumen yang mengurangi ketimpangan.
			Pengangguran	Produktivitas sumber daya manusia yang masih rendah.

No	Aspek Pembangunan Daerah	Permasalahan	Uraian Masalah	Akar Masalah
				Belum optimalnya sistem pengembangan lapangan kerja baru berbasis kewirausahaan (pelatihan wirausaha, pendampingan usaha, bantuan perijinan, akses jejaring pemasaran, analisa laporan keuangan, dan akses permodalan sesuai kebutuhan).
				Pertumbuhan angkatan kerja tidak seimbang dengan permintaan pasar kerja.
				Belum <i>link and match</i> nya antara Pendidikan dengan dengan kebutuhan pasar kerja.
				Keberpihakan pemerintah dalam pemberdayaan kaum disabilitas ke dunia kerja.
			Pertumbuhan Ekonomi	Masih tergantungnya pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian, industri pengolahan dan perdagangan.
				Masih rendahnya Peningkatan pemanfaatan dan pengelolaan Destinasi Pariwisata.
				Kinerja ekosistem ekonomi digital yang belum optimal karena belum meratanya infrastruktur digital dan literasi digital bagi pelaku usaha.
				Pertumbuhan ekonomi tidak diikuti pemerataan pendapatan terutama di sektor ekonomi kreatif. lapangan usaha menengah kecil dan mikro (UMKM).
		Kesejahteraan Sosial Budaya	Kualitas Sumber Daya Manusia.	Masih minimnya pelayanan dasar baik pelayanannya maupun infrastruktur penunjang layanan dasar.
				Masih kurangnya kualitas, distribusi dan kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan.
				Jangkauan akses ke pelayanan dasar terbatas karena ketersediaan sarana pendidikan dan kesehatan masih terbatas.

No	Aspek Pembangunan Daerah	Permasalahan	Uraian Masalah	Akar Masalah
				Tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap kesehatan mental.
				Masih Tingginya angka kematian Ibu dan Balita.
				Belum Optimalnya pelayanan menuju New Zero Stunting.
				Belum meratanya Pelayanan jaminan Kesehatan.
				Rendahnya partisipasi angkatan kerja Perempuan dibanding laki-laki karena aspek kesempatan kerja dan penghasilan.
				Indeks Ketimpangan Gender (IKG) kabupaten Sumedang masih pada kategori menengah kebawah.
			Penguatan Nilai-Nilai Agama dan Budaya	Rendahnya peran ekonomi budaya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, partisipasi pendidikan, serta ketahanan sosial yang dapat menciptakan sikap toleran dan rasa aman bagi masyarakat.
				Belum optimalnya peran nilai agama dalam membentuk nilai-nilai masyarakat, motivasi, dan kontrol sosial kehidupan bermasyarakat.
				Menurunnya nilai budaya lokal akibat perkembangan teknologi.
				Menurunnya tingkat mental para generasi muda dalam kehidupan.
4.	Aspek Daya Saing	Daya Saing Ekonomi	Lambatnya Pertumbuhan ekonomi	Belum meratanya infratraktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi.
				Proyek Strategis Nasional belum berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi.
				Masih rentannya sektor-sektor ekonomi akibat dampak dari resesi global maupun regional.

No	Aspek Pembangunan Daerah	Permasalahan	Uraian Masalah	Akar Masalah
				Belum optimalnya pengembangan ekonomi pada sektor ekonomi kreatif, Perdagangan, Industri padat modal berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, Pasar Induk dan UMKM.
				Belum optimalnya pemanfaatan potensi Sumber Daya alam.
		Daya Saing Sumber Daya Manusia	Capaian IPM Kabupaten Sumedang masih rendah.	Rendahnya partisipasi sekolah dan tingginya anak tidak sekolah.
				Belum optimalnya literasi digital dan pemanfaatan TIK dalam meningkatkan daya saing SDM.
				Kurangnya SDM yang kompeten sesuai kebutuhan pasar kerja.
				Masih Rendahnya usia kerja yang memperoleh pekerjaan.
				Pengeluaran per kapita masih rendah di bawah provinsi dan nasional.
		Daya Saing Infrastruktur Wilayah	Masih rendahnya kualitas dan pemerataan infrastruktur	Cakupan Pelayanan Irigasi belum memadai dengan luas lahan pertanian yang terairi irigasi teknis.
				Rumah Tangga yang memiliki akses air bersih dan bersanitasi layak masih rendah.
				Infrastruktur Konektivitas pendukung perekonomian belum merata.
				Kualitas permukiman dan Perumahan serta sarana prasarana pendukungnya masih rendah.
				Kecepatan penanganan terhadap kerusakan infrastuktur belum optimal.
				Perencanaan dan penerapan teknologi dalam pengelolaan sampah dan limbah belum optimal.
				Infrastruktur pengembangan Digital belum merata.

No	Aspek Pembangunan Daerah	Permasalahan	Uraian Masalah	Akar Masalah
				Masih rendahnya Penerapan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim.
				Belum meratanya Infrastruktur Ruang Publik terbuka hijau yang Ramah anak dan Lansia di setiap Kecamatan.
		Daya saing Investasi	Tingkat Investasi masih rendah	Penerapan Regulasi terkait investasi belum optimal.
				Belum optimalnya dukungan penyediaan infrastruktur wilayah yang dapat mendorong aksesibilitas terhadap lokasi investasi potensial.
5.	Aspek Pelayanan Umum	Reformasi Birokrasi	Belum Optimalnya penyelenggaraan pemerintah berintegritas	Sistem Tata Kelola pemerintahan belum terpadu.
				Sarana dan prasarana pemerintahan yang belum memadai di beberapa perangkat daerah
				Profesionalisme aparatur dikaitkan dengan beban kerja yang belum merata.
				Distribusi ASN belum sesuai kebutuhan organisasi.
				Kapasitas birokrasi yang belum adaptif dan responsive terhadap dinamika global dan tuntutan masyarakat.
				Akuntabilitas kinerja perangkat daerah belum optimal dan merata.
		Pelayanan Publik	Tingkat pelayanan publik belum optimal	Optimalisasi Pelayanan kepada masyarakat belum merata.
				Masih terdapat pengaduan masyarakat terkait pelayanan publik.
				Masih terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan publik.

No	Aspek Pembangunan Daerah	Permasalahan	Uraian Masalah	Akar Masalah
		Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Belum optimalnya dampak Penerapan SPBE terhadap Tata kelola Pemerintahan	Belum terpadu penerapan SPBE di setiap perangkat daerah. Sistem informasi perencanaan, penganggaran dan penatausahaan keuangan menggunakan SIPD sehingga tingkat sangat tergantung pada server pemerintah pusat (kemendagri).

Sumber: Analisis BAPPPEDA Kabupaten Sumedang, 2024

2.3.1.6. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Permasalahan pada bagian ini merinci permasalahan pembangunan pada setiap urusan pemerintah di Kabupaten Sumedang yang menjadi hak dan kewajiban setiap Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya dalam melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat, sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.77 Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
Pendidikan		
Belum meratanya pelayanan pendidikan yang memadai	Pelayanan Pendidikan belum Optimal yang didukung sarana, Prasarana dan Sumber Daya Manusia yg memadai	Literasi peserta didik yang telah mencapai kompetensi minimum mencapai 62,20% di Kabupaten Sumedang pada Tahun 2023 sehingga masih perlu peningkatan (Capaian Literasi)
		Masih rendahnya Numerasi peserta didik yang telah mencapai kompetensi mencapai 51,92% pada tahun 2023 di Kabupaten Sumedang (Capaian Numerasi)
		Karakter peserta didik pada jenjang SD sebesar 89,74% dan jenjang SMP 47,93% di Kabupaten Sumedang sehingga masih perlu dikembangkan (Capaian Surver Karakter)
		Persentase Sebaran Guru Sekolah Dasar (Kepala Sekolah, Guru Kelas, Guru PAI, dan Guru PJOK) masih rendah yaitu 50,30% (Jumlah Guru Ideal jenjang Sekolah Dasar sebanyak 6.313 orang, Keadaan Guru saat ini sebanyak 4.269 orang, sehingga kebutuhan guru saat ini sebanyak 2.044 orang)
		Persentase Sebaran Guru Sekolah Menengah Pertama (Kepala Sekolah, Guru PAI, Guru PKn, Guru B.Indo, Guru Math, Guru IPA, Guru IPS, Guru Ing, Guru SenBud/Muatan Lokal, Guru Prakarya, Guru BK, dan Guru PJOK) masih rendah yaitu 45,58% (Jumlah Guru Ideal jenjang Sekolah Dasar sebanyak 2.145 orang, Keadaan Guru saat ini sebanyak 1.484 orang, sehingga kebutuhan guru saat ini sebanyak 661 orang)
		Masih rendahnya Jumlah pendidik yang memiliki ijazah S1/D4, S2, dan S3 pada jenjang PAUD yaitu 37,16% dari total pendidik di seluruh satuan PAUD formal maupun nonformal (Proporsi Pendidik Berijazah Minimal S1/D4)
		Masih rendahnya Rasio Penilik PAUD DIKMAS yang saat ini 1:27 lembaga sedangkan rasio ideal adalah 1:10 lembaga
		Masih rendahnya Rasio Pengawas TK yang saat ini 1:20 satuan pendidikan sedangkan rasio ideal adalah 1:15 satuan Pendidikan
		Masih rendahnya Rasio Pengawas SD yang saat ini 1:14 satuan pendidikan sedangkan rasio ideal adalah 1:10 satuan Pendidikan

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
		Masih rendahnya Rasio Pengawas SMP yang saat ini 1:11 satuan pendidikan sedangkan rasio ideal adalah 1:7 satuan Pendidikan
		Rendahnya Persentase peserta didik yang sedang duduk di kelas 1 SD yang pada tahun ajaran sebelumnya mengikuti PAUD, yaitu 49,22% dari seluruh anak yang sedang duduk di kelas 1 SD (Angka Kesiapan Sekolah)
		Masih terdapat sekolah yang kekurangan RKB terutama di wilayah padat penduduk
		Masih terdapat bangunan sekolah yang rusak dan membahayakan siswa dan membahayakan warga sekolah
		Masih banyak sekolah sekolah yang kekurangan TIK dalam mendukung proses belajar mengajar contohnya dlam melaksanakan AKM. Serta msih terdapat sekolah sekolah yang tidak terjangkau oleh jringan internet
Kesehatan		
Pelayanan kesehatan yang belum merata di setiap wilayah	Pelayanan kesehatan belum optimal	Tingginya angka kematian Ibu dan angka kematian Balita (AKI/AKB)
		Masih kurangnya sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kesehatan
		Masih terdapat kesulitan akses ke pelayanan Kesehatan
		Jumlah tempat tidur di RSUD masih belum ideal
		Belum optimalnya UHC (<i>Universal Health Coverage</i>)
	Prevelensi Stunting yang masih perlu diturunkan menuju zero stunting	Masih terdapatnya kasus stunting
	Pengendalian penyakit menular dan tidak menular belum optimal	Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Menular (AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria) dan Tidak Menular
	Perilaku hidup bersih dan sehat belum optimal	Pola Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
Belum meratanya Pembangunan dan peningkatan infrastruktur konektivitas wilayah	Kondisi Jalan Kabupaten dan Jalan Strategis Masih kurang Memadai	Lebar Jalan Kabupaten dan jalan strategis rata- rata kurang memenuhi standar Jalan Kabupaten
		Akses Jalan menuju akses ke Pariwisata kondisi nya rusak sedang
		Akses Jalan menuju akses ke Pusat Kegiatan Perkotaan BUTOM GEDE kondisinya rusak sedang
		Kondisi Jalan dan Saluran Drainase Jalan Kabupaten yang terlintasi oleh akses jalur tol kondisinya rusak berat
		Jalan Kabupaten yang berada di perbatasan wilayah kondisinya masih rusak berat.
Rendahnya Sumber daya air	Cakupan Area Irigasi masih Rendah	Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air yang belum optimal
		Jaringan irigasi masih banyak mengalami kerusakan
		Banyak sungai dan sumber daya air lainnya yang mengalami kerusakan akibat bencana banjir dan longsor
		Banyaknya lokasi jaringan irigasi yang terdampak oleh bencana banjir/longsor
		Perubahan fungsi ruang pertanian menjadi perumahan/permukiman dan infrastruktur lainnya
	Ketersediaan Air Minum belum mencukupi secara merata	Penurunan Kapasitas sumber air baku karena alih fungsi lahan
		Berkurangnya kapasitas sumber air baku pada saat musim kemarau
		Kondisi WTP yang sudah tidak optimal
		Tingkat kebocoran air pada jalur transmisi dan distribusi yang masih cukup tinggi
		Bangunan SPAM perdesaan terbangun ada yang terbengkalai
		Pembinaan terhadap keberlanjutan kelompok masyarakat pengelola SPAM kurang optimal
	Rumah Tangga Bersanitasi	Perilaku masyarakat, kesadaran masyarakat dalam hidup sehat
		Masyarakat masih ada yang belum memiliki Sarana dan prasarana sanitasi (basis data Podes)
		Penyediaan tanah/lahan untuk membangun sanitasi komunal sangat sulit sehingga saat ini limbah domestik masih dibuang ke sungai

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
	Masih Rendah kondisi bangunan yang sesuai standar	Gedung pemerintahan belum memiliki PBG dan SLF
		Kurangnya pemeliharaan Gedung dan Fasilitas Umum
Belum Optimalnya Penataan Ruang untuk mendukung Proyek Strategis Nasional, Provinsi dan Kabupaten	Dokumen Tata Ruang belum sesuai dengan perubahan regulasi dan perkembangan pembangunan	Perlu dilaksanakan reviu Rencana Tata Ruang Wilayah dikarenakan banyaknya dinamika regulasi
		Investasi belum berjalan secara optimal dikarenakan baru ada 1 (satu) RDTR yang sudah terkoneksi dengan OSS
		Perkembangan alih fungsi lahan sehingga perlu adanya pemutakhiran data
		Perlu dilaksanakan pemutakhiran dokumen Rencana Detail Tata Ruang karena adanya peraturan perundangan terbaru mengenai penataan ruang
		Perlu disusunnya dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang, serta kebijakan untuk pengendalian pemanfaatan ruang
	Masih Rendahnya Ketaatan Penata Ruangan	Terdapat pembangunan yang dilaksanakan oleh pihak masyarakat dan dunia usaha belum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam rencana tata ruang, khususnya terkait dengan arahan pemanfaatan ruang sehingga perlu dilaksanakan pengendalian terhadap rencana tapak yang sudah disahkan
Masih rendahnya Pelayanan Jasa Kontruksi	Belum tertibnya pelayanan Jasa Konstruksi	Tenaga kerja Konstruksi belum bersertifikat
		Layanan Data dan Informasi Jasa Konstruksi pada SIMJAKON belum Optimal (Profil Tenaga Kerja Konstruksi dan BUJK, Pasar Jasa Konstruksi, Materal dan Peralatan Jasa Konstruksi, Pelatihan Jasa Konstruksi, Profil Kecelakaan Kerja proyek Jasa Konstruksi, Peraturan Jasa Konstruksi, Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan
		Penyedia Jasa Konstruksi belum mempunyai SBU
		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi belum Optimal.
Perumahan dan Kawasan Permukiman		
Belum merata dan terjangkau ketersediaan infrastruktur dasar, Perumahan dan pemukiman	Penanganan Infrastruktur Perumahan dan pemukiman belum optimal	Belum optimalnya penanganan limbah domestic, tidak berfungsinya IPLT, belum adanya operator khusus yang mengelola Air Limbah domestik, kesadaran masyarakat terhadap sanitasi masih rendah
		Belum Optimalnya Penanganan Kawasan Kumuh

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
		Belum adanya database Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) perumahan dan Permukiman yang tidak memenuhi standar
		Belum tersusunnya Dokumen RP3KP selaku dokumen perencanaan sektoral bidang perumahan permukiman serta legalisasinya (Perda/Perbup)
		Backlog Rumah di Kabupaten Sumedang Masih Tinggi
		Rasio Rumah Tidak Layak Huni masih rendah
Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat		
Belum Optimalnya Penguatan Penegakan regulasi Daerah	Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum belum optimal	Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan perundang-undangan daerah
		Belum efektifnya peran serta masyarakat dalam mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
		Terdapatnya Regulasi yang tumpang tindih
		Daya Dukung pembinaan dan pemberdayaan anggota Satlinmas kurang optimal. Banyak anggota Linmas yang telah berusia lanjut sehingga berpengaruh kepada kualitas SDM Satlinmas
		Kurang minatnya warga masyarakat pemuda/pemudi yang ingin menjadi anggota linmas
Sebagian besar wilayah yang rentan terhadap bencana dan perubahan iklim	Penanggulangan dan Penanganan Bencana belum optimal	Masih rendahnya kesadaran terhadap risiko bencana dan masih rendahnya pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.
		Terbatasnya kuantitas dan kualitas sumberdaya aparatur serta sarana prasarana penanggulangan bencana
		Belum memadainya Pemberdayaan riset dan teknologi terapan dalam pengurangan risiko bencana
		Kurangnya Sinkronisasi dan harmonisasi Sistem, Regulasi dan Tata Kelola Bencana
Sosial		
Pelayanan PPKS yang masih perlu ditingkatkan efektivitasnya	Penyelenggaraan kesejahteraan sosial masih belum Optimal	Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) belum akurat (Valid)
		Peran Potensi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial (PSKS) belum maksimal
		Belum terintegrasinya pelayanan kesejahteraan sosial tingkat desa
		Sarana dan prasarana pelayanan sosial belum memadai.

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
Tenaga kerja		
Masih terdapatnya <i>mismatch</i> dan miseducation antara kompetensi angkatan kerja dan kebutuhan pasar tenaga kerja	Kompetensi Pencari Kerja masih rendah	Program pelatihan yang disediakan oleh LPK swasta masyarakat belum sesuai dengan kebutuhan pasar kerja
		Masih rendahnya kuantitas dan kualitas lulusan BLK/LPK di dalam pasar kerja
	Tidak sebandingnya antara jumlah pencari kerja dengan ketersediaan kesempatan Kerja	Kurang efektivitasnya informasi pasar kerja
		Belum optimalnya Keppres 04 Tahun 1980 tentang wajib lapor lowongan pekerjaan
		Masih rendahnya kualitas dan kuantitas fasilitas komunikasi antara pekerja dengan pengusaha
		Masih rendahnya tingkat investasi di Kabupaten Sumedang
	Belum memadainya SDM Pendukung Ketenaga kerjaan	Tidak adanya tenaga fungsional mediator hubungan industrial
		Belum terwujudnya sinergitas antara Pemerintah dengan dunia usaha dunia industri
		Masih kurangnya tenaga SDM instruktur BLK yang kompeten
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
Responsif Gender	Rendahnya kualitas hidup perempuan	Masih rendahnya kualitas hidup, perlindungan dan kesejahteraan terhadap perempuan
		Belum tersedianya data terbaru mengenai organisasi wanita yang aktif
		Partisipasi perempuan di bidang politik, sosial, ekonomi, hukum masih rendah
		Masih rendahnya tingkat kesejahteraan anak
	Masih Adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	Perempuan dan anak masih menjadi sasaran utama tindak kekerasan
		Kurangnya sosialisasasi mengenai Lembaga-lembaga perlindungan terhadap kekerasan perempuan dan anak
Pangan		
Ketahanan pangan yang rentan tehadap disrupsi ekonomi	Belum optimalnya ketersediaan cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat	Belum meratanya ketersediaan pangan antar waktu dan antar wilayah.
		Tingginya potensi penduduk yang terkena rawan pangan; dan
		Lemahnya akses data dan informasi harga pasokan dan akses pangan.
		Intervensi/penanganan desa rawan pangan tidak tepat berada di lokasi desa yang termasuk kategori miskin tinggi.

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
		Belum mencukupinya produksi pangan dalam memenuhi ketersediaan konsumsi perkapita perhari dan diikuti tingginya laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Sumedang.
		Belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan pangan lokal.
		Belum optimalnya pemanfaatan pekarangan dimasyarakat sebagai sumber pangan bergizi dan pendapatan keluarga.
		Belum optimalnya sosialisasi keamanan PSAT kepada masyarakat, produsen, dan pelaku usaha.
		Kesadaran pelaku usaha untuk registrasi PSAT-PDUK masih rendah, karena kesadaran dan pemahaman keamanan PSAT masih rendah.
		Terbatasnya sarana dan prasarana untuk uji lab keamanan PSAT.
	Rendahnya diversifikasi pangan	Tingginya ketergantungan masyarakat terhadap pangan pokok beras.
		Masih rendahnya konsumsi penganekaragaman pangan masyarakat.
		Belum optimalnya kesadaran konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang dan aman, masih ada daerah yang terindikasi rawan pangan yang menimbulkan kurang gizi terutama gizi buruk bagi balita (stunting).
		Kurangnya Promosi Pola konsumsi beragam bergizi seimbang dan aman (B2SA) di tingkat masyarakat.
		Belum mencukupinya produksi pangan dalam memenuhi ketersediaan konsumsi perkapita perhari dan diikuti tingginya laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Sumedang.
	Pertanahan	
Belum optimalnya kinerja bidang Pertanahan	Proses Pengadaan lahan untuk kepentingan umum, penanganan sengketa tanah dan pemanfaatan Tanah belum optimal	Terkendalanya pembebasan lahan untuk fasilitas umum, fasilitas sosial dan sarana pelayanan umum lainnya
		Penanganan Dampak Sosial dan Lingkungan Pembangunan Tol CISUMDAWU, Bendungan Jatigede, dan Bendungan Sadawarna oleh Pemerintah Daerah Kabupaten
		Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah Eks HGU serta Sengketa Penguasaan Hutan, dan permasalahan LC Kelurahan Situ

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
Lingkungan Hidup		
Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang belum mempertimbangkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	Masih rendahnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Degradasi kualitas lingkungan hidup
		Peningkatan timbunan sampah
		Penyelenggaraan prasarana sarana persampahan belum optimal
Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		
Belum meratanya Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil belum optimal	Belum Optimalnya proses pelayanan Dokumen Pendaftaran Penduduk
		Jangkauan pelayanan yang sangat luas
		Ketersediaan blangko KTP dari Pusat terbatas alokasinya untuk daerah
		Belum optimalnya proses pelayanan Dokumen Pencatatan Sipil.
		Belum Optimalnya pencatatan peristiwa penting lainnya (kelahiran, kematian, perkawinan dll)
		Pemanfaatan data penduduk yang masih belum maksimal penggunaannya
		Akses ke Data Center sangat terbatas sehingga menghambat pelayanan Data Kependudukan
		Belum Optimalnya Penggunaan Layanan Daring
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
Masih rendahnnya jumlah Desa Mandiri	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam mendorong Pertumbuhan Perekonomian belum optimal	Belum optimalnya pengelolaan BUMDes
		Belum optimalnya penyediaan kebutuhan dan data untuk Desa Wisata dan Inovasi Desa
		Belum optimalnya penerapan teknologi tepat guna di desa
		Masih rendahnya pengawasan pelaksanaan pembangunan desa
		Belum optimalnya fasilitasi Perencanaan Pembangunan di desa dari mulai penyusunan RPJMDes, RKPdes, RAPBDes dan APBDes
		Kualitas Pengelolaan Desa Dalam Siskeudes, Pemanfaatan Potensi Desa dan Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD) sesuai Standar belum optimal
Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana		
Masih Tingginya Angka TFR	Belum optimalnya pengendalian penduduk melalui KB	Tingginya angka Pasangan Usia Subur Muda
		Struktur penduduk usia muda tinggi

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
		Masih cukup tinggi angka kelahiran
		Masih tingginya cakupan yang ingin ber-KB namun tidak terpenuhi (unmet need)
		Tingginya pernikahan dibawah usia 20 tahun
		Rendahnya kesertaan KB Pria
		Masih rendahnya capaian KB MKJ
Kemandirian keluarga peserta KB belum optimal	Persentase keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I masih tinggi	Rendahnya motivasi keluarga pra sejahtera dalam berwirausaha
		Belum optimalnya penyuluhan tentang pemberdayaan ekonomi terhadap keluarga Pra sejahtera
		Bantuan modal untuk usaha masih terkendala
Perhubungan		
Masih rendahnya kenyamanan, Keselamatan dan Ketertiban Pengguna Jalan.	Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan	Belum berhasilnya penanganan masalah kemacetan di simpul titik kemacetan Kabupaten Sumedang, yaitu simpangan pusat aktifitas di ibukota, Pasar dan Alun-alun Tanjungsari, pertigaan Cimalaka, dan Jatinangor
		Belum optimalnya pengelolaan parkir termasuk pengendalian parkir liar
		Belum optimalnya pelayanan terminal tipe C yang sudah ada dan Belum Adanya Terminal Barang sesuai kewenangan kabupaten
		Belum memadainya koordinasi terkait pembatasan angkutan barang yang melalui jalan arteri di Kabupaten Sumedang, sehingga berakibat pada kemacetan, polusi, rawan kecelakaan, dan lain-lain
		Belum memadainya Pengadaan dan pemeliharaan fasilitas lalu lintas dan perlengkapan jalan dalam mendukung Program Prioritas daerah
		Belum memadainya trayek angkutan penumpang antar kecamatan
		Minimnya sarana dan prasarana uji kendaraan
		Belum adanya pengawasan dan pengendalian keselamatan transportasi air Angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan (ASDP) dan dampak aktifitas Pariwisata di sekitar Waduk
		Belum adanya Dokumen Perencanaan Tatanan Transportasi Lokal sesuai perkembangan Tata ruang dan perubahan regulasi.
		Belum optimalnya sosialisasi keselamatan berlalu lintas

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
		Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kemampuan kualifikasi teknis dalam bidang Perhubungan
Komunikasi Dan Informatika		
Literasi Digital masih belum optimal	Layanan komunikasi dan informasi masih perlu peningkatan	Sistem pengendalian dan pengawasan komunikasi belum optimal;
		Kurangnya kewenangan dalam penanganan permasalahan komunikasi;
		Peran dan fungsi Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) maupun Lembaga Komunikasi Masyarakat lainnya dalam diseminasi informasi belum optimal;
		Belum optimalnya peran dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Perangkat Daerah dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik (KIP);
		Partisipasi masyarakat dalam pengaduan pelayanan publik masih rendah
		Lemahnya kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan pelayanan informasi serta keterbukaan informasi publik;
		Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) bidang komunikasi public
		Kurangnya kapasitas Back Up listrik untuk NOC (Network Operation Control);
		Kurangnya Infrastruktur pendukung NOC (Network Operation Control);
		Kurangnya Kapasitas Bandwidth Internet untuk mengcover kebutuhan Internet setiap OPD Kabupaten Sumedang;
		Kurangnya Pengembangan Keahlian Sumber Daya Manusia (SDM) yang bersertifikasi di bidang Informatika.
Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah		
Lambatnya pertumbuhan nilai ekonomi Koperasi dan UMKM	Melemahnya peran koperasi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat	Kurangnya pengetahuan sumber daya aparatur dalam pemanfaatan IT
		Rendahnya minat masyarakat untuk menjadi anggota koperasi
		Tingginya persaingan dengan lembaga keuangan lainnya
		Terbatasnya permodalan dalam pengembangan koperasi
		Lemahnya manajemen koperasi
		Rendahnya tingkat kewirausahaan koperasi

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
	Peningkatan UMKM belum optimal	Rendahnya pemanfaatan IT oleh pelaku usaha
		Database UMKM belum tersedia secara akurat
		Kualitas produk usaha mikro belum bisa bersaing
		Terbatasnya pelaku usaha yang dapat mengakses permodalan
Penanaman Modal		
Belum Optimalnya Iklim Investasi Daerah	Jumlah penanaman modal di Kabupaten Sumedang belum sebanding dengan potensi investasi	Belum adanya peta data potensi investasi unggulan daerah yang lengkap sesuai dengan kondisi daerah
		Belum adanya data potensi investasi yang sudah diolah dan dikembangkan menjadi peluang investasi melalui analisis
		Belum adanya data peluang investasi unggulan daerah (sudah dilakukan analisis) sebagai bahan promosi
		Belum adanya dokumen strategi promosi investasi sebagai bahan atau acuan pelaksanaan kegiatan promosi
Kepemudaan Dan Olahraga		
Masih Rendahnya Peran Pemuda Dalam Pembangunan	Masih rendahnya peran dan partisipasi pemuda dalam mendorong percepatan pembangunan	Belum optimalnya pembinaan dan pengembangan kepemudaan
		Belum maksimalnya dukungan pelaksanaan penyelenggaraan program dan kegiatan kepemudaan
		Belum maksimalnya sarana dan prasarana kepemudaan
		Rendahnya daya kreasi generasi muda
		Masih tingginya kenakalan remaja dan penyalahgunaan obat terlarang
		Rendahnya apresiasi dan penghargaan bagi pemuda maupun kelompok kepemudaan berprestasi
	Masih minimnya jumlah atlet berprestasi	Belum maksimalnya prestasi keolahragaan di event-event Kejuaraan regional Jawa Barat maupun Nasional
		Rendahnya partisipasi masyarakat berolahraga
		Belum optimalnya pembinaan dan pengembangan keolahragaan
		belum maksimalnya dukungan pelaksanaan penyelenggaraan program dan kegiatan keolahragaan

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
Masih rendahnya prestasi olahraga	Masih minimnya jumlah atlet berprestasi	Pembinaan maupun pembibitan belum terencana dengan baik
		Kurangnya penyelenggaraan kegiatan kejuaraan
		Rendahnya apresiasi dan penghargaan bagi atlet maupun tenaga keolahragaan berprestasi
		Belum maksimalnya prestasi keolahragaan di event-event Kejuaraan regional Jawa Barat maupun Nasional
		Rendahnya partisipasi masyarakat berolahraga
		Belum optimalnya pembinaan dan pengembangan keolahragaan
		belum maksimalnya dukungan pelaksanaan penyelenggaraan program dan kegiatan keolahragaan
		Belum optimalnya Pembinaan maupun pembibitan para atlet
		Kurangnya penyelenggaraan kegiatan kejuaraan
Statistik	Masih rendahnya kualitas Data dan realtime	Rendahnya apresiasi dan penghargaan bagi atlet maupun tenaga keolahragaan berprestasi
		Masih kurangnya dukungan fasilitas sarana dan prasarana olahraga
		Masih kurangnya pemahaman terhadap Pengelolaan Data dari setiap produsen data
		Masih banyak data yang belum disampaikan oleh Produsendata kepada walidata
		Beberapa data yang dikumpulkan masih belum memenuhi prinsip Satu Data Indonesia dan dimensi kualitas data
		Masih adanya perbedaan konsep dan defisini data antara produsen data
		Masih terdapat kesalahan dalam Proses input data dari produsen data
		Masih banyak Perangkat Daerah selaku produsen data yang belum melakukan Updating data secara periodik sesuai dengan waku rillis data
Persandian	Masih Rendahnya Pengamanan Skor Informasi daerah	Masih kurangnya SDM dalam pengelolaan data
Pengamanan Informasi daerah		Pemahaman pengguna aplikasi dalam aspek keamanan informasi masih renda
		Belum optimalnya penggunaan tahapan dalam pembangunan sistem elektronik yang ada

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
		Sarana prasarana masih belum memadai, seperti: laptop, pc, lisensi aplikasi pentest, lisensi windows, lisensi antivirus
		Kurangnya alat pendukung dalam menjalankan monitoring keamanan informasi
Kebudayaan		
Belum optimalnya pemanfaatan kebudayaan daerah dalam menunjang pariwisata	Masih rendahnya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan	Masih minimnya sarana dan prasarana pendukung kebudayaan
		Masih rendahnya pembinaan terhadap pelaku seni budaya
		Pelaksanaan event seni budaya/promosi budaya masih terbatas
		Pelestarian situs cagar budaya belum optimal (masih banyak yang tidak terpelihara)
		Belum optimalnya sosialisasi dan implemntasi Sumedang Puseur Budaya Sunda
Perpustakaan		
Masih Rendahnya Indeks Literasi	Sarana dan prasarana perpustakaan belum memadai	Koleksi bahan pustaka sangat terbatas sehingga belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat
		Jumlah maupun kualitas tenaga pengelola perpustakaan belum memadai
		Layanan perpustakaan belum dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pemustaka
		Masyarakat Kabupaten Sumedang banyak tersebar di desa-desa, sehingga akses terhadap pelayanan perpustakaan daerah sangat terbatas, sementara perpustakaan desa kurang berkembang
		Jangkauan perpustakaan keliling sangat terbatas
		Minat baca masyarakat masih rendah
Kearsipan		
Rendahnya Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	Belum adanya kesamaan persepsi di setiap PD terhadap kearsipan	Masih rendahnya pemahaman aparatur terhadap kearsipan
		Belum adanya peraturan yang mengatur tentang jadwal retensi arsip
		Belum adanya fitur pada aplikasi Super e-Office untuk penyusutan arsip
		Masih rendahnya pemeliharaan kearsipan
Kelautan Dan Perikanan		
Belum optimalnya peningkatan produksi perikanan	Belum optimalnya pemanfaatan potensi perikanan	Belum optimalnya pemanfaatan lahan untuk budidaya perikanan
		Penggunaan pakan yang tidak tepat

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
		Masih rendahnya Pengetahuan, Sikap, dan Keterampilan Sumber Daya Manusia Perikanan terutama untuk Kelompok Perikanan
		Belum adanya pusat atau sentra produksi perikanan dan pengolahan, dan belum terpetakannya potensi antar wilayah
		Perubahan iklim dan cuaca
		Belum optimalnya penerapan teknologi perikanan
		Belum optimalnya pemanfaatan Potensi Perairan Umum Daratan (PUD)
		Belum adanya orientasi bisnis dalam usaha budidaya, penangkapan dan pengolahan perikanan
		Belum optimalnya pengelolaan data dan informasi perikanan
		Belum optimalnya kelembagaan perikanan
		Rendahnya kualitas benih ikan
	Konsumsi ikan masyarakat yang masih rendah	Masih rendahnya tingkat konsumsi ikan di masyarakat, sebagai akibat terdapatnya beberapa masyarakat yang tidak menyukai konsumsi utuh ikan, sehingga diperlukan upaya diversifikasi olahan perikanan dan Optimalisasi Gerakan Makan Ikan (GEMARIKAN)
	Pasar yang tidak efisien	Kurangnya akses ke pasar
		Harga yang tidak stabil
Pariwisata		
Rendahnya kunjungan wisata	Sarana prasarana pariwisata masih kurang memadai	Akses menuju destinasi wisata kurang memadai
		Terbatasnya promosi pariwisata seni dan budaya
		Belum adanya galeri ekonomi kreatif dan sentra kerajinan
		Masih rendahnya atraksi pariwisata
		Belum tersedianya amenities dilokasi wisata
		Masih rendahnya kualitas SDM bidang kepariwisataan
	Sub sektor ekonomi kreatif belum berkembang	Pengetahuan masyarakat dan ASN mengenai ekonomi kreatif masih kurang
		Kurangnya kesadaran akan pentingnya hak kekayaan intelektual (HKI)
		Masih kurangnya infrastruktur serta sarana dan prasarana ekonomi kreatif

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
		Belum terbentuknya ekosistem ekonomi kreatif
		Peran komunitas pelaku ekonomi kreatif belum maksimal
		Kualitas SDM ekonomi kreatif masih kurang
		Masih kurangnya event-event untuk apresiasi dan promosi ekonomi kreatif
		Masih kurangnya konsumsi dan pemanfaatan produk ekonomi kreatif
		Belum terciptanya sistem distribusi produk ekonomi kreatif yang efektif
		Forum komunitas pelaku ekonomi kreatif belum terbentuk sampai tingkat kecamatan
Pertanian		
Belum optimalnya pengelolaan sumber daya pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan dalam mendukung peningkatan produksi, produktivitas serta peningkatan nilai tambah	Pasar yang tidak efisien	Kurangnya akses ke pasar
		Ketidakadilan dalam pembagian keuntungan dirantai pasokan atau monopoli
	Kurangnya pengetahuan dan keterampilan dalam pengolahan usaha pertanian	Rendahnya kualitas SDM petani
		Rendahnya regenerasi petani.
		Rendahnya kapasitas petani milenial
		Terbatasnya jumlah SDM penyuluh pertanian; dan
		Masih rendahnya kompetensi SDM penyuluh.
	Produksi komoditas pertanian yang rendah	Ketergantungan petani terhadap pupuk dan pestisida non organik
		Sulitnya akses terhadap pupuk
		Biaya produksi yang tinggi
		Terbatasnya penyebaran dan penyediaan benih unggul bersertifikat
		Belum optimalnya penanganan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)
		Rendahnya dukungan sarana prasarana dalam rangka penerapan budidaya pertanian yang ramah lingkungan.
		Rendahnya penerapan Good Agricultural Practices (GAP) dalam budidaya pertanian yang baik, Good Handling Practices (GHP) dalam penanganan pascapanen yang baik, dan Good Manufacturing Practices (GMP) dalam sistem yang memastikan bahwa produk secara konsisten diproduksi dan diawasi sesuai dengan standar kualitas.

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
		Belum optimalnya pemanfaatan potensi lahan (Pemetaan Cluster Pertanian).
		Kurangnya ketersediaan infrastruktur dan alat mesin pertanian untuk mendukung peningkatan Indeks Pertanaman (IP), Perluasan Areal Tanam Baru (PATB) dan Peningkatan Mutu Intensifikasi (PMI) serta percepatan tanam baik kuantitas maupun kualitas.
		Teknologi bidang pertanian dan Digitalisasi Pertanian masih rendah
		Alih Fungsi Lahan Pertanian.
		Minimnya Akses terhadap permodalan.
		Perubahan iklim dan cuaca yang ekstrim
	Persaingan dengan produk impor	Rendahnya kualitas produk pertanian
Belum optimalnya pengelolaan sumber daya peternakan dalam mendukung peningkatan populasi, produksi sumber protein hewani serta peningkatan nilai tambah	Rendahnya nilai tambah produk pertanian	Terbatasnya Pengolahan Hasil Pertanian dan promosi produk pertanian
		Kurangnya investasi dalam teknologi bidang pertanian
	Pasar yang tidak efisien	Kurangnya negosiasi harga
		Kurangnya akses ke pasar
		Tidak adanya jaminan kualitas
	Persaingan yang tidak sehat	Struktur pasar yang tidak sehat
		Belum optimalnya kelembagaan peternakan.
	Kurangnya akses teknologi modern	Rendahnya pengetahuan dan keterampilan SDM peternak terhadap teknologi dan inovasi.
		Belum optimalnya pemanfaatan teknologi usaha peternakan.
	Rendahnya produksi peternakan	Semakin berkurangnya lahan untuk budidaya peternakan dan sumber pakan sebagai akibat pembangunan proyek strategis nasional, pemukiman, dan pembangunan lainnya
		Usaha budidaya peternakan sebagian besar masih merupakan usaha sambilan / belum berorientasi bisnis
		Masih kurangnya sarana pendukung usaha peternakan seperti Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan, Sumber Air Peternakan, Puskesmas / Klinik Hewan, Pusat Promosi, Instalasi Pembibitan, Kawasan Peternakan dan sebagainya.

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
		Harga pakan dan bahan baku pakan tidak sebanding dengan hasil yang diperoleh, dimana pakan merupakan komponen terbesar biaya produksi peternakan.
		Masih adanya serangan wabah penyakit ternak
		Masih terbatasnya akses sarana dan prasarana produksi peternakan.
	Rendahnya nilai tambah produk peternakan	Rendahnya kualitas pakan ternak
		Belum optimalnya pengelolaan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
		Kurangnya manajemen peternakan yang baik
		Biaya produktifitas yang tinggi.
	Pasar yang tidak efisien	Kurangnya akses ke pasar
		Harga yang tidak stabil
Kehutanan		
Belum Optimalnya Perekonomian masyarakat sekitar Taman Hutan Rakyat	Kreativitas ekonomi masyarakat sekitar penyangga Tahura belum optimal	Kurang efisiensinya pengelolaan Taman Hutan Rakyat (Tahura);
		Hutan Kota belum dikembangkan
Perdagangan		
Usaha Perdagangan yang kurang berkembang	Rendahnya pemanfaatan teknologi informasi dalam Pengembangan sektor perdagangan	Belum adanya kesepakatan kerjasama antara distributor, koperasi dan pelaku usaha perdagangan untuk melakukan sistem jaringan usaha
		Kurang fahamnya masyarakat untuk melakukan perdagangan secara online
	Revitalisasi Pasar Rakyat	Belum terwujudnya kesepakatan antara warga pasar dengan Pemerintah Daerah dalam rencana pembangunan pasar
		Masih terdapatnya lahan-lahan belum bersertifikat yang akan diperuntukan pembangunan pasar
		Belum adanya data valid mengenai perdagangan besar dan eceran yang tersebar di Kabupaten Sumedang
	Akses permodalan	Kurangnya informasi permodalan bagi pelaku usaha
	Kurangnya infrastruktur yang memadai	Rendahnya kualitas sarana dan prasarana perdagangan

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
Perindustrian		
Laju Pertumbuhan Industri pengolahan masih rendah	Kurangnya tingkat investasi	Kurangnya akses terhadap permodalan
		Kondisi ekonomi yang kurang stabil
		Biaya produksi yang tinggi
		Kurangnya dukungan infrastruktur
		Sertifikasi hasil industri belum menyeluruh
		Masih kurangnya promosi peluang investasi
	Kurangnya penerapan teknologi dan inovasi	Kurangnya SDM yang terampil
		Resistensi dari pekerja
	Kurangnya pemasaran	Masih kurangnya promosi produk IKM
Belum optimalnya pemasaran produk IKM		
Transmigrasi		
Belum optimalnya jumlah transmigran yang ditempatkan	Keterbatasan kuota penempatan transmigrasi	Keterbatasan kuota penempatan transmigrasi
		Belum tersedianya lahan untuk transmigrasi
		Masih rendahnya kuantitas SDM bidang transmigrasi
		Belum tersedianya SDM fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
Perencanaan		
Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran	Terdapat Beberapa Program pada Perencanaan yang tidak terdanei pada Penganggaran	Belum optimalnya kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan
		Belum semua Perangkat Daerah memiliki tingkat capaian pembangunan yang berkategori baik
		Perencanaan belum optimal sesuai dengan hasil evaluasi pembangunan
		Kurangnya pemahaman akan kedudukan perencanaan pembangunan
Keuangan		
Belum sebandingnya antara pendapatan dan kebutuhan	Kebutuhan Belanja tidak sebanding dengan pendapatan	Masih rendahnya penerimaan pendapatan daerah
		Masih rendahnya kualitas dokumen keuangan daerah

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
Pendapatan Daerah		
Belum Optimalnya Pendapatan Asli Daerah dalam mendukung Pembangunan Daerah	Pengelelolaan Potensi PAD dan Pajak Daerah belum optimal	Belum optimalnya pelayanan pajak
		Kualitas (akurasi dan kecepatan) verifikasi masih rendah
		Belum adanya dukungan sistem yang terintegrasi
		Kualitas layanan pendataan masih rendah
		Belum adanya implementasi regulasi yang memberi efek jera kepada wajib pajak yang tidak memberikan data sesuai prosedur
		Masih lemahnya analisis pendataan dan penilaian
		Belum Optimalnya pemutakhiran data potensi pajak daerah
		Belum memiliki data potensi pendapatan daerah
		Kesadaran masyarakat dalam kewajiban pajak masih rendah
		Belum dilakukan penerapan sanksi kepada wajib pajak yang melanggar
		Ketersediaan data piutang yang tidak valid
		Belum adanya sistem terpadu untuk mendorong peningkatan retribusi
		Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung pengelolaan pajak daerah secara elektronik
		Pembayaran pajak belum tepat waktu;
		Belum optimalnya penanganan piutang PBB Perdesaan dan Perkotaan
		Belum optimalnya jangkauan pelayanan Pajak Daerah bagi masyarakat di pelosok Kabupaten Sumedang
Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan		
Belum Optimalnya Indeks Profesionalitas ASN	Kualitas dan Kompetensi ASN belum Merata	Belum optimal dan terpetakannya penempatan pegawai berdasarkan analisis jabatan, kompetensi, kualifikasi dan kebutuhan organisasi secara riil
		Tambahan Penghasilan Pegawai masih berdasarkan indikator kinerja yang disusun berdasarkan perilaku dan kehadiran kerja tanpa target kinerja
		Masih kurangnya aparatur yang memiliki kualifikasi teknik serta distribusi PNS yang belum merata secara kualitas dan kuantitas

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
		Belum optimalnya pengevaluasian kinerja dan disiplin pegawai yang terintegrasi
		Masih kurangnya profesionalisme sumber daya aparatur dalam melaksanakan tugas pelayanan yang baik, bersih dan melayani
		Beberapa pelayanan administrasi kepegawaian di BKPSDM belum seluruhnya berbasis teknologi informasi
		Belum optimalnya dan terintegrasinya pemanfaatan dan penerapan teknologi informatika dalam aplikasi sistem informasi manajemen kepegawaian
Penelitian dan Pengembangan		
Hasil penelitian belum seluruhnya diimplementasikan	Dokumen Kajian belum optimal menjadi dasar pelaksanaan kegiatan	Terbatasnya fungsional peneliti
		Belum optimalnya penyebarluasan informasi arah rencana penelitian dan pengembangan
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
Sekretariat Daerah		
Belum optimalnya Pelaksanaan Perumusan Kebijakan, Pengoordinasian Perangkat Daerah dan Pelayanan Admintratif	Pelaksanaan Perumusan Kebijakan,Pengoordinasian Perangkat Daerah dan Pelayanan Admintratif belum optimal yang didukung sarana prasarana dan sumber daya manusia yang memadai	- Bagian Tata Pemerintahan
		Belum optimalnya pembinaan terhadap kecamatan dan kelurahan
		Masih rendahnya respon OPD dalam penyusunan LKPJ dan LPPD
		- Bagian Hukum
		Belum tercapainya target program pembentukan Perda sesuai dengan yang ditetapkan
		Belum tersedianya pejabat fungsional perancang peraturan perundang-undangan, penyuluh hukum dan pustakawan
		- Bagian Organisasi
		Masih adanya OPD yang belum menyusun dan menerapkan SOP dan standar pelayanan
		Belum adanya evaluasi kelembagaan, analisa jabatan dan analisa Beban kerja sesuai dengan SOTK yang baru
		Masih rendahnya respon dan pemahaman OPD terhadap dukungan data penyusunan LAKIP
		Belum tersedianya sumber daya aparatur yang memenuhi kompetensi jabatan analis dan penyusun
		- Bagian Kerjasama

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
		Belum adanya regulasi daerah yang mengatur kerjasama daerah
		Belum adanya SOP yang mengatur administrasi kerjasama OPD
		Rendahnya respon OPD terkait potensi kerjasama daerah yang bisa ditindaklanjuti
		Kurangnya sumber daya aparatur yang memenuhi kompetensi sesuai tupoksi
		Belum tersedianya data potensi kerjasama
		- Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
		Masih adanya BUMD dengan status Tidak Sehat
		Masih belum adanya sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi analisis ekonomi daerah
		Tingkat responsif pelayanan informasi analisa ekonomi daerah yang belum optimal
		Belum adanya SOP yang mengatur sistem informasi ekonomi daerah
		- Bagian Kesejahteraan Rakyat
		Belum optimalnya koordinasi di Bidang Kesejahteraan Rakyat
		Masih adanya kegiatan-kegiatan teknis
		Masih belum adanya sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi
		- Bagian Administrasi Pembangunan
		Masih rendahnya dukungan data pelaksanaan pembangunan dari OPD terkait
		Belum optimalnya pelayanan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan yang diselenggarakan OPD
		- Bagian Pengadaan Barang/Jasa
		Belum tersedianya pejabat fungsional PPBJ
		Tingkat responsif pelayanan yang masih belum optimal
		Belum terpenuhinya standar minimal sarana dan prasarana PBJ
		Belum optimalnya layanan informasi pengadaan barang dan jasa
		- Bagian Umum
		Belum tersedianya SOP pelayanan kerumah tanggaan Setda dan pimpinan daerah
		Tingkat responsif dan kualitas pelayanan yang masih belum optimal

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
		Belum adanya pemisahan tugas antara pelayanan rumah tangga pimpinan daerah dan di lingkungan Sekretariat Daerah
		Belum tersedianya pejabat pejabat fungsional arsiparis
		Bagian Protokol, dan Komunikasi Pimpinan
		Tingkat pelayanan publikasi pimpinan daerah yang masih belum optimal
		Masih lemahnya koordinasi penyelenggaraan protokoler daerah
		Masih rendahnya tingkat responsivitas OPD terkait pengaduan masyarakat
		- Bagian Perencanaan dan Keuangan
		Masih adanya keterlambatan pelaporan keuangan Setda
		Masih rendahnya kualitas kompetensi pengelola keuangan di lingkungan Setda
		Masih belum adanya sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi perencana
		Belum tersedianya sistem informasi pengelolaan keuangan
Sekretariat DPRD		
Belum optimalnya fasilitasi dan dukungan kesekretariatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Belum Optimalnya kinerja Sekretariat DPRD	Kurang optimalnya kajian produk hukum terkait permasalahan daerah sebagai bahan Raperda Inisiatif DPRD
		Kurangnya tenaga fungsional analisis hukum
		Fasilitasi pengawasan penyelenggaraan pemerintah masih bersifat administrasi belum sampai ke tingkat teknis operasional dilapangan
		Kurangnya SDM pengolah data dan informasi berbasis teknologi
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN		
Inspektorat Daerah		
Belum optimalnya fungsi Inspektorat sebagai konsultan, katalis dan penjamin kualitas di lingkungan pemerintah di Kabupaten Sumedang	Belum Meratanya Kapasitas dan Kapabilitas APIP	Tingkat maturitas SPIP masih berada pada level 3;
		Penerapan Manajemen Resiko pada Perangkat Daerah masih rendah
		Penerapan SAKIP pada Perangkat Daerah belum optimal
		Tindak Lanjut Pemeriksaan (TLHP) yang diselesaikan dengan rekomendasi belum optimal
		Temuan penyimpangan terhadap APBD masih terjadi

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
		Masih terdapat kesenjangan (GAP) kapasitas APIP, khususnya dalam sertifikasi perjenjangan dan DIKLAT substansitif pengawasan akibat minimnya sumber daya anggaran
		Masih terdapat kesenjangan (GAP) infrastuktur penunjang pengawasan, khususnya alat uji dan teknisinya
		Masih belum otpimalnya manajemen pengawasan, khususnya penegakan kode etik bagi APIP, sehingga masih terindikasikan terdapat oknum yang menerima gratifikasi dan suap
		Belum optimalnya Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan Zona Integritas
		Pemberian konsultasi pada Perangkat Daerah dan Pemerintahan Desa belum optimal
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		
Kesatuan Bangsa Dan Politik		
Belum optimalnya tingkat cipta kondisi kondusif	Masih adanya potensi konflik dan unjuk rasa	Potensi terjadi unjuk rasa cukup tinggi
		Gangguan PEKAT masih tinggi
		Belum optimalnya Tim Pemantauan Orang Asing
		Potensi Radikalisme dan terorisme masih ada
		Belum optimal koordinasi dalam penanganan konflik social
		Potensi terjadi unjuk rasa cukup tinggi
		Belum optimalnya tim terpadu penanganan konflik social
		Belum optimalnya penanganan potensi gangguan HAM
		Belum optimalnya forum-forum strategis (forum kewaspadaan dini masyarakat, forum pembauran kebangsaan, forum kerukunan umat beragama, dll.)
		Kurangnya pemahaman dan implementasi ideologi pancasila dan bhinneka tunggal ika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
		Kurangnya pemahaman dan implementasi ideologi
		Pancasila dan bhinneka tunggal ika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
		Bermunculnya aliran-aliran sesat (pemahaman agama yang salah)
		Peran ormas di masyarakat belum optimal

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
		Kesulitan pengecekan keabsahan badan hukum ormas
		Belum terbentuknya sistem informasi ormas
		Sinergitas antar lembaga masih kurang terutama forum-forum strategis masyarakat (contoh FKUB, FKDM, FPK, Forkopinda)
	Masih rendahnya partisipasi dalam mendukung proses demokrasi	Belum optimalnya sosialisasi UU tentang pemilu, pilkada dan parpol
		Belum optimalnya pendidikan politik
		Belum optimalnya Tim Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah Kabupaten Sumedang

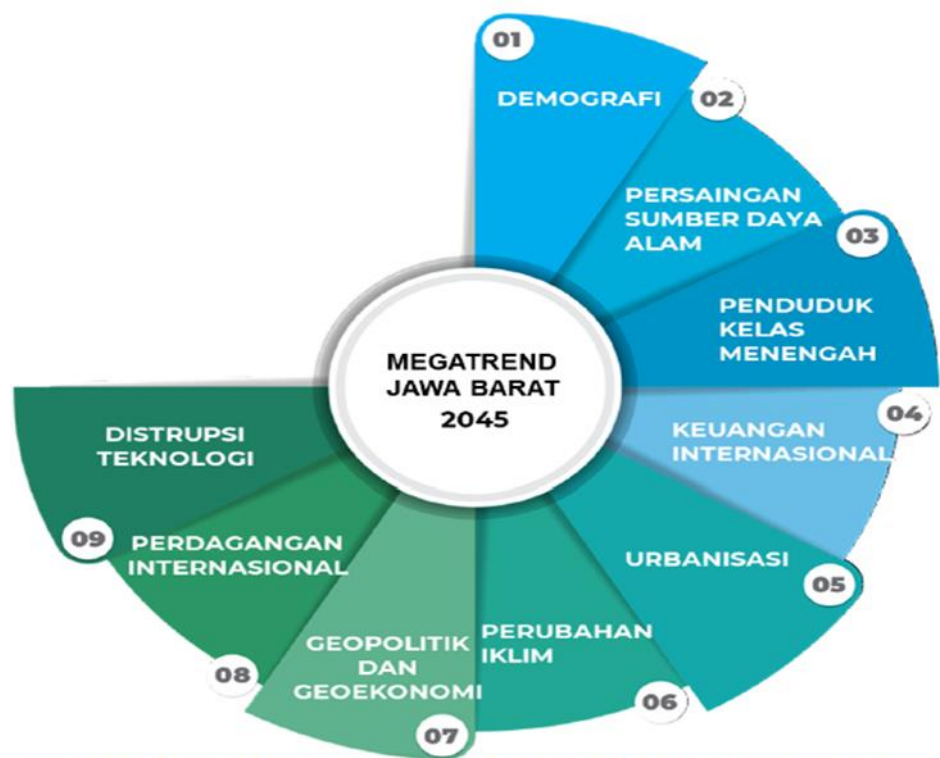
Sumber: Analisis BAPPPEDA Kabupaten Sumedang, 2024

2.3.2. Isu Strategis Daerah

2.3.2.1. Isu Sesuai Konteks

2.3.2.1.1. Isu Global

Sejumlah isu global menjadi tantangan yang perlu diantisipasi dalam menyusun perencanaan pembangunan baik jangka panjang maupun jangka menengah. Langkah awal pembangunan jangka menengah 2025-2029 harus mampu menjadi landasan / fondasi bagi upaya pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang yang sudah mengantisipasi konteks tantangan global tersebut. Berdasarkan RPJPD Provinsi Jawa Barat 2025-2045, terdapat sejumlah isu global yang perlu diperhatikan, disebut sebagai “*Megatrend Jawa Barat 2045*”.



Sumber: adaptasi dan pengembangan draft final RPJPD Jabar 2025-2045

Gambar 2.41 Konteks Isu Global yang Dihadapi Provinsi Jawa Barat Dalam “*Megatrend Jawa Barat 2045*”
(Sumber: RPJMD 2025-2029 Provinsi Jawa Barat, 2025)

Perubahan iklim. Tantangan pemanasan global akibat perubahan iklim berdampak pada peningkatan suhu global yang terus meningkat hingga 3,5°C pada *skenario intermediate*, jika tidak ada penurunan emisi GRK yang tinggi pada durasi Tahun 2020-2050. Dampak perubahan iklim ini yang kemudian melahirkan kesepakatan kebijakan global dalam pembangunan rendah karbon untuk menurunkan intensitas emisi pada sektor-sektor tertentu. Keikutsertaan Indonesia dalam penandatanganan Perjanjian Paris tentang Perubahan Iklim dinyatakan melalui *Nationally*

Determined Contribution (NDC). Komitmen ini menjadi dasar bagi Indonesia dalam merancang berbagai kebijakan nasional dalam menurunkan intensitas emisi karbon dalam pembangunan nasional. Terlebih lagi laporan dari *World Meteorological Organization* (WMO) dalam *State of The Climate* 2022 menyebutkan bahwa tahun 2022 menempati peringkat ke-6 tahun terpanas (peringkat ke-1). Tahun 2015-2022 menjadi 8 (delapan) tahun terpanas dalam catatan WMO, sehingga perubahan iklim ini menjadi 1(satu) isu strategis yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pembangunan ke depan.

Geopolitik dan geoekonomi. Rivalitas dan dominasi negara-negara besar dalam perekonomian dan politik global memberikan dampak terhadap stabilitas perekonomian negara-negara lain dunia. Konflik yang saat ini berlangsung di kawasan Timur Tengah, Eropa Timur, dan Laut Cina Selatan – Indo Pasifik, efeknya dapat merambat secara langsung dan tidak langsung dalam skala global. Dalam jangka panjang, hal ini akan mendorong deglobalisasi dimana setiap negara membangun kemandirian dan ketahanan dalam memitigasi risiko keterpaparan dampak potensi krisis yang merambat melalui jalur perdagangan dan keuangan internasional, serta komoditas dalam rantai pasok global. Di tengah tensi geopolitik yang ada, kawasan Indo-Pasifik yang diprediksi akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru berpotensi membuka berbagai peluang yang menggerakkan pertumbuhan ekonomi melalui perdagangan luar negeri, menjadi *windows of opportunity* sebagai bagian dari rantai pasok produksi dan perdagangan global.

Demografi global. Proyeksi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menunjukkan bahwa penduduk global pada tahun 2030 dan 2045 masing-masing tumbuh menjadi 8,5 miliar dan 9,5 miliar penduduk. Hal tersebut disebabkan oleh menurunnya tingkat kematian dan meningkatnya angka harapan hidup saat lahir. Terkait proporsi demografi seperti bertambahnya kelompok penduduk usia tua (*aging population*) dan tingginya jumlah penduduk usia muda akan memberikan tantangan seperti kewajiban terhadap pemenuhan perlindungan sosial dan pembukaan lapangan pekerjaan. Menurut UNDP, dua pertiga penduduk dunia akan tinggal di kawasan perkotaan pada tahun 2050, di mana 95 persen pertambahan tersebut berada di negara *emerging economies*. Di Asia dalam 4 (empat) dekade ke depan, penduduk perkotaan akan meningkat sebesar 1,7 kali lipat. Sebanyak 25–30 persen penduduk perkotaan masih tinggal di

kawasan pemukiman tanpa pelayanan dasar seperti air, drainase, sanitasi, listrik, dan jalan yang memadai. Dalam bonus demografi dimana mencermati dinamika penduduk Provinsi Jawa Barat yang cenderung bertambah dan dalam rangka menangkap peluang bonus demografi maka perlu perubahan paradigma tentang bonus demografi yang tidak hanya menekankan perubahan struktur penduduk tetapi lebih menekankan konfigurasi tingkat pendidikan penduduk. Karena itu, perhatian yang sangat besar pada keterampilan manusia sangat diperlukan.

Selain itu, terdapat 4 (empat) aspek yang harus diantisipasi dalam menghadapi bonus demografi yaitu:

1. Keberlanjutan ekonomi, melalui peningkatan pertumbuhan LPE dengan menekan Rasio Gini serta menurunkan TPT dengan penguatan akses ketenagakerjaan di sektor formal dan informal;
2. Keberlanjutan sosial budaya, melalui peningkatan serta efektivitas sistem perlindungan sosial yang inklusif, dan pemajuan kebudayaan;
3. Keberlanjutan ekologi, melalui efektivitas pemenuhan standar lingkungan yang tinggi serta penggunaan energi baru dan terbarukan dalam menopang aktivitas pembangunan; dan
4. Investasi SDM untuk menjawab daya saing Jawa Barat agar bisa unggul atau setidaknya kompetitif diberbagai aspek di level internasional, memaksimalkan era industri 4.0 menuju society 5.0 yang ditandai dengan masyarakat telah mencapai *comport, vitality and high quality life*.

Disrupsi teknologi. Saat ini, kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) bahkan bisa melakukan tugas-tugas berpikir yang sebelumnya harus dilakukan oleh manusia, seperti menulis artikel dan membuat karya seni grafis. Ke depan, akan banyak pekerjaan yang dapat tergantikan oleh pemanfaatan teknologi. Pemanfaatan teknologi dan informasi membantu adanya interkoneksi di setiap tahapan/proses pembentukan peraturan perundang-undangan, mendorong penataan regulasi, memetakan berbagai regulasi yang berpotensi tumpang tindih secara vertikal maupun horizontal, mengkaji regulasi yang inkonsisten, meningkatkan partisipasi publik dalam semua proses pembentukan peraturan perundang-undangan, serta membantu menganalisis dan evaluasi pelaksanaan regulasi. Perdagangan internasional. Meningkatnya jumlah kelas menengah masyarakat global akan mendorong sisi permintaan produk dan peningkatan perdagangan internasional. Kondisi tersebut menjadi tantangan peluang pasar ekspor produk dari Provinsi Jawa Barat ke negara-negara potensial. Produk yang

berdaya saing serta penguatan sistem logistik yang efisien diperlukan dalam meningkatkan kinerja ekspor Jawa Barat.

Urbanisasi dunia. Menurut data World Population Prospects (2022), populasi dunia saat ini mencapai lebih dari 7,0 miliar jiwa dan diperkirakan akan terus meningkat hingga 9,7 miliar jiwa pada tahun 2050. Porsi lansia di Asia juga meningkat yaitu sebesar 55 persen. Hal tersebut memberikan tantangan terkait penyesuaian tingginya kebutuhan hidup masyarakat dengan terbatasnya ketersediaan sumber daya alam dan lahan. Kebutuhan pangan, energi, dan air akan semakin meningkat pula seiring dengan tingginya pertumbuhan penduduk. Selain itu, urbanisasi yang tidak dikelola dengan baik juga telah menyebabkan perkembangan kota yang menyebar ke kawasan sekitarnya. Kondisi ini berimplikasi kepada perubahan guna lahan pertanian menjadi tempat bermukim dan kawasan perdagangan/jasa.

2.3.2.1.2. Isu Nasional

Perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari DKI Jakarta ke Kalimantan diperkirakan akan menurunkan pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta baik dari sisi konsumsi, impor ekspor perdagangan antar daerah, serta belanja pemerintah pusat di wilayah tersebut. Potensi kehilangan belanja pemerintah pusat ke wilayah DKI diperkirakan mencapai 90 persen dari total keseluruhan belanja. Keterkaitan aktivitas perekonomian yang erat menjadikan perpindahan IKN akan berdampak langsung terhadap kinerja perekonomian Provinsi Jawa Barat. Dampak yang diakibatkan berupa penurunan PDRB sebesar 0,06 persen, serta upah nyata di sektor pertanian turun sebesar 0,49 persen, sehingga dampaknya perlu diantisipasi karena dapat meningkatkan ketimpangan pendapatan yang telah menjadi permasalahan di Provinsi Jawa Barat saat ini.

Bonus demografi Indonesia. Indonesia saat ini menjadi negara dengan jumlah penduduk ke 4 (empat) terbesar didunia yaitu sebesar 277 juta jiwa dan diproyeksikan pada tahun 2045 jumlah penduduk Indonesia akan mencapai sekitar 324,05 juta jiwa. Dengan besarnya jumlah penduduk dapat menjadikan potensi sumber daya pembangunan yang besar jika memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan produktif. Selain itu besarnya jumlah penduduk dapat memberikan potensi tenaga kerja yang besar untuk menunjang sektor-sektor ekonomi potensial menghasilkan lapangan kerja yang besar seperti sektor industri, pertanian

dan pariwisata. Namun dengan besarnya penduduk Indonesia saat ini masih terdapat tantangan yaitu kualitas pendidikan yang masih rendah yang dilihat dari capaian rata-rata nilai PISA siswa Indonesia tahun 2018 untuk semua aspek (membaca, matematika dan sains) yaitu sebesar 382,00 dimana capaian tersebut masih dibawah siswa dari negara-negara OECD yaitu sebesar 488,33. Selain itu produktivitas tenaga kerja Indonesia selama kurun waktu 2010-2022 masih relatif tertinggal yaitu sebesar 7.274,9 USD dimana angka tersebut berada dibawah rata-rata kawasan ASEAN. Komposisi struktur penduduk Indonesia masih dapat dioptimalkan, dimana rasio ketergantungan di bawah 50 persen yang diproyeksikan akan berlangsung sekitar 15 (lima belas) tahun ke depan. Dengan penduduk usia produktif yang dominan akan semakin berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi apabila adanya peningkatan kualitas penduduk usia produktif melalui peningkatan produktivitasnya.

Ekonomi hijau dan ekonomi biru. Pemerintah Indonesia telah menetapkan kerangka transformasi ekonomi dengan ekonomi hijau sebagai salah satu strategi yang dipersiapkan tidak hanya dalam rangka pemulihan dari pandemi COVID-19 namun juga untuk membawa Indonesia mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030 dan Visi Indonesia Emas 2045. Ekonomi hijau merupakan model pembangunan yang mensinergikan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas lingkungan dengan pembangunan rendah karbon sebagai “tulang punggung”nya. Penerapan ekonomi hijau dapat menjadi sumber pertumbuhan baru melalui peningkatan peluang kerja investasi hijau dan pengembangan produk-produk hijau. Sementara itu, paradigma ekonomi biru merupakan kerangka pembangunan berkelanjutan untuk membantu menangani isu-isu seperti kesenjangan pembangunan, pengembangan, dan pemerataan kesejahteraan dari sumber daya laut, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang kelautan, serta pertumbuhan ekonomi.

Konektivitas dan infrastruktur dasar. Terbatasnya sistem angkutan umum massal perkotaan terutama di wilayah metropolitan dan kota-kota, konektivitas *hinterland* (intra pulau) yang terdiri dari jaringan jalan, kereta api, serta angkutan perairan danau dan sungai masih perlu ditingkatkan. Rendahnya jangkauan jaringan serat optik sebagai layanan digital yang berkualitas, dan masih belum meratanya jangkauan jaringan internet seluler di daerah terpencil menjadi tantangan nasional. Ke depannya, selain

permasalahan tersebut, terdapat beberapa masalah lain yang perlu diatasi seperti lemahnya tata kelola dan koordinasi antar lembaga, kurangnya pendanaan untuk pembangunan infrastruktur termasuk untuk menjaga kualitas dan keberlanjutan infrastruktur yang telah dibangun. Dalam pemenuhan infrastruktur dasar, tantangan utama yang dihadapi adalah belum terpenuhinya kebutuhan atas hunian layak dan terjangkau, terbatasnya rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi yang aman dan berkelanjutan, dan masih tingginya rumah tangga yang mempraktikkan Buang Air Besar Sembarangan (BABS), serta sarana dan prasarana dasar belum berketahanan bencana. Selain itu, pelayanan tenaga listrik belum optimal dan belum berkelanjutan.

Perubahan iklim, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta ketahanan bencana. Perubahan iklim berpotensi menyebabkan kerugian ekonomi secara signifikan dan mengakibatkan 319 kabupaten/kota memiliki tingkat kerentanan yang sangat tinggi terutama di sektor kelautan dan pesisir, air, pertanian dan kesehatan. Kerugian ekonomi akibat bencana perubahan iklim diperkirakan mencapai rata-rata Rp22,8 triliun per tahunnya. Di Indonesia terdapat 18.000 km garis pantai berkategori rentan dan sangat rentan, sehingga mengancam hilangnya ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Selain itu, peningkatan musim kemarau yang menyebabkan beberapa wilayah mengalami penurunan intensitas cuaca curah hujan juga berdampak pada meningkatnya potensi kekeringan, ketersediaan air, dan penurunan produksi padi.

Kondisi tersebut diperparah dengan daya dukung hutan dan lahan sawah yang diperkirakan akan terus menurun. Selain itu, daya dukung ketersediaan air juga menunjukkan tren menuju kelangkaan khususnya di wilayah Jawa. Adapun, daya dukung ekosistem laut diprediksi akan mengalami kerentanan seiring dengan kerusakan fisik ekosistem pesisir dan laut yang diakibatkan pengelolaan yang tidak berkelanjutan.

Desentralisasi dan otonomi daerah. Reformasi sistem pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi menimbulkan tren pemekaran wilayah. Pemekaran wilayah diharapkan dapat menggali dan memanfaatkan peluang yang lebih besar dari potensi daerah yang ada. Tujuan pemekaran wilayah pada dasarnya untuk mendekatkan akses pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan umum dan daya saing daerah. Tren pemekaran wilayah juga dipengaruhi oleh jumlah alokasi transfer ke daerah yang memiliki

peranan stimulan yang lebih besar terhadap belanja daerah dibandingkan dengan PAD. Alokasi transfer ke daerah memiliki kontribusi yang signifikan terhadap sektor-sektor terkait pelayanan dasar, seperti kesehatan, pendidikan dan infrastruktur dasar. Di samping itu perlu adanya peningkatan kualitas belanja yang dilakukan pemerintah daerah dimana kualitas belanja daerah sangat mempengaruhi terhadap pencapaian indikator makro daerah.

2.3.2.1.3. Isu Regional Jawa Bali

Pulau Jawa-Bali diarahkan menjadi pusat pertumbuhan industri berbasis inovasi, riset dan teknologi serta pariwisata dan ekonomi kreatif. Kebijakan kewilayahan tersebut penting untuk Provinsi Jawa Barat yang memang potensi dan kontribusinya bagi nasional cukup besar. Peluang besar Provinsi Jawa Barat untuk mewujudkan arahan tersebut tentunya didukung dengan modalitas yang ada dan adanya perubahan peran Jakarta.

Perubahan peran Jakarta sebagai kota global akan mempengaruhi Provinsi Jawa Barat secara langsung dan provinsi-provinsi lain di sekitarnya. Sebagai kota global, Jakarta akan menjadi kota yang melayani dan membiayai kegiatan internasional dalam bidang perdagangan, investasi, bisnis, pariwisata, kebudayaan, pendidikan, kesehatan dan menjadi lokasi kantor pusat perusahaan dan lembaga baik nasional, regional maupun internasional, serta menjadi pusat produksi produk strategis internasional. Perubahan peran tersebut tentunya menciptakan nilai ekonomi yang besar dan akan mempengaruhi daerah sekitarnya.

Sebagai penopang perekonomian terbesar nasional, Jawa-Bali masih menjadi magnet bagi SDM berkualitas. Namun demikian, daya saing SDM secara umum masih perlu ditingkatkan terlebih di Provinsi Jawa Barat yang jumlah penduduknya terbesar. Dengan wilayah yang luas, ketersediaan akses pendidikan juga masih belum merata. Selain itu, masih adanya kesenjangan antara kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri dan dunia usaha perlu menjadi perhatian ke depannya.

Pulau Jawa-Bali yang merupakan magnet bagi pendatang tentunya sangat rentan terhadap perubahan tatanan sosial budaya yang ada. Didorong dengan kemajuan teknologi informasi menyebabkan pertukaran informasi berlangsung makin cepat sehingga mempengaruhi kondisi sosial budaya masyarakat. Provinsi Jawa Barat pun mengalami gejala demikian.

Salah satunya ditunjukkan dengan rendahnya persentase penduduk yang pernah terlibat dalam pertunjukan seni, kegiatan organisasi, serta menghadiri atau menyelenggarakan upacara adat.

Ketimpangan wilayah utara-selatan memang sudah berlangsung sejak lama dan akan tetap terjadi ke depannya. Hal tersebut tercermin dari ketersediaan infrastruktur yang lebih baik dan lengkap serta konsentrasi berbagai industri di sepanjang wilayah utara. Ketimpangan tersebut juga terlihat dari angka kemiskinan dan pengangguran yang relatif banyak terkonsentrasi di wilayah selatan. Kondisi demikian juga terjadi di Provinsi Jawa Barat sehingga ke depannya perlu dilakukan berbagai upaya untuk mengatasi ketimpangan yang sudah berlarut-larut terjadi itu.

Perubahan iklim dan bencana alam menjadi hal yang patut menjadi perhatian utama di Pulau Jawa-Bali untuk ke depannya. Tekanan pembangunan dan wilayah yang berada pada ancaman gempa bumi, erupsi gunung berapi, dan tsunami menuntut kesiapsiagaan, mitigasi, peringatan dini, penanganan darurat, dan pemulihan pasca bencana. Kondisi tersebut juga berlaku dalam konteks Provinsi Jawa Barat.

Mengantisipasi jumlah penduduk yang makin besar, maka diperlukan tata kelola pemerintahan yang responsif seiring dengan kompleksitas permasalahan yang dihadapi ke depannya. Tuntutan peningkatan kualitas layanan publik yang cepat dan terintegrasi dengan teknologi informasi mutlak menjadi suatu keharusan. Kondisi demikian juga berlaku untuk Provinsi Jawa Barat yang ke depannya juga makin kompleks permasalahan yang dihadapi.

2.3.2.1.4. Isu Berdasarkan *West Java Development Forum (WJDF)*

West Java Development Forum (WJDF) 2023 merupakan tindak lanjut dari arahan pemerintah pusat yang meminta daerah menerjemahkan rencana pembangunan jangka panjang sampai tahun 2045. WJDF 2023 melibatkan berbagai pihak seperti kalangan akademisi, budayawan, tokoh masyarakat, inohong Jabar, Forkopimda, media, hingga generasi milenial. Dilibatkannya stakeholders dari berbagai kalangan diharapkan dapat membuat rencana pembangunan lebih maksimal, merata dan mewakili harapan seluruh masyarakat. Semua stakeholders yang mewakili memberikan pandangan bagaimana Jawa Barat di tahun 2045. Berdasarkan hasil WJDF tersebut, pembangunan tak bisa fokus hanya pada satu sektor, melainkan harus multidimensi. Namun dari pandangan

generasi muda, setidaknya ada tiga sektor penting yang harus diakomodir, yaitu ekonomi, lingkungan, dan sumber daya manusia. Pertimbangan-pertimbangan dari berbagai stakeholder tersebut kemudian distrukturkan dan menjadi isu yang diharapkan dapat memberi masukan dalam perencanaan pembangunan di Jawa Barat. Sejumlah isu yang dihasilkan dari WJDF diuraikan berikut ini.

A. Fokus Pembangunan Ekonomi Inklusif Berkelanjutan

Isu layanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas dalam menghadirkan SDM yang unggul dan sejahtera, mencakup: akses layanan kesehatan bersama; tuntas wajib belajar sampai dengan SMA; stunting; pemenuhan layanan pendidikan masyarakat; layanan kesehatan dan kemiskinan bersama; pemenuhan akses layanan dasar yang berkualitas (kesehatan, pendidikan); dan peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung bonus demografi.

Adapun isu perlindungan sosial terintegrasi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, mencakup: kemiskinan dan rumah tidak layak huni; penanganan kemiskinan melalui ekonomi keluarga; sistem informasi PPKS; perlindungan masyarakat miskin secara tepat sasaran; pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal; layanan kesehatan dan kemiskinan bersama wilayah perbatasan; pemberdayaan masyarakat miskin petani dan nelayan; layanan terpadu dalam penanggulangan kemiskinan wilayah perbatasan; dan skenario mitigasi bertambahnya penduduk miskin.

Isu pemerataan pembangunan wilayah dan peningkatan pendapatan masyarakat menengah ke bawah, mencakup: pemerataan pertumbuhan wilayah dan ekonomi sesuai dengan potensi lokal; pemerataan pertumbuhan wilayah dan ekonomi sesuai dengan potensi lokal ketimpangan akses sosial dan ekonomi serta pertumbuhan ekonomi yang tidak inklusif; kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat; pemerataan kualitas hidup berbasis teknologi; dan skenario mitigasi melebarnya tingkat ketimpangan Isu penciptaan dan perluasan lapangan pekerjaan serta pembentukan SDM tenaga kerja yang kompeten sesuai pasar kerja, mencakup; ketersediaan BLK dan SDM yang kompeten sesuai dengan kebutuhan kerja; industri padat karya untuk penyerapan tenaga kerja lokal; ketersediaan BLK dan SDM yang kompeten sesuai dengan kebutuhan kerja; optimalisasi kuantitas dan kualitas BLK; pencetakan

wirausaha baru yang tangguh dan berdaya saing; ketersediaan BLK dan SDM yang kompeten sesuai dengan kebutuhan kerja; digital skill kepada tenaga kerja pemuda; kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja; SDM tenaga kerja yang kompeten; dan perluasan kesempatan kerja untuk semua kalangan.

Isu kesejahteraan petani (petani, pekebun, petani ikan dan nelayan), mencakup: konflik antar nelayan dalam pemanfaatan ruang laut; pengelolaan ekosistem pesisir dan perikanan tangkap bersama pada batas wilayah laut 12 mil; produktivitas kegiatan usaha tani dan kegiatan usaha ekonomi pertanian; regenerasi petani; produktivitas sumber daya kelautan dan keamanan laut; dan pemanfaatan bersama pelabuhan perikanan.

Sedangkan isu sistem pangan yang berkelanjutan, meliputi: produktivitas pertanian dan perikanan; adaptasi varietas pertanian berketahanan iklim; sistem pangan berkelanjutan; kelancaran distribusi ternak wilayah perbatasan; belum optimalnya penerapan pola konsumsi pangan yang berkelanjutan; pemanfaatan ruang pesisir dan laut yang berkelanjutan; produktivitas sumber daya kelautan dan keamanan laut; produktivitas kegiatan usaha tani dan kegiatan usaha ekonomi pertanian; regenerasi petani; ketersediaan pangan berkelanjutan; ketersediaan dan akses pangan; dan optimalisasi *logistic global value chain* dan *blue economy*.

B. Fokus Penguatan Infrastruktur Berkelanjutan

Isu infrastruktur yang terintegrasi, efisien, merata serta adaptif terhadap bencana, meliputi: aglomerasi perkotaan di Bodebekpunjur, Rebana, dan Cekungan Bandung sebagai *engine of growth*; infrastruktur persampahan berkelanjutan dan sistem transportasi yang efisien penyediaan dan layanan infrastruktur sumber daya air, air bersih, limbah, jalan, sampah yang merata; penyediaan dan layanan sistem transportasi; konektivitas antar pusat kegiatan; persampahan serta rantai pasok pangan yang efisien; infrastruktur berkelas dunia; keselamatan pelayaran ASDP (Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan) lintas provinsi; infrastruktur wilayah dan logistik terintegrasi (kereta, sistem logistik pelabuhan dan bandara, air bersih, transportasi darat); infrastruktur perbatasan terintegrasi, handal dan adaptif bencana (jalan, sampah, air bersih, pelabuhan kereta, air limbah); dan peningkatan infrastruktur dasar dan konektivitas untuk mendukung perekonomian.

Untuk isu infrastruktur digital yang merata dan berkualitas, mencakup: pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi dalam ekonomi digital; kesiapan transformasi digital yang berkelanjutan; keterjangkauan akses digital yang merata; dan penggunaan teknologi digital dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Adapun isu transformasi energi fosil ke energi baru terbarukan, mencakup pengembangan EBT untuk mendukung green economy dan transisi energi.

Sementara, isu infrastruktur sumber daya air yang andal dalam mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat, mencakup penanganan banjir terintegrasi dan berkelanjutan, penanganan banjir terintegrasi dan berkelanjutan, ketersediaan air baku dan air bersih yang berkualitas dan *continue*, serta penanganan banjir terintegrasi dan berkelanjutan pelayanan sistem irigasi.

C. Fokus Peningkatan Produktivitas Daerah

Isu produktivitas, kualitas dan daya saing produk barang dan jasa sektor-sektor perekonomian, mencakup: Kawasan Pantura sebagai basis industri hijau, perikanan dan ketahanan pangan; optimalisasi pengembangan ekowisata terintegrasi; pengembangan IKM dan UKM; optimalisasi kinerja sektor-sektor ekonomi pariwisata dan ekraf; peningkatan investasi dan promosi investasi industri; peningkatan produktivitas tenaga kerja industri; pengembangan pariwisata kelas dunia; kerjasama perdagangan dalam penguatan rantai pasok pangan berkualitas; Jawa Barat sebagai bagian dari rantai pasok pangan berkualitas; link and match antara industri dan sektor hulu; dan mengembangkan rantai nilai regional pada produk-produk yang berdaya saing di pasar internasional.

Adapun isu UMKM yang unggul, berdaya saing serta menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi, mencakup: peran pemuda dalam kewirausahaan; peningkatan produktivitas dan partisipasi UMKM dalam rantai nilai produksi; optimalisasi pertumbuhan startup; pemberdayaan UMKM dan startup; penguatan IKM dan UMKM; pemberdayaan UMKM dan koperasi; peningkatan kinerja sektor-sektor ekonomi spesifik wilayah (pariwisata, UMKM dan Industri); pelatihan dan pemasaran digital produk UMKM; integrasi pengembangan ekraf; pemberdayaan UMKM dan koperasi wilayah perbatasan; kewirausahaan yang berkelanjutan melalui UKM; dan komoditas pertanian sebagai komoditas wirausaha/bisnis.

D. Fokus Penguatan Daya Saing SDM Berkelanjutan

Isu pendidikan vokasi dan keselarasan subsidi pendidikan antar wilayah perbatasan dan pendidikan karakter berlandaskan nilai budaya, mencakup: pendidikan usia dini berbasis lingkungan hidup; peningkatan kualitas pendidikan pada usia dini (0-5 tahun); pemajuan kebudayaan; pengelolaan SDM yang terintegrasi (publik, swasta, dan masyarakat); penguatan kurikulum adaptif berbasis TIK; pengembangan dan penguatan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA); pelestarian masyarakat adat dan cagar budaya; optimalisasi kompetensi tenaga kerja; pendidikan vokasi; keselarasan subsidi pendidikan; akses pendidikan lintas batas wilayah perbatasan; pemajuan kebudayaan daerah; dan peningkatan kualitas dan akses pendidikan.

Adapun isu kesetaraan entitas sosial dan individu dalam pembangunan, meliputi: pemberdayaan masyarakat yang inklusif; pembangunan yang merata dan inklusif; dan inklusivitas dalam pembangunan bagi semua kalangan. Adapun isu ketersediaan infrastruktur digital meliputi: peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital; peningkatan kemampuan SDM digital (*digital skill*); akselerasi digitalisasi dan penggunaan teknologi melalui peningkatan literasi digital; transformasi digital; dan digital divide/kesenjangan untuk mengakses teknologi digital.

E. Fokus Penguatan Lingkungan Sosial Masyarakat yang Sehat dan Budaya Masyarakat Maju

Isu pembangunan keluarga yang berkualitas, mencakup: sistem informasi PPKS; Jabar sebagai provinsi yang memperhatikan lansia; meminimalisir gangster; dan awareness terhadap kesehatan mental. Adapun isu pemajuan kebudayaan, mencakup: aspek regulasi muatan lokal kebudayaan daerah; *platform* kebudayaan; dan penanaman nilai agama dan budaya bangsa.

F. Fokus Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Isu lingkungan yang berkualitas dan daya dukung lingkungan yang berkelanjutan bagi pembangunan, meliputi: penanganan kualitas lingkungan terintegrasi; alih fungsi lahan; peran serta masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup; kerusakan pesisir pantai; pengelolaan sampah; Banjir Rob Pantai Utara akibat perubahan iklim; alih fungsi lahan; ekonomi berkelanjutan berbasis industri hijau; pemenuhan kawasan lindung;

pengelolaan limbah; RTH dan imbal jasa ekologis; pengarusutamaan pembangunan berwawasan lingkungan; ekonomi hijau berbasis digital; dan dampak pengembangan industri manufaktur terhadap lingkungan.

Adapun isu mitigasi risiko bencana berbasis masyarakat, meliputi: mitigasi tsunami pada *zona megathrust* pantai selatan; penanganan bencana yang belum optimal karena terbatasnya penyebaran informasi kepada masyarakat; mitigasi bencana dan perubahan iklim; timbulnya abrasi di pesisir laut yang menyebabkan luas daratan berkurang; dan perlindungan sosial adaptif.

G. Fokus Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Isu tata kelola pemerintahan kolaboratif, meliputi: kelembagaan kerjasama antar daerah; struktur organisasi yang efektif; kolaborasi pentahelix dalam penanganan berbagai masalah infrastruktur dasar; tata kelola pemerintahan yang inklusif; *environmental leadership*; dan perbaikan regulasi dalam semua aspek birokrasi.

Adapun isu pelayanan publik terintegrasi berbasis elektronik, meliputi: pelayanan adaptif dan terintegrasi pada kawasan greater metro pemanfaatan citra digital dalam pendataan kendaraan bermotor optimalisasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) secara berkualitas dalam pelayanan publik; digitalisasi pelayanan publik yang terintegrasi, dan kemudahan izin berusaha dan investasi.

Sementara isi sistem inovasi daerah untuk percepatan pembangunan, meliputi: kawasan perbatasan yang berdaya saing; penyiapan teknologi secara inovatif, efektif dan efisien; transformasi digital; pencarian alternatif sumber pendanaan yang lain belum optimal; pemimpin yang adaptif dan responsif; insentif dan disinsentif dalam pengelolaan sampah; pembangunan inklusif yang berkelanjutan; pemanfaatan teknologi digital dalam menciptakan inovasi dalam pembangunan berkelanjutan; dan Peningkatan partisipasi pada forum-forum inovasi IPTEK dan sains.

2.3.2.1.5. Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan

Isu strategis terkait Pembangunan Berkelanjutan (PB/SDG's) dihasilkan dari rangkaian tahapan dan proses yang dilalui dalam penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (KLHS RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 – 2029. Dari hasil KLHS, telah disepakati terdapat 9 (sembilan) isu

pembangunan berkelanjutan strategis yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan RPJMD 2025-2029, yaitu:

1. Belum meratanya distribusi dan kualitas dari akses dan sarana prasarana serta SDM pendidikan di segala jenjang termasuk pengembangan sistem teknologi informasi digital;
2. Belum optimalnya perlindungan sosial yang tepat sasaran guna mewujudkan inklusivitas dan masyarakat yang adaptif;
3. Belum merata dan masih rendahnya kualitas infrastruktur pelayanan dalam penanganan dampak lingkungan dari persampahan, sanitasi, konektivitas publik, dan energi yang tidak ramah lingkungan;
4. Belum meratanya pelayanan, pengendalian pencegahan, dan penanganan permasalahan kesehatan serta kurangnya SDM bidang kesehatan, baik secara kuantitas dan kualitas;
5. Belum optimalnya ekonomi daerah, akses permodalan, pembinaan UMKM, pariwisata, serta pengembangan ekonomi biru dan hijau berbasis keunggulan wilayah;
6. Belum optimalnya pengendalian dan penanggulangan kebencanaan dan perubahan iklim, serta upaya penurunan gas rumah kaca;
7. Belum optimalnya pembangunan wilayah yang berkelanjutan dan terintegrasi dengan tata ruang, tata kelola pemerintahan, serta kerja sama antar pihak termasuk masyarakat adat;
8. Penurunan kualitas dan daya dukung lahan akibat alih fungsi lahan, khususnya untuk ketersediaan pangan dan air; dan
9. Belum optimalnya pengelolaan DAS dan rendahnya upaya konservasi keanekaragaman hayati darat dan laut.

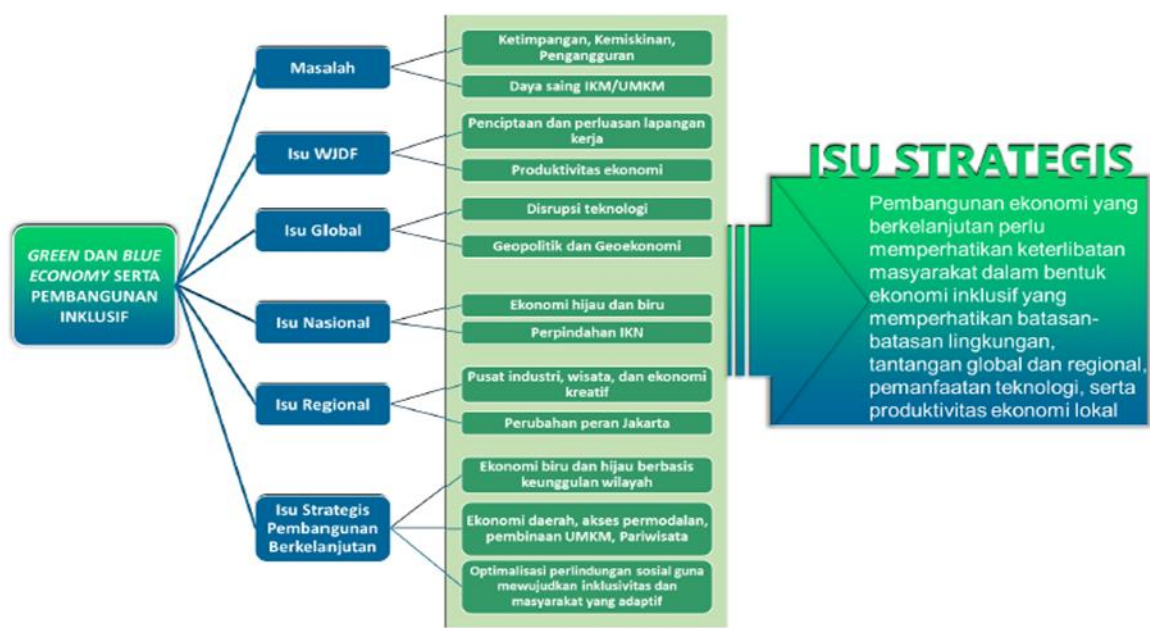
2.3.2.2. Isu Strategis Provinsi Jawa Barat

Berikut adalah sintesa hasil perumusan permasalahan serta rumusan isu sesuai konteks pembangunan daerah di Jawa Barat yang mencakup sejumlah isu utama yang menjadi isu strategis untuk diperhatikan dalam perencanaan pembangunan Jawa Barat.

2.3.2.2.1. Isu *Green and Blue Economy* Serta Pembangunan Inklusif

Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan perlu memperhatikan keterlibatan masyarakat dalam bentuk ekonomi inklusif yang memperhatikan batasan-batasan lingkungan, tantangan global dan regional, pemanfaatan teknologi, serta produktivitas ekonomi lokal. Paradigma *green* dan *blue economy* yang berkembang saat ini harus

melibatkan masyarakat Jawa Barat sebagai bagian dari keseimbangan sistem sosial ekologi di Jawa Barat, sesuai dengan semangat konsep pembangunan *green and blue economy*.



Gambar 2.42 Isu Strategis Terkait *Green and Blue Economy* serta Pembangunan Inklusif
(Sumber: RPJMD 2025-2029 Provinsi Jawa Barat, 2025)

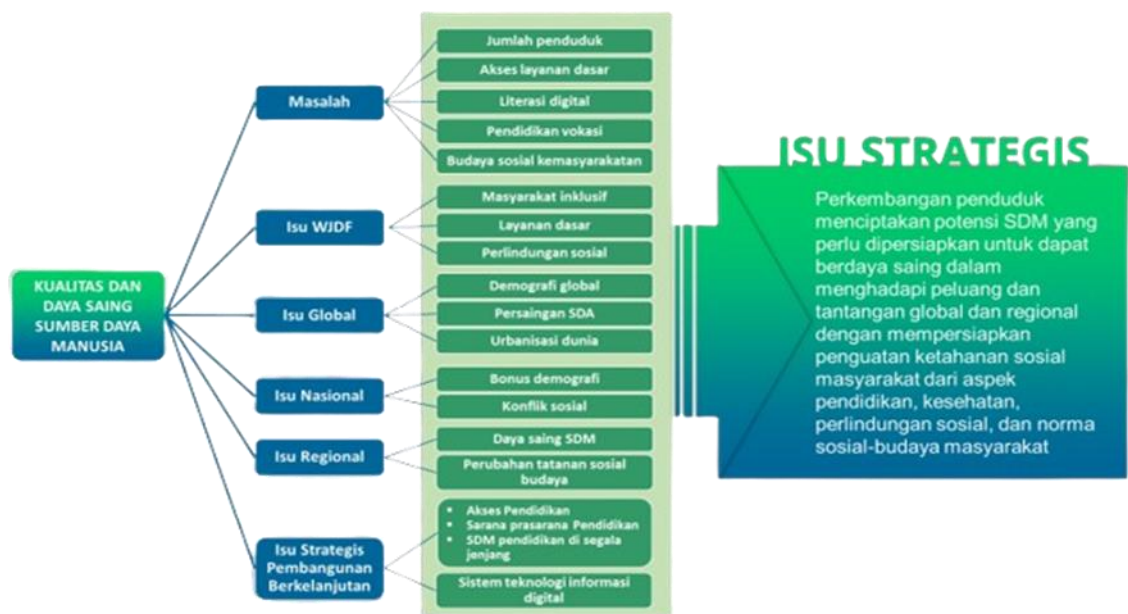
Green economy merujuk pada model ekonomi yang berfokus pada pengembangan secara berkelanjutan dan ramah lingkungan. Konsep ini menekankan penggunaan sumber daya alam yang terbarukan, efisiensi energi, serta mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Tujuannya adalah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya berkelanjutan dari segi lingkungan, tetapi juga berdampak positif bagi masyarakat secara luas. *Blue economy*, di sisi lain berkaitan dengan pengelolaan berkelanjutan sumber daya laut dan pesisir. Konsep ini mencakup pengembangan ekonomi yang memanfaatkan potensi laut dan sumber daya alam yang ada di ekosistem laut secara berkelanjutan. *Blue economy* menekankan pentingnya perlindungan lingkungan laut, pemanfaatan sumber daya dengan cara yang bertanggung jawab, serta pemberdayaan masyarakat pesisir yang hidup dari laut.

Pembangunan inklusif merupakan pendekatan dalam pembangunan ekonomi dan sosial yang memastikan bahwa manfaat dari pertumbuhan ekonomi didistribusikan secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk yang terpinggirkan atau rentan. Ini melibatkan penciptaan kesempatan kerja yang adil, akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat untuk

berpartisipasi dalam proses pembangunan. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa *green* dan *blue economy* dengan pembangunan inklusif berupaya untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana, dan memperkuat kapasitas masyarakat untuk mengatasi tantangan pembangunan yang ada, sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan.

2.3.2.2.2. Isu Kualitas Dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

Perkembangan penduduk menciptakan potensi sumber daya manusia yang perlu dipersiapkan untuk dapat berdaya saing dalam menghadapi peluang dan tantangan global dan regional. Kondisi ini perlu dilakukan antara lain dengan mempersiapkan penguatan ketahanan sosial masyarakat dari aspek pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan norma sosial-budaya masyarakat.



Gambar 2.43 Isu Terkait Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
(Sumber: RPJMD 2025-2029 Provinsi Jawa Barat, 2025)

Isu kualitas dan daya saing sumber daya manusia ini menjadi sangat penting dalam konteks pembangunan ekonomi dan sosial di wilayah Provinsi Jawa Barat. Berikut beberapa poin penting terkait isu kualitas dan daya saing sumber daya manusia:

1. Kualitas Pendidikan dan Pelatihan

Kualitas sumber daya manusia dipengaruhi secara signifikan oleh sistem pendidikan dan pelatihan yang tersedia. Penting untuk memastikan bahwa pendidikan dasar, menengah, dan tinggi memberikan pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan tuntutan pasar kerja global yang terus berubah.

2. Relevansi Keterampilan

Sumber daya manusia yang kompeten adalah mereka yang memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri dan ekonomi saat ini. Program pendidikan dan pelatihan harus dapat menghasilkan lulusan yang siap terjun langsung ke dunia kerja atau yang mampu menyesuaikan diri dengan cepat dengan perubahan teknologi dan tuntutan pasar.

3. Inovasi dan Kreativitas

Selain keterampilan teknis, penting juga untuk mendorong inovasi dan kreativitas di kalangan sumber daya manusia. Kemampuan untuk berpikir kritis, memecahkan masalah, dan berkolaborasi adalah faktor-faktor yang mendorong daya saing individu dan organisasi.

4. Kesejahteraan dan Motivasi

Faktor-faktor non-finansial seperti lingkungan kerja yang kondusif, pengakuan atas prestasi, serta kesempatan untuk pengembangan karir juga berperan penting dalam meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia. Kesejahteraan mental dan fisik juga harus diperhatikan untuk menjaga produktivitas dan kualitas kerja yang optimal.

5. Pemberdayaan dan Keterlibatan

Masyarakat yang terlibat aktif dalam pengambilan keputusan dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan ekonomi juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Keterlibatan ini menciptakan rasa memiliki yang kuat dan motivasi untuk berkontribusi secara positif.

6. Adaptasi terhadap Perubahan

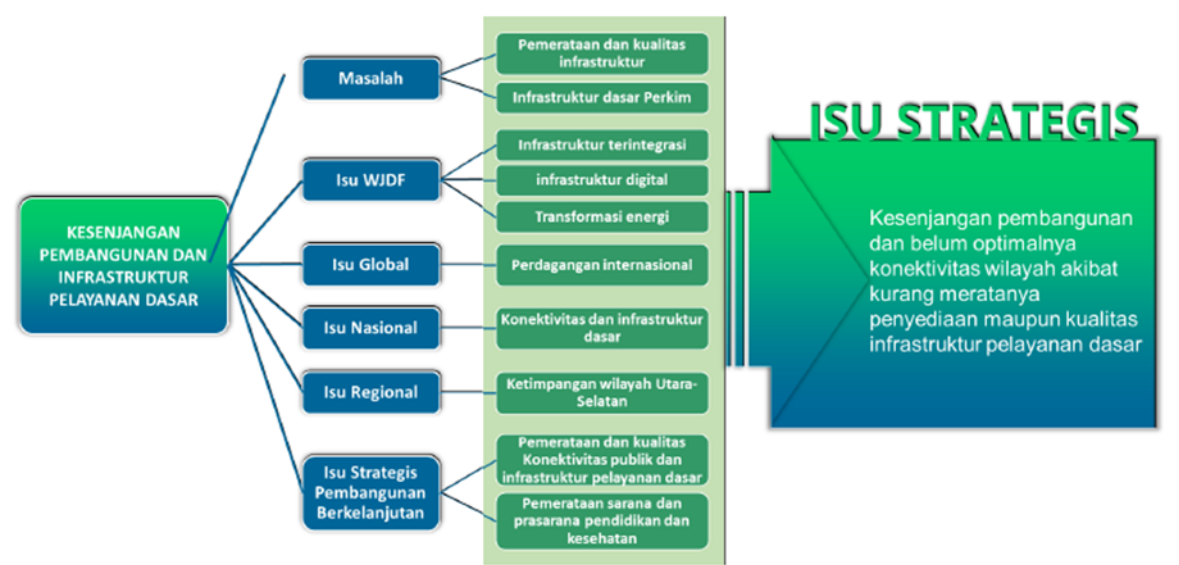
Globalisasi dan teknologi telah mengubah lanskap ekonomi secara signifikan. Sumber daya manusia yang memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan ini akan lebih mampu mempertahankan daya saingnya dalam pasar kerja yang kompetitif.

Perbaikan terhadap kualitas dan daya saing sumber daya manusia memerlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, lembaga pendidikan, dan masyarakat secara keseluruhan. Investasi dalam pendidikan, pelatihan, inovasi, kesejahteraan, dan pemberdayaan adalah kunci untuk mencapai tujuan ini dalam upaya meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan.

2.3.2.2.3. Isu Kesenjangan Pembangunan Dan Infrastruktur Pelayanan Dasar

Kesenjangan pembangunan dan belum optimalnya konektivitas wilayah akibat kurang meratanya penyediaan maupun kualitas infrastruktur pelayanan dasar merupakan salah satu permasalahan sekaligus tantangan utama dalam penyelenggaraan pembangunan di Jawa Barat. Kesenjangan dalam penyelenggaraan pembangunan akan menciptakan perbedaan kualitas kehidupan, termasuk kualitas sumber daya manusianya. Dalam Indonesia Development Forum (2018), kesenjangan ini berkaitan dengan permasalahan dalam pemenuhan layanan dasar meliputi kurangnya akses pada layanan dasar khususnya di antara masyarakat marginal yang dapat menyebabkan kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia.

Kesenjangan wilayah merupakan hal yang wajar dalam sebuah pembangunan (Saratri, 2009). Hal ini dapat terjadi karena adanya perbedaan faktor geografi, kualitas sumber daya alam dan manusia, hingga keterbatasan aksesibilitas perhubungan antar daerah. Masalah pokok yang harus dipecahkan adalah adanya konsepsi kuat untuk jangka waktu yang panjang yang dilandasi keadilan sosial dan sistem ekonomi yang tidak memihak terlalu kuat pada wilayah tertentu.



Gambar 2.44 Isu Terkait Kesenjangan Pembangunan dan Infrastruktur Pelayanan Dasar
(Sumber: RPJMD 2025-2029 Provinsi Jawa Barat, 2025)

Isu tentang kesenjangan pembangunan dan infrastruktur pelayanan dasar mencakup berbagai aspek yang mempengaruhi akses dan kualitas

hidup Masyarakat di wilayah Provinsi Jawa Barat. Berikut adalah beberapa poin penting terkait isu kesenjangan pembangunan dan infrastruktur pelayanan dasar:

1. Akses yang Tidak Merata

Salah satu masalah utama adalah ketimpangan dalam akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar seperti air bersih, sanitasi, listrik, transportasi, dan telekomunikasi. Daerah perkotaan biasanya lebih terjamin infrastrukturnya dibandingkan dengan daerah pedesaan atau terpencil.

2. Dampak pada Kualitas Hidup

Kesenjangan infrastruktur dapat mempengaruhi kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Misalnya, akses yang terbatas terhadap air bersih dan sanitasi dapat meningkatkan risiko penyakit dan menghambat pembangunan ekonomi lokal.

3. Pengembangan Ekonomi

Infrastruktur yang baik, seperti jaringan transportasi yang efisien dan listrik yang stabil, mendukung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Ketidakmampuan untuk mengakses infrastruktur yang memadai dapat menjadi hambatan serius bagi pengembangan ekonomi lokal.

4. Inklusivitas Sosial

Infrastruktur pelayanan dasar yang merata merupakan prasyarat untuk inklusi sosial yang sejati. Semua warga harus memiliki akses yang sama terhadap fasilitas dan layanan yang mendasar untuk memastikan keadilan sosial.

5. Perubahan Iklim dan Keberlanjutan

Pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan dan berkelanjutan menjadi semakin penting dalam menghadapi tantangan perubahan iklim global. Infrastruktur yang tahan terhadap bencana alam juga penting untuk mengurangi kerentanan masyarakat terhadap ancaman ini.

6. Pemerataan Pembangunan

Penting untuk menerapkan kebijakan dan program yang mengarah pada pemerataan pembangunan infrastruktur, baik dari segi geografis maupun sosial-ekonomi. Hal ini memerlukan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil.

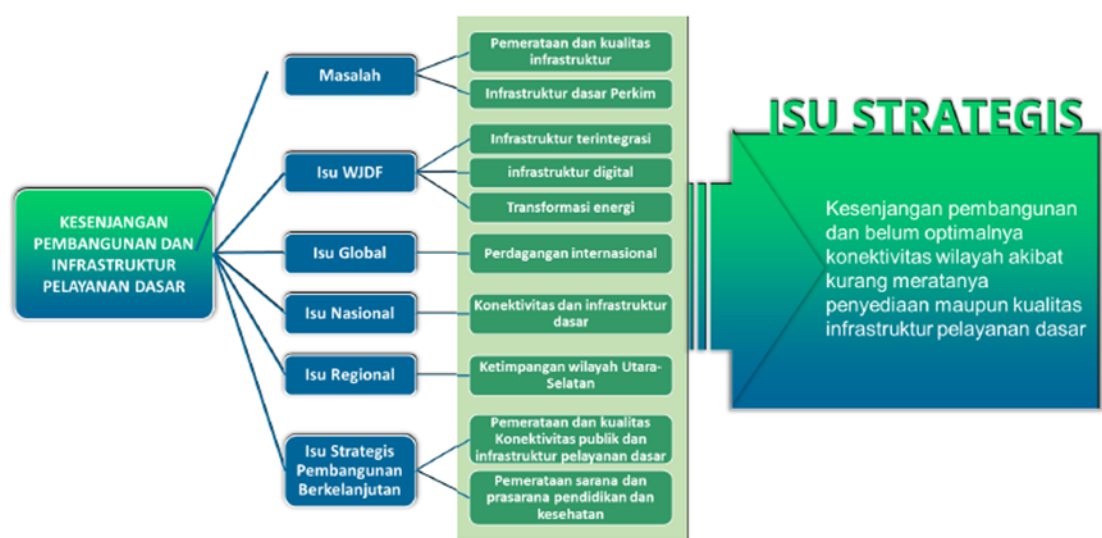
7. Tantangan Finansial

Meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar seringkali melibatkan tantangan finansial yang signifikan, terutama di negara-negara berkembang atau daerah yang terpencil. Diperlukan strategi keuangan yang inovatif dan berkelanjutan untuk membiayai pembangunan infrastruktur ini.

Penanggulangan kesenjangan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar memerlukan komitmen yang kuat dari berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah, organisasi internasional, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Investasi yang tepat waktu dan strategi yang berkelanjutan sangat penting untuk memastikan bahwa setiap individu dapat menikmati hak dasarnya secara merata dan berkelanjutan.

2.3.2.2.4. Isu Keberlanjutan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan

Perlindungan terhadap lingkungan dan ekosistem wilayah untuk memperkuat fungsi daya dukung dan daya tampung lingkungan secara berkelanjutan menghadapi tekanan pembangunan, risiko dampak perubahan iklim, dan kerawanan bencana merupakan salah satu isu utama yang perlu dipertimbangkan dalam merumuskan RPJMD dalam tahap Pembangunan Fondasi Daerah di Jawa Barat 2025-2029.



Gambar 2.45 Isu Terkait Keberlanjutan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan
(Sumber: RPJMD 2025-2029 Provinsi Jawa Barat, 2025)

Upaya pengelolaan dan penguatan daya dukung dan daya tampung lingkungan perlu dipersiapkan sejak tahap awal pembangunan Jawa Barat ini untuk menjamin kelancaran pembangunan dalam jangka panjang. Isu

keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan merupakan tema isu yang sangat penting dalam konteks perlindungan lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan. Berikut sejumlah poin utama yang terkait dengan isu keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

1. Daya Dukung dan Daya Tampung

Daya dukung lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk mendukung populasi spesies tertentu atau aktivitas manusia tanpa mengalami kerusakan yang tidak dapat dipulihkan. Daya tampung, di sisi lain mengacu pada kapasitas maksimum lingkungan untuk menanggung beban dari aktivitas manusia atau faktor lainnya tanpa menyebabkan kerusakan atau penurunan kualitas lingkungan yang signifikan.

2. *Overexploitasi* Sumber Daya

Salah satu masalah utama adalah *overexploitasi* sumber daya alam seperti air tanah, hutan, dan lahan pertanian. Jika tidak dikelola dengan baik, hal ini dapat mengarah pada penurunan kualitas lingkungan, degradasi tanah, penurunan keanekaragaman hayati, dan hilangnya ekosistem.

3. Perubahan Iklim

Perubahan iklim juga mempengaruhi daya dukung dan daya tampung lingkungan. Pemanasan global dapat mengubah pola hujan, meningkatkan suhu permukaan laut, dan menyebabkan perubahan ekstrem cuaca, yang semuanya berdampak pada ekosistem dan keberlanjutan lingkungan.

4. Manajemen Sumber Daya

Penting untuk menerapkan prinsip-prinsip manajemen sumber daya yang berkelanjutan, termasuk pengelolaan hutan secara lestari, konservasi air, penggunaan energi terbarukan, dan pengendalian polusi, untuk memastikan bahwa sumber daya alam dapat digunakan secara berkelanjutan oleh generasi saat ini dan mendatang.

5. Kehidupan Berkelanjutan

Konsep keberlanjutan mencakup tidak hanya perlindungan lingkungan fisik tetapi juga kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Pembangunan yang berkelanjutan mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan, sehingga tidak mengorbankan kepentingan generasi mendatang.

6. Kolaborasi Global

Isu keberlanjutan lingkungan adalah masalah global yang memerlukan kerjasama internasional dan komitmen bersama untuk mengatasi tantangannya. Kesepakatan internasional seperti Persetujuan Paris tentang perubahan iklim menunjukkan pentingnya kerjasama global dalam mengatasi tantangan lingkungan yang kompleks.

7. Pendidikan dan Kesadaran

Meningkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keberlanjutan lingkungan adalah langkah krusial dalam mendukung perubahan perilaku dan keputusan yang lebih ramah lingkungan di semua tingkatan masyarakat.

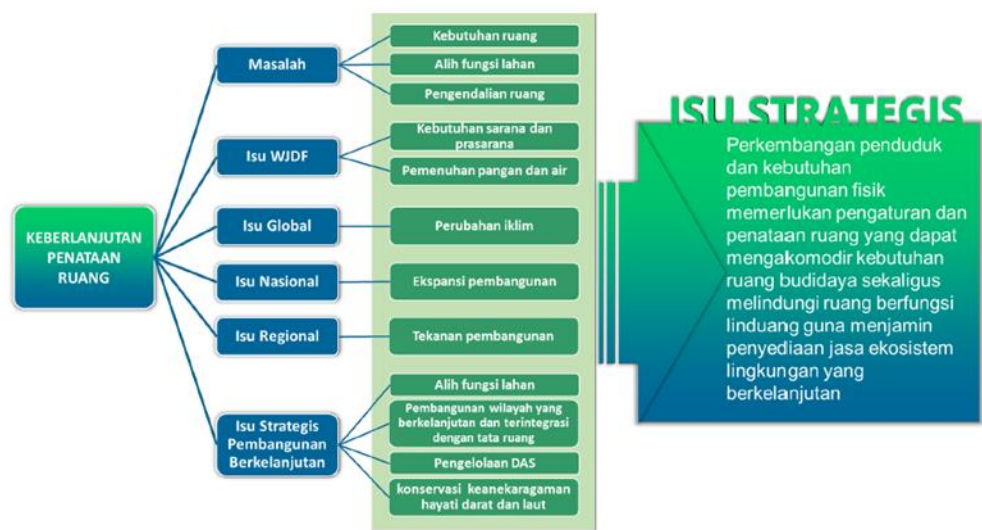
Pengelolaan sumberdaya alam untuk pemanfaatan kebutuhan penyelenggaraan pembangunan yang dapat menopang kehidupan manusia merupakan tantangan utama dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan, terdapat upaya untuk mempertahankan keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan manusia dalam jangka pendek dengan keberlanjutan pemanfaatannya untuk menunjang kehidupan yang berkelanjutan dalam pembangunan serta memperhatikan kesejahteraan sosial, ekonomi dan kelestarian fungsi lingkungan hidup hingga masa yang akan datang. Oleh karena itu, kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lainnya dan keseimbangan antar keduanya (daya dukung lingkungan hidup) serta kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya (daya tampung lingkungan hidup) penting untuk diketahui, dipahami dan dijadikan dasar dalam perencanaan pembangunan.

Perlindungan terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan adalah tanggung jawab bersama untuk memastikan bahwa ekosistem wilayah dan lingkungan dapat berfungsi dengan baik dan memberikan manfaat jangka panjang bagi kehidupan dan penghidupan manusia dan di wilayah Provinsi Jawa Barat.

2.3.2.2.5. Isu Keberlanjutan Penataan Ruang

Perkembangan penduduk dan kebutuhan pembangunan fisik memerlukan pengaturan dan penataan ruang yang dapat mengakomodir kebutuhan ruang budidaya sekaligus melindungi ruang berfungsi lindung guna menjamin penyediaan jasa ekosistem lingkungan yang berkelanjutan.

Isu keberlanjutan penataan ruang menjadi sangat relevan dalam konteks pembangunan perkotaan dan pedesaan yang berkelanjutan.



Gambar 2.46 Isu Terkait Keberlanjutan Penataan Ruang
(Sumber: RPJMD 2025-2029 Provinsi Jawa Barat, 2025)

Berikut ini adalah beberapa poin penting terkait isu keberlanjutan penataan ruang:

- 1. Pertumbuhan Perkotaan yang Berkelanjutan**
Pembangunan perkotaan yang cepat sering kali menghadapi tantangan dalam hal penggunaan lahan yang efisien, penataan kawasan yang terintegrasi, dan infrastruktur yang memadai. Keberlanjutan penataan ruang mencakup pembangunan perkotaan yang terencana dengan baik untuk mengurangi kemacetan, polusi udara, dan kerusakan lingkungan.
- 2. Perlindungan Lingkungan**
Penataan ruang yang berkelanjutan memperhatikan perlindungan lingkungan alam, termasuk pelestarian ruang terbuka hijau, konservasi ekosistem, dan penanganan limbah secara efektif. Hal ini membantu menjaga kualitas udara, air, dan tanah, serta keanekaragaman hayati yang ada di sekitar area perkotaan dan pedesaan.
- 3. Keadilan Sosial**
Kebijakan penataan ruang yang berkelanjutan harus mengutamakan keadilan sosial, memastikan akses yang sama terhadap fasilitas dan layanan publik seperti transportasi, pendidikan, kesehatan, dan perumahan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat, termasuk yang kurang mampu.

4. Adaptasi terhadap Perubahan Iklim

Perubahan iklim mempengaruhi pola cuaca dan kondisi lingkungan secara global. Penataan ruang yang berkelanjutan mencakup infrastruktur yang tahan terhadap perubahan iklim, seperti drainase yang baik untuk mengatasi banjir, penggunaan material bangunan yang ramah lingkungan, dan desain yang mengurangi jejak karbon.

5. Penggunaan Lahan yang Efisien

Isu keberlanjutan penataan ruang juga melibatkan penggunaan lahan yang efisien dan berkelanjutan. Ini mencakup zonasi yang tepat untuk penggunaan lahan, perlindungan terhadap tanah subur dan area lindung, serta pengelolaan pertanian yang berkelanjutan untuk memastikan ketahanan pangan dan keberlanjutan ekonomi pedesaan.

6. Partisipasi Masyarakat

Masyarakat harus terlibat dalam proses perencanaan dan penataan ruang, sehingga keputusan yang diambil mencerminkan kebutuhan dan aspirasi mereka. Partisipasi ini juga memastikan penerimaan dan implementasi kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

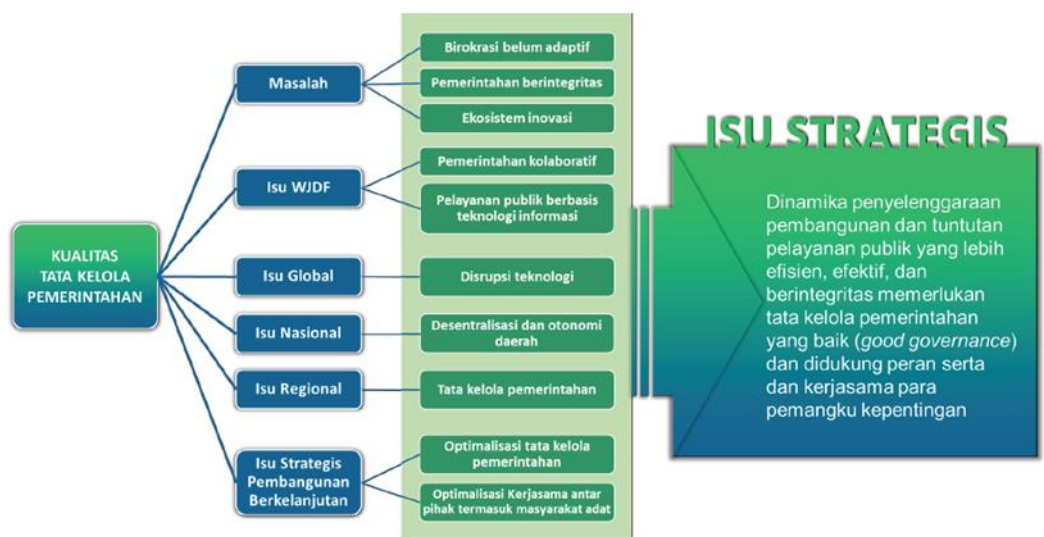
7. Kolaborasi Antar Pemerintah

Kebijakan penataan ruang yang berkelanjutan memerlukan kolaborasi antar pemerintah, termasuk pemerintah lokal, regional, dan nasional, serta sektor swasta dan masyarakat sipil. Ini penting untuk menyinkronkan kebijakan dan strategi dalam mengelola pertumbuhan perkotaan dan pedesaan secara holistik.

Melalui pendekatan yang berkelanjutan dalam penataan ruang diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat, inklusif, dan produktif bagi generasi saat ini dan masa depan. Dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam setiap keputusan penataan ruang diharapkan dapat mencapai pembangunan yang berkelanjutan secara menyeluruh.

2.3.2.2.6. Isu Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

Dinamika penyelenggaraan pembangunan dan tuntutan pelayanan publik yang lebih efisien, efektif, dan berintegritas memerlukan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan didukung peran serta dan kerjasama para pemangku kepentingan.



Gambar 2.47 Isu Terkait Kualitas Tata Kelola Pemerintahan
(Sumber: RPJMD 2025-2029 Provinsi Jawa Barat, 2025)

Isu kualitas tata kelola pemerintahan merupakan faktor krusial dalam menentukan efektivitas dan keberhasilan sebuah pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Berikut ini beberapa aspek penting yang terkait dengan isu kualitas tata kelola pemerintahan:

1. Transparansi dan Akuntabilitas

Kualitas tata kelola pemerintahan dapat diukur dari seberapa transparan dan akuntabelnya pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Transparansi mengacu pada keterbukaan informasi publik dan proses pengambilan keputusan, sementara akuntabilitas berhubungan dengan kemampuan pemerintah untuk bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka kepada masyarakat.

2. Keterlibatan Masyarakat

Tata kelola yang baik melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kebijakan yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi warga negara. Partisipasi aktif masyarakat juga membantu dalam memonitor kinerja pemerintah dan mendorong perubahan positif dalam kebijakan publik.

3. Keadilan dan Keterbukaan

Kualitas tata kelola pemerintahan juga mencakup keadilan dalam penyediaan layanan publik dan distribusi sumber daya. Pemerintah yang efektif harus memastikan bahwa keputusan dan layanan yang disediakan tidak diskriminatif dan tersedia untuk semua warga tanpa pandang bulu.

4. Efisiensi dan Efektivitas

Tata kelola yang baik menuntut efisiensi dalam penggunaan sumber daya publik, baik itu anggaran, tenaga kerja, maupun infrastruktur. Pemerintah harus mampu mengelola sumber daya dengan baik agar program-program pembangunan dan layanan publik dapat dijalankan secara efektif dan memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat.

5. Penegakan Hukum dan Anti-Korupsi

Penegakan hukum yang kuat dan sistem anti-korupsi yang efektif adalah komponen penting dari tata kelola pemerintahan yang berkualitas. Korupsi dapat merusak kepercayaan publik, menghambat pembangunan ekonomi, dan menghambat distribusi sumber daya secara adil.

6. Inovasi dan Teknologi

Pemerintah yang efektif harus mengadopsi inovasi dan teknologi terbaru untuk meningkatkan efisiensi layanan publik, meningkatkan aksesibilitas informasi, dan memfasilitasi partisipasi masyarakat yang lebih luas dalam proses pengambilan keputusan.

7. Kolaborasi dan Kemitraan

Kualitas tata kelola pemerintahan juga ditentukan oleh kemampuan pemerintah untuk bekerja sama dengan sektor swasta, organisasi non-pemerintah, dan lembaga internasional untuk menciptakan solusi bersama atas tantangan yang kompleks dan lintas-batas.

Secara keseluruhan, kualitas tata kelola pemerintahan berperan penting dalam membentuk kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan yang stabil dan berkelanjutan. Pemerintah yang baik mampu mengelola negara dengan adil, efektif, dan transparan, sehingga mampu memenuhi harapan masyarakat dan mendukung perkembangan yang berkelanjutan.

2.3.2.3. Isu Strategis Kabupaten Sumedang

Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 dirumuskan dengan menggunakan kriteria-kriteria yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan; merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah; luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat; memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah; dan potensial untuk dikelola. Hasil perumusan isu strategis pembangunan Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 telah mempertimbangkan isu strategis global, Nasional dan Provinsi Jawa Barat serta dengan memperhatikan isu

Pembangunan berkelanjutan KLHS RPJMD selain memperhatikan pula isu strategis dalam RPJPD Kabupaten Sumedang 2025-2045. Isu Pembangunan berkelanjutan berdasarkan KLHS RPJMD Kabupaten Sumedang meliputi:

1. Perlindungan dan bantuan sosial, serta mitigasi bencana yang belum maksimal dalam mengentaskan kemiskinan dan mewujudkan ketahanan keluarga;
2. Infrastruktur dasar yang belum memadai seperti akses air bersih dan sanitasi, tempat tinggal layak, konektivitas transportasi, ketenagalistrikan, jaringan internet serta pengelolaan sampah dan limbah;
3. Minimnya ekosistem ekonomi berbasis teknologi dan pembangunan berkelanjutan serta rendahnya produktivitas sektor ekonomi primer dan daya tarik pariwisata;
4. Belum optimalnya sarana prasarana dan pelayanan cakupan akses kesehatan, pengendalian dan pencegahan stunting, penyakit menular, serta kapasitas tenaga kesehatan yang masih rendah dan belum merata;
5. Kualitas regulasi dan koordinasi perencanaan dan pengelolaan wilayah yang kurang mendukung upaya pelestarian keanekaragaman hayati;
6. Belum meratanya akses dan kualitas pendidikan serta perlunya peningkatan pelestarian budaya dan kearifan lokal.

Tabel 2.78 Penentuan Isu Strategis Daerah

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Penduduk Usia Produktif Masih Dominan dan puncaknya sampai Tahun 2030 (Berdasarkan Proyeksi Data BPS) Terdapat peluang untuk memperkuat sektor pendidikan dan kesehatan dengan pemanfaatan teknologi dalam pelayanan dan pembelajaran serda Keberadaan Kawasan Pendidikan Tinggi di Jatinangor	RLS dan HLS masih Rendah	Belum meratanya akses dan kualitas pendidikan serta perlunya peningkatan pelestarian budaya dan kearifan lokal	Demografi memainkan peran penting karena pertumbuhan dan distribusi penduduk akan menentukan kebutuhan infrastruktur pendidikan serta kualitas SDM di masa depan	Bonus Demografi bagi Kabupaten Sumedang memiliki peluang besar untuk memanfaatkan bonus demografi dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan pengembangan SDM. Dalam konteks pendidikan, hal ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi generasi muda, sehingga mereka dapat menjadi SDM unggul yang siap bersaing di pasar kerja regional maupun global	Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia berkaitan dengan pendidikan dan SDM. Fokusnya adalah meningkatkan kualitas pendidikan, keterampilan, dan kompetensi masyarakat agar dapat bersaing di tingkat regional, nasional, maupun global. Kesenjangan Pembangunan dan Infrastruktur Pelayanan Dasar melibatkan distribusi pembangunan dan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, air bersih, dan fasilitas kesehatan. Infrastruktur pendidikan (seperti sekolah dan laboratorium) juga termasuk dalam kategori ini.	SDM dan Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat
	Akses terbatas terhadap pendidikan tinggi dan fasilitas kesehatan di daerah pedesaan					
	Angka Stunting masih tinggi (14,4% Data SSGI)	Belum optimalnya sarana prasarana dan pelayanan cakupan akses kesehatan,				
	Kasus TBC Masih tinggi Jumlah Kematian Ibu dan Bayi masih cukup tinggi	pengendalian dan pencegahan stunting, penyakit menular, serta kapasitas tenaga kesehatan yang masih rendah dan belum merata				

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Reformasi Birokrasi berjalan Baik dibuktikan dengan Nilai Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Profesionalitas Aparatur, Indeks Pelayanan Publik dan Nilai SAKIP yang sudah cukup tinggi	1) Beberapa layanan publik belum sepenuhnya berbasis digital. 2) Kapasitas ASN belum merata, terutama di kecamatan-kecamatan terpencil. 3) Survei Penilaian Integritas (SPI) menunjukkan skor kategori rentan				Kualitas Tata Kelola Pemerintahan ini berfokus pada transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pemerintah dalam mengelola pembangunan.	Tata kelola pemerintahan dan profesionalitas aparatur
Ketersediaan aksesibilitas dan infrastruktur yang terhubung dengan kawasan dan sentra perekonomian	Infrastruktur dasar yang belum memadai, terutama di daerah yang terhubung dengan wilayah perdesaan yang terpencil	Infrastruktur dasar yang belum memadai seperti akses air bersih dan sanitasi, tempat tinggal layak, konektivitas transportasi, ketenagalistrikan, jaringan internet serta pengelolaan sampah dan limbah	Kebutuhan untuk mengintegrasikan pembangunan infrastruktur dengan standar perubahan iklim dan energi terbarukan	Penyelarasan pembangunan infrastruktur dengan ekonomi hijau	Kesenjangan Pembangunan dan Infrastruktur Pelayanan Dasar melibatkan distribusi pembangunan dan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, air bersih, dan fasilitas kesehatan. Infrastruktur pendidikan (seperti sekolah dan laboratorium) juga termasuk dalam kategori ini.	Infrastruktur dan prasarana pengembangan wilayah

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Posisi geografis Sumedang yang strategis, serta sumber daya alam yang melimpah (pertanian, kehutanan, energi terbarukan, dan air)	Penurunan kualitas air, konversi lahan pertanian untuk pembangunan, dan risiko bencana alam	Minimnya ekosistem ekonomi berbasis teknologi dan pembangunan berkelanjutan serta rendahnya produktivitas sektor ekonomi primer dan daya tarik pariwisata	Dampak perubahan iklim yang mempengaruhi ketahanan pangan dan bencana alam	Kebijakan energi terbarukan dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan	Pengelolaan kawasan perbatasan DAS yang dapat mempengaruhi kualitas air	Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif
Kabupaten Sumedang memiliki potensi besar dalam sektor pertanian dan penyediaan air dengan dua DAS besar (Cimanuk dan Citarum)	Ketidakmampuan beberapa kecamatan dalam mencapai ambang batas ketersediaan pangan dan air yang memadai, serta potensi pengurangan kapasitas daya dukung lingkungan akibat pembangunan	Pengelolaan daya dukung alam yang terintegrasi untuk ketahanan pangan dan air.	Perubahan iklim secara langsung memengaruhi pola tanam, ketersediaan air, serta produktivitas lahan pertanian akibat cuaca ekstrem seperti kekeringan atau banjir. Hal ini menjadi tantangan besar bagi petani di Sumedang untuk mempertahankan hasil produksi pangan yang stabil	Pengelolaan pertanian yang berkelanjutan Perubahan Iklim, Daya Dukung, dan Daya Tampung Lingkungan menjadi ancaman serius bagi sektor pertanian di Kabupaten Sumedang. Pola cuaca yang tidak menentu, seperti musim kemarau yang lebih panjang atau curah hujan ekstrem, dapat memengaruhi pola tanam, produktivitas lahan, dan distribusi air untuk irigasi	Green Economy (Ekonomi Hijau) dapat diterapkan melalui praktik pertanian berkelanjutan, seperti pertanian organik, agroforestri, dan pengelolaan lahan dengan pendekatan ramah lingkungan. Blue Economy (Ekonomi Biru) dapat dimanfaatkan melalui optimalisasi sumber daya air untuk mendukung pertanian. Pembangunan Inklusif juga penting untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat, termasuk petani kecil dan kelompok marjinal, dapat berpartisipasi dalam aktivitas pertanian dan menikmati hasilnya	Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif

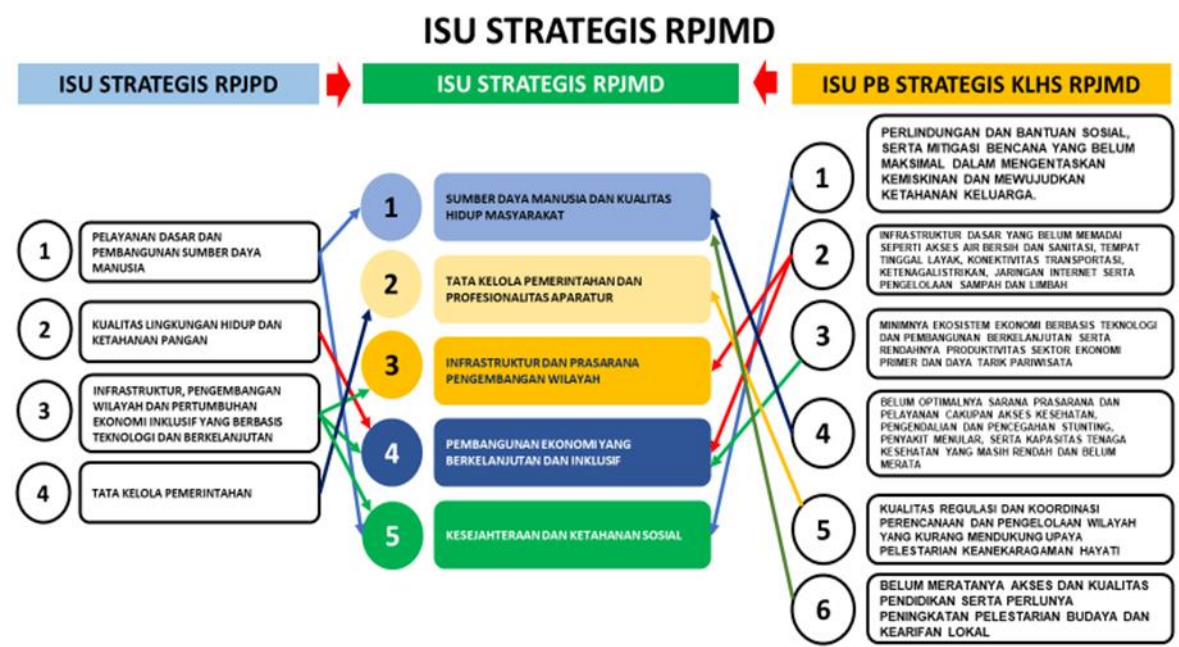
POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Kabupaten Sumedang memiliki potensi dalam sektor ekonomi berkelanjutan, terutama dalam pengembangan industri kreatif, pariwisata, dan pertanian	Terdapat kesenjangan pendapatan yang signifikan antara daerah perkotaan (seperti Jatinangor) dan daerah pedesaan, yang mempengaruhi akses terhadap pendidikan dan layanan dasar	Pengelolaan sumber daya sosial yang lebih adil dan berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan antara daerah kaya dan miskin	Perubahan tren pasar global yang mempengaruhi pendapatan sektor informal.	Ketimpangan ekonomi yang masih signifikan di berbagai daerah, termasuk ketimpangan akses layanan dan pendapatan	Ketimpangan akses dan kualitas pekerjaan di daerah pedesaan yang lebih bergantung pada sektor pertanian	Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif
Sumedang berada di kawasan dengan kerentanannya terhadap bencana seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan	Kurangnya kapasitas adaptasi dan mitigasi bencana di beberapa wilayah.	Meningkatkan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim dan kesiapsiagaan bencana	Perubahan iklim yang meningkatkan frekuensi dan intensitas bencana alam	Kebijakan mitigasi bencana dan peningkatan kapasitas adaptasi di daerah rawan bencana	Kerentanan terhadap bencana alam yang semakin meningkat di wilayah perbatasan dengan kawasan perkotaan	Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif
Potensi besar dalam mengembangkan sektor industri kecil dan menengah yang berkelanjutan, serta pelatihan keterampilan berbasis teknologi dan digital	Keterbatasan keterampilan tenaga kerja di sektor formal, terutama bagi penduduk yang tinggal di daerah pedesaan, yang mengurangi daya saing tenaga kerja Sumedang di pasar global	Pengembangan pelatihan yang berbasis pada teknologi hijau dan sumber daya alam lokal untuk menciptakan tenaga kerja yang adaptif terhadap perkembangan industri masa depan	Perkembangan teknologi yang membutuhkan tenaga kerja dengan keterampilan baru dan adaptif	Proses industrialisasi yang membutuhkan tenaga kerja dengan keahlian tinggi dalam bidang manufaktur dan teknologi	Keterbatasan kesempatan kerja di daerah pedesaan yang mendorong urbanisasi.	Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Keberadaan program pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas yang sudah berjalan dan berpotensi lebih ditingkatkan, terutama dengan pendekatan berbasis lingkungan	Tingginya angka kemiskinan di beberapa kecamatan, terutama di daerah perbatasan, yang memerlukan intervensi sosial-ekonomi lebih cepat	Perlindungan dan bantuan sosial, serta mitigasi bencana yang belum maksimal dalam mengentaskan kemiskinan dan mewujudkan ketahanan keluarga	Krisis ekonomi global akibat pandemi Covid-19 yang memperburuk situasi masyarakat miskin dan memengaruhi akses pangan	Strategi pengurangan kemiskinan dengan pendekatan yang holistik dan terpadu antara sosial-ekonomi dan lingkungan	Tantangan daerah pedesaan dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang setara dengan daerah perkotaan	Kesejahteraan dan ketahanan sosial

Sumber: Laporan KLHS RPJMD Kabupaten Sumedang dan Analisis BAPPPEDA, 2025

Dari Tabel di atas, maka isu strategis Kabupaten Sumedang untuk periode Tahun 2025-2029 adalah:

1. Sumber daya manusia dan kualitas hidup masyarakat.
2. Tata kelola pemerintahan dan profesionalitas aparatur.
3. Infrastruktur dan prasarana pengembangan wilayah.
4. Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.
5. Kesejahteraan dan ketahanan sosial.



Gambar 2.48 Keterkaitan Isu Strategis RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 dengan Isu Strategis RPJPD Tahun 2025-2045 serta Isu Pembangunan Berkelanjutan pada KLHS RPJMD Tahun 2025-2029
(Sumber: Analisis BAPPPEDA, 2025)

2.3.2.3.1. Sumber Daya Manusia (SDM) dan Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat

Kabupaten Sumedang memiliki potensi besar untuk mengembangkan SDM yang unggul dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam penanganan isu strategis tersebut melalui aspek-aspek berikut:

1. Peningkatan Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Sumedang relatif masih rendah dibandingkan dengan standar regional maupun nasional. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya: a. Minimnya akses pendidikan di wilayah terpencil. Banyak masyarakat di daerah pedesaan yang tidak dapat melanjutkan pendidikan hingga jenjang menengah atas atau perguruan tinggi karena keterbatasan fasilitas dan

biaya; b. Tingginya angka putus sekolah dikarenakan faktor ekonomi keluarga sering menjadi alasan utama anak-anak tidak melanjutkan Pendidikan; c. Relevansi kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja. Kurikulum yang kurang adaptif terhadap kebutuhan industri menyebabkan minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan menurun.

2. Pemerataan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan

Kualitas Pendidikan relatif masih tidak merata antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Kurangnya tenaga pengajar berkualitas di daerah terpencil dan tenaga pengajar profesional cenderung memilih bekerja di wilayah perkotaan. Sarana prasarana yang minim di beberapa sekolah di pedesaan yang tidak memiliki fasilitas memadai, seperti laboratorium, perpustakaan, dan teknologi informasi. Kurangnya inovasi dalam metode pembelajaran. Metode pembelajaran tradisional masih mendominasi, sehingga kurang efektif dalam meningkatkan kompetensi siswa.

3. Pemerataan Pelayanan Kesehatan di setiap wilayah

Pemerataan pelayanan kesehatan di setiap wilayah merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam pembangunan daerah Kabupaten Sumedang. Isu ini menjadi prioritas karena kesehatan adalah fondasi utama untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mendukung produktivitas ekonomi, dan menciptakan generasi yang sehat dan cerdas. Namun, kondisi pelayanan kesehatan di Kabupaten Sumedang masih menghadapi berbagai tantangan, terutama ketimpangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Kondisi kabupaten Sumedang memiliki karakteristik geografis yang cukup kompleks, dengan wilayah dataran tinggi, pegunungan, hingga dataran rendah. Kondisi ini menyebabkan distribusi fasilitas kesehatan tidak merata, sehingga masyarakat di wilayah terpencil sering kali kesulitan mengakses layanan kesehatan.

4. Penguatan Ahlak dan Nilai-nilai Budaya

Penguatan akhlak dan nilai-nilai budaya merupakan hal yang sangat relevan dalam pembangunan daerah Kabupaten Sumedang. Dalam konteks modernisasi dan globalisasi yang semakin pesat, menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya lokal serta memperkuat akhlak masyarakat menjadi tantangan sekaligus prioritas utama. Kabupaten Sumedang, yang kaya akan warisan budaya tradisional, memiliki

potensi besar untuk mengintegrasikan nilai-nilai budaya ini ke dalam pembangunan manusia (SDM) yang unggul dan berkepribadian luhur. Namun, di tengah arus perubahan zaman, terjadi erosi nilai-nilai budaya lokal dan moralitas yang dapat memengaruhi kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, penguatan akhlak dan nilai-nilai budaya tidak hanya penting untuk menjaga identitas daerah, tetapi juga untuk mendukung pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis karakter.

5. *Zero New Stunting* dan Pencegahan Penyakit Menular

Zero new stunting (nol kasus baru stunting) dan pencegahan penyakit menular sangat penting dalam pembangunan daerah Kabupaten Sumedang. Hal tersebut memiliki dampak langsung terhadap kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), produktivitas ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Kabupaten Sumedang, sebagai daerah dengan potensi besar dalam sektor pertanian, industri, dan pariwisata, memerlukan SDM yang sehat dan berkualitas untuk mendukung pencapaian visi pembangunan daerahnya.

Adanya tantangan seperti tingginya angka stunting dan penyebaran penyakit menular masih menjadi kendala serius di beberapa wilayah, terutama di daerah pedesaan. Oleh karena itu, penanganan kedua aspek ini harus dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan untuk menciptakan masyarakat yang sehat, sejahtera, dan produktif.

6. Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi

Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) tidak hanya menjadi indikator kesehatan masyarakat, tetapi juga cerminan dari kualitas layanan kesehatan, aksesibilitas fasilitas kesehatan, serta tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan maternal dan neonatal. Kabupaten Sumedang, sebagai daerah dengan potensi besar dalam sektor pertanian, industri, dan pariwisata, membutuhkan SDM yang sehat dan berkualitas untuk mendukung visi pembangunannya. Oleh karena itu, penurunan AKI dan AKB menjadi prioritas utama dalam upaya menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif.

2.3.2.3.2. Tata Kelola Pemerintahan dan Profesionalitas Aparatur

Kabupaten Sumedang sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat memiliki potensi besar dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya. Namun, keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada kualitas tata kelola pemerintahan dan profesionalitas aparatur yang menjadi tulang punggung pelaksanaan kebijakan. Berikut adalah beberapa aspek penting terkait isu Tata Kelola Pemerintahan dan Profesionalitas Aparatur:

1. Penguatan Integritas & Profesionalitas Aparatur

Penguatan integritas dan profesionalitas aparatur merupakan solusi strategis yang sangat relevan dalam menangani isu tata kelola pemerintahan di Kabupaten Sumedang. Dengan meningkatkan integritas dan profesionalitas aparatur, pemerintah daerah dapat menciptakan sistem pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Hal ini tidak hanya akan mendukung pembangunan daerah, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

2. Penguatan Inovasi, Digitalisasi dan Kemudahan Akses Layanan Publik.

Dalam konteks tata kelola pemerintahan dan profesionalitas aparatur, pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik. Untuk memastikan keberhasilan penguatan inovasi, digitalisasi, dan kemudahan akses layanan publik, sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya sangat diperlukan.

3. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki kaitan yang sangat erat dengan penanganan isu strategis pembangunan daerah, termasuk di Kabupaten Sumedang, dalam konteks Tata Kelola Pemerintahan dan Profesionalitas Aparatur. PAD adalah salah satu sumber pendanaan penting bagi pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mendorong kemandirian fiskal daerah. Dengan meningkatkan PAD, pemerintah daerah dapat mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat, sehingga memberikan lebih banyak ruang untuk inovasi dan efisiensi dalam tata kelola pemerintahan.

4. Penguatan Akuntabilitas

Dalam menangani isu-isu terkait tata kelola pemerintahan dan profesionalitas aparatur di Kabupaten Sumedang. Akuntabilitas adalah

prinsip dasar dalam *good governance* yang menjamin bahwa setiap kebijakan, program, dan tindakan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik dalam hal proses maupun hasilnya.

Dengan memperkuat akuntabilitas, pemerintah daerah dapat menciptakan sistem pemerintahan yang transparan, efisien, dan berorientasi pada hasil. Selain itu, penguatan akuntabilitas juga akan mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan dengan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mengurangi risiko praktik korupsi.

2.3.2.3.3. Infrastruktur dan Prasarana Pengembangan Wilayah

Infrastruktur dan prasarana pengembangan wilayah di Kabupaten Sumedang mencerminkan tantangan besar yang harus dihadapi dalam rangka mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Potensi besar dalam pengembangan wilayah yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pembangunan berkelanjutan. Beberapa aspek penting terkait isu strategis Infrastruktur dan Prasarana Pengembangan Wilayah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur Jalan

Infrastruktur jalan yang baik dan merata tidak hanya menjadi tulang punggung mobilitas masyarakat, tetapi juga berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, pengembangan wilayah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan pendekatan yang terencana dan terintegrasi, peningkatan infrastruktur jalan dapat menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi, pengembangan wilayah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sumedang.

2. Pembukaan Akses Jalan Baru, Konektivitas, dan Pengembangan Wilayah

Pembangunan infrastruktur jalan baru, peningkatan konektivitas antarwilayah, serta pengembangan wilayah menjadi elemen kunci yang harus diperhatikan secara strategis. Ketiga aspek ini saling terkait dan dapat berkontribusi pada percepatan pembangunan ekonomi, pemerataan infrastruktur, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan perencanaan yang matang, implementasi yang tepat, dan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, provinsi, dan

kabupaten, Kabupaten Sumedang dapat menjadi daerah yang maju, kompetitif, dan inklusif.

3. Peningkatan Kualitas Irigasi Pertanian

Memiliki potensi pertanian yang besar, dengan sebagian besar masyarakatnya menggantungkan hidup pada sektor ini. Namun, untuk memaksimalkan potensi tersebut, diperlukan peningkatan kualitas infrastruktur irigasi pertanian sebagai salah satu elemen penting dalam pembangunan daerah. Peningkatan irigasi tidak hanya berdampak langsung pada produktivitas pertanian, tetapi juga menjadi kunci dalam menangani isu strategis terkait infrastruktur dan prasarana pengembangan wilayah di Kabupaten Sumedang.

4. Pemerataan konektivitas jaringan internet

Ketimpangan akses internet antara wilayah perkotaan dan pedesaan masih menjadi tantangan serius. Minimnya konektivitas digital di wilayah pedesaan menghambat transformasi ekonomi dan sosial masyarakat. Digitalisasi layanan publik juga memerlukan jaringan internet yang stabil.

5. Infrastruktur Pengelolaan Sampah

Masalah persampahan masih memerlukan penanganan serius. Terutama sampah makanan menjadi penyumbang terbesar masalah sampah, sementara sistem pengelolaan sampah belum optimal. Hal ini berdampak negatif pada kualitas lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat. Untuk itu infrastruktur pengelolaan sampah memang merupakan salah satu aspek yang sangat penting. Permasalahannya tidak hanya terkait dengan kebersihan lingkungan, tetapi juga berdampak pada kesehatan masyarakat, ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, pengelolaan sampah yang baik menjadi kunci untuk mendukung pembangunan wilayah yang berkelanjutan.

6. Akses Air Bersih dan Sanitasi

Ketersediaan air bersih dan sistem sanitasi yang baik tidak hanya menjadi kebutuhan dasar manusia, tetapi juga berperan krusial dalam menjaga kesehatan masyarakat, meningkatkan produktivitas, serta mendukung pembangunan ekonomi dan lingkungan yang berkelanjutan. Akses air bersih dan sanitasi merupakan elemen penting dalam pembangunan infrastruktur dan prasarana pengembangan wilayah di Kabupaten Sumedang. Dengan meningkatkan akses air bersih dan sanitasi, pemerintah dapat meningkatkan kualitas hidup

masyarakat, mendukung pembangunan ekonomi, dan menjaga kelestarian lingkungan. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, serta penerapan teknologi inovatif dan kebijakan yang tepat.

7. Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan

Tata ruang merupakan instrumen utama dalam perencanaan pembangunan wilayah yang bertujuan untuk mengatur pemanfaatan lahan secara optimal, efisien, dan berkelanjutan. Sementara itu, alih fungsi lahan sering kali menjadi isu strategis karena dampaknya terhadap lingkungan, ekonomi, dan sosial masyarakat. Dengan pengelolaan yang baik, tata ruang dapat menjadi alat untuk mengarahkan pembangunan yang berkelanjutan, sementara pengendalian alih fungsi lahan dapat melindungi ketahanan pangan dan kelestarian lingkungan.

8. Energi Baru Terbarukan (EBT)

Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) tidak hanya berkontribusi pada pemenuhan kebutuhan energi secara berkelanjutan, tetapi juga mendukung upaya mitigasi perubahan iklim, pengurangan ketergantungan pada bahan bakar fosil, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi hijau. Dengan memanfaatkan potensi EBT, Kabupaten Sumedang dapat mencapai kemandirian energi, mengurangi dampak lingkungan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, serta penerapan teknologi dan kebijakan yang tepat.

9. Pembangunan dan Pengembangan Rumah Layak Huni

Rumah layak huni tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan tempat tinggal yang aman, nyaman, dan sehat bagi masyarakat, tetapi juga memiliki dampak luas terhadap kualitas hidup, pembangunan ekonomi, serta keberlanjutan lingkungan. Dengan memastikan akses terhadap rumah layak huni, pemerintah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendukung pembangunan ekonomi, dan menjaga kelestarian lingkungan.

2.3.2.3.4. Pembangunan Ekonomi Yang Berkelanjutan dan Inklusif

Dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, kesenjangan sosial, dan transformasi ekonomi, diperlukan strategi yang komprehensif untuk memastikan bahwa pembangunan tidak hanya fokus pada pertumbuhan, tetapi juga pada pemerataan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Untuk mengidentifikasi isu strategis serta memberikan solusi dalam mendorong ekonomi Kabupaten Sumedang yang tangguh, inklusif, dan ramah lingkungan, disajikan beberapa aspek penting sebagai berikut:

1. Pengembangan Kawasan Perekonomian

Dengan memanfaatkan potensi lokal, inovasi teknologi, dan kolaborasi antar-pihak, pengembangan kawasan ini dapat menjadi motor penggerak perekonomian daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Pengembangan kawasan perkonomian baru memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Meskipun menghadapi sejumlah hambatan seperti keterbatasan infrastruktur, minimnya kapasitas SDM, dan kurangnya investasi, ada banyak peluang yang dapat dimanfaatkan, seperti potensi lokal, dukungan kebijakan, dan perkembangan teknologi. Dengan strategi yang tepat, seperti peningkatan infrastruktur, pemberdayaan SDM, dan kolaborasi antar-pihak, pengembangan kawasan perkonomian baru dapat menjadi motor penggerak perekonomian Kabupaten Sumedang.

2. Peningkatan Nilai Inverstasi Daerah

Investasi daerah tidak hanya membawa modal finansial, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya saing daerah, serta mendorong inovasi teknologi dan keberlanjutan lingkungan. Dengan memanfaatkan potensi lokal dan menciptakan iklim investasi yang kondusif, dapat menjadi tujuan investasi yang menarik bagi pelaku usaha domestik maupun internasional. Peningkatan nilai investasi daerah merupakan solusi strategis untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di Kabupaten Sumedang.

3. Pengembangan dan Penguatan Usaha Mikro Kecil, Ekonomi Kreatif dan Koperasi

Pengembangan dan penguatan Usaha Mikro Kecil (UMK), Ekonomi Kreatif, serta Koperasi merupakan salah satu prioritas dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Ketiga sektor ini memiliki peran

strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dengan memberikan akses permodalan, meningkatkan kapasitas pelaku usaha, memanfaatkan teknologi digital, dan membangun sinergi antar-sektor.

4. Digitalisasi Ekonomi

Pembangunan infrastruktur digital menjadi fondasi utama dalam upaya digitalisasi ekonomi. Tanpa akses internet yang memadai, potensi digitalisasi tidak akan tercapai. Dengan memanfaatkan teknologi digital, pemerintah dapat meningkatkan efisiensi, memperluas akses pasar, dan memberdayakan masyarakat secara lebih merata. Digitalisasi ekonomi di Kabupaten Sumedang dapat diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur digital, pemberdayaan pelaku ekonomi lokal, pengembangan ekonomi kreatif, pemanfaatan teknologi, dan kolaborasi antar-pemangku kepentingan untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

5. Kualitas dan Daya Saing Tenaga Kerja serta Perluasan Lapangan Pekerjaan

Pembangunan ekonomi berkelanjutan dan inklusif merupakan salah satu prioritas utama dalam perencanaan pembangunan daerah, termasuk di Kabupaten Sumedang. Dalam konteks ini, peningkatan kualitas dan daya saing tenaga kerja serta perluasan lapangan pekerjaan menjadi elemen kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan. Dengan memanfaatkan potensi lokal, mengembangkan sumber daya manusia, dan menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak, Pemerintah Kabupaten Sumedang dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

6. Pengembangan Sektor Pertanian dan Peternakan untuk mendukung Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi masyarakat secara kuantitas dan kualitas, aman, merata, serta terjangkau oleh semua lapisan masyarakat. Infrastruktur yang memadai sangat penting untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan peternakan.

Pengembangan sektor pertanian dan peternakan di Kabupaten Sumedang harus dilakukan secara terintegrasi dengan melibatkan

berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, petani, peternak, akademisi, hingga pelaku industri. Dengan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, Sumedang dapat menjadi contoh daerah yang berhasil mencapai ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

7. Penanganan dan Pengelolaan Persampahan

Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan pencemaran tanah, air, dan udara. Ini berdampak pada kerusakan ekosistem lokal, seperti sungai yang tersumbat sampah atau lahan yang terkontaminasi limbah. Implementasi sistem pengelolaan sampah berbasis *reduce, reuse, recycle* (3R) dapat mengurangi volume sampah yang dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Selain itu, pengolahan sampah organik menjadi kompos atau biogas dapat mendukung pertanian lokal dan energi terbarukan.

8. Penanganan Bencana

Kabupaten Sumedang, sebagai salah satu daerah di Jawa Barat, memang dikenal sebagai wilayah yang rawan bencana alam, seperti tanah longsor, banjir bandang, gempa bumi, dan kekeringan. Hal ini disebabkan oleh kondisi geografis, topografi, serta aktivitas manusia yang dapat memperburuk kerentanan lingkungan. Oleh karena itu, penanganan bencana menjadi aspek penting dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan dan inklusif di wilayah tersebut. Penanganan bencana di kabupaten Sumedang bukan hanya soal respons terhadap kejadian bencana, tetapi juga merupakan bagian integral dari pembangunan ekonomi berkelanjutan dan inklusif. Dengan pendekatan yang komprehensif, melibatkan semua pemangku kepentingan, dan memperhatikan aspek keberlanjutan serta inklusivitas, Sumedang dapat mengurangi risiko bencana dan membangun ketahanan masyarakat terhadap ancaman bencana alam.

9. Pengembangan Pariwisata

Pariwisata memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, serta melestarikan budaya dan lingkungan. Namun, pengembangan pariwisata harus dilakukan dengan pendekatan yang berkelanjutan dan inklusif agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa merusak sumber daya alam dan budaya setempat. Dengan mengelola pariwisata secara bijak, Sumedang dapat

memanfaatkan potensinya sebagai destinasi wisata unggulan sekaligus melindungi keberlanjutan sumber daya alam dan budaya lokal.

10. Ketersediaan dan Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok

Kebutuhan pokok seperti beras, gula, minyak goreng, daging, telur, sayuran, dan lainnya adalah elemen dasar yang mendukung kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, memastikan ketersediaan dan stabilitas harga barang-barang ini sangat krusial untuk menjaga kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Upaya ini tidak hanya akan mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan dan inklusif, tetapi juga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

2.3.2.3.5. Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial

Kabupaten Sumedang memiliki potensi ekonomi yang cukup besar, didukung oleh sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan industri kecil menengah (IKM). Namun, pertumbuhan ekonominya masih dipengaruhi oleh tantangan, diantaranya kesenjangan ekonomi antarwilayah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan Kabupaten Sumedang masih menjadi perhatian serius. Meskipun ada tren penurunan, jumlah penduduk miskin relatif tinggi, terutama di wilayah perdesaan. Adapun upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang adalah meluncurkan berbagai program untuk mengurangi kemiskinan, seperti bantuan sosial, pelatihan keterampilan, dan pemberdayaan UMKM. Berikut beberapa aspek penting terkait dengan isu kesejahteraan dan ketahanan sosial adalah:

1. Efektivitas Perlindungan Sosial dan Bantuan Sosial

Beberapa kebijakan yang dimiliki Kabupaten Sumedang telah dirancang untuk melindungi masyarakat rentan dan memberikan bantuan kepada kelompok miskin atau terdampak bencana, meliputi: a. Program Keluarga Harapan (PKH): Program nasional yang juga dilaksanakan di Sumedang untuk membantu keluarga miskin; b. Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT): Bantuan dalam bentuk *voucher* atau kartu elektronik untuk membeli kebutuhan pangan; c. Bantuan Langsung Tunai (BLT): Diberikan kepada masyarakat yang terdampak bencana alam; d. Jaminan Sosial: Termasuk program jaminan kesehatan seperti BPJS Kesehatan bagi masyarakat miskin; e. Program Inovatif Lokal: Pemerintah Kabupaten Sumedang juga menciptakan program inovatif

seperti "Sumedang Simpati" yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun, efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada pelaksanaan di lapangan. Jika tidak ada koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, distribusi bantuan dan perlindungan sosial dapat terhambat.

2. Pemberdayaan serta Perlindungan Perempuan dan Anak

Masalah pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta anak mencakup berbagai aspek, termasuk kekerasan, ketimpangan gender, minimnya akses pendidikan dan kesehatan, serta faktor budaya. Solusi yang efektif adalah memerlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi terkait untuk menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung bagi perempuan dan anak. Dengan melibatkan edukasi, penguatan institusi, peningkatan akses ekonomi dan kesehatan, serta dorongan partisipasi perempuan dalam pembangunan.

3. Pelayanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Merupakan salah satu program pemerintah daerah yang bertujuan untuk memberikan bantuan dan dukungan kepada masyarakat yang membutuhkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial. Program ini dirancang untuk menjangkau kelompok rentan, seperti lanjut usia (lansia), penyandang disabilitas, anak terlantar, korban kekerasan, keluarga miskin, dan kelompok lain yang memerlukan perlindungan sosial. Dengan berbagai program yang telah dilaksanakan, program ini telah memberikan manfaat signifikan. Namun, tantangan seperti fiskal yang terbatas dan data yang tidak akurat perlu diatasi agar program ini dapat berjalan lebih efektif dan merata.

4. Penguatan Peran Kelembagaan Sosial

Penguatan peran kelembagaan sosial dalam menangani isu strategis kesejahteraan dan ketahanan sosial merupakan langkah penting untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, serta berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Akan tetapi perlu melakukan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah hingga masyarakat lokal. Dengan fokus pada peningkatan kapasitas, kolaborasi, dan pemberdayaan, isu strategis kesejahteraan dan ketahanan sosial dapat ditangani secara efektif.

BAB III
VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH

3.1. Visi, Misi, Tujuan dan Program Prioritas

Pada bagian ini disajikan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta program prioritas untuk pembangunan daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025 – 2029. Visi dan misi yang dimaksud dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025 – 2029 merupakan visi, misi dan janji kerja dari Bupati dan Wakil Bupati periode Tahun 2025 – 2029.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, dan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu kepemimpinan Bupati bersama Wakil Bupati. Adapun sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh Pemerintah dalam jangka waktu tertentu. Dalam hal ini sasaran diupayakan diukur melalui indikator yang bersifat kuantitatif, sehingga dapat diukur. Sasaran ditetapkan dengan maksud agar perjalanan atau proses kegiatan dalam mencapai tujuan dapat berlangsung secara fokus, efektif, dan efisien.

Program Prioritas Pembangunan Daerah adalah program strategis yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD yang diperoleh dengan teknik *cascading* (penurunan) kinerja.

3.1.1. Visi dan Misi

3.1.1.1. Visi

Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumedang periode 2025–2029 adalah sebagai berikut:



“**SIMPATI**” adalah akronim dari **Sejahtera** Masyarakatnya, **Agamis** Akhlaqnya, **Maju** Daerahnya, **Profesional** Aparaturnya dan **Kreatif** Ekonominya. Lebih lanjut penjabaran visi di atas adalah sebagai berikut:

SEJAHTERA

Kondisi masyarakat Kabupaten Sumedang yang secara lahir batin mendapatkan rasa aman, nyaman, dan tentram dalam menjalani kehidupan, yang ditandai dengan meningkatnya pelayanan dasar mencakup sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan sarana ekonomi yang inklusif bagi masyarakat, dan meningkatnya perlindungan, produktivitas dan pemenuhan hak dasar bagi masyarakat secara adil dan merata.

AGAMIS

Sikap dan perilaku hidup masyarakat Kabupaten Sumedang yang mencerminkan dan merefleksikan nilai-nilai agama yang diyakininya. Ditandai dengan banyaknya kegiatan keagamaan, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan keagamaan, dan tidak adanya konflik antar penganut agama (internal dan eksternal). Berfungsinya lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan sebagai agen perubahan sosial dalam masyarakat dan mengurangi dampak negatif ekstrimisme, berkembang dan meningkatkan kapasitas serta kualitas lembaga sosial keagamaan; serta aktualisasi nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

MAJU

Kemampuan masyarakat Kabupaten Sumedang dalam mendayagunakan pikiran dan sumber daya yang ada di sekelilingnya, ditandai dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (kapasitas fiskal), meningkatnya kerja sama antara pemerintah, swasta dan akademisi, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan meningkatnya adaptasi teknologi, tertata kawasan serta terbukanya kebijakan *shareholding* pemerintah dan investor dalam pengelolaan sumber daya alam sehingga dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan keistimewaan suatu daerah.

PROFESIONAL

Pemerintah Kabupaten Sumedang mewujudkan *good governance* dimana penyelenggaraan pemerintahan secara partisipatif, efektif, jujur, adil, transparan dan bertanggungjawab kepada semua level pemerintahan. Upaya untuk mewujudkan *good governance* memerlukan unsur profesionalisme dari aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Profesionalisme disini lebih menekankan kepada kemampuan, keterampilan dan keahlian aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang responsif, transparan, efektif, dan efisien. Ditandai dengan meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan, pengelolaan keuangan serta pelayanan publik melalui fasilitasi, pelatihan, dan pendampingan.

KREATIF

Masyarakat Kabupaten Sumedang memiliki kreativitas dan produktivitas yang tinggi sehingga dapat menghasilkan barang dan atau jasa yang lebih baik unggul secara berkesinambungan, mampu bersaing serta mampu bertahan dalam segala kondisi. Kreativitas dan produktivitas ini akan ditunjang dengan membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Dampak dari pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi ini adalah proses pembangunan yang akan semakin menyebar ke wilayah sekitarnya. Kutub-kutub pertumbuhan ini akan berimbas pada wilayah atau daerah sekitarnya secara otomatis (*trickle-down effect*). Namun demikian efek itu hanya akan terjadi dan berlangsung optimal manakala sektor-sektor yang dikembangkan dirancang sedemikian rupa sesuai dengan potensi ekonomi dan sosial di wilayah tersebut. Oleh karena itu, perlu disertai dengan kesiapan tenaga terampil dalam meningkatkan daya saing daerah. Di sisi lain, tumbuh dan berkembangnya sektor kewirausahaan sebagai arus utama dinamika perekonomian masyarakat Kabupaten Sumedang.

SEMAKIN MAJU

Sebuah kondisi pembangunan daerah yang telah menjadikan dasar capaian dalam 5 tahun kepemimpinan sebelumnya sebagai komitmen kuat untuk memelihara hasil pembangunan, menyempurnakan kesejahteraan, dan melanjutkan kemajuan yang telah dicapai dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup.

3.1.1.2. Misi

Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi yang telah dipaparkan di atas. Rumusan misi menggambarkan visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya yang perlu dilakukan. Misi juga memberikan arah dan batasan dalam proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi yang telah diuraikan, langkah-langkah akan ditempuh melalui lima misi pembangunan daerah sebagai berikut:

Misi Pertama: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Agamis dan Berkarakter

Misi ini mendorong pembangunan SDM masyarakat Kabupaten Sumedang yang tidak hanya cerdas secara intelektual, sehat secara fisik dan mental, tetapi juga kuat secara moral dan spiritual, serta menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal. SDM yang agamis dan berkarakter akan menjadi pondasi dalam menciptakan masyarakat yang berintegritas, beretika, dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Misi Kedua: Memperkuat Birokrasi Profesional dan Responsif

Misi ini mendorong upaya membentuk birokrasi pemerintahan yang berintegritas, kompeten, dan adaptif terhadap perubahan, serta mampu merespons kebutuhan masyarakat dengan cepat dan tepat. Birokrasi yang profesional dan responsif adalah kunci utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Misi Ketiga: Meningkatkan Infrastruktur Dasar yang Merata dan Berkeadilan

Infrastruktur dasar merupakan prasyarat utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan konektivitas wilayah, dan mempercepat pemerataan pembangunan. Ketersediaan infrastruktur seperti jalan, air bersih, listrik, sanitasi, perumahan, pengelolaan sampah akan langsung berdampak pada kualitas hidup masyarakat. Namun, disparitas akses dan kualitas infrastruktur antarwilayah, terutama antara daerah perkotaan dan pedesaan masih menjadi tantangan. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur yang merata dan berkeadilan menjadi prioritas untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat tanpa terkecuali memperoleh manfaat pembangunan.

Misi Keempat: Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

Pertumbuhan ekonomi semata tidak cukup jika tidak disertai pemerataan manfaatnya bagi seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi harus bersifat inklusif (merangkul semua golongan, termasuk masyarakat rentan, miskin, dan UMKM) serta berkelanjutan (tidak merusak lingkungan, memperhatikan generasi mendatang). Kabupaten Sumedang memiliki potensi besar dalam sektor pertanian, UMKM, pariwisata, industri kreatif, dan industri pengolahan serta perdagangan. Namun, tantangannya adalah bagaimana mengelola potensi itu agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang atau kawasan tertentu, tetapi bisa dirasakan secara merata dan adil.

Misi Kelima: Memperkuat Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial

Pembangunan yang berhasil bukan hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga dari tingkat kesejahteraan dan ketahanan sosial masyarakat. Kesejahteraan menekankan pada terpenuhinya kebutuhan dasar dan meningkatnya kualitas hidup, sementara ketahanan sosial merujuk pada kemampuan masyarakat dalam menghadapi tekanan ekonomi, konflik sosial, dan berbagai persoalan kehidupan (kerentanan sosial, ketidaksetaraan akses untuk mendapatkan pelayanan, kekerasan terhadap perempuan dan anak, kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, anak-anak dan perempuan).

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi diatas pada implementasinya dilandasi oleh 3 (tiga) fondasi yaitu:

- 1. **Agama**, agar implementasi perwujudannya terarah sesuai dengan kaidah dan nilai-nilai agama;
- 2. **Budaya**, agar implementasi perwujudannya membumi dengan menekankan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.
- 3. **Teknologi**, agar implementasi perwujudannya lebih akseleratif dan sesuai dengan perkembangan teknologi global.

3.1.1.3. Keselarasan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 dengan Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2045

Visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tidak terlepas dari visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah sebagaimana telah ditetapkan pada Peraturan Daerah Kabupaten

Sumedang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2025. Visi jangka menengah adalah bentuk dari sebuah visi antara menuju visi jangka panjang. Visi jangka panjang Kabupaten Sumedang adalah **“Kabupaten Sumedang yang Maju, Agamis, Mandiri, Adil dan Berkelanjutan (Sumedang MANDALA)”** diwujudkan melalui visi jangka menengah, yaitu **“Sumedang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif (SIMPATI) Semakin Maju Menuju Indonesia Emas 2045”**.

Misi yang dibawa/diemban dalam jangka menengah adalah misi antara yang mendukung misi jangka panjang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1 Keselarasan Misi RPJPD Kabupaten Sumedang 2025-2045 dengan Misi RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2045

MISI RPJPD	MISI RPJMD
Misi 1: Mengembangkan Sumber Daya Manusia Produktif dan Berdaya Saing	Misi 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Agamis dan Berkarakter. Misi 5: Memperkuat Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial.
Misi 2: Mewujudkan Perekonomian yang Tangguh dan Inklusif	Misi 4: Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan
Misi 3: Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif, Inovatif dan Akuntabel	Misi 2: Memperkuat Birokrasi Profesional dan Responsif.
Misi 4: Mewujudkan Kabupaten Sumedang yang Aman dan Berkeadilan	Misi 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Agamis dan Berkarakter. Misi 2: Memperkuat Birokrasi Profesional dan Responsif.
Misi 5: Mewujudkan Masyarakat yang Menjunjung Tinggi Nilai Agama, Budaya dan Berwawasan Lingkungan	Misi 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Agamis dan Berkarakter Misi 4: Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan Misi 5: Memperkuat Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial.
Misi 6: Meningkatkan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah yang Merata.	Misi 3: Meningkatkan Infrastruktur Dasar yang Merata dan Berkeadilan.
Misi 7: Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar yang Berkualitas.	Misi 3: Meningkatkan Infrastruktur Dasar yang Merata dan Berkeadilan.
Misi 8: Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan	Misi 3: Meningkatkan Infrastruktur Dasar yang Merata dan Berkeadilan. Misi 4: Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan.

Sumber: Hasil Analisis BAPPPEDA, 2025

3.1.1.4. Keselarasan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025 - 2029 dengan Visi dan Misi RPJMN Tahun 2025 - 2029 (Astacita)

Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Sumedang 2025-2029 harus selaras dengan RPJMN Tahun 2025-2029, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 dengan Visi ***"Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045"***, sedangkan visi RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 adalah ***"Sumedang SIMPATI Semakin Maju Menuju Indonesia Emas 2045"***.

Dalam pencapaian visi tersebut dilaksanakan melalui 8 misi (Asta Cita) sebagaimana dijabarkan sebagai berikut:

- Asta Cita Satu** : Memperkokoh ideologi Pancasila, dan hak asasi manusia
- Asta Cita Dua** : Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru.
- Asta Cita Tiga** : Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
- Asta Cita Empat** : Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan penyandang disabilitas.
- Asta Cita Lima** : Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

- Asta Cita Enam** : Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
- Asta Cita Tujuh** : Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
- Asta Cita Delapan** : Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat adil dan makmur.

Dalam pelaksanaannya untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi RPJMN Tahun 2025-2029 (Astacita) terdapat 17 (tujuh belas) Program Prioritas dan 8 (delapan) Program Hasil Terbaik Cepat atau “*Quick Win*” yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Mencapai swasembada pangan, energi, dan air

Pangan, energi, dan air merupakan syarat utama dari kemandirian dan kedaulatan sebuah negara. Untuk itu, pencapaian swasembada pangan, energi, dan air harus dilakukan secara cepat dan seksama. Untuk program pangan diantaranya dengan pengembangan program *food estate*, terutama untuk padi, jagung, singkong, dan kedelai, dan tebu. Ditargetkan minimal 4 juta Ha tambahan luas panen tanaman pangan tercapai pada tahun 2029. Kecukupan air akan dijamin melalui manajemen air yang baik sehingga tersedia pada saat kemarau dan tidak menyebabkan bencana saat musim hujan.

2. Penyempurnaan sistem penerimaan negara

Pemerintah akan melaksanakan amanah konstitusi UUD 1945 pasal 23A secara taat asas sehingga dipandang perlu untuk meningkatkan kapasitas lembaga penerimaan negara. Diharapkan lembaga ini mampu memberikan kontribusi positif terhadap upaya mendapatkan sumber pembiayaan pembangunan berkelanjutan.

3. Reformasi politik, hukum, dan birokrasi

Politik adalah unsur penting dari kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa agar peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan dapat diakomodasi dengan baik.

Untuk itu, diperlukan upaya meminimalisasi sistem politik uang serta meningkatkan kesetaraan dan kemudahan dalam akses politik. Kesamaan hak setiap orang di mata hukum dan kepastian penegakan hukum merupakan salah satu prasyarat stabilitas ekonomi dan demokrasi. Birokrasi yang efisien, profesional, dan berintegritas merupakan penunjang yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Digitalisasi dengan satu data terpadu dipastikan akan sangat membantu efisiensi dan kesatuan pengelolaan, serta pembinaan karir.

4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi

Korupsi menyebabkan kebocoran pada berbagai aspek pembiayaan dalam pembangunan negara dan mengakibatkan rusaknya perekonomian negara serta sendi-sendi kehidupan sosial masyarakat. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi seimbang antara pencegahan dan penindakan perlu secara terstruktur dilakukan. Pemberantasan korupsi secara seimbang menitikberatkan pada menghilangkan keuntungan pada pelaku sekaligus mengupayakan pemulihan kerugian keuangan negara. Bila kebijakan ini dapat dilakukan dengan seksama, akan diperoleh manfaat ekonomi yang merata dan efisien, tambahan pembiayaan pemerintah, serta percepatan kemajuan negara.

5. Pemberantasan kemiskinan

Kemiskinan merupakan cerminan dari kurangnya akses terhadap hasil pembangunan bagi masyarakat. Kemiskinan juga menjadi akar masalah dari tumbuhnya berbagai tindak kriminal dan permasalahan sosial, termasuk lahirnya generasi yang kurang berkualitas.

Untuk itu, pemberantasan kemiskinan harus menjadi prioritas utama kebijakan pemerintah. Upaya pemberantasan kemiskinan ekstrim menuju 0% perlu dilakukan sesegera mungkin dalam 2 tahun pertama pemerintahan. Sementara untuk kemiskinan, ditargetkan di bawah 6% di akhir 2029.

6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba

Penggunaan narkoba adalah salah satu penyakit sosial masyarakat yang dapat menghancurkan produktivitas dan kualitas hidup masyarakat. Untuk itu, langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan peredaran dan penggunaan narkoba harus dilakukan secara tepat sasaran dan menyeluruh dimulai dari kesadaran dalam keluarga.

7. Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia: Peningkatan BPJS Kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat

Akses pelayanan kesehatan yang memadai dan berkualitas akan sangat membantu peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Program BPJS Kesehatan yang sedang diselenggarakan saat ini perlu ditingkatkan dan didukung dengan penyediaan obat bagi seluruh rakyat. Untuk itu, peningkatan program BPJS Kesehatan dan ketersediaan obat menjadi perhatian utama pemerintah.

8. Penguatan pendidikan, sains dan teknologi, serta digitalisasi

Kemajuan sebuah bangsa ditentukan oleh kualitas pendidikan, serta penguasaan sains dan teknologi. Inovasi akan lahir seiring dengan kemajuan di bidang tersebut. Untuk itu, dana riset dan inovasi akan diupayakan mencapai 1,5-2,0% dari PDB dalam 5 tahun. Untuk itu, kebijakan pemerintah dalam berinvestasi yang mendukung pendidikan, sains dan teknologi, serta digitalisasi merupakan suatu keharusan dalam memperkuat kemandirian bangsa. Ini dilakukan diantaranya melalui pengembangan dana abadi pendidikan, dana abadi pesantren, dana abadi kebudayaan, dan dana abadi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif

Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif.

10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas

Untuk menciptakan masyarakat yang adil dan inklusif, negara memiliki peran utama dalam penguatan kesetaraan gender, dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas. Dengan mendorong kebijakan dan inisiatif yang melindungi hak-hak perempuan dan kaum penyandang disabilitas, termasuk hak pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi politik, pemerintah dapat meniadakan diskriminasi gender dalam berkontribusi penuh terhadap pembangunan negara. Pemerintah juga perlu lebih intensif dalam memberikan perlindungan yang cukup untuk tumbuh kembang anak-anak, termasuk kecukupan gizi.

11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup

Dalam upaya pembangunan dan peningkatan ekonomi negara, kepastian keberlanjutan dan pelestarian lingkungan hidup menjadi prioritas utama untuk menjamin generasi mendatang dapat hidup sehat dan nyaman. Oleh karena itu, percepatan pencapaian komitmen terhadap target pembangunan berkelanjutan termasuk percepatan pencapaian target *net zero emission* GRK akan dilaksanakan. Diantaranya juga dengan mengupayakan penurunan jejak karbon (*carbon footprint*) dan jejak air (*water footprint*) untuk berbagai produk. Selain itu, pemanfaatan bioplastik dalam kehidupan sehari-hari perlu diupayakan sesegera mungkin.

12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani

Swasembada pangan ditentukan oleh tercapainya produksi dan produktivitas yang berkelanjutan dari komoditas pangan. Produksi dan produktivitas pangan akan sangat ditentukan oleh tersedianya dan akses yang menyeluruh petani pada pupuk, benih unggul, dan pestisida. Untuk itu, pemerintah berkewajiban untuk menjamin ketersediaan termasuk akses langsung pupuk, benih, dan pestisida kepada petani.

13. Menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan

Tempat tinggal yang layak dan terjangkau merupakan hak dasar setiap warga negara. Pembangunan perumahan juga bisa menguatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi masyarakat miskin, serta mengurangi ketimpangan. Pemerintah harus hadir memberikan perumahan yang terjangkau dan sanitasi yang layak bagi masyarakat yang membutuhkan. Dengan target membangun atau merenovasi sebanyak 40 rumah per desa/kelurahan per tahun akan dapat dicapai sebanyak 3 juta rumah mulai tahun kedua.

14. Melanjutkan pemerataan ekonomi, penguatan UMKM dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)

Salah satu kunci pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah pemerataan hasil pertumbuhan ekonomi yang dirasakan oleh semua kalangan masyarakat. Penguatan skala ekonomi dan pembangunan kelembagaan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), serta

kewirausahaan merupakan langkah-langkah penting dalam pemerataan hasil pertumbuhan ekonomi.

Penguatan program Kredit Usaha Tani, peternakan, perikanan, perkebunan, produksi pangan rakyat, nelayan pesisir, industri hilir UKM, kredit untuk usaha *Start Up* dan kredit untuk para millennial akan didorong, diperluas, dan diperbanyak untuk dapat menumbuhkan wirausaha-wirausaha baru, terutama dikalangan anak muda. Pembangunan Indonesia harus lebih merata melalui penciptaan pusat pertumbuhan baru di luar Pulau Jawa, salah satunya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis Sumber Daya Alam (SDA) dan maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi

Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis SDA, termasuk sektor maritim, untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi.

Upaya hilirisasi dan industrialisasi berbasis SDA akan meningkatkan nilai tambah, lapangan pekerjaan, dan efek pengganda lainnya. Tidak saja secara ekonomi, tetapi juga efek pengganda sosial. Upaya hilirisasi dilakukan dengan memastikan terjadinya transfer teknologi, mengembangkan SDM lokal, sekaligus menjaga lingkungan.

Hilirisasi terbukti telah meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah secara signifikan di wilayah yang memiliki SDA dan mendorong pemerataan ekonomi serta industrialisasi di Wilayah Timur Indonesia.

Hilirisasi yang sudah dilaksanakan seperti hilirisasi produk nikel akan dilanjutkan dan akan ditambah dengan hilirisasi bauksit, tembaga, timah, produk agro, serta produk maritim. Pemanfaatan sektor maritim juga perlu diperkuat untuk dapat menunjang proses industrialisasi dan pengembangan ekonomi biru.

16. Memastikan kerukunan antar umat beragama, kebebasan beribadah, dan perawatan rumah ibadah

Menjaga kerukunan antar umat beragama, kebebasan beribadah, dan perawatan rumah ibadah merupakan bagian penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kerukunan yang tercipta akan membuat negara kuat, aman, dan harmonis.

17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga

Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga. Budaya adalah bagian integral dari identitas bangsa, dan pelestariannya membantu melindungi warisan budaya yang berharga. Penyediaan dana abadi kebudayaan akan menjamin pelestarian budaya secara berkelanjutan. Program pelestarian budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga akan mengangkat citra Indonesia di tingkat internasional. Peningkatan ekonomi kreatif melalui seni, musik, film, dan industri kreatif lainnya juga dapat menciptakan lapangan kerja baru dan pertumbuhan ekonomi yang signifikan.

Dalam 5 tahun, fondasi Indonesia Emas 2045 harus diwujudkan dengan 8 Program Hasil Terbaik Cepat (PHCT) yang dikawal langsung oleh Presiden dan Wakil Presiden dengan rincian sebagai berikut:

1. Makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil

Stunting (tengkes) adalah masalah konkret dan mendesak yang harus segera ditangani secara langsung dan massal oleh pemerintah untuk memastikan tercapainya kualitas SDM dan kualitas hidup yang baik. Hal ini dilakukan dengan memberikan makan siang harian kepada siswa jenjang prasekolah, sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), dan pesantren. Bantuan gizi diberikan kepada ibu hamil dan balita di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kesehatan dan membantu ekonomi keluarga.

Program ini menargetkan lebih dari 80 juta penerima manfaat dengan cakupan 100% pada tahun 2029.

2. Pemeriksaan kesehatan gratis, menurunkan kasus TBC 50% dalam lima tahun, dan membangun RS lengkap berkualitas di kabupaten

Kesehatan adalah salah satu bagian penting dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Jumlah tenaga kesehatan (Nakes) per populasi dan tempat tidur rumah sakit (RS) per populasi yang masih di bawah standar *World Health Organization* (WHO) harus segera dibenahi.

Akselerasi pemberantasan penyakit tuberkulosis (TBC) serta pembangunan RS menjadi prioritas utama untuk memastikan kualitas hidup manusia di Indonesia yang terjaga.

Pemeriksaan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kesehatan dan pencegahan penyakit dengan pemeriksaan kesehatan tekanan darah, kadar gula darah, dan rontgen paru.

Target pemberantasan TBC adalah mengurangi kasus TBC sebanyak 50% pada tahun 2029.

Rumah sakit berkualitas akan didirikan di seluruh kabupaten dengan dukungan dan insentif yang menarik bagi dokter ahli yang akan bertugas di sana.

3. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional

Guna mencapai swasembada pangan, dibutuhkan peningkatan produktivitas lahan pertanian melalui berbagai program intensifikasi dan ekstensifikasi lahan.

Kedua program tersebut dilakukan di level desa, kecamatan, kabupaten/kota, dan nasional secara lebih efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan dengan komoditas padi, jagung, kedelai, singkong, tebu, sagu, dan sukun. Ditargetkan minimal tambahan 4 juta Ha luas panen tanaman pangan tercapai pada tahun 2029.

4. Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan menengah, meningkatkan kualitas lulusan dan infrastruktur sekolah dan sarana pendukungnya, akan dibangun sekolah-sekolah unggulan di setiap kabupaten.

Sekolah unggulan yang akan dibangun mengikuti model sekolah unggulan tanpa asrama (*non-boarding school*) dan asrama, serta terintegrasi dari jenjang sekolah dasar hingga ke menengah atas. Di samping itu, akan dilaksanakan perbaikan untuk sekolah-sekolah yang berada dalam kondisi kurang dan tidak layak.

5. Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut

Masih adanya kemiskinan absolut menunjukkan pembangunan ekonomi belum optimal dan belum merata. Negara wajib memberikan perlindungan sosial untuk warga miskin.

Program-program seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), KIS Lansia, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Sembako, Kartu Prakerja, MEKAR, dan Program

Keluarga Harapan akan dilanjutkan dan menambahkan Kartu Anak Sehat. Selain itu program Kredit Usaha Tani perternakan, perikanan, perkebunan, produksi pangan rakyat, nelayan, pesisir, industri hilir UKM, kredit untuk usaha *start up* dan kredit untuk para millennial akan didorong, diperluas, dan diperbanyak untuk menjadi garda terdepan dalam upaya peningkatan wirausaha dan sekaligus memberantas kemiskinan serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia.

Maka dari itu, negara harus melanjutkan program tersebut, dan ditingkatkan menjadi perlindungan sosial sepanjang hayat dengan target angka kemiskinan di bawah 6 persen serta mencapai status pembangunan manusia sangat tinggi (IPM di atas 80).

6. Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, dan tenaga kesehatan), TNI/POLRI, dan pejabat negara

Pelayanan publik yang baik akan terlaksana bila Aparatur Sipil Negara (ASN) terutama guru, dosen, dan tenaga kesehatan (Nakes), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), dan pejabat negara berada dalam kondisi sejahtera. Oleh karena itu, pendapatan mereka perlu ditingkatkan secara layak. Kebijakan penggajian diarahkan pada upah minimum provinsi (UMP) dengan rentang gaji tertinggi mengacu pada jabatan profesional, meski pelaksanaan dilakukan bertahap sesuai kemampuan keuangan negara.

7. Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menyediakan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan

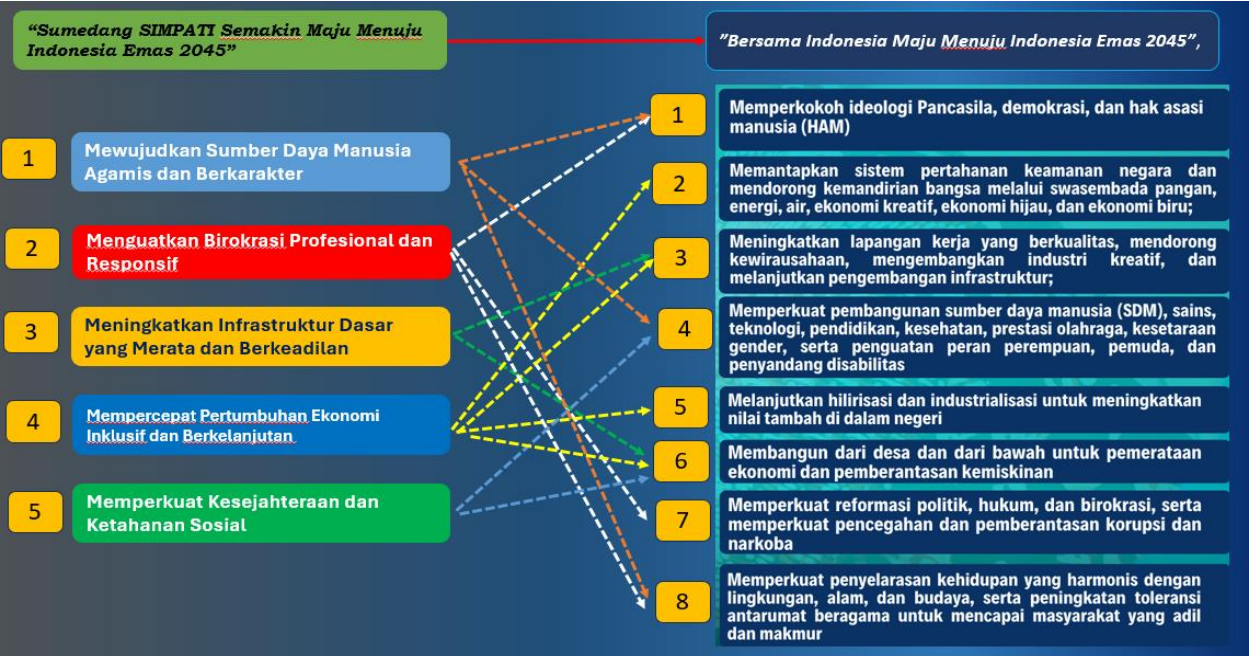
Membangun dari desa menjadi strategi utama dalam pembangunan nasional. Untuk itu, program terkait pembangunan desa yang sudah dilaksanakan harus dilanjutkan dan ditingkatkan, termasuk membangun rumah murah dengan sanitasi baik untuk masyarakat yang membutuhkan, menyalurkan dana desa dan dana kelurahan secara langsung. Ditargetkan untuk dapat membangun/merenovasi rumah sebanyak 40 rumah per desa/kelurahan per tahun dengan total nasional mencapai 3 juta rumah mulai pada tahun kedua.

8. Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%

Sebagian pembangunan ekonomi perlu dibiayai sebagian dari anggaran pemerintah. Anggaran pemerintah perlu ditingkatkan dari sisi penerimaan yang bersumber dari pajak dan bukan pajak (PNBP).

Untuk itu, negara membutuhkan terobosan konkret dalam upaya meningkatkan penerimaan negara dari dalam negeri. Pendirian Badan Penerimaan Negara ditargetkan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 23%.

Untuk menciptakan keselarasan pembangunan Kabupaten Sumedang dengan Pemerintah Pusat perlu diselaraskan dengan memperhatikan keselarasan visi dan misi. Keselarasan tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 3.1 Keselarasan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 dengan Visi dan Misi RPJMN Tahun 2025-2029 (Astacita)

(Sumber: Hasil analisis BAPPPPEDA, 2025)

3.1.1.5. Keselarasan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 dengan Visi dan Misi RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029

Visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat. Pernyataan visi Provinsi Jawa Barat periode 2025-2029

menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang dan menjadi tujuan pencapaian RPJPD Jawa Barat tahun 2025-2045 tahap pertama dalam rangka penguatan fondasi transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola. Visi Provinsi Jawa Barat tahun 2025-2029 adalah:



Pernyataan **Jawa Barat Istimewa - Lembur Diurus, Kota Ditata** mengandung makna tata kelola wilayah yang adil dan seimbang antara pengembangan wilayah perdesaan dan perkotaan, antara pembangunan ekonomi dan konservasi. Kalimat Visi tersebut memberi pemahaman bahwa tujuan pembangunan daerah pada tahun 2025-2029 adalah untuk menciptakan kondisi Jawa Barat yang istimewa dalam penyelenggaraan pembangunannya, dengan memperhatikan unsur mikro lokal sebagai asal muasal tradisi (dimaknai dengan lembur/perdesaan) maupun unsur kemajuan pembangunan yang lebih makro (dimaknai dengan kota/perkotaan) sebagai potensi pengungkit pertumbuhan wilayah yang dapat mendorong kemampuan Jawa Barat untuk bersaing sebagai daerah yang unggul dalam segala bidang pembangunan.

Secara filosofis frase, kalimat Jawa Barat Istimewa – Lembur Diurus, Kota Ditata, memiliki makna kata sebagai berikut:

- **JABAR** merupakan akronim dari Jawa Barat sebagai Provinsi yang terdiri atas penduduk/masyarakat dan wilayah/daerah yang terbagi dalam 27 kabupaten/kota.
- **ISTIMEWA** memiliki arti situasi atau kondisi dimana penyelenggara pemerintah, dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa

Barat berkomitmen untuk mengistimewakan masyarakat, baik istimewa dalam memberikan pelayanan, maupun istimewa dalam pelaksanaan pembangunan. Istimewa adalah situasi atau kondisi terunggul, termaju, paripurna, dan teratas.

- **LEMBUR DIURUS**, *Lembur* dalam bahasa Sunda berarti desa atau kampung, dan *Diurus* berarti dikelola atau dipelihara menjadi lebih baik. Hal ini mencakup pengelolaan sumber daya alam berbasis potensi lokal, peningkatan infrastruktur pelayanan dasar, serta pemberdayaan masyarakat desa agar berkembang dan menikmati kesejahteraan yang setara dengan daerah perkotaan.

Pengelolaan perdesaan meliputi pengembangan kawasan pertanian, perikanan dan kelautan, peternakan, pariwisata, serta sektor lainnya yang dilaksanakan dengan tetap menjaga fungsi konservasi dan keberlanjutan lingkungan hidup serta menjaga kearifan lokal dan tradisi.

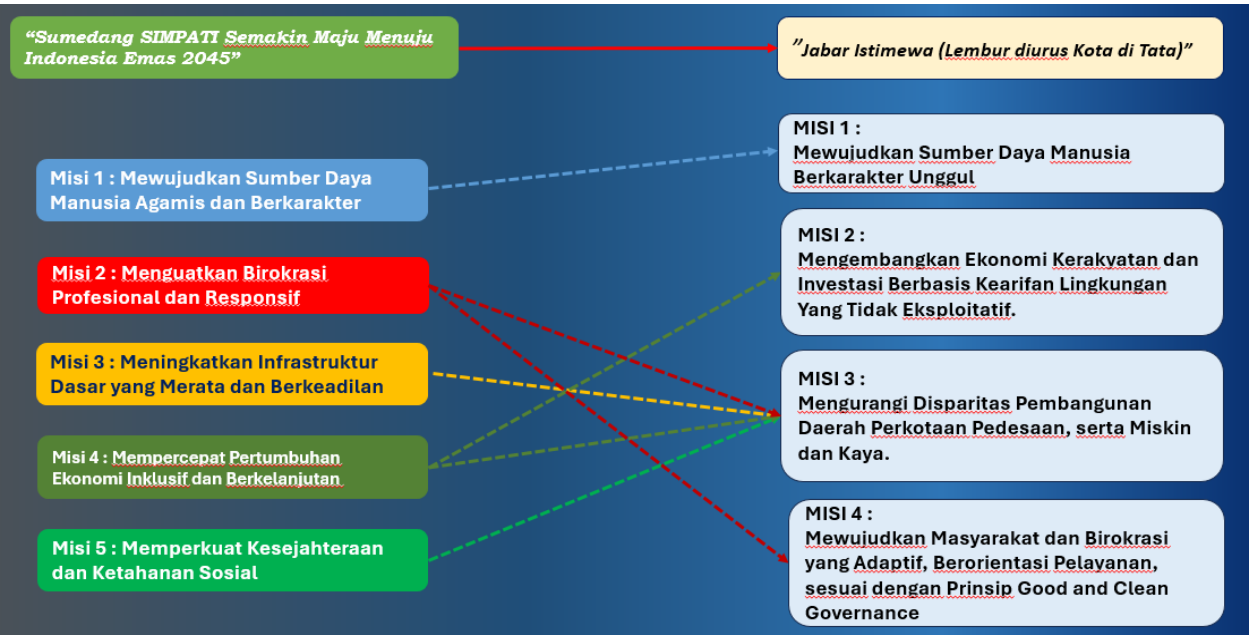
- **KOTA DITATA** Kota merujuk pada kawasan perkotaan atau kota-kota besar di Jawa Barat, sedangkan *ditata* berarti dikelola atau ditata dengan baik. Slogan ini mengandung arti bahwa pemerintah akan fokus pada penataan kota, termasuk perbaikan infrastruktur, transportasi, tata ruang, pengelolaan limbah, dan pembangunan ekonomi yang lebih terencana. Pembangunan wilayah perkotaan akan diwujudkan sebagai kawasan perdagangan barang dan jasa, serta kawasan industri yang dikelola untuk pengelolaan sumber daya dan daya saing daerah. Hal ini bertujuan untuk menjadikan kota-kota di Jawa Barat sebagai tempat yang nyaman untuk ditinggali, dengan memperhatikan kesejahteraan warganya dan menciptakan kota yang lebih maju, modern, serta ramah lingkungan.

Secara keseluruhan, "**Lembur Diurus, Kota Ditata**" mencerminkan visi pembangunan yang seimbang antara pedesaan dan perkotaan. Jawa Barat ingin memastikan bahwa daerah perdesaan tidak akan tertinggal dalam hal pembangunan dan pemberdayaan, sementara di sisi lain, kota-kota di Jawa Barat juga mendapat perhatian serius dalam hal penataan dan perbaikan kualitas hidup, sehingga baik desa maupun kota dapat berkembang secara berkelanjutan dan harmonis.

Dalam pencapaian Visi tersebut di dukung oleh 4 (empat) misi sebagai berikut:

- Misi 1 :** Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul.
- Misi 2 :** Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif.
- Misi 3 :** Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Perdesaan, serta Miskin dan Kaya.
- Misi 4 :** Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, sesuai dengan Prinsip *Good and Clean Governance*.

Untuk menciptakan keselarasan pembangunan antara kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Barat, perlu ada telaahan kesesuaian antara visi-misi provinsi dengan visi-misi kabupaten/kota. Dalam konteks pembangunan jangka menengah Kabupaten Sumedang, diketahui terdapat irisan persamaan antara substansi visi misi Kabupaten Sumedang dengan substansi visi-misi Provinsi Jawa Barat. Penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 3.2 Keselarasan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 dengan Visi dan Misi RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029

(Sumber: Hasil analisis BAPPPEDA, 2025)

3.2. Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada analisis isu-isu strategis. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah.

3.2.1. Perumusan Tujuan dan Sasaran

3.2.1.1. Langkah Perumusan Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Sumedang secara teknokratik ditempuh dengan menelaah arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2045, kebijakan pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat dan nasional serta isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Sumedang yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya. Selanjutnya, tujuan dan sasaran tersebut dikolaborasi dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Sumedang terpilih untuk menghasilkan rumusan tujuan dan sasaran pembangunan.

Pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, selanjutnya dijabarkan ke dalam sasaran. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah. Sasaran RPJMD selain menerjemahkan tujuan dari visi dan misi kepala daerah terpilih, sekurang-kurangnya berisi sasaran pokok RPJPD periode berkenaan. Hal ini dimaksudkan agar sasaran pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat merupakan sarana untuk melaksanakan dan sekaligus upaya untuk mewujudkan sasaran pembangunan jangka panjang Jawa Barat Tahun 2025-2029.

Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Sumedang secara teknokratik ditempuh dengan menelaah arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2045, kebijakan pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat dan Nasional serta isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Sumedang yang

telah ditetapkan pada bab sebelumnya. Selanjutnya, tujuan dan sasaran tersebut dikolaborasikan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Sumedang terpilih untuk menghasilkan rumusan tujuan dan sasaran pembangunan.

Dalam pencapaian visi pembangunan Kabupaten Sumedang sebagaimana termuat pada RPJPD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2045 terdapat sasaran visi yang harus dicapai pada rencana jangka menengah Tahun 2025-2029. Sasaran Visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Pendapatan per Kapita;
2. Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Ketimpangan;
3. Kepemimpinan Daerah yang Inovatif dan Berdaya Saing;
4. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia; dan
5. Penurunan Emisi GRK menuju *Net Zero Emission*.

Untuk lebih rinci sasaran visi dan target kinerja dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.2 Sasaran Visi dan Target Kinerja Sasaran Visi Tahun 2025-2029

Sasaran Visi	Indikator	Target (Tahun)					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Peningkatan Pendapatan per Kapita	PDRB per Kapita (ADHB) (Juta Rupiah)	39,91 - 40,78	46,67	44,37 - 47,7	46,17 - 51,33	47,96 - 52,16	49,76 - 54,26
	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	19,62	19,71	19,8	19,89	19,99	20,09
2. Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Ketimpangan	Tingkat Kemiskinan (%)	9,09 - 8,23	8,34	8,49 - 7,41	8,24 - 7,08	8,00 - 6,76	7,76 - 6,44
	Rasio Gini (Indeks)	0,360 - 0,335	0,334	0,387 - 0,333	0,386 - 0,332	0,385 - 0,331	0,382 - 0,330
	Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota (%)	1,64	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65
	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,79 - 5,20	6,03	4.29 - 6.34	4.36 - 6.41	4.40 - 6.45	4.47 - 6.52
3. Kepemimpinan Daerah yang Inovatif dan Berdaya Saing	Indeks Inovasi Daerah	73,30	73,35	73,40	73,45	73,50	73,55
	Indeks Daya Saing Daerah (Angka)	3,593	3,651	3,710	3,770	3,831	3,893
4. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)	75,06	75,45	75,98	76,52	77,08	77,65
5. Penurunan Emisi GRK menuju Net Zero Emission	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	6,05	6,44	6,87	7,42	7,96	8,40
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	66,25	66,50	66,76	67,01	67,26	67,51

Sumber: Hasil Analisis BAPPPEDA, 2025

3.2.1.2. Pendekatan Perumusan Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Dalam proses perumusan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Sumedang, digunakan pendekatan holistik-tematik dan integratif. Pendekatan holistik-tematik dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan aspek pembangunan serta unsur penting dan strategis yang berperan dalam pencapaian visi dan misi. Sementara pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan untuk merumuskan sasaran pembangunan yang fokus dan terukur dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan. Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur yang merupakan tolok ukur keberhasilan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang. Pencapaian indikator kinerja Kepala Daerah selanjutnya menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah didukung oleh Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah. Dengan demikian, apa yang mau dicapai atau diubah dalam pembangunan lima tahun kedepan menjadi semakin jelas dan dapat diukur pencapaiannya. Berdasarkan hasil perumusan, penjabaran visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 terdiri dari 5 (lima) tujuan dan 17 (tujuh belas) sasaran. Setiap tujuan dan sasaran pembangunan disertai dengan indikator dan target pembangunan setiap tahun selama 5 (lima) tahun.

3.2.1.3. Uraian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Tujuan dan sasaran untuk mewujudkan visi dan misi, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

- Misi 1

:

Mewujudkan Sumber Daya Manusia Agamis dan Berkarakter
- Tujuan

:

Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, dan berkarakter.
- Sasaran 1

:

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.
- Sasaran 2

:

Meningkatnya pemerataan aksesibilitas dan penyelenggaraan pendidikan serta literasi masyarakat.
- Sasaran 3

:

Mewujudkan kehidupan sosial yang dijiwai keimanan dan ketakwaan sesuai keyakinan masyarakat, yang taat hukum, berbudaya dan demokratis.

- Misi 2 : Memperkuat Birokrasi Profesional dan Responsif**
- Tujuan : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif dan inovatif berbasis teknologi digital.
- Sasaran 1 : Terciptanya tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan inovatif sampai tingkat desa.
- Sasaran 2 : Meningkatnya pemanfaatan transformasi digital.
- Sasaran 3 : Penguatan regulasi dan kepastian hukum dalam upaya peningkatan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat.
- Sasaran 4 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik.
- Sasaran 5 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintahan daerah.
- Misi 3 : Meningkatkan Infrastruktur Dasar yang Merata dan Berkeadilan.**
- Tujuan : Mewujudkan kualitas infrastruktur dasar dan pengembangan wilayah.
- Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar dan konektivitas.
- Sasaran 2 : Meningkatnya ketahanan air.
- Misi 4 : Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**
- Tujuan : Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
- Sasaran 1 : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah berbasis inovasi dan teknologi.
- Sasaran 2 : Terkendalinya stabilitas fiskal daerah.
- Sasaran 3 : Meningkatnya ketahanan pangan daerah.
- Sasaran 4 : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.
- Sasaran 5 : Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana dan perubahan iklim.
- Misi 5 : Memperkuat Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial**
- Tujuan : Mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan sosial.
- Sasaran 1 : Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat.

Sasaran 2 : Meningkatnya akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender.

Hasil perumusan tujuan dan sasaran yang menjabarkan kepada Visi, Misi Bupati dan Wakil Bupati Sumedang periode Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Tabel 3.3 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029

VISI/MISI	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal	Target Tahun						Ket.
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Misi 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Agamis dan Berkarakter	Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, dan berkarakter		Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)	74,57	74,77	75,45	75,98	76,52	77,08	77,65	
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia harapan hidup (Tahun)	75,29	75,42	75,62	75,81	76,00	76,20	76,39	
			Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	17,1	15,41	13,96	11,11	10,45	9,82	9,23	
			Penanganan Tuberkulosis: a. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)*	92,88	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	
			b. Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)*	84,13	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	
		Meningkatnya pemerataan aksesibilitas dan penyelenggaraan pendidikan serta literasi masyarakat	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (Tahun)	8,74	8,75 - 8,92	8,77 - 9,01	8,79 - 9,11	8,81 - 9,2	8,83 - 9,29	8,85 - 9,39	
			Harapan lama sekolah (Tahun)	13,02	13,03	13,04	13,05	13,06	13,07	13,08	
		Mewujudkan kehidupan sosial yang dijiwai keimanan dan ketakwaan sesuai keyakinan masyarakat, yang, taat hukum, berbudaya dan demokratis	Indeks Kerukunan Umat Beragama (Indeks)	77,6	77,78	78,23	78,90	79,15	79,95	80,80	
			Tingkat cipta kondisi kondusif (%)	100	100	100	100	100	100	100	
			Tingkat bina demokratisasi (%)	100	100	100	100	100	100	100	
			Persentase warisan budaya yang dilestarikan (%)	N/A	19	22	25	27	30	33	
			Partisipasi dan peran pemuda dalam pembangunan (%)	34,70	34,88	35,41	35,77	36,12	36,48	36,83	
Misi 2 : Memperkuat Birokrasi Profesional dan Responsif	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif dan inovatif berbasis teknologi digital		Indeks daya Saing Daerah (Angka)	3,86	3,593	3,651	3,710	3,770	3,831	3,893	
			Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)	89,65	90,00	91,00	92,00	93,00	94,00	95,00	
		Terciptanya tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan inovatif sampai tingkat desa	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	81	81	82	83	84	85	87	
			Indeks Survei Penilaian Integritas (SPI) (%)	68,6	80	80,5	81	81,5	82	82,5	

VISI/MISI	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal	Target Tahun						Ket.
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			Indeks Inovasi Daerah (Angka)	73,23	73,3	73,35	73,4	73,45	73,5	73,55	
			Indeks Desa (%)	N/A	80	82	84	86	88	90	
		Meningkatnya pemanfaatan transformasi digital	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks)	4,51	4,6						
			Indeks Pemerintahan Digital/PEMDI (Indeks)			2,0	2,2	2,4	2,6	2,8	
		Penguatan regulasi dan kepastian hukum dalam upaya peningkatan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat	Indeks Kepatuhan Daerah (Indeks)	N/A	65	66	67	68	69	70	
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik (Indeks)	N/A	4,71	4,72	4,73	4,74	4,75	4,76	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintahan daerah	Nilai Skor LPPD Kabupaten (Skor)	3,64 (2023)	3,647	3,648	3,649	3,650	3,651	3,652	
Misi 3 : Meningkatkan Infrastruktur Dasar yang Merata dan Berkeadilan	Mewujudkan kualitas infrastruktur dasar dan pengembangan wilayah		Indeks Kualitas Infrastruktur (Indeks)	75,88	75,89	76,18	76,48	76,78	77,07	77,37	
		Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar dan konektivitas	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	54,47	55,12	55,76	56,40	57,04	57,67	58,29	
			Indeks Konektivitas Jalan (Indeks)	1,298	1,373	1,426	1,479	1,503	1,549	1,649	
		Meningkatnya ketahanan air	Kapasitas air baku (M ³ /detik)	0,68	0,69	0,71	1,48	2,26	3,04	3,63	
			Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%)	24,39	24,61	25,03	25,27	26,09	26,50	26,97	
Misi 4 : Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan		Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,05	4,79 - 5,20	6,03	4.29 - 6.34	4.36 - 6.41	4.40 - 6.45	4.47 - 6.52	
			PDRB per Kapita (ADHB) (Juta Rupiah)	39,7	39,91 - 40,78	46,67	44,37 - 47,7	46,17 - 51,33	47,96 - 52,16	49,76 - 54,26	
			Penurunan intensitas emisi GRK (%)	N/A	6,05	6,44	6,87	7,42	7,96	8,40	

VISI/MISI	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal	Target Tahun						Ket.
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			Indeks Resiko Bencana (Indeks)	127,24	119,43	111,62	103,81	96	88,19	80,38	
			Indeks Ekonomi Hijau Daerah (Pilar Ekonomi) (Indeks)	37,57	38,10	41,10	42,72	44,74	46,85	49,04	
		Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah berbasis inovasi dan teknologi	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	19,32	19,62	19,71	19,80	19,89	19,99	20,09	
			Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*	5,49	5,58	5,67	5,75	5,84	5,93	6,02	
			Rasio PDRB Sektor Perdagangan (%)	15,82	17,93	19,63	21,33	23,03	24,73	26,43	
			Rasio kewirausahaan daerah (%)	3,61 (2023)	3,74	3,92	4,11	4,31	4,52	4,74	
			Tingkat pengangguran terbuka (%)	6,16	6,13 - 6,68	5,41	5,39 - 6,49	5,11 - 6,29	4,83 - 6,09	4,55 - 5,89	
			Rasio Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	21,83	23,51	23,59	23,67	23,75	23,84	23,92	
			Net ekspor impor antar daerah (% PDRB)	1,21	-0,50 s.d 1,21	-0,45 s.d 1,25	-0,42 s.d 1,27	-0,40 s.d 1,29	-0,30 s.d 1,31	-0,15 s.d 1,33	
			Rasio PDRB Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (%)	19,27	19,28	19,32	19,37	19,41	19,46	19,5	
		Terkendalnya stabilitas fiskal daerah	Rasio pajak daerah terhadap PDRB (%)	0,515	0,519	0,523	0,528	0,535	0,542	0,550	
			Persentase Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) (%)	N/A	90	92	95	97	100	100	
			Total kredit/PDRB (%)	N/A	19,13	19,63	16,74	17,34	17,92	18,03	
		Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) (%)	5,43	5,01	4,83	4,61	4,36	4,08	3,80	
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	62,47	66,25	66,50	66,76	67,01	67,26	67,51	
			Penurunan emisi GRK Kumulatif (Ton Co ₂ eq)	N/A	456.726,86	501.743,13	549.988,17	606.325,34	672.001,06	743.714,08	

VISI/MISI	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal	Target Tahun						Ket.
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana dan perubahan iklim	Indeks Ketahanan Daerah (Angka)	0,48	0,50	0,52	0,54	0,56	0,58	0,6	
Misi 5 : Memperkuat Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial	Mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan sosial		Pengeluaran Per Kapita (Rp.Juta/Tahun)	11,59	11,430 - 12,325	11,632 - 12,713	11,58 - 13,092	12,035 - 13,536	12,235 - 13,971	12,325 - 14,113	
			Rasio Gini (Indeks)	0,337	0,360 - 0,335	0,334	0,387 - 0,333	0,386 - 0,332	0,385 - 0,331	0,382 - 0,330	
		Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat	Tingkat kemiskinan (%)	9,10	9,09 - 8,23	8,34	8,49 - 7,41	8,24 - 7,08	8,00 - 6,76	7,76 - 6,44	
		Meningkatnya akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (%)	60,83	65,29	67,29	69,29	71,29	73,29	75,29	
			Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (Indeks)	0,217	0,45 - 0,44	0,43 - 0,42	0,42 - 0,41	0,41 - 0,40	0,40 - 0,39	0,39 - 0,38	
			Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Indeks)	96,22	96,56	96,78	97,01	97,23	97,46	97,69	
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (Indeks)	72,60	76,14	76,28	76,78	77,23	77,55	77,80	
			Indeks Perlindungan Anak (Indeks)	68,44	69,80	71,19	72,61	74,06	75,54	77,05	

Sumber: Hasil Analisis BAPPPEDA, 2025

3.3. Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

Upaya pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran perlu didukung oleh penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah sehingga menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Pemerintah Kabupaten Sumedang merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna).

Dalam konteks RPJMD Kabupaten Sumedang, rumusan strategi harus menunjukkan keinginan yang kuat dari Pemerintahan Kabupaten Sumedang untuk menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan dalam pembangunan daerah. Melalui parameter tertentu, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya berpikir strategis dalam menjamin transformasi menuju pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, kemudian strategi harus dikendalikan dan dievaluasi.

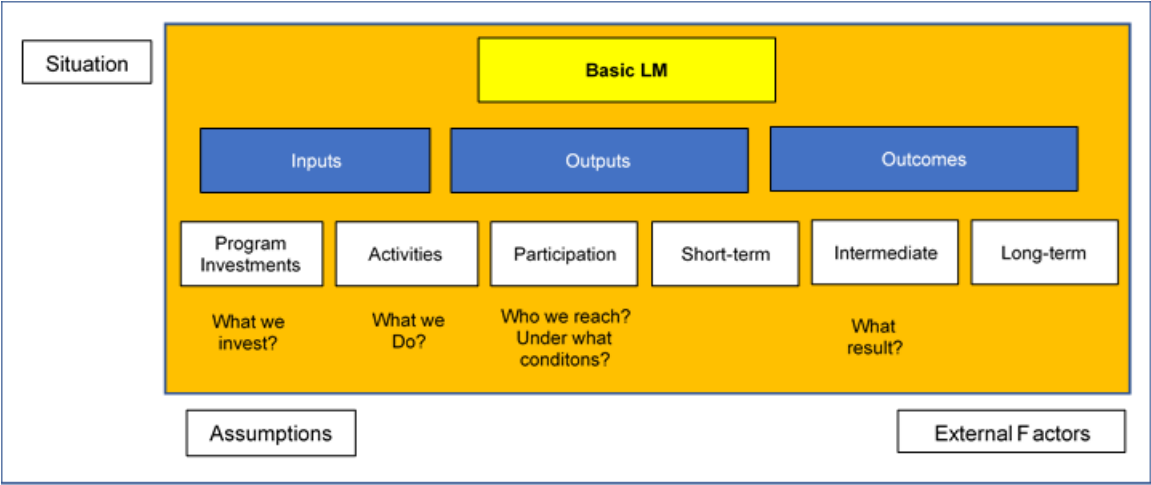
Sedangkan arah kebijakan merupakan terjemahan dari visi dan misi kepala daerah ke dalam rencana kerja yang dapat dioperasionalkan. Segala sesuatu yang secara langsung dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD, dianggap strategis. Rumusan strategi dan arah kebijakan bertujuan untuk memberikan rujukan supaya dalam merumuskan capaian target kinerja pembangunan, langkah-langkah yang dilakukan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah harus melalui pendekatan komprehensif. Oleh karena itu, perlu ada penjelasan tentang bagaimana pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Strategi menjabarkan langkah-langkah sistematis mencapai visi dan misi melalui program-program prioritas indikatif yang selanjutnya diperjelas dengan kebijakan umum. Untuk mendapatkan gambaran nyata bagaimana langkah-langkah strategis dilakukan dari waktu ke waktu untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, arah kebijakan akan mengarahkan langkah kapan indikator capaian masing-masing sasaran harus dicapai dan sekaligus memberi pedoman pada periodisasi dokumen RPJMD Kabupaten Sumedang.

Selain itu, strategi dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 juga harus selaras dengan periodisasi perencanaan yang tercantum dalam dokumen RPJPD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2045. Berdasarkan RPJPD, periode RPJMD saat ini berada dalam periode pertama. Arah kebijakan yaitu pada RPJPD **“Sumedang Yang Maju, Agamis, Mandiri, Adil dan Berkelanjutan (Sumedang MANDALA)”**.

Berdasarkan penjelasan di atas, dan dengan berpedoman pada rumusan keterkaitan antara visi dan misi dengan rumusan tujuan dan sasaran sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, dirumuskan strategi dan arah kebijakan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 yang merupakan penjabaran dari setiap sasaran sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Metode yang digunakan sebagai alat bantu dalam merumuskan strategi pembangunan jangka menengah Kabupaten Sumedang tahun 2025-2029 yaitu analisis *Logic Model* (LM) atau Model Logika, adalah alat yang menyampaikan skema, program, atau proyek singkat, format yang visual yang menjelaskan tindakan yang direncanakan dan hasil yang diharapkan. Secara ringkas, LM menjelaskan hubungan antara masukan, kegiatan, keluaran, dan hasil serta kebutuhan masyarakat dan/atau pemangku kepentingan yang terlibat dan berdampak.

Lebih jauh, LM membantu penyusunan desain, perencanaan, pengembangan strategi, serta lebih lanjut dapat digunakan untuk monitoring, dan evaluasi pada level Pemerintah Kabupaten Sumedang. Model ini juga dapat diuji untuk kelayakan, dan lebih detailnya dapat menyelaraskan dengan kegiatan, sumber daya, output pada urusan teknis atau perangkat daerah. Hubungan antara unsur-unsur terjadi berdasarkan hubungan sebab akibat (kausal), serta dapat menjadi acuan dalam menyusun rencana aksi pemerintah maupun pada perangkat daerah. Visualisasi LM dapat dilihat pada Gambar 3.3 berikut.



Gambar 3.3 *Logic Model*
(Sumber: Analisis BAPPERIDA Kabupaten Sumedang, 2025)

Pada penentuan strategi dan arah kebijakan yang akan menjadi panduan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan, dirumuskan dengan memformulasikan *short term outcome* untuk strategi dan *intermediate outcome* untuk arah kebijakan dan menjadi dasar bagi penentuan program prioritas. Melalui penerapan instrumen ini dapat dilihat kehandalan suatu program untuk mewujudkan sasaran daerah yang telah direncanakan.

3.3.1. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah

3.3.1.1. Strategi Pembangunan

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Pemerintah Daerah menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi pemangku kepentingan pembangunan daerah. Di sini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategis tersebut menciptakan nilai (*strategic objective*). Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya “berpikir strategis” dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi (*learning process*).

Berdasarkan analisis, strategi Kabupaten Sumedang untuk periode pembangunan 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan.
2. Peningkatan sumber daya manusia bidang kesehatan.
3. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan.
4. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan.
5. Peningkatan sumber daya manusia bidang pendidikan.
6. Peningkatan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan merata.
7. Pengembangan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan/non formal.
8. Peningkatan literasi masyarakat secara menyeluruh untuk mendukung pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
9. Peningkatan kehidupan sosial yang agamis, toleran, taat hukum, berbudaya dan demokratis.
10. Peningkatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam kehidupan masyarakat yang berasaskan Pancasila.
11. Peningkatan peran pemuda dalam pembangunan.
12. Peningkatan kualitas aparatur yang berorientasi pada reformasi birokrasi.
13. Perwujudan tata kelola pemerintahan desa yang baik.
14. Pembangunan ekosistem digital dalam rangka mendukung penguatan transformasi digital.
15. Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi daerah serta peningkatan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat.
16. Peningkatan pelayanan publik yang lebih efisien, transparan dan responsif.
17. Penguatan sistem perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja terintegrasi dan transparan.
18. Meningkatkan kerjasama dalam dan luar negeri dalam upaya mendukung kinerja pemerintah daerah.
19. Pengimplementasian pengembangan tata ruang wilayah.
20. Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak huni), bangunan tahan bencana dan infrastruktur konektivitas daerah, serta peningkatan kualitas permukiman.
21. Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air.
22. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dalam dukungan pengembangan dan pembangunan proyek strategis regional maupun Nasional.
23. Perluasan kesempatan kerja, pelatihan kerja serta sertifikasi keahlian sesuai kebutuhan lapangan kerja.

24. Kualitas dan daya saing industri kecil menengah dan koperasi.
25. Peningkatan pengelolaan, pengembangan dan penataan kawasan dayatarik wisata dan pemberdayaan ekonomi kreatif.
26. Pengembangan industri pengolahan dan manufaktur terpadu ramah lingkungan berbasis keunggulan wilayah yang dikembangkan pada kawasan strategis.
27. Penguatan hilirisasi komoditas unggulan dan peningkatan akses pasar dan promosi komoditas daerah serta digitalisasi perdagangan
28. Penerapan ekonomi hijau (*Green economy*).
29. Mendorong stabilitas keuangan dan daya saing investasi daerah.
30. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat.
31. Meningkatkan produktivitas pertanian dan perikanan menuju kemandirian pangan.
32. Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
33. Memperkuat kapasitas daerah dalam menghadapi risiko bencana alam dan dampak perubahan iklim.
34. Mempercepat penanggulangan dan penuntasan kemiskinan.
35. Meningkatkan pemberdayaan dan pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia.
36. Meningkatkan kesetaraan gender dan kualitas hidup perempuan di berbagai bidang pembangunan.

3.3.1.2.

3.3.1.3. Arah Kebijakan Pembangunan

Arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Sumedang untuk periode RPJMD 2025-2029 mengacu pada rumusan kerangka kerja pencapaian misi RPJPD 2025-2045 Tahap Pertama (2025-2029) yang dirumuskan dengan tema **“Penguatan Fondasi Pembangunan Daerah”** sebagai penguatan modalitas atau sumber daya untuk pelaksanaan pembangunan.

Uraian strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Sumedang pada 5 (lima) tahun kedepan yang selaras dengan Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel 3.4 berikut ini:

Tabel 3.4 Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2025-2029

NO	MISI	Tujuan	Sasaran RPJMD	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
1	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Agamis dan Berkarakter	Terwujudnya masyarakat yang sehat, cerdas dan berkarakter	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1	Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan	1	Meningkatkan status Pustu menjadi Puskesmas dan pemerataan tenaga kesehatan serta fasilitas kesehatan di setiap desa
						2	Penguatan regulasi dalam upaya pengadaan tenaga kesehatan di setiap wilayah
						3	Meningkatkan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan
				2	Peningkatan sumber daya manusia bidang kesehatan	1	Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan
						2	Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan
						3	Peningkatan kualitas pendidikan tenaga kesehatan
						4	Pemenuhan dan pemerataan kebutuhan tenaga kesehatan yang terutama di daerah perbatasan
				3	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan	1	Memperluas layanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif
						2	Mewujudkan cakupan layanan kesehatan semesta
						3	Percepatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting di seluruh wilayah dengan titik fokus: - Kecamatan Jatigede - Kecamatan Jatinunggal - Kecamatan Tanjungsari - Kecamatan Jatinangor - Kecamatan Ujungjaya

NO	MISI	Tujuan	Sasaran RPJMD	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
						4	Pengendalian dan pencegahan eliminasi penyakit manular dan penyakit tropis yang terabaikan melalui upaya preventif dan meningkatkan tingkat literasi masyarakat bidang kesehatan
						5	Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya
			Meningkatnya pemerataan aksesibilitas dan penyelenggaraan pendidikan serta literasi masyarakat	4	Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan	1	Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah
				5	Peningkatan sumber daya manusia bidang pendidikan	1	Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan
						2	Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan
						3	Peningkatan kompetensi guru dan tenaga pendidik
						4	Pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus guru dan tenaga kependidikan terutama di daerah perbatasan
						5	Penguatan dan penataan regulasi dalam upaya pengadaan guru dan tenaga kependidikan di setiap wilayah
				6	Peningkatan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan merata	1	Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah)

NO	MISI	Tujuan	Sasaran RPJMD	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
						2	Peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi
						3	Pemenuhan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, <i>digital literacy</i> , dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah)
						4	Pembangunan manajemen talenta dan prestasi peserta didik
				7	Pengembangan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan/non formal	1	Pembangunan layanan pendidikan kesetaraan jarak jauh berbasis digital dan TIK
						2	Pembangunan sekolah terbuka dan pesantren, serta pengembangan sekolah berbasis asrama
				8	Peningkatan literasi masyarakat secara menyeluruh untuk mendukung pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan	1	Pengembangan dan revitalisasi perpustakaan daerah, desa dan ruang publik (digital dan fisik) didukung dengan distribusi buku dan bahan bacaan yang berkualitas, relevan, dan bermuatan lokal
						2	Penyediaan akses internet di ruang publik
						3	Kampanye literasi keluarga, mendorong orang tua menjadi pendidik literasi awal bagi anak-anak
						4	Kolaborasi dengan lembaga nonformal untuk kelas belajar masyarakat
						5	Pelatihan literasi digital bagi pelajar dan masyarakat

NO	MISI	Tujuan	Sasaran RPJMD	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
			Mewujudkan kehidupan sosial yang dijiwai keimanan dan ketakwaan sesuai keyakinan masyarakat, yang, taat hukum, berbudaya dan demokratis	9	Peningkatan kehidupan sosial yang agamis, toleran, taat hukum, berbudaya dan demokratis	6	Integrasi program literasi digital ke dalam kurikulum sekolah dan pelatihan kerja
						1	Peningkatan kerukunan antar etnis, umat beragama dan golongan
						2	Peningkatan transformasi kelembagaan dan tata kelola ideologi, politik, hukum, dan keamanan daerah
						3	Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat
				10	Peningkatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam kehidupan masyarakat yang berasaskan Pancasila	1	Peningkatan pelestarian, perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan budaya dan kearifan lokal
						2	Integrasi nilai-nilai budaya lokal dan Pancasila dalam pendidikan dan kehidupan sosial
2	Menguatkan Birokrasi Profesional dan Responsif	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif dan inovatif berbasis teknologi digital	Terciptanya tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan inovatif sampai tingkat desa	11	Peningkatan peran pemuda dalam pembangunan	1	Penguatan kelembagaan pemuda dan olahraga
						2	Peningkatan kapasitas pemuda dan atlet
				12	Peningkatan kualitas aparatur yang berorientasi pada reformasi birokrasi	1	Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja
						2	Perkuatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko
						3	Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara efektif
						4	Meningkatkan kapasitas APIP dalam melakukan audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan kinerja

NO	MISI	Tujuan	Sasaran RPJMD	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
				13	Perwujudan tata kelola pemerintahan desa yang baik	1	Peningkatan kapasitas aparatur desa dalam etika pemerintahan, manajemen keuangan, dan pelayanan publik
						2	Penguatan integritas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa
			Meningkatnya pemanfaatan transformasi digital	14	Pembangunan ekosistem digital dalam rangka mendukung penguatan transformasi digital	1	Penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok
						2	Peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau <i>digital skill</i>
			Penguatan regulasi dan kepastian hukum dalam upaya peningkatan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat	15	Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi daerah serta peningkatan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat	1	Penyelerasan regulasi daerah yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat
						2	Penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam perumusan kebijakan
						3	Peningkatan efektivitas penegakan hukum
						4	Penguatan sinergi antara aparat keamanan, pemerintah daerah, dan masyarakat
						5	Penguatan layanan darurat dan pengaduan masyarakat
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik	16	Peningkatan pelayanan publik yang lebih efisien, transparan dan responsif	1	Peningkatan kepatuhan atas implementasi standar pelayanan publik
						2	Mengembangkan berbagai layanan publik melalui platform digital

NO	MISI	Tujuan	Sasaran RPJMD	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintahan daerah		17	Penguatan sistem perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja terintegrasi dan transparan		terintegrasi untuk meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan transparansi
						3	Peningkatan edukasi penggunaan layanan publik digital bagi masyarakat
						1	Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional dan provinsi
						2	Penguatan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja yang akuntabel dan transparan
				18	Meningkatkan kerjasama dalam dan luar negeri dalam upaya mendukung kinerja Pemerintah daerah	3	Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan
						4	Penguatan <i>e-government</i> dalam penyelenggaraan pemerintahan
						1	Penguatan kerjasama antar daerah dalam pengelolaan wilayah
						2	Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan
3	Meningkatkan Infrastruktur Dasar yang Merata dan Berkeadilan	Mewujudkan kualitas infrastruktur dasar dan pengembangan wilayah	Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar dan konektivitas.	19	Pengimplementasian pengembangan tata ruang wilayah	3	Penguatan regulasi dan kerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi
						1	Percepatan penyusunan panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah (antara lain termasuk rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana detail tata ruang (RDTR), standar pelayanan, dsb.)
				20	Peningkatan akses infrastruktur pelayanan	2	Pengendalian pemanfaatan ruang untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan
						1	Peningkatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan

NO	MISI	Tujuan	Sasaran RPJMD	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
							Ciptasari Kec. Pamulihan, Ds. Cimarias Kec. Pamulihan, Ds. Karedok Kec. Jatigede, Ds. Padaasih Kec. Conggeang; Tahun 2028: Ds. Mekarmulya Kec. Situraja, Ds. Cilayung Kec. Jatinangor, Ds. rancamulya Kec. Sumedang Utara, Ds. Cisurat Kec. Wado, Ds. Cimarga Kec. Cisitu; Tahun 2029 : Ds. Banjarsari Kec. Jatinunggal, Ds. Pamulihan Kec. Pamulihan, Ds. Sukapura Kec. Wado, Ds. Margamukti Kec. Sumedang Utara, Ds. Ciranggem Kec. Jatigede; Tahun 2030: Ds. Sukagalih Kec. Sumedang Selatan, Ds. Kirisik Kec. Jatinunggal, Ds. Girimukti Kec. Sumedang Utara, Ds. Cisolak Kec Cisarua, Ds. Cimanintin Kec. Jatinunggal. (Sanitasi Tahun 2026 : Ds. Karedok Kec. Jatigede, Ds. Nangerang Kec. Sukasari, Ds. Cikadu Kec. Situraja, Ds. Karangpuan Kec. Darmaraja, Ds. Pamulihan Kec. Pamulihan, Ds. Raharja Kec. Tanjungsari, Ds. Cipameumpeuk Kec. Sumedang Selatan, Ds. Cijeruk Kec. Pamulihan, Ds. Jatimukti Kec. Jatinangor, Ds. Kamal Kec. Tanjungmedar, Ds. Ganeas Kec. Ganeas; Tahun 2027: Ds. Cihanjuang Kec. Cimanggung, Ds. Cikoneng Kec. Ganeas, Ds. Cilayung Kec. Jatinangor, Ds. Cipacing Kec. Jatinangor, Ds. Cipameumpeuk Kec. Sumedang Selatan, Ds. Cipanas Kec. Tanjungkerta, Ds. Ciptasari Kec. Pamulihan, Ds. Citali Kec. Pamulihan, Ds. Gunasari Kec. Sumedang Selatan, Ds. Jatisari Kec. Tanjungsari,

NO	MISI	Tujuan	Sasaran RPJMD	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
							Ds. Mekarrahayu Kec. Sumedang Selatan; Tahun 2028: Ds. Raharja Kec. Tanjungsari, Ds. Rancamulya Kec. Sumedang Utara, Ds. Tanjungmekar Kec. Tanjungkerta, Ds. Tanjungsari Kec. Tanjungsari, Ds. Ambit Kec. Situraja, Ds. Cijati Kec. Situraja, Ds. Cikeusi Kec. Darmaraja, Ds. Cimarga Kec. Cisitu, Ds. Girimukti Kec. Sumedang Utara, Ds. Kaduwulung Kec. Situraja, Ds. Tolengas Kec. Tomo, Ds. Trunamanggala Kec. Cimalaka; Tahun 2029: Ds. Cigendel Kec. Pamulihan, Ds. Cimanintin Kec. Jatinunggal, Ds. Cimungkal Kec. Wado, Ds. Cintajaya Kec. Jatigede, Ds. Cipeundeuy Kec. Jatinunggal, Ds. Citimun Kec. Cimalaka, Ds. Kamal Ds. Tanjungmedar, Ds. Karedok Kec. Jatigede, Ds. Licin Kec. Cimalaka, Ds. Nangerang Kec. Sukasari, Ds. Pamulihan Kec. Pamulihan; Tahun 2030: Ds. Pasirbiru Kec. Rancakalong, Ds. Suriamukti Kec. Surian, Ds. Tanjungmedar Kec. Tanjungmedar, Ds. Wanajaya Kec. Surian, Ds. Sinarmulya Kec. Sumedang Selatan, Ds. Sirnasari Kec. Jatinunggal, Ds. Sukaratu Kec. Darmaraja, Ds. Pamulihan Kec. Situraja, Ds. Gunturmekar Kec. Tanjungkerta, Ds. Cilembu Kec. Pamulihan.
						8	Penguatan kelembagaan dan SDM dalam penilaian standardisasi bangunan yang tahan bencana dan iklim

NO	MISI	Tujuan	Sasaran RPJMD	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
						9	Peningkatan akses kepemilikan rumah layak huni terjangkau dan berkelanjutan
						10	Peningkatan akses kepemilikan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya
						11	Pengurangan luasan kawasan kumuh kewenangan kabupaten. Tahun 2026: Kawasan Depok Kec. Tanjungsari, Kawasan Lembang Kec. Tanjungsari, Kawasan Ciranggon Kec. Sumedang Selatan, Kawasan Burujul Kec. Sumedang selatan; Tahun 2027: Kawasan Genteng Pacing-Cibunut Kec. Sumedang selatan, Kawasan Citulampa Kec. Tanjungsari, Kawasan Panday Kec. Sumedang Selatan, Kawasan Gordah Kec. Tanjungsari; Tahun 2028: Kawasan Talun Kec. Sumedang Utara, Kawasan Ciraja Kec. Sumedang Selatan, Kawasan Legok Cabe Kec. Cimanggung, Kawasan Sayang Kec. Jatinangor; Tahun 2029: Kawasan Pagaden Kec. Tanjungsari, Kawasan Situ Kec. Sumedang Utara, Kawasan Singaparna Kec. Sumedang Selatan, Kawasan Karasak Kec. Jatinangor; Tahun 2030: Kawasan Mandalunggu Kec. Jatinangor, Kawasan Nalegong Kec. Sumedang Selatan, Kawasan Warung Cina II Kec. Cimanggung, Kawasan Leles-Kebon Sereh Kec. Sumedang Selatan
						12	Percepatan pengadaan tanah sesuai LARAP-3C (Land Acquisition and

NO	MISI	Tujuan	Sasaran RPJMD	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
							<i>Resettlement Action Plan-Clean, Clear, Consolidated)</i> yang disusun secara kolaboratif & partisipatif bersama masyarakat, guna menghadirkan rasa keadilan, <i>trust</i> , dan dukungan penuh dari masyarakat, terutama untuk proyek-proyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas
				21	Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dalam dukungan pembangunan dan pembangunan proyek strategis regional maupun Nasional	1	Fasilitasi dan koordinasi dalam dukungan pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana kereta api logistik dry port KA terintegrasi kawasan strategis industri Kertajati-Cirebon
						2	Fasilitasi dan koordinasi Pengadaan lahan dalam Pengembangan kereta api cepat (<i>HST/High Speed Train</i>) Jakarta-Bandung-Cirebon
						3	Fasilitasi dan koordinasi dalam rangka elektrifikasi jalur KA dan peningkatan sarana/prasarana perkeretaapian, terutama untuk layanan perkeretaapian KA komuter di kawasan metropolitan Bandung
						4	Fasilitasi dan koordinasi dalam dukungan pembangunan jalan tol intraregional atau jalan arteri lingkaran kawasan perkotaan, terutama pada jalan tol intraregional metropolitan Bandung
						5	Fasilitasi dan koordinasi dalam rangka pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk (i) pemenuhan

NO	MISI	Tujuan	Sasaran RPJMD	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
						pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan di Kawasan Cincin Tampomas, Waduk Jatigede dan Waduk Cipanas untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iv) pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui <i>co-firing</i> dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan; (iii) pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; (iv) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (<i>smart grid</i>) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; (v) pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (<i>isolated mini/micro-grid</i>) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (vi) pengembangan sistem penyimpanan/cadangan energi; (vii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; (viii) pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; dan (ix) pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan.

NO	MISI	Tujuan	Sasaran RPJMD	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
			Meningkatnya ketahanan air	22	Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air.	1	Peningkatan infrastruktur air baku dan sistem irigasi
						2	Peningkatan konservasi air yang terintegrasi dari hulu ke hilir
						3	Penguatan sinergi lintas sektor dan wilayah dalam pengelolaan air
						4	Pelibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan dan perlindungan sumber air
4	Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah berbasis inovasi dan teknologi	23	Perluasan kesempatan kerja, pelatihan kerja serta sertifikasi keahlian sesuai kebutuhan lapangan kerja	1	Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif melalui <i>upskilling</i> maupun <i>reskilling</i>
						2	Penguatan pelatihan vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah berbasis kebutuhan dunia usaha dan dunia industri
						3	Peningkatan cakupan jaminan perlindungan ketenagakerjaan
				24	Kualitas dan daya saing industri kecil menengah dan koperasi	1	Pemberdayaan usaha mikro dan kecil yang inklusif dan berbasis kerakyatan
						2	Peningkatan keterkaitan usaha mikro dan kecil pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif
						3	Penyiapan industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi
				25	Peningkatan pengelolaan, pengembangan dan	1	Penataan dan penguatan daya tarik wisata secara kolaboratif dan partisipatif

NO	MISI	Tujuan	Sasaran RPJMD	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
					penataan kawasan dayatarik wisata dan pemberdayaan ekonomi kreatif	2	Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha
						3	Penguatan kelembagaan mitra strategis pariwisata
						4	Peningkatan konektivitas kawasan pariwisata
						5	Pengembangan dan pemberdayaan ekonomi kreatif
						6	Pembangunan dan pengembangan Kawasan <i>Geo Heritage</i>
				26	Pengembangan industri pengolahan dan manufaktur terpadu ramah lingkungan berbasis keunggulan wilayah yang dikembangkan pada kawasan strategis	1	Pengembangan industri berbasis keunggulan wilayah dan ramah lingkungan
						2	Penguatan rantai pasok lokal dengan melibatkan UMKM dan industri kecil menengah dalam ekosistem industri
						3	Peningkatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang dunia usaha dan dunia industri
						4	Pengembangan Kawasan Industri BUTOM
				27	Penguatan hilirisasi komoditas unggulan dan peningkatan akses pasar dan promosi komoditas daerah serta digitalisasi perdagangan	1	Pengembangan diversifikasi produk komoditas unggulan daerah dalam upaya meningkatkan nilai tambah
						2	Meningkatkan kapasitas pelaku usaha dalam manajemen produksi dan kualitas produk
						3	Meningkatkan partisipasi pelaku usaha lokal dalam pameran, promosi dagang, dan misi dagang nasional maupun internasional

NO	MISI	Tujuan	Sasaran RPJMD	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
						4	Peningkatan standardisasi produk melalui sertifikasi
						5	Pembangunan dan revitalisasi pasar rakyat, gudang, dan pusat distribusi terpadu
						6	Digitalisasi sistem informasi perdagangan dan logistik (<i>tracking, e-payment, e-logistics</i>)
						7	Penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif, antara lain melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas <i>researcher</i>, peningkatan pembiayaan riset sektor-sektor ekonomi produktif, serta penguatan kolaborasi riset sektor-sektor ekonomi produktif antara pemerintah, dunia akademik, DUDI, masyarakat, baik dalam dan luar negeri
				28	Penerapan ekonomi hijau (<i>green economy</i>)	1	Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis untuk sektor pertanian dan perikanan budidaya
						2	Penyiapan regulasi dan pengelola pengembangan ekosistem dan lanskap ekonomi hijau yang berkelanjutan
						3	Pengembangan teknologi tepat guna untuk pertanian organik, pengelolaan limbah, energi bersih, dan bangunan hijau
						4	Penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat melalui edukasi pentingnya ekonomi hijau, melibatkan pelaku usaha

NO	MISI	Tujuan	Sasaran RPJMD	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
							dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan
						5	Pemanfaatan energi terbarukan di sektor publik dan swasta
						6	Peningkatan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami
			Terkendalinya stabilitas fiskal daerah	29	Mendorong stabilitas keuangan dan daya saing investasi daerah	1	Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah (KPBUD dan CSR), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas provinsi dan prioritas nasional
						2	Peningkatan pengendalian inflasi daerah
						3	Peningkatan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan <i>blended finance</i>.
						4	Penyediaan akses pembiayaan kredit usaha pertanian
						5	Penguatan dan restrukturisasi BUMD
						6	Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke <i>green/low-cost financing</i>, bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya, baik di tingkat pusat dan daerah, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri),

NO	MISI	Tujuan	Sasaran RPJMD	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
							sektor-sektor ekonomi hijau, dan energi baru dan terbarukan
			Meningkatnya ketahanan pangan daerah	30	Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat	1	Peningkatan ketersediaan, akses, distribusi, keamanan, dan penguatan cadangan, serta konsumsi pangan yang beragam
				31	Meningkatkan produktivitas pertanian dan perikanan menuju kemandirian pangan	1	Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global
						2	Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis
						3	Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian
						4	Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan & kemandirian pangan dan <i>water prosperity</i>
						5	Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas perikanan dan daya saing produk perikanan
						6	Pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dengan memanfaatkan teknologi monitoring
						7	Modernisasi sarana dan prasarana perikanan
						8	Peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam rangka

NO	MISI	Tujuan	Sasaran RPJMD	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
						penguatan ketahanan dan kemandirian pangan nasional	
			Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	32	Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan	1	Penegakan regulasi terhadap pencemaran udara, air, dan tanah serta Pengawasan ketat terhadap eksternalitas industri, transportasi, pertambangan domestik, dan pertanian.
						2	Fasilitasi konservasi dan rehabilitasi lahan kritis, hutan, dan daerah aliran sungai (DAS) dan Perlindungan kawasan lindung dan keanekaragaman hayati
						3	Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir berbasis masyarakat dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan ekonomi sirkular yang terintegrasi dengan Pengembangan TPPAS Regional Legok Nangka (Tahun 2029 Kecamatan Cimagung, Kecamatan Jatinangor, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Sukasari, Kecamatan Pamulihan)
						4	Kemitraan dengan dunia usaha dalam implementasi program CSR berbasis lingkungan
						5	Penyediaan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju <i>zero solid waste city</i> dan mendukung ekonomi sirkular pada kawasan perkotaan
			Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana dan perubahan iklim	33	Memperkuat kapasitas daerah dalam menghadapi risiko bencana alam dan dampak perubahan iklim	1	Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat

NO	MISI	Tujuan	Sasaran RPJMD	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
							akan potensi bahaya, seperti gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi
						2	Pemanfaatan data dan kajian ilmiah dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan adaptif
						3	Peningkatan kapasitas adaptif pada sektor-sektor ekonomi dan wilayah yang rentan terhadap risiko perubahan iklim (Tahun 2026: Kecamatan Cimanggung, Kecamatan Jatinangor, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Sukasari, Kecamatan Pamulihan, Tahun 2027: Kecamatan Rancakalong, Kecamatan Sumedang Selatan, Kecamatan Sumedang Utara, Kecamatan Ganeas, Kecamatan Cisarua) Tahun 2028: Kecamatan Cimalaka, Kecamatan Paseh, Kecamatan Conggeang, Kecamatan Buahdua, Kecamatan Tanjungkerta, Kecamatan Tanjungmedar, Kecamatan Surian, Tahun 2029: Kecamatan Situraja, Kecamatan Cisitua, Kecamatan Darmaraja, Kecamatan Wado, Kecamatan Cibugel, Kecamatan Jatinunggal, Kecamatan Jatigede. Kecamatan Tomo, Kecamatan Ujungjaya)
5	Memperkuat Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial	Mewujudkan kesejahteraan	Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat	34	Mempercepat penanggulangan dan penuntasan kemiskinan	1	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat melalui program perlindungan masyarakat

NO	MISI	Tujuan	Sasaran RPJMD	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
		masyarakat dan ketahanan sosial				2	Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan usaha mikro kecil dan menengah
						3	Meningkatkan infrastruktur dasar di kantung-kantung kemiskinan
			Meningkatnya akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender	35	Meningkatkan pemberdayaan dan pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, penyandang disabilitas, dan lansia	1	Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang
						2	Pemberdayaan perempuan, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan
				36	Meningkatkan kesetaraan gender dan kualitas hidup perempuan di berbagai bidang pembangunan	1	Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan

Sumber: Hasil Analisis BAPPPEDA, 2025

Keterangan: Cetak tebal arah kebijakan transformasi

Pelaksanaan strategi dilaksanakan melalui pentahapan pembangunan sebagai prioritas pembangunan tahunan periode 2025-2029. Pentahapan ini merupakan bagian dari tahap pertama atau pondasi RPJPD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2045, yang merupakan penguatan modalitas/sumber daya yang dimiliki dalam pelaksanaan pembangunan ke depan. Upaya penguatan fondasi ini meliputi:

1. Pemenuhan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan dalam menunjang pembangunan sumber daya manusia berakhlak, berkarakter, berkualitas, dan inklusif;
2. Penguatan produksi dan produktivitas sektor ekonomi primer;
3. Penataan kelembagaan, regulasi, digitalisasi, dan pemberdayaan masyarakat sipil yang berintegritas, kolaboratif dan inovatif;
4. Penyelenggaraan transformasi kelembagaan dan tata kelola ideologi, politik, hukum dan keamanan daerah;
5. Peningkatan akses terhadap nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan;
6. Peningkatan infrastruktur dasar yang berkualitas;
7. Rehabilitasi sarana dan prasarana pelayanan dasar; dan
8. Penataan kebijakan pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan tahapan pertama atau pondasi di atas, perumusan pentahapan pembangunan pada RPJMD 2025-2029 dapat dilihat pada tabel 3.5 dibawah ini:

Tabel 3.5 Pentahapan Pembangunan Tahun 2025-2029

TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V	TAHAP VI
2025	2026	2027	2028	2029	2030
Penguatan Infrastruktur, Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Reformasi Birokrasi (Infrastruktur pelayanan dasar, infrastruktur jalan dan jembatan, peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan keterampilan dll), peningkatan tata kelola pemerintahan, daya tampung dan daya dukung kualitas lingkungan)	Peningkatan Infrastruktur, Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Reformasi Birokrasi (Infrastruktur pelayanan dasar, infrastruktur jalan dan jembatan, peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan keterampilan dll), peningkatan tata kelola pemerintahan, daya tampung dan daya dukung kualitas lingkungan)	Akselerasi Pertumbuhan Produktivitas Sektor Ekonomi (Peningkatan produktifitas pertanian, perikanan dan peternakan, peningkatan industri pengolahan didukung penguatan usaha mikro kecil dan ekonomi kreatif serta sektor konstruksi, hilirisasi industri, pengembangan kawasan pariwisata, sosial budaya (nilai-nilai sosial, budaya, dan tradisi masyarakat).	Optimalisasi Pembangunan Daerah Berkelanjutan (Peningkatan produktifitas pertanian, perikanan dan peternakan, peningkatan industri pengolahan didukung penguatan usaha mikro kecil dan ekonomi kreatif serta sektor konstruksi, hilirisasi industri, pertumbuhan sektor pariwisata berbasis budaya, daya tampung dan daya dukung kualitas lingkungan)	Perwujudan Sumedang SIMPATI Semakin Maju SDM berdaya saing, pelayanan publik berkualitas, good governance, infrastruktur mantap, sektor ekonomi yang bertumbuh dan ketahanan daerah	Pemantapan Pembangunan Berkelanjutan Pemantapan SDM berdaya saing, pelayanan publik berkualitas, good governance, infrastruktur mantap, sektor ekonomi yang bertumbuh dan ketahanan daerah

Sumber: Hasil Analisis BAPPPEDA, 2025

3.3.2. Arah Kebijakan Kewilayahan

Penyusunan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 mempedomani RTRW Kabupaten Sumedang melalui penyelarasan antara sasaran dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah dengan tujuan, kebijakan, serta rencana struktur dan rencana pola ruang wilayah dalam RTRW pada periode berkenaan. RPJMD yang disusun diharapkan selaras dan mengadaptasi rencana yang dimuat dalam RTRW untuk mewujudkan pembangunan yang berbasis penataan ruang.

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang mengamanatkan bahwa pemerintah daerah perlu melakukan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR) baik secara vertikal maupun horizontal. SPPR dilakukan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTRW, dengan menyelaraskan indikasi program utama sebagaimana dimaksud dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu. Dalam kaitannya dengan penyelarasan dokumen RPJMD dan RTRW, dokumen SPPR ini menjadi instrumen yang dapat dipergunakan dalam melakukan sinkronisasi antara program dalam dokumen RPJMD agar selaras dengan program pemanfaatan ruang yang termuat dalam RTRW. Dengan demikian, program-program pembangunan yang bersifat spasial dapat memiliki lokus yang jelas dan berbasis ruang.

Sesuai dengan pendekatan penyusunan perencanaan berdasarkan substansinya, RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan pendekatan holistik-tematik, integratif, dan spasial.

A. Pengembangan Kewilayahan dalam Perspektif Kabupaten

Dalam Upaya mendorong pengembangan wilayah di Kabupaten Sumedang mengacu kepada terminologi Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud yaitu:

- a. Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung meliputi Kecamatan Jatinangor, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Pamulihan, Kecamatan Cimanggung, Kecamatan Sukasari.
- b. Pusat Pelayanan Kawasan BUTOM meliputi: Kecamatan Buahdua, Kecamatan Ujungjaya, Kecamatan Tomo. Dalam mendukung pengembangan wilayah ini telah terbit Peraturan Bupati Sumedang Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Ujungjaya Tahun 2024-2044.

- c. Pusat Pelayanan Kawasan Jatigede meliputi Kecamatan Jatigede, Kecamatan Wado, Kecamatan Jatinunggal, Kecamatan Darmaraja, Kecamatan Cisu.
- d. Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan Ibu Kota Perkotaan Sumedang yang telah didukung dengan adanya Peraturan Bupati Sumedang Nomor 130 Tahun 2020 tentang Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Sumedang Tahun 2020-2040.

B. Pengembangan Kewilayahan dalam Arah kebijakan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029

Sesuai arah kebijakan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029, bahwa untuk pembangunan kewilayahan di Kabupaten Sumedang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Penyiapan kawasan strategis pertanian di wilayah Cimanuk-Cisanggarung.
2. Pembangunan dan perluasan coverage sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan, terutama pada metropolitan Jabodetabek dan Metropolitan Bandung.
3. Reaktivasi layanan perkeretaapian Rancaekek-Tanjungsari.
4. Persiapan elektrifikasi jalur KA dan peningkatan sarana/prasarana perkeretaapian, terutama untuk layanan perkeretaapian KA komuter di Kawasan Metropolitan Bandung.
5. Pengembangan kereta api cepat (*HST/High Speed Train*) Jakarta-Bandung-Cirebon-Semarang-Surakarta-Surabaya.
6. Peningkatan sarana & prasarana dan kualitas pelayanan bandar udara internasional yang dapat melayani aksesibilitas/konektivitas cepat ke/dari kawasan metropolitan, kawasan strategis industri, kawasan strategis pariwisata & ekonomi kreatif dan/atau Daerah Afirmasi 3TP, terutama Bandar Udara Internasional Jawa Barat (Kertajati).

C. Pengembangan Kewilayahan Pengembangan Kewilayahan dalam Perspektif Nasional Tahun 2025-2029

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, bahwa dalam rencana pembangunan di wilayah Jawa Barat khususnya Kabupaten Sumedang sebagaimana tercantum pada lampiran IV Peraturan Presiden Nomor 12 tahun

2025 pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.6 Arah Pembangunan Nasional Tahun 2025-2029

No.	Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi
1.	Kawasan swasembada pangan, air, dan energi Citarum-Cimanuk-Cisanggarung	a. Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat, antara lain pada D.I. Jatiluhur, D.I. Rentag, D.I. Cihea, D.I. Cikeusik, D.I. Seuseupan, D.I. Cipanas II, D.I. Cipancuh, D.I. Cileuleuy, D.I. Leuwinangka. b. Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah daerah. c. Peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi). d. Peningkatan produktifitas peternakan/pangan hewani (termasuk pengembangan kawasan peternakan). e. Pengembangan dan peningkatan produktifitas hortikultura. f. Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tananan pangan, peternakan, dan hortikultura. g. Konservasi sumber daya air melalui rehabilitasi hutan dan lahan pada <i>catchment area</i>, terutama pada DAS Citarum, DAS Cipunagara, DAS Cimanuk, DAS Kali Cilet, DAS Kali Pangkalan, DAS Cisanggarung, DAS Cipager, dan DAS Kali Kesunean. h. Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai, situ, dan danau, terutama pada DAS Citarum, DAS Cipunagara, DAS Cimanuk, DAS Kali Cilet, DAS Kali Pangkalan, DAS Cisanggarung, DAS Cipager, DAS Kali Kesunean, serta Waduk Jatiluhur, Waduk Cirata, Waduk Saguling, Waduk Jatigede, Waduk Darea, Waduk Sadawarna, Waduk Cipancuh, Situ Lembang, Situ Patenggang, Situ Cisanti, Situ Cipanunjang-Cileunca. i. Pembangunan infrastruktur PLTP Tampomas.

No.	Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi
		j. Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain melalui kebijakan tata ruang untuk perlindungan lahan pertanian; reforma agraria, redistribusi, dan konsolidasi lahan pertanian; optimalisasi dan revitalisasi lahan pertanian; dan peningkatan penggunaan pupuk/pestisida/pakan organik. k. Peningkatan produktifitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi, antara lain melalui: penyediaan dan perluasan akses alsintan modern/benih dan bibit berkualitas/pupuk dan pestisida berkualitas; mitigasi OPT dan kesehatan hewan; peningkatan infrastruktur konektifitas transportasi dan digital bagi petani; peningkatan kualitas pascapanen melalui peningkatan prasarana pascapanen. l. Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, perluasan akses asuransi usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar, antara lain melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi dan korporasi petani; pembiayaan dana bergulir dan kredit lunak petani; perluasan akses asuransi usaha tani; peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan sistem resi gudang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama. m. Pengembangan pusat/laboratorium riset pertanian skala lokal dalam rangka pengembangan varietas unggul dan budidaya lokal, peningkatan produktifitas petani, serta penguatan implementasi hasil riset pertanian.

Sumber: Dokumen RPJPN TAHUN 2025-2029

Sebagaimana diketahui bahwa Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038 dalam proses revisi, sehingga secara detail akan disajikan pada dokumen perencanaan tahunan (RKPD).

3.3.3. Program Prioritas Daerah

Program prioritas atau program unggulan merupakan serangkaian kegiatan-kegiatan yang disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumedang kepada masyarakat yang menggambarkan kegiatan konkret yang mudah dimengerti masyarakat, bermanfaat, dan memiliki dampak yang besar bagi masyarakat yang direncanakan dan dilaksanakan selama masa jabatan. Program prioritas atau program unggulan disusun dengan mempertimbangkan strategi yang akan dijalankan dalam upaya mencapai Tujuan dan Sasaran Pembangunan pada periode 2025-2029.

Adapun program prioritas atau program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumedang sebagaimana dimaksud, adalah sebagai berikut:

1. Program Sekolah/Pesantren Produktif dan Ramah Lingkungan

Program ini bertujuan untuk mewujudkan satuan pendidikan (sekolah atau pesantren) yang berdaya guna (produktif) serta berwawasan lingkungan (ramah lingkungan), dengan menekankan enam pilar utama berikut:

- a. **Terawat Bangunannya**, bangunan sekolah yang representatif (aman, bersih, sehat dan nyaman) dengan perawatan yang berkala dengan melibatkan warga sekolah.
- b. **Asri Pekarangannya**, lingkungan sekolah yang hijau, asri, bersih dengan mengedepankan pengelolaan sampah yang baik (3R/ *reduce, reuse, recycle*) dengan didukung sarana edukasi lingkungan (bank sampah, kompos, hidroponik, dan lain-lain).
- c. **Santun Gurunya**, guru menjadi teladan dalam bersikap, berbahasa, dan bertindak dengan mengedepankan etika, empati, dan pembinaan karakter siswa dan pendekatan pembelajaran yang humanis dan berintegritas.
- d. **Kreatif Muridnya**, siswa harus aktif dalam kegiatan kewirausahaan, seni, teknologi, dan inovasi dengan proses pembelajaran berbasis proyek, riset kecil, dan eksplorasi bakat dengan ditunjang lingkungan belajar yang mendukung ekspresi dan pertumbuhan minat siswa.
- e. **Akuntabel Tata Kelolanya**, sistem manajemen sekolah transparan, efektif, dan efisien melalui perencanaan dan pelaporan

keuangan/administrasi dilakukan terbuka dan bisa dipertanggungjawabkan serta melibatkan semua elemen dalam pengambilan keputusan.

- f. **Terbuka Kontrol Sosialnya**, sekolah harus terbuka terhadap masukan dari masyarakat, orang tua, dan pemangku kepentingan dengan adanya saluran untuk menerima pengaduan atau aspirasi dan terlibat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.

2. Program Maghrib Mengaji

Program ini merupakan pembelajaran atau pembacaan Al-Qur'an yang dilakukan secara *virtual (live streaming atau video conference)* maupun dilakukan secara tatap muka setiap waktu magrib, bertujuan melestarikan budaya mengaji sambil memanfaatkan teknologi digital. Kegiatan ini terbuka bagi masyarakat umum dengan tujuan meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap Al-Qur'an.

3. Program Ta'lim Aparatur dan Pesantren Aparatur

Program ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai keagamaan dan integritas pada para pegawai pemerintahan melalui :

- **Ta'lim aparatur**, kegiatan pembinaan keagamaan yang ditujukan kepada aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai pemerintahan melalui pengajian rutin, ceramah keagamaan, diskusi atau kajian kitab yang dilaksanakan 1 (satu) kali setiap bulan.
- **Pesantren Aparatur**, program ini merupakan bentuk pelatihan intensif yang mengadaptasi sistem pesantren dalam membina aparatur berupa pelatihan karakter dan spiritual berbasis pesantren bagi ASN atau pejabat pemerintahan, yang biasanya dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu.

4. Program Implementasi Sumedang Puseur Budaya Sunda (SPBS) pada lingkungan Pemerintahan dan Masyarakat

Sesuai amanat Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Sumedang Puseur Budaya Sunda, bahwa sebagai pesemaian untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan budaya Sunda secara sistematis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan memperkuat peran pelaku seni budaya, kelompok kreatif dan komunitas seni tradisi serta mendorong pengembangan sektor

pariwisata berbasis kekayaan alam dan kebudayaan dalam rangka implementasi SPBS (Sumedang Puseur Budaya Sunda), melalui:

- a. Penyelenggaraan acara-acara kesenian dan kebudayaan.
- b. Pengembangan pusat kuliner dan seni kreatif;
- c. Pengembangan wisata alam dan budaya berbasis kolaborasi;
- d. Fasilitasi pendidikan dan pelestarian seni tradisi Sumedang.

5. Program Jawara Anti Korupsi

Program ini merujuk pada semangat, strategi, dan implementasi nyata dalam mewujudkan instansi pemerintah yang bersih dari korupsi dan mampu memberikan layanan publik secara optimal. Dengan penjabaran sebagai berikut:

- **"Jawara"** di sini bisa dimaknai sebagai tokoh utama atau pelopor yang menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi dan pembenahan birokrasi. Konsep ini mendukung pencapaian Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani.

Makna dari **"Jawara"** adalah :

- a. **Jujur** : Aparatur menjunjung kejujuran dalam pelayanan dan pengelolaan anggaran.
- b. **Amanah** : Bertanggung jawab dan dapat dipercaya dalam menjalankan tugas.
- c. **Waspada** : Selalu siaga terhadap potensi *fraud* atau penyalahgunaan wewenang.
- d. **Aktif** : Proaktif melakukan perbaikan sistem dan pelayanan.
- e. **Responsif** : Cepat dan tepat dalam melayani kebutuhan masyarakat.
- f. **Anti Korupsi** : Menolak segala bentuk gratifikasi, suap, dan penyimpangan.

6. Program memperkuat ASN sebagai upaya memajukan & menguatkan birokrasi (Program Meritokrasi dan Profesionalisme ASN)

Program merupakan menempatkan ASN bukan hanya sebagai pelaksana teknis, tapi juga sebagai pilar utama pembangunan dan teladan moral di tengah masyarakat. Dalam pelaksanaannya melalui:

- 1. Keterbukaan dan kepastian jenjang jabatan dan karier serta pendapatan ASN berbasis kinerja.
- 2. Menjamin kenyamanan dan kepuasan kerja serta perlindungan hukum bagi ASN.

3. Fasilitasi ASN menjelang pensiun/MPP melalui pemberdayaan usaha dan atau *social preneurship*.
4. Pamong SIMPATI Award yang diprioritaskan pada penyuluh berprestasi, petugas gizi berprestasi, guru berprestasi, bidan desa berprestasi, dan karyawan kantor.

7. Program Jalan Leucir nepi ka Desa

Program JALAN LEUCIR NEPI KA DESA adalah inisiatif pemerintah untuk meningkatkan infrastruktur jalan dari mulai jalan kabupaten sampai ke tingkat desa, sehingga masyarakat secara umum dapat menikmati kualitas akses yang lebih baik sekaligus lebih mudah untuk melakukan aktivitas sehari-hari dengan tujuan meningkatkan aksesibilitas, konektivitas, dan kualitas hidup masyarakat melalui:

1. Jalan kabupaten dan desa dalam kondisi baik.
2. Pembukaan akses jalan baru.

8. Program Gerakan Wirausaha Pemuda/Kaum Milenial

Program ini merupakan upaya sistematis dan kolaboratif untuk mendorong, membina, dan memberdayakan pemuda/milenial agar terjun dalam dunia wirausaha produktif, kreatif, dan berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya dapat melalui:

1. Bimbingan teknis kreatifitas pada berbagai sub sektor ekonomi kreatif.
2. Fasilitasi jejaring dan permodalan ekonomi kreatif.
3. Penguatan kelembagaan dan ekosistem ekonomi kreatif.
4. Optimalisasi Gedung *Creative Centre*.

9. Program Revolusi Pertanian (Revolper) atau Program 4A (Ada Air, Ada Pupuk, Ada Benih, dan Ada Alat Mesin Pertanian)

Program ini merupakan transformasi pertanian dan peternakan secara sistemik, dengan fokus pada penyediaan sarana produksi yang lengkap dan berkelanjutan, serta pemberdayaan petani/peternak agar dapat memproduksi optimal, berdaya saing tinggi dan mendapatkan hasil yang lebih menguntungkan, melalui:

1. Membangun irigasi guna penyediaan air sepanjang musim.
2. Bantuan alat mesin pertanian (Alsintan), mekanisasi pertanian, dan bioteknologi.
3. Asuransi usaha tani dan ternak.
4. Pelayanan kesehatan ternak.
5. Membangun jalan usaha tani (JUT).

6. Penyediaan saprotan, pupuk, benih dan bibit sepanjang musim.
7. Bantuan permodalan usaha pertanian, peternakan dan perikanan.

10. Program Usaha Mikro Kecil Unggul

Program ini memperlakukan UMKM bukan hanya sebagai pelengkap ekonomi, melainkan sebagai penggerak utama ekonomi lokal yang perlu pembinaan, perlindungan, dan pemberdayakan, melalui:

1. Fasilitasi insentif perizinan dan permodalan.
2. Revitalisasi pasar tradisional, membangun pasar induk dan tempat usaha lainnya.
3. Fasilitasi bantuan teknologi produksi dan pemasaran.
4. Pembinaan dan pendampingan usaha mikro dan kecil unggulan dalam memasuki sistem perdagangan digital.

11. Program Pengembangan Industri Manufaktur, Jasa Perhotelan, dan Pariwisata

Program ini merupakan strategi untuk penguatan ekonomi daerah yang berdaya saing melalui:

1. Fasilitasi kemudahan perizinan dan insentif berusaha lainnya.
2. Pelaksanaan forum investasi daerah.

12. Program Kadeudeuh Simpati

Program ini salah satu bentuk komitmen Pemerintah Daerah dalam membantu penguatan pembangunan di desa dan pemberian insentif bagi para penggerak masyarakat serta bantuan bagi lembaga keagamaan, berupa:

1. Penguatan keuangan desa.
2. Melanjutkan program insentif guru ngaji.
3. Melanjutkan insentif bagi RT/RW.
4. Insentif bagi PKK.
5. Melanjutkan insentif bagi Kader Posyandu.
6. Melanjutkan bantuan kepada pesantren.
7. Insentif bagi Linmas.
8. Dukungan administrasi Guru Honorer.

13. Program Optimalisasi Pelayanan Rumah SIMPATI

Program ini merupakan komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang sebagai pelayan masyarakat sehingga dapat menjadi tempat atau "rumah" yang nyaman untuk masyarakat miskin dan rentan. Program yang inklusif ini meliputi pemberdayaan perempuan, perlindungan anak,

ibu hamil dan mendorong terbentuknya pelayanan lansia (Geriatri), serta aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Implementasi Program Unggulan ini antara lain:

1. Penguatan konvergensi penanggulangan stunting.
2. Penguatan Rintang Simpati dalam wujud pemberian makan gratis bagi fakir miskin Lansia.
3. Layanan Geriatri/Lansia di semua Rumah Sakit Umum Daerah.
4. Pencegahan kekerasan perempuan dan perdagangan orang.
5. Peningkatan sarana prasarana dan pelayanan publik yang ramah disabilitas.

Tabel berikut memperlihatkan keterkaitan perencanaan dari Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran hingga menghasilkan Program Prioritas sebagaimana dimaksud.

Tabel 3.7 Teknik Merumuskan Program Prioritas Daerah RPJMD Tahun 2025-2029

VISI/MISI	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator Tujuan/Sasaran	Program Prioritas	Indikator Program	Program Unggulan	Perangkat Daerah Penanggungjawab
VISI : SUMEDANG SIMPATI SEMAKIN MAJU MENUJU INDONESIA EMAS 2045								
	Terwujudnya Masyarakat yang sehat, cerdas dan berkarakter			Indeks Pembangunan Manusia				
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		Usia Harapan Hidup			Program Optimalisasi Pelayanan Rumah Simpati Pengembangan layanan Geriatri/Lansia di semua rumah sakit pemerintah Program penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi	
				Penanganan Tuberkulosis: a. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>) b. Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>)				
				Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita				
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase fasilitas layanan kesehatan yang sesuai standar		Dinas Kesehatan
				Cakupan pelayanan kesehatan penyakit menular				
				Cakupan pelayanan kesehatan penyakit tidak menular				
				Kesehatan ibu dan anak				
				a. Jumlah kasus kematian ibu per tahun				

VISI/MISI	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator Tujuan/Sasaran	Program Prioritas	Indikator Program	Program Unggulan	Perangkat Daerah Penanggungjawab
						b. Jumlah kasus kematian bayi per tahun		
			Meningkatnya kualitas pelayanan rumah sakit yang sesuai standar			Cakupan pelayanan kesehatan rujukan yang sesuai standar		RSUD Umar Wirahadikusumah
			Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman	Persentase cakupan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman		Dinas Kesehatan
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan		
			Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk		Program Pengendalian Penduduk	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (<i>Age Specific Fertility Rate/ASFR</i>)		Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan P3A
		Meningkatnya pemerataan aksesibilitas dan penyelenggaraan pendidikan serta literasi masyarakat		Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun			Program Sekolah/Pesantren Produktif dan Ramah Lingkungan 1. Pemeliharaan bangunan sekolah dan sarana lainnya 2. Pengembangan sekolah berwawasan lingkungan 3. Peningkatan kapasitas pendidik dalam mewujudkan pendidikan berkarakter 4. Pengembangan muatan lokal pendidikan karakter 5. Peningkatan tata	
				Harapan lama sekolah				
			Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah		Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan SD		
						Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan SMP		
						Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan PAUD		
						Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan kesetaraan		

VISI/MISI	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator Tujuan/Sasaran	Program Prioritas	Indikator Program	Program Unggulan	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Meningkatnya layanan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan		Program Pembinaan Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	kelola penyelenggaraan pendidikan 6. Penguatan peran komite sekolah Program Kadeudeuh Simpati Pemberian insentif untuk guru mengaji dan dukungan administrasi guru honorer	Dinas Arsip dan Perpustakaan
		Mewujudkan Kehidupan sosial yang dijiwai keimanan dan ketakwaan sesuai keyakinan masyarakat, yang taat hukum, berbudaya, dan demokratis		Indeks Kerukunan Umat Beragama			Program Magrib Mengaji Program Ta'lim Aparatur dan Pesantren Aparatur Program Kadeudeuh SIMPATI Bantuan kepada pesantren dan lembaga keagamaan lainnya	
			Meningkatnya penerapan hasil pembinaan, ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase peningkatan orang yang terbina dalam aspek pemahaman ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan bidang kesejahteraan rakyat		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase implementasi kebijakan urusan kesejahteraan rakyat		Sekretariat Daerah
				Persentase warisan budaya yang dilestarikan (%)			Program Implementasi Sumedang Puseur	

VISI/ MISI	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator Tujuan/Sasaran	Program Prioritas	Indikator Program	Program Unggulan	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan		Program Pengembangan Kebudayaan	Tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan	Budaya Sunda (SPBS) pada lingkungan pemerintahan dan masyarakat 1. Penyelenggaraan acara-acara kesenian dan kebudayaan. 2. Pengembangan pusat kuliner dan seni kreatif. 3. Pengembangan wisata alam dan budaya berbasis kolaborasi 4. Fasilitasi pendidikan dan pelestarian seni tradisi Sumedang	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga
			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase kesenian tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan		
			Meningkatnya warisan budaya yang dikelola		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase cagar budaya yang ditetapkan dan dikelola		
				Tingkat cipta kondisi kondusif				
			Meningkatnya kewaspadaan daerah		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase potensi konflik yang diselesaikan		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				Tingkat bina demokratisasi				
			Meningkatnya penerapan hasil pembinaan ideologi Pancasila serta wawasan kebangsaan		Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase pelaksanaan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Meningkatnya pemahaman teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan		Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan	Persentase peningkatan peran parpol yang melaksanakan pendidikan politik dan		

VISI/MISI	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator Tujuan/Sasaran	Program Prioritas	Indikator Program	Program Unggulan	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik		Etika serta Budaya Politik	pengembangan etika serta budaya politik		
				Partisipasi dan peran pemuda dalam pembangunan			Program Gerakan Wirausaha Pemuda/ kaum milenial:	
			Meningkatnya daya saing kepemudaan		Program Pengembangan Kapasitas daya saing kepemudaan	Persentase pemuda yang pernah mengikuti pelatihan/ kursus/training dan memperoleh sertifikat	1. Bimbingan teknis kreatifitas pada berbagai sub sektor ekonomi kreatif. 2. Fasilitasi jejaring dan permodalan ekonomi kreatif. 3. Penguatan kelembagaan dan ekosistem ekonomi kreatif. 4. Optimalisasi Gedung <i>Creative Center</i>	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga
			Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi		
Misi 2: Menguatkan Birokrasi Profesional dan Responsif	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan inovatif berbasis teknologi digital			Indeks Daya Saing Daerah				
				Indeks Reformasi Birokrasi				
		Terciptanya tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan inovatif sampai tingkat desa		Indeks Profesionalisme ASN			Program Meritokrasi dan Profesionalisme ASN:	
			Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian		Program Kepegawaian Daerah	Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi	1. Penerapan sistem merit dalam sistem karier dan tunjangan ASN. 2. Perlindungan hukum bagi ASN. 3. Pelayanan pendampingan ASN sebelum memasuki masa purna bakti. 4. Pemberian	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN			Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya		
			Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN			Persentase pengembangan karir ASN sesuai dengan kompetensinya		

VISI/ MISI	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator Tujuan/Sasaran	Program Prioritas	Indikator Program	Program Unggulan	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN			Persentase pegawai dengan SKP bernilai baik	penghargaan bagi ASN berprestasi.	
				Indeks Survei Penilaian Integritas (SPI)			Program Jawa Anti Korupsi: Pembenahan sistem birokrasi dalam upaya mencapai Zona Integritas (ZI) dan Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani.	
			Meningkatnya kepatuhan atas pemenuhan rekomendasi tindaklanjut hasil pemeriksaan		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Tindaklanjut rekomendasi hasil pemeriksaan tahun anggaran N-1 eksternal (BPK)		Inspektorat Daerah
						Tindaklanjut rekomendasi hasil pemeriksaan tahun anggaran N-1 internal (APIP Kabupaten)		
						Tindaklanjut rekomendasi hasil pemeriksaan tahun anggaran N-1 internal (APIP Lainnya)		
			Meningkatnya kualitas perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi	Persentase pemenuhan infrastruktur peningkatan kapabilitas APIP		
				Indeks Inovasi Daerah				
			Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan		Program Riset dan Inovasi Daerah	Persentase data inovasi Kabupaten Sumedang yang dilaporkan		Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah
				Indeks Desa			Program Kadeudeuh Simpati: 1. Penguatan	Dinas Pemberdayaan
			Meningkatnya kualitas penataan desa		Program Penataan Desa	Persentase fasilitasi penataan desa		

VISI/MISI	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator Tujuan/Sasaran	Program Prioritas	Indikator Program	Program Unggulan	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase aparatur desa dan anggota BPD yang ditingkatkan kapasitasnya	keuangan desa 2. Pemberian insentif RT/RW, PKK, kader Posyandu, dan Linmas.	Masyarakat dan Desa
			Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat dalam pembangunan		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase fasilitasi pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)		
		Meningkatnya pemanfaatan transformasi digital		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik				
				Indeks Pemerintahan Berbasis Digital (PEMDI)				
			Meningkatnya kualitas layanan publik melalui pemanfaatan teknologi digital		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase perangkat daerah dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo Persentase perangkat daerah di tingkat kabupaten/kota yang terhubung dengan jaringan intra pemerintah daerah Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan Sistem		Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian, dan Statistik

VISI/MISI	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator Tujuan/Sasaran	Program Prioritas	Indikator Program	Program Unggulan	Perangkat Daerah Penanggungjawab	
						Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD)			
			Meningkatnya kualitas data pembangunan		Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)			
		Penguatan regulasi dan kepastian hukum dalam upaya peningkatan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat		Indeks Kepatuhan Daerah					
			Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada		Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan		Satuan Polisi Pamong Praja	
			Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum			Persentase penyelenggaraan Tibumtranmas			
			Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat			Persentase cakupan perlindungan masyarakat			
			Meningkatnya kapasitas SDM PPNS			Jumlah PPNS pada Satpol PP			
			Meningkatnya kualitas produk hukum daerah yang dihasilkan			Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat			Persentase implementasi kebijakan urusan hukum
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Indeks Pelayanan Publik					
			Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko		Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
			Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk			Program Pendaftaran Penduduk			Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)
		Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (IKA)							

VISI/MISI	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator Tujuan/Sasaran	Program Prioritas	Indikator Program	Program Unggulan	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil		Program Pencatatan Sipil	Persentase akta kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan		
						Persentase akta kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan		
						Persentase akta perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan		
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik		Program Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase masyarakat yang diberikan layanan di kecamatan		
			Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran dan non kebakaran		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan kebakaran		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
			Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran			Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran		
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintahan daerah		Nilai skor LPPD Kabupaten				
			Meningkatnya kualitas perencanaan dan pembangunan daerah		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Nilai aspek perencanaan pembangunan dalam penghargaan pembangunan daerah		Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang Pemerintahan dan		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase capaian kinerja program perangkat daerah mitra Bidang Pemerintahan dan		

VISI/MISI	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator Tujuan/Sasaran	Program Prioritas	Indikator Program	Program Unggulan	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Pembangunan Manusia			Pembangunan Manusia		
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			Persentase capaian kinerja program perangkat daerah mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang Perekonomian dan SDA			Persentase capaian kinerja program perangkat daerah mitra Bidang Perekonomian dan SDA		
			Meningkatnya kualitas pengelolaan penganggaran		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Ketepatan waktu proses penganggaran		Badan Keuangan dan Aset Daerah
			Meningkatnya kualitas pelaksanaan penatausahaan keuangan			Persentase realisasi penyerapan anggaran belanja terhadap rencana anggaran kas		
			Meningkatnya kualitas pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan			Persentase ketepatan waktu penyampaian LKPD		
			Pengelolaan barang milik daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase dokumen pengelolaan barang milik daerah		
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan kewilayahan		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase implementasi kebijakan urusan pemerintahan		Sekretariat Daerah (Bagian Tata Pemerintahan)
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Sakip perangkat daerah		Seluruh Perangkat Daerah

VISI/MISI	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator Tujuan/Sasaran	Program Prioritas	Indikator Program	Program Unggulan	Perangkat Daerah Penanggungjawab
Misi 3: Meningkatkan Infrastruktur Dasar yang Merata dan Berkeadilan	Mewujudkan kualitas infrastruktur dasar dan pengembangan wilayah			Indeks Kualitas Infrastruktur				
		Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar dan konektivitas		Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan				
			Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana		Program Pengembangan Perumahan	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
			Terfasilitasinya relokasi rumah yang layak huni			Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni		
			Meningkatnya kualitas kawasan permukiman kumuh kewenangan kabupaten dengan luas dibawah 10 Ha		Program Kawasan Permukiman	Persentase luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani		
			Meningkatnya penyediaan PSU perumahan		Program Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase permukiman yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)		
			Meningkatnya bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi		Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase kepatuhan PBG & SLF kabupaten/kota		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
				Indeks Konektivitas Jalan			Program Jalan Leucir Nepi ka Desa	

VISI/MISI	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator Tujuan/Sasaran	Program Prioritas	Indikator Program	Program Unggulan	Perangkat Daerah Penanggungjawab		
			Meningkatnya struktur jalan dan jembatan		Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat kemantapan jalan kabupaten/kota	1. Peningkatan jalan kabupaten dan desa 2. Pembangunan jalan baru	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang		
			Meningkatnya konektivitas angkutan darat		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota		Dinas Perhubungan		
			Meningkatnya kualitas dan kuantitas kelengkapan jalan yang terpasang terhadap kondisi ideal			Persentase perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan				
						Rasio konektivitas kabupaten/kota				
		Meningkatnya ketahanan air		Kapasitas air baku						
			Meningkatnya luas lahan yang terairi jaringan irigasi		Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase luas layanan irigasi multikomoditas		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang		
				Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan						
			Meningkatnya pelayanan penyediaan air minum		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.	Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang		
		Misi 4: Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang			Laju pertumbuhan ekonomi				
						PDRB per kapita (ADHB)				

VISI/MISI	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator Tujuan/Sasaran	Program Prioritas	Indikator Program	Program Unggulan	Perangkat Daerah Penanggungjawab
Inklusif dan Berkelanjutan	inklusif dan berkelanjutan			Penurunan Intensitas emisi GRK				
				Indeks Ekonomi Hijau Daerah				
				Indeks Risiko Bencana				
		Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah berbasis inovasi dan teknologi		Rasio PDRB Industri Pengolahan			Program Pengembangan Industri Manufaktur, Jasa dan Pariwisata	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan
			Tersusunnya dokumen perencanaan dan pembangunan industri		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase pertumbuhan industri kecil		
			Meningkatnya pengendalian izin usaha industri kabupaten/kota		Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase jumlah perusahaan industri dan kawasan industri yang telah menindaklanjuti hasil rekomendasi pengawasan dibandingkan dengan jumlah perusahaan industri dan kawasan industri yang telah dilakukan pengawasan	Fasilitasi kemudahan perizinan dan insentif berusaha lainnya.	
				Rasio PDRB penyediaan akomodasi makan dan minum				
			Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata	Jumlah kunjungan wisatawan		
			Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata		Program Pemasaran Pariwisata	Persentase objek daya tarik wisata yang dipromosikan	Program Pengembangan Industri Manufaktur, Jasa Perhotelan dan Pariwisata	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

VISI/ MISI	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator Tujuan/Sasaran	Program Prioritas	Indikator Program	Program Unggulan	Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Rasio PDRB Sektor Perdagangan			Program Usaha Mikro Kecil Unggul: 1. Revitalisasi pasar tradisional 2. Pembangunan pasar induk 3. Pengembangan dan pengawasan usaha perdagangan	
			Meningkatnya sarana distribusi perdagangan		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya		Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
			Meningkatnya ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting		Program Stabilisasi Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting		
				Rasio kewirausahaan daerah			Program Usaha Mikro Kecil Unggul: 1. Fasilitasi insentif perizinan dan permodalan 2. Pemberian bantuan teknologi produksi dan pemasaran	
			Meningkatnya pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)		Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
			Meningkatnya pengembangan usaha mikro menjadi usaha kecil		Program Pengembangan UMKM	Jumlah usaha mikro yang bertransformasi dari informal ke formal		
				Tingkat pengangguran terbuka			Program gerakan wirausaha pemuda/kaum milenial	
			Meningkatnya kualitas dan penempatan tenaga kerja		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Meningkatnya penempatan tenaga kerja		Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase ketersediaan informasi kesempatan kerja pada sektor formal dan non formal		
			Terciptanya hubungan industrial yang harmonis,		Program Hubungan Industrial	Persentase perselisihan hubungan industrial yang		

VISI/MISI	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator Tujuan/Sasaran	Program Prioritas	Indikator Program	Program Unggulan	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			dinamis dan berkeadilan			diselesaikan melalui bipartit/mediasi		
				Pembentukan Modal Tetap Bruto			Program Pengembangan Industri Manufaktur, Jasa Perhotelan, dan Pariwisata	
			Meningkatnya iklim investasi tingkat kabupaten		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Realisasi total terhadap target investasi	Pelaksanaan forum investasi daerah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal dan perijinan		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase realisasi penanaman modal pelaku usaha		
			Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal		
				Net Ekspor Impor Antar Daerah			Program Usaha Mikro Kecil Unggul:	
			Meningkatnya pelaku usaha yang menjadi eksportir		Program Pengembangan Ekspor	Nilai total penjualan perdagangan antar wilayah pada kabupaten/kota	Pembinaan dan pendampingan usaha mikro dan kecil unggulan dalam memasuki sistem perdagangan digital	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
			Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri		Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase produk lokal yang terstandardisasi		
				Rasio PDRB Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan			Program Revolusi Pertanian (Revolper):	
			Meningkatnya kualitas dan kuantitas budidaya pertanian yang didukung dengan sarana pertanian		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Luas ekstensifikasi komoditas pertanian	1. Pembangunan dan rehabilitasi sistem pengairan pertanian 2. Pemberian bantuan alat mesin pertanian (Alsintan) 3. Pengembangan sistem asuransi usaha tani dan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
						Luas intensifikasi komoditas pertanian		
			Meningkatnya populasi ternak			Peningkatan populasi ternak		

VISI/MISI	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator Tujuan/Sasaran	Program Prioritas	Indikator Program	Program Unggulan	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase infrastruktur peternakan yang tersedia dan dikembangkan	ternak 3. Pelayanan kesehatan ternak 4. Pembangunan dan rehabilitasi jalan usaha tani (JUT) 5. Penyediaan saprota, pupuk, benih dan bibit sepanjang musim 6. Bantuan permodalan usaha pertanian, peternakan, dan perikanan	
			Meningkatnya kualitas dan kuantitas budidaya pertanian yang didukung dengan prasarana pertanian			Persentase prasarana pertanian yang dibangun/direhabilitasi		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			Terkendalnya kasus kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase kasus kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner yang dikendalikan		Dinas Perikanan dan Peternakan
			Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
						Persentase penanggulangan bencana pertanian		
						Persentase pengendalian bencana pertanian		
			Terkendalnya dan tertanggulangnya bencana penyakit hewan menular strategis			Persentase wilayah yang terkendali dari bencana penyakit hewan menular strategis		Dinas Perikanan dan Peternakan
			Meningkatnya kapasitas SDM pertanian		Program Penyuluhan Pertanian	Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan petani		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

VISI/MISI	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator Tujuan/Sasaran	Program Prioritas	Indikator Program	Program Unggulan	Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Persentase peningkatan kapasitas penyuluh pertanian		Dinas Perikanan dan Peternakan
						Persentase peningkatan kapasitas petani		
			Meningkatnya produksi perikanan tangkap		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi perikanan tangkap		
			Meningkatnya produksi perikanan budidaya		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi perikanan budidaya		
		Terkendalinya stabilitas Fiskal Daerah	Meningkatnya jumlah unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Persentase Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD)	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Peningkatan jumlah unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan		Badan Pendapatan Daerah
			Meningkatnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase kesesuaian data potensi Pendapatan Asli Daerah		
						Persentase penerimaan Pendapatan Asli Daerah		
						Persentase perencanaan terhadap potensi PAD		
						Persentase transaksi pajak dan retribusi yang		

VISI/MISI	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator Tujuan/Sasaran	Program Prioritas	Indikator Program	Program Unggulan	Perangkat Daerah Penanggungjawab
						diproses melalui sistem informasi		
				Total kredit/PDRB				
			Meningkatnya pelayanan izin usaha simpan pinjam		Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Pertumbuhan volume usaha koperasi		Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan
			Meningkatnya pengawasan dan pemeriksaan koperasi		Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi		
			Meningkatnya kesehatan KSP/USP koperasi		Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase KSP/USP yang sehat		
			Meningkatnya koperasi yang diberdayakan dan mendapat perlindungan		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase koperasi yang diberdayakan dan mendapat perlindungan		
		Meningkatnya ketahanan pangan daerah		Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan			Program Revolusi Pertanian (Revolper)	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan		Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Ketersediaan pangan pokok		
			Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan		
			Meningkatnya penanganan kerawanan pangan		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase daerah rentan rawan pangan		
			Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan		Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan		
		Meningkatnya kualitas		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)				

VISI/ MISI	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator Tujuan/Sasaran	Program Prioritas	Indikator Program	Program Unggulan	Perangkat Daerah Penanggungjawab
		lingkungan hidup		Penurunan emisi GRK/kumulatif				
			Meningkatnya kapasitas fasilitas pengolahan sampah		Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Terlaksananya pemantauan kualitas air dan udara		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase pemantauan kualitas air dan kualitas udara		
			Terlaksananya pengelolaan limbah B3 sesuai peraturan yang berlaku		Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase pelaku usaha yang mengelola limbah B3 sesuai ketentuan		
			Meningkatnya penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Peningkatan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat		
			Meningkatnya kinerja pengelolaan sampah		Program Pengelolaan Persampahan	Indeks Governance dalam Pengelolaan Sampah		
		Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana dan perubahan iklim		Indeks Ketahanan Daerah				
			Meningkatnya layanan informasi rawan bencana		Program Penanggulangan Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Meningkatnya layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana			Persentase warga negara dan aparatur yang memperoleh		

VISI/MISI	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator Tujuan/Sasaran	Program Prioritas	Indikator Program	Program Unggulan	Perangkat Daerah Penanggungjawab
						layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		
			Meningkatnya layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana			Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		
			Meningkatnya kualitas pendampingan pasca bencana			Persentase warga negara terdampak bencana yang mendapat pendampingan pasca bencana		
Misi 5: Memperkuat Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial	Mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan sosial	Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat		Tingkat Kemiskinan				
				Rasio Gini				
				Pengeluaran per Kapita				
			Meningkatnya Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) perorangan dalam pelayanan sosial		Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) perorangan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar	Program Optimalisasi Pelayanan Rumah Simpati: 1. Penguatan Rintang Simpati dalam wujud pemberian makan gratis bagi fakir miskin Lansia. 2. Peningkatan sarana prasarana dan pelayanan publik yang ramah disabilitas. 3. Pencegahan kekerasan perempuan dan perdagangan orang	Dinas Sosial
			Meningkatnya kapasitas PSKS lainnya yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial			Persentase PSKS lainnya yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial		
			Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi penyandang disabilitas terlantar		Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi		

VISI/MISI	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator Tujuan/Sasaran	Program Prioritas	Indikator Program	Program Unggulan	Perangkat Daerah Penanggungjawab
						kebutuhan dasarnya di luar panti		
			Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi anak terlantar			Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti		
			Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi lanjut usiaterlantar			Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti		
			Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi gelandangan dan pengemis terlantar			Persentase gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti		
			Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi PPKS lainnya di luar HIV/AIDS			Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya diluar HIV/AIDS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti		
			Meningkatnya sarana dan prasarana untuk pelayanan sosial sesuai standar			Persentase sarana prasarana yang disediakan sesuai standar untuk pelayanan sosial di luar panti		
			Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi penerima manfaat		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar		

VISI/MISI	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator Tujuan/Sasaran	Program Prioritas	Indikator Program	Program Unggulan	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Meningkatnya kemandirian ekonomi bagi penerima manfaat			Pesentase penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi		
			Pemutakhiran data fakir miskin			Jumlah pemutakhiran data fakir miskin dan kelompok rentan yang dilakukan selama satu tahun		
			Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi korban bencana alam, sosial, dan non alam		Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam, sosial, dan non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota		
			Tersedianya sarana dan prasarana bagi korban bencana			Persentase sarana prasarana bagi korban bencana kabupaten/kota yang disediakan sesuai standar		
			Meningkatnya pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana			Persentase pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana kabupaten/kota pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar		

VISI/MISI	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator Tujuan/Sasaran	Program Prioritas	Indikator Program	Program Unggulan	Perangkat Daerah Penanggungjawab
		Meningkatnya akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan dan anak, serta kesetaraan gender		Indeks Pembangunan Keluarga				
				Indeks Ketimpangan Gender (IKG)				
				Indeks Pembangunan Gender				
				Indeks Pemberdayaan Gender				
		Meningkatnya kelembagaan pengarusutamaan gender	Meningkatnya pemberdayaan perempuan		Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)		Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Meningkatnya kekerasan terhadap perempuan			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan		
			Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak		Program Perlindungan Perempuan	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif		
					Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang berperspektif gender dan hak anak sesuai standar		
				Indeks Perlindungan Anak				
			Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara kompherensif		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)		Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
			Meningkatnya pencegahan dan			Indeks Perlindungan		

VISI/MISI	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator Tujuan/Sasaran	Program Prioritas	Indikator Program	Program Unggulan	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak		Program Perlindungan Khusus Anak	Khusus Anak (IPKA) Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif		Perempuan dan Perlindungan Anak
			Meningkatnya penanganan warga negara korban tindak kekerasan		Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase penanganan warga negara korban tindak kekerasan		

Sumber: Hasil Analisis BAPPPEDA, 2025

Tabel 3.8 Lokasi Prioritas Pembangunan

No.	Nama Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Tematik	Keterangan
1	Rekonstruksi jalan	Ruas Jalan Ujungjaya-Conggeang	Mendukung Perpres 87 Tahun 2021 tentang Kawasan Rebana dan Jawa Barat Selatan, akses menuju Kawasan Industri <i>Aerocity</i>	Panjang 2.680 meter
		Ruas Jalan Burujul-Sanca	Mendukung Perpres 87 Tahun 2021 tentang Kawasan Rebana dan Jawa Barat Selatan, akses menuju Kawasan Industri <i>Aerocity</i>	Panjang 3.600 meter
		Ruas Jalan Cisumur-Nangerang	Akses menuju Kabupaten Subang dan Kawasan Bendung Sadawarna Kec. Surian, kawasan penghasil vanili terbaik.	Panjang 4.330 meter
		Ruas Jalan Cacaban-Banasbanten	Mendukung Perpres 87 Tahun 2021 tentang Kawasan Rebana dan Jawa Barat Selatan, merupakan kawasan pertanian	Panjang 3.535 meter
2	Rehabilitasi	Ruas Jalan Cigarukgak-Buahdua	Mendukung Perpres 87 Tahun 2021 tentang Kawasan Rebana dan Jawa Barat Selatan, merupakan Kawasan Cincin Tampomas. Merupakan kawasan pertanian terpadu Desa Cikurubuk	
3	Pembangunan rumah sakit	RS Mekarasih Jatigede		

Sumber: Hasil Analisis BAPPPEDA, 2025

3.3.4. Dukungan Program Daerah terhadap Program Prioritas Nasional

RPJMD 2025-2029 Kabupaten Sumedang juga mendukung sejumlah program prioritas nasional yang didasarkan pada RPJMN Tahun 2025-2029. Berikut sejumlah program prioritas nasional yang membutuhkan dukungan pada Pemerintah Kabupaten Sumedang.

1. Makan Bergizi Gratis

Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebutuhan gizi harian masyarakat, terutama di kalangan anak-anak dan ibu, dapat tercukupi dengan baik sesuai dengan standar Angka Kecukupan Gizi (AKG). Program MBG dapat menggerakkan ekonomi lokal dengan melibatkan UMKM, petani, dan peternak dalam rantai pasokannya. Dengan melibatkan pelaku usaha lokal, program ini dapat memberikan dampak positif pada kesejahteraan masyarakat secara lebih luas. Dukungan Kabupaten Sumedang terhadap program ini:

- a. Sektor Ekonomi: mendorong keterlibatan UMKM, petani, dan nelayan dalam rantai pasok. Sehingga, lebih banyak pihak terkait distribusi dan produksi pangan bergizi.
- b. Sektor Kesehatan: mendorong upaya makan bergizi secara teratur kepada kelompok rentan serta keamanan pangan yang dikonsumsi.
- c. Sektor Pendidikan: mendorong partisipasi siswa dalam kegiatan sekolah dan mengurangi angka putus sekolah, yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia.
- d. Sektor Ketahanan Pangan: memperkuat produksi pangan lokal untuk menghasilkan pangan yang berkualitas.
- e. Memfasilitasi terbentuknya dan terselenggaranya kantor satuan pelayanan yang representatif.

2. Sekolah Rakyat

Sekolah Rakyat merupakan inisiatif strategis Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk menjawab tantangan kesenjangan akses pendidikan bagi kelompok rentan dan marjinal. Materi pembelajaran dirancang tidak hanya berisi kemampuan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung (*calistung*), tetapi juga ditambah dengan pendidikan karakter, keterampilan hidup (*life-skill*), serta pengetahuan sosial dan budaya lokal. Sekolah Rakyat merupakan sekolah terintegrasi dari tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Sekolah Rakyat menyelenggarakan pendidikan unggulan yang tidak hanya menekankan aspek akademis tetapi juga mengutamakan pembentukan

karakter dan kepribadian luhur. Sebagai *center of excellence*, Sekolah Rakyat berkomitmen memberikan dampak positif kepada peserta didik dengan menginspirasi dan mengembangkan intelektual. Melalui *excellence of thought* (keunggulan dalam pemikiran) dan *excellence of character* (keunggulan dalam karakter), Sekolah Rakyat diharapkan menghasilkan lulusan yang cerdas intelektualnya, tangguh mentalnya, dan kuat karakternya. Kabupaten Sumedang mendukung sekolah rakyat melalui penyediaan lahan, perizinan, dan penyiapan guru serta tenaga pendidik.

3. Koperasi Merah Putih

Koperasi merah putih merupakan amanat Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang wajib ditindaklanjuti oleh seluruh pemerintah daerah. Dalam Inpres ini disebutkan bahwa akan dilakukan percepatan pembentukan 80.000 koperasi desa/Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia. Untuk Kabupaten Sumedang sendiri akan ada percepatan pembentukan koperasi sebanyak 277 unit, untuk percepatan pembentukan koperasi ini terdapat Satgas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Dalam pendirian koperasi merah putih terdapat 3 model, yaitu: (1). Membangun koperasi baru, (2). Mengembangkan koperasi yang sudah ada, (3). Revitalisasi koperasi yang tidak aktif. Terkait pendanaan untuk percepatan pembentukan koperasi merah putih ini dibebankan pada: APBN, APBD, APBDes, sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dukungan Kabupaten Sumedang dalam pembentukan koperasi merah putih ini adalah:

- a. Menyediakan anggaran untuk bantuan pembuatan akta notaris koperasi;
- b. Melakukan sosialisasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan serta pembinaan dan pengawasan pada tiap desa dalam pelaksanaan pembentukan 277 koperasi desa/kelurahan merah putih; dan
- c. Melaporkan perkembangan pembentukan koperasi desa/kelurahan merah putih kepada Gubernur.

4. Program 3 juta Rumah

Program 3 Juta Rumah merupakan inisiatif strategis nasional dalam sektor perumahan yang diluncurkan untuk menjawab tantangan *backlog* perumahan nasional yang tinggi serta untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah

(MBR). Dalam pelaksanaannya, program ini mengintegrasikan pembangunan rumah tapak dan hunian vertikal secara masif dan berkelanjutan, mencakup pembangunan hunian baru serta perbaikan kualitas rumah tidak layak huni (Rutilahu).

Tujuan utama dari Program 3 Juta Rumah yaitu:

1. Mengurangi backlog kepemilikan rumah di Indonesia secara signifikan.
2. Meningkatkan kualitas hunian masyarakat melalui perbaikan rumah tidak layak huni.
3. Memastikan akses perumahan yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan bagi seluruh kelompok Masyarakat.

Sasaran program 3 juta rumah ini meliputi:

1. Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di wilayah perkotaan dan perdesaan.
2. Pegawai negeri, TNI/Polri, pekerja sektor informal, serta generasi muda (milenial) yang belum memiliki rumah.
3. Daerah dengan kepadatan tinggi dan backlog perumahan yang tinggi, termasuk kawasan kumuh.

Pelaksanaan Program 3 Juta Rumah memiliki sejumlah dampak strategis:

1. Penurunan backlog nasional secara progresif, menuju target ideal ketersediaan hunian.
2. Peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui hunian layak, sehat, dan aman.
3. Penguatan pusat pertumbuhan kota berkelanjutan, melalui integrasi perumahan dengan infrastruktur dasar dan tata ruang.

Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang berkomitmen untuk mendukung Program 3 Juta Rumah melalui kebijakan Pembangunan Rumah untuk masyarakat miskin. Berikut ini beberapa program yang secara langsung mendukung Program 3 Juta Rumah, yaitu:

1. Upaya perbaikan rutilahu sebanyak ± 16.856 unit rumah hingga tahun 2030 meliputi rutilahu di kawasan kumuh kewenangan kabupaten dan diluar kawasan kumuh.
2. Dukungan regulasi dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pembebasan Retribusi dan Percepatan

- Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
3. Pemerintah Daerah akan mendorong pendanaan melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam bergotong royong membangun rumah untuk rakyat.
 4. Pengendalian dan pengawasan perijinan penyelenggaraan perumahan yang sesuai dengan tata ruang yang telah ditetapkan.

3.3.5. Dukungan Program Daerah terhadap Astacita

Sesuai Visinya, Kabupaten Sumedang berkomitmen mendukung visi Indonesia Emas 2045 melalui keterpaduan program dan kebijakan yang sejalan dengan 8 Astacita Pemerintahan Prabowo-Gibran. Dukungan ini diwujudkan dalam berbagai indikatif kebijakan program daerah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.9 Dukungan Program Daerah terhadap Astacita

No.	Asta Cita	Program	Perangkat Daerah Pengampu
1	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Program Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Program Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik
		Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan elalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan dan Peternakan

No.	Asta Cita	Program	Perangkat Daerah Pengampu
		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan dan Peternakan
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Perikanan dan Peternakan
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		Program Pemberdayaan, Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga
4	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z) dan Penyandang Disabilitas	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
		Program Hubungan Industrial	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

No.	Asta Cita	Program	Perangkat Daerah Pengampu
		Program Perlindungan Khusus Anak	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
		Program Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga
		Program Pembinaan Perpustakaan	Dinas Arsip dan Perpustakaan
5	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		Program Pengembangan Ekspor	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

No.	Asta Cita	Program	Perangkat Daerah Pengampu
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
6	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
		Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial
		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Program Penataan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
		Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
7	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik
		Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik
		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi dan Pamong Praja
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran, dan Non Kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga

No.	Asta Cita	Program	Perangkat Daerah Pengampu
		Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Dinas Arsip dan Perpustakaan
		Program Pengelolaan Arsip	Dinas Arsip dan Perpustakaan
		Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sumber: Bappppeda Kabupaten Sumedang, 2025

3.3.6. **Komitmen Daerah dalam Pelaksanaan Program Mendukung SPM**

Pemerintah Kabupaten Sumedang berkomitmen kuat dalam pelaksanaan program pembangunan daerah yang mendukung terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai tanggung jawab konstitusional pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan kebijakan perencanaan dan penganggaran yang berorientasi pada pencapaian target SPM di seluruh urusan wajib pelayanan dasar. Pemerintah Kabupaten Sumedang secara konsisten mengintegrasikan target dan indikator SPM ke dalam dokumen perencanaan daerah, mulai dari RPJMD, RKPD, hingga Renja perangkat daerah.

Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kabupaten Sumedang memastikan sinergi antar-perangkat daerah melalui forum-forum yang dilaksanakan dalam rangka mengkoordinasikan koordinasi SPM, serta memperkuat sistem pemantauan dan evaluasi guna menjamin keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan. Upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga dilaksanakan secara berkelanjutan agar aparatur pelaksana memiliki kemampuan teknis sesuai standar yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Dukungan pendanaan dialokasikan secara proporsional dalam APBD dengan mempertimbangkan kebutuhan pemenuhan setiap indikator SPM. Pemerintah daerah juga berkomitmen untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya melalui pendekatan berbasis hasil (*performance-based budgeting*).

Melalui langkah-langkah tersebut, Pemerintah Kabupaten Sumedang menegaskan tekadnya untuk mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas, merata, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat, sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan amanat peraturan perundang-undangan.

Pada tabel berikut, dijabarkan berbagai program daerah yang dilaksanakan dalam mendukung kegiatan SPM, dan penganggarannya dijabarkan secara khusus pada Tabel 4.3 pada pembahasan bab berikutnya.

Tabel 3.10 Dukungan Program Daerah terhadap Standar Pelayanan Minimal

No.	Perangkat Daerah	Program SPM	Keterangan
1	Dinas Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	
2	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	
4	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Program Pengembangan Perumahan	
		Program Kawasan Permukiman	
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	
5	Satuan Polisi Pamong Praja	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penanggulangan Bencana	
8	Dinas Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	
		Program Penanganan Bencana	

Sumber: Bapppeda Kabupaten Sumedang, 2025

BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA

PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Rencana program perangkat daerah dalam RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 yang terdiri dari program pembangunan daerah yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah. Program ini kemudian diimplementasikan oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya masing-masing, dengan memastikan bahwa pelaksanaannya berkontribusi terhadap pencapaian visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah.

Program perangkat daerah disusun sesuai dengan susunan perangkat daerah yang tercantum Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2026 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang. Program perangkat daerah disusun berdasarkan urusan yang meliputi urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi 6 (enam) urusan, urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi 18 (delapan belas) urusan; unsur urusan pemerintahan pilihan meliputi 7 (tujuh) urusan; unsur pendukung urusan pemerintahan meliputi 2 (dua) unsur; unsur penunjang urusan pemerintahan 4 (empat) unsur; unsur pengawasan urusan pemerintahan 1 (satu) unsur; unsur kewilayahan 1 (satu) unsur yang meliputi 26 kecamatan; dan unsur pemerintahan umum 1 (satu) unsur dan non urusan perangkat daerah.

4.1. Program Perangkat Daerah

Program, indikator dan target kinerja dan pagu indikatif perangkat daerah telah disusun dalam mencapai kinerja pembangunan daerah untuk periode tahun 2025-2030. Program perangkat daerah merupakan kumpulan seluruh program yang terdapat dalam Bab IV Renstra perangkat daerah termasuk program penunjang urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawab sekretariat perangkat daerah. Dalam upaya menjaga kesinambungan perencanaan daerah pada tahun 2030 yang merupakan tahun transisi menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD Tahun 2030 yang pada pelaksanaannya

akan menjadi tanggung jawab Kepala Daerah periode tahun 2030-2034. Adapun program perangkat daerah dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Program Perangkat Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					735.311.061.417,00		769.557.953.448,43		787.138.293.579,74		805.519.390.815,23		824.171.748.942,60	
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					509.607.075.457,00		522.612.643.892,43		536.532.831.923,74		550.887.761.849,23		565.111.335.935,60	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	90,69	91	91,5	509.607.075.457,00	92	522.612.643.892,43	92,5	536.532.831.923,74	93	550.887.761.849,23	93,5	565.111.335.935,60	1.01.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Pendidikan
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					225.003.985.960,00		245.955.309.556,00		249.516.461.656,00		253.433.728.966,00		257.742.723.007,00	
Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Kesetaraan (%)	59,61	59,63	59,69	225.003.985.960,00	59,81	245.955.309.556,00	59,89	249.516.461.656,00	59,97	253.433.728.966,00	60,09	257.742.723.007,00	1.01.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Pendidikan
	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan PAUD (%)	91,40	91,42	91,48		91,6		91,68		91,7		91,76		1.01.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Pendidikan
	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan SD (%)	97,31	97,33	97,39		97,51		97,59		97,61		97,67		1.01.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Pendidikan
	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan SMP (%)	91,55	91,57	91,63		91,75		91,83		91,85		91,91		1.01.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Pendidikan
1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					500.000.000,00		550.000.000,00		605.000.000,00		665.500.000,00		732.050.000,00	
Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan lokal (%)	-	-	25	500.000.000,00	50	550.000.000,00	70	605.000.000,00	100	665.500.000,00	100	732.050.000,00	1.01.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Pendidikan
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					200.000.000,00		440.000.000,00		484.000.000,00		532.400.000,00		585.640.000,00	
Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (%)	85,53	88,83	92,14	200.000.000,00	95,44	440.000.000,00	98,74	484.000.000,00	100	532.400.000,00	100	585.640.000,00	1.01.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Pendidikan
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					665.767.570.035,00		700.143.406.459,00		737.964.608.415,00		778.505.148.673,00		821.229.127.526,00	
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					499.701.186.033,00		531.647.022.457,00		565.798.224.413,00		602.468.764.671,00		642.292.743.524,00	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	90,15	90,52	91	238.443.714.300,00	91,24	257.295.177.136,00	91,63	277.728.786.826,00	91,87	299.995.855.205,00	92	324.336.188.585,00	1.02.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	90,15	90,52	91	261.257.471.733,00	91,24	274.351.845.321,00	91,63	288.069.437.587,00	91,87	302.472.909.466,00	92	317.956.554.939,00	1.02.0.00.0.00.01.00 01 - Rumah Sakit Umum Daerah Umar Wirahadikusumah
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	90,15	90,52	91	238.443.714.300,00	91,24	257.295.177.136,00	91,63	277.728.786.826,00	91,87	299.995.855.205,00	92	324.336.188.585,00	1.02.0.00.0.00.01.00 02 - Puskesmas Jatinangor
	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	90,15	90,52	91		91,24		91,63		91,87		92		1.02.0.00.0.00.01.00 03 - Puskesmas Cimanggung
	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	90,15	90,52	91		91,24		91,63		91,87		92		1.02.0.00.0.00.01.00 04 - Puskesmas Tanjungsari
	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	90,15	90,52	91		91,24		91,63		91,87		92		1.02.0.00.0.00.01.00 05 - Puskesmas Margajaya
	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	90,15	90,52	91		91,24		91,63		91,87		92		1.02.0.00.0.00.01.00 06 - Puskesmas Sukasari
	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	90,15	90,52	91		91,24		91,63		91,67		92		1.02.0.00.0.00.01.00 07 - Puskesmas Haurngombong
	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	90,15	90,52	91		91,24		91,63		91,87		92		1.02.0.00.0.00.01.00 08 - Puskesmas Pamulihan
	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	90,15	90,52	91		91,24		91,63		91,87		92		1.02.0.00.0.00.01.00 09 - Puskesmas Rancakalong
	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	90,15	90,52	91		91,24		91,63		91,87		92		1.02.0.00.0.00.01.00 10 - Puskesmas Sumedang Selatan
	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	90,15	90,52	91		91,24		91,63		91,87		92		1.02.0.00.0.00.01.00 11 - Puskesmas Sukagalih
	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	90,15	90,52	91		91,24		91,63		91,87		92		1.02.0.00.0.00.01.00 12 - Puskesmas Kotakaler
	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	90,15	90,52	91		91,24		91,63		91,87		92		1.02.0.00.0.00.01.00 13 - Puskesmas Situ
	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	90,15	90,52	91		91,24		91,63		91,87		92		1.02.0.00.0.00.01.00 14 - Puskesmas Ganeas
	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	90,15	90,52	91		91,24		91,63		91,87		92		1.02.0.00.0.00.01.00 15 - Puskesmas Situraja
	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	90,15	90,52	91		91,24		91,63		91,87		92		1.02.0.00.0.00.01.00 16 - Puskesmas Cisitu
	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	90,15	90,52	91		91,24		91,63		91,87		92		1.02.0.00.0.00.01.00 17 - Puskesmas Darmaraja
	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	90,15	90,52	91		91,24		91,63		91,87		92		1.02.0.00.0.00.01.00 18 - Puskesmas Cibugel
	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	90,15	90,52	91		91,24		91,63		91,87		92		1.02.0.00.0.00.01.00 19 - Puskesmas Wado

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	90,15	90,52	91		91,24		91,63		91,87		92		1.02.0.00.0.00.01.00 20 - Puskesmas Jatinunggal
	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	90,15	90,52	91		91,24		91,63		91,87		92		1.02.0.00.0.00.01.00 21 - Puskesmas Jatigede
	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	90,15	90,52	91		91,24		91,63		91,87		92		1.02.0.00.0.00.01.00 22 - Puskesmas Tomo
	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	90,15	90,52	91		91,24		91,63		91,87		92		1.02.0.00.0.00.01.00 23 - Puskesmas Ujungjaya
	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	90,15	90,52	91		91,24		91,63		91,87		92		1.02.0.00.0.00.01.00 24 - Puskesmas Conggeang
	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	90,15	90,52	91		91,24		91,63		91,87		92		1.02.0.00.0.00.01.00 25 - Puskesmas Paséh
	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	90,15	90,52	91		91,24		91,63		91,87		92		1.02.0.00.0.00.01.00 26 - Puskesmas Cimalaka
	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	90,15	90,52	91		91,24		91,63		91,87		92		1.02.0.00.0.00.01.00 27 - Puskesmas Cisarua
	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	90,15	90,52	91		91,24		91,63		91,87		92		1.02.0.00.0.00.01.00 28 - Puskesmas Tanjungkerta
	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	90,15	90,52	91		91,24		91,63		91,87		92		1.02.0.00.0.00.01.00 29 - Puskesmas Sukamantri
	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	90,15	90,52	91		91,24		91,63		91,87		92		1.02.0.00.0.00.01.00 30 - Puskesmas Tanjungmedar
	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	90,15	90,52	91		91,24		91,63		91,87		92		1.02.0.00.0.00.01.00 31 - Puskesmas Buahdua
	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	90,15	90,52	91		91,24		91,63		91,87		92		1.02.0.00.0.00.01.00 32 - Puskesmas Hariang
	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	90,15	90,52	91		91,24		91,63		91,87		92		1.02.0.00.0.00.01.00 33 - Puskesmas Surian
	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	90,15	90,52	91		91,24		91,63		91,87		92		1.02.0.00.0.00.01.00 34 - Puskesmas Cisempur
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					164.255.033.202,00		166.575.033.202,00		169.780.033.202,00		173.275.033.202,00		175.925.033.202,00	
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Jumlah Kematian Balita (Kasus)	202	196	190	146.583.559.851,00	184	147.903.559.851,00	181	150.108.559.851,00	178	152.603.559.851,00	173	154.253.559.851,00	1.02.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kesehatan
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penyakit menular (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penyakit tidak menular (%)	94,88	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kesehatan
	Jumlah Kasus Kematian Ibu per Tahun (Kasus)	21	21,00	20,00		19,00		18,00		17,00		16,00		1.02.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kesehatan
	Persentase Fasilitas Layanan Kesehatan yang sesuai standar (%)	61	64	67		70		73		76		79		1.02.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kesehatan
	Jumlah Kasus Kematian Ibu per Tahun (Kasus)	21	21,00	20,00		19,00		18,00		17,00		16,00		1.02.0.00.0.00.01.00 02 - Puskesmas Jatinangor
	Jumlah Kematian Balita (Kasus)	202	196	190		184		181		178		173		1.02.0.00.0.00.01.00 02 - Puskesmas Jatinangor
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penyakit menular (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.00 02 - Puskesmas Jatinangor
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penyakit tidak menular (%)	94,88	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.00 02 - Puskesmas Jatinangor
	Persentase Fasilitas Layanan Kesehatan yang sesuai standar (%)	61	64	67		70		73		76		79		1.02.0.00.0.00.01.00 02 - Puskesmas Jatinangor
	Jumlah Kasus Kematian Ibu per Tahun (Kasus)	21	21,00	20,00		19,00		18,00		17,00		16,00		1.02.0.00.0.00.01.00 03 - Puskesmas Cimanggung
	Jumlah Kematian Balita (Kasus)	202	196	190		184		181		178		173		1.02.0.00.0.00.01.00 03 - Puskesmas Cimanggung
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penyakit menular (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.00 03 - Puskesmas Cimanggung
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penyakit tidak menular (%)	94,88	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.00 03 - Puskesmas Cimanggung
	Persentase Fasilitas Layanan Kesehatan yang sesuai standar (%)	61	64	67		70		73		76		79		1.02.0.00.0.00.01.00 03 - Puskesmas Cimanggung
	Jumlah Kasus Kematian Ibu per Tahun (Kasus)	21	21,00	20,00		19,00		18,00		17,00		16,00		1.02.0.00.0.00.01.00 04 - Puskesmas Tanjungsari
	Jumlah Kematian Balita (Kasus)	202	196	190		184		181		178		173		1.02.0.00.0.00.01.00 04 - Puskesmas Tanjungsari
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penyakit menular (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.00 04 - Puskesmas Tanjungsari
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penyakit tidak menular (%)	94,88	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.00 04 - Puskesmas Tanjungsari
	Persentase Fasilitas Layanan Kesehatan yang sesuai standar (%)	61	64	67		70		73		76		79		1.02.0.00.0.00.01.00 04 - Puskesmas Tanjungsari
	Jumlah Kasus Kematian Ibu per Tahun (Kasus)	21	21,00	20,00		19,00		18,00		17,00		16,00		1.02.0.00.0.00.01.00 05 - Puskesmas Margajaya

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Kematian Balita (Kasus)	202	196	190		184		181		178		173		1.02.0.00.0.00.01.00 05 - Puskesmas Margajaya
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penyakit menular (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.00 05 - Puskesmas Margajaya
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penyakit tidak menular (%)	94,88	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.00 05 - Puskesmas Margajaya
	Persentase Fasilitas Layanan Kesehatan yang sesuai standar (%)	61	64	67		70		73		76		79		1.02.0.00.0.00.01.00 05 - Puskesmas Margajaya
	Jumlah Kasus Kematian Ibu per Tahun (Kasus)	21	21,00	20,00		19,00		18,00		17,00		16,00		1.02.0.00.0.00.01.00 06 - Puskesmas Sukasari
	Jumlah Kematian Balita (Kasus)	202	196	190		184		181		178		173		1.02.0.00.0.00.01.00 06 - Puskesmas Sukasari
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penyakit menular (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.00 06 - Puskesmas Sukasari
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penyakit tidak menular (%)	94,88	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.00 06 - Puskesmas Sukasari
	Persentase Fasilitas Layanan Kesehatan yang sesuai standar (%)	61	64	67		70		73		76		79		1.02.0.00.0.00.01.00 06 - Puskesmas Sukasari
	Jumlah Kasus Kematian Ibu per Tahun (Kasus)	21	21,00	20,00		19,00		18,00		17,00		16,00		1.02.0.00.0.00.01.00 07 - Puskesmas Haurngombong
	Jumlah Kematian Balita (Kasus)	202	196	190		184		181		178		173		1.02.0.00.0.00.01.00 07 - Puskesmas Haurngombong
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penyakit menular (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.00 07 - Puskesmas Haurngombong
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penyakit tidak menular (%)	94,88	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.00 07 - Puskesmas Haurngombong
	Persentase Fasilitas Layanan Kesehatan yang sesuai standar (%)	61	64	67		70		73		76		79		1.02.0.00.0.00.01.00 07 - Puskesmas Haurngombong
	Jumlah Kasus Kematian Ibu per Tahun (Kasus)	21	21,00	20,00		19,00		18,00		17,00		16,00		1.02.0.00.0.00.01.00 08 - Puskesmas Pamulihan
	Jumlah Kematian Balita (Kasus)	202	196	190		184		181		178		173		1.02.0.00.0.00.01.00 08 - Puskesmas Pamulihan
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penyakit menular (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.00 08 - Puskesmas Pamulihan
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penyakit tidak menular (%)	94,88	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.00 08 - Puskesmas Pamulihan
	Persentase Fasilitas Layanan Kesehatan yang sesuai standar (%)	61	64	67		70		73		76		79		1.02.0.00.0.00.01.00 08 - Puskesmas Pamulihan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Kasus Kematian Ibu per Tahun (Kasus)	21	21,00	20,00		19,00		18,00		17,00		16,00		1.02.0.00.0.00.01.00 09 - Puskesmas Rancakalong
	Jumlah Kematian Balita (Kasus)	202	196	190		184		181		178		173		1.02.0.00.0.00.01.00 09 - Puskesmas Rancakalong
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penyakit menular (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.00 09 - Puskesmas Rancakalong
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penyakit tidak menular (%)	94,88	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.00 09 - Puskesmas Rancakalong
	Persentase Fasilitas Layanan Kesehatan yang sesuai standar (%)	61	64	67		70		73		76		79		1.02.0.00.0.00.01.00 09 - Puskesmas Rancakalong
	Jumlah Kematian Balita (Kasus)	202	196	190		184		181		178		173		1.02.0.00.0.00.01.00 10 - Puskesmas Sumedang Selatan
	Jumlah Kasus Kematian Ibu per Tahun (Kasus)	21	21,00	20,00		19,00		18,00		17,00		16,00		1.02.0.00.0.00.01.00 10 - Puskesmas Sumedang Selatan
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penyakit menular (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.00 10 - Puskesmas Sumedang Selatan
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penyakit tidak menular (%)	94,88	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.00 10 - Puskesmas Sumedang Selatan
	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang sesuai standar (Persentase)	61	64	67		70		73		76		79		1.02.0.00.0.00.01.00 10 - Puskesmas Sumedang Selatan
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penyakit menular (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.00 11 - Puskesmas Sukagalih
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penyakit tidak menular (%)	94,88	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.00 11 - Puskesmas Sukagalih
	Jumlah Kasus Kematian Ibu per Tahun (Kasus)	21	21,00	20,00		19,00		18,00		17,00		16,00		1.02.0.00.0.00.01.00 11 - Puskesmas Sukagalih
	Jumlah Kematian Balita (Kasus)	202	196	190		184		181		178		173		1.02.0.00.0.00.01.00 11 - Puskesmas Sukagalih
	Persentase Fasilitas Layanan Kesehatan yang sesuai standar (%)	61	64	67		70		73		76		79		1.02.0.00.0.00.01.00 11 - Puskesmas Sukagalih
	Jumlah Kasus Kematian Ibu per Tahun (Kasus)	21	21,00	20,00		19,00		18,00		17,00		16,00		1.02.0.00.0.00.01.00 12 - Puskesmas Kotakaler
	Jumlah Kematian Balita (Kasus)	202	196	190		184		181		178		173		1.02.0.00.0.00.01.00 12 - Puskesmas Kotakaler
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penyakit menular (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.00 12 - Puskesmas Kotakaler

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penyakit tidak menular (%)	94,88	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.00 12 - Puskesmas Kotakaler
	Persentase Fasilitas Layanan Kesehatan yang sesuai standar (%)	61	64	67		70		73		76		79		1.02.0.00.0.00.01.00 12 - Puskesmas Kotakaler
	Jumlah Kematian Balita (Kasus)	202	196	190		184		181		178		173		1.02.0.00.0.00.01.00 13 - Puskesmas Situ
	Jumlah Kasus Kematian Ibu per Tahun (Kasus)	21	21,00	20,00		19,00		18,00		17,00		16,00		1.02.0.00.0.00.01.00 13 - Puskesmas Situ
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penyakit menular (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.00 13 - Puskesmas Situ
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penyakit tidak menular (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.00 13 - Puskesmas Situ
	Persentase Fasilitas Layanan Kesehatan yang sesuai standar (%)	61	61	67		70		73		76		79		1.02.0.00.0.00.01.00 13 - Puskesmas Situ
	Jumlah Kasus Kematian Ibu per Tahun (Kasus)	21	21,00	20,00		19,00		18,00		17,00		16,00		1.02.0.00.0.00.01.00 14 - Puskesmas Ganeas
	Jumlah Kematian Balita (Kasus)	202	196	190		184		181		178		173		1.02.0.00.0.00.01.00 14 - Puskesmas Ganeas
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penyakit menular (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.00 14 - Puskesmas Ganeas
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penyakit tidak menular (%)	94,88	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.00 14 - Puskesmas Ganeas
	Persentase Fasilitas Layanan Kesehatan yang sesuai standar (%)	61	64	67		70		73		76		79		1.02.0.00.0.00.01.00 14 - Puskesmas Ganeas
	Jumlah Kematian Balita (Kasus)	202	196	190		184		181		178		173		1.02.0.00.0.00.01.00 15 - Puskesmas Situraja
	Jumlah Kasus Kematian Ibu per Tahun (Kasus)	21	21,00	20,00		19,00		18,00		17,00		16,00		1.02.0.00.0.00.01.00 15 - Puskesmas Situraja
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penyakit menular (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.00 15 - Puskesmas Situraja
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penyakit tidak menular (%)	94,88	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.00 15 - Puskesmas Situraja
	Persentase Fasilitas Layanan Kesehatan yang sesuai standar (%)	61	64	67		70		73		76		79		1.02.0.00.0.00.01.00 15 - Puskesmas Situraja
	Jumlah Kasus Kematian Ibu per Tahun (Kasus)	21	21,00	20,00		19,00		18,00		17,00		16,00		1.02.0.00.0.00.01.00 16 - Puskesmas Cisitu
	Jumlah Kematian Balita (Kasus)	202	196	190		184		181		178		173		1.02.0.00.0.00.01.00 16 - Puskesmas Cisitu

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penyakit menular (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.00 16 - Puskesmas Cisitu
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penyakit tidak menular (%)	94,88	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.00 16 - Puskesmas Cisitu
	Persentase Fasilitas Layanan Kesehatan yang sesuai standar (%)	61	64	67		70		73		76		79		1.02.0.00.0.00.01.00 16 - Puskesmas Cisitu
	Jumlah Kasus Kematian Ibu per Tahun (Kasus)	21	21,00	20,00		19,00		18,00		17,00		16,00		1.02.0.00.0.00.01.00 17 - Puskesmas Darmaraja
	Jumlah Kematian Balita (Kasus)	202	196	190		184		181		178		173		1.02.0.00.0.00.01.00 17 - Puskesmas Darmaraja
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penyakit menular (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.00 17 - Puskesmas Darmaraja
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penyakit tidak menular (%)	94,88	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.00 17 - Puskesmas Darmaraja
	Persentase Fasilitas Layanan Kesehatan yang sesuai standar (%)	61	64	67		70		73		76		79		1.02.0.00.0.00.01.00 17 - Puskesmas Darmaraja
	Jumlah Kasus Kematian Ibu per Tahun (Kasus)	21	21,00	20,00		19,00		18,00		17,00		16,00		1.02.0.00.0.00.01.00 18 - Puskesmas Cibugel
	Jumlah Kematian Balita (Kasus)	202	196	190		184		181		178		173		1.02.0.00.0.00.01.00 18 - Puskesmas Cibugel
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penyakit menular (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.00 18 - Puskesmas Cibugel
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penyakit tidak menular (%)	9,88	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.00 18 - Puskesmas Cibugel
	Persentase Fasilitas Layanan Kesehatan yang sesuai standar (%)	61	64	64		67		70		73		79		1.02.0.00.0.00.01.00 18 - Puskesmas Cibugel
	Jumlah Kasus Kematian Ibu per Tahun (Kasus)	21	21,00	20,00		19,00		18,00		17,00		16,00		1.02.0.00.0.00.01.00 19 - Puskesmas Wado
	Jumlah Kematian Balita (Kasus)	202	196	190		184		181		178		173		1.02.0.00.0.00.01.00 19 - Puskesmas Wado
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penyakit menular (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.00 19 - Puskesmas Wado
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penyakit tidak menular (%)	94,88	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.00 19 - Puskesmas Wado
	Persentase Fasilitas Layanan Kesehatan yang sesuai standar (%)	61	64	67		70		73		76		79		1.02.0.00.0.00.01.00 19 - Puskesmas Wado
	Jumlah Kasus Kematian Ibu per Tahun (Kasus)	21	21,00	20,00		19,00		18,00		17,00		16,00		1.02.0.00.0.00.01.00 20 - Puskesmas Jatinunggal

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Kematian Balita (Kasus)	202	196	190		184		181		178		173		1.02.0.00.0.00.01.00 20 - Puskesmas Jatinunggal
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penyakit menular (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.00 20 - Puskesmas Jatinunggal
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penyakit tidak menular (%)	94,88	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.00 20 - Puskesmas Jatinunggal
	Persentase Fasilitas Layanan Kesehatan yang sesuai standar (%)	61	64	67		70		73		76		79		1.02.0.00.0.00.01.00 20 - Puskesmas Jatinunggal
	Jumlah Kasus Kematian Ibu per Tahun (Kasus)	21	21,00	20,00		19,00		18,00		17,00		16,00		1.02.0.00.0.00.01.00 21 - Puskesmas Jatigede
	Jumlah Kematian Balita (Kasus)	202	196	190		184		181		178		173		1.02.0.00.0.00.01.00 21 - Puskesmas Jatigede
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penyakit menular (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.00 21 - Puskesmas Jatigede
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penyakit tidak menular (%)	94,88	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.00 21 - Puskesmas Jatigede
	Persentase Fasilitas Layanan Kesehatan yang sesuai standar (%)	61	64	67		70		73		76		79		1.02.0.00.0.00.01.00 21 - Puskesmas Jatigede
	Jumlah Kematian Balita (Kasus)	202	196	190		184		181		178		173		1.02.0.00.0.00.01.00 22 - Puskesmas Tomo
	Jumlah Kematian Ibu (Kasus)	21	21	20		19		18		17		16		1.02.0.00.0.00.01.00 22 - Puskesmas Tomo
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penyakit menular (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.00 22 - Puskesmas Tomo
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penyakit tidak menular (%)	94,88	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.00 22 - Puskesmas Tomo
	Persentase Fasilitas Layanan Kesehatan yang sesuai standar (%)	61	64	67		70		73		76		79		1.02.0.00.0.00.01.00 22 - Puskesmas Tomo
	Jumlah Kasus Kematian Ibu per Tahun (Kasus)	21	21,00	20,00		19,00		18,00		17,00		16,00		1.02.0.00.0.00.01.00 23 - Puskesmas Ujungjaya
	Jumlah Kematian Balita (Kasus)	202	196	190		184		181		178		173		1.02.0.00.0.00.01.00 23 - Puskesmas Ujungjaya
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penyakit menular (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.00 23 - Puskesmas Ujungjaya
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penyakit tidak menular (%)	94,88	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.00 23 - Puskesmas Ujungjaya
	Persentase Fasilitas Layanan Kesehatan yang sesuai standar (%)	61	64	67		70		73		76		79		1.02.0.00.0.00.01.00 23 - Puskesmas Ujungjaya

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Kasus Kematian Ibu per Tahun (Kasus)	21	21,00	20,00		19,00		18,00		17,00		16,00		1.02.0.00.0.00.01.00 24 - Puskesmas Conggeang
	Jumlah Kematian Balita (Kasus)	202	196	190		184		181		178		173		1.02.0.00.0.00.01.00 24 - Puskesmas Conggeang
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penyakit menular (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.00 24 - Puskesmas Conggeang
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penyakit tidak menular (%)	94,88	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.00 24 - Puskesmas Conggeang
	Persentase Fasilitas Layanan Kesehatan yang sesuai standar (%)	61	64	67		70		73		76		79		1.02.0.00.0.00.01.00 24 - Puskesmas Conggeang
	Jumlah Kasus Kematian Ibu per Tahun (Kasus)	21	21,00	20,00		19,00		18,00		17,00		16,00		1.02.0.00.0.00.01.00 25 - Puskesmas Paseh
	Jumlah Kematian Balita (Kasus)	202	196	190		184		181		178		173		1.02.0.00.0.00.01.00 25 - Puskesmas Paseh
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penyakit menular (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.00 25 - Puskesmas Paseh
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penyakit tidak menular (%)	94,88	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.00 25 - Puskesmas Paseh
	Persentase Fasilitas Layanan Kesehatan yang sesuai standar (%)	61	64	67		70		73		76		79		1.02.0.00.0.00.01.00 25 - Puskesmas Paseh
	Jumlah Kasus Kematian Ibu per Tahun (Kasus)	21	21,00	20,00		19,00		18,00		17,00		16,00		1.02.0.00.0.00.01.00 26 - Puskesmas Cimalaka
	Jumlah Kematian Balita (Kasus)	202	196	190		184		181		178		173		1.02.0.00.0.00.01.00 26 - Puskesmas Cimalaka
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penyakit menular (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.00 26 - Puskesmas Cimalaka
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penyakit tidak menular (%)	94,88	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.00 26 - Puskesmas Cimalaka
	Persentase Fasilitas Layanan Kesehatan yang sesuai standar (%)	61	64	67		70		73		76		79		1.02.0.00.0.00.01.00 26 - Puskesmas Cimalaka
	Jumlah Kematian Balita (Kasus)	202	196	190		184		181		178		173		1.02.0.00.0.00.01.00 27 - Puskesmas Cisarua
	Jumlah Kasus Kematian Ibu per Tahun (Kasus)	21	21,00	20,00		19,00		18,00		17,00		16,00		1.02.0.00.0.00.01.00 27 - Puskesmas Cisarua
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penyakit menular (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.00 27 - Puskesmas Cisarua
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penyakit tidak menular (%)	94,88	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.00 27 - Puskesmas Cisarua

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Fasilitas Layanan Kesehatan yang sesuai standar (%)	61	64	67		70		73		76		79		1.02.0.00.0.00.01.00 27 - Puskesmas Cisarua
	Jumlah Kematian Balita (Kasus)	202	196	190		184		181		178		173		1.02.0.00.0.00.01.00 28 - Puskesmas Tanjungkerta
	Jumlah Kasus Kematian Ibu per Tahun (Kasus)	21	21,00	20,00		19,00		18,00		17,00		16,00		1.02.0.00.0.00.01.00 28 - Puskesmas Tanjungkerta
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penyakit menular (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.00 28 - Puskesmas Tanjungkerta
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penyakit tidak menular (%)	94,88	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.00 28 - Puskesmas Tanjungkerta
	Persentase Fasilitas Layanan Kesehatan yang sesuai standar (%)	61	64	67		70		73		76		79		1.02.0.00.0.00.01.00 28 - Puskesmas Tanjungkerta
	Jumlah Kasus Kematian Ibu per Tahun (Kasus)	21	21,00	20,00		19,00		18,00		17,00		16,00		1.02.0.00.0.00.01.00 29 - Puskesmas Sukamantri
	Jumlah Kematian Balita (Kasus)	202	196	190		184		181		178		173		1.02.0.00.0.00.01.00 29 - Puskesmas Sukamantri
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penyakit menular (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.00 29 - Puskesmas Sukamantri
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penyakit tidak menular (%)	94,88	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.00 29 - Puskesmas Sukamantri
	Persentase Fasilitas Layanan Kesehatan yang sesuai standar (%)	61	64	67		70		73		76		79		1.02.0.00.0.00.01.00 29 - Puskesmas Sukamantri
	Jumlah Kasus Kematian Ibu per Tahun (Kasus)	21	21,00	20,00		19,00		18,00		17,00		16,00		1.02.0.00.0.00.01.00 30 - Puskesmas Tanjungmedar
	Jumlah Kematian Balita (Kasus)	202	196	190		184		181		178		173		1.02.0.00.0.00.01.00 30 - Puskesmas Tanjungmedar
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penyakit menular (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.00 30 - Puskesmas Tanjungmedar
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penyakit tidak menular (%)	94,88	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.00 30 - Puskesmas Tanjungmedar
	Persentase Fasilitas Layanan Kesehatan yang sesuai standar (%)	61	64	67		70		73		76		79		1.02.0.00.0.00.01.00 30 - Puskesmas Tanjungmedar
	Jumlah Kasus Kematian Ibu per Tahun (Kasus)	21	21,00	20,00		19,00		18,00		17,00		16,00		1.02.0.00.0.00.01.00 31 - Puskesmas Buahdua
	Jumlah Kematian Balita (Kasus)	202	196	190		184		181		178		173		1.02.0.00.0.00.01.00 31 - Puskesmas Buahdua
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penyakit menular (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.00 31 - Puskesmas Buahdua

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penyakit tidak menular (%)	94,88	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.00 31 - Puskesmas Buahdua
	Persentase Fasilitas Layanan Kesehatan yang sesuai standar (%)	61	64	67		70		73		76		79		1.02.0.00.0.00.01.00 31 - Puskesmas Buahdua
	Jumlah Kasus Kematian Ibu per Tahun (Kasus)	21	21,00	20,00		19,00		18,00		17,00		16,00		1.02.0.00.0.00.01.00 32 - Puskesmas Hariang
	Jumlah Kematian Balita (Kasus)	202	196	190		184		181		178		173		1.02.0.00.0.00.01.00 32 - Puskesmas Hariang
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penyakit menular (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.00 32 - Puskesmas Hariang
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penyakit tidak menular (%)	94,88	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.00 32 - Puskesmas Hariang
	Persentase Fasilitas Layanan Kesehatan yang sesuai standar (%)	61	64	67		70		73		76		79		1.02.0.00.0.00.01.00 32 - Puskesmas Hariang
	Jumlah Kasus Kematian Ibu per Tahun (Kasus)	21	21,00	20,00		19,00		18,00		17,00		16,00		1.02.0.00.0.00.01.00 33 - Puskesmas Surian
	Jumlah Kematian Balita (Kasus)	202	196	190		184		181		178		173		1.02.0.00.0.00.01.00 33 - Puskesmas Surian
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penyakit menular (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.00 33 - Puskesmas Surian
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penyakit tidak menular (%)	94,88	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.00 33 - Puskesmas Surian
	Persentase Fasilitas Layanan Kesehatan yang sesuai standar (%)	61	64	67		70		73		76		79		1.02.0.00.0.00.01.00 33 - Puskesmas Surian
	Jumlah Kasus Kematian Ibu per Tahun (Kasus)	21	21,00	20,00		19,00		18,00		17,00		16,00		1.02.0.00.0.00.01.00 34 - Puskesmas Cisempur
	Jumlah Kematian Balita (Kasus)	202	196	190		184		181		178		173		1.02.0.00.0.00.01.00 34 - Puskesmas Cisempur
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penyakit menular (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.00 34 - Puskesmas Cisempur
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penyakit tidak menular (%)	94,88	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.00 34 - Puskesmas Cisempur
	Persentase Fasilitas Layanan Kesehatan yang sesuai standar (%)	61	64	67		70		73		76		79		1.02.0.00.0.00.01.00 34 - Puskesmas Cisempur
	Jumlah Kasus Kematian Ibu per Tahun (Kasus)	21	21,00	20,00		19,00		18,00		17,00		16,00		1.02.0.00.0.00.01.00 35 - Puskesmas Sawahdadap
	Jumlah Kematian Balita (Kasus)	202	196	190		184		181		178		173		1.02.0.00.0.00.01.00 35 - Puskesmas Sawahdadap

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penyakit menular (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.00 35 - Puskesmas Sawahdadap
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penyakit tidak menular (%)	94,88	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.00 35 - Puskesmas Sawahdadap
	Persentase Fasilitas Layanan Kesehatan yang sesuai standar (%)	61	64	67		70		73		76		79		1.02.0.00.0.00.01.00 35 - Puskesmas Sawahdadap
	Jumlah Kasus Kematian Ibu per Tahun (Kasus)	21	21,00	20,00		19,00		18,00		17,00		16,00		1.02.0.00.0.00.01.00 36 - Puskesmas Padasuka
	Jumlah Kematian Balita (Kasus)	202	196	190		184		181		178		173		1.02.0.00.0.00.01.00 36 - Puskesmas Padasuka
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penyakit menular (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.00 36 - Puskesmas Padasuka
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penyakit tidak menular (%)	94,88	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.00 36 - Puskesmas Padasuka
	Persentase Fasilitas Layanan Kesehatan yang sesuai standar (%)	61	64	67		70		73		76		79		1.02.0.00.0.00.01.00 36 - Puskesmas Padasuka
Meningkatnya kualitas pelayanan Rumah Sakit yang sesuai standar	Cakupan Pelayanan Kesehatan RujukanA yang sesuai standar (Nilai)	94,17	94,17	94,17	17.671.473.351,00	94,17	18.671.473.351,00	95,00	19.671.473.351,00	95,00	20.671.473.351,00	95,00	21.671.473.351,00	1.02.0.00.0.00.01.00 01 - Rumah Sakit Umum Daerah Umar Wirahadikusumah
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					400.000.000,00		450.000.000,00		600.000.000,00		750.000.000,00		850.000.000,00	
Meningkatnya Mutu dan Distribusi Tenaga Kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetisi SDM Bidang Kesehatan (%)	88	89	89	400.000.000,00	89,13	450.000.000,00	89,75	600.000.000,00	90	750.000.000,00	90,2	850.000.000,00	1.02.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kesehatan
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					400.000.000,00		410.000.000,00		625.000.000,00		675.000.000,00		750.000.000,00	
Meningkatnya Kualitas dan Distribusi Sediaan Farmasi Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman (%)	87	87,54	88	400.000.000,00	88,54	410.000.000,00	88,87	625.000.000,00	89	675.000.000,00	89,33	750.000.000,00	1.02.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kesehatan
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					1.011.350.800,00		1.061.350.800,00		1.161.350.800,00		1.336.350.800,00		1.411.350.800,00	
Meningkatnya kualitas pemeberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (%)	31	36	39	1.011.350.800,00	43	1.061.350.800,00	45	1.161.350.800,00	48	1.336.350.800,00	50	1.411.350.800,00	1.02.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (%)	31	36	39		43		45		48		50		1.02.0.00.0.00.01.00 02 - Puskesmas Jatinangor
	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (%)	31	36	39		43		45		48		50		1.02.0.00.0.00.01.00 03 - Puskesmas Cimanggung
	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (%)	31	36	39		43		45		48		50		1.02.0.00.0.00.01.00 04 - Puskesmas Tanjungsari
	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (%)	31	36	39		43		45		48		50		1.02.0.00.0.00.01.00 05 - Puskesmas Margajaya
	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (%)	31	36	39		43		45		48		50		1.02.0.00.0.00.01.00 06 - Puskesmas Sukasari
	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (%)	31	36	39		43		45		48		50		1.02.0.00.0.00.01.00 07 - Puskesmas Haurngombong
	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (%)	31	36	39		43		45		48		50		1.02.0.00.0.00.01.00 08 - Puskesmas Pamulihan
	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (%)	31	36	39		43		45		48		50		1.02.0.00.0.00.01.00 09 - Puskesmas Rancakalong
	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (%)	31	36	39		43		45		48		50		1.02.0.00.0.00.01.00 10 - Puskesmas Sumedang Selatan
	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (%)	31	36	39		43		45		48		50		1.02.0.00.0.00.01.00 11 - Puskesmas Sukagalih
	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (%)	31	36	39		43		45		48		50		1.02.0.00.0.00.01.00 12 - Puskesmas Kotakaler
	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (%)	31	35	39		43		45		48		50		1.02.0.00.0.00.01.00 13 - Puskesmas Situ
	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (%)	31	36	39		43		45		48		50		1.02.0.00.0.00.01.00 14 - Puskesmas Ganeas
	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (%)	31	36	39		43		45		48		50		1.02.0.00.0.00.01.00 15 - Puskesmas Situraja
	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (%)	31	36	39		43		45		48		50		1.02.0.00.0.00.01.00 16 - Puskesmas Cisitu
	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (%)	31	36	39		43		45		48		50		1.02.0.00.0.00.01.00 17 - Puskesmas Darmaraja
	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (%)	31	36	39		43		45		48		50		1.02.0.00.0.00.01.00 18 - Puskesmas Cibugel
	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (%)	31	36	39		43		45		48		50		1.02.0.00.0.00.01.00 19 - Puskesmas Wado
	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (%)	31	36	39		43		45		48		50		1.02.0.00.0.00.01.00 20 - Puskesmas Jatinunggal

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (%)	31	36	39		43		45		48		50		1.02.0.00.0.00.01.00 21 - Puskesmas Jatigede
	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (%)	31	36	39		43		45		48		50		1.02.0.00.0.00.01.00 22 - Puskesmas Tomo
	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (%)	31	36	39		43		45		48		50		1.02.0.00.0.00.01.00 23 - Puskesmas Ujungjaya
	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (%)	31	36	39		43		45		48		50		1.02.0.00.0.00.01.00 24 - Puskesmas Conggeang
	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (%)	31	36	39		43		45		48		50		1.02.0.00.0.00.01.00 25 - Puskesmas Paseh
	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (%)	31	36	39		43		45		48		50		1.02.0.00.0.00.01.00 26 - Puskesmas Cimalaka
	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (%)	31	36	39		43		45		48		50		1.02.0.00.0.00.01.00 27 - Puskesmas Cisarua
	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (%)	31	36	39		43		45		48		50		1.02.0.00.0.00.01.00 28 - Puskesmas Tanjungkerta
	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (%)	31	36	39		43		45		48		50		1.02.0.00.0.00.01.00 29 - Puskesmas Sukamantri
	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (%)	31	36	39		43		45		48		50		1.02.0.00.0.00.01.00 30 - Puskesmas Tanjungmedar
	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (%)	31	36	39		43		45		48		50		1.02.0.00.0.00.01.00 31 - Puskesmas Buahdua
	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (%)	31	36	39		43		45		48		50		1.02.0.00.0.00.01.00 32 - Puskesmas Hariang
	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (%)	31	36	39		43		45		48		50		1.02.0.00.0.00.01.00 33 - Puskesmas Surian
	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (%)	31	36	39		43		45		48		50		1.02.0.00.0.00.01.00 34 - Puskesmas Cisempur
	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (%)	31	36	39		43		45		48		50		1.02.0.00.0.00.01.00 35 - Puskesmas Sawahdadap
	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (%)	31	36	39		43		45		48		50		1.02.0.00.0.00.01.00 36 - Puskesmas Padasuka
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					259.673.863.100,00		256.369.645.740,00		280.055.091.188,00		259.948.953.969,00		230.370.509.747,00	
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					25.985.836.000,00		26.508.023.450,00		27.008.424.623,00		28.008.845.855,00		29.509.288.147,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	85,96	86	87	25.985.836.000,00	88	26.508.023.450,00	89	27.008.424.623,00	90	28.008.845.855,00	92	29.509.288.147,00	1.03.0.00.0.00.10.00 00 - Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					17.691.502.600,00		18.191.502.600,00		18.691.502.600,00		19.191.502.600,00		11.000.000.000,00	
Meningkatnya Luas Lahan yang Terairi Jaringan Irigasi	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas (%)	71,4	71,48	71,53	17.691.502.600,00	71,58	18.191.502.600,00	71,64	18.691.502.600,00	71,69	19.191.502.600,00	71,72	11.000.000.000,00	1.03.0.00.0.00.10.00 00 - Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					8.400.000.000,00		8.500.000.000,00		8.600.000.000,00		8.700.000.000,00		8.800.000.000,00	
Meningkatnya pelayanan penyediaan air minum	Persentase Kapasitas yang dapat terlayani melalui SPAM jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan (%)	82,33	82,57	82,58	8.400.000.000,00	82,68	8.500.000.000,00	82,77	8.600.000.000,00	82,86	8.700.000.000,00	82,95	8.800.000.000,00	1.03.0.00.0.00.10.00 00 - Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL					2.765.000.000,00		10.345.000.000,00		31.049.000.000,00		2.440.000.000,00		2.470.000.000,00	
Meningkatnya Kapasitas Fasilitas Pengolahan Sampah	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	2,32	2,63	2,98	2.765.000.000,00	3,38	10.345.000.000,00	8,27	31.049.000.000,00	22,70	2.440.000.000,00	23,96	2.470.000.000,00	2.11.3.28.1.03.12.00 00 - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					6.250.000.000,00		16.350.000.000,00		6.350.000.000,00		6.450.000.000,00		6.550.000.000,00	
Meningkatnya rumah tinggal bersanitasi	Persentase rumah tinggal bersanitasi (diluar kawasan kumuh) (%)	87,08	87,21	87,34	6.250.000.000,00	87,48	16.350.000.000,00	87,61	6.350.000.000,00	87,74	6.450.000.000,00	87,88	6.550.000.000,00	1.03.0.00.0.00.10.00 00 - Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					13.000.000.000,00		5.500.000.000,00		6.500.000.000,00		7.500.000.000,00		8.500.000.000,00	
Meningkatnya Bangunan Gedung (Kecuali Rumah Tinggal Tunggal Dan Rumah Deret Sederhana) Yang Laik Fungsi	Persentase kepatuhan PBG & SLF Kabupaten/Kota (%)	100	100	100	13.000.000.000,00	100	5.500.000.000,00	100	6.500.000.000,00	100	7.500.000.000,00	100	8.500.000.000,00	1.03.0.00.0.00.10.00 00 - Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					38.028.711.000,00		16.400.000.000,00		18.400.000.000,00		20.400.000.000,00		22.400.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas bangunan dan lingkungan yang sesuai standar	Rasio Cakupan Penataan Bangunan dan Lingkungan (kantor pemerintahan) (%)	54,55	59,09	63,64	38.028.711.000,00	68,18	16.400.000.000,00	72,73	18.400.000.000,00	77,27	20.400.000.000,00	81,82	22.400.000.000,00	1.03.0.00.0.00.10.00 00 - Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAA N JALAN					142.462.813.500,00		148.960.119.690,00		157.316.163.965,00		160.643.605.514,00		134.026.221.600,00	
Meningkatnya Struktur Jalan dan Jembatan	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota (%)	87,54	88,17	89,62	142.462.813.500,00	91,09	148.960.119.690,00	92,56	157.316.163.965,00	94,03	160.643.605.514,00	95,38	134.026.221.600,00	1.03.0.00.0.00.10.00 00 - Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					2.275.000.000,00		2.400.000.000,00		2.525.000.000,00		2.600.000.000,00		2.700.000.000,00	
Meningkatnya Jumlah Tenaga terampil konstruksi yang memiliki kompetensi	Peningkatan Jumlah Tenaga Terampil Konstruksi yang Kompeten dalam Pembangunan Infrastruktur (Orang)	111	71	100	2.125.000.000,00	100	2.250.000.000,00	100	2.375.000.000,00	100	2.450.000.000,00	100	2.550.000.000,00	1.03.0.00.0.00.10.00 00 - Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Meningkatnya kapasitas penyedia jasa konstruksi di Kabupaten Sumedang	Persentase penyedia jasa konstruksi yang mendapatkan pembinaan (%)	-	16,67	33,33	150.000.000,00	50	150.000.000,00	66,67	150.000.000,00	83,33	150.000.000,00	100	150.000.000,00	1.03.0.00.0.00.10.00 00 - Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAA N PENATAAN RUANG					2.815.000.000,00		3.215.000.000,00		3.615.000.000,00		4.015.000.000,00		4.415.000.000,00	
Meningkatnya Kualitas RTR	Persentase Kesesuaian Tahapan Penyusunan RTR yang sesuai dengan peraturan (%)	46,20	57,14	64,29	1.950.000.000,00	78,57	2.150.000.000,00	85,71	2.350.000.000,00	100	2.550.000.000,00	100	2.750.000.000,00	1.03.0.00.0.00.10.00 00 - Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Meningkatnya Pelayanan Pemanfaatan Ruang	Persentase Pelayanan Pemanfaatan Ruang yang Diterbitkan (%)	71,91	80	82,50	865.000.000,00	85	1.065.000.000,00	90	1.265.000.000,00	95	1.465.000.000,00	97,50	1.665.000.000,00	1.03.0.00.0.00.10.00 00 - Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					29.153.877.141,00		37.935.650.000,00		40.939.150.000,00		44.069.550.000,00		48.774.300.000,00	
1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					8.998.877.141,00		14.310.650.000,00		16.214.150.000,00		18.244.550.000,00		20.849.300.000,00	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	86,24	86,24	87	8.998.877.141,00	88	14.310.650.000,00	89	16.214.150.000,00	89,5	18.244.550.000,00	90,24	20.849.300.000,00	1.04.2.10.1.03.02.00 00 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					1.955.000.000,00		2.425.000.000,00		2.525.000.000,00		2.625.000.000,00		2.725.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terpenuhinya Rumah Layak Huni Bagi Warga Negara Korban Bencana	Persentase Rumah Korban Bencana yang Tertangani Program Kabupaten/Kota (%)	100	100	100	1.955.000.000,00	100	2.425.000.000,00	100	2.525.000.000,00	100	2.625.000.000,00	100	2.725.000.000,00	1.04.2.10.1.03.02.00 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					3.000.000.000,00		3.000.000.000,00		3.000.000.000,00		3.000.000.000,00		4.000.000.000,00	
Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kewenangan Kabupaten dengan luas dibawah 10 Ha	Persentase Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (%)	-	1,65	20	3.000.000.000,00	40	3.000.000.000,00	60	3.000.000.000,00	80	3.000.000.000,00	100	4.000.000.000,00	1.04.2.10.1.03.02.00 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					4.400.000.000,00		4.400.000.000,00		4.900.000.000,00		5.100.000.000,00		5.600.000.000,00	
Tertatanya Kawasan Permukiman Kewenangan Kabupaten dengan luas dibawah 10 Ha	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani (%)	9,06	9,08	9,39	4.400.000.000,00	9,71	4.400.000.000,00	10,03	4.900.000.000,00	10,34	5.100.000.000,00	10,66	5.600.000.000,00	1.04.2.10.1.03.02.00 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					10.800.000.000,00		13.800.000.000,00		14.300.000.000,00		15.100.000.000,00		15.600.000.000,00	
Meningkatnya penyediaan PSU Perumahan	Persentase Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana Sarana dan Utilitas Umum) (%)	87,03	100	100	4.600.000.000,00	100	6.600.000.000,00	100	6.600.000.000,00	100	6.600.000.000,00	100	6.600.000.000,00	1.04.2.10.1.03.02.00 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Meningkatnya Kualitas Jalan Lingkungan Permukiman	Persentase Jalan Lingkungan Yang Ditangani (Persentase)	-	30	30	6.200.000.000,00	30	7.200.000.000,00	30	7.700.000.000,00	30	8.500.000.000,00	30	9.000.000.000,00	1.04.2.10.1.03.02.00 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					56.154.529.765,00		55.632.135.570,00		59.988.509.127,00		64.294.540.040,00		69.073.894.044,00	
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					36.560.188.665,00		33.451.035.570,00		34.955.839.127,00		36.447.423.040,00		38.088.165.344,00	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	84,44	84,88	85,00	16.133.248.429,00	85,22	16.233.000.000,00	85,66	16.500.000.000,00	86,00	16.600.000.000,00	86,44	16.700.000.000,00	1.05.0.00.0.00.01.00 - Satuan Polisi Pamong Praja

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	84,067	85,32	85,933	6.181.846.336,00	86,767	6.300.000.000,00	87,600	6.500.000.000,00	88,644	6.750.000.000,00	89,417	7.000.000.000,00	1.05.0.00.0.00.04.00 00 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	-	-	67,5	14.245.093.900,00	70	10.918.035.570,00	72,5	11.955.839.127,00	75	13.097.423.040,00	77,5	14.388.165.344,00	1.05.0.00.0.00.02.00 00 - Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					8.193.603.600,00		9.898.400.000,00		11.502.200.000,00		13.157.600.000,00		14.789.760.000,00	
Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persenatse Perda dan Perkada yang Ditegakan (%)	100	100	100	830.000.000,00	100	900.000.000,00	100	1.000.000.000,00	100	1.100.000.000,00	100	1.200.000.000,00	1.05.0.00.0.00.01.00 00 - Satuan Polisi Pamong Praja
Meningkatnya penanganan gangguan ketentrman dan ketertiban umum	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (Persentase)	100	100	100	3.808.003.600,00	100	3.850.000.000,00	100	3.875.000.000,00	100	3.950.000.000,00	100	4.000.000.000,00	1.05.0.00.0.00.01.00 00 - Satuan Polisi Pamong Praja
Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat (%)	100	100	100	3.475.600.000,00	100	4.988.400.000,00	100	6.451.200.000,00	100	7.914.000.000,00	100	9.376.800.000,00	1.05.0.00.0.00.01.00 00 - Satuan Polisi Pamong Praja
Meningkatnya kapasitas SDM PPNS	Jumlah PPNS pada Satpol PP (Orang)	2	2	2	80.000.000,00	4	160.000.000,00	6	176.000.000,00	8	193.600.000,00	10	212.960.000,00	1.05.0.00.0.00.01.00 00 - Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					5.315.000.000,00		5.846.500.000,00		6.431.150.000,00		7.074.265.000,00		7.781.691.500,00	
Meningkatnya Layanan Informasi Rawan Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (%)	100	100	100	350.000.000,00	100	385.000.000,00	100	423.500.000,00	100	465.850.000,00	100	512.435.000,00	1.05.0.00.0.00.04.00 00 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Meningkatnya Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (%)	100	100	100	2.300.000.000,00	100	2.530.000.000,00	100	2.783.000.000,00	100	3.061.300.000,00	100	3.367.430.000,00	1.05.0.00.0.00.04.00 00 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Meningkatnya Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (%)	100	100	100	1.315.000.000,00	100	1.446.500.000,00	100	1.591.150.000,00	100	1.750.265.000,00	100	1.925.291.500,00	1.05.0.00.0.00.04.00 00 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Meningkatnya Kualitas Pendampingan Pasca Bencana	Persentase warga negara Terdampak Bencana Yang Mendapat Pendampingan Pasca Bencana (%)	100	100	100	1.350.000.000,00	100	1.485.000.000,00	100	1.633.500.000,00	100	1.796.850.000,00	100	1.976.535.000,00	1.05.0.00.0.00.04.00 00 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					6.085.737.500,00		6.436.200.000,00		7.099.320.000,00		7.615.252.000,00		8.414.277.200,00	
Meningkatnya Layanan Pencegahan Kebakaran dan Non Kebakaran	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran (Persentase)	100	100	100	4.445.131.700,00	100	4.646.200.000,00	100	5.141.320.000,00	100	5.478.452.000,00	100	6.086.797.200,00	1.05.0.00.0.00.02.00 00 - Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (%)	71,35	100	100	1.640.605.800,00	100	1.790.000.000,00	100	1.958.000.000,00	100	2.136.800.000,00	100	2.327.480.000,00	1.05.0.00.0.00.02.00 00 - Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					13.577.454.520,00		14.352.500.000,00		15.057.500.000,00		15.837.500.000,00		16.897.500.000,00	
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.550.954.520,00		6.750.000.000,00		7.000.000.000,00		7.250.000.000,00		7.500.000.000,00	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	82,14	82,8	83	6.550.954.520,00	83,25	6.750.000.000,00	83,5	7.000.000.000,00	83,75	7.250.000.000,00	84	7.500.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Sosial
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					1.404.000.000,00		1.500.000.000,00		1.600.000.000,00		1.700.000.000,00		1.900.000.000,00	
Meningkatnya Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perorangan dalam Pelayanan Sosial	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) perorangan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar (%)	31	38,50	46	300.000.000,00	53,50	375.000.000,00	61	400.000.000,00	68,50	425.000.000,00	76	500.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Sosial
Meningkatnya Kapasitas PSKS Lainnya yang aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persentase PSKS Lainnya yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial (%)	37,50	50	62,50	1.104.000.000,00	75	1.125.000.000,00	87,50	1.200.000.000,00	100	1.275.000.000,00	100	1.400.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Sosial
1.06.03 - PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN					35.000.000,00		40.000.000,00		45.000.000,00		50.000.000,00		55.000.000,00	
Meningkatnya Penanganan Warga Negara Korban Tindak Kekerasan	Persentase Penanganan Warga Negara Korban Tindak Kekerasan (%)	-	-	100	35.000.000,00	100	40.000.000,00	100	45.000.000,00	100	50.000.000,00	100	55.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Sosial
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					3.500.000.000,00		3.600.000.000,00		3.700.000.000,00		3.800.000.000,00		4.000.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Penyandang Disabilitas Terlantar	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (%)	100	100	100	2.265.000.000,00	100	2.015.000.000,00	100	2.015.000.000,00	100	2.020.000.000,00	100	2.125.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Sosial
Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Anak Terlantar	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (%)	100	100	100	145.000.000,00	100	180.000.000,00	100	215.000.000,00	100	250.000.000,00	100	285.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Sosial
Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Lanjut UsiaTerlantar	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (%)	100	100	100	680.000.000,00	100	730.000.000,00	100	730.000.000,00	100	730.000.000,00	100	730.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Sosial
Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Gelandangan dan Pengemis Terlantar	Persentase gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (%)	100	100	100	80.000.000,00	100	80.000.000,00	100	80.000.000,00	100	80.000.000,00	100	80.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Sosial
Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS	Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (%)	14,97	43,52	45	205.000.000,00	50	445.000.000,00	55	510.000.000,00	60	570.000.000,00	65	630.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Sosial
Meningkatnya Sarana dan Prasarana untuk Pelayanan Sosial sesuai standar	Persentase sarana prasarana yang disediakan sesuai standar untuk pelayanan sosial di luar panti (%)	100	100	100	125.000.000,00	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Sosial
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					937.500.000,00		1.137.500.000,00		1.337.500.000,00		1.537.500.000,00		1.737.500.000,00	
Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Penerima Manfaat	Pesentase Penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar (%)	100	100	100	250.000.000,00	100	380.000.000,00	100	435.000.000,00	100	475.000.000,00	100	515.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Sosial
Meningkatnya Kemandirian Ekonomi bagi Penerima Manfaat	Pesentase Penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi (%)	1,26	1,3	1,52	337.500.000,00	1,77	380.000.000,00	2,02	472.500.000,00	2,28	577.500.000,00	2,53	692.500.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Sosial
Pemutakhiran Data Fakir Miskin	Jumlah pemutakhiran data fakir miskin dan kelompok rentan yang dilakukan selama satu tahun (Dokumen)	1	1	1	350.000.000,00	1	377.500.000,00	1	430.000.000,00	1	485.000.000,00	1	530.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Sosial
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA					1.000.000.000,00		1.100.000.000,00		1.200.000.000,00		1.300.000.000,00		1.480.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terpenuhinya Kebutuhan dasar bagi korban bencana alam, sosial dan non alam	Persentase korban bencana alam, sosial dan non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota (%)	100	100	100	425.000.000,00	100	530.000.000,00	100	520.000.000,00	100	620.000.000,00	100	680.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Sosial
Tersedianya Sarana dan Prasarana bagi Korban Bencana	Persentase Sarana Prasarana bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang disediakan sesuai standar (%)	100	100	100	160.000.000,00	100	140.000.000,00	100	240.000.000,00	100	220.000.000,00	100	320.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Sosial
Meningkatnya Pekerja Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan Penanganan Korban Bencana	Persentase pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana kabupaten/kota pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar (%)	77	78,79	80,30	415.000.000,00	83,33	430.000.000,00	86,36	440.000.000,00	89,39	460.000.000,00	92,42	480.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Sosial
1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					150.000.000,00		225.000.000,00		175.000.000,00		200.000.000,00		225.000.000,00	
Meningkatnya pemeliharaan Makam Pahlawan dan daerah	Persentase Pengelolaan Makam Pahlawan (%)	100	100	100	150.000.000,00	100	225.000.000,00	100	175.000.000,00	100	200.000.000,00	100	225.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Sosial
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					13.140.732.490,00		13.954.854.290,00		14.566.215.944,00		15.032.418.447,62		15.503.607.026,35	
2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.376.132.490,00		7.576.132.490,00		7.776.132.490,00		7.976.132.490,00		8.176.132.490,00	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	80,95	81	81,05	7.376.132.490,00	81,10	7.576.132.490,00	81,20	7.776.132.490,00	81,30	7.976.132.490,00	81,40	8.176.132.490,00	2.07.3.32.0.00.02.00 00 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					220.000.000,00		309.000.000,00		318.270.000,00		327.818.100,00		337.652.643,00	
Terkelolanya informasi tenaga kerja	Jumlah dokumen rencana Kerja (Dokumen)	-	-	1	220.000.000,00	1	309.000.000,00	1	318.270.000,00	1	327.818.100,00	1	337.652.643,00	2.07.3.32.0.00.02.00 00 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					2.793.000.000,00		3.112.790.000,00		3.236.173.700,00		3.363.258.911,00		3.494.156.678,33	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kualitas dan Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi (%)	10,76	11,30	12,30	2.793.000.000,00	13,30	3.112.790.000,00	14,30	3.236.173.700,00	15,30	3.363.258.911,00	16,30	3.494.156.678,33	2.07.3.32.0.00.02.00 00 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					749.600.000,00		856.931.800,00		985.639.754,00		1.015.208.946,62		1.045.665.215,02	
Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase ketersediaan informasi kesempatan kerja pada sektor formal dan non formal (%)	-	-	15	749.600.000,00	20	856.931.800,00	25	985.639.754,00	30	1.015.208.946,62	35	1.045.665.215,02	2.07.3.32.0.00.02.00 00 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					2.002.000.000,00		2.100.000.000,00		2.250.000.000,00		2.350.000.000,00		2.450.000.000,00	
Terciptanya Hubungan Industrial Yang Harmonis, dinamis dan berkeadilan	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui bipartit/mediasi (%)	100	100	100	2.002.000.000,00	100	2.100.000.000,00	100	2.250.000.000,00	100	2.350.000.000,00	100	2.450.000.000,00	2.07.3.32.0.00.02.00 00 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					10.805.000.000,00		11.475.000.000,00		11.675.000.000,00		12.045.000.000,00		12.250.000.000,00	
2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					8.650.000.000,00		9.150.000.000,00		9.250.000.000,00		9.500.000.000,00		9.500.000.000,00	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	80	86,98	87,68	8.650.000.000,00	88,03	9.150.000.000,00	88,38	9.250.000.000,00	88,73	9.500.000.000,00	89,08	9.500.000.000,00	2.14.2.08.0.00.05.00 00 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAA N GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					810.000.000,00		900.000.000,00		925.000.000,00		950.000.000,00		1.000.000.000,00	
Meningkatnya Kelembagaan Pengarusutamaan Gender	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase)	41,34	49,48	57,62	200.000.000,00	65,76	250.000.000,00	73,90	275.000.000,00	82,04	300.000.000,00	90,18	350.000.000,00	2.14.2.08.0.00.05.00 00 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)	54,65	54.74 - 55.25	56.42- 56.91	610.000.000,00	57.53 - 58.54	650.000.000,00	58.73 - 60.14	650.000.000,00	59.84 - 61.71	650.000.000,00	61.28 - 63.24	650.000.000,00	2.14.2.08.0.00.05.00 00 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					220.000.000,00		250.000.000,00		275.000.000,00		320.000.000,00		400.000.000,00	
Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	-	100	100	220.000.000,00	100	250.000.000,00	100	275.000.000,00	100	320.000.000,00	100	400.000.000,00	2.14.2.08.0.00.05.00 00 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					325.000.000,00		350.000.000,00		375.000.000,00		400.000.000,00		450.000.000,00	
Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraangender, pemuenuhan hak, serta pelindungan perempuan dan anak	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar (%)	33,33	33,33	66,66	325.000.000,00	66,66	350.000.000,00	100	375.000.000,00	100	400.000.000,00	100	450.000.000,00	2.14.2.08.0.00.05.00 00 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan (Persentase)	100	100	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	2.14.2.08.0.00.05.00 00 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					150.000.000,00		175.000.000,00		200.000.000,00		225.000.000,00		250.000.000,00	
Terjaminnya pemuenuhan hak semua anak secara kompherensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	66,24	67,56	68,92	150.000.000,00	70,29	175.000.000,00	71,70	200.000.000,00	73,13	225.000.000,00	74,60	250.000.000,00	2.14.2.08.0.00.05.00 00 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)	79,17	80,75	82,37	600.000.000,00	84,02	600.000.000,00	85,70	600.000.000,00	87,41	600.000.000,00	89,16	600.000.000,00	2.14.2.08.0.00.05.00 00 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Persentase)	43,10	100	100		100		100		100		2.14.2.08.0.00.05.00 00 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					3.595.000.000,00		4.122.500.000,00		4.484.950.000,00		4.888.645.000,00		5.374.209.500,00	
2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN					260.000.000,00		286.000.000,00		314.600.000,00		346.060.000,00		380.666.000,00	
Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Ketersediaan pangan pokok (Kg/KAP/TH)	236,90	238,08	239,27	260.000.000,00	240,47	286.000.000,00	241,67	314.600.000,00	242,88	346.060.000,00	244,10	380.666.000,00	3.27.2.09.0.00.10.00 00 - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					2.810.000.000,00		3.141.000.000,00		3.400.100.000,00		3.740.110.000,00		4.114.121.000,00	
Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	94,5	94,55	94,6	2.810.000.000,00	94,65	3.141.000.000,00	94,7	3.400.100.000,00	94,75	3.740.110.000,00	94,8	4.114.121.000,00	3.27.2.09.0.00.10.00 00 - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					300.000.000,00		448.000.000,00		498.000.000,00		503.000.000,00		550.000.000,00	
Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	11,55	11,50	11,45	300.000.000,00	11,40	448.000.000,00	11,35	498.000.000,00	11,30	503.000.000,00	11,25	550.000.000,00	3.27.2.09.0.00.10.00 00 - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					225.000.000,00		247.500.000,00		272.250.000,00		299.475.000,00		329.422.500,00	
Meningkatnya Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (Persentase)	100	100	100	225.000.000,00	100	247.500.000,00	100	272.250.000,00	100	299.475.000,00	100	329.422.500,00	3.27.2.09.0.00.10.00 00 - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					35.000.000.000,00		35.000.000.000,00		35.000.000.000,00		35.000.000.000,00		35.000.000.000,00	
2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN					34.000.000.000,00		34.000.000.000,00		34.000.000.000,00		34.000.000.000,00		34.000.000.000,00	
Masyarakat mendapatkan Penetapan Ganti Rugi dan Santunan Sesuai Ketentuan	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan yang terselesaikan (%)	100	100	100	34.000.000.000,00	100	34.000.000.000,00	100	34.000.000.000,00	100	34.000.000.000,00	100	34.000.000.000,00	1.04.2.10.1.03.02.00 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2.10.06 - PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE					1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00	
Terwujudnya Pemerataan Penguasaan Tanah dan Pemberdayaan Masyarakat melalui Penataan Aset dan Akses di Daerah	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal Kelebihan dari Tanah Maksimum dan Tanah Absentee (%)	100	100	100	1.000.000.000,00	100	1.000.000.000,00	100	1.000.000.000,00	100	1.000.000.000,00	100	1.000.000.000,00	1.04.2.10.1.03.02.00 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					33.126.101.494,00		45.487.450.244,00		46.047.537.494,00		47.511.703.494,00		49.472.518.494,00	
2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					22.656.101.494,00		23.156.101.494,00		23.656.101.494,00		24.156.101.494,00		24.656.101.494,00	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	86,06	86,16	86,26	22.656.101.494,00	86,36	23.156.101.494,00	86,46	23.656.101.494,00	86,56	24.156.101.494,00	86,66	24.656.101.494,00	2.11.3.28.1.03.12.00 - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00	
Tersedianya Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup (Dokumen)	2	-	1	400.000.000,00	1	400.000.000,00	1	400.000.000,00	2	400.000.000,00	1	400.000.000,00	2.11.3.28.1.03.12.00 - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					320.000.000,00		420.000.000,00		520.000.000,00		620.000.000,00		720.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pemantauan Kualitas Air dan Udara	Persentase pemantauan kualitas air dan kualitas udara (%)	100	100	100	320.000.000,00	100	420.000.000,00	100	520.000.000,00	100	620.000.000,00	100	720.000.000,00	2.11.3.28.1.03.12.00 00 - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					750.000.000,00		861.098.750,00		984.436.000,00		1.032.102.000,00		1.101.917.000,00	
Meningkatnya Pengelolaan RTH Publik dan Taman Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase Pengelolaan RTH Publik dan Taman Keanekaragaman Hayati (Kehati) (%)	-	75	76	750.000.000,00	77	861.098.750,00	78	984.436.000,00	79	1.032.102.000,00	80	1.101.917.000,00	2.11.3.28.1.03.12.00 00 - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					245.000.000,00		345.000.000,00		445.000.000,00		545.000.000,00		645.000.000,00	
Terlaksananya Pengelolaan Limbah B3 Sesuai Peraturan yang Berlaku	Persentase pelaku usaha yang mengelola Limbah B3 sesuai ketentuan (%)	100	100	100	245.000.000,00	100	345.000.000,00	100	445.000.000,00	100	545.000.000,00	100	645.000.000,00	2.11.3.28.1.03.12.00 00 - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					160.000.000,00		260.000.000,00		360.000.000,00		460.000.000,00		560.000.000,00	
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izzin PPLH	Jumlah usaha/kegiatan yang dibina dan diawasi (Kegiatan Usaha)	45	50	55	160.000.000,00	60	260.000.000,00	65	360.000.000,00	70	460.000.000,00	75	560.000.000,00	2.11.3.28.1.03.12.00 00 - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					150.000.000,00		230.000.000,00		325.000.000,00		465.000.000,00		565.000.000,00	
Meningkatnya Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	Peningkatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat (%)	-	-	23	150.000.000,00	28	230.000.000,00	31	325.000.000,00	33	465.000.000,00	36	565.000.000,00	2.11.3.28.1.03.12.00 00 - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					100.000.000,00		125.000.000,00		150.000.000,00		175.000.000,00		200.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Penerimaan Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten Kepada Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi	Peningkatan Penerimaan Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten Kepada Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantroph i (%)	-	-	50	100.000.000,00	56	125.000.000,00	57	150.000.000,00	59	175.000.000,00	60	200.000.000,00	2.11.3.28.1.03.12.00 00 - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					120.000.000,00		125.000.000,00		130.000.000,00		135.000.000,00		140.000.000,00	
Meningkatnya Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Pengaduan Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (%)	100	100	100	120.000.000,00	100	125.000.000,00	100	130.000.000,00	100	135.000.000,00	100	140.000.000,00	2.11.3.28.1.03.12.00 00 - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					8.225.000.000,00		19.565.250.000,00		19.077.000.000,00		19.523.500.000,00		20.484.500.000,00	
Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sampah	Indeks Governance Dalam Pengelolaan Sampah (Poin)	20	22	28	8.225.000.000,00	32	19.565.250.000,00	34	19.077.000.000,00	35	19.523.500.000,00	35	20.484.500.000,00	2.11.3.28.1.03.12.00 00 - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					10.776.187.724,00		12.276.187.724,00		13.558.112.724,00		14.693.147.724,00		15.160.450.000,00	
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					8.576.187.724,00		9.076.187.724,00		9.476.187.724,00		9.876.187.724,00		10.150.500.000,00	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	90,01	90,15	90,25	8.576.187.724,00	90,50	9.076.187.724,00	91	9.476.187.724,00	91,50	9.876.187.724,00	92	10.150.500.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					1.335.000.000,00		1.835.000.000,00		2.285.000.000,00		2.774.435.000,00		2.974.350.000,00	
Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) (%)	17,24	17,50	20	1.335.000.000,00	22,50	1.835.000.000,00	25	2.285.000.000,00	27,50	2.774.435.000,00	30	2.974.350.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (Persentase)	60	60	65		70		75		80		85		2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL					475.000.000,00		775.000.000,00		1.006.925.000,00		1.232.525.000,00		1.320.600.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	97	97	97	475.000.000,00	97	775.000.000,00	98	1.006.925.000,00	98	1.232.525.000,00	98	1.320.600.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	50	55	60		70		70		80		80		2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	55	60	65		70		75		80		80		2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					390.000.000,00		590.000.000,00		790.000.000,00		810.000.000,00		715.000.000,00	
Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang DiManfaatkan (Persentase)	70	75	80	390.000.000,00	87	590.000.000,00	90	790.000.000,00	93	810.000.000,00	95	715.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					19.383.808.265,00		21.727.564.550,00		23.679.077.460,00		25.116.724.952,00		26.750.182.583,00	
2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.999.977.072,00		7.250.000.000,00		7.500.000.000,00		7.750.000.000,00		8.000.000.000,00	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	86	88	89	6.999.977.072,00	90	7.250.000.000,00	90,5	7.500.000.000,00	91	7.750.000.000,00	91,5	8.000.000.000,00	2.13.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA					363.000.000,00		435.600.000,00		522.720.000,00		627.264.000,00		752.716.800,00	
Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase Fasilitas Penataan Desa (Persentase)	25,93	3,33	3,70	363.000.000,00	4,44	435.600.000,00	4,81	522.720.000,00	5,19	627.264.000,00	5,56	752.716.800,00	2.13.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA					231.000.000,00		277.200.000,00		332.640.000,00		345.000.000,00		380.000.000,00	
Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	Persentase Fasilitas Kerjasama Desa (Persentase)	-	25,93	50	231.000.000,00	62	277.200.000,00	74	332.640.000,00	87	345.000.000,00	100	380.000.000,00	2.13.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					8.737.203.793,00		10.484.644.550,00		11.581.573.460,00		12.097.888.152,00		13.117.465.783,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)	2,73	14,62	15,46	8.737.203.793,00	15,99	10.484.644.550,00	16,51	11.581.573.460,00	17,03	12.097.888.152,00	17,56	13.117.465.783,00	2.13.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					3.052.627.400,00		3.280.120.000,00		3.742.144.000,00		4.296.572.800,00		4.500.000.000,00	
Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Pembangunan	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (Persentase)	80	83	86	3.052.627.400,00	91	3.280.120.000,00	94	3.742.144.000,00	97	4.296.572.800,00	100	4.500.000.000,00	2.13.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					10.304.958.000,00		10.429.958.000,00		10.604.958.000,00		10.694.958.000,00		10.779.958.000,00	
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					150.000.000,00		175.000.000,00		200.000.000,00		225.000.000,00		250.000.000,00	
Terkendalinya pertumbuhan jumlah penduduk	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ ASFR 15-19) (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun)	14,71	14.5069-14.6069	14.3090-14.3090	150.000.000,00	14.1119-14.1119	175.000.000,00	13.9156-13.9156	200.000.000,00	13.7198-13.7198	225.000.000,00	13.5248-13.5248	250.000.000,00	2.14.2.08.0.00.05.00 00 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					3.006.658.000,00		3.081.658.000,00		3.106.658.000,00		3.146.658.000,00		3.156.658.000,00	
Meningkatnya Jumlah Akseptor KB	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) (Persentase)	81,89	76,27	76,33	692.000.000,00	76,38	767.000.000,00	76,44	792.000.000,00	76,49	832.000.000,00	76,55	842.000.000,00	2.14.2.08.0.00.05.00 00 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Persentase Kebutuhan KB yang terpenuhi (%)	90,41	89,46	89,47		89,48		89,49		89,50		89,51		2.14.2.08.0.00.05.00 00 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri (Persentase)	7,22	7,58	7,94	2.314.658.000,00	8,30	2.314.658.000,00	8,66	2.314.658.000,00	9,02	2.314.658.000,00	9,38	2.314.658.000,00	2.14.2.08.0.00.05.00 00 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	8,69	8,9833	8,9829		8,9787		8,9750		8,9722		8,9703		2.14.2.08.0.00.05.00 00 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					7.148.300.000,00		7.173.300.000,00		7.298.300.000,00		7.323.300.000,00		7.373.300.000,00	
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (%)	73,43	74,22	75,01	7.148.300.000,00	76,32	7.173.300.000,00	77,63	7.298.300.000,00	78,94	7.323.300.000,00	80,25	7.373.300.000,00	2.14.2.08.0.00.05.00 00 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					35.913.185.808,00		38.089.305.174,00		38.324.125.433,00		38.576.028.705,00		38.356.788.705,00	
2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					13.630.154.098,00		13.452.905.174,00		13.310.965.433,00		13.111.108.705,00		12.730.108.705,00	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	71,5	75	77	13.630.154.098,00	79	13.452.905.174,00	81	13.310.965.433,00	82	13.111.108.705,00	85	12.730.108.705,00	2.15.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Perhubungan
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAA N LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					22.283.031.710,00		24.636.400.000,00		25.013.160.000,00		25.464.920.000,00		25.626.680.000,00	
Meningkatnya Konektivitas Angkutan Darat	Kinerja lalu lintas Kabupaten/kota (%)	0,26	0,26	0,28	3.550.000.000,00	0,29	6.611.400.000,00	0,30	6.003.160.000,00	0,31	6.349.920.000,00	0,32	6.321.680.000,00	2.15.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Perhubungan
	Persentase perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan (%)	40,00	40,00	60,00		60,00		80,00		80,00		100		2.15.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Perhubungan
	Rasio konektivitas kabupaten/kota (%)	0,58	0,60	0,60		0,60		0,60		0,60		0,60		2.15.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Perhubungan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kualitas dan kuantitas Kelengkapan Jalan yang terpasang terhadap kondisi Ideal	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (Persentase)	29,63	30,99	32,70	18.733.031.710,00	34,79	18.025.000.000,00	37,07	19.010.000.000,00	39,35	19.115.000.000,00	41,64	19.305.000.000,00	2.15.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Perhubungan
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					17.353.687.546,00		17.966.777.470,00		19.283.228.445,00		20.495.728.245,00		21.772.747.389,00	
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.383.029.946,00		7.435.056.670,00		7.858.234.645,00		8.058.234.645,00		8.301.260.389,00	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	90,75	91,25	91,50	7.383.029.946,00	92	7.435.056.670,00	92,50	7.858.234.645,00	93	8.058.234.645,00	93,50	8.301.260.389,00	2.16.2.20.2.21.04.00 00 - Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					4.016.409.600,00		4.432.048.000,00		4.845.252.800,00		5.099.778.500,00		5.300.000.000,00	
Meningkatnya layanan komunikasi publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota (%)	-	75	76	4.016.409.600,00	77	4.432.048.000,00	78	4.845.252.800,00	79	5.099.778.500,00	80	5.300.000.000,00	2.16.2.20.2.21.04.00 00 - Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					5.954.248.000,00		6.099.672.800,00		6.579.741.000,00		7.337.715.100,00		8.171.487.000,00	
Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital	Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo (%)	100	100	100	5.954.248.000,00	100	6.099.672.800,00	100	6.579.741.000,00	100	7.337.715.100,00	100	8.171.487.000,00	2.16.2.20.2.21.04.00 00 - Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
	Persentase Perangkat Daerah (PD) di tingkat Kabupaten/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah (%)	-	75	80		85		90		95		100		2.16.2.20.2.21.04.00 00 - Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
	Persentase Perangkat daerah yang memanfaatkan sistem penghubung layanan Pemerintah Daerah (SPLPD) (%)	100	100	100		100		100		100		100		2.16.2.20.2.21.04.00 00 - Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					18.452.135.970,00		16.541.087.050,00		16.991.782.805,00		17.464.048.135,50		17.960.006.593,31	
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					12.142.135.970,00		12.500.000.000,00		12.600.000.000,00		12.700.000.000,00		12.799.966.594,26	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	84,31	85,31	86,32	12.142.135.970,00	87,32	12.500.000.000,00	88,32	12.600.000.000,00	89,32	12.700.000.000,00	90,32	12.799.966.594,26	2.17.3.30.3.31.07.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
2.17.02 - PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM					5.000.000,00		20.000.000,00		40.000.000,00		60.000.000,00		80.000.000,00	
Meningkatnya pelayanan izin usaha simpan pinjam	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi (Persentase)	7,97	9,96	11,95	5.000.000,00	13,94	20.000.000,00	15,93	40.000.000,00	17,92	60.000.000,00	19,91	80.000.000,00	2.17.3.30.3.31.07.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					50.000.000,00		55.000.000,00		60.500.000,00		66.550.000,00		73.205.000,00	
Meningkatnya Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Persentase)	59,76	79,68	100	50.000.000,00	100	55.000.000,00	100	60.500.000,00	100	66.550.000,00	100	73.205.000,00	2.17.3.30.3.31.07.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI					10.000.000,00		30.000.000,00		40.000.000,00		50.000.000,00		60.000.000,00	
Meningkatnya Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase KSP/USP Yang Sehat (%)	59,76	79,68	100	10.000.000,00	100	30.000.000,00	100	40.000.000,00	100	50.000.000,00	100	60.000.000,00	2.17.3.30.3.31.07.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					50.000.000,00		55.000.000,00		60.000.000,00		65.000.000,00		70.000.000,00	
Meningkatnya koperasi yang mendapat pendidikan dan pelatihan perkoperasian	Persentase koperasi yang mendapat pendidikan dan pelatihan perkoperasian (%)	49,8	59,76	69,72	50.000.000,00	79,68	55.000.000,00	89,64	60.000.000,00	99,60	65.000.000,00	100	70.000.000,00	2.17.3.30.3.31.07.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN					2.125.000.000,00		150.000.000,00		200.000.000,00		250.000.000,00		300.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PERLINDUNGAN KOPERASI														
Meningkatnya koperasi yang diberdayakan dan mendapat perlindungan	Persentase koperasi yang diberdayakan dan mendapat perlindungan (%)	60,16	80,08	100	2.125.000.000,00	100	150.000.000,00	100	200.000.000,00	100	250.000.000,00	100	300.000.000,00	2.17.3.30.3.31.07.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					380.000.000,00		450.000.000,00		500.000.000,00		550.000.000,00		600.000.000,00	
Meningkatnya Pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)	Persentase Pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM) (%)	31,36	3,09	32,82	380.000.000,00	33,55	450.000.000,00	34,28	500.000.000,00	35,01	550.000.000,00	35,74	600.000.000,00	2.17.3.30.3.31.07.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					3.690.000.000,00		3.281.087.050,00		3.491.282.805,00		3.722.498.135,50		3.976.834.999,05	
Meningkatnya pengembangan usaha mikro menjadi usaha kecil	Jumlah Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (Persentase)	3,35	4,32	5,28	3.690.000.000,00	6,24	3.281.087.050,00	7,2	3.491.282.805,00	8,16	3.722.498.135,50	9,12	3.976.834.999,05	2.17.3.30.3.31.07.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					10.112.574.195,00		10.486.194.370,00		10.976.194.570,00		11.414.442.233,00		11.863.929.328,00	
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					8.395.353.214,00		8.611.194.370,00		8.976.194.570,00		9.289.442.233,00		9.613.929.328,00	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	90,31	90,56	91	8.395.353.214,00	92	8.611.194.370,00	93	8.976.194.570,00	94	9.289.442.233,00	95	9.613.929.328,00	2.18.0.00.0.00.23.00 00 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					250.000.000,00		275.000.000,00		300.000.000,00		325.000.000,00		350.000.000,00	
Meningkatnya iklim investasi tingkat kabupaten	Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase)	-	100	100	250.000.000,00	100	275.000.000,00	100	300.000.000,00	100	325.000.000,00	100	350.000.000,00	2.18.0.00.0.00.23.00 00 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					363.553.105,00		400.000.000,00		450.000.000,00		500.000.000,00		550.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (Persentase)	-	65	67	363.553.105,00	75	400.000.000,00	80	450.000.000,00	83	500.000.000,00	86	550.000.000,00	2.18.0.00.0.00.23.00 00 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					553.667.876,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00	
Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)	100	100	100	553.667.876,00	100	600.000.000,00	100	600.000.000,00	100	600.000.000,00	100	600.000.000,00	2.18.0.00.0.00.23.00 00 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					450.000.000,00		500.000.000,00		550.000.000,00		600.000.000,00		650.000.000,00	
Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal dan Perijinan	Persentase Realisasi Penanaman Modal Pelaku Usaha (Persentase)	100	100	100	450.000.000,00	100	500.000.000,00	100	550.000.000,00	100	600.000.000,00	100	650.000.000,00	2.18.0.00.0.00.23.00 00 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)	100	100	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	2.18.0.00.0.00.23.00 00 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					29.470.000.000,00		14.162.500.000,00		14.712.500.000,00		14.812.500.000,00		33.342.500.000,00	
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					1.550.000.000,00		1.650.000.000,00		1.750.000.000,00		1.850.000.000,00		1.950.000.000,00	
Meningkatnya daya saing kepemudaan	Persentase Pemuda yang pernah mengikuti pelatihan/kursus/traini ng dan memperoleh sertifikat (%)	9,45	9,63	9,81	1.550.000.000,00	9,99	1.650.000.000,00	10,16	1.750.000.000,00	10,34	1.850.000.000,00	10,52	1.950.000.000,00	3.26.2.22.2.19.02.00 00 - Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					26.800.000.000,00		11.700.000.000,00		12.150.000.000,00		12.150.000.000,00		30.580.000.000,00	
Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga	Persentase Atlet yang berasal dari kab/kota yang masuk Pelatda Provinsi (%)	-	-	10	26.800.000.000,00	10	11.700.000.000,00	10	12.150.000.000,00	10	12.150.000.000,00	10	30.580.000.000,00	3.26.2.22.2.19.02.00 00 - Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					1.120.000.000,00		812.500.000,00		812.500.000,00		812.500.000,00		812.500.000,00	
Meningkatnya kualitas kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan (Persentase)	100	100	100	1.120.000.000,00	100	812.500.000,00	100	812.500.000,00	100	812.500.000,00	100	812.500.000,00	3.26.2.22.2.19.02.00 00 - Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					650.000.000,00		750.000.000,00		800.000.000,00		850.000.000,00		900.000.000,00	
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAA N STATISTIK SEKTORAL					650.000.000,00		750.000.000,00		800.000.000,00		850.000.000,00		900.000.000,00	
Meningkatnya Kualitas data Pembangunan	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)	3,24	3,24	3,26	650.000.000,00	3,26	750.000.000,00	3,28	800.000.000,00	3,28	850.000.000,00	3,30	900.000.000,00	2.16.2.20.2.21.04.00 00 - Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					783.719.700,00		850.000.000,00		950.000.000,00		975.000.000,00		1.000.000.000,00	
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAA N PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					783.719.700,00		850.000.000,00		950.000.000,00		975.000.000,00		1.000.000.000,00	
Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (%)	85,12	73,53	76,25	783.719.700,00	78,97	850.000.000,00	81,69	950.000.000,00	84,42	975.000.000,00	87,14	1.000.000.000,00	2.16.2.20.2.21.04.00 00 - Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					2.448.824.600,00		3.200.000.000,00		3.400.000.000,00		3.600.000.000,00		3.800.000.000,00	
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					1.134.861.500,00		1.250.000.000,00		1.300.000.000,00		1.350.000.000,00		1.400.000.000,00	
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (Persentase)	40	50	60	1.134.861.500,00	65	1.250.000.000,00	70	1.300.000.000,00	75	1.350.000.000,00	80	1.400.000.000,00	3.26.2.22.2.19.02.00 00 - Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga
2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					250.000.000,00		350.000.000,00		450.000.000,00		550.000.000,00		650.000.000,00	
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan (%)	100	100	100	250.000.000,00	100	350.000.000,00	100	450.000.000,00	100	550.000.000,00	100	650.000.000,00	3.26.2.22.2.19.02.00 00 - Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.22.04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH					75.000.000,00		100.000.000,00		125.000.000,00		150.000.000,00		175.000.000,00	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal (Persentase)	15	15	17	75.000.000,00	17	100.000.000,00	17	125.000.000,00	17	150.000.000,00	17	175.000.000,00	3.26.2.22.2.19.02.00 - Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					838.963.100,00		850.000.000,00		875.000.000,00		900.000.000,00		925.000.000,00	
Meningkatnya warisan budaya yang dikelola	Persentase Cagar Budaya yang ditetapkan dan dikelola (%)	17	17	22	838.963.100,00	25	850.000.000,00	27	875.000.000,00	30	900.000.000,00	33	925.000.000,00	3.26.2.22.2.19.02.00 - Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga
2.22.06 - PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN					150.000.000,00		650.000.000,00		650.000.000,00		650.000.000,00		650.000.000,00	
Meningkatnya tata kelola museum	Persentase Museum yang Dikelola (%)	100	100	100	150.000.000,00	100	650.000.000,00	100	650.000.000,00	100	650.000.000,00	100	650.000.000,00	3.26.2.22.2.19.02.00 - Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					1.108.732.600,00		1.449.169.050,00		1.517.374.000,00		1.588.489.150,00		1.633.664.000,00	
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					1.058.732.600,00		1.396.669.050,00		1.462.249.000,00		1.530.607.900,00		1.572.889.000,00	
Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (Nilai)	72,27	72,3	72,50	1.058.732.600,00	72,55	1.396.669.050,00	73	1.462.249.000,00	74	1.530.607.900,00	75	1.572.889.000,00	2.24.2.23.0.00.02.00 - Dinas Arsip dan Perpustakaan
2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					50.000.000,00		52.500.000,00		55.125.000,00		57.881.250,00		60.775.000,00	
Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah nasional dan naskah kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki (Persentase)	10,10	10,10	12,12	50.000.000,00	14,14	52.500.000,00	16,16	55.125.000,00	18,18	57.881.250,00	20,20	60.775.000,00	2.24.2.23.0.00.02.00 - Dinas Arsip dan Perpustakaan
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					8.535.118.507,00		9.733.318.842,35		10.054.534.042,35		10.373.573.342,35		10.679.799.342,35	
2.24.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.463.832.707,00		7.563.469.342,35		7.653.469.342,35		7.753.469.342,35		7.853.469.342,35	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	84,306	85	86	7.463.832.707,00	89	7.563.469.342,35	91	7.653.469.342,35	92	7.753.469.342,35	94	7.853.469.342,35	2.24.2.23.0.00.02.00 - Dinas Arsip dan Perpustakaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					598.190.000,00		1.283.099.500,00		1.449.502.700,00		1.612.474.000,00		1.769.379.000,00	
Meningkatnya tata kelola asrip dinamis dan statis	Tingkat Ketersediaan Arsip (Persentase)	76,4	76,65	77	598.190.000,00	77,20	1.283.099.500,00	77,45	1.449.502.700,00	77,60	1.612.474.000,00	77,80	1.769.379.000,00	2.24.2.23.0.00.02.00 00 - Dinas Arsip dan Perpustakaan
2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					423.095.800,00		834.250.000,00		896.437.000,00		949.750.000,00		996.176.000,00	
Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan asrip sesuai NSPK	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa bernegara kepentingan pemerintahan, untuk negara, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat (%)	50	60	62	423.095.800,00	63	834.250.000,00	64	896.437.000,00	65	949.750.000,00	66	996.176.000,00	2.24.2.23.0.00.02.00 00 - Dinas Arsip dan Perpustakaan
2.24.04 - PROGRAM PERIZINAN PENGUNAAN ARSIP					50.000.000,00		52.500.000,00		55.125.000,00		57.880.000,00		60.775.000,00	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap penggunaan asrip yang bersifat tertutup	Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup (Persentase)	-	100	100	50.000.000,00	100	52.500.000,00	100	55.125.000,00	100	57.880.000,00	100	60.775.000,00	2.24.2.23.0.00.02.00 00 - Dinas Arsip dan Perpustakaan
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					17.844.578.697,00		18.494.615.197,00		19.200.000.000,00		20.175.000.000,00		20.850.000.000,00	
3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					14.449.615.197,00		14.949.615.197,00		15.500.000.000,00		16.250.000.000,00		16.500.000.000,00	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	87,4333	88,1111	88,9444	14.449.615.197,00	89,7778	14.949.615.197,00	91,7778	15.500.000.000,00	92,7778	16.250.000.000,00	93,6111	16.500.000.000,00	3.25.3.27.0.00.02.00 00 - Dinas Perikanan dan Peternakan
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					620.400.000,00		670.000.000,00		700.000.000,00		750.000.000,00		850.000.000,00	
Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	1.530,83	1.638,99	1.760,84	620.400.000,00	1.901,70	670.000.000,00	2.063,35	700.000.000,00	2.249,05	750.000.000,00	2.462,71	850.000.000,00	3.25.3.27.0.00.02.00 00 - Dinas Perikanan dan Peternakan
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					2.579.563.500,00		2.600.000.000,00		2.650.000.000,00		2.750.000.000,00		3.000.000.000,00	
Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	9.037,51	9.308,64	9.634,44	2.579.563.500,00	10.019,8 2	2.600.000.000,00	10.470,7 1	2.650.000.000,00	10.994,2 4	2.750.000.000,00	11.598,9 3	3.000.000.000,00	3.25.3.27.0.00.02.00 00 - Dinas Perikanan dan Peternakan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					120.000.000,00		175.000.000,00		200.000.000,00		250.000.000,00		300.000.000,00	
Meningkatnya Pengawasan Sumberdaya Perikanan	Persentase Pengawasan Sumberdaya Perikanan (%)	100	100	16,87	120.000.000,00	19,05	175.000.000,00	21,19	200.000.000,00	23,33	250.000.000,00	25,95	300.000.000,00	3.25.3.27.0.00.02.00 00 - Dinas Perikanan dan Peternakan
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					75.000.000,00		100.000.000,00		150.000.000,00		175.000.000,00		200.000.000,00	
Meningkatnya Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Peningkatan Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (%)	6,67	7,81	8,70	75.000.000,00	9,33	100.000.000,00	9,76	150.000.000,00	10,00	175.000.000,00	10,00	200.000.000,00	3.25.3.27.0.00.02.00 00 - Dinas Perikanan dan Peternakan
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					14.249.037.708,00		15.802.162.490,00		16.765.910.279,00		17.768.959.396,00		18.813.886.336,00	
3.26.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					9.813.685.408,00		10.829.369.600,00		11.370.838.100,00		11.939.380.000,00		12.536.349.000,00	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	92	92,25	92,5	9.813.685.408,00	93	10.829.369.600,00	93,5	11.370.838.100,00	94	11.939.380.000,00	94,5	12.536.349.000,00	3.26.2.22.2.19.02.00 00 - Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					1.111.629.900,00		1.222.792.890,00		1.345.072.179,00		1.479.579.396,00		1.627.537.336,00	
Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisara	Jumlah Kunjungan Wisatawan (Orang)	1.824.704	1.910.24 4	2.015.79 4	1.111.629.900,00	2.141.14 4	1.222.792.890,00	2.286.69 4	1.345.072.179,00	2.451.01 9	1.479.579.396,00	2.632.36 4	1.627.537.336,00	3.26.2.22.2.19.02.00 00 - Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					1.030.000.000,00		1.250.000.000,00		1.400.000.000,00		1.500.000.000,00		1.600.000.000,00	
Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Objek Daya Tarik Wisata yang dipromosikan (%)	68,49	100	100	1.030.000.000,00	100	1.250.000.000,00	100	1.400.000.000,00	100	1.500.000.000,00	100	1.600.000.000,00	3.26.2.22.2.19.02.00 00 - Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga
3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					1.167.746.100,00		1.250.000.000,00		1.300.000.000,00		1.400.000.000,00		1.500.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase Fasilitas Pelaku Ekonomi Kreatif untuk Memiliki Kekayaan Intelektual (Persentase)	1,17	3,52	3,52	1.167.746.100,00	3,52	1.250.000.000,00	3,52	1.300.000.000,00	3,52	1.400.000.000,00	3,52	1.500.000.000,00	3.26.2.22.2.19.02.00 - Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					1.125.976.300,00		1.250.000.000,00		1.350.000.000,00		1.450.000.000,00		1.550.000.000,00	
Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (Persentase)	20	20	20	1.125.976.300,00	20	1.250.000.000,00	20	1.350.000.000,00	20	1.450.000.000,00	20	1.550.000.000,00	3.26.2.22.2.19.02.00 - Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					79.848.949.643,00		79.566.612.280,00		82.998.723.508,00		90.748.545.857,00		89.578.068.442,00	
3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					36.924.960.893,00		33.096.272.608,00		35.635.399.869,00		36.727.939.855,00		36.896.451.841,00	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	86,62	86,98	87,39	36.924.960.893,00	87,81	33.096.272.608,00	88,23	35.635.399.869,00	88,64	36.727.939.855,00	89,14	36.896.451.841,00	3.27.2.09.0.00.10.00 - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					22.701.209.600,00		24.571.234.262,00		25.938.357.688,00		27.832.193.456,00		29.865.412.801,00	
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Budidaya Pertanian yang didukung dengan sarana pertanian	Luas Ekstensifikasi Komoditas Pertanian (Hektar)	-	100	110	11.519.303.875,00	121	13.071.234.262,00	133	13.938.357.688,00	146	15.332.193.456,00	161	16.865.412.801,00	3.27.2.09.0.00.10.00 - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Luas Intensifikasi Komoditas Pertanian (Hektar)	-	2.000	2.200		2.420		2.662		2.928		3.221		3.27.2.09.0.00.10.00 - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Meningkatnya Populasi Ternak	Peningkatan Populasi Ternak (%)	7,75	8,00	8,84	11.181.905.725,00	9,69	11.500.000.000,00	10,53	12.000.000.000,00	11,38	12.500.000.000,00	12,22	13.000.000.000,00	3.25.3.27.0.00.02.00 - Dinas Perikanan dan Peternakan
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					17.740.879.300,00		19.169.000.000,00		18.584.350.000,00		23.021.235.000,00		19.481.808.500,00	
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Budidaya Pertanian yang didukung dengan prasarana pertanian	Persentase Prasarana Pertanian yang Dibangun/Direhabilitas (%)	-	5,00	5,20	14.048.874.600,00	5,40	14.515.500.000,00	5,60	14.715.500.000,00	5,80	14.915.500.000,00	6,00	15.115.500.000,00	3.27.2.09.0.00.10.00 - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pernakan	Persentase Infrastruktur Pernakan yang Tersedia dan Dikembangkan (%)	21,79	26,92	7,50	3.692.004.700,00	30,63	4.653.500.000,00	53,13	3.868.850.000,00	76,25	8.105.735.000,00	100	4.366.308.500,00	3.25.3.27.0.00.02.00 00 - Dinas Perikanan dan Peternakan
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					521.076.750,00		650.000.000,00		675.000.000,00		700.000.000,00		750.000.000,00	
Terkendalnya Kasus Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Kasus Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang Dikendalikan (%)	99,47	99,56	99,63	521.076.750,00	99,71	650.000.000,00	99,83	675.000.000,00	100	700.000.000,00	100	750.000.000,00	3.25.3.27.0.00.02.00 00 - Dinas Perikanan dan Peternakan
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					708.000.000,00		615.500.000,00		694.550.000,00		779.005.000,00		869.405.500,00	
Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (%)	100	100	100	648.000.000,00	100	540.500.000,00	100	594.550.000,00	100	654.005.000,00	100	719.405.500,00	3.27.2.09.0.00.10.00 00 - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Persentase penanggulangan Bencana Pertanian (%)	100	100	100		100		100		100		100		3.27.2.09.0.00.10.00 00 - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Persentase Pengendalian Bencana Pertanian (%)	100	100	100		100		100		100		100		3.27.2.09.0.00.10.00 00 - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Terkendalnya dan Tertanggulangnya Bencana Penyakit Hewan Menular Strategis	Persentase Wilayah yang Terkendali dari Bencana Penyakit Hewan Menular Strategis (%)	100	100	100	60.000.000,00	100	75.000.000,00	100	100.000.000,00	100	125.000.000,00	100	150.000.000,00	3.25.3.27.0.00.02.00 00 - Dinas Perikanan dan Peternakan
3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN					35.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Terbitnya Rekomendasi Teknis Izin Usaha Pernakan	Persentase Rekomendasi Teknis Izin Usaha Peternakan yang Diterbitkan (%)	88,89	100	100	35.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	3.25.3.27.0.00.02.00 00 - Dinas Perikanan dan Peternakan
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					1.217.823.100,00		1.414.605.410,00		1.421.065.951,00		1.638.172.546,00		1.664.989.800,00	
Meningkatnya Kapasitas SDM Pertanian	Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Petani (%)	-	20,15	26,86	1.217.823.100,00	33,58	1.414.605.410,00	40,29	1.421.065.951,00	47,01	1.638.172.546,00	53,72	1.664.989.800,00	3.27.2.09.0.00.10.00 00 - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Persentase Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian (%)	-	13,44	26,88		40,32		53,76		67,20		80,65		3.27.2.09.0.00.10.00 00 - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Peningkatan Kapasitas Petani (%)	-	20	24		28		32		36		40		3.27.2.09.0.00.10.00 - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN					600.000.000,00		759.667.550,00		873.617.683,00		973.617.683,00		1.073.617.683,00	
3.28.04 - PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA					600.000.000,00		759.667.550,00		873.617.683,00		973.617.683,00		1.073.617.683,00	
Meningkatnya nilai efektivitas pengelolaan Kawasan konservasi	Persentase Kelengkapan Pengelolaan Kawasan Konservasi Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota (%)	65	65	66	600.000.000,00	66	759.667.550,00	67	873.617.683,00	67	973.617.683,00	68	1.073.617.683,00	2.11.3.28.1.03.12.00 00 - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					3.285.416.000,00		3.813.250.000,00		4.219.575.000,00		4.654.032.500,00		5.119.435.750,00	
3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					25.000.000,00		50.000.000,00		75.000.000,00		100.000.000,00		125.000.000,00	
Meningkatnya Pemberian Rekomendasi perizinan pendaftaran perusahaan	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (Persentase)	100	100	100	25.000.000,00	100	50.000.000,00	100	75.000.000,00	100	100.000.000,00	100	125.000.000,00	2.17.3.30.3.31.07.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					2.557.500.000,00		2.813.250.000,00		3.094.575.000,00		3.404.032.500,00		3.744.435.750,00	
Meningkatnya sarana distribusi perdagangan	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase)	88,89	88,89	100	2.557.500.000,00	100	2.813.250.000,00	100	3.094.575.000,00	100	3.404.032.500,00	100	3.744.435.750,00	2.17.3.30.3.31.07.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					457.916.000,00		550.000.000,00		600.000.000,00		650.000.000,00		700.000.000,00	
Meningkatnya ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persentase)	100	100	100	457.916.000,00	100	550.000.000,00	100	600.000.000,00	100	650.000.000,00	100	700.000.000,00	2.17.3.30.3.31.07.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					75.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00	
Meningkatnya pelaku usaha yang menjadi eksportir	Nilai Total Penjualan Perdagangan Antar	83,33	91,67	100	75.000.000,00	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	2.17.3.30.3.31.07.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil,

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Wilayah pada kab/kota (%)													Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					70.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Meningkatnya alat metrologi yang sesuai standar	Persentase alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (Persentase)	36,26	38,37	42,61	70.000.000,00	44,73	100.000.000,00	46,85	100.000.000,00	48,97	100.000.000,00	51,09	100.000.000,00	2.17.3.30.3.31.07.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
3.30.07 - PROGRAM PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					100.000.000,00		150.000.000,00		200.000.000,00		250.000.000,00		300.000.000,00	
Meningkatnya Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Produk Lokal yang Terstandarisasi (%)	71,67	80	88,33	100.000.000,00	99,66	150.000.000,00	99,66	200.000.000,00	99,66	250.000.000,00	99,66	300.000.000,00	2.17.3.30.3.31.07.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					580.000.000,00		665.000.000,00		705.000.000,00		745.000.000,00		785.000.000,00	
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					567.500.000,00		625.000.000,00		625.000.000,00		625.000.000,00		625.000.000,00	
Tersusunnya dokumen perencanaan dan pembangunan industri	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil (%)	100	100	100	567.500.000,00	100	625.000.000,00	100	625.000.000,00	100	625.000.000,00	100	625.000.000,00	2.17.3.30.3.31.07.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					5.000.000,00		20.000.000,00		40.000.000,00		60.000.000,00		80.000.000,00	
Meningkatnya Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang telah menindaklanjuti hasil rekomendasi pengawasan dibandingkan dengan jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang telah dilakukan pengawasan (%)	87,50	90	91,67	5.000.000,00	93,34	20.000.000,00	95,01	40.000.000,00	96,68	60.000.000,00	98,35	80.000.000,00	2.17.3.30.3.31.07.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					7.500.000,00		20.000.000,00		40.000.000,00		60.000.000,00		80.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini (Persentase)	-	60	65	7.500.000,00	68	20.000.000,00	70	40.000.000,00	73	60.000.000,00	75	80.000.000,00	2.17.3.30.3.31.07.00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI					586.000.000,00		594.000.000,00		605.000.000,00		616.000.000,00		627.000.000,00	
3.32.02 - PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI					250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00	
Meningkatnya pelaksanaan transmigrasi	Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan (Persentase)	-	-	20	250.000.000,00	40	250.000.000,00	60	250.000.000,00	80	250.000.000,00	100	250.000.000,00	2.07.3.32.0.00.02.00 00 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3.32.03 - PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI					303.000.000,00		310.000.000,00		320.000.000,00		330.000.000,00		340.000.000,00	
Meningkatnya efektivitas pelaksanaan program transmigrasi	Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan (Persentase)	-	-	100	303.000.000,00	100	310.000.000,00	100	320.000.000,00	100	330.000.000,00	100	340.000.000,00	2.07.3.32.0.00.02.00 00 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3.32.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI					33.000.000,00		34.000.000,00		35.000.000,00		36.000.000,00		37.000.000,00	
Meningkatnya Pemberdayaan dan kapasitas transmigran dalam pengembangan kawasan transmigrasi	Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan (Persentase)	-	-	10	33.000.000,00	20	34.000.000,00	30	35.000.000,00	40	36.000.000,00	50	37.000.000,00	2.07.3.32.0.00.02.00 00 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH					81.801.669.750,00		83.637.500.000,00		85.451.250.000,00		87.596.375.000,00		89.003.512.500,00	
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					64.575.000.000,00		65.500.000.000,00		66.500.000.000,00		67.775.000.000,00		68.500.000.000,00	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	89,65	90	91	64.575.000.000,00	92	65.500.000.000,00	93	66.500.000.000,00	94	67.775.000.000,00	95	68.500.000.000,00	4.01.0.00.0.00.01.00 00 - Sekretariat Daerah
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					14.726.669.750,00		15.387.500.000,00		15.926.250.000,00		16.493.875.000,00		16.843.262.500,00	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan kewilayahan	Persentase implementasi kebijakan urusan pemerintahan (%)	100	100	100	900.000.000,00	100	990.000.000,00	100	1.089.000.000,00	100	1.197.900.000,00	100	1.317.690.000,00	4.01.0.00.0.00.01.00 00 - Sekretariat Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan bidang kesejahteraan rakyat	Persentase implementasi kebijakan urusan kesejahteraan rakyat (%)	100	100	100	12.101.669.750,00	100	12.500.000.000,00	100	12.750.000.000,00	100	13.000.000.000,00	100	13.000.000.000,00	4.01.0.00.0.00.01.00 00 - Sekretariat Daerah
Meningkatnya kualitas produk hukum daerah yang dihasilkan	Persentase implementasi kebijakan urusan hukum (%)	100	100	100	1.075.000.000,00	100	1.182.500.000,00	100	1.300.750.000,00	100	1.430.825.000,00	100	1.573.907.500,00	4.01.0.00.0.00.01.00 00 - Sekretariat Daerah
Meningkatnya kepuasan masyarakat dari hasil kerja sama yang ditindaklanjuti	Persentase implementasi kebijakan urusan kerjasama (%)	100	100	100	650.000.000,00	100	715.000.000,00	100	786.500.000,00	100	865.150.000,00	100	951.665.000,00	4.01.0.00.0.00.01.00 00 - Sekretariat Daerah
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					2.500.000.000,00		2.750.000.000,00		3.025.000.000,00		3.327.500.000,00		3.660.250.000,00	
Meningkatnya kualitas Kebijakan Daerah Urusan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Persentase implementasi kebijakan urusan perekonomian dan Sumber Daya Alam (%)	100	100	100	1.000.000.000,00	100	1.100.000.000,00	100	1.210.000.000,00	100	1.331.000.000,00	100	1.464.100.000,00	4.01.0.00.0.00.01.00 00 - Sekretariat Daerah
Meningkatnya implementasi kebijakan bidang administrasi pembangunan	Persentase implementasi kebijakan urusan administrasi pembangunan (%)	100	100	100	750.000.000,00	100	825.000.000,00	100	907.500.000,00	100	998.250.000,00	100	1.098.075.000,00	4.01.0.00.0.00.01.00 00 - Sekretariat Daerah
Meningkatnya ITKP (Indek Tata Kelola Pengadaan)	Kriteria Capaian Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa (Kategori)	79,94	79,96	80,00	750.000.000,00	80,20	825.000.000,00	80,40	907.500.000,00	80,60	998.250.000,00	80,80	1.098.075.000,00	4.01.0.00.0.00.01.00 00 - Sekretariat Daerah
4.02 - SEKRETARIAT DPRD					82.877.521.529,00		84.377.521.529,00		85.877.521.529,00		87.377.521.529,00		88.877.521.529,00	
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					56.477.521.529,00		56.977.521.529,00		57.477.521.529,00		57.977.521.529,00		58.477.521.529,00	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	87,367	87,9	88	56.477.521.529,00	89	56.977.521.529,00	90	57.477.521.529,00	91	57.977.521.529,00	92	58.477.521.529,00	4.02.0.00.0.00.01.00 00 - Sekretariat DPRD
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					26.400.000.000,00		27.400.000.000,00		28.400.000.000,00		29.400.000.000,00		30.400.000.000,00	
Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N (Persentase)	100	100	100	5.505.068.000,00	100	5.703.327.000,00	100	5.903.316.000,00	100	6.105.107.000,00	100	6.308.805.000,00	4.02.0.00.0.00.01.00 00 - Sekretariat DPRD
	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N (Persentase)	100	100	100		100		100		100		4.02.0.00.0.00.01.00 00 - Sekretariat DPRD		
Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	100	100	100	14.407.475.000,00	100	14.968.971.000,00	100	15.525.672.000,00	100	16.077.356.000,00	100	16.623.756.000,00	4.02.0.00.0.00.01.00 00 - Sekretariat DPRD

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas DPRD	Persentase peningkatan kapasitas DPRD (%)	100	100	100	3.762.444.000,00	100	3.895.061.000,00	100	4.028.407.000,00	100	4.162.513.000,00	100	4.297.421.000,00	4.02.0.00.0.00.01.00 00 - Sekretariat DPRD
Meningkatnya kualitas penerimaan aspirasi masyarakat	Persentase penerimaan aspirasi masyarakat (%)	100	100	100	2.725.013.000,00	100	2.832.641.000,00	100	2.942.605.000,00	100	3.055.024.000,00	100	3.170.018.000,00	4.02.0.00.0.00.01.00 00 - Sekretariat DPRD
5.01 - PERENCANAAN					17.506.287.817,00		21.358.250.000,00		21.299.103.000,00		21.891.058.075,00		22.917.209.366,00	
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					12.576.287.817,00		14.686.850.000,00		13.838.190.000,00		13.967.791.250,00		14.121.840.000,00	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	89,62	91,0167	92	12.576.287.817,00	93	14.686.850.000,00	94	13.838.190.000,00	95	13.967.791.250,00	96	14.121.840.000,00	5.01.5.05.0.00.02.00 00 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					1.430.000.000,00		1.775.000.000,00		1.785.000.000,00		1.785.000.000,00		2.220.000.000,00	
Meningkatnya kualitas perencanaan dan pembangunan daerah	Nilai Aspek Perencanaan Pembangunan dalam Penghargaan Pembangunan Daerah (%)	2,89	2,91	2,93	1.430.000.000,00	2,97	1.775.000.000,00	3,01	1.785.000.000,00	3,05	1.785.000.000,00	3,09	2.220.000.000,00	5.01.5.05.0.00.02.00 00 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					3.500.000.000,00		4.896.400.000,00		5.675.913.000,00		6.138.266.825,00		6.575.369.366,00	
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (%)	98,12	98,17	98,22	1.000.000.000,00	98,27	2.000.000.000,00	98,32	2.200.000.000,00	98,37	2.420.000.000,00	98,42	2.662.000.000,00	5.01.5.05.0.00.02.00 00 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang Infrastruktur dan Wilayah	Persentase Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah Mitra Bidang Infrastruktur dan Wilayah (%)	94,00	98,00	98,00	1.500.000.000,00	98,00	1.805.000.000,00	98,00	2.330.000.000,00	98,00	2.515.000.000,00	98,00	2.650.000.000,00	5.01.5.05.0.00.02.00 00 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang Perekonomian dan SDA	Persentase Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah Mitra Bidang Perekonomian dan SDA (%)	90,57	98,00	98,00	1.000.000.000,00	98,00	1.091.400.000,00	98,00	1.145.913.000,00	98,00	1.203.266.825,00	98,00	1.263.369.366,00	5.01.5.05.0.00.02.00 00 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5.02 - KEUANGAN					594.487.929.731,00		618.943.104.412,40		632.755.846.571,60		647.106.981.325,50		662.800.201.141,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					106.113.403.596,00		108.500.000.000,00		109.200.000.000,00		110.500.000.000,00		113.000.000.000,00	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	93,80	93,80	93,85	83.963.403.596,00	93,9	85.750.000.000,00	93,95	86.050.000.000,00	94	87.000.000.000,00	94,05	88.500.000.000,00	5.02.0.00.0.00.05.00 00 - Badan Keuangan dan Aset Daerah
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	93,23	94	94	22.150.000.000,00	95	22.750.000.000,00	96	23.150.000.000,00	96	23.500.000.000,00	97	24.500.000.000,00	5.02.0.00.0.00.06.00 00 - Badan Pendapatan Daerah
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					472.700.780.650,00		492.639.064.412,40		503.690.846.571,60		515.106.981.325,50		526.825.201.141,00	
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Penganggaran	Ketepatan Waktu Proses Penganggaran (Tepat Waktu)	100	100	100	2.005.607.000,00	100	2.250.000.000,00	100	2.500.000.000,00	100	2.750.000.000,00	100	3.000.000.000,00	5.02.0.00.0.00.05.00 00 - Badan Keuangan dan Aset Daerah
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan	Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran Belanja Terhadap Rencana Anggaran Kas (%)	97,24	97,25	97,26	468.505.173.650,00	97,27	487.071.164.412,40	97,28	497.859.546.571,60	97,29	509.012.281.325,50	97,30	520.467.001.141,00	5.02.0.00.0.00.05.00 00 - Badan Keuangan dan Aset Daerah
Meningkatnya Kualitas Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD (%)	98,15	98,20	98,25	2.190.000.000,00	98,30	3.317.900.000,00	98,35	3.331.300.000,00	98,40	3.344.700.000,00	98,45	3.358.200.000,00	5.02.0.00.0.00.05.00 00 - Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					5.844.489.000,00		6.229.040.000,00		6.300.000.000,00		6.350.000.000,00		6.500.000.000,00	
Pengelolaan Barang Milik Daerah Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- undangan	Persentase Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah (%)	92,73	92,74	92,75	5.844.489.000,00	92,76	6.229.040.000,00	92,77	6.300.000.000,00	92,78	6.350.000.000,00	92,79	6.500.000.000,00	5.02.0.00.0.00.05.00 00 - Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					9.829.256.485,00		11.575.000.000,00		13.565.000.000,00		15.150.000.000,00		16.475.000.000,00	
Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Kesesuaian Data Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) (%)	22,67	23,43	100	9.829.256.485,00	100	11.575.000.000,00	100	13.565.000.000,00	100	15.150.000.000,00	100	16.475.000.000,00	5.02.0.00.0.00.06.00 00 - Badan Pendapatan Daerah
	Persentase Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (%)	22,67	23,43	100		100		100		100		5.02.0.00.0.00.06.00 00 - Badan Pendapatan Daerah		
	Persentase Perencanaan terhadap Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) (%)	22,67	23,43	100		100		100		100		5.02.0.00.0.00.06.00 00 - Badan Pendapatan Daerah		
	Persentase Transaksi Pajak dan Retribusi yang Diproses Melalui Sistem Informasi (%)	22,67	23,43	100		100		100		100		5.02.0.00.0.00.06.00 00 - Badan Pendapatan Daerah		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.03 - KEPEGAWAIAN					20.345.875.495,00		21.208.562.061,00		22.172.240.163,00		23.242.802.172,00		24.172.590.271,00	
5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					10.112.822.395,00		10.619.463.515,00		11.150.436.690,00		11.707.958.525,00		12.293.356.451,00	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	85,86	86	87	10.112.822.395,00	88	10.619.463.515,00	89	11.150.436.690,00	90	11.707.958.525,00	91	12.293.356.451,00	5.03.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					10.233.053.100,00		10.589.098.546,00		11.021.803.473,00		11.534.843.647,00		11.879.233.820,00	
Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi (Persentase)	84	86	88	3.000.000.000,00	90	3.150.000.000,00	92	3.207.500.000,00	94	3.250.000.000,00	96	3.472.875.000,00	5.03.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	86	87	88	4.941.998.615,00	89	5.189.098.546,00	90	5.464.303.473,00	91	5.754.843.647,00	92	5.754.843.647,00	5.03.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya (Persentase)	92	93	94	1.873.184.285,00	95	1.850.000.000,00	96	1.900.000.000,00	97	2.050.000.000,00	98	2.167.778.183,00	5.03.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik (Persentase)	93	94	95	417.870.200,00	96	400.000.000,00	97	450.000.000,00	98	480.000.000,00	99	483.736.990,00	5.03.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					1.075.000.000,00		1.125.000.000,00		1.125.000.000,00		1.125.000.000,00		1.125.000.000,00	
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					725.000.000,00		725.000.000,00		725.000.000,00		725.000.000,00		725.000.000,00	
Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah (Persentase)	60	65	70	725.000.000,00	75	725.000.000,00	80	725.000.000,00	85	725.000.000,00	90	725.000.000,00	5.01.5.05.0.00.02.00 00 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH					350.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	Persentase Inovasi Kabupaten yang Dilaporkan (%)	75	75	76	350.000.000,00	77	400.000.000,00	78	400.000.000,00	79	400.000.000,00	80	400.000.000,00	5.01.5.05.0.00.02.00 00 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH					30.259.074.860,00		32.309.328.481,00		33.733.293.930,00		34.938.822.789,00		36.202.956.845,00	
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					21.293.884.860,00		21.826.231.981,00		22.371.887.780,00		22.931.184.974,00		23.504.464.598,00	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	93,2833	93,40	93,50	21.293.884.860,00	93,75	21.826.231.981,00	94,00	22.371.887.780,00	94,25	22.931.184.974,00	94,50	23.504.464.598,00	6.01.0.00.0.00.01.00 00 - Inspektorat
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAA N PENGAWASAN					5.195.000.000,00		6.215.245.000,00		6.666.769.500,00		6.943.537.500,00		7.217.981.900,00	
Meningkatnya Kepatuhan atas pemenuhan Rekomendasi Tindakanlanjut Hasil Pemeriksaan	Tindaklanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Tahun Anggaran N-1 Eksternal (BPK) (%)	81,45	82	82,5	5.195.000.000,00	83	6.215.245.000,00	83,5	6.666.769.500,00	84	6.943.537.500,00	85	7.217.981.900,00	6.01.0.00.0.00.01.00 00 - Inspektorat
	Tindaklanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Tahun Anggaran N-1 Internal (APIP Kabupaten) (%)	73,29	73,5	74		74,5		75		80		85		6.01.0.00.0.00.01.00 00 - Inspektorat
	Tindaklanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Tahun Anggaran N-1 Internal (APIP Lainnya) (%)	59,93	65	67		70		75		80		85		6.01.0.00.0.00.01.00 00 - Inspektorat
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					3.770.190.000,00		4.267.851.500,00		4.694.636.650,00		5.064.100.315,00		5.480.510.347,00	
Meningkatnya Kualitas Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Presentase Pemenuhan Infrastruktur Peningkatan Kapabilitas APIP (%)	75	80	80	3.770.190.000,00	85	4.267.851.500,00	88	4.694.636.650,00	90	5.064.100.315,00	95	5.480.510.347,00	6.01.0.00.0.00.01.00 00 - Inspektorat
7.01 - KECAMATAN					122.636.212.136,00		129.353.705.353,00		134.834.905.887,00		141.085.762.636,00		148.807.736.192,00	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					84.017.485.253,00		85.808.200.000,00		87.250.500.000,00		88.940.499.990,00		91.169.500.000,00	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	81,39	82	82,45	2.679.007.800,00	83,27	2.732.200.000,00	84,10	2.815.500.000,00	84,95	2.880.499.990,00	86,10	3.030.500.000,00	7.01.0.00.0.00.01.00 00 - Kecamatan Wado
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	83,08	83,08	84,50	3.100.000.000,00	85,00	3.125.000.000,00	85,50	3.150.000.000,00	86,00	3.175.000.000,00	86,50	3.115.000.000,00	7.01.0.00.0.00.02.00 00 - Kecamatan Jatininggal

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	90,47	90,75	90,80	3.100.000.000,00	91	3.125.000.000,00	91,20	3.150.000.000,00	91,40	3.175.000.000,00	91,60	3.200.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - Kecamatan Darmaraja
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	85,83	85,95	86,00	2.950.000.000,00	86,50	3.150.000.000,00	87,00	3.250.000.000,00	87,50	3.300.000.000,00	88	3.350.000.000,00	7.01.0.00.0.00.10.00 00 - Kecamatan Buahdua
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	90,01	90,10	90,20	2.700.000.000,00	90,40	2.850.000.000,00	90,60	2.900.000.000,00	90,80	3.100.000.000,00	91,00	3.150.000.000,00	7.01.0.00.0.00.04.00 00 - Kecamatan Cibugel
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	85,20	86,00	86,00	3.500.000.000,00	87,00	3.551.000.000,00	88,00	3.600.000.000,00	89,00	3.675.000.000,00	90,00	3.700.000.000,00	7.01.0.00.0.00.22.00 00 - Kecamatan Cimalaka
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	85,58	85,58	86,00	3.300.000.000,00	87,00	3.350.000.000,00	88,00	3.400.000.000,00	89,00	3.475.000.000,00	90,00	3.675.000.000,00	7.01.0.00.0.00.14.00 00 - Kecamatan Cimanggung
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	88,45	88,50	88,50	2.850.000.000,00	88,60	2.950.000.000,00	88,70	3.115.000.000,00	88,80	3.200.000.000,00	89,00	3.300.000.000,00	7.01.0.00.0.00.23.00 00 - Kecamatan Cisarua
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	85,90	86,23	86,52	2.700.000.000,00	86,74	2.850.000.000,00	86,33	2.875.000.000,00	87,25	3.050.000.000,00	87,53	3.150.000.000,00	7.01.0.00.0.00.05.00 00 - Kecamatan Cisitu
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	85,36	86,5	87,14	3.150.000.000,00	88,00	3.200.000.000,00	88,50	3.275.000.000,00	89,57	3.335.000.000,00	89,89	3.475.000.000,00	7.01.0.00.0.00.07.00 00 - Kecamatan Conggeang
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	88,90	88,90	89,00	3.130.000.000,00	89,05	3.165.000.000,00	89,10	3.200.000.000,00	89,15	3.225.000.000,00	89,20	3.350.000.000,00	7.01.0.00.0.00.19.00 00 - Kecamatan Ganeas
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	85,956	85,98	86	2.700.000.000,00	86,20	2.750.000.000,00	86,35	2.800.000.000,00	86,50	2.875.000.000,00	86,75	2.915.000.000,00	7.01.0.00.0.00.26.00 00 - Kecamatan Jatigede
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	86,66	86,66	87,20	3.250.000.000,00	88,00	3.275.000.000,00	88,60	3.300.000.000,00	89,00	3.365.000.000,00	89,50	3.500.000.000,00	7.01.0.00.0.00.15.00 00 - Kecamatan Jatinangor
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	80,83	81,44	82,25	3.200.000.000,00	83,07	3.250.000.000,00	83,90	3.275.000.000,00	84,74	3.300.000.000,00	85,58	3.400.000.000,00	7.01.0.00.0.00.13.00 00 - Kecamatan Pamulihan
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	85,07	86,17	86,23	2.808.477.453,00	87,06	2.850.000.000,00	88,73	2.875.000.000,00	89,56	2.900.000.000,00	90,00	3.000.000.000,00	7.01.0.00.0.00.08.00 00 - Kecamatan Paseh
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	87,95	88,00	88,00	2.700.000.000,00	88,05	2.750.000.000,00	88,22	2.850.000.000,00	88,41	2.975.000.000,00	88,50	3.050.000.000,00	7.01.0.00.0.00.16.00 00 - Kecamatan Rancakalong
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	81,32	82,45	83,20	3.250.000.000,00	84,25	3.275.000.000,00	85,30	3.300.000.000,00	86,25	3.350.000.000,00	87,15	3.399.000.000,00	7.01.0.00.0.00.06.00 00 - Kecamatan Situraja
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	82,85	82,85	83,08	3.300.000.000,00	84,20	3.350.000.000,00	85,15	3.375.000.000,00	86,00	3.400.000.000,00	87,10	3.500.000.000,00	7.01.0.00.0.00.12.00 00 - Kecamatan Sukasari
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	85,88	85,89	86,38	6.500.000.000,00	86,88	6.650.000.000,00	87,38	6.750.000.000,00	87,88	6.850.000.000,00	88,38	6.950.000.000,00	7.01.0.00.0.00.17.00 00 - Kecamatan Sumedang Selatan
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	85,05	85,75	86,20	5.665.000.000,00	86,75	5.700.000.000,00	87,20	5.725.000.000,00	87,75	5.750.000.000,00	88,20	5.850.000.000,00	7.01.0.00.0.00.18.00 00 - Kecamatan Sumedang Utara
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	85,75	86,5	86,80	2.750.000.000,00	87,75	2.775.000.000,00	88,80	2.815.000.000,00	89,75	2.875.000.000,00	90,00	2.950.000.000,00	7.01.0.00.0.00.09.00 00 - Kecamatan Surian

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	80,80	82,28	83,32	2.550.000.000,00	84,30	2.650.000.000,00	85,35	2.700.000.000,00	86,38	2.735.000.000,00	87,40	2.815.000.000,00	7.01.0.00.0.00.21.00 00 - Kecamatan Tanjungmedar
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	82,62	83,2	83,85	2.800.000.000,00	84,55	2.835.000.000,00	85,35	2.875.000.000,00	86,10	2.900.000.000,00	87,20	2.975.000.000,00	7.01.0.00.0.00.20.00 00 - Kecamatan Tanjungkerta
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	85,86	85,89	86,00	3.100.000.000,00	86,50	3.150.000.000,00	87,00	3.215.000.000,00	87,50	3.275.000.000,00	88,00	3.350.000.000,00	7.01.0.00.0.00.11.00 00 - Kecamatan Tanjungsari
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	85,89	86,10	86,60	2.550.000.000,00	87,35	2.715.000.000,00	88,10	2.765.000.000,00	88,95	2.850.000.000,00	89,75	2.975.000.000,00	7.01.0.00.0.00.24.00 00 - Kecamatan Tomo
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	85,78	86,1	86,51	3.735.000.000,00	87,29	3.785.000.000,00	88,10	3.900.000.000,00	88,96	3.950.000.000,00	89,86	4.045.000.000,00	7.01.0.00.0.00.25.00 00 - Kecamatan Ujungjaya
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					15.314.559.661,00		16.750.264.828,00		18.158.011.310,00		19.706.823.941,00		21.423.009.677,00	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase masyarakat yang diberikana layanan di Kecamatan (%)	100	100	100	553.000.000,00	100	563.000.000,00	100	575.000.000,00	100	587.000.000,00	100	601.000.000,00	7.01.0.00.0.00.10.00 00 - Kecamatan Buahdua
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase masyarakat yang diberikana layanan di Kecamatan (%)	100	100	100	847.550.000,00	100	932.305.000,00	100	1.025.535.500,00	100	1.128.089.050,00	100	1.240.897.955,00	7.01.0.00.0.00.04.00 00 - Kecamatan Cibugel
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase masyarakat yang diberikana layanan di Kecamatan (%)	100	100	100	109.518.796,00	100	120.470.676,00	100	132.517.743,00	100	145.769.518,00	100	160.346.470,00	7.01.0.00.0.00.22.00 00 - Kecamatan Cimalaka
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase masyarakat yang diberikana layanan di Kecamatan (%)	100	100	100	701.100.000,00	100	708.360.000,00	100	716.346.000,00	100	725.130.600,00	100	734.793.500,00	7.01.0.00.0.00.14.00 00 - Kecamatan Cimanggung
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase masyarakat yang diberikana layanan di Kecamatan (%)	100	100	100	498.500.000,00	100	548.350.000,00	100	603.185.000,00	100	663.503.500,00	100	729.853.850,00	7.01.0.00.0.00.23.00 00 - Kecamatan Cisarua
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase masyarakat yang diberikana layanan di Kecamatan (%)	100	100	100	557.500.000,00	100	567.500.000,00	100	575.000.000,00	100	582.000.000,00	100	589.000.000,00	7.01.0.00.0.00.05.00 00 - Kecamatan Cisitu
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase masyarakat yang diberikana layanan di Kecamatan (%)	100	100	100	748.550.000,00	100	823.405.000,00	100	905.745.500,00	100	996.320.050,00	100	1.095.952.055,00	7.01.0.00.0.00.07.00 00 - Kecamatan Conggeang
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase masyarakat yang diberikana layanan di Kecamatan (%)	100	100	100	563.500.000,00	100	643.850.000,00	100	705.835.000,00	100	774.018.500,00	100	849.020.350,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - Kecamatan Darmaraja

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase masyarakat yang diberikana layanan di Kecamatan (%)	100	100	100	498.500.000,00	100	548.350.000,00	100	603.185.000,00	100	663.503.500,00	100	729.853.850,00	7.01.0.00.0.00.19.00 00 - Kecamatan Ganeas
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase masyarakat yang diberikana layanan di Kecamatan (%)	100	100	100	665.950.000,00	100	791.000.000,00	100	811.500.000,00	100	833.302.500,00	100	874.576.250,00	7.01.0.00.0.00.26.00 00 - Kecamatan Jatigede
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase masyarakat yang diberikana layanan di Kecamatan (%)	100	100	100	593.500.000,00	100	652.850.000,00	100	718.135.000,00	100	789.948.500,00	100	868.943.350,00	7.01.0.00.0.00.15.00 00 - Kecamatan Jatinangor
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase masyarakat yang diberikana layanan di Kecamatan (%)	100	100	100	558.128.000,00	100	571.000.000,00	100	628.100.000,00	100	690.910.000,00	100	760.001.000,00	7.01.0.00.0.00.02.00 00 - Kecamatan Jatinunggal
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase masyarakat yang diberikana layanan di Kecamatan (%)	100	100	100	750.000.000,00	100	825.000.000,00	100	907.500.000,00	100	998.250.000,00	100	1.098.075.000,00	7.01.0.00.0.00.13.00 00 - Kecamatan Pamulihan
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase masyarakat yang diberikana layanan di Kecamatan (%)	100	100	100	611.000.000,00	100	672.600.000,00	100	739.700.000,00	100	811.000.000,00	100	892.000.000,00	7.01.0.00.0.00.08.00 00 - Kecamatan Paseh
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase masyarakat yang diberikana layanan di Kecamatan (%)	100	100	100	621.845.000,00	100	674.309.500,00	100	732.020.450,00	100	795.502.495,00	100	865.332.745,00	7.01.0.00.0.00.16.00 00 - Kecamatan Rancakalong
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase masyarakat yang diberikana layanan di Kecamatan (%)	100	100	100	505.500.000,00	100	556.050.000,00	100	611.655.000,00	100	672.820.500,00	100	740.102.550,00	7.01.0.00.0.00.06.00 00 - Kecamatan Situraja
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase masyarakat yang diberikana layanan di Kecamatan (%)	100	100	100	749.050.000,00	100	823.955.000,00	100	906.350.500,00	100	996.985.550,00	100	1.096.684.105,00	7.01.0.00.0.00.12.00 00 - Kecamatan Sukasari
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase masyarakat yang diberikana layanan di Kecamatan (%)	100	100	100	588.500.000,00	100	657.350.000,00	100	723.085.000,00	100	795.393.500,00	100	872.932.850,00	7.01.0.00.0.00.17.00 00 - Kecamatan Sumedang Selatan
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase masyarakat yang diberikana layanan di Kecamatan (%)	100	100	100	596.500.000,00	100	656.150.000,00	100	721.765.000,00	100	793.941.500,00	100	873.335.650,00	7.01.0.00.0.00.18.00 00 - Kecamatan Sumedang Utara
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase masyarakat yang diberikana layanan di Kecamatan (%)	100	100	100	614.062.865,00	100	675.469.152,00	100	743.016.067,00	100	817.317.673,00	100	899.049.441,00	7.01.0.00.0.00.09.00 00 - Kecamatan Surian

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase masyarakat yang diberikana layanan di Kecamatan (%)	100	100	100	132.000.000,00	100	145.200.000,00	100	159.720.000,00	100	175.692.000,00	100	193.261.200,00	7.01.0.00.0.00.21.00 00 - Kecamatan Tanjungmedar
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase masyarakat yang diberikana layanan di Kecamatan (%)	100	100	100	556.755.000,00	100	497.285.500,00	100	507.014.050,00	100	523.715.455,00	100	536.617.001,00	7.01.0.00.0.00.20.00 00 - Kecamatan Tanjungkerta
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase masyarakat yang diberikana layanan di Kecamatan (%)	100	100	100	546.000.000,00	100	620.600.000,00	100	682.660.000,00	100	750.926.000,00	100	826.018.600,00	7.01.0.00.0.00.11.00 00 - Kecamatan Tanjungsari
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase masyarakat yang diberikana layanan di Kecamatan (%)	100	100	100	608.500.000,00	100	669.350.000,00	100	736.285.000,00	100	809.913.000,00	100	890.904.300,00	7.01.0.00.0.00.24.00 00 - Kecamatan Tomo
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase masyarakat yang diberikana layanan di Kecamatan (%)	100	100	100	963.550.000,00	100	1.147.905.000,00	100	1.262.695.500,00	100	1.388.965.050,00	100	1.527.861.555,00	7.01.0.00.0.00.25.00 00 - Kecamatan Ujungjaya
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase masyarakat yang diberikana layanan di Kecamatan (%)	100	100	100	576.000.000,00	100	658.600.000,00	100	724.460.000,00	100	796.905.500,00	100	876.596.050,00	7.01.0.00.0.00.01.00 00 - Kecamatan Wado
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					16.386.272.898,00		18.472.891.469,00		20.367.830.615,00		22.544.238.676,00		25.049.283.044,00	
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif (%)	100	100	100	185.000.000,00	100	195.000.000,00	100	204.000.000,00	100	214.000.000,00	100	223.000.000,00	7.01.0.00.0.00.10.00 00 - Kecamatan Buahdua
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif (%)	100	100	100	352.000.000,00	100	387.200.000,00	100	425.920.000,00	100	468.512.000,00	100	515.363.200,00	7.01.0.00.0.00.04.00 00 - Kecamatan Cibugel
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif (%)	100	100	100	514.464.158,00	100	565.910.574,00	100	622.501.631,00	100	684.751.794,00	100	753.226.974,00	7.01.0.00.0.00.22.00 00 - Kecamatan Cimalaka
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif (%)	100	100	100	423.500.000,00	100	465.850.000,00	100	512.435.000,00	100	563.678.500,00	100	693.251.350,00	7.01.0.00.0.00.14.00 00 - Kecamatan Cimanggung
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif (%)	100	100	100	195.400.000,00	100	204.000.000,00	100	224.000.000,00	100	244.000.000,00	100	262.000.000,00	7.01.0.00.0.00.05.00 00 - Kecamatan Cisitua
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif (%)	100	100	100	161.000.000,00	100	192.100.000,00	100	211.310.000,00	100	232.441.000,00	100	255.685.100,00	7.01.0.00.0.00.23.00 00 - Kecamatan Cisarua
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif (%)	100	100	100	511.500.000,00	100	562.650.000,00	100	618.915.000,00	100	680.806.500,00	100	748.887.150,00	7.01.0.00.0.00.07.00 00 - Kecamatan Conggeang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif (%)	100	100	100	230.000.000,00	100	283.000.000,00	100	308.300.000,00	100	336.130.000,00	100	366.743.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - Kecamatan Darmaraja
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif (%)	100	100	100	190.000.000,00	100	209.000.000,00	100	229.900.000,00	100	252.890.000,00	100	278.179.000,00	7.01.0.00.0.00.19.00 00 - Kecamatan Ganeas
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif (%)	100	100	100	239.335.200,00	100	270.000.000,00	100	283.500.000,00	100	297.675.000,00	100	312.558.750,00	7.01.0.00.0.00.26.00 00 - Kecamatan Jatigede
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif (%)	100	100	100	329.500.000,00	100	362.450.000,00	100	398.695.000,00	100	438.564.500,00	100	482.420.950,00	7.01.0.00.0.00.15.00 00 - Kecamatan Jatinangor
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif (%)	100	100	100	220.000.000,00	100	360.000.000,00	100	396.000.000,00	100	435.600.000,00	100	479.160.000,00	7.01.0.00.0.00.02.00 00 - Kecamatan Jatinunggal
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif (%)	100	100	100	360.000.000,00	100	476.000.000,00	100	643.600.000,00	100	887.960.000,00	100	1.246.756.000,00	7.01.0.00.0.00.13.00 00 - Kecamatan Pamulihan
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif (%)	100	100	100	200.000.000,00	100	219.500.000,00	100	239.000.000,00	100	259.000.000,00	100	283.000.000,00	7.01.0.00.0.00.08.00 00 - Kecamatan Paseh
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif (%)	100	100	100	273.000.000,00	100	285.000.000,00	100	295.000.000,00	100	300.000.000,00	100	300.000.000,00	7.01.0.00.0.00.16.00 00 - Kecamatan Rancakalong
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif (%)	100	100	100	196.000.000,00	100	215.600.000,00	100	237.160.000,00	100	260.876.000,00	100	286.963.600,00	7.01.0.00.0.00.06.00 00 - Kecamatan Situraja
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif (%)	100	100	100	407.000.000,00	100	447.700.000,00	100	492.470.000,00	100	541.717.000,00	100	595.888.700,00	7.01.0.00.0.00.12.00 00 - Kecamatan Sukasari
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif (%)	100	100	100	4.825.800.000,00	100	5.326.880.000,00	100	5.859.568.000,00	100	6.445.524.800,00	100	7.090.077.280,00	7.01.0.00.0.00.17.00 00 - Kecamatan Sumedang Selatan
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif (%)	100	100	100	4.170.600.000,00	100	4.587.660.000,00	100	5.046.426.000,00	100	5.551.068.600,00	100	6.106.175.460,00	7.01.0.00.0.00.18.00 00 - Kecamatan Sumedang Utara
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif (%)	100	100	100	614.226.285,00	100	675.648.914,00	100	743.213.805,00	100	817.535.185,00	100	899.288.704,00	7.01.0.00.0.00.09.00 00 - Kecamatan Surian
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif (%)	100	100	100	490.986.255,00	100	540.084.881,00	100	594.093.369,00	100	653.502.706,00	100	718.852.976,00	7.01.0.00.0.00.21.00 00 - Kecamatan Tanjungmedar
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif (%)	100	100	100	137.841.000,00	100	151.625.100,00	100	166.787.610,00	100	183.466.371,00	100	201.813.008,00	7.01.0.00.0.00.20.00 00 - Kecamatan Tanjungkerta
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif (%)	100	100	100	140.000.000,00	100	179.000.000,00	100	196.900.000,00	100	216.590.000,00	100	238.249.000,00	7.01.0.00.0.00.11.00 00 - Kecamatan Tanjungsari

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif (%)	100	100	100	197.500.000,00	100	217.250.000,00	100	238.975.000,00	100	262.872.500,00	100	289.159.000,00	7.01.0.00.0.00.24.00 00 - Kecamatan Tomo
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif (%)	100	100	100	471.620.000,00	100	698.782.000,00	100	744.660.200,00	100	837.126.220,00	100	896.838.842,00	7.01.0.00.0.00.25.00 00 - Kecamatan Ujungjaya
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif (%)	100	100	100	350.000.000,00	100	395.000.000,00	100	434.500.000,00	100	477.950.000,00	100	525.745.000,00	7.01.0.00.0.00.01.00 00 - Kecamatan Wado
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					1.401.650.000,00		1.578.939.500,00		1.719.183.450,00		1.872.714.295,00		2.042.853.850,00	
Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan (%)	100	100	100	66.000.000,00	100	72.600.000,00	100	79.860.000,00	100	87.846.000,00	100	96.630.600,00	7.01.0.00.0.00.04.00 00 - Kecamatan Cibugel
Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan (%)	100	100	100	28.000.000,00	100	29.000.000,00	100	30.000.000,00	100	31.000.000,00	100	33.000.000,00	7.01.0.00.0.00.10.00 00 - Kecamatan Buahdua
Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan (%)	100	100	100	24.200.000,00	100	26.620.000,00	100	29.282.000,00	100	32.210.200,00	100	35.431.220,00	7.01.0.00.0.00.22.00 00 - Kecamatan Cimalaka
Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan (%)	100	100	100	88.000.000,00	100	96.800.000,00	100	106.480.000,00	100	117.128.000,00	100	128.840.800,00	7.01.0.00.0.00.14.00 00 - Kecamatan Cimanggung
Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan (%)	100	100	100	35.000.000,00	100	38.500.000,00	100	42.350.000,00	100	46.585.000,00	100	51.243.500,00	7.01.0.00.0.00.23.00 00 - Kecamatan Cisarua
Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan (%)	100	100	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	7.01.0.00.0.00.05.00 00 - Kecamatan Cisitua
Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan (%)	100	100	100	104.500.000,00	100	114.950.000,00	100	126.445.000,00	100	139.089.500,00	100	152.998.450,00	7.01.0.00.0.00.07.00 00 - Kecamatan Conggeang
Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan (%)	100	100	100	25.000.000,00	100	27.500.000,00	100	30.250.000,00	100	33.275.000,00	100	36.602.500,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - Kecamatan Darmaraja
Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan (%)	100	100	100	20.000.000,00	100	22.000.000,00	100	24.200.000,00	100	26.620.000,00	100	29.282.000,00	7.01.0.00.0.00.19.00 00 - Kecamatan Ganeas
Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan (%)	100	100	100	52.250.000,00	100	55.000.000,00	100	57.750.000,00	100	60.637.500,00	100	63.669.375,00	7.01.0.00.0.00.26.00 00 - Kecamatan Jatigede

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan (%)	100	100	100	50.000.000,00	100	55.000.000,00	100	60.500.000,00	100	66.550.000,00	100	73.205.000,00	7.01.0.00.0.00.15.00 00 - Kecamatan Jatinangor
Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan (%)	100	100	100	24.000.000,00	100	75.000.000,00	100	82.500.000,00	100	90.750.000,00	100	99.825.000,00	7.01.0.00.0.00.02.00 00 - Kecamatan Jatinunggal
Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan (%)	100	100	100	125.000.000,00	100	137.500.000,00	100	151.250.000,00	100	166.375.000,00	100	183.012.500,00	7.01.0.00.0.00.13.00 00 - Kecamatan Pamulihan
Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan (%)	100	100	100	45.000.000,00	100	50.000.000,00	100	55.000.000,00	100	60.000.000,00	100	66.000.000,00	7.01.0.00.0.00.08.00 00 - Kecamatan Paseh
Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan (%)	100	100	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	7.01.0.00.0.00.16.00 00 - Kecamatan Rancakalong
Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan (%)	100	100	100	40.000.000,00	100	64.000.000,00	100	70.400.000,00	100	77.440.000,00	100	85.184.000,00	7.01.0.00.0.00.06.00 00 - Kecamatan Situraja
Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan (%)	100	100	100	82.500.000,00	100	90.750.000,00	100	99.825.000,00	100	109.807.500,00	100	120.788.250,00	7.01.0.00.0.00.12.00 00 - Kecamatan Sukasari
Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan (%)	100	100	100	40.000.000,00	100	44.000.000,00	100	48.400.000,00	100	53.240.000,00	100	58.564.000,00	7.01.0.00.0.00.17.00 00 - Kecamatan Sumedang Selatan
Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan (%)	100	100	100	50.000.000,00	100	55.000.000,00	100	60.500.000,00	100	66.550.000,00	100	73.205.000,00	7.01.0.00.0.00.18.00 00 - Kecamatan Sumedang Utara
Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan (%)	100	100	100	24.200.000,00	100	26.620.000,00	100	29.282.000,00	100	32.210.200,00	100	35.431.220,00	7.01.0.00.0.00.09.00 00 - Kecamatan Surian
Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan (%)	100	100	100	44.000.000,00	100	48.400.000,00	100	53.240.000,00	100	58.564.000,00	100	64.420.400,00	7.01.0.00.0.00.21.00 00 - Kecamatan Tanjungmedar
Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan (%)	100	100	100	40.000.000,00	100	19.299.500,00	100	21.229.450,00	100	23.352.395,00	100	25.687.635,00	7.01.0.00.0.00.20.00 00 - Kecamatan Tanjungkerta
Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan (%)	100	100	100	50.000.000,00	100	55.000.000,00	100	60.500.000,00	100	66.550.000,00	100	73.205.000,00	7.01.0.00.0.00.11.00 00 - Kecamatan Tanjungsari
Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan (%)	100	100	100	60.000.000,00	100	66.000.000,00	100	72.600.000,00	100	79.860.000,00	100	87.846.000,00	7.01.0.00.0.00.24.00 00 - Kecamatan Tomo

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan (%)	100	100	100	79.000.000,00	100	86.900.000,00	100	95.590.000,00	100	105.149.000,00	100	115.663.900,00	7.01.0.00.0.00.25.00 00 - Kecamatan Ujungjaya
Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan (%)	100	0	100	75.000.000,00	100	92.500.000,00	100	101.750.000,00	100	111.925.000,00	100	123.117.500,00	7.01.0.00.0.00.01.00 00 - Kecamatan Wado
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					1.283.507.000,00		1.856.498.500,00		2.029.418.350,00		2.218.835.185,00		2.827.062.454,00	
Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase permasalahan/ pengaduan/ konflik sosial yang ditangani (%)	100	100	100	50.000.000,00	100	55.000.000,00	100	60.000.000,00	100	65.000.000,00	100	170.000.000,00	7.01.0.00.0.00.05.00 00 - Kecamatan Cisitu
Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase permasalahan/ pengaduan/ konflik sosial yang ditangani (%)	100	100	100	37.000.000,00	100	63.000.000,00	100	65.000.000,00	100	67.000.000,00	100	69.000.000,00	7.01.0.00.0.00.10.00 00 - Kecamatan Buahdua
Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase permasalahan/ pengaduan/ konflik sosial yang ditangani (%)	100	100	100	46.200.000,00	100	50.820.000,00	100	55.902.000,00	100	61.492.200,00	100	67.641.420,00	7.01.0.00.0.00.04.00 00 - Kecamatan Cibugel
Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase permasalahan/ pengaduan/ konflik sosial yang ditangani (%)	100	100	100	42.301.600,00	100	46.531.760,00	100	51.184.936,00	100	56.303.430,00	100	61.933.773,00	7.01.0.00.0.00.22.00 00 - Kecamatan Cimalaka
Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase permasalahan/ pengaduan/ konflik sosial yang ditangani (%)	100	100	100	60.000.000,00	100	60.500.000,00	100	66.550.000,00	100	73.205.000,00	100	80.525.500,00	7.01.0.00.0.00.14.00 00 - Kecamatan Cimangung
Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase permasalahan/ pengaduan/ konflik sosial yang ditangani (%)	100	100	100	40.000.000,00	100	44.000.000,00	100	48.400.000,00	100	53.240.000,00	100	58.564.000,00	7.01.0.00.0.00.23.00 00 - Kecamatan Cisarua
Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase permasalahan/ pengaduan/ konflik sosial yang ditangani (%)	100	100	100	44.000.000,00	100	48.400.000,00	100	53.240.000,00	100	58.564.000,00	100	164.420.400,00	7.01.0.00.0.00.07.00 00 - Kecamatan Conggeang
Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase permasalahan/ pengaduan/ konflik sosial yang ditangani (%)	100	100	100	22.000.000,00	100	24.200.000,00	100	26.620.000,00	100	29.282.000,00	100	32.210.200,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - Kecamatan Darmaraja
Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase permasalahan/ pengaduan/ konflik sosial yang ditangani (%)	100	100	100	30.000.000,00	100	33.000.000,00	100	36.300.000,00	100	39.930.000,00	100	43.923.000,00	7.01.0.00.0.00.19.00 00 - Kecamatan Ganeas

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase permasalahan/ pengaduan/ konflik sosial yang ditangani (%)	100	100	100	41.500.000,00	100	50.000.000,00	100	52.500.000,00	100	55.125.000,00	100	57.881.250,00	7.01.0.00.0.00.26.00 00 - Kecamatan Jatigede
Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase permasalahan/ pengaduan/ konflik sosial yang ditangani (%)	100	100	100	46.500.000,00	100	151.150.000,00	100	166.265.000,00	100	182.891.500,00	100	201.180.650,00	7.01.0.00.0.00.15.00 00 - Kecamatan Jatinangor
Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase permasalahan/ pengaduan/ konflik sosial yang ditangani (%)	100	100	100	21.372.000,00	100	50.000.000,00	100	55.000.000,00	100	60.500.000,00	100	66.550.000,00	7.01.0.00.0.00.02.00 00 - Kecamatan Jatinunggal
Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase permasalahan/ pengaduan/ konflik sosial yang ditangani (%)	100	100	100	75.000.000,00	100	82.500.000,00	100	90.750.000,00	100	99.825.000,00	100	109.807.500,00	7.01.0.00.0.00.13.00 00 - Kecamatan Pamulihan
Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase permasalahan/ pengaduan/ konflik sosial yang ditangani (%)	100	100	100	33.000.000,00	100	36.300.000,00	100	39.000.000,00	100	42.000.000,00	100	46.000.000,00	7.01.0.00.0.00.08.00 00 - Kecamatan Paseh
Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase permasalahan/ pengaduan/ konflik sosial yang ditangani (%)	100	100	100	45.000.000,00	100	45.000.000,00	100	45.000.000,00	100	45.000.000,00	100	45.000.000,00	7.01.0.00.0.00.16.00 00 - Kecamatan Rancakalong
Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase permasalahan/ pengaduan/ konflik sosial yang ditangani (%)	100	100	100	30.000.000,00	100	133.000.000,00	100	146.300.000,00	100	160.930.000,00	100	177.023.000,00	7.01.0.00.0.00.06.00 00 - Kecamatan Situraja
Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase permasalahan/ pengaduan/ konflik sosial yang ditangani (%)	100	100	100	49.500.000,00	100	54.450.000,00	100	59.895.000,00	100	65.884.500,00	100	72.472.950,00	7.01.0.00.0.00.12.00 00 - Kecamatan Sukasari
Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase permasalahan/ pengaduan/ konflik sosial yang ditangani (%)	100	100	100	35.000.000,00	100	110.000.000,00	100	121.000.000,00	100	133.100.000,00	100	146.410.000,00	7.01.0.00.0.00.17.00 00 - Kecamatan Sumedang Selatan
Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase permasalahan/ pengaduan/ konflik sosial yang ditangani (%)	100	100	100	30.000.000,00	100	133.000.000,00	100	146.300.000,00	100	160.930.000,00	100	177.023.000,00	7.01.0.00.0.00.18.00 00 - Kecamatan Sumedang Utara
Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase permasalahan/ pengaduan/ konflik sosial yang ditangani (%)	100	100	100	61.153.400,00	100	67.268.740,00	100	73.995.614,00	100	81.395.175,00	100	189.534.693,00	7.01.0.00.0.00.09.00 00 - Kecamatan Surian

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase permasalahan/ pengaduan/ konflik sosial yang ditangani (%)	100	100	100	33.000.000,00	100	36.300.000,00	100	39.930.000,00	100	43.923.000,00	100	48.315.300,00	7.01.0.00.0.00.21.00 00 - Kecamatan Tanjungmedar
Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase permasalahan/ pengaduan/ konflik sosial yang ditangani (%)	100	100	100	45.980.000,00	100	50.578.000,00	100	55.635.800,00	100	61.199.380,00	100	67.319.318,00	7.01.0.00.0.00.20.00 00 - Kecamatan Tanjungkerta
Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase permasalahan/ pengaduan/ konflik sosial yang ditangani (%)	100	100	100	45.000.000,00	100	59.500.000,00	100	65.450.000,00	100	71.995.000,00	100	79.194.500,00	7.01.0.00.0.00.11.00 00 - Kecamatan Tanjungsari
Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase permasalahan/ pengaduan/ konflik sosial yang ditangani (%)	100	100	100	170.000.000,00	100	187.000.000,00	100	205.700.000,00	100	226.270.000,00	100	248.897.000,00	7.01.0.00.0.00.24.00 00 - Kecamatan Tomo
Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase permasalahan/ pengaduan/ konflik sosial yang ditangani (%)	100	100	100	100.000.000,00	100	110.000.000,00	100	121.000.000,00	100	133.100.000,00	100	246.410.000,00	7.01.0.00.0.00.25.00 00 - Kecamatan Ujungjaya
Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase permasalahan/ pengaduan/ konflik sosial yang ditangani (%)	100	100	100	50.000.000,00	100	75.000.000,00	100	82.500.000,00	100	90.750.000,00	100	99.825.000,00	7.01.0.00.0.00.01.00 00 - Kecamatan Wado
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					4.232.737.324,00		4.886.911.056,00		5.309.962.162,00		5.802.650.549,00		6.296.027.167,00	
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	Persentase desa dengan nilai sakip desa minimal berkategori baik (%)	100	100	100	100.000.000,00	100	130.000.000,00	100	138.000.000,00	100	149.000.000,00	100	160.000.000,00	7.01.0.00.0.00.10.00 00 - Kecamatan Buahdua
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	Persentase desa dengan nilai sakip desa minimal berkategori baik (%)	100	100	100	220.000.000,00	100	242.000.000,00	100	266.200.000,00	100	292.820.000,00	100	322.102.000,00	7.01.0.00.0.00.04.00 00 - Kecamatan Cibugel
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	Persentase desa dengan nilai sakip desa minimal berkategori baik (%)	100	100	100	91.885.464,00	100	101.074.010,00	100	111.181.411,00	100	122.299.553,00	100	134.529.508,00	7.01.0.00.0.00.22.00 00 - Kecamatan Cimalaka
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	Persentase desa dengan nilai sakip desa minimal berkategori baik (%)	100	100	100	199.500.000,00	100	175.450.000,00	100	237.995.000,00	100	212.294.500,00	100	233.523.950,00	7.01.0.00.0.00.14.00 00 - Kecamatan Cimanggung
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	Persentase desa dengan nilai sakip desa minimal berkategori baik (%)	100	100	100	100.000.000,00	100	110.000.000,00	100	121.000.000,00	100	133.100.000,00	100	146.410.000,00	7.01.0.00.0.00.23.00 00 - Kecamatan Cisarua

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	Persentase desa dengan nilai sakip desa minimal berkategori baik (%)	100	100	100	152.000.000,00	100	168.000.000,00	100	181.000.000,00	100	197.000.000,00	100	216.000.000,00	7.01.0.00.0.00.05.00 00 - Kecamatan Cisitu
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	Persentase desa dengan nilai sakip desa minimal berkategori baik (%)	100	100	100	282.000.000,00	100	320.200.000,00	100	352.220.000,00	100	387.442.000,00	100	426.186.200,00	7.01.0.00.0.00.07.00 00 - Kecamatan Conggeang
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	Persentase desa dengan nilai sakip desa minimal berkategori baik (%)	100	100	100	62.000.000,00	100	98.200.000,00	100	105.020.000,00	100	112.522.000,00	100	120.774.200,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - Kecamatan Darmaraja
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	Persentase desa dengan nilai sakip desa minimal berkategori baik (%)	100	100	100	115.000.000,00	100	93.500.000,00	100	102.850.000,00	100	163.135.000,00	100	124.448.500,00	7.01.0.00.0.00.19.00 00 - Kecamatan Ganeas
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	Persentase desa dengan nilai sakip desa minimal berkategori baik (%)	100	100	100	197.125.000,00	100	207.500.000,00	100	217.875.000,00	100	228.768.750,00	100	240.207.188,00	7.01.0.00.0.00.26.00 00 - Kecamatan Jatigede
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	Persentase desa dengan nilai sakip desa minimal berkategori baik (%)	100	100	100	215.000.000,00	100	236.500.000,00	100	260.150.000,00	100	286.165.000,00	100	314.781.500,00	7.01.0.00.0.00.15.00 00 - Kecamatan Jatinangor
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	Persentase desa dengan nilai sakip desa minimal berkategori baik (%)	100	100	100	138.480.000,00	100	232.500.000,00	100	255.750.000,00	100	281.325.000,00	100	309.457.500,00	7.01.0.00.0.00.02.00 00 - Kecamatan Jatinunggal
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	Persentase desa dengan nilai sakip desa minimal berkategori baik (%)	100	100	100	185.000.000,00	100	203.500.000,00	100	223.850.000,00	100	246.235.000,00	100	270.858.500,00	7.01.0.00.0.00.13.00 00 - Kecamatan Pamulihan
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	Persentase desa dengan nilai sakip desa minimal berkategori baik (%)	100	100	100	172.900.000,00	100	190.100.000,00	100	204.100.000,00	100	220.000.000,00	100	238.000.000,00	7.01.0.00.0.00.08.00 00 - Kecamatan Paseh
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	Persentase desa dengan nilai sakip desa minimal berkategori baik (%)	100	100	100	60.000.000,00	100	60.000.000,00	100	60.000.000,00	100	60.000.000,00	100	60.000.000,00	7.01.0.00.0.00.16.00 00 - Kecamatan Rancakalong
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	Persentase desa dengan nilai sakip desa minimal berkategori baik (%)	100	100	100	145.000.000,00	100	179.500.000,00	100	197.450.000,00	100	217.195.000,00	100	238.914.500,00	7.01.0.00.0.00.06.00 00 - Kecamatan Situraja
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	Persentase desa dengan nilai sakip desa minimal berkategori baik (%)	100	100	100	286.000.000,00	100	314.600.000,00	100	306.735.000,00	100	337.408.500,00	100	371.149.350,00	7.01.0.00.0.00.12.00 00 - Kecamatan Sukasari
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	Persentase desa dengan nilai sakip desa minimal berkategori baik (%)	100	100	100	138.000.000,00	100	151.800.000,00	100	166.980.000,00	100	183.678.000,00	100	202.045.800,00	7.01.0.00.0.00.17.00 00 - Kecamatan Sumedang Selatan
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	Persentase desa dengan nilai sakip desa minimal berkategori baik (%)	100	100	100	180.000.000,00	100	198.000.000,00	100	217.800.000,00	100	239.580.000,00	100	263.538.000,00	7.01.0.00.0.00.18.00 00 - Kecamatan Sumedang Utara

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	Persentase desa dengan nilai sakip desa minimal berkategori baik (%)	100	100	100	158.284.860,00	100	174.113.346,00	100	155.224.681,00	100	170.747.149,00	100	187.821.864,00	7.01.0.00.0.00.09.00 00 - Kecamatan Surian
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	Persentase desa dengan nilai sakip desa minimal berkategori baik (%)	100	100	100	145.200.000,00	100	159.720.000,00	100	175.692.000,00	100	193.261.200,00	100	212.587.320,00	7.01.0.00.0.00.21.00 00 - Kecamatan Tanjungmedar
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	Persentase desa dengan nilai sakip desa minimal berkategori baik (%)	100	100	100	152.862.000,00	100	140.503.700,00	100	152.724.070,00	100	158.492.397,00	100	171.491.637,00	7.01.0.00.0.00.20.00 00 - Kecamatan Tanjungkerta
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	Persentase desa dengan nilai sakip desa minimal berkategori baik (%)	100	100	100	75.000.000,00	100	162.500.000,00	100	178.750.000,00	100	196.625.000,00	100	216.287.500,00	7.01.0.00.0.00.11.00 00 - Kecamatan Tanjungsari
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	Persentase desa dengan nilai sakip desa minimal berkategori baik (%)	100	100	100	115.000.000,00	100	126.500.000,00	100	139.150.000,00	100	153.065.000,00	100	168.371.500,00	7.01.0.00.0.00.24.00 00 - Kecamatan Tomo
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	Persentase desa dengan nilai sakip desa minimal berkategori baik (%)	100	100	100	314.000.000,00	100	455.400.000,00	100	500.940.000,00	100	551.034.000,00	100	606.137.400,00	7.01.0.00.0.00.25.00 00 - Kecamatan Ujungjaya
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	Persentase desa dengan nilai sakip desa minimal berkategori baik (%)	100	100	100	232.500.000,00	100	255.750.000,00	100	281.325.000,00	100	309.457.500,00	100	340.403.250,00	7.01.0.00.0.00.01.00 00 - Kecamatan Wado
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					12.835.813.800,00		14.229.493.450,00		39.096.986.500,00		86.960.689.550,00		14.521.519.250,00	
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.573.224.800,00		5.272.525.000,00		5.401.917.500,00		5.539.919.250,00		5.239.919.250,00	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	87,55	87,90	88,50	4.573.224.800,00	89,50	5.272.525.000,00	91,00	5.401.917.500,00	92,50	5.539.919.250,00	94,00	5.239.919.250,00	8.01.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					1.150.000.000,00		1.200.000.000,00		1.250.000.000,00		1.300.000.000,00		1.300.000.000,00	
Meningkatnya Penerapan hasil Pembinaan Ideologi Pancasila serta Wawasan Kebangsaan	Persentase Pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (%)	88	92	94	1.150.000.000,00	96	1.200.000.000,00	98	1.250.000.000,00	100	1.300.000.000,00	100	1.300.000.000,00	8.01.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN					2.837.589.000,00		3.054.468.450,00		27.612.069.000,00		55.139.170.300,00		3.000.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK														
Meningkatnya pemahaman Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik	Persentase peningkatan peran parpol yang melaksanakan pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik (%)	80	83	86	2.837.589.000,00	90	3.054.468.450,00	95	27.612.069.000,00	100	55.139.170.300,00	100	3.000.000.000,00	8.01.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					525.000.000,00		625.000.000,00		651.250.000,00		670.062.500,00		670.062.500,00	
Meningkatnya peran organisasi kemasyarakatan	Cakupan Ormas Yang di Bina Kategori Aktif (%)	70	80	85	525.000.000,00	90	625.000.000,00	100	651.250.000,00	100	670.062.500,00	100	670.062.500,00	8.01.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					450.000.000,00		575.000.000,00		618.750.000,00		673.437.500,00		673.437.500,00	
Meningkatnya Penerapan hasil Pembinaan, Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase peningkatan orang yang terbina dalam aspek pemahaman Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya (%)	70	75	80	450.000.000,00	85	575.000.000,00	90	618.750.000,00	100	673.437.500,00	100	673.437.500,00	8.01.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					3.300.000.000,00		3.502.500.000,00		3.563.000.000,00		23.638.100.000,00		3.638.100.000,00	
Meningkatnya Kewaspadaan Daerah	Persentase potensi Konflik yang diselesaikan (%)	100	100	100	3.300.000.000,00	100	3.502.500.000,00	100	3.563.000.000,00	100	23.638.100.000,00	100	3.638.100.000,00	8.01.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
TOTAL KESELURUHAN					3.101.417.490.043,00		3.227.930.930.785,18		3.379.482.717.277,69		3.520.313.659.438,20		3.547.392.696.525,61	

Sumber: BAPPPEDA (diolah), 2025

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 berpedoman pada Indikator Utama Pembangunan (IUP) sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) indikator sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045. Indikator tersebut merupakan indikator terseleksi untuk menjadi dasar dan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah periode Tahun 2025-2029. Lebih lanjut, penetapan indikator kinerja daerah (IKD) terhadap capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang didalamnya memuat Indikator Kinerja Kunci (IKK). Adapun Indikator Kinerja Utama disajikan dalam tabel 4.2 dan Indikator Kinerja Daerah disajikan dalam tabel 4.3 di bawah ini.

Tabel 4.2 Capaian Realisasi Indikator Makro 2024 dan Target Indikator Makro Tahun 2025-2029

No	Indikator	Satuan	Baseline 2024	TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	74,57	74,77	75,45	75,98	76,52	77,08	77,65
2	Tingkat Kemiskinan	Persen	9,10	9,09 - 8,23	8,34	8,49 - 7,41	8,24 - 7,08	8,00 - 6,76	7,76 - 6,44
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	6,16	6,13 - 6,68	5,41	5,39 - 6,49	5,11 - 6,29	4,83 - 6,09	4,55 - 5,89
4	Rasio Gini	Indeks	0,337	0,360 - 0,335	0,334	0,387 - 0,333	0,386 - 0,332	0,385 - 0,331	0,382 - 0,330
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,05	4,79 - 5,20	6,03	4.29 - 6.34	4.36 - 6.41	4.40 - 6.45	4.47 - 6.52
6	PDRB per Kapita (ADHB)	Juta Rupiah	39,7	39,55 – 41,74	46,67	47,7 – 49,45	51,33 – 54,13	55,18 – 61,25	59,5 – 65,71
7	Penurunan Intensitas Emisi GRK	Persen	N/A	6,05	6,44	6,87	7,42	7,96	8,40

Sumber: BAPPPEDA (diolah), 2025

Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	74,57	74,77	75,45	75,98	76,52	77,08	77,65	
2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,05	4,79-5,20	6,03	4,29-6,34	4,36-6,41	4,40-6,45	4,47-6,52	
3.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	89,65	90	91	92	93	94	95	
4.	Indeks Risiko Bencana	Indeks	127,24	119,43	111,62	103,81	96	88,19	80,38	
5.	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	60,83	65,29	67,29	69,29	71,29	73,29	75,29	
6.	Tingkat kemiskinan	%	9,10	9,09-8,23	8,34	8,49-7,41	8,24-7,08	8,00-6,76	7,76-6,44	
7.	Rasio pajak daerah terhadap PDRB	(%)	0,515	0,519	0,523	0,528	0,535	0,542	0,550	
8.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	poin	62,47	66,25	66,50	66,76	67,01	67,26	67,51	
9.	Nilai Skor LPPD Kabupaten	Skor	3,64 (2023)	3,647	3,648	3,649	3,65	3,651	3,652	
10.	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	%	54,47	55,12	55,76	56,40	56,40	57,67	58,29	
11.	Indeks Kualitas Infrastruktur	Indeks	75,88	75,89	76,18	76,48	76,78	77,07	77,37	
12.	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	77,6	77,78	78,23	78,90	79,15	79,95	80,80	
13.	Indeks Pemerintahan Digital (PEMDI)	Indeks	N/A	N/A	2,0	2,2	2,4	2,6	2,8	
14.	Indeks Perlindungan Anak	Indeks	68,44	69,8	71,19	72,61	74,06	75,54	77,05	
15.	Indeks Konektivitas Jalan	Indeks	1,298	1,373	1,426	1,479	1,503	1,549	1,649	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
16.	Indeks Survei Penilaian Integritas (SPI)	%	68,6	80	80,5	81	81,5	82	82,5	
17.	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	(%)	17,1	15,41	13,96	12,71	11,64	10,71	9,91	
18.	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>)	(%)	92,88	93	93	93	93	93	93	
19.	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>)	(%)	84,13	91	91	91	91	91	91	
20.	Indeks Desa	Indeks	N/A	80	82	84	86	88	90	
21.	Persentase warisan budaya yang dilestarikan	Persentase	N/A	19	22	25	27	30	33	
22.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,16	6,13-6,68	5,41	5,39-6,49	5,11-6,29	4,83-6,09	4,55-5,89	
23.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	72,60	76,14	76,28	76,78	77,23	77,55	77,80	

Sumber: BAPPPEDA (diolah), 2025

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI									
1	Penurunan intensitas emisi GRK	(%)	-	6,05	6,44	6,87	7,42	7,96	8,4	
2	Indeks Risiko Bencana	Indeks	127,24	119,43	111,62	103,81	96	88,19	80,38	
3	Kapasitas Air Baku	m3/detik	0,68	0,69	0,71	1,48	2,26	3,04	3,63	
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	poin	62,88	66,25	66,50	66,76	67,01	67,26	67,51	
5	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,48	0,50	0,52	0,54	0,56	0,58	0,60	
6	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	(%)	5,43	5,01	4,83	4,61	4,36	4,08	3,80	
7	Penurunan Emisi GRK/Kumulatif	TON CO2 EQ	-	456.726,86	501.743,13	549.988,17	606.325,34	672.001,06	743.714,08	
8	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	(%)	24,39	24,61	25,03	25,27	26,09	26,50	26,97	
9	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	(%)	2,32	2,63	2,98	3,38	8,27	22,70	23,96	
10	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	(%)	5,52	7,02	12,40	17,77	23,15	28,52	33,90	
11	Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	(%)	73,37	76,77	80,34	84,07	87,97	97,36	100	
12	Skor Pola Pangan Harapan	Nilai	94,5	94,55	94,6	94,65	94,7	94,75	94,8	
II	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	74,57	75,06	75,45	75,98	76,52	77,08	77,65	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,05	4.79-5.20	6.03-6.03	4.29-6.34	4.36-6.41	4.40-6.45	4.47-6.52	
3	Pengeluaran Per Kapita	Juta Rupiah	11,59	11.430 - 12.325	11.632 - 12.713	11.58- 13.092	12.035 - 13.536	12.235 - 13.971	12.325- 14.113	
4	Rasio Gini	Indeks	0,337	0.360-0.335	0.334-0.334	0.387-0.333	0.386-0.332	0.385-0.331	0.382-0.330	
5	PDRB per Kapita	Juta Rupiah	39,7	39.91-40.78	46.67-46.67	44.37-47.7	46.17-51.33	47.96-52.16	49.76-54.26	
6	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,217	0.45 -0.44	0.43 -0.42	0.42 -0.41	0.41 -0.40	0.40 -0.39	0.39 -0.38	
7	Tingkat Kemiskinan	%	9,10	9.09-8.23	8.34-8.34	8.49 -7.41	8.24 -7.08	8.00 -6.76	7.76 -6.44	
8	Usia Harapan Hidup (UHH)	(tahun)	75,29	75,42	75,62	75,81	76,00	76,20	76,39	
9	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	60,83	65,29	67,29	69,29	71,29	73,29	75,29	
10	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	77,6	77,78	78,23	78,90	79,15	79,95	80,80	
11	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,02	13,03	13,04	13,05	13,06	13,07	13,08	
12	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	96,22	96,56	96,78	97,01	97,23	97,46	97,69	
13	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	(%)	17,10	15,41	13,96	12,71	11,64	10,71	9,91	
14	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	68,44	69,80	71,19	72,61	74,06	75,54	77,05	
15	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	(%)	92,88	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	
16	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun	Tahun	8,74	8.75-8.92	8.77-9.01	8.79-9.11	8.81-9.20	8.83-9.29	8.85-9.39	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
17	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	Persentase	-	19	22	25	27	30	33	
18	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	(%)	84,13	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	
19	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	72,60	76,14	76,28	76,78	77,23	77,55	77,80	
20	Partisipasi dan peran Pemuda dalam Pembangunan	%	34,70	34,88	35,41	35,77	36,12	36,48	36,83	
21	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,16	6.13 -6.68	5.41-5.41	5.39 -6.49	5.11 -6.29	4.83 -6.09	4.55 -5.89	
22	Rasio PDRB Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	%	19,27	19,28	19,32	19,37	19,41	19,46	19,50	
23	Angka Karakter	%	-	55,64	55,66	55,69	55,72	55,74	55,77	
24	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	(%)	-	100	100	100	100	100	100	
25	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Indeks	64,97	64,98	64,99	65	66	66,5	70	
26	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	%	-	50,02	51,66	53,32	55	56,73	61,32	
27	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan SMP	%	91,55	91,57	91,63	91,75	91,83	91,85	91,91	
28	Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota	%	1,66	1,64	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	
29	Jumlah Kasus Kematian Ibu per Tahun	Kasus	21	21,00	20,00	19,00	18,00	17,00	16,00	
30	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan SD	%	97,31	97,33	97,39	97,51	97,59	97,61	97,67	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
31	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan PAUD	%	91,40	91,42	91,48	91,6	91,68	91,7	91,76	
32	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Kesetaraan	%	59,61	59,63	59,69	59,81	59,89	59,97	60,09	
33	Angka Literasi	%	-	63,83	64,26	64,69	65,13	65,56	65,99	
34	Angka Numerasi	%	-	61,46	61,74	62,02	62,30	62,58	62,86	
35	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	%	-	100	100	100	100	100	100	
36	Pengentasan luasan kawasan kumuh	Hektar	164,69	141,03	132,48	116,08	108,38	92,73	79,50	
37	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)	(%)	-	90,43	90,86	91,28	91,71	92,14	92,57	
38	Indeks Zakat Nasional (IZN)	Poin	0,60	0,62	0,64	0,66	0,68	0,70	0,72	
III	ASPEK DAYA SAING DAERAH									
1	Indeks Kualitas Infrastruktur	Indeks	75,88	75,89	76,18	76,48	76,78	77,07	77,37	
2	Indeks Ekonomi Hijau Daerah (Pilar Ekonomi)	Indeks	37,57	38,10	41,10	42,72	44,74	46,85	49,04	
3	Rasio Pembentukan Modal Tetap Bruto	%	21,83	23,51	23,59	23,67	23,75	23,84	23,92	
4	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	19,32	19,62	19,71	19,80	19,89	19,99	20,09	
5	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%	54,47	55,12	55,76	56,40	56,40	57,67	58,29	
6	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	(%)	0,515	0,519	0,523	0,528	0,535	0,542	0,550	
7	Indeks Konektivitas Jalan	Indeks	1,298	1,373	1,426	1,479	1,503	1,549	1,649	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
8	Total Kredit /PDRB	%	-	19,13	19,63	21,48	23,04	24,57	27,65	
9	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	5,49	5,58	5,67	5,75	5,84	5,93	6,02	
10	Rasio PDRB Sektor Perdagangan	%	15,82	17,93	19,63	21,33	23,03	24,73	26,43	
11	Indeks Inovasi Daerah	Angka	73,23	73,30	73,35	73,40	73,45	73,50	73,55	
12	Persentase Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD)	%	-	90	92	95	97	100	100	
13	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	3,61	3,74	3,92	4,11	4,31	4,52	4,74	
14	Indeks Desa	Indeks	-	80	82	84	86	88	90	
15	Net Ekspor Impor Antar Daerah	%	1,21	-0,50 sd 1,21	-0,45 sd 1,25	-0,42 sd 1,27	-0,40 sd 1,29	-0,30 sd 1,31	-0,15 sd 1,33	
16	Indeks Akses Keuangan Daerah	Indeks	-	4,29	4,31	4,34	4,36	4,39	4,4	
17	Persentase Desa Mandiri	%	64,81	92,96	94,07	95,19	96,30	98,15	100	
18	Rasio Pertumbuhan Wirausaha Baru yang Berskala Mikro	%	-	5,92	6,12	6,32	6,52	6,72	6,92	
19	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	%	54,65	54,74 - 55,25	56,42 - 56,91	57,53 - 58,54	58,73 - 60,14	59,84 - 61,71	61,28 - 63,24	
IV	ASPEK PELAYANAN UMUM									
1	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3,86	3,593	3,651	3,710	3,770	3,831	3,893	
2	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	89,65	90	91	92	93	94	95	
3	Indeks Pelayanan Publik.	Indeks	4,58	4,71	4,72	4,73	4,74	4,75	4,76	
4	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	81	81	82	83	84	85	87	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
5	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	4,51	4,6	-	-	-	-	-	
6	Nilai Skor LPPD Kabupaten	Skor	3,64	3,647	3,648	3,649	3,65	3,651	3,652	
7	Indeks Kepatuhan Daerah	poin	-	65	66	67	68	69	70	
8	Tingkat Cipta Kondisi Kondusif	%	100	100	100	100	100	100	100	
9	Indeks Pemerintahan Digital (PEMDI)	Indeks	-	-	2,0	2,2	2,4	2,6	2,8	
10	Indeks Survei Penilaian Integritas (SPI)	%	68,6	80	80,5	81	81,5	82	82,5	
11	Tingkat Bina Demokratisasi	%	100	100	100	100	100	100	100	
12	Persentase Capaian Aksi HAM	%	-	70	70,5	71	71,5	72	73	
13	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	-	80	80,5	81	81,5	82	82,5	
V	INDIKATOR KINERJA KUNCI									
AA	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN									
1	Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan (APS)	%	94,01	94,11	94,17	94,29	94,37	94,39	94,45	
2	Jumlah Warga Negara usia 7-18 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan (APS)	%	97,92	97,94	98,00	98,12	98,20	98,22	98,28	
3	Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV	%	67,93	68,43	68,83	69,13	69,33	69,43	69,48	
4	Indeks iklim kebinekaan sekolah jenjang SMP	Nilai	70,04	71,04	72,04	73,04	74,04	75,04	76,04	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
5	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	Nilai	84,45	84,95	85,35	85,65	85,85	85,95	86,00	
6	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional	Nilai	85,04	85,54	85,94	86,24	86,44	86,54	86,59	
7	Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	82,12	82,62	83,02	83,32	83,52	83,62	83,67	
8	Indeks iklim inklusivitas sekolah jenjang SD	Nilai	64,31	66,81	69,31	71,81	74,31	76,81	79,31	
9	Indeks iklim inklusivitas sekolah jenjang SMP	Nilai	57,79	60,20	62,60	65,00	67,40	69,80	72,20	
10	Indeks iklim kebinekaan sekolah jenjang SD	Nilai	75,34	76,35	77,35	78,35	79,35	80,35	81,35	
11	Indeks iklim keamanan sekolah jenjang SD	Nilai	80,48	81,37	82,27	83,17	84,07	84,97	85,87	
12	Indeks iklim keamanan sekolah jenjang SMP	Nilai	71,39	72,89	74,39	75,89	77,39	78,89	80,39	
13	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	%	49,71	49,83	49,99	50,20	50,45	50,73	52,47	
14	Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	77,98	78,48	78,88	79,18	79,38	79,48	79,53	
15	Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	%	95,68	99,79	99,81	99,82	99,83	99,84	99,85	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
AB	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
1	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	95,72	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	93,85	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	99,97	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	84,63	100	100	100	100	100	100	
8	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	97,64	100	100	100	100	100	100	
9	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan	%	100	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	kesehatan jiwa sesuai standar									
10	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
11	Jumlah Kematian Ibu	Orang	21	26	24	21	19	18	16	
12	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	%	1,04	1,06	1,07	1,08	1,09	1,11	1,20	
13	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	%	79,27	100	100	100	100	100	100	
14	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
AC	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									
1	Persentase Kondisi irigasi kewenangan kab/kota	%	71,40	72,52	73,46	74,42	75,42	76,43	77,02	
2	Persentase tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan tersertifikasi di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja kualifikasi operator/teknisi/analisis	%	-	12,43	29,95	47,46	64,97	82,49	100	
3	Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah	%	-	82,57	82,81	83,04	83,27	83,51	83,74	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	penduduk di kabupaten/kota									
4	Persentase penduduk yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	%	-	87,21	87,34	87,48	87,61	87,74	87,88	
5	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas	%	71,4	71,48	71,53	71,58	71,64	71,69	71,72	
6	Persentase kepatuhan PBG & SLF Kabupaten/Kota	%	100	100	100	100	100	100	100	
7	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	%	87,54	88,17	89,62	91,09	92,56	94,03	95,38	
8	Persentase Pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan	%	-	19,00	33,33	50,00	66,67	83,33	100	
9	Persentase penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kab/Kota	%	100	100	100	100	100	100	100	
10	Jumlah hari layanan penerbitan KKPR berusaha/non berusaha (sesuai kewenangan) yang terbit/dilayani Pemerintah Daerah	Hari	90	30	30	30	30	30	30	
AD	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN									
1	Persentase Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	%	-	1,65	20	40	60	80	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
2	Persentase Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana Sarana dan Utilitas Umum)	%	87,03	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani	%	9,06	9,08	9,39	9,71	10,03	10,34	10,66	
4	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	-	-	20	20	20	20	20	
5	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100	100	11,43	20	20	20	20	
AE	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
1	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
5	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	71,35	100	100	100	100	100	100	
6	Jumlah PPNS pada Satpol PP	Orang	2	2	2	4	6	8	10	
7	Persenatse Perda dan Perkada yang Ditegakan	%	100	100	100	100	100	100	100	
8	Persentase Jumlah Sarana prasarana minimal yang digunakan sebagai penunjang dalam penegakan perda dan perkada serta penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyaraka	%	100	100	100	100	100	100	100	
9	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit	15	15	15	15	15	15	15	
10	Persentase jumlah anggota Satpol PP yang telah mengikuti diklat dasar	%	46	46	75	100	100	100	100	
11	Presentase SOP yang tersedia dalam penegakan Perda dan perkada serta Penyelenggaraan Tibumtranmas	%	0	0	100	100	100	100	100	
AF	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL									
1	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase gelandangan pengemis yang terpenuhi	%	100	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	kebutuhan dasarnya di luar panti									
3	Persentase Sarana Prasarana bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang disediakan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	14,97	43,52	45	50	55	60	65	
5	Persentase pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana kabupaten/kota pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar	%	77	78,79	80,30	83,33	86,36	89,39	92,42	
6	Persentase korban bencana alam, sosial dan non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	100	100	
7	Pesentase Penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	%	100	100	100	100	100	100	100	
8	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) perorangan sosial yang melaksanakan	%	31	38,50	46	53,50	61	68,50	76	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	pelayanan sosial sesuai standar									
9	Persentase sarana prasarana yang disediakan sesuai standar untuk pelayanan sosial di luar panti	%	100	100	100	100	100	100	100	
10	Pesentase Penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi	%	1,26	1,3	1,52	1,77	2,02	2,28	2,53	
11	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100	100	100	100	100	
12	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100	100	100	100	100	
13	Jumlah pemutahiran data fakir miskin dan kelompok rentan yang dilakukan selama satu tahun	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	
14	Persentase Pekerja Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Luar Panti Sesuai Standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
AG	2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA									
1	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala	%	4,57	5	5,50	6	6,50	7	7,50	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)									
2	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar kerja dalam wilayah Kabupaten/kota	%	47,79	49	51	53	55	57	59	
3	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	10,76	11,30	12,30	13,30	14,30	15,30	16,30	
4	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	45,33	46,50	48,00	49,50	51,00	52,50	53,00	
5	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	-	-	77	79	81	83	85	
AH	2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
1	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persentase	43,10	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	-	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	Persentase	41,34	49,48	57,62	65,76	73,90	82,04	90,18	
4	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	100	100	100	100	100	100	100	
AI	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN									
1	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
2	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	11,55	11,50	11,45	11,40	11,35	11,30	11,25	
3	Persentase Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	%	63,87	100	100	100	100	100	100	
AJ	2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN									
1	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal Kelebihan dari Tanah Maksimum dan Tanah Absentee	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase pemanfaatan tanah dengan yang sesuai peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	100	100	100	100	100	100	100	
4	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	%	100	100	100	100	100	100	100	
5	Tersedianya tanah untuk masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100	
6	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	100	100	100	100	100	100	100	
AK	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP									
1	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Poin	28,1	40	50	60	70	75	80	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
2	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota	%	100	100	100	100	100	100	100	
AL	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									
1	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persentase	55	60	65	70	75	80	80	
2	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persentase	97	97	97	97	98	98	98	
3	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	%	17,24	17,50	20	22,50	25	27,50	30	
4	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Persentase	60	60	65	70	75	80	85	
5	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persentase	50	55	60	70	70	80	80	
6	Jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	%	100	100	100	100	100	100	100	
7	Jumlah data profil kependudukan yang disusun	%	100	100	100	100	100	100	100	
AM	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									
1	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	Persentase	-	25,93	50	62	74	87	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
2	Persentase Fasilitas Penataan Desa	Persentase	25,93	3,33	3,70	4,44	4,81	5,19	5,56	
3	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	Persentase	80	83	86	91	94	97	100	
4	Persentase pengentasan desa tertinggal	%	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	-	92,96	94,07	95,19	96,30	98,15	100	
AN	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									
1	Total Fertility Rate (TFR).	Orang	2,03	2,02	2,0242	2,0232	2,0222	2,0221	2,0191	
2	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun	14,71	14.5069-14.6069	14.3090-14.3090	14.1119-14.1119	13.9156-13.9156	13.7198-13.7198	13.5248-13.5248	
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	8,69	8,9833	8,9829	8,9787	8,9750	8,9722	8,9703	
4	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)	Persentase	81,89	76,27	76,33	76,38	76,44	76,49	76,55	
AO	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN									
1	Kinerja lalu lintas Kabupaten/kota	%	0,26	0,26	0,28	0,29	0,30	0,31	0,32	
2	Persentase perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan	%	40,00	40,00	60,00	60,00	80,00	80,00	100	
3	Rasio konektivitas kabupaten/kota	%	0,58	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
4	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	Persentase	29,63	30,99	32,70	34,79	37,07	39,35	41,64	
AP	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
1	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	-	75	76	77	78	79	80	
2	Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Perangkat daerah yang memanfaatkan sistem penghubung layanan Pemerintah Daerah (SPLPD)	%	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Perangkat Daerah (PD) di tingkat Kabupaten/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	%	-	75	80	85	90	95	100	
AQ	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH									
1	Jumlah Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	Persentase	3,35	4,32	5,28	6,24	7,2	8,16	9,12	
2	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	Persentase	7,97	9,96	11,95	13,94	15,93	17,92	19,91	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
3	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi Wirasausaha	%	8,68	9,93	11,2	12,4	13,6	14,9	16,1	
4	Pertumbuhan Wirausaha	Persentase	-	12,7	35,9	50,7	64,4	78,6	92,8	
5	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	43,31	52,33	65,23	70,61	76,00	81,38	86,76	
AR	2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL									
1	Realisasi Total terhadap Target Investasi	Persentase	-	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	%	15,41	7,66	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
AS	2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA									
1	Tingkat Partispasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	9,35	9,53	9,71	9,89	10,06	10,24	1.042	
2	Tingkat pemuda partisipasi dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	23,35	25,52	25,88	26,06	26,24	26,41	26,59	
3	Peningkatan Prestasi Olahraga	Medali	38	40	42	44	46	48	50	
4	Persentase Pemuda yang pernah mengikuti pelatihan/kursus/training dan memperoleh sertifikat	%	9,45	9,63	9,81	9,99	10,16	10,34	10,52	
5	Persentase Atlet yang berasal dari kab/kota yang masuk Pelatda Provinsi	%	-	-	10	10	10	10	10	
AT	2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK									
1	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	3,24	3,24	3,26	3,26	3,28	3,28	3,30	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
AU	2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN									
1	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	%	85,12	73,53	76,25	78,97	81,69	84,42	87,14	
AV	2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN									
1	Persentase Jumlah Warisan Budaya yang dilestarikan	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Jumlah Cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang didaftarkan	%	100	100	100	100	100	100	100	
AW	2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN									
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	72,27	72,3	72,50	72,55	73	74	75	
AX	2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN									
1	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di lingkup Pemerintahan Daerah	Nilai	0	80	82,1	84,2	86	88	90	
2	Tingkat Ketersediaan Arsip	Persentase	76,4	76,65	77	77,20	77,45	77,60	77,80	
3	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa bernegara kepentingan pemerintahan, untuk negara, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	50	60	62	63	64	65	66	
AY	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN									
1	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	1.530,83	1.638,99	1.760,84	1.901,70	2.063,35	2.249,05	2.462,71	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
2	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	9.037,51	9.308,64	9.634,44	10.019,82	10.470,71	10.994,24	11.598,93	
3	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	%	100	100	100	100	100	100	100	
AZ	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA									
1	Tingkat hunian akomodasi	%	24,26	25,47	26,75	28,08	29,49	30,96	32,51	
2	Pertumbuhan Investasi Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum	%	0,51	5,1	5,53	6,22	6,80	7,19	7,40	
3	Kontribusi sektor parawisata terhadap PAD	%	5,97	5,59	5,61	5,63	5,65	5,67	5,69	
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	5,49	5,51	5,53	5,55	5,57	5,59	5,61	
5	Persentase Pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6	
6	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	Persentase	1,17	3,52	3,52	3,52	3,52	3,52	3,52	
BA	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN									
1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Persentase	1,729	0,20	0,22	0,24	0,26	0,28	0,30	
2	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	Persentase	11,84	12,17	12,42	12,67	12,92	13,17	13,42	
3	Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	Diperoleh dari Surveyance Penyakit dari 5 PHMS									
4	Peningkatan Produksi Hortikultura	Persentase	1,732	0,20	0,22	0,24	0,26	0,28	0,30	
5	Peningkatan Produksi komoditas Perkebunan	%	21,66	0,15	0,16	0,17	0,18	0,19	0,20	
6	Luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	%	100	100	100	100	100	100	100	
BB	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN									
1	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Persentase	36,26	38,37	42,61	44,73	46,85	48,97	51,09	
3	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	Persentase	88,89	88,89	100	100	100	100	100	
4	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
5	Nilai Total Penjualan Perdagangan Antar Wilayah pada kab/kota	%	-	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	100	100	100	100	100	100	100	
BC	3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN									

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	Persentase	-	60	65	68	70	73	75	
2	Pertambahan Jumlah Industri kecil dan menengah di Kabupaten/kota	%	71,56	75,49	77,94	80,39	82,84	85,29	87,74	
3	Persentase jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang memiliki tingkat kepatuhan minimal "Baik" dibandingkan seluruh jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang sudah dilakukan pembinaan	%	-	50	65	70	75	80	85	
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	%	100	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah	%	100	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	yang dikeluarkan oleh instansi terkait									
7	Persentase jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang telah menindaklanjuti hasil rekomendasi pengawasan dibandingkan dengan jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang telah dilakukan pengawasan	%	-	60	65	70	75	80	90	
8	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor	%	8,56	10,29	12,01	13,73	15,45	17,17	18,89	
BD	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH									
1	Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	Poin	15	15	18	21	24	27	30	
2	Tingkat Kematangan UKPBJ	Poin	40	40	40	40	40	40	40	
3	Persentase Jumlah Total Proyek Konstruksi Yang Dibawa Ke tahun berikutnya, yang ditandatangani pada kuartal pertama	%	0	0	0	0	0	0	0	
4	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	%	8	8,37	8,38	8,39	8,40	8,41	8,42	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
5	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	38	12,42	19,83	19,85	19,86	19,87	19,88	
6	Pemanfaatan Sistem Pengadaan	Poin	24,94	24,95	25,00	25,02	25,04	25,06	25,08	
7	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	12,40	12,42	12,43	12,44	12,45	12,47	12,48	
8	Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun N	Nilai	92,90	92,90	93,00	94,00	95,00	96,00	97,00	
BE	4.02 - SEKRETARIAT DPRD									
1	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
BF	5.01 - PERENCANAAN									
1	Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	
BG	5.02 - KEUANGAN									
1	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	positif	Nilai	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	
2	Cash Management: Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	positif	%	5,21	5,22	5,23	5,24	5,25	5,26	
3	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to	positif	%	92,56	92,8	92,9	93	93,1	93,2	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	frontline service delivery units)									
4	Manajemen Aset	positif	Kategori	4	4	4	4	4	4	
5	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	positif	Persentase	-	27,58	33,00	40,00	40,50	41,00	
6	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	positif	%	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	negatif	Persentase	-	5,52	1,82	0,73	0,29	0,12	
8	Persentase Penurunan SILPA	negatif	Persentase	-	17,62	13,62	10,62	8,62	7,62	
9	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	positif	Persentase	-	97,00	97,50	98,00	98,50	99,00	
10	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	positif	%	13	13,02	13	13,03	13,04	13,05	
11	Rasio Belanja Urusan pemerintahan Umum (Dikurangi transfer expenditures)	positif	%	69,45	69,88	69,45	69,89	69,9	69,91	
12	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	negatif	%	-11,63	-11,5	-11,4	-11,3	-11,2	-11,1	
13	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	negatif	Persentase	-	33,00	32,00	30,00	29,00	28,00	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
14	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	negatif	%	-1,51	-1,41	-1,39	-1,37	-1,35	-1,33	
15	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase	22,67	23,43	22,70	23,23	23,76	24,30	24,85	
BH	5.03 - KEPEGAWAIAN									
1	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	70,95	71	71,5	72	72,5	73	73	
2	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	30,03	30,5	31	31,5	32	32,5	33	
3	Nilai Indeks Implementasi NSPK manajemen ASN	Indeks	-	75	81	82	83	84	85	
4	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	22,27	22,5	23	23,5	24	24,5	25	
BI	5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									
1	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan	Persentase	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00	
2	Rasio Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha di Daerah	%	75	75	76	77	78	79	80	
BJ	6.01 - INSPEKTORAT DAERAH									

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	
2	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	
3	Manajemen Risiko Indeks	Nilai	Dievaluasi dengan hasil Level 1	Dievaluasi dengan hasil Level 1	Dievaluasi dengan hasil Level 1	Dievaluasi dengan hasil Level 1	Dievaluasi dengan hasil Level 1	Dievaluasi dengan hasil Level 1	Dievaluasi dengan hasil Level 1	

Sumber: BAPPPEDA (diolah), 2025

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	1.01.0.00.0.00.01. 0000 - Dinas Pendidikan									
1	Jumlah warga negara usia 7-12 tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan (APS)	%	97,01	99,82	99,84	99,85	99,86	99,87	99,88	
2	Zona Integritas Perangkat Daerah	Nilai	91,08	91,13	91,18	91,23	91,28	91,33	91,38	
3	Jumlah Warga Negara Usia 13-15 tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan (APS)	%	94,35	99,76	99,78	99,79	99,80	99,81	99,82	
4	Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan (APS)	%	94,01	94,11	94,17	94,29	94,37	94,39	94,45	
5	Jumlah Warga Negara usia 7-18 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan (APS)	%	97,92	97,94	98,00	98,12	98,20	98,22	98,28	
6	Rata - Rata Kemampuan Literasi	%	83,53	84,08	84,48	84,78	84,98	85,08	85,13	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	Berdasarkan Asesmen Nasional									
7	Rata - Rata Kemampuan Numerasi Berdasarkan Asesmen Nasional	%	69,29	81,72	82,12	82,42	82,62	82,72	82,77	
	1.02.0.00.0.00.01. 0000 - Dinas Kesehatan									
1	Angka Kematian Ibu (AKI)	(per 100.000 kelahiran hidup)	143	161	148	130	118	111	99	
2	Zona Integritas Perangkat Daerah	Nilai	83,68	85	86	87	88	89	90	
3	Angka Kematian Balita	Per 1.000 Kelahiran	13,8	15	13,8	13,1	12,5	11,98	11,91	
4	Cakupan SPM Bidang Kesehatan	Persentase	95,92	100	100	100	100	100	100	
5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Kesehatan	Persentase	93	93,15	93,24	93,38	93,55	93,63	93,74	
	1.03.0.00.0.00.10. 0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang									
1	Peningkatan persentase jalan dalam kondisi mantap	%	-	0,63	1,45	1,47	1,47	1,47	1,35	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
2	Persentase penduduk yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	%	-	87,21	87,34	87,48	87,61	87,74	87,88	
3	Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota	%	-	82,57	82,81	83,04	83,27	83,51	83,74	
4	Zona Integritas Perangkat Daerah	Nilai	70,54	86	87	88	88	89	89	
5	Persentase Kondisi irigasi kewenangan kab/kota	%	71,40	72,52	73,46	74,42	75,42	76,43	77,02	
6	Persentase Bangunan dan Lingkungan Pemerintahan yang Tertata	%	75	59,09	63,64	68,18	72,73	77,27	81,82	
7	Persentase tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan tersertifikasi di wilayah	%	-	12,43	29,95	47,46	64,97	82,49	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja kualifikasi operator/teknisi/analis									
8	Ketaatan Terhadap RTRW	%	75,46	75,62	75,75	75,9	76,4	76,9	77,4	
	1.04.2.10.1.03.02.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan									
1	Persentase rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan	Persentase	50	52	54	56	58	60	62	
2	Zona Integritas Perangkat Daerah	Nilai	80	80,5	81	81,5	82	82,5	83	
3	Pengentasan luasan kawasan kumuh	Hektar	164,69	141,03	132,48	116,08	108,38	92,73	79,50	
4	Persentase Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang Difasilitasi	%	100	100	100	100	100	100	100	
	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja									
1	Persentase gangguan	%	100	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	Trantibum yang dapat diselesaikan									
2	Zona Integritas Perangkat Daerah	Nilai	51,78	60	65	70	75	80	85	
	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan									
1	Cakupan Response Time Pelayanan Kebakaran dan Non Kebakaran	%	46,57	46,57	53,79	57,04	60,29	65,70	68,59	
2	Zona Integritas Perangkat Daerah	Nilai	51,78	60	65	70	75	80	85	
	1.05.0.00.0.00.04.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah									
1	Zona Integritas Perangkat Daerah	Nilai	62,76	66	70	74	78	82	86	
2	Persentase Penanggulangan Pra Bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Penanggulangan Tanggap Darurat Bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Penanggulangan Pasca Bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	1.06.0.00.0.00.01. 0000 - Dinas Sosial									
1	Persentase Kelembagaan Sosial/PSKS yang memberikan pelayanan sosial	%	22	27	32	37	42	47	52	
2	Persentase Pencapaian Penerimaan Layanan Dasar bagi PPKS SPM Bidang Sosial	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Zona Integritas Perangkat Daerah	Nilai	89	90,8	91	91,25	91,50	91,75	92	
4	Persentase Pencapaian Penerimaan Layanan Dasar bagi PPKS Non SPM Bidang Sosial	%	64,89	69,89	74,89	79,89	84,89	89,89	94,89	
	2.07.3.32.0.00.02. 0000 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi									
1	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar kerja dalam wilayah Kabupaten/kota	%	47,79	49	51	53	55	57	59	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
2	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	4,57	5	5,50	6	6,50	7	7,50	
3	Zona Integritas Perangkat Daerah	Nilai	80,53	82,5	83	83,5	84	84,5	85	
4	Jumlah Transmigran yang Ditempatkan dan Difasilitasi	KK	78	81	84	87	90	93	96	
5	Persentase Peserta Pelatihan yang Bersertifikat	%	100	100	100	100	100	100	100	
	2.11.3.28.1.03.12.0000 - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan									
1	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Indeks	68,50	68,65	68,72	68,79	68,86	68,93	69,00	
2	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota	%	100	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
3	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	64,40	67,17	67,37	67,57	67,77	67,97	68,17	
4	Persentase Peningkatan Generasi Lingkungan	%	8,1	11	18	21	24	27	30	
5	Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Taman Hutan Raya (Tahura)	Poin	65	65	66	66	67	67	68	
6	Zona Integritas Perangkat Daerah	Nilai	78,36	85	86	87	88	89	90	
7	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Poin	28,1	40	50	60	70	75	80	
8	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	58,44	64,10	64,50	64,90	65,30	65,70	66,10	
	2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil									
1	Cakupan Kepemilikan Identitas Penduduk	%	90	90	92	94	96	98	98	
2	Cakupan Kepemilikan Akta Catatan Sipil	%	94	95	95,5	96	96,5	97	97	
3	Persentase Instansi yang Memanfaatkan Data Kependudukan	%	70	80	82	85	87	90	90	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
4	Zona Integritas Perangkat Daerah	Nilai	88,28	88,5	89	89,5	90	90,5	91	
	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
1	Persentase Desa Mandiri	%	64,81	92,96	94,07	95,19	96,30	98,15	100	
2	Zona Integritas Perangkat Daerah	Nilai	78	80	85	86	87	88	89	
	2.14.2.08.0.00.05.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
1	Nilai dalam Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	Nilai	-	750	800	820	840	860	880	
2	Total Fertility Rate (TFR).	Orang	2,03	2,02	2,0242	2,0232	2,0222	2,0221	2,0191	
3	Nilai Penganugerahan Parahita Ekapraya Daerah	Nilai	-	630	660	690	730	760	790	
4	Zona Integritas Perangkat Daerah	Nilai	78,78	79,48	80,18	80,88	81,58	82,28	82,98	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	2.15.0.00.0.00.01. 0000 - Dinas Perhubungan									
1	Cakupan Kelancaran, Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	%	51,45	54,61	61,31	65,69	69,59	73,81	82,12	
2	Zona Integritas Perangkat Daerah	Nilai	75	76	78	80	82	84	86	
	2.16.2.20.2.21.04. 0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik									
1	Indeks Layanan SPBE	Poin	4,69	4,70	-	-	-	-	-	
2	Zona Integritas Perangkat Daerah	Nilai	93,85	93,85	94,85	95,35	95,85	96,35	96,85	
3	Nilai Kematangan Teknologi Digital	Poin	-	-	2,0	2,2	2,4	2,6	2,8	
4	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	3,24	3,24	-	-	-	-	-	
5	Persentase Masyarakat dalam Memahami Program-Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang	%	60	70	-	-	-	-	-	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
6	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Indeks	-	-	91	92	93	94	95	
7	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral Yang Sesuai Dengan Prinsip Satu Data Indonesia	%	-	-	60	70	80	90	100	
8	Score Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)	Skor	549	675	700	725	750	775	800	
	2.17.3.30.3.31.07.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian									
1	Zona Integritas Perangkat Daerah	Nilai	75,09	76,09	77,09	78,09	79,09	80,09	81,09	
2	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	Persentase	-	10,29	12,02	13,76	15,51	17,26	19,02	
3	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	Persentase	-	5,98	7,97	9,96	11,95	13,94	15,93	
4	Pertumbuhan Wirausaha	Persentase	-	12,7	35,9	50,7	64,4	78,6	92,8	
5	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	Persentase	-	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	2.18.0.00.0.00.23.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu									
1	Nilai Investasi di Kabupaten Sumedang	Rupiah	3.796.035.862.947,34	4.086.880.318.665	4.291.224.329.348,25	4.505.785.545.815,66	4.731.074.823.106,45	4.967.628.564.261,77	5.216.009.992.474,86	
2	Zona Integritas Perangkat Daerah	Nilai	84,5	85	86	87	88	89	90	
	2.24.2.23.0.00.02.0000 - Dinas Arsip dan Perpustakaan									
1	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Indeks	64,97	64,98	64,99	65	66	66,5	70	
2	Zona Integritas Perangkat Daerah	Nilai	78,90	79,00	79,20	79,50	80	81	82	
3	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di lingkup Pemerintahan Daerah	Nilai	0	80	82,1	84,2	86	88	90	
	3.25.3.27.0.00.02.0000 - Dinas Perikanan dan Peternakan									
1	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	Persentase	11,84	12,17	12,42	12,67	12,92	13,17	13,42	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
2	Peningkatan Produksi Perikanan	%	3,30	3,58	4,10	4,62	5,14	5,66	6,18	
3	Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis Diperoleh dari Surveillance Penyakit dari 5 PHMS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
4	Zona Integritas Perangkat Daerah	Nilai	76,33	84,00	90,00	92,00	94,00	96,00	98,00	
	3.26.2.22.2.19.02.0000 - Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga									
1	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya yang dikelola secara terpadu	%	100	27,27	45,45	63,63	81,81	100	100	
2	Cakupan subsektor ekonomi kreatif yang dikembangkan	%	100	25	43,75	62,50	81,25	100	100	
3	Zona Integritas Perangkat Daerah	Nilai	92	92,25	92,5	93	93,5	94	94,5	
4	Tingkat Partispasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	9,35	9,53	9,71	9,89	10,06	10,24	1.042	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
5	Tingkat hunian akomodasi	%	24,26	25,47	26,75	28,08	29,49	30,96	32,51	
6	Tingkat pemuda partisipasi dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	23,35	25,52	25,88	26,06	26,24	26,41	26,59	
7	Peningkatan Prestasi Olahraga	Medali	38	40	42	44	46	48	50	
	3.27.2.09.0.00.10.0000 - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan									
1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Persentase	1,729	0,20	0,22	0,24	0,26	0,28	0,30	
2	Zona Integritas Perangkat Daerah	Nilai	82,134	82,30	82,50	82,70	82,90	83,10	83,30	
3	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks	86,88	75,56	77,35	79,13	80,92	82,71	75,56	
4	Peningkatan Produksi Hortikultura	Persentase	1,732	0,20	0,22	0,24	0,26	0,28	0,30	
5	Peningkatan Produksi komoditas Perkebunan	%	21,66	0,15	0,16	0,17	0,18	0,19	0,20	
	4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah									
1	Zona Integritas Perangkat Daerah	Nilai	88,76	89,01	89,26	89,51	89,76	90,01	90,25	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
2	Persentase kinerja perumusan kebijakan, pengkoordinasian, dan layanan administrasi bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase kinerja perumusan kebijakan, pengkoordinasian, dan layanan administrasi bidang pembangunan dan ekonomi	%	100	100	100	100	100	100	100	
	4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat DPRD									
1	Zona Integritas Perangkat Daerah	Nilai	82	82,05	82,1	82,3	82,4	82,5	82,6	
2	Persentase Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	%	100	100	100	100	100	100	100	
	5.01.5.05.0.00.02.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah									
1	Persentase Rekomendasi Kebijakan	Persentase	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan									
2	Presentase capaian Kinerja Utama Perangkat Daerah	%	97,27	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	
3	Zona Integritas Perangkat Daerah	Nilai	89,40	89,40	90	91	92	93	94	
4	Rasio Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha di Daerah	%	75	75	76	77	78	79	80	
	5.02.0.00.0.00.05.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah									
1	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Nilai	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	
2	Zona Integritas Perangkat Daerah	Nilai	92,88	92,89	92,91	92,94	92,96	92,99	93,00	
	5.02.0.00.0.00.06.0000 - Badan Pendapatan Daerah									

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase	22,67	23,43	22,70	23,23	23,76	24,30	24,85	
2	Zona Integritas Perangkat Daerah	Nilai	90,6	91	93	95	96	97	97	
	5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia									
1	Zona Integritas Perangkat Daerah	Nilai	85,86	86	87	88	89	90	91	
2	Indeks Sistem Merit	Poin	353	355	360	360	365	365	370	
	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat									
1	Zona Integritas Perangkat Daerah	Nilai	88,19	88,50	88,75	89,00	89,25	89,50	90,00	
2	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	
3	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	
	7.01.0.00.0.00.01.0000 - Kecamatan Wado									
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	90,35	90,45	90,75	91,00	91,15	91,30	91,50	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
2	Zona Integritas Perangkat Daerah	Nilai	78,53	89	89,1	89,2	89,3	89,4	89,5	
	7.01.0.00.0.00.02.0000 - Kecamatan Jatinunggal									
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	90,00	97,52	97,53	97,54	97,55	97,56	97,57	
2	Zona Integritas Perangkat Daerah	Nilai	75	80	80,5	81	81,5	82	82,5	
	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Darmaraja									
1	Zona Integritas Perangkat Daerah	Nilai	87	89	90,10	90,20	90,30	90,40	90,50	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	90,50	90,58	90,99	91,10	91,20	91,30	91,40	
	7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Cibugel									
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	91,58	92,00	93,00	93,25	93,50	93,75	94,00	
2	Zona Integritas Perangkat Daerah	Nilai	89,00	90,00	91,00	91,25	91,50	91,75	92,00	
	7.01.0.00.0.00.05.0000 - Kecamatan Cisit									
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	89	90,58	90,99	91,25	91,50	91,75	91,85	
2	Zona Integritas Perangkat Daerah	Nilai	80,83	80,83	81,13	82,25	83,32	84,23	85,35	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Situraja									
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	90	90,50	90,60	90,70	90,80	90,90	91,00	
2	Zona Integritas Perangkat Daerah	Nilai	82	84	85	86	87	88	89	
	7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Conggeang									
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	92,29	92,50	92,75	93,25	93,50	93,75	93,80	
2	Zona Integritas Perangkat Daerah	Nilai	78,63	79,50	80,30	81,50	82,20	83,50	83,75	
	7.01.0.00.0.00.08.0000 - Kecamatan Paseh									
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	90,50	90,58	90,99	91,40	91,81	92,22	92,63	
2	Zona Integritas Perangkat Daerah	Nilai	73,37	76,21	85	86	87	88	89	
	7.01.0.00.0.00.09.0000 - Kecamatan Surian									
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	90,50	90,58	90,99	91,30	91,50	91,75	92,00	
2	Zona Integritas Perangkat Daerah	Nilai	75	80	81	82	83	84	85	
	7.01.0.00.0.00.10.0000 - Kecamatan Buahdua									

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	86,57	90,58	90,99	91,30	91,50	91,75	92,00	
2	Zona Integritas Perangkat Daerah	Nilai	56,61	82	85	86	87	88	89	
	7.01.0.00.0.00.11.0000 - Kecamatan Tanjungsari									
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	92,86	90,58	90,99	91,50	92,00	92,50	93,00	
2	Zona Integritas Perangkat Daerah	Nilai	82	84	87	88	89	90	91	
	7.01.0.00.0.00.12.0000 - Kecamatan Sukasari									
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	92,66	92,66	92,80	93,00	93,20	93,50	94,00	
2	Zona Integritas Perangkat Daerah	Nilai	75	80	80,60	81,50	82,25	82,70	83,50	
	7.01.0.00.0.00.13.0000 - Kecamatan Pamulihan									
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	93,32	93,50	93,70	93,90	94,10	94,30	94,50	
2	Zona Integritas Perangkat Daerah	Nilai	80,09	84	85	86	87	88	89	
	7.01.0.00.0.00.14.0000 - Kecamatan Cimanggung									
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	90,50	90,50	90,60	90,70	90,80	90,90	91,00	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
2	Zona Integritas Perangkat Daerah	Nilai	85,58	85,58	86,00	87,00	88,00	89,00	90,00	
	7.01.0.00.0.00.15.0000 - Kecamatan Jatinangor									
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	90,20	90,30	90,35	90,40	90,50	90,75	91,00	
2	Zona Integritas Perangkat Daerah	Nilai	88	89	90	90,25	90,50	90,75	91	
	7.01.0.00.0.00.16.0000 - Kecamatan Rancakalong									
1	Zona Integritas Perangkat Daerah	Nilai	87,95	88,00	88,00	88,05	88,22	88,41	88,50	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	90,5	93,8	94	94,20	94,50	94,75	95,00	
	7.01.0.00.0.00.17.0000 - Kecamatan Sumedang Selatan									
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	90,50	90,58	90,99	91,30	91,50	91,75	92,00	
2	Zona Integritas Perangkat Daerah	Nilai	87	89	90	91	92	93	94	
	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Sumedang Utara									
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	90,00	90,25	90,50	90,75	91,00	91,25	91,50	
2	Zona Integritas Perangkat Daerah	Nilai	85	87	87,5	88	88,5	89	89,5	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Ganeas									
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	90,50	90,58	90,99	91,25	91,50	9,75	91,85	
2	Zona Integritas Perangkat Daerah	Nilai	80	82	82,5	83	83,5	84	84,5	
	7.01.0.00.0.00.20.0000 - Kecamatan Tanjungkerta									
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	93,41	93,50	93,58	93,63	93,70	93,76	93,80	
2	Zona Integritas Perangkat Daerah	Nilai	71,98	84	87	87,3	87,8	88	90	
	7.01.0.00.0.00.21.0000 - Kecamatan Tanjungmedar									
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	90,5	90,58	90,87	91,20	91,50	91,00	91,50	
2	Zona Integritas Perangkat Daerah	Nilai	87,11	89,00	89,50	90,00	90,50	90,85	91,00	
	7.01.0.00.0.00.22.0000 - Kecamatan Cimalaka									
1	Zona Integritas Perangkat Daerah	Nilai	73,28	84,00	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	89,58	90,60	90,65	90,70	90,75	90,80	90,85	
	7.01.0.00.0.00.23.0000 - Kecamatan Cisarua									

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	91,27	91,27	91,30	91,35	91,40	91,45	91,50	
2	Zona Integritas Perangkat Daerah	Nilai	84,77	85	85,5	86	86,5	87	87,5	
	7.01.0.00.0.00.24.0000 - Kecamatan Tomo									
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	89,96	90,45	90,75	91,00	91,15	91,30	91,50	
2	Zona Integritas Perangkat Daerah	Nilai	74,73	76,00	77,50	79,00	80,50	82,00	84,00	
	7.01.0.00.0.00.25.0000 - Kecamatan Ujungjaya									
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	97,06	97,06	97,08	97,10	97,15	97,30	97,50	
2	Zona Integritas Perangkat Daerah	Nilai	75,98	79,05	80,63	81,44	82,25	83,07	83,90	
	7.01.0.00.0.00.26.0000 - Kecamatan Jatigede									
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	97,17	91	91,25	91,50	91,75	92	92,25	
2	Zona Integritas Perangkat Daerah	Nilai	72	75	75,25	75,50	75,75	76	76,25	
	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik									
1	Persentase Penyelesaian Konflik	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
2	Tingkat partisipasi dan aksesibilitas masyarakat dalam pembangunan dan proses politik/demokrasi	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Zona Integritas Perangkat Daerah	Nilai	81,21	82,00	83,00	84,00	85,00	86,00	87,00	

Sumber: sipd-ri.kemendagri.go.id/ RPJMD, (diolah)

BAB V

PENUTUP

RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, Pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW, serta RPJMN.

Dalam upaya menjaga kesinambungan perencanaan Daerah pada Tahun 2030 yang merupakan tahun transisi menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD Tahun 2030 yang pada pelaksanaannya akan menjadi tanggung jawab Kepala Daerah periode tahun 2030-2034.

5.1. Kaidah Pelaksanaan

RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan panduan bagi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan pembangunan selama 5 (lima) tahun. Keberhasilan pelaksanaan RPJMD diukur dari ketercapaian target-target yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama semua pihak untuk mewujudkannya, dengan memperhatikan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

- A. RPJMD Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah ini digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- B. Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dengan berpedoman RPJMD Tahun 2025-2029;
- C. Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah;
- D. Pemerintah desa di wilayah Kabupaten Sumedang dalam menyusun RPJMDesa harus selaras dengan memperhatikan arah kebijakan, target, dan Program Prioritas yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

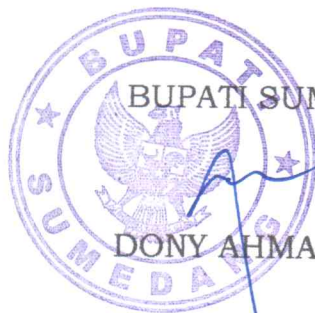
- E. RPJMD menjadi pedoman bagi seluruh komponen Daerah yang terdiri dari pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Sumedang sesuai dengan Visi, Misi, dan program prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Periode Tahun 2025-2029;
- F. Bupati selaku Kepala Daerah menginstruksikan jajarannya untuk mempublikasikan dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk kepada DPRD sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah, mengingat dokumen RPJMD merupakan dokumen yang masuk sebagai kategori informasi publik, sehingga sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

5.2. Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian dan evaluasi merupakan suatu kesatuan dan menjadi bagian penting dalam proses perencanaan Pembangunan Daerah. Dalam Pasal 183 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, pengendalian dan evaluasi perencanaan Pembangunan Daerah meliputi pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan Pembangunan Daerah, pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah. Pengendalian dan evaluasi RPJMD dilakukan berdasarkan evaluasi terhadap Renstra Perangkat Daerah dan evaluasi hasil pelaksanaan RKPD yang dilakukan untuk mengetahui konsistensi antara RKPD dengan RPJMD dan kesesuaian antara capaian Pembangunan Daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029, Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD dan hasil evaluasi Rencana Strategis Perangkat Daerah, secara teknis pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan perencanaan.

Demikian, penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah menjadi RPJMD Tahun 2025-2029 dan diharapkan dapat “Mewujudkan Masyarakat Sumedang Simpati Semakin Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.



BUPATI SUMEDANG,

DONY AHMAD MUNIR



Jl. Prabu Gajah Agung No. 9, Kel. Situ, Kec. Sumedang Utara - 45323